



**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

BUKU I



BUPATI BREBES

PENGANTAR

**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPADA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat,

Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;

Yang Saya Hormati,

Bapak dan Ibu Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;

Segenap Jajaran Eksekutif, Hadirin dan Seluruh Peserta Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes yang berbahagia.

Alhamdulillahirobbil'alamin.... Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021 sebagai laporan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2021.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini merupakan bentuk sinergi antara Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes. Selain sebagai bentuk sinergi, dokumen LKPj ini merupakan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021, dimana setelah evaluasi dilakukan, akan dihasilkan rekomendasi dari DPRD Kabupaten Brebes yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes selanjutnya.

Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini, perkenankan Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua komponen masyarakat, jajaran eksekutif maupun legislatif, dan instansi vertikal yang telah mendukung, bekerja sama, dan ikut mensukseskan program pembangunan, menjaga stabilitas daerah serta bersama-sama menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penanggulangan bencana dan pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes.

Rapat Paripurna dan hadirin yang saya hormati,

Laporan realisasi keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 di dalam Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2021 yang akan Saya sampaikan ini, merupakan laporan keuangan yang bersifat umum dan belum teraudit, hal ini disebabkan laporan realisasi keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 terlebih dahulu harus melalui pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Oleh karena itu, laporan realisasi keuangan APBD Tahun Anggaran 2021 akan disampaikan tersendiri dalam 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Garis besar laporan keuangan APBD 2021 adalah sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 3.161.926.541.449,62 (*Tiga Trilyun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Koma Enam Dua Rupiah*) atau tercapai 100,75% dari target anggaran sebesar Rp. 3.138.485.176.291,00 (*Tiga Trilyun Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*). Dalam pelaksanaannya, Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 tidak lepas dari keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan kasus COVID-19 dan berkat dukungan kebijakan stimulus ekonomi dari Pemerintah.

Dari sisi Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.125.853.111.539,00 (*Tiga Trilyun Seratus Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) atau 95,12 % dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 (*Tiga Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Anggaran Belanja Daerah tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.3.220.782.215.000,00 (*Tiga Trilyun Dua Ratus Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*) dan setelah perubahan

menjadi sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 (*Tiga Trilyun Dua Ratus Delapan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), mengalami perubahan sebesar 65.525.428.838,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).

Selain Pendapatan dan Belanja, dari sektor pembiayaan, tercatat anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 181.492.467.547,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp 181.498.742.702,57 (*Seratus Delapan Puluh Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Koma Lima Tujuh Rupiah*).

Selanjutnya dari pos Pengeluaran Pembiayaan, Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 33.670.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar 31.663.260.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) atau tercapai 94,04%. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah pada BUMD dan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pada Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan bahwa hasil perhitungan SILPA sebesar Rp. 185.908.912.613,19 (*Seratus Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Belas Koma Satu Sembilan Rupiah*).

Secara keseluruhan, atas kerja keras dan kerja sama semua sektor, kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes setiap tahun rata-rata mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, baik dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini juga seiring dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan dalam

pembiayaan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meskipun tiap tahun terdapat kenaikan, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan daerah yang semakin meningkat melalui belanja yang terus bertambah tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Maka dari itu kita harus lebih semangat untuk berusaha dan berupaya senantiasa meningkatkan pendapatan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menghasilkan penerimaan pendapatan daerah, disamping itu kita juga mengevaluasi terhadap penerimaan retribusi yang belum mencapai target.

Rapat Paripurna dan hadirin yang saya hormati,

APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Brebes sesuai RPJMD 2017-2022 untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Brebes dengan masa lima tahunan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 - 2022.

Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan beberapa indikator makro untuk mengukur dan melihat keberhasilan kinerja pembangunan secara riil dari sebuah wilayah. BPS Kabupaten Brebes telah mempublikasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2021 sebesar 2,33, nilai tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang sangat signifikan sebesar 595,745% setelah berkontraksi hingga -0,47 di tahun 2020 akibat dampak pandemi *COVID-19*. Di sisi lain, kenaikan IPM sebesar 0,318% dari nilai 66,11 di tahun 2020 menjadi 66,32 di tahun 2021 juga merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa di masa sulit pandemi *COVID-19*. Ini harus kita syukuri bersama sebagai bentuk

keberhasilan dari kerja keras seluruh pihak di Kabupaten Brebes, Saya ucapkan terima kasih atas pencapaian ini.

Selain itu, jika dilihat dari sisi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, pada tahun 2021 PDRB per kapita Kabupaten Brebes sebesar Rp. 24.559.193,54 atau mengalami peningkatan 3,01% dari tahun 2020 sebesar Rp. 23.820.000,- yang saat itu mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19 . Kenaikan PDRB per kapita Kabupaten Brebes ini adalah sebagai bukti pemulihan ekonomi di Kabupaten Brebes berjalan dengan baik, dan selain itu, peningkatan PDRB per kapita menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes semakin meningkat.

Rapat Paripurna dan hadirin yang saya hormati,

Seperti kita ketahui, pandemi *COVID-19* masih mempengaruhi seluruh sendi kehidupan di negara kita dalam beberapa tahun ini, tidak terkecuali di Kabupaten Brebes, dampak kesehatan dan dampak ikutannya di sektor lain terutama sektor ekonomi sangat menguras energi dan sumber daya kita. Tetapi alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dengan bantuan TNI, POLRI, Pemerintah Desa, dan Organisasi Kemasyarakatan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 baik upaya 3T (Testing, Tracing, Treatment), vaksinasi, penegakan protokol kesehatan, bantuan sosial, maupun usaha-usaha lain, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, alhamdulillah Kabupaten Brebes berada di Level 2, hal tersebut sangat berdampak lebih baik pada pergerakan perekonomian masyarakat di Kabupaten Brebes. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dari berbagai pihak baik POLRI, TNI, Tenaga Kesehatan, Pemerintah Desa, Organisasi Kemasyarakatan dan pihak-pihak lain dalam percepatan penanggulangan *COVID-19* di Kabupaten Brebes, Saya yakin dengan sinergi yang baik ini, kita dapat membangun Kabupaten Brebes

lebih baik lagi.

Rapat Paripurna dan hadirin yang saya hormati,

Sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian Visi, Misi dan Tujuan pembangunan Kabupaten Brebes serta untuk melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa peraturan terkait lainnya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPi) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan memuat antara lain : Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah, memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah; Pengelolaan Keuangan Daerah secara makro, termasuk Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah meliputi Urusan Wajib (Pelayanan Dasar dan Bukan Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Semoga laporan ini dapat memberikan informasi atas kinerja pemerintah Kabupaten Brebes, dan menjadi bahan penilaian serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilaksanakan melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna dan hadirin yang saya hormati,

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 ini Saya sampaikan, dan sekali lagi Saya menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2021 masih perlu ditingkatkan, dan masih ada perbaikan-perbaikan.

Akhirnya, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada

seluruh masyarakat Kabupaten Brebes yang telah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membangun dan mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Brebes.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan Rahmat, Hidayah, Perlindungan dan Petunjuk-Nya kepada Kita semua untuk mewujudkan Kabupaten Brebes yang unggul, sejahtera dan berkeadilan. Amin.

Sekian dan terima kasih.

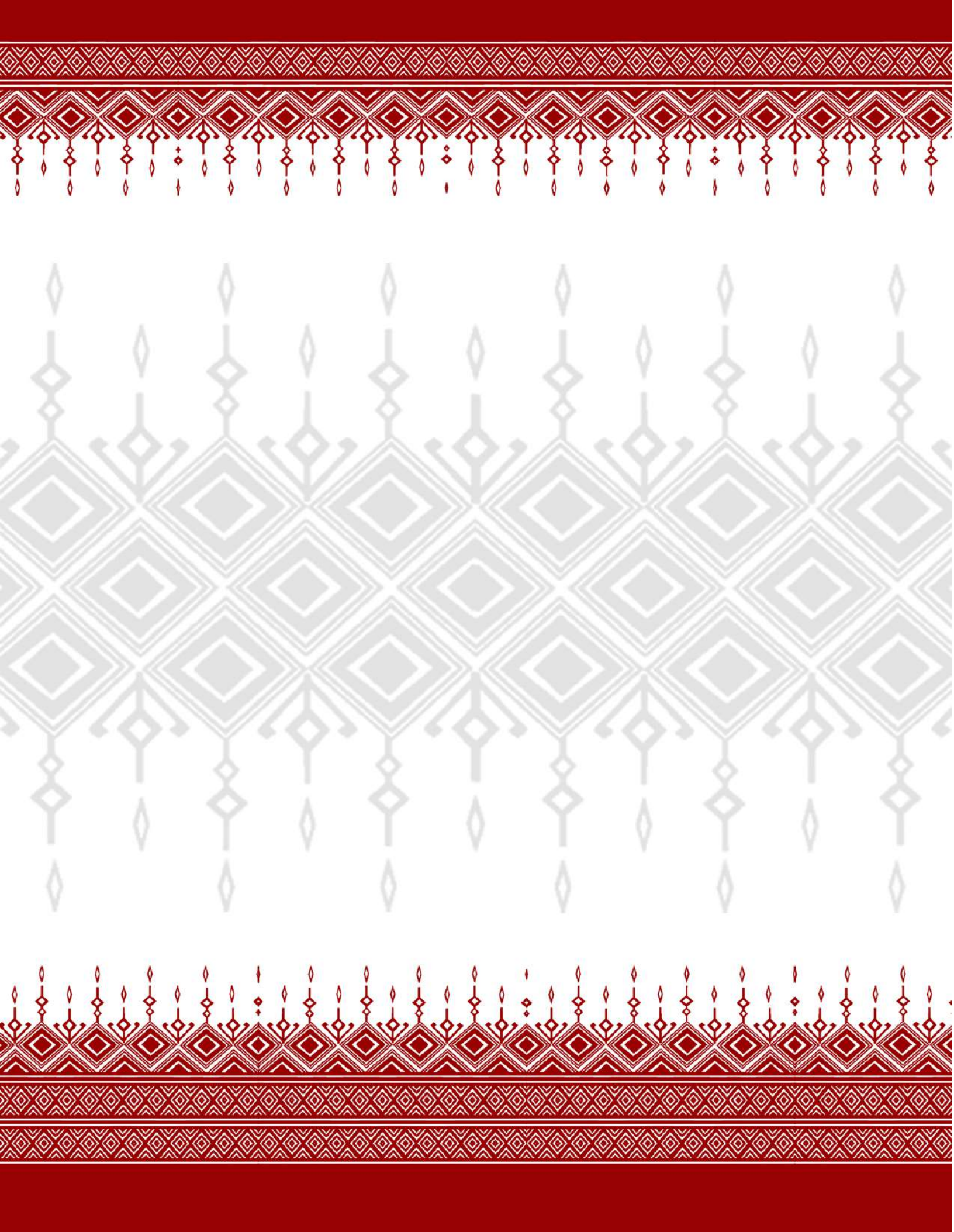
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Brebes, 23 Maret 2022

BUPATI BREBES



IDZA PRIYANTI, SE, MH





**LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPADA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

BUKU II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat, taufiq, hidayah, dan karunia—Nya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Selanjutnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah LKPJ diterima maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran tahun berjalan dan tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah atau Kebijakan Daerah. Selain itu penyusunan LKPJ juga dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah agar sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Sebagaimana telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Perubahan Tahun 2021 dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2021, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Brebes. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka realisasi anggaran yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini bersifat sementara (**un-audited**) dan belum merupakan laporan pertanggungjawaban

keuangan daerah Tahun Anggaran 2021, karena laporan keuangan daerah akan disampaikan tersendiri setelah adanya hasil pelaksanaan pemeriksaan oleh BPK.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan baik data, metode penyajian dan analisis informasi maupun kesimpulannya. Oleh karena itu rekomendasi catatan-catatan strategis, saran, dan atau koreksi dari DPRD Kabupaten Brebes merupakan masukan penting bagi penyempurnaan LKPJ ini khususnya, dan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes pada umumnya. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu penyusunan LKPJ ini. Semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes di masa yang akan datang.

Brebes, 23 Maret 2022

BUPATI BREBES



IDZA PRIYANTI, SE, MH

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Dasar Hukum	I-1
1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah	I-3
1.3 Data Umum Daerah	I-21
A. Data Geografis Daerah	I-21
B. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	I-26
C. Jumlah PNS	I-32
D. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	I-38
E. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	I-39
F. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	I-46
BAB II PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	II-1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	III-1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	III-1
A. Capaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020	III-2
B. Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan	III-9
B.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	III-9
B.2 Dinas Kesehatan	III-11
B.3 RSUD Brebes	III-33
B.4 RSUD Bumiayu	III-35
B.5 Dinas Pekerjaan Umum	III-36
B.6 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan TARU	III-37
B.7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	III-38
B.8 Satuan Polisi Pamong Praja	III-40
B.9 BPBD	III-41
B.10 Dinas Sosial	III-42
B.11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	III-44
B.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	III-44
B.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-46
B.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-48
B.15 Dinas Perhubungan	III-50
B.16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	III-51
B.17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	III-52
B.18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP	III-56

B.19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	III-57
B.20 Dinas Arsip dan Perpustakaan	III-59
B.21 Dinas Perikanan	III-61
B.22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	III-63
B.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	III-69
B.24 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	III-71
B.25 Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)	III-73
B.26 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)	III-73
B.27 Sekretariat Daerah (Bag. Adm Pembangunan)	III-74
B.28 Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)	III-74
B.29 Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)	III-75
B.30 Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)	III-75
B.31 Sekretariat Daerah (Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)	III-75
B.32 Sekretariat Daerah (Bag. Umum)	III-76
B.33 Sekretariat DPRD	III-76
B.34 Kecamatan Brebes	III-79
B.35 Kecamatan Jatibarang	III-79
B.36 Kecamatan Wanasari	III-80
B.37 Kecamatan Songgom	III-80
B.38 Kecamatan Bulakamba	III-81
B.39 Kecamatan Tanjung	III-81
B.40 Kecamatan Losari	III-81
B.41 Kecamatan Kersana	III-82
B.42 Kecamatan Ketanggungan	III-82
B.43 Kecamatan Banjarharjo	III-82
B.44 Kecamatan Larangan	III-83
B.45 Kecamatan Tonjong	III-83
B.46 Kecamatan Bumiayu	III-84
B.47 Kecamatan Paguyangan	III-85
B.48 Kecamatan Sirampog	III-85
B.49 Kecamatan Bantarkawung	III-85
B.50 Kecamatan Salem	III-86
B.51 Inspektorat	III-86
B.52 Baperlitbangda	III-87
B.53 BPKAD	III-88
B.54 Bapenda	III-89
B.55 BKPSDMD	III-89
B.56 Badan Kesbangpol Daerah	III-90
 C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Analisis	
Kesesuaian	III-91
C.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	III-91

C.2 Dinas Kesehatan	III-115
C.3 RSUD Brebes	III-165
C.4 RSUD Bumiayu	III-169
C.5 Dinas Pekerjaan Umum	III-175
C.6 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan TARU	III-193
C.7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ...	III-199
C.8 Satuan Polisi Pamong Praja	III-207
C.9 BPBD	III-213
C.10 Dinas Sosial	III-221
C.11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB	III-231
C.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	III-243
C.13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	III-253
C.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	III-261
C.15 Dinas Perhubungan	III-271
C.16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	III-279
C.17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan	III-287
C.18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	III-293
C.19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	III-301
C.20 Dinas Arsip dan Perpustakaan	III-311
C.21 Dinas Perikanan	III-317
C.22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	III-327
C.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	III-345
C.24 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	III-353
C.25 Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)	III-363
C.26 Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)	III-367
C.27 Sekretariat Daerah (Bag. Pembangunan)	III-371
C.28 Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)	III-375
C.29 Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)	III-379
C.30 Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)	III-381
C.31 Sekretariat Daerah (Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)	III-385
C.32 Sekretariat Daerah (Bag. Umum)	III-389
C.33 Sekretariat DPRD	III-395
C.34 Kecamatan Brebes	III-411
C.35 Kecamatan Jatibarang	III-419
C.36 Kecamatan Wanasari	III-425
C.37 Kecamatan Songgom	III-429
C.38 Kecamatan Bulakamba	III-433
C.39 Kecamatan Tanjung	III-441
C.40 Kecamatan Losari	III-447
C.41 Kecamatan Kersana	III-455
C.42 Kecamatan Ketanggungan	III-461
C.43 Kecamatan Banjarharjo	III-467

C.44 Kecamatan Larangan	III-472
C.45 Kecamatan Tonjong	III-479
C.46 Kecamatan Bumiayu	III-487
C.47 Kecamatan Paguyangan	III-497
C.48 Kecamatan Sirampog	III-505
C.49 Kecamatan Bantarkawung	III-509
C.50 Kecamatan Salem	III-515
C.51 Inspektorat	III-521
C.52 Baperlitbangda	III-527
C.53 BPKAD	III-535
C.54 Bapenda	III-549
C.55 BKPSDMD	III-557
C.56 Badan Kesbangpol Daerah	III-569
D. Capaian Kinerja Makro	III-577
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	III-589
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Sebelumnya	III-595
 BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	 VI-1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan	VI-2
A. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	VI-2
B. Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya	VI-3
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	VI-3
 BAB V PENUTUP	 V-1
 LAMPIRAN I Laporan Penanganan COVID-19 2021	 1
LAMPIRAN II Penghargaan yang diraih di Tahun 2021.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum Pembentukan Pemerintah Kabupaten Brebes secara de jure ditetapkan dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah–Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes tanggal 4 Nopember 1985 Nomor 9–A Tahun 1985 tentang Hari Jadi Kabupaten Brebes, yang ditetapkan bahwa tanggal 18 Januari 1678 sebagai Hari Jadi Kabupaten Brebes.

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka perlu dilaksanakan mekanisme pertanggungjawaban, salah satunya melalui kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kewajiban penyampaian LKPJ secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes



yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Brebes untuk dibahas secara internal. Diharapkan hasil pembahasan dimaksud dapat ditetapkan menjadi Keputusan DPRD Kabupaten Brebes dan disampaikan kepada Bupati Brebes sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Landasan yuridis Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes T.A 2021, adalah :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang–Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438).
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 Nomor 38A).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.
10. Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021.
11. Peraturan Bupati Brebes Nomor 045 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Brebes Nomor 051 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021
13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 026 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021.

1.2 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD. Selain hasil evaluasi, pertimbangan lain untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara lain:

- 1) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021;
- 2) Prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2021;
- 3) RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
- 4) Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes;



- 5) Hasil kebijakan top down, bottom up dan hasil musrenbang tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Berdasarkan visi dan misi yang akan dicapai sebagaimana dalam periode RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 sebagai acuan pembangunan Kabupaten Brebes, maka Visi Kabupaten Brebes yang akan dicapai adalah

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Terdapat 3 (tiga) kata kunci yang merupakan agenda yang ingin dicapai oleh seluruh komponen masyarakat Brebes yaitu :

1. Unggul. Kata unggul diartikan sebagai lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet dan sebagainya). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan sumberdaya manusia Brebes yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.
2. Sejahtera. Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita dan meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Berkeadilan. Berkeadilan dimaknai sebagai suatu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi kewilayahan, tetapi juga mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender dan lintas usia

Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Brebes, yaitu sebagai berikut :



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Gambaran pencapaian visi dan penjabarannya dalam misi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Brebes Unggul dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 1;
2. Brebes Sejahtera dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 2 dan misi 3;
3. Brebes Berkeadilan dijabarkan dan dilaksanakan melalui misi 6.

Ketercapaian visi yang dijabarkan dalam tiap misi tersebut, didukung dengan penguatan pada misi 4 dan misi 5. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan daerah lima tahun kedepan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antar satu misi dengan misi yang lain.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dalam penyusunan RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2021 memuat penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

Tujuan dari misi pertama adalah “Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran terdiri dari :

- a. Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- b. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel I.1.
Tujuan dan Sasaran Misi 1

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Harapan lama sekolah (tahun)
				Rata-rata lama sekolah (tahun)
			Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia harapan hidup (tahun)

Sumber Data : Baperlitbangda

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari misi kedua adalah:

- a. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah, dengan indikator tujuan adalah Cakupan Pelayanan Infrastruktur Wilayah.

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
- 2) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- 3) Meningkatnya cakupan sanitasi;
- 4) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;
- 5) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;



- 6) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;
- b. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan indikator tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas air;
- 2) Meningkatnya kualitas udara;
- 3) Meningkatnya tutupan hutan.

Tabel I.2.
Tujuan dan Sasaran Misi 2

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah	Cakupan pelayanan infrastruktur wilayah (%)	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio jalan baik (%)
			Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak (%)
			Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)
				Persentase kawasan bebas banjir Perkotaan (%)
				Persentase Penanganan Persampahan (%)
			Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)
			Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)
2	Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase pemukiman kumuh (%)
			Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air
			Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara
			Meningkatnya tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Sumber Data : Baperlitbangda



3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan dari misi ketiga adalah “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan”, dengan indikator kinerja Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Sasaran terdiri dari:

- Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- Meningkatnya laju investasi daerah;
- Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja.

Tabel I.3
Tujuan dan Sasaran Misi 3

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup	Pertumbuhan Ekonomi (%)		
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (juta)
			Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta)
			Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan (juta)
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (juta)
			Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Laju kenaikan investasi (%)
				Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN) (milyar rupiah)



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
				Rasio penduduk yang bekerja (%)

Sumber Data : Baperlitbangda

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Tujuan dari misi keempat adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran terdiri dari:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 2) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- 3) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
- 4) Meningkatnya kualitas kelitbangan.

- b. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat, dengan indikator Angka Kriminalitas.

Sasarannya adalah meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat.

Tabel I.4.
Tujuan dan Sasaran Misi 4

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM
			Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks Nilai Evaluasi LPPD
				Opini BPK
			Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)
2	Menciptkan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif	Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)

Sumber Data : Baperlitbangda

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tujuan misi kelima adalah “Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik”, dengan indikator Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik.

Sasaran terdiri dari:

- Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
- Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu;
- Desa memiliki BUMDes.

Tabel I.5
Tujuan dan Sasaran Misi 5

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Rasio desa dengan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan desa yang baik (%)	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)
			Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
			Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)

Sumber Data : Baperlitbangda

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:

- a. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan, dengan indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG). Sasarannya adalah meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan.
- b. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas Anak. Sasarannya adalah meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata.
- c. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal, dengan indikator Persentase peningkatan penanganan PMKS (%). Sasarannya adalah meningkatnya penanganan PMKS.

Tabel I.6
Tujuan dan Sasaran Misi 6

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	HLS (tahun)
				RLS (tahun)
				AHH (tahun)
				Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (ribu rupiah PPP)
				Persentase partisipasi perempuan di lembaga



NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
				pemerintahan (%)
				Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)
				Persentase penanganan korban KDRT (%)
2	Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Indeks komposit kesejahteraan anak (%)	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Prevalensi anak bekerja (%)
				Rasio perkawinan anak (%)
				Cakupan anak memiliki akte (%)
				Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)
3	Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal	Persentase peningkatan penanganan PMKS	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)
				Persentase PMKS penerima KUBE (%)

Sumber Data : Baperlitbangda

B. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes 2021

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 2021 diarahkan pada upaya pencapaian sasaran dan target awal pembangunan jangka menengah tahun 2017-2022. meliputi:

1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta penguatan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi
2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama sumber daya kesehatan
3. Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan perkuatan inovasi, pengembangan *digital economy* dan ekonomi kreatif serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja dan penciptaan *start up* bisnis baru.



4. Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup
5. Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga ditingkat desa, serta menciptakan kondusivitas daerah

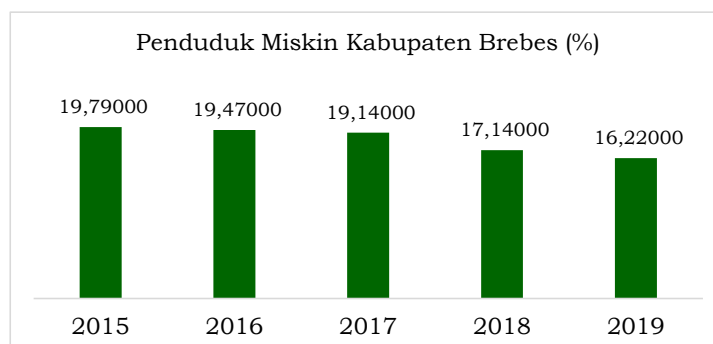
Sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi RKPD periode 2019. Selain hasil evaluasi, pertimbangan lain untuk merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan daerah antara lain:

1. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021;
2. Prioritas RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2021;
3. RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022;
4. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Brebes;

Hasil kebijakan top down, bottom up dan hasil musrenbang tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Kebijakan dan Startegi Penurunan Kemiskinan

Gambar I.1.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Brebes
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2020

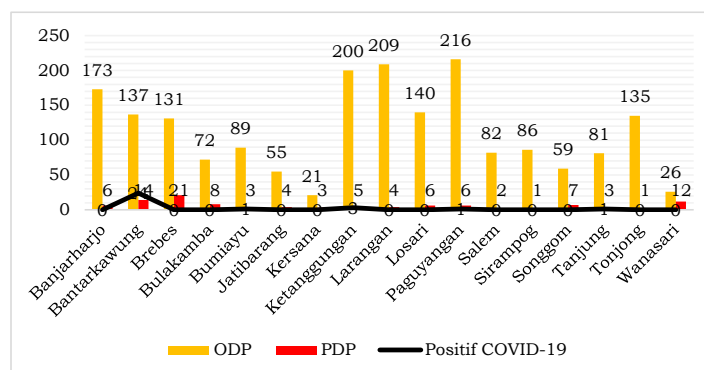


Mengingat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung lambat, maka upaya penanggulangan kemiskinan perlu lebih dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan perumahan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan ada empat strategi utama yang ditempuh oleh pemerintah. Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; ketiga, mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; keempat, mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kebijakan dan Strategi Penanganan Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 merubah tatanan dalam masyarakat terutama tatanan sosial dan ekonomi. Kasus pertama ditemukan pada Desember 2019 dan menyebar sangat masif lebih dari 200 negara tidak terkecuali Indonesia yang ditemukan kasus pertama pada Maret 2020. Sedangkan di Kabupaten Brebes kasus pertama positif COVID-19 pada tanggal 5 Mei 2020 sejumlah 16 kasus transmisi jamaah ijtihad Gowa – Sulawesi Selatan.

Gambar I
Sebaran Pandemi COVID-19 di Kabupaten Brebes
Data per 3 Juni 2020





Sampai dengan 3 Juni 2020, data Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menunjukkan Orang Dalam Pemantauan (ODP) sejumlah 1.912 orang, Pasien Dalam Pemantauan (PDP) sejumlah 106 orang dan Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sejumlah 30 orang.

Dari ODP sejumlah 1.912 orang telah selesai pemantauan sejumlah 1.842 orang, masih dalam pemantauan 66 orang dan meninggal 4 orang. Untuk PDP dari 106 orang 8 orang masih dirawat, 91 orang dinyatakan sembuh dan diizinkan pulang, 7 orang meninggal dunia. Sedangkan untuk dari 30 orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 6 orang dirawat, 4 orang karantina dan sejumlah 20 orang sembuh.

Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, ODP terbanyak ada di Kecamatan Paguyangan 216 orang, PDP terbanyak terdapat di Kecamatan Brebes sejumlah 21 orang dan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terbanyak di Kecamatan Bantarkawung sejumlah 24 orang dan berasal dari jamaah ijtihad Gowa.

Upaya-upaya pencegahan dan penyebaran telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah dan tokoh-tokoh masyarakat seperti mengeluarkan kebijakan sekolah dari rumah, bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah serta masif melaksanakan sosialisasi melalui berbagai platform media sosial untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sesuai instruksi menteri keuangan dan menteri dalam negeri, APBD Kabupaten Brebes telah melalui refocusing dan realokasi anggaran sejumlah Rp.76.329.113.020,- yang digunakan untuk penanggulangan COVID-19 baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung seperti penanganan pasien maupun pekerja non informal melalui jaring pengaman sosial dengan bantuan sosial terutama masyarakat miskin.

Tahun 2021 diproyeksikan untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19 dalam memasuki fase keseimbangan baru dalam masyarakat. Dua sektor utama menjadi prioritas yaitu pemulihan sosial dan ekonomi. Pemulihan sosial ditekankan pada bidang kesehatan dengan upaya pencegahan, penularan dan menekan angka kematian yang disebabkan COVID-19 dengan memperbaiki sistem jaminan kesehatan masyarakat, penguatan laboratorium kesehatan, peningkatan SDM dan alat kesehatan. Sedangkan pada bidang ekonomi langkah strategis yang akan ditempuh adalah meningkatkan konsumsi masyarakat, peningkatan iklim investasi melalui percepatan kawasan industri Brebes, pemulihan sektor informal non pertanian, pariwisata, industri pengolahan, perdagangan dan transportasi.

Mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat terkait dengan *recovery* ekonomi dan sosial akibat pandemi global COVID-19 adalah sebagai berikut :



- a. Strategi pemulihan ekonomi pasca COVID-19 untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, menyediakan subsidi bagi UMKM, dll melalui :

1) Akselerasi Investasi

Salah satu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mampu mendongkrak secara signifikan adalah dengan ditetapkannya Kawasan Industri Brebes berdasarkan Perpres 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang. Menyikapi hal ini maka upaya menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui penyiapan iklim investasi yang lebih kondusif disamping penyiapan infrastruktur kawasan secara intensif investasi yang ada agar tidak pindah ke Negara/wilayah lain.

2) Pemulihan Industri dan Perdagangan

Beberapa industry besar yang ada di Kabupaten Brebes yang selama pandemi COVID-19 ini sedikit terganggu, perlu dilakukan pembenahan sesuai protocol covid19 sehingga produksi akan berjalan normal dan secara otomatis akan menarik tenaga kerja yang selama ini dirumahkan sehingga dalam tatanan normal baru ini akan kembali produktif dan aman.

Adapun untuk pemulihan perdagangan perlu dibuka melalui penyediaan sarana dan prasana yang mendukung terselenggaranya aktivitas perdagangan dengan memperhatikan protocol COVID-19.

3) Pembukaan Pariwisata

Dengan pemberlakuan tatanan normal baru dengan tetap melaksanakan protocol COVID-19, upaya pembukaan kehidupan baru mulai dibuka dengan berbagai aktivitas. Pembukaan dan peningkatan frekuensi dan jalur transportasi; peningkatan pemasaran wisata ke originasi (wilayah) yang sudah pulih; Peningkatan event olah raga, senin budaya dan MICE; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas;



Peningkatan infrastruktur dan standar layanan; Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

- 4) Relaksasi pajak daerah terutama pada sektor usaha vital (pariwisata, industry, dll)
- 5) Stimulus pemodalan terutama bagi industry sektor pangan dan kebutuhan dasar serta kelompok UMKM
- 6) Pengembangan Infrastruktur terutama Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri dan Pariwisata.
- 7) Peningkatan produksi pertanian khususnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura melalui pengawalan budidaya pertanian local termasuk pengawasan distribusi pupuk dan benih.

b. Strategi pemulihan ekonomi sosial pasca pandemic COVID-19 :

- 1) Penguatan Sektor Kesehatan untuk memastikan penyediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk, juga peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan juga Penggerakan partisipasi sector non pemerintah dalam pengendalian COVID
- 2) Perluasan Program Perlindungan Sosial untuk memastikan seluruh anak miskin dan rentan bersekolah, pemerataan akses terhadap layanan dasar, memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan menerima bantuan sosial dan terlindungi. Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informasi diimbangi dengan update data penduduk sasaran bansos yang akurat.
- 3) Pembangunan SDM. Program peningkatan SDM; Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pendidikan Usia Dini perlu lebih diperkuat lagi.



Kebijakan dan Strategi Kawasan Industri Brebes

Revisi Perda RTRW merupakan salah satu upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes, yaitu dengan memberikan kesempatan dan peluang investasi sebesar-besarnya di sektor industri. Hal ini tercermin dari porsi alokasi luas kawasan peruntukan industri dalam revisi perda RTRW yang melonjak tajam lebih dari 10 kali lipat daripada perda RTRW sebelumnya. Berikut perbedaan tujuan dan luas alokasi kawasan peruntukan industri antara perda lama dengan perda baru:

1. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Brebes 2010 – 2020

Tujuan penataan ruang Kabupaten Brebes adalah terwujudnya ruang Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang berbasis pertanian unggul dan berwawasan lingkungan, dengan luas KPI 495,13 Ha.

2. Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang RTRW Kab. Brebes 2019 - 2039

Penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Brebes sebagai gerbang pembangunan di bagian barat Jawa Tengah berbasis pertanian, industri, dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan luas KPI 5.648,51 Ha.

Latar Belakang Kebijakan

Bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional menuju 7 % kontribusi pencapaiannya dibebankan kepada beberapa provinsi, salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi 7 %, Gubernur Jawa Tengah mengajukan usulan 12 program prioritas kepada Presiden Republik Indonesia, salah satu di dalamnya adalah pengembangan kawasan industri, yaitu Kawasan Industri di Brebes. Hal ini sejalan dengan kebijakan daerah Kabupaten Brebes, baik dalam visi misi Bupati maupun Perda RTRW. Hasil rapat terbatas antara Presiden Republik Indonesia dengan Gubernur Jawa Tengah tanggal 9 Juli 2019 di Istana Bogor telah menetapkan 3 prioritas program percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah, yaitu penataan kawasan dengan industri tertentu menjadi Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal, pengembangan



kawasan strategis pariwisata nasional di Borobudur dan pengembangan kawasan industri baru di Kabupaten Brebes.

Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui beberapa tahapan dengan melibatkan SKPD terkait baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Hasil identifikasi tersebut disepakati menjadi program kegiatan percepatan pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang.

Luas Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang dialokasikan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 adalah 5.648,51 Ha meliputi Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Ketanggungan dan Kersana. Sebanyak 92 % luas lahan KPI berada pada kawasan pesisir, yaitu seluas 5.216,10 Ha dengan kondisi eksisting masih berupa permukiman (warna kuning) dan non Permukiman (warna hijau) antara lain kebun campuran, ladang/tegalan palawija, sawah irigasi dan tambak polikultur.

Infrastruktur penunjang yang sudah ada antara lain:

1. Jalan Tol Trans Jawa dengan sejumlah exit tol yang tersedia, yaitu exit tol Pejagan, Brebes Barat dan Brebes Timur;
2. Jalan Nasional Pantura Cirebon – Semarang;
3. Jalan Nasional Tengah Pejagan – Prupuk;
4. Jalan Lingkar Utara Brebes – Tegal (On Going);
5. Jalan Rel Cirebon – Semarang;
6. Pelabuhan Tegal dan Cirebon;
7. PLTU Batang (On Going);
8. Gardu Induk Tanjung (On Going);
9. Waduk Penjalin dan Malahayu.

Luas lahan yang tersedia pada calon lokasi Kawasan Industri Brebes berdasarkan petak / persil yang berada di 11 desa adalah 6.090,94 Ha dengan kondisi terbangun 70,55 Ha (1,2%) dan kondisi belum terbangun 6.020,39 Ha (98,8 %). Sampai dengan saat ini sudah terdata 32 perusahaan yang telah beroperasi di



Kabupaten Brebes dan berencana akan meneruskan investasinya kembali. Adapun jenis bidang usaha besar – menengah.

Pembangunan Kantor Pelayanan

Pandemi COVID-19 menyebabkan semua pembangunan yang direncanakan dan saat dalam pelaksanaan terhenti. Kebijakan pusat agar semua anggaran dalam program dan kegiatan direalokasikan dan difokuskan ke penanggulangan COVID-19. Dampak dari realokasi dan refocusing adalah tidak tercapainya target-target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2020 salah satunya adalah pembangunan kantor terpadu, kondisi saat ini kantor perangkat daerah tersebar di beberapa lokasi terjauh adalah Dinas Perhubungan yang berada di Kecamatan Bulakamba. Hal ini tentu mempunyai dampak yaitu terhambatnya koordinasi antar perangkat daerah, perizinan dan pelayanan informasi untuk masyarakat yang tidak cepat. Selain itu, pelayanan perizinan juga memerlukan keterpaduan lokasi, sehingga masyarakat tidak lagi susah dalam upaya memperoleh izin untuk berbagai hal karena dengan satu lokasi dapat mengurus berbagai perizinan terutama pertimbangan akses antara wilayah utara dan selatan dengan membangun mall pelayanan publik.

Selain itu, pelayanan kesehatan terutama fasilitas kesehatan belum sepenuhnya merata, dari 38 puskesmas yang tersebar di 17 Kecamatan fasilitas puskesmas belum sepenuhnya dapat melayani kesehatan masyarakat dan baru terdapat 2 rumah sakit milik pemerintah di Kabupaten Brebes dengan pelayanan wilayah yang sangat luas. Memerlukan tambahan satu pelayanan kesehatan untuk masyarakat di wilayah barat dan tengah Kabupaten Brebes yaitu Kecamatan Losari, Tanjung, Bulakamba, Kersana, Ketanggungan, Larangan, Banjarharjo agar dapat lebih dekat dan mudah dijangkau ketika masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan dengan lokasi pembangunan di Kecamatan Ketanggungan pertimbangan akses kemudahan ke fasilitas kesehatan.

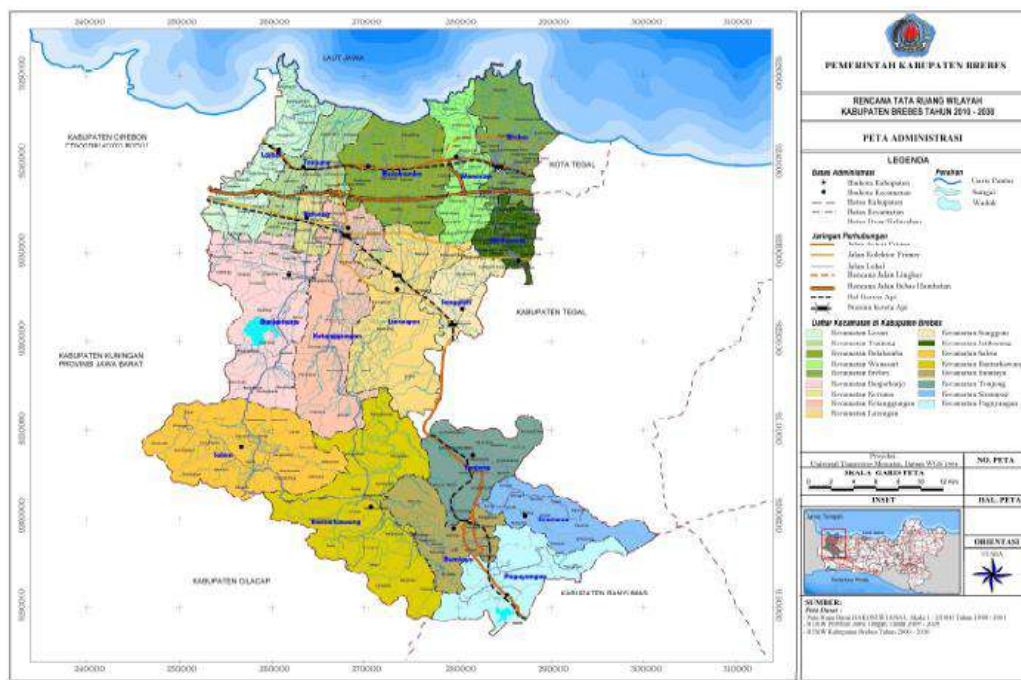


1.3 DATA UMUM DAERAH

A. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak di bagian utara paling barat dari Provinsi Jawa Tengah pada koordinat $108^{\circ} 41'37,7''$ – $109^{\circ} 44'56,5''$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 44'56,5''$ – $7^{\circ} 20'51,48''$ Lintang Selatan, dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km dan memiliki garis pantai sepanjang 55 km dengan luas wilayah laut 12 mil laut dari garis pantai seluas 1.036,80 km²

Gambar I.1
Peta administrasi Kabupaten Brebes dapat dilihat pada Gambar



Kabupaten Brebes memiliki luas wilayah 1.769,62 km². Secara administratif Kabupaten Brebes berada pada posisi ujung barat laut dari Provinsi Jawa Tengah, dengan batas wilayah administrasi sebelah utara Laut Jawa, sebelah timur Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, sebelah selatan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap, sebelah barat Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Kabupaten



Brebes terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 292 Desa dan 5 Kelurahan, seperti pada uraian table berikut ini :

Tabel I.7
Jumlah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Brebes

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Salem	21	–
2.	Bantarkawung	18	–
3.	Bumiayu	15	–
4.	Paguyangan	12	–
5.	Sirampog	13	–
6.	Tonjong	14	–
7.	Larangan	11	–
8.	Ketanggungan	21	–
9.	Banjarharjo	25	–
10.	Losari	22	–
11.	Tanjung	18	–
12.	Kersana	13	–
13.	Bulakamba	19	–
14.	Wanasari	20	–
15.	Songom	10	–
16.	Jatibarang	22	–
17.	Brebes	18	5
Jumlah		292	5

Sumber Data : Baperlitbangda

Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar dalam 17 Kecamatan. Beberapa kecamatan memiliki topografi yang variatif. Diantaranya kecamatan dengan bentuk topografi yang sangat rendah tersebar hampir disemua kecamatan kecuali



Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog. Luas wilayah dengan topografi sangat rendah seluas 70.489 Ha atau sekitar 40% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 24.614 Ha atau sekitar 14% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan di antaranya adalah Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Banjarharjo.

Secara geologi, wilayah Kabupaten Brebes termasuk ke dalam bagian daerah geologi pegunungan Pulau Jawa yang dapat dilihat dari bentuk alam, morfologi, dan susunan batuan pembentuknya. Morfologi pegunungan yang terdapat di Kecamatan Paguyangan dan Sirampog dipengaruhi tiga faktor litologi maupun struktur. Kenampakan morfologi wilayah dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Dataran alluvial yang merupakan dataran rendah dan berlereng datar, umumnya menempati daerah–daerah endapan;
- b. Daerah perbukitan berlereng sedang umumnya ditempati oleh batuan gamping;
- c. Daerah pegunungan berlereng curam yang dibentuk oleh batuan lava.

Menurut jenis tanahnya, Kabupaten Brebes dibedakan atas 19 jenis dengan sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Brebes adalah alluvial kelabu yaitu dengan luas 25,53% dari total luas wilayah. Tekstur tanah di Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu dan pasir pembentuk tanah. Karena karakteristik geologi yang sedemikian itu, maka sebagian besar wilayah Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang subur dan cocok untuk pengembangan pertanian.

Sesuai karakteristik geologinya, potensi sumberdaya mineral yang ada merupakan sumber daya mineral bahan galian golongan C, dengan cadangan tereka meliputi 8 jenis yaitu : pasir sungai, tras, batu pasir, andesit, lempung gerabah, bentonite, gipsum dan batu gamping.

Berdasarkan cadangan tereksplorasi meliputi 3 jenis yaitu pasir sungai, andesit dan lempung gerabah. Sebaran batu pasir berasal dari endapan sungai



berada di sepanjang alur sungai Cisanggarung, sungai Pemali, sungai Keruh, sungai Pedes dan sungai lainnya. Batu pasir berasal dari endapan vulkanik berada di wilayah kaki lereng Gunung Slamet. Berdasarkan cadangan terindikasi, Kabupaten Brebes juga memiliki cadangan sumberdaya mineral bahan galian golongan C berupa batu gamping (batu kapur) di Kecamatan Songgom.

Kabupaten Brebes memiliki wilayah dengan kerentanan gerakan tanah yang bervariasi yaitu mulai dari kerentanan rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan data teknik *groundcheck* geologi, wilayah dengan zona kerentanan gerakan tanah rendah ada di sekitar Kecamatan Tonjong, zona kerentanan gerakan tanah sedang di daerah tubuh/kaki Gunung Slamet, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi di wilayah sebelah selatan Kecamatan Tonjong.

Gerakan tanah pada kerentanan tinggi masih sangat aktif pada wilayah kelerengan tinggi terutama kalau dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi atau adanya proses erosi di bagian dasar sungai yang sangat kuat, apalagi jika diatasnya tidak ada vegetasi/tutupan tanah (Badan Geologi, Pusat Sumberdaya Air Tanah dan Geologi Lingkungan). Kondisi gerakan tanah tersebut berpotensi menyebabkan bencana tanah longsor dan juga berpengaruh terhadap kualitas infrastruktur.

Iklim di Kabupaten Brebes termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Menurut data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR) Kabupaten Brebes, pada tahun 2021 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari yaitu dengan rata-rata curah hujan sebanyak 483 mm, dengan rata-rata hari hujan selama 28 hari. Sedangkan jumlah curah hujan tertinggi berdasarkan kecamatan terjadi di Kecamatan Banjarharjo sebanyak 20.332 mm yang berasal dari pengamatan di tujuh stasuin pengukuran.

Selanjutnya wilayah Kabupaten Brebes dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut. Kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan 875 mdpl. Kecamatan Salem dengan 500 mdpl. Kecamatan Paguyangan dengan 342 mdpl. Kecamatan Tonjong dengan 175 mdpl. Kecamatan Bumiayu dan Kecamatan Bantarkawung yang masing-masing 162 mdpl dan 161 mdpl.



Sedangkan untuk Kecamatan Larangan. Kecamatan Banjarharjo dan Kecamatan Ketanggungan tingginya berkisar antara 23 mdpl. 22 mdpl dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di Kecamatan Losari. Tanjung. Kersana. Bulakamba. Wanasari. Songgom. Jatibarang dan Brebes. Letak ketinggian Kecamatan dari permukaan air laut di Kabupaten Brebes pada tahun 2021 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel I.8
Luas dan Ketinggian Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Ketinggian (m dpl)
1	Salem	167,21	500
2	Bantarkawung	208,18	161
3	Bumiayu	82,09	162
4	Paguyangan	108,17	342
5	Sirampog	74,19	875
6	Tonjong	86,55	175
7	Larangan	160,25	23
8	Ketanggungan	153,41	17
9	Banjarharjo	161,75	22
10	Losari	91,79	5
11	Tanjung	72,09	3
12	Kersana	26,97	1
13	Bulakamba	120,36	3
14	Wanasari	75,34	1
15	Songgom	52,65	5
16	Jatibarang	36,39	5
17	Brebes	92,23	3
	Jumlah/rata-rata	1.769,62	136.6

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2022

Wilayah Kabupaten Brebes berdasarkan kondisi kemiringannya terbagi menjadi 5 (lima) kategori. pada umumnya tergolong kemiringan relative datar (dominan: 0%-8%). seluas 93.169 Ha atau 53% dari total keseluruhan wilayah kabupaten. Sedangkan wilayah dengan kemiringan 8%-15% seluas 20.085 Ha atau



12% dari total keseluruhan wilayah dengan kemiringan lereng 15%-25% seluas 26.567 Ha atau 15% dari total luas keseluruhan.

Untuk wilayah dengan kemiringan 25%-40% berada dalam wilayah seluas 33.725 Ha atau sekitar 19% dari total keseluruhan. Selain itu, wilayah dengan kemiringan lereng yang paling curam atau lebih dari 40% berada di wilayah seluas 911 Ha atau sekitar 0.5% dari total luas keseluruhan wilayah di Kabupaten Brebes yang tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Banjarharjo. Kecamatan Ketanggungan merupakan kecamatan terluas dengan jumlah kemiringan lereng >40% sekitar 589 Ha.

B. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang perlu mendapat perhatian mengingat bahwa penduduk merupakan pelaku dan salah satu dari yujuan pembangunan. Tentu sebagai modal pembangunan, penduduk harus mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber-sumber daya lain untuk melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Untuk menjadikan penduduk sebagai sumber daya yang mampu mengolah sumber-sumber daya pembangunan. Sumber daya manusia juga perlu dikelola sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas bukan sekedar kuantitas.

Dari sisi kuantitas berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2021 berjumlah 1.986.347 jiwa yang terdiri dari 1.008.774 jiwa penduduk laki-laki atau 50.79% dan 977.573 jiwa penduduk perempuan atau 49,21%. Dari total jumlah penduduk tersebut terdapat Rasio Jenis Kelamin sebesar 102,83 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,70% per tahun.

Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Brebes sebanyak 184.183 jiwa disusul Kecamatan Bulakamba sebesar 183.344 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Salem sebanyak 63.719 jiwa. Tingkat kepadatan



penduduk Kabupaten Brebes sebesar 1.126 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Kersana (2.518 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Salem (381 jiwa/km²). Secara terinci diuraikan pada tabel di bawah ini mengenai Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Brebes.

Tabel I.9
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin,
dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Salem	32.321	31.398	63.719	102,9	381
2	Bantarkawung	52.738	50.537	103.275	104,4	499
3	Bumiayu	57.598	55.131	112.729	104,5	1.386
4	Paguyangan	57.606	54.691	112.297	105,3	1.046
5	Sirampog	36.021	34.474	70.495	104,5	948
6	Tonjong	39.645	38.379	78.024	103,3	892
7	Larangan	79.429	77.681	157.110	102,2	991
8	Ketanggungan	73.541	71.329	144.870	103,1	944
9	Banjarharjo	64.927	64.314	129.241	101,0	805
10	Losari	70.134	68.414	138.548	102,5	1.522
11	Tanjung	53.526	51.627	105.153	103,7	1.470
12	Kersana	33.849	33.247	67.096	101,8	2.518
13	Bulakamba	93.487	89.857	183.344	104,0	1.518
14	Wanasari	82.405	79.092	161.497	104,2	2.166
15	Songgom	43.498	42.559	86.057	102,2	1.642
16	Jatibarang	44.912	43.797	88.709	102,5	2.394
17	Brebes	93.137	91.046	184.183	102,3	1.995
	JUMLAH	1.008.774	977.573	1.986.347	103,2	1.126

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes 2021, data diolah

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes berdasarkan Kepala Keluarga dan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) sebagaimana dalam tabel berikut ini :



Tabel I.10
Jumlah Penduduk berdasarkan Kepala Keluarga dan
Kepemilikan Kartu Keluarga per Kecamatan Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga			Jumlah Kepemilikan KK					
		Laki-laki	Prp	Jumlah	Laki-laki	%	Prp	%	Jumlah	%
1	Salem	18.333	3.307	21.640	18.292	85,08	3.209	14,92	21.501	99,36
2	Bantarkawung	27.948	5.804	33.752	27.811	83,56	5.473	16,44	33.284	98,61
3	Bumiayu	29.480	8.237	37.717	29.461	78,20	8.214	21,80	37.675	99,89
4	Paguyangan	29.702	6.828	36.530	29.582	81,94	6.519	18,06	36.101	98,82
5	Sirampog	18.778	4.767	23.545	18.714	80,11	4.645	19,89	23.359	99,21
6	Tonjong	20.518	5.697	26.215	20.454	78,51	5.600	21,49	26.054	99,38
7	Larangan	44.298	11.086	55.384	44.200	80,26	10.873	19,74	55.073	99,44
8	Ketanggungan	40.539	9.810	50.349	40.484	80,64	9.720	19,36	50.204	99,71
9	Banjarharjo	37.757	9.135	46.892	37.725	80,76	8.985	19,24	46.710	99,61
10	Losari	37.172	9.633	46.805	37.131	79,53	9.556	20,47	46.687	99,75
11	Tanjung	28.065	6.108	34.173	28.014	82,34	6.008	17,66	34.022	99,56
12	Kersana	18.332	4.513	22.845	18.304	80,41	4.460	19,59	22.764	99,64
13	Bulakamba	49.381	12.015	61.396	49.309	80,54	11.913	19,46	61.222	99,72
14	Wanasari	43.074	9.412	52.486	43.010	82,20	9.311	17,80	52.321	99,68
15	Songgom	22.914	7.173	30.087	22.846	76,42	7.050	23,58	29.896	99,36
16	Jatibarang	23.343	6.832	30.175	23.220	77,76	6.642	22,24	29.862	98,96
17	Brebes	48.824	12.288	61.112	48.767	80,02	12.175	19,59	60.942	99,72
	JUMLAH	538.458	132.645	671.103	537.324	80,48	130.353	19,52	667.677	99,49

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, 2021

Dari tabel 1.4 dapat dijelaskan bahwa jumlah Kepala Keluarga (KK) paling banyak ada di wilayah Kecamatan Bulakamba yakni 61.222 KK sedangkan Kepala Keluarga paling sedikit ada di wilayah Kecamatan Salem yakni 21.501 KK. Selanjutnya prosentase Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Brebes sebesar 99,49%, paling banyak berada di wilayah Kecamatan Bumiayu yaitu sebesar 99,89% atau sebanyak 37.675 KK yang memiliki Kartu Keluarga dari 37.717 KK.

Penduduk yang bekerja berdasarkan pekerjaan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tahun 2021, sebagaimana uraian pada tabel berikut ini.



Tabel I.11
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaannya Tahun 2021

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	221.279	201.303	422.582	21,27
2	Mengurus Rumah Tangga	-	291.665	291.665	14,68
3	Pelajar/Mahasiswa	170.848	152.796	323.644	16,29
4	Pensiunan	3.603	1.379	4.982	0,25
5	Pegawai Negeri Sipil	6.350	3.826	10.176	0,51
6	TNI/POLRI	1.103	31	10.134	0,05
7	Perdagangan	7.862	7.147	15.009	0,76
8	Petani/Peternak/Nelayan	126.031	93.789	219.820	11,07
9	Industri, Kontruksi, Mekanik, Arsitek	2.331	101	2.432	0,00
10	Transportasi, Pilot, Sopir, Pelaut	8.331	22	8.353	0,00
11	Karyawan (BUMN, BUMD, swasta, honorer)	47.158	18.315	65.473	0,03
12	Buruh (tani, ternak, nelayan, harian lepas)	81.589	38.935	120.524	0,06
13	Pembantu Rumah Tangga	8	525	533	0,00
14	Tukang (Cukur, Listrik, Batu, Kayu, Sol Sepatu, Las, Jahit, Gigi)	2.449	248	2.697	0,00
15	Seniman, Penata (Rias, Rambut, Busana), Perancang Busana, Juru Masak	71	20	91	0,00
16	Ustadz/Mubaigh, Imam Masjid, Pastor, Pendeta, Biarawati	297	62	359	0,00
17	Bupati, Wakil Bupati, Duta Besar, Anggota Legislatif (DPD, BPK, DPRD Prov, DPRD Kab, DPR RI)	33	9	42	0,00
18	Dosen/Guru/Peneliti	6.353	9.343	15.696	0,01
19	Pengacara, Konsultan, Notaris, Akuntan	64	21	85	0,00
20	Tenaga medis (dokter, bidan, perawat, apoteker, psikiater)	665	2.595	3.260	0,00
21	Promotor Acara, Penyiar (Radio, Televisi), Wartawan, Penterjemah	68	9	77	0,00
22	Pedagang	42.237	34.307	76.544	3,85
23	Kepala Desa, Perangkat Desa	2.807	335	3.142	0,00
24	Wiraswasta	277.213	120.712	397.925	20,03
25	Lainnya	24	30	54	0,00
	JUMLAH	1.008.774	977.573	1.986.347	100,00

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Dari data pada tabel I.5 dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan penduduk Kabupaten Brebes yang paling besar selama tahun 2021 adalah dengan jenis pekerjaan sebagai wiraswasta yaitu sebesar 397.925 (20,03%). Selanjutnya



jenis pekerjaan dengan status sebagai pelajar dan mahasiswa cukup tinggi yaitu sebesar 323.644 (16,29%). Hal ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang didukung oleh kesadaran masyarakat masih cukup tinggi.

Dari sisi kualitas, penduduk Kabupaten Brebes dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan. Sesuai dengan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, jumlah penduduk Kabupaten Brebes dengan tingkat pendidikan masih didominasi oleh tamatan SD/ sederajat sebanyak 756.314 orang atau 38,08% disusul tamatan SLTP/ sederajat sebanyak 301.339 orang atau 15,17% dan urutan ketiga dari tamatan SLTA sebesar 228.892 orang atau 11,52%. Sementara itu penduduk Kabupaten Brebes lulusan dari Perguruan Tinggi mulai dari D1 sampai dengan S3 berjumlah 53.539 orang atau sebesar 2,70%.

Berdasarkan dari gambaran tersebut di atas maka kualitas penduduk Kabupaten Brebes masih terus perlu ditingkatkan terutama untuk mengurangi tingkat lulusan SD/ Sederajat dan anak putus sekolah guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari komponen pendidikan. Keseimbangan jumlah lulusan antar tingkat pendidikan diupayakan tidak terlalu jauh untuk memberikan jaminan pemerataan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Brebes. Pendidikan sejatinya menjadi salah satu indikator yang dapat dijadikan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Pendidikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di daerah merupakan salah satu dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan pendidikan dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel I.12
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2021

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum sekolah	206.443	201.488	407.931	20,54
2	Belum tamat SD/ sederajat	118.424	119.908	238.332	12,00
3	Tamat SD/ Sederajat	371.157	385.157	756.314	38,08
4	Tamat SLTP/ sederajat	156.866	144.473	301.339	15,17
5	Tamat SLTA/ sederajat	129.142	99.750	228.892	11,52



No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
6	Diploma I/II	2.113	2.161	4.274	0,22
7	Akademi/Diploma III	4.914	6.367	11.281	0,57
8	Diploma IV/Strata 1	18.614	17.746	36.360	1,83
9	Strata II	1.036	488	1.524	0,08
10	Strata III	65	35	100	0,01
	JUMLAH	1.008.774	977.573	1.986.347	100,00

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes

Kehidupan beragama di Kabupaten Brebes juga cukup damai dengan memegang tingkat toleransi yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kerukunan antar umat dan inter agama di Kabupaten Brebes. Pada tahun 2021, dari Jumlah penduduk sebesar 1.986.347 jiwa terbagi menjadi 6 agama dan 1 aliran kepercayaan. Jumlah terbesar penduduk Kabupaten Brebes terbanyak beragama Islam yaitu sebanyak 1.981.032 jiwa atau 99,73% disusul agama Kristen sebanyak 3.467 jiwa atau 0,17% dan Katholik sebanyak 1.425 jiwa atau 0,07%. Sedangkan jumlah pemeluk agama lainnya adalah agama Hindu sebanyak 18 jiwa, selanjutnya agama Budha sebanyak 236 jiwa, Konghucu sebanyak 81 jiwa, serta Aliran Kepercayaan sebanyak 88 jiwa sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel I.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Brebes Tahun 2021

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Islam	1.006.141	974.981	1.981.032	99,73
2	Kristen	1.686	1.781	3.467	0,17
3	Katholik	711	714	1.425	0,07
4	Hindu	9	9	10	0,00
5	Budha	126	110	236	0,01
6	Konghucu	45	36	81	0,01
7	Aliran Kepercayaan	56	32	88	0,01
	Jumlah	1.008.774	977.573	1.986.347	100,00

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



C. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengalami perubahan sebagai hasil evaluasi dari tingkat Provinsi serta kebutuhan / penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Brebes yang diharapkan ke depan bisa berjalan dengan lebih baik. Adapun terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan pula pembenahan terhadap perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Brebes, dengan diterbitkannya :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
2. Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2021, Susunan Perangkat Daerah menggunakan Susunan Perangkat Daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dimulai pada tahun anggaran baru yaitu Tahun Anggaran 2021.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 sebanyak 8.381 Orang. Mengalami penurunan sebanyak 654 orang dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 9.035 Hal ini disebabkan karena Mutasi ke luar daerah lain , Pensiun karena sakit dan meninggal dunia dan Pensiun Karena APS, dan terdapat penambahan PNS dari Mutasi Masuk dari luar daerah ke Brebes. Penambahan CPNS dari hasil Seleksi CPNS Formasi tahun 2021 baru dilakukan pemberkasan pada tahun 2022. Sehingga pada tahun 2021 mengalami minus growth PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.



Dari PNS sejumlah 8.381 orang terdiri dari Laki-laki berjumlah 4.292 orang dan Perempuan Sebanyak 4.089 orang. PNS Golongan I sebanyak 85 Orang, Golongan II 1.350 Orang, Golongan III 4.246 orang dan Golongan IV sebanyak 2.700 Orang. Berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 2.223 yang berpendidikan non Sarjana dan 6.158 berpendidikan Sarjana. Hal ini berarti 73,47 Persen PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berpendidikan Sarjana.

Dilihat dari jenis jabatan, PNS di lingkungan Pemkab. Brebes sebagian besar adalah tenaga Fungsional Pendidikan dan Kesehatan yaitu sebanyak 5.039 atau sebesar 60,12 Persen.

Rincian data PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

JUMLAH PEGAWAI : 8381

LAKI – LAKI : 4292

PEREMPUAN : 4089

Tabel I.14

Jumlah PNS Pemkab. Brebes berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	IA	
2	IB	4
3	IC	20
4	ID	61
Jumlah Golongan I		85
5	IIA	47
6	IIB	216
7	IIC	463
8	IID	624
Jumlah Golongan II		1350
9	IIIA	783
10	IIIB	1255
11	IIIC	1045



NO	GOLONGAN	JUMLAH
12	IIID	1163
Jumlah Golongan III		4246
13	IVA	1131
14	IVB	1482
15	IVC	81
16	IVD	5
17	IVE	1
Jumlah Golongan IV		2700
Jumlah Pegawai		8381

Sumber Data : BKPSDMD Kab Brebes

Tabel I.15

Jumlah PNS Pemkab. Brebes berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	5
2	SMP	31
3	SMA	106
4	SLTA	1263
5	DIPLOMA 1	2
6	DIPLOMA 2	74
7	DIPLOMA 3 (D3)	742
8	DIPLOMA (D3)	
NON SARJANA		2223
9	SARJANA S1	5737
10	SARJANA S2	419
11	SARJANA S3	2
SARJANA		6158
JUMLAH PEGAWAI		8381

Sumber Data : BKPSDMD Kab Brebes



Tabel I.16

Jumlah PNS Pemkab. Brebes berdasarkan Jenis Jabatan

NO	JENIS JABATAN	JUMLAH
1	JABATAN FUNGSIONAL PENDIDIKAN	4.389
2	FUNGSIONAL KESEHATAN	1.254
3	ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL TERTENTU	3.392
Jumlah Pegawai		9.035

Secara ringkas dapat diuraikan susunan perangkat daerah Kabupaten Brebes pada tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah : 1 unit.
- b. Sekretariat DPRD : 1 unit.
- c. Inspektorat : 1 unit.
- d. Satpol Pamong Praja : 1 unit.
- e. Dinas Daerah : 20 unit.
- f. Badan Daerah : 5 unit.
- g. RSUD : 2 unit.
- h. Kecamatan : 17 unit.
- i. Kelurahan : 5 unit.
- j. Lembaga Pusat di Daerah :
 - BPBD : 1 unit.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Brebes per 31 Desember tahun 2021, sebanyak 8.381 orang, Secara terinci susunan organisasi kelembagaan beserta jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se Kabupaten Brebes dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.17

Susunan Organisasi Kelembagaan dan Jumlah Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021

SKPD KABUPATEN BREBES	NAMA NOMENKLATUR	JUMLAH PNS	KETERANGAN
▪ Sekretariat	1. Sekretaris Daerah Tipe A	1	Nomor 3 Tahun



BAB I PENDAHULUAN

SKPD KABUPATEN BREBES	NAMA NOMENKLATUR	JUMLAH PNS	KETERANGAN
Daerah	1.1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik	-	2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
	1.2. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	1	
	1.3. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan	-	
	1.4. Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra	-	
	1) Bagian Tata Pemerintahan	9	
	2) Bagian Kesejahteraan Rakyat	10	
	1.5. Asisten Sekda Bidang Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan	1	
	3) Bagian Perekonomian	9	
	4) Bagian Administrasi Pembangunan	10	
	5) Bagian Layanan Pengadaan	14	
	1.6. Asisten Sekda Bidang Administrasi	-	
	6) Bagian Hukum	8	
	7) Bagian Organisasi Perangkat Daerah	9	
	8) Bagian Umum	38	
▪ Sekretariat DPRD	2. Sekretariat DPRD Tipe A	40	
▪ Inspektorat	3. Inspektorat Tipe A	50	
▪ Dinas Daerah	4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tipe A	4966	
	5. Dinas Kesehatan Tipe A	1283	
	6. Dinas Pekerjaan Umum Tipe B	85	
	7. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Tipe B	125	
	8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B	27	
	9. Dinas Sosial Tipe B	27	
	10. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A	42	
	11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A	39	
	12. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A	20	
	13. Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Tipe A	110	
	14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A	27	
	15. Dinas Perhubungan Tipe A	46	
	16. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Tipe A	32	
	17. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Tipe A	122	
	18. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe A	29	



SKPD KABUPATEN BREBES	NAMA NOMENKLATUR	JUMLAH PNS	KETERANGAN
	19. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B	22	
	20. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A	43	
	21. Dinas Arsip dan Perpustakaan Tipe A	18	
	22. Dinas Perikanan Tipe A	19	
	23. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A	83	
	24. Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A	26	
Badan	25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B	50	
	26. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A	39	
	27. Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah Tipe A	44	
	28. Badan Pendapatan Daerah Tipe A	28	
	29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe A	17	
Rumah Sakit	30. RSUD Brebes	347	
	31. RSUD Bumiayu	65	
Kecamatan	32. Kecamatan Salem Tipe A	27	
	33. Kecamatan Bantarkawung Tipe A	19	
	34. Kecamatan Bumiayu Tipe A	22	
	35. Kecamatan Paguyangan Tipe A	23	
	36. Kecamatan Sirampog Tipe A	15	
	37. Kecamatan Tonjong Tipe A	22	
	38. Kecamatan Jatibarang Tipe A	23	
	39. Kecamatan Wanasari Tipe A	18	
	40. Kecamatan Brebes Tipe A	16	
	41. Kecamatan Songgom Tipe A	18	
	42. Kecamatan Kersana Tipe A	18	
	43. Kecamatan Losari Tipe A	19	
	44. Kecamatan Tanjung Tipe A	19	
	45. Kecamatan Bulakamba Tipe A	18	
	46. Kecamatan Larangan Tipe A	20	
	47. Kecamatan Ketanggungan Tipe A	22	
	48. Kecamatan Banjarharjo Tipe A	22	
Kelurahan	49. Kelurahan Brebes	9	
	50. Kelurahan Limbangan Wetan	6	
	51. Kelurahan Limbangan Kulon	9	
	52. Kelurahan Gandasuli	7	



SKPD KABUPATEN BREBES	NAMA NOMENKLATUR	JUMLAH PNS	KETERANGAN
	53. Kelurahan Pasar Batang	8	
Lembaga Pusat di Daerah	54. BPBD	21	
—	Jumlah Total	8381	—

Sumber data : SKPD se Kabupaten Brebes

D. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.161.926.541.449,62 (100,75%) dari target anggaran sebesar Rp. 3.138.485.176.291. Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 tidak lepas dari keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel I.18
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	3.138.485.176.291	3.161.926.541.449,62	23.441.365.158,62	100,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.422.097.000	518.297.245.782,62	36.875.148.782,62	107,66
Pajak Daerah	120.020.000.000	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67
Retribusi Daerah	33.644.220.000	16.112.505.734,00	(17.531.714.266,00)	47,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.882.962.000	9.839.332.523,00	(43.629.477,00)	99,56
Lain-lain PAD yang Sah	317.874.915.000	367.919.858.807,62	50.044.943.807,62	115,74
PENDAPATAN TRANSFER	2.464.203.125.961	2.456.463.471.667	(7.739.654.294,00)	99,69%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.242.175.594.856	2.238.340.473.031	(3.835.121.825,00)	99,83%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.027.531.105	218.122.998.636	(3.904.532.469,00)	98,24%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.859.953.330	187.165.824.000	(5.694.129.330,00)	97,05%
Pendapatan Hibah	12.500.000.000	8.175.000.000	(4.325.000.000,00)	65,40%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	180.359.953.330	178.990.824.000	(1.369.129.330,00)	99,24%



URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (unaudited).

E. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.125.853.111.539,00 atau 95,12 % dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00. Anggaran belanja daerah tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.3.220.782.215.000,00, setelah perubahan sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00, mengalami perubahan sebesar 65.525.428.838. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan seperti tabel berikut ini :

Tabel I.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
BELANJA DAERAH	3.286.307.643.838	3.125.853.111.539,00	(160.454.532.299,00)	95,12%
BELANJA OPERASI	2.086.950.229.960	1.991.889.019.204,00	(95.061.210.756,00)	95,44%
Belanja Pegawai	1.083.054.366.150	1.061.700.994.882,00	(21.353.371.268,00)	98,03%
Belanja Barang dan Jasa	886.671.048.628	818.451.655.502,00	(68.219.393.126,00)	92,31%
Belanja Bunga	274.000.000	273.265.200,00	(734.800,00)	99,73%
Belanja Hibah	98.218.313.682	93.365.302.620	(4.853.011.062,00)	95,06%
Belanja Bantuan Sosial	18.732.501.500	18.097.801.000	(634.700.500,00)	96,61%
BELANJA MODAL	493.807.389.839	439.319.806.903	(54.487.582.936,00)	88,97%
Belanja Modal Tanah	1.748.750.000	1.505.476.140	(243.273.860,00)	86,09%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.447.912.678	81.728.765.670	(25.719.147.008,00)	76,06%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.100.658.297	159.174.560.006	(21.926.098.291,00)	87,89%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.909.062.622	180.910.365.758	(5.998.696.864,00)	96,79%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.601.006.242	16.000.639.329	(600.366.913,00)	96,38%
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161,00)	36,08%
Belanja Tidak Terduga	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161,00)	36,08%
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446,00)	99,13%
Belanja Bagi Hasil	17.701.635.388	12.244.943.942	(5.456.691.446,00)	69,17%
Belanja Bantuan Keuangan	680.265.716.500	679.663.713.500	(602.003.000,00)	99,91%
SURPLUS/DEFISIT	- 147.822.467.547	36.073.429.910,62	183.895.897.457,62	0,00%

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (un audited).



Secara ringkas dapat disampaikan pula laporan realisasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel I.20
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Brebes T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	3.138.485.176.291	3.161.926.541.449,62	23.441.365.158,62	100,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.422.097.000	518.297.245.782,62	36.875.148.782,62	107,66%
PENDAPATAN TRANSFER	2.464.203.125.961	2.456.463.471.667,00	(7.739.654.294,00)	99,69%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.859.953.330	187.165.824.000	(5.694.129.330,00)	97,05%
BELANJA DAERAH	3.286.307.643.838	3.125.853.111.539,00	(160.454.532.299,00)	95,12%
BELANJA OPERASI	2.086.950.229.960	1.991.889.019.204,00	(95.061.210.756,00)	95,44%
BELANJA MODAL	493.807.389.839	439.319.806.903,00	(54.487.582.936,00)	88,97%
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990,00	(4.847.044.161,00)	36,08%
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442,00	(6.058.694.446,00)	99,13%
SURPLUS/DEFISIT	(147.822.467.547,00)	36.073.429.910,62	183.895.897.457,62	0,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.492.467.547,00	181.498.742.702,57	6.275.155,57	100,00%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.670.000.000	31.663.260.000	(2.006.740.000,00)	94,04%
PEMBIAYAAN NETTO	147.822.467.547	149.835.482.702,57	2.013.015.155,57	101,36%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	185.908.912.613,19	185.908.912.613,19	

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (un audited).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes T.A 2021 meliputi : 1) Urusan Wajib Pelayanan Dasar ; 2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar ; 3) Urusan Pilihan ; 4) Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, sebagaimana uraian pada tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Tidak Langsung berikut ini :

Tabel I.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Brebes Akhir T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
URUSAN WAJIB PELAYANAN	2.066.331.333.991	1.943.428.678.905	(122.902.655.086)	94,05



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
DASAR				
Belanja Operasi	1.612.498.366.779	1.541.219.179.852	(71.279.186.927)	95,58
Belanja Modal	453.832.967.212	402.209.499.053	(51.623.468.159)	88,63
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	147.908.681.495	139.607.785.252	(8.300.896.243)	94,39
Belanja Operasi	132.793.669.723	125.935.212.150	(6.858.457.573)	94,84
Belanja Modal	15.115.011.772	13.672.573.102	(1.442.438.670)	90,46
URUSAN PILIHAN	41.095.096.148	38.901.990.805	(2.193.105.343)	94,66
Belanja Operasi	33.063.137.448	31.424.844.139	(1.638.293.309)	95,04
Belanja Modal	8.031.958.700	7.477.146.666	(554.812.034)	93,09
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	1.030.972.532.204	1.003.914.656.577	(27.057.875.627)	97,38
Belanja Operasi	308.595.056.010	293.309.783.063	(15.285.272.947)	95,05
Belanja Modal	16.827.452.155	15.960.588.082	(866.864.073)	94,85
Belanja Tidak Terduga	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161)	36,08
Belanja Transfer	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446)	99,13
TOTAL	3.286.307.643.838	3.125.853.111.539	(160.454.532.299)	95,12

Sumber data : BPPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Uraian pada tabel III.1 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Brebes T.A 2021, total anggaran sebesar Rp. 3.286.307.643.838 dan realisasi sebesar Rp. 3.125.853.111.539 atau 95,12%.

Secara lebih terinci anggaran dan realisasi belanja penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Brebes T.A 2021, sebagaimana uraian tabel tersebut sebagai berikut :

Tabel I.21
Anggaran dan Realisasi Belanja
Ururan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Akhir T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Ururan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	2.066.331.333.991	1.943.428.678.905	(122.902.655.086)	94,05
BELANJA OPERASI	1.612.498.366.779	1.541.219.179.852	(71.279.186.927)	95,58
BELANJA MODAL	453.832.967.212	402.209.499.053	(51.623.468.159)	88,63



BAB I PENDAHULUAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Pendidikan	961.895.112.396	940.802.475.376	(21.092.637.020)	97,81
BELANJA OPERASI	883.173.239.115	863.741.004.101	(19.432.235.014)	97,80
BELANJA MODAL	78.721.873.281	77.061.471.275	(1.660.402.006)	97,89
Kesehatan	650.264.662.306	579.852.858.928	(70.411.803.378)	89,17
BELANJA OPERASI	565.306.836.167	519.686.382.752	(45.620.453.415)	91,93
BELANJA MODAL	84.957.826.139	60.166.476.176	(24.791.349.963)	70,82
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	401.576.934.546	372.335.397.216	(29.241.537.330)	92,72
BELANJA OPERASI	127.666.647.567	122.854.554.587	(4.812.092.980)	96,23
BELANJA MODAL	273.910.286.979	249.480.842.629	(24.429.444.350)	91,08
Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	27.310.450.032	26.262.678.237	(1.047.771.795)	96,16
BELANJA OPERASI	13.496.356.212	12.968.368.237	(527.987.975)	96,09
BELANJA MODAL	13.814.093.820	13.294.310.000	(519.783.820)	96,24
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	14.816.789.460	14.383.885.657	(432.903.803)	97,08
BELANJA OPERASI	12.620.764.467	12.409.027.684	(211.736.783)	98,32
BELANJA MODAL	2.196.024.993	1.974.857.973	(221.167.020)	89,93
Sosial	10.467.385.251	9.791.383.491	(676.001.760)	93,54
BELANJA OPERASI	10.234.523.251	9.559.842.491	(674.680.760)	93,41
BELANJA MODAL	232.862.000	231.541.000	(1.321.000)	99,43

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Tabel I.22
Anggaran dan Realisasi Belanja
Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Akhir T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	147.908.681.495	139.607.785.252	(8.300.896.243)	94,39
BELANJA OPERASI	132.793.669.723	125.935.212.150	(6.858.457.573)	94,84
BELANJA MODAL	15.115.011.772	13.672.573.102	(1.442.438.670)	90,46
Tenaga Kerja	6.028.173.434	5.576.683.130	(451.490.304)	92,51
BELANJA OPERASI	5.945.612.434	5.499.820.130	(445.792.304)	92,50
BELANJA MODAL	82.561.000	76.863.000	(5.698.000)	93,10
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.968.903.727	5.642.517.265	(326.386.462)	94,53
BELANJA OPERASI	5.408.200.470	5.089.028.305	(319.172.165)	94,10
BELANJA MODAL	560.703.257	553.488.960	(7.214.297)	98,71
Pangan	14.592.941.259	14.185.890.718	(407.050.541)	97,21
BELANJA OPERASI	13.671.965.913	13.292.199.318	(379.766.595)	97,22
BELANJA MODAL	920.975.346	893.691.400	(27.283.946)	97,04



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Pertanahan	2.851.982.500	2.668.263.540	(183.718.960)	93,56
BELANJA OPERASI	2.003.232.500	1.971.136.400	(32.096.100)	98,40
BELANJA MODAL	848.750.000	697.127.140	(151.622.860)	82,14
Lingkungan Hidup	20.904.162.689	18.666.406.014	(2.237.756.675)	89,30
BELANJA OPERASI	19.795.607.689	18.200.572.214	(1.595.035.475)	91,94
BELANJA MODAL	1.108.555.000	465.833.800	(642.721.200)	42,02
Administrasi Kependudukan dan Cakil	10.167.759.243	9.504.450.287	(663.308.956)	93,48
BELANJA OPERASI	9.467.139.083	8.851.076.487	(616.062.596)	93,49
BELANJA MODAL	700.620.160	653.373.800	(47.246.360)	93,26
Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.917.680.348	6.840.620.620	(77.059.728)	98,89
BELANJA OPERASI	6.868.380.348	6.792.220.620	(76.159.728)	98,89
BELANJA MODAL	49.300.000	48.400.000	(900.000)	98,17
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.460.986.222	6.986.526.757	(474.459.465)	93,64
BELANJA OPERASI	6.257.426.222	5.921.258.557	(336.167.665)	94,63
BELANJA MODAL	1.203.560.000	1.065.268.200	(138.291.800)	88,51
Perhubungan	18.959.771.985	17.238.455.091	(1.721.316.894)	90,92
BELANJA OPERASI	13.412.502.076	11.876.322.689	(1.536.179.387)	88,55
BELANJA MODAL	5.547.269.909	5.362.132.402	(185.137.507)	96,66
Komunikasi dan Informatika	8.088.286.320	7.905.482.027	(182.804.293)	97,74
BELANJA OPERASI	7.305.364.320	7.125.225.027	(180.139.293)	97,53
BELANJA MODAL	782.922.000	780.257.000	(2.665.000)	99,66
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.740.687.020	12.421.654.581	(319.032.439)	97,50
BELANJA OPERASI	12.699.467.020	12.383.479.581	(315.987.439)	97,51
BELANJA MODAL	41.220.000	38.175.000	(3.045.000)	92,61
Penanaman Modal	6.833.556.122	6.278.379.220	(555.176.902)	91,88
BELANJA OPERASI	6.672.243.622	6.121.382.220	(550.861.402)	91,74
BELANJA MODAL	161.312.500	156.997.000	(4.315.500)	97,32
Kepemudaan dan Olah Raga	14.762.877.095	14.621.192.100	(141.684.995)	99,04
BELANJA OPERASI	13.192.877.095	13.084.442.100	(108.434.995)	99,18
BELANJA MODAL	1.570.000.000	1.536.750.000	(33.250.000)	97,88
Statistik	117.026.480	116.572.750	(453.730)	99,61
BELANJA OPERASI	84.079.580	83.632.850	(446.730)	99,47
BELANJA MODAL	32.946.900	32.939.900	(7.000)	99,98
Kebudayaan	7.563.689.955	7.108.249.127	(455.440.828)	93,98
BELANJA OPERASI	6.594.298.255	6.327.143.527	(267.154.728)	95,95
BELANJA MODAL	969.391.700	781.105.600	(188.286.100)	80,58
Perpustakaan	3.823.738.976	3.721.561.625	(102.177.351)	97,33
BELANJA OPERASI	3.288.814.976	3.191.391.725	(97.423.251)	97,04



BAB I PENDAHULUAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
BELANJA MODAL	534.924.000	530.169.900	(4.754.100)	99,11
Kearsipan	126.458.120	124.880.400	(1.577.720)	98,75
BELANJA OPERASI	126.458.120	124.880.400	(1.577.720)	98,75

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Tabel I.23
Anggaran dan Realisasi Belanja
Urusan Pilihan Akhir T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Urusan Pilihan	41.095.096.148	38.901.990.805	(2.193.105.343)	94,66
BELANJA OPERASI	33.063.137.448	31.424.844.139	(1.638.293.309)	95,04
BELANJA MODAL	8.031.958.700	7.477.146.666	(554.812.034)	93,09
Kelautan dan Perikanan	12.240.375.022	11.083.573.244	(1.156.801.778)	90,55
BELANJA OPERASI	10.916.874.022	9.976.544.244	(940.329.778)	91,39
BELANJA MODAL	1.323.501.000	1.107.029.000	(216.472.000)	83,64
Pariwisata	854.472.598	812.567.400	(41.905.198)	95,10
BELANJA OPERASI	454.472.598	413.077.400	(41.395.198)	90,89
BELANJA MODAL	400.000.000	399.490.000	(510.000)	99,87
Pertanian	21.022.196.348	20.268.470.643	(753.725.705)	96,41
BELANJA OPERASI	17.036.080.548	16.558.107.377	(477.973.171)	97,19
BELANJA MODAL	3.986.115.800	3.710.363.266	(275.752.534)	93,08
Perdagangan	5.798.050.720	5.708.377.092	(89.673.628)	98,45
BELANJA OPERASI	3.482.708.820	3.455.112.692	(27.596.128)	99,21
BELANJA MODAL	2.315.341.900	2.253.264.400	(62.077.500)	97,32
Perindustrian	1.180.001.460	1.029.002.426	(150.999.034)	87,20
BELANJA OPERASI	1.173.001.460	1.022.002.426	(150.999.034)	87,13
BELANJA MODAL	7.000.000	7.000.000	0	100,00
Transmigrasi	0	0	0	0,00

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Tabel I.24
Anggaran dan Realisasi Belanja
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	1.030.972.532.204	1.003.914.656.577	(27.057.875.627)	97,38
BELANJA OPERASI	308.595.056.010	293.309.783.063	(15.285.272.947)	95,05
BELANJA MODAL	16.827.452.155	15.960.588.082	(866.864.073)	94,85



URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA (LEBIH KURANG)	(%)
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161)	36,08
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446)	99,13
Administrasi Pemerintahan	55.990.208.268	52.358.299.573	(3.631.908.695)	93,51
BELANJA OPERASI	52.687.154.738	49.322.463.873	(3.364.690.865)	93,61
BELANJA MODAL	3.303.053.530	3.035.835.700	(267.217.830)	91,91
Pengawasan	8.721.994.704	8.459.841.643	(262.153.061)	96,99
BELANJA OPERASI	8.036.434.724	7.786.592.916	(249.841.808)	96,99
BELANJA MODAL	685.559.980	673.248.727	(12.311.253)	98,20
Perencanaan	7.613.085.689	7.357.541.686	(255.544.003)	96,64
BELANJA OPERASI	7.254.261.689	7.025.231.686	(229.030.003)	96,84
BELANJA MODAL	358.824.000	332.310.000	(26.514.000)	92,61
Keuangan	775.749.062.290	762.209.098.702	(13.539.963.588)	98,25
BELANJA OPERASI	67.459.228.016	64.983.933.870	(2.475.294.146)	96,33
BELANJA MODAL	2.739.810.235	2.580.879.400	(158.930.835)	94,20
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161)	36,08
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446)	99,13
Kepegawaian	48.336.550.701	47.255.703.392	(1.080.847.309)	97,76
BELANJA OPERASI	46.576.823.241	45.586.226.520	(990.596.721)	97,87
BELANJA MODAL	1.759.727.460	1.669.476.872	(90.250.588)	94,87
Pendidikan dan Pelatihan	2.174.812.500	2.105.926.037	(68.886.463)	96,83
BELANJA OPERASI	2.174.812.500	2.105.926.037	(68.886.463)	96,83
Penelitian dan Pengembangan	536.748.000	530.680.610	(6.067.390)	98,87
BELANJA OPERASI	536.748.000	530.680.610	(6.067.390)	98,87
Sekretariat DPRD	64.818.027.048	59.501.187.957	(5.316.839.091)	91,80
BELANJA OPERASI	64.150.041.048	58.946.328.182	(5.203.712.866)	91,89
BELANJA MODAL	667.986.000	554.859.775	(113.126.225)	83,06
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	55.296.299.448	52.876.451.399	(2.419.848.049)	95,62
BELANJA OPERASI	48.595.552.498	46.368.553.809	(2.226.998.689)	95,42
BELANJA MODAL	6.700.746.950	6.507.897.590	(192.849.360)	97,12
Kesatuan Bangsa dan Politik	11.735.743.556	11.259.925.578	(475.817.978)	95,95
BELANJA OPERASI	11.123.999.556	10.653.845.560	(470.153.996)	95,77
BELANJA MODAL	611.744.000	606.080.018	(5.663.982)	99,07

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

F. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan



Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah dapat di lihat pada tabel III.3 berkaitan dengan Target dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021. Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 181.492.467.547,00 dengan realisasi sebesar Rp 181.498.742.702,57 terdiri dari penghematan belanja sebesar Rp. 140.106.001.315,00, dan sisa belanja lainnya sebesar Rp. 41.376.466.231,57 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebesar Rp. 40.616.205.863,67, sisa dana BOS sebesar Rp. 760.260.367,90. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 33.670.000.000,00 antara lain untuk penyertaan modal pemerintah pada BUMD sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.000.000,00 , dan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 13.670.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.663.260,000,00.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes pada setiap tahun rata-rata mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, baik dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini juga seiring dengan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meskipun tiap tahun ada kenaikan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan daerah yang semakin meningkat sedangkan belanja terus bertambah tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Maka dari itu kita harus lebih semangat untuk berusaha dan berupaya senantiasa meningkatkan pendapatan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menghasilkan penerimaan pendapatan daerah, disamping itu kita juga mengevaluasi terhadap penerimaan retribusi yang belum mencapai target, sedangkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) meskipun setiap tahun selalu naik, namun arah penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat utamanya untuk pembayaran gaji pegawai, disamping itu juga adanya dana pendampingan apabila kegiatan tersebut sumber dananya dari bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada RKPD yang telah diselaraskan dengan RPJMD tahun 2017 – 2022 dengan mengacu azas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. ***Tertib***, Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



- b. **Efisien**, adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- c. **Ekonomis**, adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah..
- d. **Efektif**, adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- e. **Transparan**, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- f. **Bertanggungjawab**, adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. **Keadilan**, adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- h. **Kepatutan**, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. **Manfaat untuk masyarakat**, adalah keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. **Taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan**, adalah pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Desentralisasi fiskal memberikan pelimpahan wewenang pengelolaan keuangan kepada daerah dalam meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah seperti yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi



daerah yang dimilikinya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang mengarah kepada kemajuan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah dan menjawab tantangan pokok perekonomian di tahun 2021, Pemerintah Daerah menerapkan strategi kebijakan fiskal yang tetap diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah–langkah konsolidasi fiskal. Dalam tahun 2021 Pemerintah Daerah tetap melakukan kebijakan pengendalian defisit. Langkah pengendalian defisit tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah.

Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang disusun dalam bentuk ringkasan APBD maupun Penjabarannya secara informatif dan transparan. Menurut pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, meliputi :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain–lain PAD yang sah.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah.
- c. Lain–lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Struktur Pendapatan Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah



2. Pendapatan Transfer, yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan; Transfer Pemerintah Pusat Lainnya; dan Transfer Pemerintah Provinsi.
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah, yang terdiri dari Pendapatan Hibah ; Pendapatan Dana Darurat ; Pendapatan Lainnya.

Untuk mencapai target yang telah direncanakan, Pemerintah Kabupaten Brebes mengarahkan kebijakan pendapatan tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Pemantapan kelembagaan, regulasi dan sistem informasi manajemen administrasi dan operasional pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur terhadap wajib pajak/retribusi melalui sarana dan prasarana.
- c. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dengan tetap memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi serta memperhatikan pembangunan berkelanjutan serta kelangsungan dan tumbuh kembangnya dunia usaha.
- d. Peningkatan koordinasi, peran dan fungsi SKPD teknis penghasil pendapatan.
- e. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal/ lembaga lainnya.
- f. Peningkatan pembinaan, pengawasan dan monitoring terhadap obyek penerimaan maupun terhadap petugas penerimaan daerah.
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka meningkatkan kontribusi pendapatan daerah.
- h. Peningkatan profesionalisme SDM pengelola pendapatan daerah.

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus di arahkan kepada usaha-usaha yang terus-menerus dan berlanjut agar pendapatan asli daerah tersebut terus



meningkat, sehingga diharapkan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari Pemerintah Pusat. Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi pengelola pendapatan asli daerah berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
2. Menyesuaikan/memperbaiki aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, meliputi :
 - a. Penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan.
 - b. Penyesuaian tarif.
 - c. Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.
3. Peningkatan pengawasan dan pengendalian.
4. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD.
5. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan.

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional yakni pungutan yang dilakukan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan akhir bulan Desember Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.161.926.541.449,62 (100,75%) dari target anggaran



sebesar Rp. 3.138.485.176.291. Anggaran Pendapatan Daerah tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 tidak lepas dari keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan kasus Covid-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Kabupaten Brebes T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	3.138.485.176.291	3.161.926.541.449,62	23.441.365.158,62	100,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.422.097.000	518.297.245.782,62	36.875.148.782,62	107,66
Pajak Daerah	120.020.000.000	124.425.548.718,00	4.405.548.718,00	103,67
Retribusi Daerah	33.644.220.000	16.112.505.734,00	(17.531.714.266,00)	47,89
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.882.962.000	9.839.332.523,00	(43.629.477,00)	99,56
Lain-lain PAD yang Sah	317.874.915.000	367.919.858.807,62	50.044.943.807,62	115,74
PENDAPATAN TRANSFER	2.464.203.125.961	2.456.463.471.667	(7.739.654.294,00)	99,69%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.242.175.594.856	2.238.340.473.031	(3.835.121.825,00)	99,83%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.027.531.105	218.122.998.636	(3.904.532.469,00)	98,24%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.859.953.330	187.165.824.000	(5.694.129.330,00)	97,05%
Pendapatan Hibah	12.500.000.000	8.175.000.000	(4.325.000.000,00)	65,40%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	180.359.953.330	178.990.824.000	(1.369.129.330,00)	99,24%

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (unaudited).

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pencapaian target pendapatan, upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pemerintah Daerah pada umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya secara optimal.



- b. Mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta penyampaian data– data terkini dan akuntabel dengan instansi/lembaga lain yang terkait baik Pusat maupun Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya.
- c. Menetapkan target PAD yang realistis sesuai dengan potensi riil sumber–sumber pendapatan yang ada pada masing–masing SKPD penghasil/ pengelola pendapatan.
- d. Mengoptimalkan pencapaian target PAD pada masing–masing SKPD teknis penghasil pendapatan.
- e. Melaksanakan sistem dan prosedur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain–lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur / mekanisme administrasi pelayanan.
- g. Menggali pendapatan atas pengelolaan dana bergulir.
- h. Pemetaan potensi sumber–sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh dinas–dinas penghasil pendapatan.
- i. Mengadakan kerja sama dengan instansi vertikal seperti Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Negeri dan PLN atau instansi/ lembaga lain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pelayanan masyarakat.

Dalam melaksanakan Kebijakan Umum Pendapatan Daerah tidak semua dapat berjalan lancar, namun ditemui beberapa permasalahan, kendala dan tantangan dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kebijakan umum pendapatan daerah, yaitu :

- (1) Pengelolaan PBB-P2 belum didukung dengan SOP dan proses penetapan penghapusan Piutang PBB-P2 tidak segera dilaksanakan (LHP BPK Tahun 2019)
- (2) Pelayanan penyetoran pendapatan PBB-P2 melalui bank tidak memenuhi kebutuhan.
- (3) Data piutang dan data wajib pajak yang belum terupdate dengan baik.



- (4) Belum adanya monitoring dan pemeriksaan pajak.
- (5) Keterbatasan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.
- (6) Kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berdampak belum tergalinya sumber-sumber pendapatan disebabkan sarana prasarana yang kurang memadai.
- (7) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah relatif masih kurang.
- (8) Kurang tertibnya administrasi pengelolaan di masing-masing SKPD pengelola pendapatan.
- (9) Kurang akuratnya basis data pendapatan, khususnya PAD pada unit-unit kerja pengelola pendapatan yang berdampak kurang optimalnya pencapaian target pendapatan.
- (10) Masih rendahnya kontribusi Perusda terhadap PAD, disebabkan belum optimalnya peran serta Perusda dalam mengelola usahanya maka hal tersebut mengurangi pendapatan daerah.

Solusi yang diterapkan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada antara lain :

- (1) Menyusun juknis mekanisme pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan atas aktivitas penagihan/pemungutan, penyetoran dan pelaporan pengelolaan PBB-P2.
- (2) Menyusun SOP dan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.
- (3) Menambah akses dan jam layanan penerimaan setoran pajak melalui bank sesuai kebutuhan.
- (4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- (5) Mengevaluasi dan mendata ulang data piutang dan semua wajib pajak.
- (6) Membentuk tim pemeriksaan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan terkait omzet objek pajak dan mengikuti bimbingan teknis yang



diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- (7) Melakukan monitoring penyampaian SPTPD oleh wajib pajak
- (8) Melakukan evaluasi dalam kegiatan pemutakhiran dan validasi data secara bertahap serta sosialisasi kepada wajib pajak untuk melakukan pemutakhiran data.
- (9) Peningkatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah.
- (10) Mengevaluasi dan meninjau kembali berbagai Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pendapatan.
- (11) Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman, aman dan mantap.
- (12) Penyederhanaan sistem administrasi, terutama administrasi perijinan.
- (13) Meningkatkan prasarana yang dapat memacu semangat usaha masyarakat.
- (14) Meningkatkan promosi potensi pada even—even peluang investasi baik tingkat Provinsi maupun Nasional.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Arah dan Kebijakan Umum Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diarahkan agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Brebes harus mampu mendorong pertumbuhan Investasi Daerah dengan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor, dan senantiasa menjaga kestabilan harga dan tingkat inflasi yang cenderung rendah. Hal ini merupakan syarat mutlak, mengingat dampak ekspansif yang diharapkan dari pengeluaran Pemerintah bagi kegiatan pembangunan sangat minim, disebabkan faktor keterbatasan dana yang tersedia. Oleh karena itu perlu adanya Arah Kebijakan Umum Belanja Daerah, agar pemanfaatan dana dilakukan secara tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu, sehingga kinerja yang diharapkan dapat segera terwujud.



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, yang meliputi:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- c. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- d. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 pasal 28 ayat (3) Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi :

- a. Penerimaan pembiayaan :
 - Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
 - Pencairan Dana Cadangan;
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau
 - Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengeluaran pembiayaan :



- Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- Penyertaan modal daerah;
- Pembentukan dana cadangan;
- Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
- Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022, bahwa kebijakan belanja daerah secara umum diarahkan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan daerah. Oleh karena itu penyusunannya harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Selanjutnya belanja daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan memperhatikan urgensi kebutuhan dan kemampuan daerah.

Penganggaran Belanja Daerah diupayakan pada pencapaian hasil melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah diarahkan pada:

1. Penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
2. Prioritas anggaran belanja adalah menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi urusannya.



3. Setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Besarnya plafond anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.
5. Penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan OPD dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan dokumen perencanaan yang berlaku.
6. Belanja daerah dianggarkan berdasarkan pada *Mandatory Spending* yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. *Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran Negara yang sudah diatur oleh undang-undang, tujuannya adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah

2. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.125.853.111.539,00 atau 95,12 % dari Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00. Anggaran belanja daerah tahun 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.3.220.782.215.000,00, setelah perubahan sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00, mengalami perubahan sebesar 65.525.428.838. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan seperti tabel berikut ini :

Tabel II.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
BELANJA DAERAH	3.286.307.643.838	3.125.853.111.539,00	(160.454.532.299,00)	95,12%
BELANJA OPERASI	2.086.950.229.960	1.991.889.019.204,00	(95.061.210.756,00)	95,44%



URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
Belanja Pegawai	1.083.054.366.150	1.061.700.994.882,00	(21.353.371.268,00)	98,03%
Belanja Barang dan Jasa	886.671.048.628	818.451.655.502,00	(68.219.393.126,00)	92,31%
Belanja Bunga	274.000.000	273.265.200,00	(734.800,00)	99,73%
Belanja Hibah	98.218.313.682	93.365.302.620	(4.853.011.062,00)	95,06%
Belanja Bantuan Sosial	18.732.501.500	18.097.801.000	(634.700.500,00)	96,61%
BELANJA MODAL	493.807.389.839	439.319.806.903	(54.487.582.936,00)	88,97%
Belanja Modal Tanah	1.748.750.000	1.505.476.140	(243.273.860,00)	86,09%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.447.912.678	81.728.765.670	(25.719.147.008,00)	76,06%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	181.100.658.297	159.174.560.006	(21.926.098.291,00)	87,89%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.909.062.622	180.910.365.758	(5.998.696.864,00)	96,79%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.601.006.242	16.000.639.329	(600.366.913,00)	96,38%
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161,00)	36,08%
Belanja Tidak Terduga	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161,00)	36,08%
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446,00)	99,13%
Belanja Bagi Hasil	17.701.635.388	12.244.943.942	(5.456.691.446,00)	69,17%
Belanja Bantuan Keuangan	680.265.716.500	679.663.713.500	(602.003.000,00)	99,91%
SURPLUS/DEFISIT	- 147.822.467.547	36.073.429.910,62	183.895.897.457,62	0,00%

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (un audited).

Secara ringkas dapat disampaikan pula laporan realisasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.3
Target dan Realisasi APBD Kabupaten Brebes T.A 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
PENDAPATAN DAERAH	3.138.485.176.291	3.161.926.541.449,62	23.441.365.158,62	100,75%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.422.097.000	518.297.245.782,62	36.875.148.782,62	107,66%
PENDAPATAN TRANSFER	2.464.203.125.961	2.456.463.471.667,00	(7.739.654.294,00)	99,69%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.859.953.330	187.165.824.000	(5.694.129.330,00)	97,05%
 BELANJA DAERAH	 3.286.307.643.838	 3.125.853.111.539,00	 (160.454.532.299,00)	 95,12%
BELANJA OPERASI	2.086.950.229.960	1.991.889.019.204,00	(95.061.210.756,00)	95,44%
BELANJA MODAL	493.807.389.839	439.319.806.903,00	(54.487.582.936,00)	88,97%
BELANJA TIDAK TERDUGA	7.582.672.151	2.735.627.990,00	(4.847.044.161,00)	36,08%
BELANJA TRANSFER	697.967.351.888	691.908.657.442,00	(6.058.694.446,00)	99,13%
 SURPLUS/DEFISIT	 (147.822.467.547,00)	 36.073.429.910,62	 183.895.897.457,62	 0,00%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	181.492.467.547,00	181.498.742.702,57	6.275.155,57	100,00%



URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	LEBIH (KURANG)	%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.670.000.000	31.663.260.000	(2.006.740.000,00)	94,04%
PEMBIAYAAN NETTO	147.822.467.547	149.835.482.702,57	2.013.015.155,57	101,36%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	-	185.908.912.613,19	185.908.912.613,19	

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (un audited).

3. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan–kegiatan yang ditetapkan dalam kebijakan umum APBD diharapkan tetap konsisten dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan yang ada dan senantiasa dinamis dalam rangka mengakomodir dinamika masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dalam pengelolaan belanja daerah di antaranya dilakukan dengan prinsip efisiensi dan kehati–hatian serta mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Adapun permasalahan–permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan belanja daerah dan solusi yang ditempuh, yaitu :

- 1) Pengelolaan keuangan yang terdesentralisasikan di setiap OPD maka dituntut kesiapan SDM untuk melaksanakan pengelolaan keuangan pada setiap SKPD. Permasalahan yang dihadapi pada setiap SKPD adalah SDM yang ada belum sepenuhnya siap, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan sampai dengan pelaporannya. Oleh karena itu maka solusi yang ditempuh adalah dengan memberikan pemahaman / pembinaan kepada setiap jajaran pengelola keuangan SKPD, bahwa pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban adalah menjadi tanggung jawab masing–masing SKPD.
- 2) Kurang cermatnya beberapa SKPD dalam perencanaan penganggaran sehingga banyak pergeseran belanja yang harus dilakukan mendahului perubahan APBD. Hal ini akan berakibat adanya beberapa belanja / kegiatan yang belum bisa dilaksanakan dan harus menunggu perubahan APBD. Oleh



karena itu solusi yang dilakukan adalah pembinaan kepada pelaksana di SKPD agar lebih cermat dalam perencanaan penganggaran.

- 3) Program dan kegiatan yang tertuang dalam prioritas kegiatan pembangunan setiap tahun belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan, karena alokasi anggaran yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi harapan. Oleh karena itu selalu ditekankan kepada semua jajaran di SKPD agar dalam penganggaran lebih mengutamakan prioritas yang benar-benar diperlukan dan efisien dalam pemanfaatan anggaran.
- 4) Dana bantuan baik dari Provinsi maupun Pusat (Dana Alokasi Khusus) yang terprogram untuk biaya kegiatan daerah, sering mengalami perubahan atau bahkan tidak mendapatkan alokasi dana, oleh karena itu agar SKPD yang menerima dana bantuan Pemerintah Pusat / Provinsi agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat / Provinsi sehingga tidak akan mengganggu pelaksanaan suatu kegiatan / belanja daerah.
- 5) OPD sering melakukan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada anggaran dan SPD (Surat Penyediaan Dana), sehingga ketersediaan kas harus ditinjau ulang setiap saat dalam memenuhi kebutuhan SKPD. Solusi yang ditempuh adalah dengan mengadakan koordinasi dengan SKPD serta memberi penekanan agar penyerapan dana atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah direncanakan.
- 6) Adanya perubahan aturan baru terkait Bagan Akun standar dari permendagri No 13 ke Permendagri 90 menyebabkan adanya perubahan dalam hal aplikasi keuangan daerah terkait dengan akun baru dan butuh penyesuaian oleh masing-masing operator aplikasi keuangan daerah dalam hal ini operator SIPD dan SIMDA di setiap OPD, oleh karena itu harus selalu melakukan pembinaan kepada operator SKPD.



C. Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Anggaran pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan anggaran yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah.

Penerimaan pembiayaan tahun 2021 yang terdiri dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Kebijakan umum pembiayaan daerah tahun 2021 untuk pembayaran pokok utang sebesar Rp. 13.663.260.000,00.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah.

Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah dapat di lihat pada tabel III.3 berkaitan dengan Target dan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021. Anggaran penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 181.492.467.547,00 dengan realisasi sebesar Rp 181.498.742.702,57 terdiri dari penghematan belanja sebesar Rp. 140.106.001.315,00, dan sisa belanja lainnya sebesar Rp. 41.376.466.231,57 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebesar Rp. 40.616.205.863,67, sisa dana BOS sebesar Rp. 760.260.367,90. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp. 33.670.000.000,00 antara lain untuk penyertaan modal pemerintah pada BUMD sebesar Rp. 20.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 18.000.000.000,00 , dan Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp. 13.670.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.663.260,000,00.

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Brebes pada setiap tahun rata-rata mengalami kenaikan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan, baik dari pendapatan asli daerah maupun penerimaan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, hal ini juga seiring dengan perkembangan pembangunan yang



dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sedangkan pendapatan asli daerah belum dapat diandalkan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meskipun tiap tahun ada kenaikan, namun belum dapat memenuhi kebutuhan daerah yang semakin meningkat sedangkan belanja terus bertambah tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Maka dari itu kita harus lebih semangat untuk berusaha dan berupaya senantiasa meningkatkan pendapatan dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang dapat menghasilkan penerimaan pendapatan daerah, disamping itu kita juga mengevaluasi terhadap penerimaan retribusi yang belum mencapai target, sedangkan penerimaan daerah dari Dana Alokasi Umum (DAU) meskipun setiap tahun selalu naik, namun arah penggunaannya sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat utamanya untuk pembayaran gaji pegawai, disamping itu juga adanya dana pendampingan apabila kegiatan tersebut sumber dananya dari bantuan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2021 dalam aspek Pembiayaan Daerah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah senilai Rp. 16.275.156,00 perlu ditingkatkan lagi pada tahun berikutnya.
2. Adanya ketidakpastian penerimaan dari dana bergulir yang sudah berstatus macet sehingga tidak dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan
3. Pencantuman penerimaan pembiayaan daerah hanya bersifat transit dan harus dikeluarkan kembali pada pengeluaran pembiayaan.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah optimalisasi jenis-jenis pendapatan daerah dan lebih melakukan penghematan terhadap belanja daerah, sehingga SiLPA yang diperoleh dalam penerimaan pembiayaan betul-betul SiLPA murni.



Analisa Laporan Keuangan

Analisa ratio keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia atau untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam ukuran yang berbeda untuk perencanaan, pengendalian dan pengukuran fungsi manajemen.

Analisis ratio APBD pada dasarnya sama dengan analisis ratio pada perusahaan yaitu untuk melihat keuangan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan dimasa yang akan datang. Namun pada penjelasan dibawah ini hanyalah salah satu referensi bagaimana kita bisa menginterpretasikan laporan keuangan pemerintah daerah, karena dalam analisis laporan keuangan Pemerintah Daerah belum ada pijakan atau teori yang mapan dengan nama atau kaidah pengukuran yang standar.

1. Kemandirian

Ratio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi ratio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Ratio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi ratio kemandirian, berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Mengenai Ratio kemandirian dapat diukur persentasenya berdasarkan pendapatan asli daerah terhadap bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman, bahwa pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes tahun 2021 sebesar Rp. 518.306.190.572,62 sedangkan bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi tahun 2021 sebesar Rp. 2.456.463.471.667,00 sehingga persentase ratio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes terhadap bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi tahun 2021 adalah 21,10 %. Berdasarkan analisis ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam



melaksanakan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dana dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

2. Ratio Efektivitas

Ratio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Ratio efektivitas dapat diukur persentasenya berdasarkan Realisasi penerimaan PAD terhadap Target pagu anggaran. Untuk tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Brebes merealisasikan penerimaan PAD sebesar Rp. 518.297.245.782,62 sedangkan Target pagu anggaran sebesar Rp. 481.422.097.000,00 sehingga persentase ratio efektivitas PAD terhadap pagu anggaran adalah 107,66%.

Berdasarkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dapat dikategorikan efektif apabila ratio yang ingin dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, sehingga semakin tinggi ratio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Hal ini berarti ratio efektivitas yang dicapai pada tahun 2021 dinyatakan sudah efektif karena telah mencapai 107,66%.

3. Ratio Aktivitas

Ratio Aktivitas menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau yang sekarang disebut belanja tidak langsung dan belanja pembangunan yang berarti belanja langsung atau belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin (belanja tidak langsung) berarti persentase belanja investasi (belanja modal) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Adapun persentase perhitungan alokasi belanja pada APBD Kabupaten Brebes, kinerjanya diukur berdasarkan :

- 1) Ratio belanja Operasi terhadap APBD, Total belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.991.889.019.204,00 sedangkan Total APBD Tahun



Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 sehingga persentase kinerjanya adalah 60,61%.

- 2) Ratio belanja pegawai terhadap APBD, total belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 1.061.700.994.882,00 sedangkan total APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 sehingga persentase kinerjanya adalah 32,31%.
- 3) Ratio belanja modal terhadap APBD, total modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 439.319.806.903,00 sedangkan total APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 sehingga persentase kinerjanya adalah 13,37%.
- 4) Ratio Belanja Barang dan Jasa terhadap APBD, total belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 818.451.655.502,00 sedangkan total APBD sebesar Rp. 3.286.307.643.838,00 sehingga persentase kinerjanya sebesar 24,90%

4. Ratio Derajat Desentralisasi Fiskal

Ratio derajat desentralisasi fiskal atau otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal dapat diukur berdasarkan PAD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 518.297.245.782,62 terhadap total pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.138.485.176.291,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah persentase kinerjanya adalah 16,51%.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang–Undang 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “ Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (23), bahwa : “Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah “. Adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta adanya peralihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes T.A 2021 telah dilakukan pembenahan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.



3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Capaian Target Perjanjian Kinerja pada Visi Misi Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Pelaksanaan pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Brebes memasuki tahun keempat di tahun 2021 sesuai RPJMD 2017-2022. Berbagai program dan kegiatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Brebes tahun 2017-2022 yaitu ***“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”***, dengan 6 (enam) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Berikut capaian dari indicator tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan gambaran penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bsebes di Tahun 2021, yaitu :



1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.

**Tabel III.1
Capaian Sasaran Misi 1**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
1	Meningkatnya akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,54	12,02	12,03	12,04	12,25	12,05
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,36	6,19	6,2	6,21	7,15	6,22
	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,42	68,84	69,04	69,33	68,46	69,54

2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

**Tabel III.2
Capaian Sasaran Misi 2**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
1	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik bagi Masyarakat	Rasio jalan baik (%)	60	68,11	76,61	83,53	81	77,71
	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Cakupan akses air minum layak (%)	88,35	85,33	95,38	95,44	89,95	95,74
	Meningkatnya cakupan sanitasi	Cakupan akses jamban (%)	68,60	111,14	86,21	110,57	74,25	100
		Persentase kawasan bebas banjir perkotaan (%)	90	90	100	95	98	94,29
		Persentase	12,66	68,01	14,06	17,45	28,66	18,04



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
		Penanganan Persampahan (%)						
	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik (%)	60,00	61,03	63,55	73	64,04	74
	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni (%)	84,48	84,92	55,63	100	7,41	99,76
	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh (%)	93,16	110,44	75,19	29,85	18,64	38,25
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	- Indek Kualitas Air	42,3	52	36,31 6	30	47,6	50
		- Indeks Kualitas Udara	79,2	82	84.88 3	82,62	84,4	81,07
		- Indek Kualitas Tutupan Lahan	66,5	62	67.49 5	65	68,5	47,35

3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

Tujuan dari misi ketiga adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan

Tabel III.3
Capaian Sasaran Misi 3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Realisasi Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
3	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian (juta rupiah)	16.187.956	16.007.281,69	16.467.510	17.620.682	21.219.108	17.877,527
	Meningkatnya Kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta rupiah)	5.691.797	6.793.532,74	7.727.070	7.928.862	6.198.153	8.588,388
	Meningkatnya Kontribusi sektor	Kontribusi sektor	6.091.182	7.092.755,80	7.699.770	7.569.499	6.271.182	7.904,441



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Realisasi Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
	perdagangan	perdagangan (juta rupiah)						
	Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata (juta rupiah)	1.619.970	4.549.240	2.039.793	977.783	2.592.318	992,869
	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	Laju kenaikan investasi (%)	1	1,3	1,8	2,28	2	129
		Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA / PMDN) (milyar rupiah)	1.291	640,394	1.650,5	5.826	1.384	2.498
	Meningkatnya penguatan system inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	0	20	40	40	80	80
	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	65,35	67,03	7,27	66,65	70,73	63,97
		Rasio penduduk yang bekerja (%)	61,11	62,16	62,16	61,03	66,15	60.1

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.

Tabel III.4
Capaian Sasaran Misi 4

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM	76,83	79,9	78,66	79,39	77,75	80,38
	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Indeks nilai hasil evaluasi LPPD	Tinggi	Tinggi	Masih Dalam Proses	Masih Dalam Proses	Tinggi	Masih Dalam Proses
		Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	Masih dalam Proses
	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN	61,24	63,00	73,22	106,2	63,45	73,34



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	0	20	40	100	80	80
	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) (%)	100	100	89,96	100	100	100

5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.

Tabel III.5
Capaian Sasaran Misi 5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
5	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	9,93	16,10	94,35	51,36	68,49	68,49
	Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu (%)	9,93	16,10	94,35	51,36	68,49	68,49
	Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	21,2	42,12	94,35	51,36	68,49	68,49

6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak akan, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.



**Tabel III.6
Capaian Sasaran Misi 6**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
6	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	Harapan Lama sekolah (tahun)	11,58	12,02	12,03	12,04	11,82	12,05
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	4,86	6,19	6,2	6,21	4,96	6,22
		Usia Harapan Hidup (tahun)	70,33	68,78	69,04	69,33	71,04	69,54
		Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) (ribu rupiah)	6.378	9.890	10.238	10.058	6.455	24559
		Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	1,97	0,977	46,86	0,9935	2,17	1,37
		Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	26,49	41,99	46,86	13,173	28,67	36,03
		Persentase penanganan korban KDRT (%)	100	100		100	100	100
	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	Prevalensi anak bekerja (%)	0,0184	0	0	0	0,0182	0
		Rasio perkawinan anak (%)	0,44	0,43	0,14	0,0014	0,42	2,95
		Cakupan anak memiliki akte (%)	66,09	85	83,14	84	97,00	97,04
		Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya penanganan PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	32	40	92	100	70	100



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2017)	Capaian Tahun			Target 2021	Capaian 2021
				2018	2019	2020		
		Persentase PMKS penerima KUBE (%)	3	4	100	6	7	1

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Brebes berhasil mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Adapun Penghargaan tersebut sebagaimana terlampir.



B. Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan

Tabel III.7

Capaian Indikator Kinerja Program Pembangunan

B.1.DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pendidikan	Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter	1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik (%)	95	73.23	Belum Tercapai karena perubahan anggaran	1. Meningkatkan GKB dengan data DTS dari SIPBM 2. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. 3. Melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk menyampaikan kepada wali siswa agar putra putri menyelesaikan pendidikan minimal sampai SMA sederajat 4. Mengalokasikan anggaran bagi siswa GKB pendidikan formal SD/SMP/SMA sederajat 5. Sosialisasi kegiatan GBK dan meminta data ke desa dan FMPP
			2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik (%)	100	87.67	Belum Tercapai karena perubahan anggaran	
			3	Persentase Perpustakaan SD (%)	48	66.46	Tercapai	
			4	Persentase Perpustakaan SMP (%)	53	93.61	Tercapai	
			5	Persentase Ruang Komputer SMP (%)	75	77.07	Tercapai	
			6	Persentase Laboratorium SMP (%)	40	68.05	Tercapai	
			7	Rasio siswa per kelas SD	28	25.08	Belum tercapai karena penerimaan PPDB berkurang	
			8	Rasio siswa per kelas SMP	32	28.61	Belum tercapai karena penerimaan PPDB berkurang	
			9	Rasio Rombel per kelas SD	1	1	Tercapai	
			10	Rasio Rombel per kelas SMP	1	1	Tercapai	
			11	prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	120	19	Belum Tercapai karena belum ada penilaian	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							akreditasi	Hal tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk Mengembalikan orang dewasa tidak sekolah ke sekolah Non Formal/PKBM dan Mengusahakan tidak ada peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/SMA
			12	Indeks Paritas Gender Jenjang SD/MI (indeks)	1	1	Tercapai	
			13	Indeks Paritas Gender Jenjang SMP/MTs (indeks)	1	1	Tercapai	
			14	Jumlah penduduk angkatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)	250	465	Tercapai	
			15	Persentase Guru PAUD yang memenuhi kualifikasi SL/ D-IV (%)	65	50.45	Belum tercapai karena tidak ada anggaran untuk memfasilitasi guru PAUD sekolah lanjutan	
			16	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi SL/ D-IV (%)	100	94.51	Belum tercapai karena tidak ada anggaran untuk memfasilitasi guru SD sekolah lanjutan	
			17	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi SL/ D-IV (%)	100	95.02	Belum tercapai karena tidak ada anggaran untuk memfasilitasi guru SMP sekolah lanjutan	
			18	Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik (%)	40	13.35	Belum tercapai karena masih banyak guru pemegang sertifikasi belum terdaftar di data kelulusan sertifikasi	
			19	Persentase guru SD bersertifikat pendidik (%)	70	44.62	Belum tercapai karena masih banyak guru pemegang sertifikasi belum terdaftar di data kelulusan sertifikasi	
			20	Persentase guru SMP bersertifikat pendidik (%)	60	41.65	Belum tercapai karena masih banyak guru pemegang sertifikasi belum terdaftar di data kelulusan sertifikasi	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			21	Rasio Guru PNS SD Negeri/20 siswa	28	28	Tercapai	
			22	Rasio Guru PNS SMP Negeri/20 siswa	32	32	Tercapai	
			23	Rasio guru terhadap murid sekolah SD	20	21	Tercapai	
			24	Rasio guru terhadap murid sekolah SMP	20	22	Tercapai	
2	Pemuda dan Olahraga	-	25	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam melatih kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18	80	Tercapai	
			26	Jumlah pemuda kader kewirausahaan	65	245	Tercapai	
			27	Jumlah pembina pramuka penegak dan pandega yang mendapat fasilitas pelayanan kepemudaan	600	350	Belum tercapai banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena kendala PPKM berkelanjutan	
			28	Cakupan pembinaan olahraga (%)	55	73	Tercapai	
			29	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%)	50	75	Tercapai	
			30	Cakupan pembinaan atlet muda (%)	50	50	Tercapai	
			31	Jumlah atlet berprestasi (orang)	42	58	Tercapai	

B.2. DINAS KESEHATAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kesehatan	Peningkatan, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama kesehatan terutamanya prasarana dan sarana	1	Penurunan prevalensi BB pada anak dengan BB rendah	3,5	1,004	Tercapai	1. Meningkatkan cakupan ASI eksklusif, pemberian suplemen makanan (makanan tambahan), peningkatan keluarga sadar gizi dan peningkatan



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		kesehatan						pemanfaatan posyandu
			2	Penurunan prevalensi stunting	28	11,24	Tercapai	2. Peningkatan sarana dan prasarana PONE (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar), mengadakan pelatihan dan pembentukan tim PONED, serta peningkatan kemampuan bidan dalam kesiapsiagaan persalinan dan monitoring tumbuh kembang anak guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
			3	Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif (%)	84	64,98	Permasalahan : Pola asuh tentang ASI eksklusif dari keluarga masih kurang Saran : Memberikan penyuluhan/pendekat an kepada keluarga tentang ASI eksklusif	
			4	Cakupan pelayanan balita (D/S) (%)	89	73,7	Permasalahan : Banyak balita yang tidak datang ke posyandu pada masa pandemi Saran : Melaksanakan posyandu dengan proses yang ketat	
			5	Cakupan Keluarga sadar gizi (%)	78	78,49	Tercapai	3. Pemasangan media promosi Kesehatan lewat balitko
			6	Penurunan prevalensi anak gizi buruk (%)	0,5	0,41	Tercapai	4. Kampanye promosi Kesehatan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
			7	Cakupan desa baik garam (%)	100	73,3	Permasalahan : 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan garam beryodium; 2. Masih terdapat garam di pasar / toko yang menjual garam dengan kandungan yodiumnya rendah 3. Ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pematian garam	5. Sosialisasi dan advokasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 6. Telah dianggarkan anggaran insentif tenaga kesehatan

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							beryodium karena belum memiliki alat untuk tes yaitu iodine test. Solusi : 1. Penertiban penjual; 2. Bertungsiya Perda garam; 3. Peningkatan sosialisasi.	daerah melalui APBD murni dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan pada Tahun 2020. APBD murni insentif bulan Maret s.d Mei 2020 untuk nakes/lainnya yang belum mendapatkan insentif dari BOKT. Adapun BOKT digunakan untuk membayar insentif nakes bulan Maret s.d Juni untuk puskesmas dan Maret sd Juli untuk RSUD.
			8	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)	100	100	Tercapai	
			9	Cakupan balita naik BB (N/D) (%)	78	82,45	Tercapai	
			10	Bayi baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Diri) (%)	54	82,81	Tercapai	
			11	Remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah) (%)	29	56,54	Tercapai	
			12	Cakupan bayi dapat Vitamin A (%)	94	98,48	Tercapai	Dengan ujian
			13	Cakupan balita dapat Vitamin A (%)	94	96,56	Tercapai	Meningkatkan
			14	Cakupan ibu nifas dapat Vitamin A dan Fe 42 (%)	93	99,48	Tercapai	penanggulangan masalah gizi pada anak dan balita. Peningkatan pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau bermutu dan berkeadilan, dan Adanya perubahan perilaku masyarakat dari perilaku yang tidak sehat berubah ke perilaku yang sehat.
			15	Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium (%)	100	95	Permasalahan : 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan garam beryodium; 2. Masih terdapat garam di pasar / toko yang menjual garam dengan kandungan yodiumnya rendah 3. Ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pemantauan garam	1) Untuk urusan kesehatan, Meningkatkan cakupan ASI eksklusif, pemberian suplemen makanan (makanan tambahan),

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							beriodum karena belum memiliki alat untuk tes yaitu iodine test. Solusi : 1. Penertiban penjual; 2. Berfungsinya Perda garam; 3. Peningkatan sosialisasi.	peningkatan keluarga sadar gizi dan peningkatan pemanfaatan posyandu
16			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (11 T) /ANC Terpadu (%)		70	91	Tercapai	2) Peningkatan sarana dan prasarana PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar), mengadakan pelatihan dan pembentukan tim PONED, serta peningkatan kemampuan bidang dalam kesiapsiagaan persalinan dan monitoring tumbuh kembang anak guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)
17			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Persalinan Sesuai Standar (%)		79	99,6	Tercapai	
18			Prosentase Cakupan K1 (%)		100	100	Tercapai	3) Pemasangan media promosi Kesehatan lewat balihoo
19			Prosentase Cakupan K4 (%)		89	88,52	Permasalahan : Banyak K1 akses shg K4 tidak terpenuhi Solusi : 1. Melakukan kunjungan rumah, dan 2. Melalui penyuluhan ke calon pengantin	
20			Prosentase KB Aktif (%)		70	74,2	Tercapai	4) Kampanye promosi Kesehatan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
21			Prosentase Cakupan KF 1 (%)		74	99,68	Tercapai	
22			Prosentase Cakupan KF 3 (%)		68	96,14	Tercapai	5) Sosialisasi dan advokasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
23			Prosentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan terstandar (%)		78	99,6	Tercapai	
24			Prosentase persalinan oleh tenaga kesehatan (%)		94	99,95	Tercapai	
25			Prosentase komplikasi Kebidanan yang tertangani (%)		93	100	Tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			26	100	100	Tercapai	Sehat (GERMAS). Dengan tujuan untuk : 1) Meningkatkan penanggulangan masalah gizi pada anak dan balita 2) Peningkatan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau bermutu dan berkeadilan 3) Adanya perubahan perilaku masyarakat dari perilaku yang tidak sehat berubah ke perilaku yang sehat.
			Prosentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)				
			27	46	44,5	Permasalahan : Masyarakat langsung kontak kepada nakes Solusi : Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat (penyebarluasan informasi)	
			Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat (%)				
			28	88	100	Tercapai	
			Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh tenaga kesehatan (%)				
			29	88	100	Tercapai	
			Prosentase kunjungan neonatal pertama KNI (%)				
			30	89	98,4	Tercapai	
			Prosentase kunjungan neonatal lengkap KN3 (%)				
			31	94	100	Tercapai	
			Prosentase Neonatal Komplikasi tertangani (%)				
			32	94	90,2	Permasalahan : 1) Adanya pandemi menyebabkan kunjungan bayi ke posyandu menurun 2) Stok imunisasi dasar lengkap sempat kosong sehingga bayi tidak dapat melaksanakan imunisasi saat posyandu Solusi : 1) Posyandu dilaksanakan dengan proses ketat 2) Melengkapi stok imunisasi yg kurang	
			Prosentase kunjungan bayi (%)				

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			33	Prosentase Bayi BBLR tertangani (%)	100	100	Tercapai	
			34	Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	89	79,68	Permasalahan : Adanya pandemi menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun Solusi : Posyandu dilaksanakan dengan proses ketat	
			35	Prosentase Balita di MTBS (%)	76	100	Tercapai	
			36	Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut (%)	55	46,22	Permasalahan : Pada masa pandemi Covid19 lansia yang datang ke posyandu berkurang Solusi : Melaksanakan posyandu lansia dengan protokol kesehatan yang ketat	
			37	Prosentase PMT (Pemberian makanan Tambahan) Lansia (%)	40	98,5	Tercapai	
			38	Prosentase Posyandu Lansia (%)	70	98,5	Tercapai	
			39	Persentase puskesmas Santun Lansia (%)	100	100	Tercapai	
			40	Cakupan Desa Siaga Aktif (%)	82	100	Tercapai	
			41	presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)	80	100	Tercapai	
			42	Cakupan Akses Jamban Sehat (%)	95	100	Tercapai	
			43	Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (%)	92	100	Tercapai	
			44	presentase sarana air minum masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan (%)	95	95,76	Tercapai	
			45	persentase tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan	63	74,75	Tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			(presentase)				
46			AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun)	2,75	2,4	Permasalahan : Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi sehingga program lain belum dapat berjalan maksimal Solusi 1. Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen 2. Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas	
47			persentase penurunan kasus penyakit yg dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu. - Campak - Difteri	11	1(+) rubella	Tercapai. Hanya ditemukan 4 suspek campak, hasil laborat 3 negatif campak dan 1 positif rubella	
48			Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon	75	100	Tercapai	
49			Persentase pengungsi korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan	100	tidak ada pengungsian korban bencana pada th 2021	Tercapai	
50			Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS)	98	MR : 71,4 DT : 63,6 Td : 60,6	Permasalahan : 1) Adanya pandemi pelayanan imunisasi menjadi terhambat, 2) Beberapa puskesmas belum pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Anak Sekolah), 3) Keterbatasan tenaga pelaksana karena fokus pada pelaksanaan vaksinasi covid19 dalam rangka percepatan vaksinasi dan pelaksanaan 3T Solusi : 1) Puskesmas melakukan sweeping ke sekolah di hari yang lain (jadwal BIAS Ulang); dan 2) Koordinasi dengan guru untuk menjemput siswa yang tidak hadir pada saat sweeping.	
			51	Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jannah haji	85	Tidak ada pelaksanaan haji pada tahun 2021	Permasalahan : adanya pandemi covid-19 menyebabkan pemberangkatan haji di tahun 2021 ditunda sehingga kegiatan pemeriksaan dan pelacakan pasca haji tidak sepenuhnya dilaksanakan. Solusi : Jika tahun 2022 penyelenggaraan ibadah haji jadi dilaksanakan, maka kegiatan pemeriksaan haji akan dilaksanakan.	
			52	Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI)	100	92,9	Permasalahan : 1) Adanya pandemi	
			53	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan	93,5	72,3	pelayanan imunisasi	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			yang mendapat imunisasi dasar lengkap			menjadi terhambat,	
54			Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster)	70	DPT/HB Hib: 32,9% dan MR : 34,8%	2) Keterbatasan vaksin dari propinsi dan 3) Keterbatasan tenaga pelaksana karena fokus pada pelaksanaan vaksinasi covid19 dalam rangka percepatan vaksinasi dan pelaksanaan 3T (Test, Tracing, Treatment)	
						Solusi : Menyampaikan ke propinsi terkait keterbatasan vaksin yang ada di kabupaten	
						Tercapai	
55			Insiden Rate DBD	56	0,006	Tercapai	
56			Case Fatality Rate DBD	0,58	0,05	Tercapai	
57			Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate)	85	77,7	Permasalahan: 1. Pasien TB yang sedang pengobatan meninggal dunia 2. Pasien TB yang sedang pengobatan DO (Drop Out) karena ESO (Efek Samping Obat)	
						Solusi: Bekerja sama dengan lintas sektor dalam membantu melacak pasien mangkir	
58			Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resisten obat (% succes rate)	80	56	Permasalahan: 1. Pasien TB yang	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						sedang pengobatan meninggal dunia 2. Pasien TB yang sedang pengobatan DO karena ESO 3. Pasien TB MDR (<i>Multidrug Resistant</i>) menolak pengobatan dengan alasan biaya Solusi: 1. Bekerja sama dengan lintas sektor dalam membantu melacak pasien mangkir 2. Menyampaikan pada pasien terkait bantuan enabler untuk pasien TB MDR yang pengobatan	
			59	68	48,85	Permasalahan: 1. Pengurangan Jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun 2. Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi. Solusi: 1. Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen 2. Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik	
			60	85	2.325	Angka notifikasi semua kasus TB yg diobati (case notification rate / CNR) per 100.000 penduduk	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas	
			61	Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV (%)	70	65	Permasalahan : 1) Belum semua pasien Tb mau dites HIV; 2) Belum semua petugas Tb merujuk pasien nya untuk test HIV; 3) Koordinasi petugas Tb dan petugas HIV di layanan belum maksimal. Solusi : 1) Meningkatkan jejaring kolaborasi petugas Tb dan HIV; 2) Menekankan kewajiban bahwa semua pasien Tb harus diperiksa HIV; 3) Melengkapi pencatatan dan pelaporan di SITb (Sistem Informasi Tuberculosis)	
			62	Cakupan penemuan kasus TB resisten obat (absolut)	75	71	Permasalahan: 1. Pengurangan Jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun 2. Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi.	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Solusi 1. Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen 2. Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas	
			63 Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART)	80	74, 35	Permasalahan : 1. Kasus HIV yang ditemukan sudah dalam stadium 4 dan akhirnya meninggal dunia 2. Masih tinggi nya angka kasus HIV yang Loss to Follow Up (LFU) Solusi : 1. Bekerja sama dengan LSM pendamping untuk mengunjungi pasien dan memotivasi untuk kembali ke pengobatan	
			64 Cakupan Populasi beresiko yang diperiksa HIV	85	74, 85	Permasalahan: 1. Pengurangan Jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun 2. Seluruh SDM Puskesmas	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							1. Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen 2. Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas Solusi 1. Binte ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen 2. Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas	
			65 Angka Penemuan Kusta (per 10.000 penduduk)		1	0.52	Permasalahan: 1. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga mereka enggan utk datang berobat ke faskes 2. Masih adanya stigma buruk di masyarakat tentang pasien kusta 3. Kegiatan penemuan aktif masih jarang dilakukan Solusi : 1. Memberikan KIE ke masyarakat tentang pryakit kusta 2. Meningkatkan kegiatan penemuan secara aktif melalui kegiatan kampanye penemuan pasien kusta	
			66 Persentase penemuan Pneumonia Balita		60	35,65	Permasalahan: 1. Pengurangan jam	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke Puskesmas juga menurun 2. Masyarakat takut untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan apalagi dengan keluhan batuk pilek (takut kalau dicovidkan) 3. Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi. 4. Masih lemahnya system pencatatan dan pelaporan Program P2ISPA di Puskesmas 5. Belum semua kunjungan balita sakit ditangani dengan MTBS (Managemen terpadu Balita Sakit) 6. Belum semua petugas mampu melaksanakan kalsifikasi untuk penemuan kasus. Solusi : 1. Bimbingan Teknis Program tentang pencatatan dan pelaporan Program P2ISPA 2. On The Job Training (OJT) bagi petugas	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dalam pemeriksaaan untuk menemukan Kasus Pneumonia	
			67	Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	80	0,029	Permasalahan : - Kondisi Pandemi sehingga kegiatan mengumpulkan Masyarakat di hentikan - Pembatasan jam kunjungan ke Puskesmas yang menyebabkan turunya angka kunjungan ke Puskesmas - Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit (DDFR PTM) Tidak Menular masih rendah, dianggap tidak penting. - Karena sasaran kegiatan adalah orang sehat/ merasa sehat sehingga Kesulitan dalam pergerakan masyarakat untuk datang kef askes (Puskesmas dan jaringannya - Belum semua Puskesmas melaksanakan Pemeriksaan IVA Solusi : - Melaksanakan	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Koordinasi Lintas sektor mengerakkan lagi kegiatan Pemeriksaan IVA (Ibu PKK, dharna wanita, ibu bhayangkari, ibu Persit,)	
							2. Melaksakan KIE kepada masyarakat tentang Pentingnya DDFR PTM 3. Workshop Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan IVA untuk Tenaga Kesehatan terlatih	
			68	Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80	33,95	Permasalahan : 1. Kondisi Pandemi sehingga kegiatan di Posbindu dihentikan. 2. Pembatasan Jam Kunjungan ke Puskesmas yang menyebabkan turunya angka kunjungan di Puskesmas 3. Dana untuk Kegiatan untuk Posbindu banyak yang direfokusing untuk penanganan Pandemi 4. Di Desa/Kelurahan Belum ada petugas kesehatan misalnya perawat yang khusus mempunyai tupoksi Program P2PTM	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						5. Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit (DDFR PTM) Tidak Menular masih rendah, dianggap tidak penting. 6. Karena sasaran kegiatan adalah orang sehat/ merasa sehat sehingga Kesulitan dalam pergerakan masyarakat untuk datang kef asks (Puskemas dan jaringannya) untuk melakukan DDFR PTM. 7. Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Posbindu PTM/kelurahan 8. Belum semua Desa mempunyai Posbindu Kit 9. Keterbatasan logistik untuk pemeriksaan gula darah. 10. Belum semua Desa/kelurahan yang mempunyai Posbindu PTM mempunyai kader terlatih 11. Masih Lemahnya Sistem Pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Puskemas dan jaringannya.	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Solusi : 1. Melaksanakan Koordinasi Lintas sektor terkait (desa/kelurahan) untuk mengadakan Posbindu Kit dan menyediakan bahan habis pakai pemeriksaan Gula Darah 2. Melaksakan KIE kepada masyarakat tentang Pentingnya DDFR PTM 3. Melaksanakan Pelatihan kader Posbindu secara bertahap 4. Bimbingan Teknis untuk pencatatan dan pelaporan program	
			69	Cakupan minum obat filariasis (POPM/ pemberian obat pencegahan masal)	100	97	Permasalahan : 1. Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi 2. Sasaran penduduk minum obat filariasis banyak yg terkonfirmasi positif covid sehingga banyak yg enggan dan menolak minum obat kaki gajah 3. Banyak yg sudah masuk di sasaran popm namun tidak ke	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							daerah asal dikarenakan pandemi Solusi : Memberikan obat filariasis melalui kader pada saat posyandu atau dengan jemput bola yang diberikan langsung ke rumah-rumah	
			70	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)	20	34,21	Tercapai	
			71	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM	100	83,84	Permasalahan : Belum semua desa/kelurahan mempunyai Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular) Solusi : Kerjasama dengan lintas sektor terkait (desa/kelurahan) untuk mendirikan Posbindu PTM minimal 1	
			72	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	52,85	Permasalahan : 1) Koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal 2) Stigma masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes Solusi 1) KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan advokasi perangkat	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						desa saat kunjungan ke keluarga ODGJ pasung, 2) Sudah terbentuk TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) sehingga wadahnya lebih terkoordinasi penanganannya ODGJ lebih meningkat	
			73 Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	70,39	Permasalahan : 1. Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan di Puskesmas 2. Pengurangan jam kunjungan di Puskesmas yang menyebabkan angka kunjungan turun 3. Selama masa Pandemi Masyarakat takut berkunjung ke faskes Solusi : 1. Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas 2. Perlu diadakan petugas kesehatan di desa/kelurahan yang khusus menangani P2PTM	
			74 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	38,60	Permasalahan : 1. Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan kegiatan di Puskesmas 2. Pengurangan jam	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Kunjungan di Puskesmas yang menyebabkan angka kunjungan turun 3. Selama masa Pandemi Masyarakat takut berkunjung ke faskes Solusi : 1. Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas 2. Perlu diadakan petugas kesehatan di desa/kelurahan yang khusus menangani Prgram P2PTM	
			75	Cakupan pelayanan gigi bumil	100	95,03%	Permasalahan : 1) Kurangnya koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di puskesmas; 2) Kurangnya sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil; 3) Ibu hamil langsung pulang, tidak memeriksakan giginya karena alasan tertentu; dan 4) Masih kurangnya kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut yg baik bagi ibu hamil Solusi : 1) Koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							puskesmas; 2) Sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping burnil; 3) Meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut yg baik.	
			76	Cakupan pelayanan gigi pada anak pra sekolah	50	63,23	Tercapai	
			77	Cakupan UKGS (Upaya Kesehatan Gigi Sekolah)	80	88,81	Tercapai	
			78	Persentase desa total coverage PJS PK	100	100	Tercapai	
			79	Jumlah kecamatan yg memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	100	100	Tercapai	
			80	Persentase faskes yg memiliki ijin pelayanan kesehatan	100	100	Tercapai	
			81	Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	100	71,33	Permasalahan : Adanya perubahan regulasi terkait penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) menyebabkan Dinkes, DPMPTSP dan Industri Rumah Tangga perlu melakukan penyesuaian mekanisme perizinan	
			82	Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan	100	97,9	Solusi : Mengikuti mekanisme penerbitan SPP-IRT sesuai regulasi yang baru Adanya penonaktifan PBI JK (Penerima	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) oleh Kementerian Sosial menyebabkan banyak peserta PBI JKN yang menjadi tidak aktif kepesertaan JKN nya Solusi : Penambahan kuota utk kepesertaan JKN	
			83	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekes di Puskesmas yang tersedia	95	100	Tercapai	
			84	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100	100	Tercapai	
			85	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100	100	Tercapai	

B.3. RSUD BREBES

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kesehatan	Peningkatan, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Rujukan $\geq 80\%$	80	79,50	Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun di Bulan Juli 2021	Pertu dibangunnya Ramp di RSUD Brebes dalam waktu secepatnya mengingat fungsi yang sangat vital adanya Ramp di 5 lantai sebesar Rp. 5 Milyar. Mohon dianggratkan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022. Ramp merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam gedung Rumah Sakit yang berfungsi menghubungkan ruang – ruang dengan ketinggian
			2	Indeks kepuasan pelayanan keperawatan $> 80\%$	80	79,50		
			4	Indeks Kepuasan Pelayanan Penunjang $\geq 80\%$	80	79,50		
			5	Program Peningkatan Mutu Layanan	80	89,55		

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			Kesehatan Rumah Sakit				elevasi berbeda bagi penyandang disabilitas. Ramp ini yang membedakan antara gedung rumah sakit dengan gedung – gedung umum; Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternative bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga; Salah satunya untuk jalur evakuasi pasien pengguna bed, kursi roda, dan di khususkan apabila terjadi bencana. Telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan Ramp di Tahun 2022 bersumber dana BLUD RSUD Brebes.
							Pemenuhan Alat Kesehatan yang diperuntukkan untuk mendukung kinerja bagi dokter spesialis. Salah satunya adalah untuk Bedah Syaraf. Mohon dianggarkan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 Bagi RSUD Brebes Bedah Syaraf adalah spesialis yang sangat penting disamping RSUD Brebes sesuai tipe RSUD Brebes sudah tipe B, untuk Bedah Syaraf masih jarang sekali dan ada Dokter yang

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								bersedia di tempatkan di Brebes. Telah dialokasikan anggaran untuk penyediaan alat kedokteran Bedah Syaraf di Tahun 2022 bersumber dana BLUD RSUD Brebes

B.4. RSUD BUMIAYU

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kesehatan	Peningkatan, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Rujukan $\geq 80\%$	80	80,03	Tercapai	Mohon dianggratkan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022
			2	Jumlah Pendapatan (Rp. Juta)	35.64	30.211	Belum Tercapai	Ramp merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam gedung rumah sakit yang berfungsi menghubungkan ruang-ruang dengan ketinggian elevasi berbeda bagi penyandang disabilitas. Ramp ini yang membedakan antara Gedung rumah sakit dengan Gedung-gedung umum,
			3	Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien	30.679	26.810	Belum Tercapai	Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga
							Hanya tercapai 87%	Salah satunya untuk jalur

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								evakuasi pasien pengguna bed, kursi roda, dan dikhususkan apabila terjadi bencana
			4	Indeks Kepuasan Pelayanan Medis dan Rujukan >80%	80	80,03	Tercapai	
			5	Indeks Kepuasan Pelayanan Keperawatan >80%	80	80,03	Tercapai	

B.5. DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pekerjaan Umum dan Taru	Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan	1	Persentase Jumlah Alat Berat Siap Pakai (%)	80	92	Tercapai	Akan melakukan program penataan bahu jalan dan Sosialisasi ke warga setempat dengan tujuan untuk memperbaiki dan membersihkan bahu jalan yang masuk dalam rumija(Ruang Milik Jalan) agar bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan jalan dan memaksimalkan fungsinya. Memperbaiki sistem pemeliharaan jalan yang lebih tepat sasaran dan



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		hidup						mutu yang lebih baik dan menambah anggaran pemeliharaan jalan dengan tujuan agar kondisi jalan wilayah di brebes bisa ditingkatkan dan Perekonomian dan kegiatan masyarakat bisa meningkat seiring kondisi jalan yang semakin membaik
			2	Persentase Kesesuaian Perencanaan dengan hasil Pembangunan	100	100	Tercapai	
			3	Meningkatnya Kondisi jalan dan jembatan baik dan mantap (%)	70	76.07	Tercapai	
			4	Meningkatnya Kondisi infrastruktur perkotaan (gedung) (%)	30	15	Belum Tercapai, Perhub Bangunan Gedung sebagai turunan dari PERDA Bangunan Gedung baru tersusun.	
			5	Meningkatnya Kondisi infrastruktur Drainase (%)	82	80	Belum Tercapai, Ada saluran drainase yang belum dibangun yaitu di lahan jalan tol dan lingk ar utara.	
			6	Meningkatnya Kondisi infrastruktur Air minum (%)	88	95.74	Tercapai	
			7	Meningkatnya Kondisi infrastruktur perdesaan (%)	78	51.29	Belum Tercapai, Anggaran yang terbatas mengakibatkan perbaikan jalan hanya bisa mengcover sebagian kecil dari total kerusakan jalan porous.	

B.6. DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN TARU

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pekerjaan Umum dan Taru	Pemantapan infrastruktur	1	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan penatan Ruan dengan dokumen RTRW (%)	20	20	Tercapai	Akan dikoordinasikan dengan pengampu



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup						kewenangan pemerintahan provinsi Jawa tengah yaitu melalui dinas pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang provinsi Jawa tengah dan pemerintahan pusat yaitu melalui balai besar wilayah sungai(BBWS) pemali juana dan balai besar wilayah sungai (BBWS)cimanuk cisinggarung.
			2	Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	267.245	267.45	Tercapai	Akan dilakukan inventaris bangunan liar dan jembatan yang berdiri diatas aliran sungai.
			3	Presentase jumlah sungai yang berfungsi optimal (%)	27,08	28.3	Tercapai	Dinas PSDA TARU akan melakukan sosialisasi terhadap pemilik bangunan liar tersebut agar menaati peraturan pendirian bangunan sepanjang garis sepadan sungai

B.7. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perumahan rakyat	Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur infrastruktur	1	Rumah Tidak Layak Huni Yang tertangani (unit)	3.176	819	Permasalahan: Anggaran hanya untuk penanganan RTLH penangan RTLH bersumber dari DAK, Sementara tidak ada	Data RTLH di Kabupaten Brebes berdasarkan pada data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 jumlah 63.471, sedangkan berdasarkan DTKS (Data

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup					Alokasi dari Kab. Brebes. Solusi: Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran sendiri untuk penanganan RTLH.	Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2019 berjumlah 22.939, namun untuk pengambilan kebijakan pemerintah bersumber basis data DTKS seiring dengan penanganan penurunan angka kemiskinan, dari masing – masing sumber data pemerintah desa (pendes) sudah bisa mengakses data RTLH lewat SIMPERUM (Sistem Informasi Perumahan) dan mevalidasi data RTLH tersebut.
			2	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh (Ha)	69,02	100,86	Permasalahan: Lokus tidak berada di kawasan kumuh. Solusi: Pelaksanaan Kegiatan untuk menangani Kawasan Kumuh di wilayah brebes seharusnya lokus sesuai Sk Kumuh.	Sumber data RTLH yang berasal dari PBDT dan DTKS semuanya diikuti oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah kabupaten Brebes belum memiliki Singel Data RTLH, langka yang perlu diselesaikan dalam rangka pemutakhiran data RTLH
			3	Persentase tanah yang bersertifikat (%)	30	30,18	Tercapai	Gerakan dari pemdes lewat RT / RW untuk melakukan pendataan basis datanya dari Simperum dan divalidasi oleh pemdes lewat operator Simperum Desa. Dalam pembuatan singel data RTLH perlu koordinasi sinergitas antara data RTLH PBDT dan DTKS serta hasil verifikasi di lapangan lewat RT / RW. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2018, 2019 dan 2021 sudah melakukan validasi, verifikasi dan up date data RTLH di



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								Sinergitas dan terintegrasinya data Simperum dan e RTLH data singel data RTLH Kabupaten Brebes perlu dibangun dalam rangka memudahkan dalam kinerja capaian Garapan RTLH.

B.8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketertarikan Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Penyelenggaraa n tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Cakupan Pelaksanaan Patroli Trantibum (%)	52,94	52,94	Tercapai	-
			2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota (%)	100	100	Tercapai	-



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

B.9. BPBD

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Ketertarikan Masyarakat dan Perlindungan Umum	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Cakupan Desa Tangguh Bencana (%)	27,5	14	Ketertarikan anggaran sehingga target Desa Tangguh Bencana (Destana) belum bisa tercapai secara maksimal	Sesuai amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Bencana pasal 8 tertulis bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bencana adalah mengalokasikan dana penyelenggaraan bencana dalam APBD yang memadai
			2	Pengurangan Persentase korban terdampak bencana (%)	10	10	Tercapai	penanggulangan bencana, yaitu pra bencana,saat bencana, dan pasca bencana.
			3	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100	100	Tercapai	Menyadari akan pentingnya penanggulangan bencana, terutama untuk kabupaten brebes yang memiliki resiko tinggi bencana, setiap tahun BPBD selalu mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan di dalam penyusunan rencana kerja dengan mengakomodir ke-3 tahapan
			4	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%)	75	100	Tercapai	penanggulangan bencana. Akan tetapi, anggaran yang ditetapkan untuk BPBD kabupaten brebes belum dapat mencukupi kebutuhan untuk penanggulangan bencana
			5	Persentase Jumlah Sarana dan Prasaran yang Tertangani Pasca Bencana (%)	35	27,79	Minimnya anggaran sehingga target Sarana dan prasarana yang tertangani pasca bencana tidak dapat tercapai dengan maksimal.	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
B.10. DINAS SOSIAL

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Sosial	Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disabilitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya (%)	100	100	Target indikator dapat tercapai dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan semua tanpa hambatan sesuai rencana.	1. Sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pendataan dan pemutakhiran PMKS. Kegiatan telah dilaksanakan melibatkan stakeholder terkait meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihak kecamatan dan desa, serta Pendamping PKH dan TSKS.
			2	Presentase Meningkatnya Penyanggah Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)	80	82	Target indikator dapat tercapai dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan semua tanpa hambatan sesuai rencana.	2. Kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Bidang Penanggulangan Kemiskinan, meliputi : - Membuat Juknis Verifikasi dan Validasi Data Penanggulangan Kemiskinan. - Membuat Profil Kemiskinan Daerah - Menyusun Grand Design Penanggulangan Kemiskinan - Pembuatan Dokumen Hasil Verifikasi dan Validasi dan Sinkronisasi
			3	Presentase Meningkat Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar	85	100	Target indikator dapat tercapai dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan semua tanpa hambatan sesuai rencana.	
			4	Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	60	269	Target indikator dapat tercapai dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan semua tanpa hambatan sesuai rencana.	
			5	Juknis tentang Perlindungan Sosial (beasiswa pendidikan, jaminan kesehatan, rumah tidak layak huni dan program perlindungan sosial lainnya) (juknis) (%)	100	0%	Target indikator tidak tercapai, dikarenakan tidak ada anggaran / refocusing	
			6	Tersusunnya database	1	100%	Target indikator	



BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			penanggulangan kemiskinan(%)			dapat tercapai dikarenakan semua kegiatan dapat dilaksanakan semua tanpaada hambatan sesuai rencana.	Data Penanggulangan Kemiskinan Beberapa kegiatan sudah direncanakan dan diusulkan anggarannya tetapi belum memperoleh alokasi anggaran, meliputi : - Pelatihan Keterampilan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebesar Rp. 750.000.000,- - Verifikasi dan Validasi DTKS dan Pendataan PMKS sebesar Rp. 500.000.000,- 3. Agar program penangan/penanggulan gan kemiskinan makin berkualitas dan tepat sasaran, masih diperlukan penambahan anggaran, sehingga diharapkan dapat tercapai Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan Angka Kemiskinan dan Kabupaten Brebes. Dengan Tujuan untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data PMKS yang valid dan program penangan/penanggulan gan kemiskinan yang berkualitas dan tepat sasaran.



BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
B.11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	1	Persentase meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA) (%)	16	16	Tercapai	1. Sosialisasi Perda Kab. Brebes No.004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak 2. Memberikan Sosialisasi dan KIE mengenai kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan 3. Rencana Pembuatan Perda tentang Kabupaten Layak Anak Dengan tujuan untuk Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan, Penanganan Korban dan Pengembangan system data dan informasi anak serta Pencegahan Pernikahan Dini dan Remaja terhindar dari Triad KRR.
			2	Cakupan pembentukan forum anak desa dibanding jumlah desa (%)	40,4	40,40	Tercapai	
			3	Cakupan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak dibanding kasus terlapor (%)	100	100	Tercapai	
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	4	Profil KKBPK (Buku Profil)	1	1	Tercapai	
			5	Grand Design KKBPK (Dokumen)	1	1	Tercapai	
			6	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	69,45	69,58	Tercapai	
			7	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	71,05	71,1	Tercapai	

B.12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Lingkungan Hidup	Pemertapan infrastruktur	1	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	Persentase aduan masyarakat yang	1. Mengusulkan Kebutuhan armada pengangkut

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup				ditindaklanjuti tercapai 100%	1. Sampah 198 unit truk @ Rp. 400 juta = Rp. 79.200.000.000. 2. Mengusulkan tenaga kerja yang dibutuhkan 990 orang dengan rincian untuk honor @365 hari x 65.000 x 990 orang = 23.487.750.000. 3. Mengusulkan kebutuhan BBM 198 unit x 17 liter x 365 hari x Rp 5.150 = Rp. 6.327.238.500/tahun. 4. Anggaran pemeliharaan Sarpras Sampah 198 unit x 12 bulan x Rp.1000.000 = 2.376.000.000/tahun. Dengan tujuan sampah dapat diangkut secara optimal ke Tempat Pemrosesan Akhir.
			2 Luasan tutupan lahan yang terkonservasi (Ha)	10	20	Luasan tutupan lahan yang terkonservasi mencapai 20 Ha / 200% dari Target 10 Ha	
			3 Persentase Layanan Penanganan Persampahan Perkotaan (%)	75	70	Pencapaian Layanan Persampahan Perkotaan belum mencapai target yang telah ditentukan, hal ini dikarenakan beberapa keterbatasan dalam menunjang kinerja teknis dilapangan, keterbatasan tersebut antara lain: 1. Kurangnya Sarana dan Prasarana penunjang teknis dilapangan, seperti Jumlah Armada dan alat 2. penunjang yang terbatas Terbatasnya	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							jumlah tenaga kerja lapangan persamapahan dan, 3. Minimnya anggaran BBM untuk menunjang Operisoanal Armada persampahan	
			4	Persentase Pengurangan Sampah Perdasaan (%)	45	45	Persentase Pengurangan Sampah Perdasaan tercapai sesuai target 45%	
			5	Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran (%)	20	20	Persentase Penurunan jumlah indikasi pelanggaran telah tercapai sesuai target 20%	
			6	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	75	65	Target Persentase usaha/ kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH belum tercapai dikarenakan masih terdapat beberapa usaha yang belum melaksanakan pengolahan IPAL Secara Mandiri	

B.13. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Administrasi Kependudukan dan Cacatan Sipil	Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender,	1	Cakupan Penduduk yang memiliki KTP (%)	90,71	96,53	Tercapai	Menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam ayat

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		serta perlindungan dan pemenuhan hak anak						1 dan 2 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akte kelahiran. Karena itu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten brebes selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi, kependudukan berkomitmen selalu berusaha memenuhi kebutuhan pelayanan permohonan akte kelahiran dan KTP –el dengan inovasi pelayanan :
			2	Cakupan Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (%)	95	99,48	Tercapai	
			3	Rasio Penduduk 0 - 18 Tahun Memiliki Akte (%)	95	97,04	Tercapai	
			4	Database Kependudukan	Ada	Ada	Tercapai	a) Jemput bola ke desa desa b) Kerjasama dengan rumah sakit pemerintah desa/ sekolah c) Pelayanan online
			5	Perolehan ISO 9000	Ada	Tidak Ada	Tidak Tercapai	Blanko KTP-el tahun 2021 stok aman. Apabila ada isu bahwa blanko KTP-el habis/kosong itu adalah berita tidak benar. Masyarakat bisa mengecek di blakasuta dindukcapil kabupaten brebes. Untuk blanko dokumen administrasi kependudukan lainnya juga terjamin karena persediaan kertas HVS A4 80 gram sangat mencukupi. Dengan selalu aktif secara periodik dindukcapil kabupaten brebes mengajukan permintaan blanko KTP-el ke direktorat DUKCapil Kemendagri atau ke Dispermadukcapil provinsi Jawa tengah dikandung

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								maksud agar ketersediaan blanko KTP-el di Kabupaten Brebes dapat terjamin

B.14. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusifitas daerah	1	Terselenggaranya Kegiatan BP-SPAM di Kabupaten Brebes	150 desa	150 desa	Tercapai	1. a) Membuat dan melaksanakan program kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan kinerja Desa b) Membuat aturan / regulasi yang menjamin adanya program dan kegiatan sebagai acuan dan payung hukum bagi terlaksananya kegiatan tersebut Perlu adanya penambahan Anggaran untuk kegiatan Rp. 5.000.000.000
			2	Terselenggaranya Fasilitas Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	4 desa	4 desa	Tercapai	2. Sudah ada Regulasi Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local berskala desa
			3	Terselenggaranya Fasilitas Sosialisasi Pembinaan dan Monev pada pengalokasian bantuan yang telah ditetapkan	136 desa	136 desa	Tercapai	3. a) Rapat koordinasi dengan Camat dan Kasi PMD Kec. Dan Kepala
			4	Terselenggaranya Sosialisasi dan Pembinaan dan Monev pada Lokasi PNPW-MPd dan PPK Pasca, MP3KI dan PKKPM	15 Kec	15 Kec	Tercapai	
			5	Terbinanya kelompok UED, Lumbung Pangan dan Pasar Desa	17 Kec	17 Kec	Tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			6 Terbentuknya dan terbinanya kegiatan pengelolaan Bumdes	292 desa	292 desa	Tercapai	Desa dalam rangka pengawasan terhadap bantuan dana desa b) Rapat dengan Tenaga Ahli dan Pendamping desa c) Rapat koordinasi dengan Sekretaris Desa selaku verifikasi PKD (Pengelolaan Keuangan Desa) d) Sosialisasi Regulasi, Monitoring dan Evaluasi, Regulasi, Dana BLT DD e) Berkaitan minimnya anggaran di Dirpermapdes maka perlu adanya penambahan Anggaaran sebesar Rp. 5.000.000.000 4. Dengan adanya penambahan anggaran pada no. 3 maka Sosialisasi dan Money terhadap pelaksanaan Regulasi tersebut bisa dilaksanakan khususnya
			7 Tersedianya dokumen pendataan/ inventaris perkembangan desa dan kelurahan pendataan profil desa dan profil kelurahan	292 desa	292 desa	Tercapai	
			8 Terpenuhnya sebagai peserta pada Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional	1	0	Tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada surat undangan kegiatan dari Provinsi Jawa Tengah	
			9 Terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi Desa Untuk Masyarakat	Posyante kdes di 30 desa	Posyante kdes di 30 desa	Tercapai	
			10 Terlaksananya Bimtek Tata Kelola Keuangan Desa	17 Kec	17 Kec	Tercapai	
			11 Terlaksananya Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa	17 Kec	17 Kec	Tercapai	
			12 Terlaksananya Rakor Dana Desa Tingkat Kabupaten	17 kec	0	Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	
			13 Terlaksanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa	17 Kec	17 Kec	Tercapai	
			14 Terlaksanya sosialisasi pembinaan dan money pokjanal posyandu kecamatan	17 Kec	17 Kec	Tercapai	
			15 Terlaksananya pelatihan P2MBG	17 kecamatan	0	Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	
			16 Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan	17 kec	0	Tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran	
			17 Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Brebes	17 Kec	17 Kec	Tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			18	Peningkatan jumlah desa tertib administrasi	292 desa	292 desa	Tercapai	

B.15. DINAS PERHUBUNGAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perhubungan	Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	1	Peningkatan Kinerja Lalu-lintas	0,56	0,55	Belum tercapai Kinerja lalu lintas pada ruas Jl. Jenderal Sudirman Brebes Terdapat hambatan samping, melaksanakan rekayasa lalu lintas dan penyediaan perlengkapan jalan dan koordinasi dengan instansi terkait.	Saat ini tengah disusun kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten brebes dan pin tentang pemungutan, penyeroran paja penertangan jalan, pembayaran rekening listrik dan pengelolaan. Penerangan jalan umum pemerintah kabupaten brebes. Kesepakatan bersama ini melibatkan unsur opd yang terkait yaitu Bapenda. Bpkad dan dinas perhubungan dimana leading kesepakatan Bersama ini ada di bapenda karena terkait dengan pajak penerangan Jalan. Tujuan disusunnya kesepakatan bersama adalah:
			2	Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) (unit)	9.100	8.678	Belum Tercapai Masa pandemi dan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan penurunan kendaraan yang di uji	a. Menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli Daerah kabupaten brebes yang berasal dari pajak Penerangan jalan. b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah daerah. c. Melakukan pengawasan
			3	Rasio ijin Trayek (%)	9	9	Tercapai	
			4	Persentase sarana dan prasarana perhubungan (%)	45	45	Tercapai	
			5	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (%)	80	80	Tercapai	
			6	Persentase perlengkapan jalan yang terpelihara (%)	80	80	Tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dan penertiban lampu PJU Tidak resmi d. Meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik. e. Mencapai kesepakatan dan kesepakatan validasi data lampu PJU f. Menjamin kelancaran pendataan lampu PJU. Secara berkala perencanaan penganggaran rambu-rambu jalan dan Alat perlengkapan jalan lainnya terus dilaksanakan dalam dokumen Perencanaan anggaran dinas perhubungan kabupaten brebes dengan Menyesuaikan analisa kebutuhan juga usulan masyarakat. Tujuan ketersediaan rambu jalan dan alat perlengkapan jalan Lainnya untuk keselamatan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat

B.16. DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	-	1	Dokumen Master Plan TIK Kab. Brebes (Dokumen)	0	0	-	-
			2	Tersedianya Single Data Kabupaten	0	0	-	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Statistik		3	Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1	1	Tercapai	
			4	Tersedianya Buku PDRB Kabupaten Brebes	1	1	Tercapai	
			5	Jumlah sandiman (orang)	4	-	Tidak Tercapai	
							Tidak ada anggaran untuk kegiatan tersebut	
			6	Persentase Perangkat Daerah memiliki Website (%)	69,7	100%	Tercapai	
			7	Persentase Peningkatan Kunjungan Website Pemerintah Daerah (%)	20	442%	Tercapai	

B.17.DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	koperasi, usaha kecil dan menengah	Perkutan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan	1	Persentase Koperasi Aktif dan melaksanakan RAT (%)	43,44	62,17	Realisasi Tercapai Sesuai Target yang direncanakan. Jumlah Koperasi Sebanyak 387 Aktif = 193 Koperasi Tidak Aktif = 190 Koperasi Koperasi Baru = 4 Koperasi Koperasi yang melaksanakan RAT Sebanyak 120 Koperasi dari 193 Koperasi yang	1. Sesuai anggaran DPA tahun 2020 Bidang Usaha Mikro dilaksanakan Program Pengembangan Kemitraan dan Promosi Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan mengikuti : 2. Pameran dan Bazar tingkat Nasional di Jakarta 3. Pameran dan Bazar hari Jadi Brebes 4. Pameran dan Bazar Hari Kopeerasi 5. Pameran dan Bazar Hari

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja					aktif. Permasalahan : Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap aktivitas usaha koperasi dan anggotanya, penurunan volume usaha, selain itu adanya penurunan pendapatan sehingga SHU menurun dan kualitas pinjaman NPL meningkat. Solusi : Pemberian pinjaman harus selektif.	UMKM dan Pameran serta bazar umkm lainnya 6. Memfasilitasi dan mengadakan Pelatihan bagi UMKM berbasis teknologi Internet (untuk pemasaran online dengan Toko Pedla, Bukalapak, shopee dll) 7. Memfasilitasi dan mengikutkan segala pelatihan utk peningkatan SDM baik dari Kemendikop UKM RI maupun dari Balai Latihan Koperasi dan UKM Prov. Jateng yang terkait dengan pembinaan Pemastaran, Kemasn Produk, Perizinan UMKM, Persinan PIRT, Perizinan Halal dll 8. Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan Toko Modern atau toko retail. Beberapa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan : 1. untuk mempromosikan dan memasarkan produk unggulan UMKM dan agar dapat meningkatkan produktivitas /volume usaha serta lebih dikenal produknya di masyarakat luas. 2. Peningkatan volume pemasaran umkm melalui pemasaran Online 3. Peningkatan SDM UMKM
			2	Persentase Koperasi berpredikat sehat (%)	18,24	20,83	Realisasi Tercapai Sesuai Target yang direncanakan. Dari 120 Koperasi yang dinilai kesehatannya sebanyak 25 Koperasi yang mendapat Predikat Koperasi Sehat	
			3	Persentase Peningkatan Omset Pelaku Usaha Mikro (%)	3	3	Realisasi tercapai sesuai target yang direncanakan walaupun adanya refocusing anggaran tahun 2021. Kegiatan yang sudah terencana dilaksanakan secara terbatas. Permasalahan : Kegiatan pembinaan	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							dan monitoring evaluasi bagi pelaku usaha umkm dilakukan secara terbatas. Selain itu produktivitas usaha (Omset) pelaku umkm juga menurun akibat adanya covid-19.	dalam pengembangan usaha, baik melalui pelatihan perencanaan bisnis, Ketrampilan, maupun Pemasaran bagi UMKM Kemasan produk semakin baik dan menarik sertalegalitas usaha atau produknya lebih dipercaya konsumen Terjalin kerjasama kemitraan usaha dengan Toko Modern (Toko Almart Indomart dan PT Bukalapak)
							Solusi : Perlu adanya penambahan anggaran untuk pemberdayaan pelaku umkm. Untuk peningkatan pemasaran dan promosi produk umkm maka dilakukan kemitraan dengan Bukalapak, Alfamart, Toko Modern, dan difasilitasiya sentra Produk UMKM Lapakemane.	4. Untuk mengurangi permasalahan yang ada dilakukan dengan pembinaan dan monitoring evaluasi ke umkm setiap kegiatan yang telah dan akan dilakukan.
			4	Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin Usaha (%)	9	9	Realisasi tercapai sesuai target yang direncanakan, dikarenakan adanya program BPUM Bantuan produktif Usaha Mikro tahun 2021 yang dalam persyaratan dan ketentuan diwajibkan untuk melampirkan izin UMK dan SKU (Surat Keterangan Usaha dari Desa) maka Para pelaku usaha yang	Dengan dukungan anggaran di tahun 2021, maka Dinas Koperasi UM dan Perdagangan berkomitmen untuk lebih mengawasi kegiatan distribusi pupuk bersubsidi yang Nomor 518/039.A/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi kepada semua Distributor dan juga meniadwalkan kegiatan monitoring distribusi pupuk bersubsidi secara rutin tiap bulan ke Distributor dan juga KPL. Selain itu, setiap aktivitas yang menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan, akan kami tegur

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						mendatlar BPUM membuat perizinan sebagai syaratnya. Tahun 2021 untuk pelaku umkm yang mempunyai dan membuat izin IUMK dan SKU mencapai 104.602 umkm.	secara tertulis, dimana hal ini sudah kami laksanakan di tahun ini untuk distributor serta KPL. diawali dengan distribusi surat Kepala Dinas. Dengan tujuan terwujudnya 6 Tepat (Tepat Jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) dalam distribusi pupuk bersubsidi.
2	Perdagangan	Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja	6 (%) Persentase Pasar dalam kondisi baik	19,23	19,23	Realisasi tercapai sesuai target yang direncanakan walaupun adanya refocusing anggaran tahun 2021. Permasalahan : Kondisi bangunan pasar rakyat yang perlu diperbaiki, serta sarana dan prasarana dipasar yang sudah tidak memadai untuk menampung semua pedagang. Solusi : Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai untuk dilakukan revitalisasi dan rehab bangunan fisik pasar, sarana dan prasarana pendukungnya.	
			7 Persentase Alat Dagang Jolos Uji Metrologi (%)	10,8	26,80	Dari 3224 UTTP yang ditera/ tera ulang di tahun 2021, semua UTTP masih memenuhi persyaratan untuk digunakan. Permasalahan : Pelayanan tera/tera ulang belum optimal karena keterbatasan	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Solusi : diperlukan usulan penambajaan tenaga penera.	

B.18. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Penanaman Modal	Perkataan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja	1	Peraturan Daerah Penyelenggaraan Penanaman Modal (Ada/Tidak)	1	1	Tercapai	Program perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal melalui kegiatan program perencanaan penanaman modal pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal mempunyai tujuan meningkatkan jumlah investor. Sedangkan program pendanaan pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan modal dan sistem informasi mempunyai tujuan meningkatkan realisasi investasi. Diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan sekaligus juga dapat mengurangi angka kemiskinan di kabupaten brebes
			2	Dok Rencana Umum Penanaman Modal(RUPM) (Ada/Tidak)	1	1	Tercapai	
			3	Peningkatan jumlah Usaha Menengah Besar yang bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	4	2	Belum tercapai Karena adanya recofusing anggaran dan adanya	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlaku di pulau Jawa dan Bali.	
			4	Jumlah Kegiatan Investasi yang dipantau dan diawasi (Investor)	50	214	Tercapai	
			5	Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	90	80,1	Belum Tercapai	
			6	Dok Informasi dan Pelaporan Perijinan dan non perijinan (dok) (Ada/Tidak)	1	1	Tercapai	
			7	Persentase Pengaduan yang tertangani (%)	100	100	Tercapai	

B.19. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kebudayaan	-	1	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	28,17	29,56	Tercapai	Bupati untuk tidak menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten apalagi cenderung diinsa parwisata sekarang ini banyak kurang tanggap disistem dan pengelolannya karena bidang parwisata memiliki potensi yang bagus untuk menambah pad kabupaten brebes. Kekurang tanggap diinsusud dprd disebabkan pimpinan terdahulu menjangk pensun
			2	Persentase Kelompok Seni yang Terbina (%)	78,20	72,54	Belum Tercapai Dikarenakan Masih Terdampak Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Masih Belum Memperbolehkannya Pentas Kesenian Yang Bisa Menimbulkan Kerumunan Masyarakat	
			3	Jumlah Group Kesenian yang telah dibina (kelompok)	80	72	Belum Tercapai Dikarenakan Masih	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Terdampak Pandemi Covid 19 Yang Menyebabkan Masih Belum Memperbolehkannya Pentas Kesenian Yang Bisa Menimbulkan Kerumunan Masyarakat Sehingga Banyak Kelompok Kesenian Yang Gulung Tikar	
			4	Jumlah Seniman (orang) Penari	90	100	Tercapai	
			5	Pemain teater	250	350	Tercapai	
			6	Pelukis	125	100	Belum Tercapai	
2	Pariwisata	Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja	7	Kontribusi Sektor Pariwisata (guta)	2.700	1.160,52	Belum Tercapai Karena Masih Pandemi Covid 19 Sehingga Masih Banyak Tempat Wisata Yang Melakukan Buka Tutup Tempat Wisata (1.160.519,620)	
			8	Jumlah Kunjungan Wisatawan	900.000	278.891	Belum Tercapai Karena Masih Pandemi Covid 19 Sehingga Masih Banyak	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Tempat Wisata Yang Melakukan Buka Tutup Tempat Wisata	
			9	Rata-rata lama tinggal wisatawan	'1 - 5	2	Tercapai	
			10	Jumlah Obyek Wisata (OB) yang berkembang	3	6	Tercapai	
			11	Jumlah Hotel	25	13	Belum Tercapai	
			12	Jumlah Restouran / Rumah Makan	100	61	Belum Tercapai Karena Masih Pandemi Covid 19 Sehingga Banyak Rumah Makan/Restoran Yang Gulung Tikar	

B.20. DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perpustakaan	-	1	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang) (ratus)	14,5	4,39	Belum tercapai Layanan perpustakaan ditutup sementara selama 6 bulan dan kembali dibuka dengan jumlah pengunjung terbatas sesuai edaran ppkm prokes	1. Untuk tahun 2020 belum ada anggaran untuk pembangunan kearsipan berbasis digital. 2. Untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis yang terintegrasi berbasis digital tahun 2019 kita upayakan bantuan aplikasi SIKD dan SIKS ke ANRI tetapi sampai sekarang belum terealisasi 3. Syarat untuk pengelolaan kearsipan berbasis IT di perlukan 4 instrumen : - Pedoman Tata Naskah
2	Kearsipan	-	1	Meningkatnya jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku (unit kerja) (%)	89	50	Belum tercapai Karena refocusing anggaran dan pembertakuan PPKM (Pandemi Covid-19)	
			2	Prosentase Aparatur bersertifikat yang	15	14,05	Belum tercapai	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			melaksanakan pengelolaan kearsipan (%)			Perka ANRI No 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan mengubah level baku dari cukup menjadi baik	Dinas - Pedoman Klasifikasi Arsip - Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis - Jadwal Retensi Arsip Keempat instrumen tersebut sudah kami upayakan pembentukannya berupa Peraturan Bupati. Khusus untuk Jadwal Retensi/ Arsip sudah terbentuk 30 Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah namun kurang 3 urusan 4. Mengusulkan penambahan anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan digital senilai Rp. 250.000.000. Tujuan dari tindak lanjut tersebut antara lain : 1. Penghematan tempat,waktu dan sumber daya manusia 2. Untuk tahun 2022 mohon di upayakan anggaran untuk pembangunan kearsipan berbasis digital 3. Di bidang kearsipan mohon diupayakan adanya sumber daya manusia berbasis TIK/ sajana TIK 4. Adanya fasilitas perpustakaan digital di Kab. Brebes sehingga

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								dapat di akses oleh seluruh masyarakat

B.21. DINAS PERIKANAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kelautan dan Perikanan	Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja	1	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (ton)	3.591	3.675,47	Tercapai	Upaya-upaya yang dilakukan dinas perikanan untuk menjaga harga garam agar tidak jatuh (Stabil), antara lain : 1. Penyerapan garam rakyat melalui Washing Plant dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran 2. Pembangunan Gudang Garam Rakyat dengan tujuan menyimpan garam ketika harga rendah dan menjual ketika harga tinggi 3. Rencana penyerapan garam oleh ASN dengan dasar surat edaran dari Bupati
			2	Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (ton)	135	203,22	Tercapai	
			3	Produksi Perikanan Budi daya air payau (ton)	71.407	71.987,79	Tercapai	
			4	Produksi Perikanan Budi daya air tawar (ton)	3.189	3.289,90	Tercapai	Upaya-upaya yang dilakukan dinas perikanan untuk meningkatkan kesadaran nelayan untuk melindungi diri secara mandiri, antara lain : 1. Program Asuransi Nelayan terus disosialisasikan pada tahun 2021 melalui APBD
			5	Pendapatan Pembudidaya Air Payau (Ribu Rupiah./kapita/Tth)	45.520	91.587,21	Tercapai	
			6	Pendapatan Pembudidaya Air Tawar (Ribu Rupiah./kapita/Tth)	16.882	35.039,99	Tercapai	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			7 Tingkat Konsumsi Makan ikan (kg/kapita/tahun)	23	22,70	Belum Tercapai, Karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tingkat pembelian ikan dan konsumsi ikan menurun	Prov. Jateng, Kab. Brebes mendapat alokasi 5.029 nelayan kecil dan ABK perahu kecil yang diikuti dalam program tersebut
			8 Nilai Produksi olahan ikan per Tahun (Juta Rupiah)	150.590	132.957,10	Belum tercapai, Karena masih terkena dampak Covid-19	2. Surat Himbauan dari Dinas Perikanan kepada KUD Mina Saya Sari untuk meningkatkan jaminan kesehatan dan asuransi jiwa bagi nelayan anggota koperasi.
			9 Produksi Garam Krosok (ton)	60.000	1.458,72	Belum Tercapai, Karena faktor cuaca (Kemarau Basah) sehingga menyebabkan produksi dan kualitas menurun drastis dan jumlah petambak garam juga berkurang	Upaya untuk mengoptimalkan program dan kegiatannya dalam mengoptimalkan potensi yang dihasilkan dari kelautan dan perikanan darat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat pada khususnya dan daerah sekitarnya jika memungkinkan yaitu dengan optimalisasi peningkatan terus dilakukan dengan tetap menjaga kelestariannya. Tidak hanya terbatas di perairan laut, upaya penggalan potensi juga dilakukan diberapapa potensi perairan lainnya seperti waduk, embung, sungai, dan lain-lain. Peningkatan daya dukung stock sumber daya ikan baik di laut maupun perairan lainnya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan.
			10 Pendapatan Petani Garam - Kualitas I (Rupiah./Ha/Musim)	2.900	6.746,16	Tercapai	
			11 Pendapatan Petani Garam - Kualitas II dan III (Rupiah./Ha/Musim)	2.100	7.583,60	Tercapai	



BAB III HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
B.22. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Perkataan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga keriatenaga kerja	1	Cakupan Pembinaan Kelompok Tani (%)	48	85	Pembinaan target 48 dan terlaksana di 51 kelompok, dan di 51 kelompok itu yg naik kelas hanya 48 kelompok saja. Yg 3 Tidak naik kelas.	Untuk urusan Pertanian Pada bulan Maret 2021 telah dibagikan Kartu Tani sejumlah 35.979 yang merupakan tindak lanjut atas pendataan tahun 2020, sehingga total Karten yang telah terbagi kepada petani yaitu 182.549 buah. Kebijakan Program Kartu Tani pada tahun 2021 juga telah didampingi dengan e-VERVAL. Terkait ketersediaan stok dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan.
			2	Produktivitas tanaman padi (kw/ha)	56.00	59,52	Target terpenuhi termasuk perbandingan produktivitas padi tahun 2021 dengan 2020 juga mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena adanya program IP 400 dan dukungan anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	Prinsip 6 tempat (Tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat dosis, and tepat mutu) dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh petani yang berhak secara presisi (by name by address yang dapat mendukung peningkatan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
			3	produktivitas tanaman jagung (kw/ha)	66,75	73.00	Kenakan produktivitas pada jagung karena adanya bantuan benih jagung hibrida	Tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tahun anggaran 2021, antara lain :
			4	produktivitas tanaman kedelai (kw/ha)	13.86	19.50	Kenakan provitas tanaman kedelai karena ada bantuan benih kedelai dan pupuk di beberapa kecamatan	1. Sampai Desember 2021 jumlah Kartu Tani yang terbagi di Kab.Brebes
			5	produktivitas tanaman kacang hijau	11.45	13.30	Kenakan provitas	164.560 (96.5%) dari jumlah

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
			(kw/ha)			tanaman kacang hijau karena adanya bantuan sarana dan prasarana pendukung	tersebut telah digunakan sebanyak 83.871 (51%) .Sementara serapan pupuk bersubsidi tahun 2021 dibandingkan alokasinya perjenis pupuk (ton) sbb : - UREA : 26.321 (69%) - sp-36 : 3.897 (67%) - ZA : 5.011 (77%) - NPK : 14.927 (89%) - ORGANIK : 7.891 (86%) Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan.
			6 produktivitas hortikultura sayuran (bawang merah) (kw/ha)	101,50	109,9	Kenaikan provitas dikarenakan penurunan luas panen yang lebih tinggi dibanding penurunan produksinya, sehingga meskipun produksi tahun 2021 lebih rendah dibanding tahun 2020 tetapi provitasnya masih lebih tinggi. penurunan luas panen dikarenakan beberapa faktor antara lain : rendahnya serangan opt tetapi harga panen yang lebih rendah sehingga petani beralih ke tan jagung manis,	2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes telah melakukan realokasi sebanyak 5 kali sebagai upaya memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang dinamis akibat perubahan Luas Tambah Tanam Bersama ini kami sampaikan adanya program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Brebes menjadi Tangguh dalam memproduksi tanaman kebutuhan pokok : a. Program IP 400 (padi umur pendek) pada Kecamatan Ketanggungan, Banjarnharjo, Kersana dan Tonjong dengan luas tanaman 262 Ha. b. Program padi bio fortifikasi
			7 produktivitas hortikultura buah buahan (mangga) (kw/ha)	113,02	191,35	menurunnya provitas di komoditas mangga karena terjadi di pengaruh cuaca curah hujan di bulan oktober s/d desember serta beberapa serangan lalat buah	
			8 produktivitas perkebunan (kopi) (kw/ha)	222,85	645,89	Kenaikan provitas karena adanya bantuan bibit kopi di 2 kecamatan paguyangan dan salem jenis kopi robusta dan arabika	
			9 Indeks Pertanaman	181.83	217,00	Karena ada program IP 400 dan menurunnya serangan opt serta	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							menurunnya puso akibat Damak Perubahan Iklim (DPI) Target berubah sesuai di DPPA	/Inparizinc yang ternyata sangat baik untuk pencegahan stunting c. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetic tanaman melalui : - Peningkatan desa mandiri benih - Peningkatan produksi benih bersertifikat - Pengembangan Kawasan komoditas pokok UPSUS PAJALE yang diperpanjang sampai 2021 Tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah - Agar ketersediaan dan ketercukupan pangan kebutuhan pokok semakin baik - agar luasan pengembangan tanaman pajale dan kacang hijau bertambah dan luas lahan pengembangan Kawasan komoditas buah dan sayur bertambah. Tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tahun anggaran 2021 - Program IP 400 pada kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Kersana dan Tonjong dari awal rencana 262 Ha

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Pangan	Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan	10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Susenas)	76	84.9	Target tercapai namun skor poa pangan harapan dari tahun sebelumnya menurun, ini di sebabkan kondisi tahun 2021 masih dianda pandemi virus covid 19 yang	Pada urusan pangan Berdasarkan laporan capaian kinerja skpd komoditas kebutuhan pokok pangan melebihi target untuk padi, kedelai, kacang hijau, kecuali 2. Padi bio fortifikasi yang merupakan jenis padi pencegaah stunting sudah berhasil ditanam dan dipanen pada kecamatan Burnitayu, Songgom dan Tonjong seluas 1000Ha. 3. Untuk desan mandiri benih tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran untuk pemulihan ekonomi, Untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, buah dan sayur adalah sebagai berikut : - Luasan pengembangan kawasan jagung 50 Ha - Luasan pengembangan kawasan jagung 25 Ha - Luasan pengembangan kawasan kedelai 25 Ha - Luasan pengembangan kawasan manggis 2 Ha - Luasan pengembangan kawasan pisang 2 Ha UPSUS PAJALE 2021 all: 1. Penguasaan bibit padi ramah lingkungan dan padi supergenjah untuk IP 400 2. Pengadaan jagung hibrida,reguler dan IF



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		n digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja					menyebabkan perekonomian (daya jual beli) masyarakat kurang konsumsi bahan pangan umbi umbian cenderung masih jauh dari standar pola konsumsi gizi yang baik, dan konsumsi pangan hewani, sayur dan buah cenderung menurun.	jagung yang tidak memenuhi target. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya semua komoditas tersebut mengalami kenaikan produksinya. Tindak lanjut yang akan dilakukan agar semakin tercukupi dalam pasokan komoditi kebutuhan pokok adalah dengan :
			11 (Reguler)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Reguler)	88,2	78,4	Untuk skor pola pangan harapan reguler masih belum bisa memenuhi target tetapi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Belum maksimalnya target kinerja skor PPH reguler disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang masih belum selesai terlebih lagi adanya gelombang ke 2 serangan covid-19 pada akhir pertengahan tahun 2021.Meski begitu skor PPH menurut susenas sudah mencapai target skor	Hal tersebut bertujuan untuk : 1. Meningkatkan nilai tambah dari hasil komoditas produk tanaman pangan lokal 2. Mencegah terjadinya harga anjlog pada saat panen raya dan kelangkaan kebutuhan pokok pada saat gagal panen atau kemarau dan banjir 3. Mencegah terjadinya pengadaan gabah dari luar Tindak lanjut yang sudah dilakukan pada tahun anggaran 2021, meliputi : 1. Pemberian Bantuan alat pasca panen tanaman

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								pangan lokal (untuk poktan) seperti : a. 7 unit PTM power threaser multi guna untuk padi jagung kedelai (alat perontok) yang bersumber dari Hibah ABPN pusat b. 2 CSM corn sheller mobile /perontok jagung multi (besar) yang bersumber dari hibah APBN pusat c. 4 unit PTM power threaser multi guna untuk padi jagung kedelai (alat perontok) brigade dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jateng d. 5 unit CSM corn sheller mobile /perontok jagung multi (besar) brigade dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jateng e. 1 paket bantuan hibah alat pengolahan hasil tanaman pangan (untuk KWT) yaitu : - 1 unit alat parut serba guna - 4 unit kompor gas - 2 unit perajang umbi-umbian - 3 unit Spiner / peniris minyak - 2 unit timbangan digital - 1 unit Vacuum sealer 2. Pembangunan Lumbung pangan 1 unit berupa RMU, lantai jemur dan mesin RMU

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								3. Kejasama Pemkab Brebes dengan Bulog melalui kegiatan SERGAB untuk pengadaan beras premium bagi ASN di wilayah Kab.Brebes

B.23. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pertanian	Perkataan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja	1	Penurunan angka kematian ternak besar, ternak kecil dan unggas (Ekor)	2.000	2.500	Target Penurunan Angka Kematian sangat tercapai	Usulan Pokir Untuk Kelompok Tani Ternak (KTT) dalam bentuk Bantuan Keuangan dengan total senilai Rp. 420.000.000,- Dengan Perincian sebagai berikut : 1. Kelompok Peternakan Kambing Duku Caruban Purodadi, Tonjong senilai Rp. 10.000.000,- 2. Kelompok Ternak Sejahtera senilai Rp. 10.000.000,- 3. KTT Domba Barokah senilai Rp. 35.000.000,- 4. Kelompok Tani Ternak Domba Langgeng senilai Rp. 20.000.000,- 5. Kelompok Tani Ternak KTSM Alhas senilai Rp. 70.000.000,- 6. Kelompok Tani Ternak Moga Berkah senilai Rp. 25.000.000,-
			2	Penurunan kasus penyakit hewan menular (Ekor)	4.000	5.000	Target Untuk Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Tercapai mahkan Melebihi target	
			3	Peningkatan keamanan konsumsi bahan asal hewan dan produk asal hewan (Ekor)	22	22	Target Produk Asal Hewan Tercapai	
			4	Penurunan jumlah pemotongan betina produktif (Ekor)	626	726	Target Untuk Penurunan Jumlah Pemotongan Betina Produktif	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							Tercapai Bahkan Melebihi target	7. Kelompok Tani Ternak Sapi Bintang Jaya senilai Rp. 40.000.000,-
			5	Peningkatan sarana prasarana peternakan dan kesehatan hewan (Unit)	16	16	Target Peningkatan Sarpras Tercapai	8. Kelompok Tani Ternak Sapi Enggal Makmur senilai Rp. 40.000.000,-
			6	Peningkatan sarana prasarana pendukung peternakan dan kesehatan hewan (Unit)	44	38	Belum Tercapai	9. Kelompok Tani Ternak Sapi Gema Mandiri senilai Rp. 40.000.000,-
			7	Peningkatan kualitas dan kuantitas jenis produk olahan asal ternak (Jenis)	6	5	Belum Tercapai	10. Kelompok Tani Ternak Sapi Suka Makmur senilai Rp. 40.000.000,-
			8	Peningkatan jumlah kelompok yang melaksanakan pengolahan limbah peternakan (Kelompok)	6	5	Belum Tercapai	11. Kelompok Tani Ternak Sapi Wani Rekasa senilai Rp. 50.000.000,-
			9	Jumlah kelompok ternak berprestasi tingkat provinsi	14	13	Belum Tercapai	12. Kelompok Tani Ternak Surya Gemilang senilai Rp.40.000.000,-
			10	Jumlah kelompok ternak berprestasi tingkat nasional	8	8	Target Pembinaan tercapai	Penataan Kawasan ternak sapi di Marbaya Sudah diusulkan anggaran kegiatan penataan kawasan padang penggembalaan marbaya melalui sumber dana APBD kabupaten, APBD prov dan APBN.
			11	Bibit ternak unggul yang dihasilkan (Ekor)	1.700	1900	Target bibit unggul yang dihasilkan Tercapai	
			12	Meningkatnya Jumlah ternak yang mendapat SKLB	600	550	Belum Tercapai	
			13	Meningkatnya kuantitas pakan ternak	0	266	Target Kuantitas Pakan Tercapai	Terkait sapi Jabres yang dijadikan ikon ternak sapi di Kabupaten Brebes Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan sapi jabres yaitu dibuat pagar penyekat pada Lahan Padang
			14	Jumlah kelompok yang melaksanakan manajemen peternakan (Kelompok)	25	20	Belum Tercapai	Penggembalaan ternak penyelesaian ternak penggembalaan serta penambahan pakan konsentrat.



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
B.24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Tenaga Kerja	Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja	1	Persentase Tenaga Kerja Terlatih (%)	23	63,13	Tercapai	1. Penjadwalan ulang pelatihan pelatihan dan pameran sesuai protokol kesehatan dan menyesuaikan dengan kegiatan di era new normal pelatihan diselenggarakan secara terbatas pesertanya bergantian sesuai jadwal . pergeseran anggaran pelatihan dan pameran yang tidak dapat dilaksanakan pada kegiatan ini. Dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah kinerja yang rendah dengan perubahan/pergeseran anggaran yang tidak bisa dilaksanakan karena covid-19 menjadi kegiatan lain yang bisa dilaksanakan sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat maksimal. 2. Sosialisasi dan monitoring pencegahan penyebaran covid-19 diperusahaan dan membuat surat edaran nomor 560/440 tanggal 3 juni 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 ditempat kerja, dengan tujuan untuk Menyelesaikan masalah mengindari PHK karena pandemi dengan tetap berproduksinya perusahaan sesuai era new normal.
			2	Prosentase Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja (%)	8	57,50	Tercapai	
2	Perindustrian	Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital economy, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja	3	Prosentase Pertumbuhan industri Logam, Sandang dan Aneka (%)	0,55	140,00	Tercapai Terdidi pertumbuhan industry sebesar 1,32% yang disebabkan karena adanya bantuan natura dai provinsi jawa tengah kepada pelaku IKM sehingga memunculkan IKM baru	
			4	Prosentase Pertumbuhan industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (%)	1,07	162,2	Tercapai Terjadi pertumbuhan industri sebesar 2,83% yang disebabkan karena	

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							adanya bantuan natura dari provinsi jwa tengah kepada pelaku IKM sehingga memunculkan IKM baru	3. Mengajukan surat permintaan kerja sama ke Dinas Perikanan dengan tujuan untuk penjiwaan kerja sama pelatihan ketrampilan tenaga ahli perikanan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah masih kurangnya kompetensi tenaga kerja sektor perikanan.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH



B.25 - B.32. SEKRETARIAT DAERAH

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
Administrasi Pemerintahan (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat Daerah)							
25	Bagian Tata Pemerintahan	Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1 Persentase Jumlah Kecamatan ang pelaksanaan penyelenggara Administrasi Kecamatan da PATEN berjalan baik	100	100	Tercapai	-
26	Bagian Perekonomian	-	2 Peningkatan laba BUMD Kab. Brebes (Miliar Rp)	12,00	16,295 M	Tercapai PT BPR BKK Jateng belum bisa setor deviden ke Kasda karena untuk menutupi kerugian tahun-tahun sebelumnya	a. Bagian Perekonomian melakukan pembinaan dengan melihat laporan keuangan TA. 2020 sebagai tolak ukur kinerja terutama pada Rasio BOPO yang mencapai 107,04% (tidak sehat) dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam operasional lebih besar dan pendapatan yang diterima (inefisiensi) dan Rasio ROA yang mencapai 0,96% dalam hal ini Direksi belum bisa mengelola asset perusahaan dalam menghasilkan laba dan membina tata kelola yang baik. b. Adanya komitmen Direksi dalam upaya perbaikan yaitu meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								c. Atas saran Bapak Sekretaris Daerah, untuk memantau perkembangan Kinerja Perumda sampai Triwulan II Tahun 2021
27	Bagian Administrasi Pembangunan	-	3	Persentase Ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasai fisik dan keuangan (%)	100	100	Tercapai	-
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	4	Peningkatan Prestasi bidang keagamaan dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)	10	0	Pelaksanaan MTQ provinsi tidak terlaksananya karena adanya pandemic Covid-19	Terkait masalah pendataan guru ngaji, imam masjid dan mushola setiap tahun sebelum dilaksanakan pembinaan Bagian Kesra Seida selalu melaksanakan verifikasi data, yang melibatkan Kesis Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah, Kasi pelayanan (Lebe). Namun karena terbatasnya anggaran yang ada maka usulan desa tidak dapat terakomodir seluruhnya.
			5	Penurunan Biaya Non KBIH Kab. Brebes	275.000	0	Adanya pembatalan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji Indonesia dari Kemenag sehingga penyelenggaraan ibadah haji tidak dilaksanakan	
								Sedangkan atasketerlambatan pelaksanaan pembinaan guru ngaji dll disebabkan karena adanya aturan yang melarang terjadinya kerumunan massa yang dikawatirkan akan timbul penyebarana Covid-19, di samping itu ada juga kebijakan refocusing pada tahun anggaran 2020 walaupun ketika adaperubahan APBD 2020 anggaran gurungajidll dikembalikan lagi sehingga pelaksanaan guru ngaji dll

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								setelah dietakapkannya APBD perubahan 2020
29	Bagian Hukum	-	6	Peningkatan peringkat untuk penghargaan Kab/kota peduli HAM Tingkat Nasional	5	5	Tercapai	Meningkatkan Optimalisasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan peningkatan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa dengan tujuan agar seluruh kebijakan produk hukum didapat diketahui oleh masyarakat dikabupaten Brebes.
		-	7	Peningkatan peringkat Tingkat Provinsi dalam penilaian jaringan data dan informasi hukum/ JDIH	15	20	Tercapai	
30	Bagian Organisasi	Peningkatan penyelenggaraa n tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	8	Persentase OPD yang dievaluasi kelembagaan dan kinerja (%)	80	80	Tercapai	-
			9	Persentase OPD yang mempunyai dokumen inforjab (%)	40	40	Tercapai	-
31	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	10	Persentase proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil (%)	99	100	Tercapai	1. Peningkatan Kapasitas server LPSE 2. Jika implemetasi seluruh pengadaan langsung dilakukan secara eletroniik dinarapkan adanya pelatihan dn bimbingan teknis bagi penyedia jasa 3. Unit Kinerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) dapat menyajikan dan melaksanakan anggaran penghematan dari seluruh proses pemilihan, tendr da pengadaan langsung elektroik

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
								(e-PL)
32	Bagian Umum	-	1.1	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	Tercapai	-

B.33. SEKRETARIAT DPRD

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
Administrasi Pemerintahan (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan : Sekretariat DPRD)							
33	Sekretariat DPRD	-	1 Jenis Dokumen Kehumasan dan Protokolier(Dokumen)	16	16	- Permasalahan : untuk fasilitasi kegiatan pengamanan demo skala besar yang tidak bisa di prediksi, adapun situasi di Kabupaten Brebes tahun ini cukup kondusif, sehingga belanja pengamanan demo skala besar tidak dibelanjakan dan penyerapan anggaran kurang maksimal. - Solusi : Pengalihan anggaran untuk belanja jamuan lain.	-
			1 Dokumen Pokok Pikiran DPRD (Dokumen)	2	2	- Permasalahan : Alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang terbatas. - Solusi : Adanya kebijakan dari stake	-

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							holder terkait agar alokasi waktu yang disediakan bisa mencukupi apalagi dengan sistem pelaporan kegiatan yang terintegrasi langsung dengan pemerintah pusat yang sering terkendala di sistem jaringan dan komputernya.	
			2	Dokumen Hasil Pengawasan Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	2	Pada awalnya pengawasan pembangunan daerah termasuk ke dalam kegiatan Hearing (Dengar pendapat dengan masyarakat), namun karena adanya refocusing dari anggaran semula Rp.638,681.000 menjadi Rp.187,090,500 atau berkurang sebesar Rp.451,590.500, sehingga kegiatan Hearing menjadi kurang optimal untuk dilaksanakan. Adapun terdapat SILPA dalam kegiatan ini dikarenakan terbatasnya waktu dalam pelaksanaannya dan agenda yang padat.	-
			3	Jumlah Rancangan Peraturan Perundang undangan yang difasilitasi	15	15	Permasalahan : 1. Kurangnya ASN baik dari Kualitas maupun Kuantitas yang mengetahui tentang penyusunan produk	-

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							2. Proses harmonisasi dan fasilitasi Raperda yang terpisah sehingga harus melakukan perubahan berkali-kali hukum Solusi: 1. Pembahasan naskah akademik di badan pembentukan di badan pembentukan perda lebih intensifkan dengan menghadirkan menghadirkan penyusun naskah akademik 2. Penimpinan panitia khusus pembahasan raperda dikusertakan pada fasilitasi maupun evaluasi raperda di provinsi	
			4	Jenis Bintek Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD yang dilaksanakan	11	11	Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : - Bintek reguler sebanyak 4 (empat) kali - Bintek fraksi 1 (satu) kali - Bintek gender 2 (dua) kali Permasalahan : Merujuk pada Permendagri pelaksanaan bintek	-

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	INSTANSI	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							reguler dilaksanakan sebanyak 6 kali, termasuk di dalamnya bintek fraksi, namun dikarenakan adanya Wabah Covid 19 bintek fraksi hanya dilaksanakan 1 (stu) kali.	

B.34 – B.50 KECAMATAN SE-KABUPATEN BREBES

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
Administrasi Pemerintahan (Unsur Kewilayahan)								
34	Kecamatan Brebes	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	83.75	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	82.8	Belum Tercapai Karena adanya Pandemi Covid-19	
35	Kecamatan Jatibarang	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	81.4	Belum Tercapai Permasalahan : Pelayanan kurang maksimal dikarenakan adanya pandemi covid 19. Solusi : Untuk kedepan, pelayanan akan ditingkatkan walaupun masih dalam keadaan covid19.	-
			2	IKM Paten	7.8	7.56	Belum Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	80.5	Belum Tercapai Permasalahan :	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
36	Kecamatan Wanasari	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	8.47	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	73.4	Belum tercapai, Permasalahan yang dihadapi adalah masih kurang sadarnya masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu dan masih kurangnya intensitas kopak dalam memungut ke wajib pajak	
37	Kecamatan Songgom	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	7,827	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	78.20	Belum Tercapai Dari 10 Desa di Kecamatan Songgom ada 7desa yang belum	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
38	Kecamatan Bulakamba	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97.19	lunas PBB 2021 disebabkan adanya pandemic Covid-19 Sebagai solusi akan dilakukan evauasi dan intensifikasi secara rutin	-
			2	IKM Paten	7.8	8.10	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	71.80	Belum tercapai Waktu yang tidak Efektif serta kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dikarenakan adanya Pandemi COVID- 19 gelombang 2 dari bulan Mei - Agustus 2021, sehingga OPA tidak dapat melakukan penagihan secara maksimal.	
39	Kecamatan Tanjung	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	83.49	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	84.42	Belum Tercapai Permasalahan yang sering terjadi kurang sadaranya masyarakat untuk membayar Pajak dan solusinya supaya lebih meningkatkan kualitas penagih PBB supaya dapat terealisasi dengan memenuhi Target.	
40	Kecamatan Losari	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97.67	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	78.79	Tercapai	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
41	Kecamatan Kersana	-	3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	100	Tercapai	-
			1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	90	Belum Tercapai	
			2	IKM Paten	7.8	3.02	Belum Tercapai Kendala Virus Covid-19	
42	Kecamatan Ketanggungan	-	3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	87,9	Belum Tercapai Permasalahan yang sering terjadi kurang sadarnya masyarakat untuk membayar Pajak dan solusinya supaya lebih meningkatkan kualitas penagih PBB supaya dapat terealisasi dengan memenuhi Target.	-
			1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97,01	Tercapai	
			2	IKM Paten	7.8	8.129	Tercapai	
43	Kecamatan Banjarharjo	-	3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	77,63	Belum Tercapai Permasalahan yang sering terjadi kurang sadarnya masyarakat untuk membayar Pajak dan solusinya supaya lebih meningkatkan kualitas penagih PBB supaya dapat terealisasi dengan memenuhi Target.	-
			1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	Tercapai	
			2	IKM Paten	7.8	9.1	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	100	Tercapai	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
44	Kecamatan Larangan	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	99,94	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7,8	8,2	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	44,1	Belum Tercapai Permasalahan : 1). Wajib Pajak 2). Perangkat Desa 3). Kepala Desa 4). SPPT Double/Triple 5). Ada nya SPPT tidak ada objek 6). SPPT tidak sesuai wajib pajak. 7). Ada objek tetap SPPT tidak keluar/tidak ada. 8). SPPT tidak sesuai dengan objek (terlalu luas/ sedikit) Solusi : 1). Melakukan Sosialisasi kepada Wajib Pajak. 2). Memberikan Tindakan Tegat kepada Kepala dan Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas. 3). Melakukan Perbaikan SPPT.	
45	Kecamatan Tonjong	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	98	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7,8	8,43	Tercapai Permasalahan Sedikitnya kuisisioner yang diisi Penilaian menunjukkan belum adanya fasilitas untuk pengunjung disabilitas Solusi	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
46	Kecamatan Bumiyu	-					Mengusahakan kembali supaya lebih banyak kuisioner terisi Pada pertengahan tahun 2021 ada pengadaan fasilitas untuk pengunjung disabilitas	-
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	92,50	Tercapai Permasalahan Adanya pandemic covid-19 Solusi : secara rutin melakukan evaluasi dan monitoring pelunasan PBB	
			1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97	Tercapai	
			2	IKM Paten	7,8	8,54	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	82,2	Permasalahan yang Ada Double (1 Objek Pajak 2 Subjek Pajak), Objek Pajak tidak sesuai dengan subjek pajak, Ada Petugas yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya, Wajib pajak tidak mengakui, banyaknya tanahnya bersama (Cs) Solusi yang diberikan anantara lain Diajukan Penghapusan ke Bapenda, Dilakukan pengukuran ulang, Memberikan teguran / surat peringatan kepada petugas yang kurang disiplin, Pemecahan SPPT	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
47	Kecamatan Paguyangan	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	96,19	Belum Tercapai	-
			2	IKM Paten	7,8	81,96	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	69,2	Belum Tercapai Permasalahan : Adanya pandemi covid-19 sehingga mengurangi intensitas penarikan PBB Solusi : Menjadwalkan Penarikan PBB sehingga masing-masing desa bisa menyetorkan PBB pada jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama	
48	Kecamatan Sirampog	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	98	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7,8	7,21	Belum Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	84	Belum Tercapai Permasalahan yang sering terjadi kurang sadaranya masyarakat untuk membayar Pajak dan solusinya supaya lebih meningkatkan kualitas penagih PBB supaya dapat terealisasi dengan memenuhi Target.	
49	Kecamatan Bantar Kawung	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	96,04	Belum Tercapai	-
			2	IKM Paten	7,8	8,2	Tercapai	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	86	Belum Tercapai Permasalahan yang terjadi karena situasi masih dalam keadaan pandemi, sehingga	

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KECAMATAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
							penarikan PBB kurang maksimal	
50	Kecamatan Salem	-	1	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	Tercapai	-
			2	IKM Paten	7.8	8.1	Tingkat Pelayanan Kepuasan terhadap pelayanan Masyarakat di Kecamatan Salem sudah tergolong Baik namun harus lebih ditingkatkan lagi.	
			3	Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	88	94	Masih ada 2 Desa Yang masih Nunggak dalam Pelunasan PBB yaitu Wanoja dan Tembongraja. Kedisiplinan di tingkat Perangkat Desa yang harus ditingkatkan	

B.51 INSPEKTORAT

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Opini BPK				-
			2	Dokumen Perbup Kebijakan Pengawasan (Dokumen)	2	2	Tercapai Peraturan/ Kebijakan Bupati tentang Pengawasan Internal	
			3	Dokumen Sistem Prosedur Pengawasan (dokumen)	8	6	Belum Tercapai	
			4	Nilai Evaluasi LKJIP OPD	B	B	Tercapai	
			5	Dokumen Hasil Reviu LKJIP Kab. Brebes (Dokumen)	1	1	Tercapai	



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

B.52. BAPERLITBANGDA

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Perencanaan	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD (%)	100	100	Tercapai	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dijelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah berupa dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di bawah koordinasi BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes.
			2	Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke Renstra	100	100	Tercapai	
			3	Persentase program Renstra yang dijabarkan ke Renja (%)	100	100	Tercapai	
			4	Persentase pencapaian kegiatan sesuai perencanaan	100	100	Tercapai	
			5	Persentase indikator kinerja SKPD yang tercapai (%)	100	87,5	Masih angka sementara	
			6	Persentase partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan (%)	100	100	Tercapai	
			7	Persentase usulan yang direkomendasikan	100	100	Tercapai	
			8	Persentase keselarasan Renstra PD, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah (%)	100	100	Tercapai	
			9	melakukan pendampingan dan bintek renstra dan renja	9	9	Tercapai	
			10	jumlah OPD yang didampingi	9	9	Tercapai	
			11	jumlah dokumen yang dianalisa	1	1	Tercapai	
			12	persentase keselarasan Renstra PD, Renja PD terhadap RPJMD di bidang ekonomi dan infrastruktur wilayah (%)	100	100	Tercapai	
			13	melakukan pendampingan dan bintek renstra dan renja	9	9	Tercapai	
			14	jumlah OPD yang didampingi	39	39	Tercapai	
			15	jumlah dokumen yang dianalisa	4	4	Tercapai	
			16	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil keiltbangan (penelitian dan pengkajian)	80	80	Tercapai	
			17	Jumlah Rekomendasi perumusan	100	100	Tercapai	
2	Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan						



BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
		bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	kebijakan hasil kelibangan (pengembangan, perekayasaan, penerapan dan pengoperasian)				

B.53 BPKAD

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1 Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)	1	1	Tercapai	-
			2 Time Ratio Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) (hari)	1	1	Tercapai	
			3 Perbup tentang APBD (Perbup)	1	1	Tercapai	
			4 Perda tentang APBD (Perda)	1	1	Tercapai	
			5 Cakupan Sensus BMD (%)	100	100	Tercapai	
			6 Penilaian Aset (%)	75	75	Tercapai	
			7 Pencapaian target retribusi pemanfaatan BMD	310.000.000	388.182.072	Tercapai	
			8 Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perda)	1	1	Tercapai	

**B.54 BAPENDA****BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Keuangan	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Potensi dan Angka Ketetapan Pajak Daerah (Miliar Rupiah)	102,119	124,39	Tercapai 121,81%	-
			2	Target penerimaan pendapatan daerah (Miliar Rupiah)	412	518,31	Tercapai 125,80%	

B.55. BKPSDMD

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR				TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Kepegawaian	Peningkatan Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah	1	Persentase Kinerja Sasaran Kerja Pegawai	100	100		Tercapai		-
			2	Prosentase Angka Pelanggaran yang di tangani	14	10		Tercapai		
			3	Terfasilitasinya kesejahteraan bagi PNS(orang)	200	732		Tercapai		
			4	sinkronisasi data dan tale kepegawaian yang talid (orang)	2.000	2818		Tercapai		
			5	Peningkatan Persentase Mutasi PNS/ASN yang ditangani (%)	94,4	158,6		Tercapai		
			6	Time rasio pemberian SK berkala golongan II dan III (hari)	1	1		Tercapai		
			7	Persentase Kenaikan Pangkat PNS/ASN (%)	99,5	90,71		Belum Tercapai		
			8	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Formasi PNS/ASN (%)	99,62	100		Tercapai		

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
2	Pendidikan dan Pelatihan		9	Peningkatan Capaian PNS/ASN yang memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis (%)	20	186,25	Tercapai	

B.56 BADAN KESBANGPOL DAERAH

NO	URUSAN	KEBIJAKAN	URAIAN INDIKATOR		TARGET	REALISASI	KETERANGAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	-	1	Persentase Penanganan Kasus Paham Ideologi dan konflik sosial (%)	100	100	Tercapai	-
			2	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Pemilu (%)	70	70	Tercapai	
			3	Jumlah desa bebas narkoba	51	20	Belum Tercapai karena Transisi SKPD dari kantor menjadi Badan dan Sebagian Tupoksi dari BNK Kab.Brebes diimpahkan ke Badan Kesbangpol Kab.Brebes.	
			4	Jumlah Sekolah Bebas Narkoba (Unit)	30	17	Sebagian tupoksinya yaitu sosialisasi dan karena adanya pandemi covid-19 di awal hingga pertengahan tahun, kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.	



C. Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Analisis Kesesuaian

C.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga, melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu :

- Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pendidikan
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemuda dan Olahraga

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Pendidikan, yaitu Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga T.A 2021 sebesar Rp. 976.657.989.491 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 955.423.667.476 atau 97,83% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.8
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pendidikan	961.895.112.396	940.802.475.376	(21.092.637.020)	97,81
	Belanja Operasi	883.173.239.115	863.741.004.101	(19.432.235.014)	97,80
	Belanja Modal	78.721.873.281	77.061.471.275	(1.660.402.006)	97,89
2	Pemuda dan Olahraga	14.762.877.095	14.621.192.100	(141.684.995)	99,04
	Belanja Operasi	13.192.877.095	13.084.442.100	(108.434.995)	99,18
	Belanja Modal	1.570.000.000	1.536.750.000	(33.250.000)	97,88
	JUMLAH	976.657.989.491	955.423.667.476	-21.234.322.015	97,83

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dan hasil-hasilnya pada program Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Bidang Pemuda dan Olahraga, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.9
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
URUSAN PEMERINTAHAN : BIDANG PENDIDIKAN						
I	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	-	-	-	17.919.248.633 17.411.688.880 97,17%	-
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rasio guru terhadap murid sekolah SD	20,00-	20,00-	17.919.248.633 17.411.688.880 97.16%	Tercapai
1.1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Jumlah guru wiyata bhakti dan tenaga wiyata bhakti yang mendapat bantuan Kesra (orang) - Jumlah guru wiyata bhakti PAUD yang mendapat Kesra	6332 orang 2389 orang	6332 orang 2389 orang	17.254.279.280 16.778.299.280 97.41%	Tercapai
1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Bersertifikasi (orang) - Jumlah guru yang mempunyai masalah penceraian kedisiplinan dan kasus hukum untuk pemecahan masalah (orang) - Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan - Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Laporan Kegiatan Seleksi Kepala Sekolah dan Pengawas	268 orang 5115 orang 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	268 orang 5115 orang 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	664.969.353 633.389.600 95.25%	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		Sekolah - Pemetaan Analisis Jabatan Guru dan KS PAUD (dokumen)				
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio siswa per kelas SD	28,00-	25,00-	289.868.571.712 281.378.635.721 96.89%	Tercapai
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio siswa per kelas SD	28,00-	25,00-	171.860.613.359 167.879.204.444 97.68%	Tercapai
1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SD/MI (lokal)	14 unit	14 unit	2.030.000.000 2.027.150.000 99.86%	Tercapai
1.2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru yang dibangun	1 unit	1 unit	172.610.794 172.610.794 100%	Tercapai
1.3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang dibangun	7 unit	7 unit	478.442.116 478.442.116 100%	Tercapai
1.4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	- Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun (Bantuan Provinsi Bidang Pendidikan) - Jumlah ruang perpustakaan yang dibangun (DAK Fisik)	2 unit 2 unit	2 unit 2 unit	592.700.146 592.050.146 99.89%	Tercapai
1.5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Pembangunan Pagar - Jumlah Pembangunan pavin - Jumlah Pembangunan sanitasi - Jumlah Peninggian Halaman Sekolah	11 paket 5 paket 3 paket 3 paket	11 paket 5 paket 3 paket 3 paket	1.337.379.429 1.318.852.429 98.61%	Tercapai
1.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	- Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi - Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi (Bantuan Provinsi Bidang pendidikan)	181 ruang 19 ruang	181 ruang 19 ruang	20.176.851.699 20.164.187.219 99.94%	Tercapai
1.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	- Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	21 ruang 6 ruang	21 ruang 6 ruang	2.536.872.076 2.536.572.076	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		- Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang direhabilitasi			99.99%	
1.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi	5 ruang	5 ruang	117.060.607 117.060.607 100%	Tercapai
1.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	9 ruang	8 ruang	825.513.023 733.737.023 88.88%	Belum Tercapai. 1 sekolah yaitu SDN Karangbale 04 larangan tidak mempunyai perpustakaan tetapi mendapat alokasi dana untuk rehab perpustakaan sehingga tidak dicairkan.
1.1 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Toilet/ Jamban yang direhabilitasi	94 ruang	94 ruang	791.105.888 791.105.888 100%	Tercapai
1.1 1	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelar yang tersedia	12 paket	12 paket	210.094.930 184.854.000 87.99%	Tercapai
1.1 2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Fasilitas Penunjang sarpras Sekolah SD/MI	78 unit	77 unit	5.164.636.500 3.291.552.905 63.73%	Belum tercapai. Ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi.
1.1 3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)	297 orang	223 orang	178.400.000 178.400.000 100%	Belum tercapai Karena pemotongan anggaran di perubahan. Solusinya adalah agar ditahun depan

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
						dianggarkan untuk program Gerakan Kembali Bersekolah.
1.1 4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Jumlah Alat TIK yang tersedia - Jumlah Media Pendidikan yang tersedia	4 paket 7 paket	4 paket 7 paket	1.120.000.000 1.110.122.000 99.12%	Tercapai
1.1 5	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti Assesment Nasional (siswa)	32857 siswa	32857 siswa	211.297.520 204.097.520 96.59%	Tercapai
1.1 6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	- Jumlah Laporan Kegiatan Gerakan Kembali Bersekolah - Jumlah Sekolah SD Negeri Berstandar Nasional (sekolah)	1 dok 6 sekolah	1 dok 6 sekolah	75.379.900 75.379.900 100%	Tercapai
1.1 7	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah siswa SD/MI Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	1 dok 80 siswa	1 dok 80 siswa	220.685.000 213.630.000 96.80%	Tercapai
1.1 8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	- Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan tentang pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan (orang) - Jumlah Guru Dikdas Berstandar Kompetensi (orang) - Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk mengikuti program PPG	213 orang 265 orang 100 orang 225 orang 100 Orang 100 orang	213 orang 265 orang 100 orang 225 orang 100 orang 100 orang	216.157.440 145.032.220 67.10%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		(orang) - Jumlah Guru SD dan SMP yang lulus bintek Pengembangan Kurikulum Dikdas (orang) - Jumlah Guru yang Melaksana- nakan Uji Kompetensi (org) - Jumlah guru yang mempunyai masalah penceraian, kedisiplinan dan kasus hukum untuk pemecahan masalah (orang) - Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP yang mendapatkan pembinaan untuk peningkatan kompetensi (kelompok kerja)	79 pokja	79 pokja		
1.1 9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Laporan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) - Pemetaan data sarana dan prasarana pendidikan dasar (e-sarpras) (dokumen) - Pemetaan Sekolah yang Berstandar Pelayanan Minimal (dokumen) - Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS (dokumen)	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1.822.329.129 1.652.857.800 90.70%	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
1.2 0	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah sekolah yang mengelola Dana BOS secara optimal	891 sekolah	891 sekolah	132.226.126.099 130.897.708.838 99.00%	Tercapai
1.2 1	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Lab Komputer SD	2 unit	2 unit	335.370.963 335.350.963 99.99%	Tercapai
1.2 2	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah kondisi mebelair yang baik	100%	100%	966.601.000 960.448.000 99.36%	Tercapai
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rasio siswa per kelas SMP	32,00-	29,00-	77.063.487.331 74.927.426.014 97.22%	Tercapai
2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru SMP/MTs (lokal)	9 lokal	9 lokal	1.570.000.000 1.564.400.000 99.83%	Tercapai
2.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Pembangunan Paving dan Halaman - Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dan Gedung Serba Guna	5 paket 5 paket	5 paket 5 paket	3.030.000.000 3.017.646.000 99.59%	Tercapai
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	- Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi - Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi (Bantuan Provinsi Bidang Pendidikan)	125 ruang 10 ruang	123 ruang 10 ruang	12.438.550.344 11.935.726.344 99.98%	Belum Tercapai. Ada perubahan kegiatan dari rehab ruang kelas menjadi penambahan ruang kelas baru yaitu SMP BUSTANUL ULUM BANTARKAWUNG dan SMP BUSTANUL ULUM NU JATIROKEH sehingga tidak dicairkan.
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	4 ruang	4 ruang	438.251.982 438.251.982 100%	Tercapai
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS yang direhabilitasi	3 ruang	3 ruang	114.655.607 114.665.607 100%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2.6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang direhabilitasi	4 ruang	4 ruang	678.458.063 678.458.063 100%	Tercapai
2.7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	- Jumlah Ruang Lab IPA yang direhabilitasi - Jumlah Ruang Lab Komputer yang direhabilitasi	7 ruang 4 ruang	7 ruang 4 ruang	1.838.188.479 1.836.738.479 99.92%	Tercapai
2.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	- Jumlah Ruang Ibadah yang direhabilitasi - Jumlah Sarana Utilitas yang direhabilitasi - Jumlah Toilet/ Jamban yang direhabilitasi	1 ruang 12 ruang 57 ruang	1 ruang 12 ruang 57 ruang	1.860.693.645 1.857.732.370 99.84%	Tercapai
2.9	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	- Jumlah Pengadaan Alat Disinfektan - Jumlah Pengadaan Alat Lab Komputer (Bantuan Provinsi Bidang Pendidikan) - Jumlah Pengadaan Alat Peraga Olahraga - Jumlah Pengadaan Komputer - Jumlah Pengadaan Seragam Sekolah	459 buah 2 paket 1 paket 2 paket 12120 stel	459 buah 2 paket 1 paket 2 paket 5091 stel	2.283.930.000 1.334.827.458 58.44%	Belum Tercapai. Ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi.
2.1 0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah anak putus sekolah yang kembali bersekolah jenjang pendidikan dasar (orang)	694 orang	458 orang	1.321.609.600 1.255.609.600 95.01%	Belum tercapai Karena pemotongan anggaran di perubahan
2.1 1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	- Jumlah Penga- daan Alat Lab IPA Biologi - Jumlah penga- daan Alat LAB IPA Fisika - Jumlah Penga- daan Media Pendidikan - Jumlah Penga- daan alat TIK	4 paket 4 Paket 7 paket 2 paket	4 paket 4 paket 7 paket 2 paket	1.028.000.000 1.024.492.500 99.66%	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2.1 2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti Asesment Nasional (siswa)	28450 siswa	28450 siswa	272.000.000 269.300.000 99.01%	Tercapai
2.1 3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah SMP Negeri Berstandar Nasional (sekolah)	4 sekolah	4 sekolah	82.000.000 82.000.000 100%	Tercapai
2.1 4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Siswa SMP/MTs Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	1 dok 92 siswa	1 dok 92 siswa	168.891.780 167.341.780 99.08%	Tercapai
2.1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang mendapat pelatihan tentang pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan (orang) - Jumlah Guru Dikdas Berstandar Kompetensi (orang) - Jumlah Guru Dikdas yang didata untuk mengikuti program PPG (orang) - Jumlah guru yang mempunyai masalah penceriaan, kedisiplinan dan kasus hukum untuk pemecahan masalah (orang) - Jumlah kelompok kerja guru (KKG) dan MGMP yang	200 Orang 265 orang 100 orang 100 orang 17 pokja	200 orang 265 orang 100 orang 100 orang 17 pokja	60.625.000 54.850.000 90.47%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		medapatkan pembinaan untuk peningkatan kompetensi (kelompok kerja)				
2.1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Laporan kegiatan peningkatan kurikulum - Jumlah Laporan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) - Pemetaan Sekolah yang Berstandar Pelayanan Minimal (dokumen) - Pendataan sekolah yang mendapatkan alokasi dana BOS (dokumen)	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1 dok 1 dok 1 dok 1 dok	1.038.160.050 831.826.440 80.13%	Tercapai
2.1 7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	- Jumlah sekolah yang mengelola dana BOS secara optimal	151 sekolah	151 sekolah	48.133.827.231 47.758.573.841 99.22%	Tercapai
2.1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU kondisi baik	3 ruang	3 ruang	341.515.649 341.515.649 100%	Tercapai
2.1 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah kondisi baik	6 ruang	6 ruang	364.119.901 363.469.901 99.82%	Tercapai
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Prosentase lembaga PAUD berijin operasional dan terakreditasi (lembaga)	120,00-	139,00-	29.251.278.042 26.696.789.090 91.26%	Tercapai
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah pembangunan ruang kelas sarpras PAUD (paket)	15 paket	14 Paket	1.185.000.000 1.160.000.000 97.89%	Tercapai
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah pembangunan sarpras PAUD (paket)	17 paket	17 paket	774.736.000 768.036.000 99.14%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah rehab ruang kelas sarpras PAUD (paket)	31 paket	31 paket	1.135.688.000 1.130.280.000 99.52%	Tercapai
3.4	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebelair sarpras PAUD (paket)	1 paket	1 paket	29.553.000 29.553.000 100%	Tercapai
3.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE sarpras PAUD (paket)	12 paket	12 paket	145.720.000 145.720.000 100%	Tercapai
3.6	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Siswa PAUD Berprestasi Tingkat Kabupaten (siswa)	20 siswa	20 siswa	111.831.682 110.231.680 98.57%	Tercapai
3.7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang memfasilitasi kegiatan olah bakat dan kreativitas untuk anak PAUD (lembaga)	110 lembaga	110 lembaga	82.184.100 79.773.950 90.07%	Tercapai
3.8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	- Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA berprestasi mengikuti lomba (orang) - Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Bersertifikasi (orang) - Jumlah Guru PAUD PNF dan PORA Berstandar Kompetensi (orang) - Jumlah Pengawas TK dan Penilik PAUD-PNF yang Mendapatkan Pelatihan (orang) - Jumlah PTK PAUD dan PNF yang bersertifikat sadar gender (orang) - Jumlah Tenaga Pendidik PAUD yang mendapatkan pelatihan	418 orang 268 orang 268 orang 30 orang 50 orang 100 orang 250 orang	418 orang 268 orang 268 orang 30 orang 50 orang 100 orang 250 orang	65.386.460 42.795.360 65.45%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		peningkatan mutu pendidikan (orang) - Pengembangan dan pengayaan Kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pada program PAUD, Pend. Kesetaraan Paket ABC, Pend. Keaksaraan dan Pend. Kursus (orang)				
3.9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Laporan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK)	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	329.916.800 312.799.100 94.81%	Tercapai
3.10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mengelola Dana BOP secara optimal	966 lembaga	966 lembaga	25.380.000.000 22.935.900.000 90.37%	Tercapai
3.11	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah kondisi mebelair yang baik	100%	100%	11.262.000 11.262.000 100%	Tercapai
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah penduduk angkatan kerja (usia Produktif/15-44 th) memiliki kemampuan life skill (orang)	250,00-	465,00-	11.693.192.980 11.602.216.173 99.22%	Tercapai
4.1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Ruang yang dibangun	2 unit	2 unit	384.262.000 339.525.000 88.36%	Tercapai
4.2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	- Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi - Jumlah Ruang Toilet Guru yang direhabilitasi	4 unit 1 paket	4 unit 1 paket	304.662.000 269.681.000 88.52%	Tercapai
4.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan.	Jumlah kondisi bangunan toilet yang baik	100%	100%	34.200.000 30.668.000 89.67%	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
4.4	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah mebelar yang tersedia	1 paket	1 paket	45.738.000 45.738.000 100%	Tercapai
4.5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Fasilitas Utama dan Penunjang sarpras PKBM,LKP,TBM,KBU (paket)	7 paket	7 paket	237.000.000 237.000.000 100%	Tercapai
4.6	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah lembaga PAUD, KBU,LKP,PKBM, TBM yang mendapatkan bantuan operasional (lembaga) - Jumlah Penduduk Melek Aksara Bersertifikat SUKMA (Surat Keterangan Melek Aksara) dan SUKMA-L (Surat Keterangan Melek Aksara-Lanjutan) (orang) - Jumlah peserta didik yang mengikuti ujian paket A,B,C (orang)	1 dok 11 lembaga 2320 orang 2369 orang	1 dok 11 Lembaga 2320 orang 2369 orang	1.167.820.580 1.161.731.013 99.48%	Tercapai
4.7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah Laporan kegiatan penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) - Jumlah lembaga KBU,LKP,PKBM, TBM yang mendapatkan	1 dok 1 dok 13 lembaga	1 dok 1 dok 13 lembaga	342.810.400 341.371.860 99.58%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
		bantuan operasional (lembaga)				
4.8	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Non Formal yang mengelola Dana BOP secara optimal	97 lembaga	97 lembaga	9.176.700.000 9.176.501.300 100%	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAHA						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah pemuda kader kewirausahaan	65 orang	65 orang	5.365.159.280 5.503.545.700 99.88 (%)	Tercapai
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda kader kewirausahaan	65 orang	65 orang	2.526.088.480 2.500.589.150 98.99%	Tercapai
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Pemuda yang memiliki sertifikat kewirausahaan (orang)	40 orang	40 orang	349.970.000 349.583.100 99.89%	Tercapai
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi revitalisasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan (orang)	150 orang	150 orang	204.970.100 204.898.200 99.96%	Tercapai
1.3	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	- Jumlah pemuda yang memiliki skil jiwa nasionalisme, patriotisme dan bebas narkoba yang bersertifikat (orang) - Jumlah Siswa yang dibina dan dilatih PASKIBRA (orang)	330 orang 35 orang	330 orang 35 orang	1.971.148.380 1.946.107.850 98.73%	Tercapai
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan manajemen dan perencanaan program	18 orang	18 orang	2.839.070.800	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah organisasi kepemudaan yang berprestasi (organisasi)	1 dok 8 organisasi	1 dok 8 organisasi	2.839.070.800 2.804.956.550 98.80%	Tercapai
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga (%)	55,00-	55,00-	9.397.717.815 9.325.339.350 99.22%	Tercapai
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan olahraga (%)	55,00-	55,00-	5.879.757.595 5.835.068.400 99.24%	Tercapai
1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah sarpras olahraga penunjang prestasi atlet (unit) - Jumlah sarpras Olahraga yang mendapat rehab (unit)	1 dok 9 paket 5 paket	1 dok 9 paket 5 paket	5.879.757.595 5.835.068.400 99.24%	Tercapai
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi (orang)	42,00-	53,00-	3.387.960.220 3.360.270.950 99.18%	Tercapai
2.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	- Jumlah atlet berprestasi (orang) - Jumlah pelatih yang bersertifikasi (orang) - Jumlah pembinaan atlet muda (orang)	630 orang 100 Orang 45 orang	630 orang 100 orang 45 orang	1.760.149.520 1.754.956.200 99.70%	Tercapai
2.2	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	- Jumlah Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan (dokumen) - Jumlah prestasi olahraga (cabor)	1 dok 30 cabor	1 dok 30 cabor	1.627.810.700 1.605.314.750 98.62%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Cakupan pembinaan olahraga (%)	55,00-	56,60-	130.000.000	Tercapai
3.1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah masyarakat yang mendapat penyegaran jasmani (orang)	16000 orang	16000 orang	130.000.000 120.307.050 92.54%	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	653.436.690.051 643.677.233.216 98.50%	-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	1.340.748.776 1.337.953.200 99.80%	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (Renja, PPAS dan APBD) (Jenis)	3 Jenis	3 Jenis	35.771.000 35.748.000 99.94%	Tercapai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Jenis Dokumen (Dapodik, Verval Data Pendidikan, Mapping School) (jenis) - Jenis Media Publikasi dan Promosi (SIMDIK, Penyusunan Perda, Karnaval, Pameran), (Jenis)	3 jenis 3 jenis	3 jenis 3 jenis	1.185.875.276 1.183.297.650 99.78%	Tercapai
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jenis Dokumen (LKJIP, Laporan Bulanan, RUP) (jenis) - Jenis Dokumen (Profil Pendidikan) (jenis)	3 jenis 1 jenis	3 jenis 1 jenis	119.102.500 118.907.550 99.84%	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	642.541.728.241 630.496.807.175 99.10%	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	5665 orang	4925 orang	642.487.641.661 630.442.797.275 98.13%	Belum Tercapai
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	2 buah	2 buah	14.814.740 14.785.000 99.80%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jenis Dokumen laporan keuangan (buah)	1 buah	1 buah	39.271.840 39.224.900 99.93%	Tercapai
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%	573.147.000 567.99 6.300 99.10%	Tercapai
3.1	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	1 dok	1 dok	573.147.000 567.996.300 99.10%	Tercapai
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai (%)	100%	100%	4.220.625.663 4.215.975.923 99.88%	Tercapai
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	0	Refocusing
4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jenis Laporan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah	1 dok	1 dok	4.139.695.423 4.139.306.000 99.99%	Tercapai
4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur/Pegawai mendapat pemahaman(Org)	700 orang	700 orang	80.930.240 76.280.500 94.25%	Tercapai
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	1.438.248.124 1.430.752.075 99.47%	Tercapai
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	13 Jenis	13 jenis	77.862.500 77.856.900 99.99%	Tercapai
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	44 jenis	44 jenis	277.723.504 277.721.520 99.99%	Tercapai
5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	33 jenis	33 jenis	156.833.248 156.720.960 99.83%	Tercapai
5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	3 jenis	3 jenis	331.584.000 331.575.550 99.99%	Tercapai
5.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan PenggandaanTerse dia (Jenis)	27 jenis	27 jenis	324.244.372 324.220.050 99.99%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	320 laporan	320 laporan	270.000.500 262.657.092 97.28%	Tercapai
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%	442.867.400 442.345.000 99.47%	Tercapai
6.1	Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	2 jenis	2 jenis	88.134.900 88.076.000 99.93%	Tercapai
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor baru (Jenis)	10 jenis	10 jenis	354.732.500 354.269.000 98.87%	Tercapai
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	1.544.882.000 1.424.759.280 99.22%	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah Kosumsi Materai (buah) - Jumlah Laporan Kegiatan Lembur Persuratan	4393 buah 1 dok	4393 buah 1 dok	34.994.000 34.994.000 100%	Tercapai
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	4 jenis	4 jenis	470.388.000 438.925.280 93.31%	Tercapai
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Tenaga Adminstrasi/Akut ansi/ICT Tersedia (orang) - Jumlah Tenaga Kebersihan, Pramu Bhakti, Jaga Malam, dan Supporting staff Tersedia (Orang)	25 orang 32 orang	25 orang 32 orang	1.039.500.000 950.840.000 91.47%	Tercapai
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik (%)	100%	100%	1.334.442.847 1.324.966.543 99.28%	Tercapai
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Dinas/operasiona l dalam kondisi baik (Unit) - Jumlah Mobil Diproses Surat Perijinannya (unit) - Jumlah Motor diproses Surat Perijinannya (unit)	26 unit 6 unit 20 unit	26 unit 6 unit 20 unit	115.748.767 115.150.893 99.48%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan gedung dalam Kondisi Baik (jenis)	10 jenis	10 jenis	172.820.280 170.800.800 98.83%	Tercapai
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Bangunan Gedung Rusak Menjadi Baik (Unit) - Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi baik	1 unit 6 unit	1 unit 6 unit	1.045.873.800 1.039.014.850 99.34%	Tercapai

Sumber data : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Pemuda dan Olahraga, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, mempunyai masalah ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi. Solusinya adalah percepatan penetapan DPPA perubahan tahun anggaran 2022.
2. Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi. Solusinya percepatan penetapan DPPA perubahan tahun anggaran 2022.
3. Program Pengelolaan Pendidikan mempunyai beberapa permasalahan pada kegiatan dan sub kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah mempunyai permasalahan 1 sekolah yaitu SDN Karangbale 04 larangan tidak mempunyai perpustakaan tetapi mendapat alokasi dana untuk rehab perpustakaan sehingga tidak dicairkan. Solusinya percepatan penetapan DPPA perubahan tahun anggaran 2022.



- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah mempunyai permasalahan ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi.
- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar mempunyai permasalahan adanya pemotongan anggaran di perubahan
- d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah mempunyai permasalahan yaitu Ada perubahan kegiatan dari rehab ruang kelas menjadi penambahan ruang kelas baru yaitu SMP BUSTANUL ULUM BANTARKAWUNG dan SMP BUSTANUL ULUM NU JATIROKEH sehingga tidak dicairkan.
- e. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah mempunyai permasalahan yaitu Ada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi.
- f. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama tidak tercapai karena Karena pemotongan anggaran di perubahan

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Capaian kinerja program pembangunan daerah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022.

- **Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar secara umum telah tercapai dengan persentase diatas 60%, namun belum maksimal karena pada beberapa program terkendala masalah perubahan anggaran.

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar secara umum telah tercapai dengan perentase 100%**



Nilai rata-rata capaian kinerja pada target menunjukkan bahwa semua program terlaksana dengan baik.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Instansi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes T.A 2021

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Bidang : Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Semua capaian telah memenuhi target. Persentasinya rata-rata diatas 90%.

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Semua capaian telah memenuhi target. Persentasinya rata-rata diatas 90%.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Semua capaian telah memenuhi target. Persentasinya rata-rata diatas 90%.

Namun ada beberapa program yang realisasinya dibawah target antara lain :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, mempunyai masalah pada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi. Solusinya adalah percepatan penetapan DPPA perubahan tahun anggaran 2022.
- 2) Program Pengelolaan Pendidikan, Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah, mempunyai masalah pada kegiatan pengadaan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu tidak dicairkan karena anggaran turun diperubahan dan menggunakan sistem lelang sehingga waktunya tidak mencukupi. Solusinya percepatan penetapan DPPA perubahan tahun anggaran 2022.

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Bidang : Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Semua capaian telah memenuhi target. Persentasinya rata-rata diatas 90%.

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN



Semua capaian telah memenuhi target. Persentasinya rata-rata diatas 90%. Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 90% lebih sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target menunjukkan bahwa semua indikator telah tercapai.

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi dan tingkat nasional pada Tahun 2021, sebagai Berikut

A. Bidang PNFI :

1. Program Dewasa Tidak Sekolah (DTS) dengan sasaran usia 21 keatas, dengan tujuan penuntasan buta aksara dan peningkatan IPM.
2. DTS Inklusi dengan sasaran warga belajar yang berkebutuhan khusus agar mereka tetap mendapatkan pendidikan tanpa perbedaan, sebagai pilot project desa Cenang, kecamatan Songgom.
3. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri sebagai rujukan pendidikan nonformal di Kabupaten Brebes, dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan kesetaraan dan life skill.

B. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar :

1. Aufa Farhani Kusdiana Putri kelas 9 SMP Albahri School Bantarkawung, Juara Tartil Putri Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (Mapi) SMP Tingkat Propinsi Jateng Tahun 2021.
2. Juara 3 KSN IPA Tahap 2 Tingkat Propinsi Jawa Tengah atas nama Iffatul Inayah dari SMP Taalamul Huda Bumiayu.
3. Aliuuah Ar Rahmah memperoleh medali perunggu dalam Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) tingkat Nasional, mewakili Kab. Brebes dan Jawa Tengah.
4. Pada Tahun 2021 Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) jalur formal, telah mengembalikan Anak Putus Sekolah sejumlah :

- SD/MI : 233 siswa/siswi
- SMP/MTs : 458 siswa/siswi
- SMK/SMK/MA : 376 siswa/siswi

Total : 1.057 siswa/siswi



Program GKB diupayakan dapat mendorong peningkatan IPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes melalui angka rata-rata lama sekolah.

C. Bidang Pemuda dan Olahraga :

1. Inovasi Kelas Keberbakatan/Khusus Olahraga disatukan pendidikan SMP sebagai
2. tindak lanjut grand design olahraga nasional.
3. Meningkatkan Prestasi Olahraga Pelajar melalui even Popda Propinsi.
4. Terwujudnya Perda Pembangunan Kepemudaan sebagai langkah awal mewujudkan Brebes Kabupaten Layak Pemuda.
5. Terbentuknya induk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) yang mewadahi Olahraga Tradisional, Petualangan, Kebugaran Masyarakat, agar terwujud masyarakat Brebes Sehat Bugar dan tetap melestarikan budaya Keolahragaan Tradisional.
6. Seleksi Pemuda Pelopor dan Organisasi Kepemudaan Berprestasi agar membangkitkan semangat pemuda menjadi kepeloporan di semua sector agar bias membantu pembangunan di Brebes.
7. Terjalannya stakeholder kepemudaan yang saling support untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, seperti DPD KNPI Kab. Brebes, Program Pengembangan Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PPKP) Pemuda Pelopor.

Jejaring Kepemudaan tersebut akan menciptakan kegiatan dan program kepemudaan yang lebih tepat sasaran, adaptif dan sustainable.

D. Bidang PTK :

1. Finalis Apresiasi Kategori Guru SD Inspiratif tingkat Nasional : Nurohim, S.Pd (SDN Kaliwlingi 02).
2. Finalis Apresiasi Kategori Pengawas Inspiratif tingkat Nasional : Dr. Salimudin, M.Pd





C.2 Dinas Kesehatan

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Kesehatan (UPTD Labkesda, UPTD Klinik P2K, UPTD Puskesmas Brebes, Tanjung, Banjarharjo, Bumiayu dan Paguyangan), melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Kesehatan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Kesehatan, yaitu Peningkatan, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 366.291.645.186 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 336.625.548.956 atau 91,90% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.10
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kesehatan (UPTD Labkesda, UPTD Klinik P2K, UPTD Puskesmas Brebes, Tanjung, Banjarharjo, Bumiayu dan Paguyangan) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kesehatan				
	Belanja Operasi	342.844.163.726	317.455.448.095	(25.388.715.631)	92,59
	Belanja Modal	23.447.481.460	19.170.100.861	(4.277.380.599)	81,76
	JUMLAH	366.291.645.186	336.625.548.956	(29.666.096.230)	91,90

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian Dinas Kesehatan (UPTD Labkesda, UPTD Klinik P2K, UPTD Puskesmas Brebes, Tanjung, Banjarharjo, Bumiayu dan Paguyangan) dan hasil-hasilnya pada bidang Kesehatan sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.11
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kesehatan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Meningkatnya pelayanan puskesmas dalam hal kegawatdaruratan / rujukan di 2 puskesmas - Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan - Tersedianya data dan informasi Bidang Kesehatan	100% 100% 100%	100% 100% 100%	58.526.170.208 52.226.769.359 (89,24 %)	Tercapai
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	- Tersedianya mobil ambulance - Meningkatnya pelayanan puskesmas dalam hal kegawatdaruratan dan mobilitas rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit	2 unit 2 puskesmas	2 unit 2 puskesmas	822.021.250 636.010.200 (77,37%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas	- Tersedianya puskesmas mampu pelayanan jiwa dan napza	1 paket 1 paket	1 paket 1 paket	20.000.000 0 (0 %)	Belum Tercapai, krn pembangunan puskesmas kecil yang bersumber dana DBHCHT tdk dilaksanakan pada tahun ini (anggaran perubahan) shg pendampingannya (dana APBD) tidak dilaksanakan juga
1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya kendaraan mobil ambulance	2 unit	2 unit	. 802.021.250,- . 636.010.200,- (79,30 %)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	53.379.141.725 47.457.191.996 (88,91%)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ante natal care minimal 4 kali sesuai standar (10 T)/ANC te adu Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu hamil	36.700 jiwa 36.700 jiwa 96%	29.373 jiwa 29.373 jiwa 88,52%	2.231.312.880 1.895.624.792 (84,96 %)	Kegiatan dukungan manajemen jampersal (jaminan persalinan) sudah mencapai target, namun belum semua ibu hamil mendapat TTD dan ANC te adu karena tidak berkunjung ke fasilitas kesehatan pada saat pandemi
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah dukun bayi yang melaksanakan maklumat dukun bayi Jumlah petugas bersertifikat KTPA (Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak) Jumlah RS yang telah bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) dan Puskesmas melalui Dinkes (Rumah Sakit) Jumlah tenaga Kesehatan bersertifikat KB pasca persalinan Jumlah tenaga Kesehatan bersertifikat PMBA Cakupan pelayanan kesehatan pada ibu bersalin	1.300 orang 20 orang 9 RS 40 orang 25 orang 98%	1.297 orang 20 orang 14 RS 40 orang 25 orang 99,6%	5.953.142.000 5.361.485.894 (90,06 %)	Belum tercapai, krn : 1. Masih ada ibu hamil yang mempunyai sugesti takut bersalin di faskes di masa pandemi covid- 19 2. Ada sebagian kecil ibu hamil yang bersalin sebelum mencapai tempat fasilitas kesehatan (kebrojolan) 3. Untuk jumlah dukun bayi yg melaksanakan maklumat dukun bayi tidak mencapai target karena terdapat dukun bayi yang meninggal Solusi : 1. Mengefektifkan peran masyarakat dan nakes untuk konseling pada ibu hamil 2. Pemantauan ibu hamil lebih ketat dan sesuai SOP agar tidak terjadi kebrojolan./ 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						pendampingan ibu hamil
2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jenis dokumen pelayanan imunisasi (desa UCI) Jenis dokumen pelayanan imunisasi (imunisasi dasar lengkap)	2 dokumen 2 dokumen	2 dokumen 2 dokumen	769.325.000 699.084.800 (90,87 %)	Tercapai
2.4	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan gizi buruk (jiwa) Jumlah CFC (<i>Community Feeding Centre</i>) yang terbentuk (kelompok) Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan TFC (<i>Therapeutic Feeding Centre</i>) (puskesmas) Cakupan pelayanan kesehatan pada balita	100 jiwa 30 kelompok 30 puskesmas 94%	422 jiwa 30 kelompok 30 pskms 79,68%	248.268.600 208.345.608 (83,92 %)	Belum tercapai, karena adanya pandemi menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun. Kemudian tidak semua kader posyandu mendapat transport sesuai target karena sudah ada kader yang pensiun Solusi : Posyandu dilaksanakan dengan proses ketat
2.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	88%	79,33%	9.375.000 8.985.000 (95,84%)	Belum tercapai, karena pada masa pandemi pertemuan tatap muka di sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga penjangkaran kesehatan pada usia pendidikan dasar masih terbatas Solusi : Janji temu dengan pihak sekolah untuk melaksanakan penjangkaran pada saat terima raport atau pengambilan hasil belajar



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Prosentase Pelayanan Kesehatan Pada penduduk Usia Produktif (15 – 59 Tahun) sesuai Standard Prosentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi sesuai Standard	100 % 100 %	33,95 % 40,83 %	633.727.500 173.868.000 (27,44%)	Belum Tercapai, karena : - adanya PPKM pd masa pandemi membuat pertemuan tatap muka dibatasi, shg pertemuan juga terbatas - SDM terbatas - indikator banyak, shg banyak pelaksanaan yg tidak dilaksanakan - tdk adanya nakes di desa yg mempunyai tupoksi di luar Kesehatan Ibu Anak (KIA) KB - Tidak dilaksanakan - nya pengadaan bahan cetak sebagai media KIE
2.7	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	- Prosentase Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Mellitus sesuai Standard	100 %	70,39 %	6.920.500 0 (0 %)	Belum tercapai, utk kegiatan DM penggunaan anggaran sudah masuk ke sub kegiatan usia produktif (pelayanan PTM te adu)
2.8	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Prosentasi Pelayanan Kesehatan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ Berat)	100 %	52,85 %	14.866.000 14.866.000 (100 %)	Belum tercapai, karena - Koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal - Stigma masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes
2.9	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Kasus TB Resisten Obat yang Memulai Pengobatan Lini Kedua Jumlah	65 orang 40 faskes	53 Orang 43 Faskes	3.357.724.250 3.253.163.500 (96,89 %)	Belum tercapai, karena : Pengurangan jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehunga



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Laboratorium Mikroskopik yang Mengikuti Uji Silang	2.300 kasus	1.130 kasus		kunjungan ke puskesmas juga menurun Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi.
		Jumlah Semua Kasus TB yang Ditemukan dan Diobati	90%	33,85%		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
2.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah ODHA yang didampingi dan di follow up Pengobatan	65 orang	87 orang	1.062.721.490 1.013.921.000 (95,41%)	
		Jumlah puskesmas dan RS mampu melakukan layanan Konseling dan Test HIV	10 faskes	45 Faskes		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85%	71,08%		
2.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Luar Biasa (KLB)	Dokumen penanggulangan KLB	1 dokumen	1 dokumen	618.958.989 592.729.000 (95,76%)	Tercapai
2.12	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan atau Be otensi Bencana	Dokumen pelayanan kesehatan pengungsi korban bencana (dokumen)	1 dokumen	1 Dokumen	18.390.000 18.390.000 (100%)	Tercapai
2.13	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah puskesmas yg menyelenggarakan kesehatan tradisional (puskesmas)	32 pusk	38 pusk	32.117.000 32.086.000 (99,90 %)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.14	Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen kesehatan jamaah haji (pemeriksaan dan pelacakan pasca haji (dokumen) Dokumen surveilans penyakit (PD3I), diare, typhoid, surveilans te adu, puskesmas) (dokumen)	6 dokumen 7 dokumen	1 Dokumen 7 Dokumen	371.187.474 363.916.720 (98,04%)	Belum tercapai, krn ada pandemi covid-19 menyebabkan pemberangkatan haji di tahun 2021 ditunda sehingga keg. pemeriksaan dan pelacakan pasca haji tidak sepenuhnya dilaksanakan
2.15	Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	- Jumlah desa total coverage PIS PK - Jumlah pos kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kegawatdaruratan (poskes) - Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan perawatan kesehatan masyarakat (perkesmas) - Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi - Puskesmas yang mendapatkan pembinaan PIS PK	297 desa 59 poskes 38 puskesmas 38 puskesmas 38 puskesmas	297 desa 63 poskes 38 puskesmas 38 puskesmas 38 puskesmas	. 884.773.017,- . 800.494.063,- (90,47 %)	Tercapai
2.16	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen pencegahan dan pengendalian penyakit menular (DBD, kusta, HIV, Tb, Pneumonia, Filariasis) Jumlah foging focus dilaksanakan Jumlah media KIE (TB, HIV, Kusta, DBD, Pneumonia, Filariasis) Jumlah rumah yang dimonitor jentik nyamuk Jumlah suspek belkaga yang diperiksa	30 buah 30 rumah 400 buah 200 rumah 10 orang	30 buah 30 rumah - 1.000 rumah 12 orang	639.987.800 526.800.000 (82,31%)	Pada pelaksanaan media KIE belum tercapai, karena : - KAK/spesifikasi yang kurang jelas - Jadwal pelaksanaan kurang selaras dg kegiatan terkait - Spesifikasi terlalu umum krn kompetensi teknis terbatas - Survei dan informasi harga terbatas



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pembiayaan kesehatan	16.000 jiwa	60.881 jiwa	33.411.925.225 32.128.850.819 (96,16%)	Tercapai, masyarakat kurang mampu yang mendapatkan pembiayaan Kesehatan telah melebihi target
2.18	Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	- Jumlah FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) non puskesmas yg mendapat sosialisasi akreditasi FKTP (FKTP) - Jumlah puskesmas terakreditasi	150 FKTP 38 puskesmas	0 FKTP 38 Pusk	3.098.217.000 348.379.000 (11,24 %)	Belum Tercapai, karena : - Adanya pandemi Covid-19 (status kegawatdarutan Covid-19 belum dicabut); - Belum ada petunjuk terbaru tentang Instrumen Standar Akreditasi FKTP Non Puskesmas; - Belum adanya kesiapan narasumber atau surveyor Akreditasi FKTP Non Puskesmas
2.19	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon (skdr) (dokumen)	1 dokumen	1 Dokumen	16.202.000 16.201.800 (100%)	Tercapai
3.	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya data dan informasi Bidang Kesehatan	100%	100%	4.213.922.633 4.026.845.450 (95,56%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jenis dokumen kesehatan keluarga (dokumen pemetaan keluarga sadar gizi, dokumen konsumsi garam beryodium, dokumen pemantauan status gizi balita, dokumen kesehatan lansia) (dokumen) Jumlah kader posyandu yang mendapat transport	20 dokumen 8.800 orang	20 dokumen 8.790 orang	3.686.729.433 3.514.685.500 (95,33%)	Tercapai, namun tidak semua kader posyandu mendapat transport sesuai target karena sudah ada kader yang pensiun
3.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jenis Dokumen data dan Informasi Kesehatan (Profil, Komdat Pusdatin,	7 dokumen	7 dokumen	527.193.200 512.159.950 (97,15%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Data Dasar Fasyankes, SPM, SIK, dokumen hasil riset/pengembangan bidang kesehatan, SIK Online)				
4.	Kegiatan Penerbitan Ijin Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase fasilitas Kesehatan yang memiliki izin pelayanan kesehatan	100 %	100 %	111.084.600 106.721.713 (96,07%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Rumah Sakit Kelas C, D, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis perijinan (SIP, SIK dokter dan nakes lain, RS, Klinik, Apotek)	290 sertifikat	1.280 sertifikat	111.084.600 106.721.713 (96,07%)	Tercapai, semua jenis perijinan (SIP, SIK dokter dan nakes lain, RS, Klinik, Apotek) telah dilayani 100 %
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya sumber daya Kesehatan	100%	100%	16.900.104.798 16.603.755.805 (98,25 %)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Meningkatnya sumber daya Kesehatan	100%	100%	16.805.981.798 16.531.899.805 (98,37%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jenis Dokumen SDM Kesehatan dan Pengembangan PPK BLUD	2 dokumen	2 dokumen	16.805.981.798 16.531.899.805 (98,37%)	Tercapai
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya sumber daya Kesehatan	100%	100%	94.123.000 71.856.000 (76,34 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kader bersertifikat KISS (orang) Jumlah kader bersertifikat PMBA (orang) Jumlah tenaga kesehatan bersertifikat penanganan neonates (orang) Jumlah tenaga kesehatan bersertifikat MTBM (orang) Jumlah tenaga kesehatan bersertifikat MTBS (orang) Jumlah tenaga kesehatan bersertifikat SDIDTK (orang)	400 orang 200 orang 80 orang 40 orang 40 orang 40 orang	400 orang 200 orang 80 orang 40 orang 40 orang 40 orang	94.123.000 71.856.000 (76,34 %)	Tercapai
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	- Jumlah Puskesmas, Sarana Distribusi Kosmetik, Obat Tradisional yang diawasi - Persentase ketersediaan obat dan perbelkes di Puskesmas	- 38 puskesmas, 300 jenis Kosmetik, obat tradisional, 250 dok - 95%	- 38 puskesmas, 300 jenis Kosmetika, obat tradisional, 250 dok - 100%	16.784.212.007 15.051.983.723 (89,68 %)	Tercapai
1	Kegiatan Pemberian Ijin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Puskesmas, Sarana Distribusi Kosmetik, Obat Tradisional yang diawasi	38 puskesmas, 300 jenis Kosmetika, obat tradisional, 250 Dokumen	38 Puskesmas, 300 jenis kosmetika, obat tradisional, 250 dokumen	16.737.604.007 15.006.433.723 (97,73 %)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta	Jumlah Puskesmas, Sarana Distribusi Kosmetik, Obat	38 puskesmas, 300 jenis Kosmetika,	38 Puskesmas, 300 jenis	425.183.600 415.521.655 (97,73 %)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Tradisional yang diawasi	obat tradisional, 250 Dokumen	kosmerika, obat tradisional, 250 dokumen		
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perijinan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perijinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase ketersediaan obat dan perbelkes di puskesmas yang tersedia	95%	100%	16.312.420.407 14.590.912.068 (89,45 %)	Tercapai
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Presentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat	100 %	100 %	46.608.000 45.550.000 (97,73%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Ijin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sertifikat produksi pangan IRT	210 sertifikat	214 sertifikat	46.608.000 45.550.000 (97,73 %)	Tercapai, sertifikat produksi pangan IRT terlayani 100%
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)	80%	100%	1.984.485.219 1.871.107.200 (94,29 %)	Tercapai
1	Kegiatan	Presentase	80%	100%	1.787.449.219	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)			1.679.676.200 (93,97 %)	
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	TPM memenuhi syarat Kesehatan TTU memenuhi syarat Kesehatan Desa melaksanakan STBM Akses jamban Akses Air minum Kampanye GERMAS Komunikasi antar personal Limbah medis B3 Pelatihan multi media Kabupaten / kota sehat Desa siaga aktif	63 % 64 % 92 desa 95 % 95 % 3 Keg 120 peserta 38 puskesmas 80 peserta 4 tatanan 82 desa	74,75 % 65 % 297 kel/desa 100 % 95,76 % 3 keg 120 peserta 38 puskesmas 80 peserta 4 tatanan 297 kel/desa	1.787.449.219 1.679.676.200 (93,97 %)	Tercapai
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas (%)	80%	100%	197.036.000 191.431.000 (97,16%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Tes Tingkat kebugaran Puskesmas melaksanakan Kesling	15 SKPD 38 puskesmas	15 SKPD 38 puskesmas	197.036.000 191.431.000 (97,16 %)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	- Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor - Presentase Dokumen Keuangan Terekap Dengan Baik	100 % 100 %	100 % 100 %	117.056.809.288 113.640.220.168 (97,08 %)	Belum Tercapai, utk pembuatan Buku Saku Th 2021 belum dpt dilaksanakan krn minimnya waktu penyusunan



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		- Presentase Pegawai Berkompetensi - Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik - Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	17 dokumen	16 dokumen	353.438.960 218.957.200 (61,95 %)	Belum Tercapai, karena waktu yang dibutuhkan utk penyusunan buku saku tahun 2021 tidak mencukupi
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	Dokumen perencanaan tersedia	2 dokumen	2 dokumen	106.030.000 68.744.600 (64,84%)	Tercapai, namun adanya peraturan mengenai PPKM pada masa pandemi membuat keg. pertemuan tatap muka diganti menjadi secara online sehingga realisasi keuangan tidak dapat terserap semua
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA tersedia	1 dokumen	1 dokumen	75.970.000 46.917.000 (61,76%)	
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA tersedia	1 dokumen	1 dokumen	9.750.000 3.949.000 (40,50%)	
1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA tersedia	1 dokumen	1 dokumen	2.745.000 1.400.000 (51 %)	
1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA tersedia	1 dokumen	1 dokumen	2.925.000 1.500.000 (51,28%)	
1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan	Dokumen laporan evaluasi tersedia	11 dokumen	10 dokumen	156.018.960 96.446,600	



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				(61,82%)	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Dokumen Keuangan Terekap Dengan Baik	100 %	100 %	107.380.640.878 106.564.180.551 (99,24%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	107.273.194.978 106.458.621.551 (99,24%)	-
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Presentase Dokumen Keuangan Terekap Dengan Baik	100 %	100 %	107.445.900 105.559.000 (98,24%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai Berkompetensi	100 %	100 %	488.255.600 327.668.350 (69,16%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu (Stel) Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)	- 7 Stel Seragam Satpam & perlengkapan - 130 potong kain Batik - 130 pasang sepatu olahraga	- 7 Stel Seragam Satpam & perlengkapan - 130 potong kain Batik - 122 pasang sepatu olahraga	88.559.600 77.805.000 (87,86%)	Tercapai (Sepatu olahraga dibelanjakan sesuai jumlah karyawan saat itu)
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur/pegawai (orang)	45 org pengelola TU 2 x PAK jabfung 2 x klarifikasi ijin perceraian 1 x klarifikasi pelanggaran disiplin 1 x rapat eva aset 38 x movev pusk	45 org pengelola TU 2 x PAK jabfung 2 x klarifikasi ijin perceraian 1 x klarifikasi pelanggaran disiplin 1 x rapat eva aset 38 x movev pusk	399.696.000 259.863.350 (65,02%)	Tercapai, untuk kegiatan perjalanan dalam daerah dalam rangka monitoring vaksinasi covid sudah di handle dan diawasi oleh SKPD lain
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	1.232.273.840 1.205.696.637 (97,84%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi	Jenis Komponen listrik/ penerangan	6 Jenis komponen	8 Jenis komponen	69.998.900 69.084.500	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	(Jenis)	instalasi listrik 4 jenis pemeliharaan instalasi listrik	instalasi listrik 4 jenis pemeliharaan instalasi listrik	(98,69%)	
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	45 jenis ATK	45 jenis ATK	100.240.000 100.192.500 (99,95%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	14 jenis ART	14 jenis ART	28.940.000 28.867.000 (99,75%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	135 jenis makmin dan kebutuhan dapur	135 jenis makmin dan kebutuhan dapur	194.220.000 190.999.500 (98,34%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	13 jenis barang cetakan dan 1 paket penggandaan	13 jenis barang cetakan dan 1 paket penggandaan	49.999.940 49.428.400 (98,86%)	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Tersedia (Jenis)	6.400 jenis	6.400 jenis	30.000.000 29.364.000 (97,88%)	Tercapai
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	200 Laporan	200 Laporan	758.875.000 737.760.737 (97,22%)	Tercapai, namun adanya peraturan mengenai PPKM sehingga untuk perjalanan keluar daerah tidak terserap semuanya
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	74%	2.081.008.460 1.426.218.820 (68,53%)	Belum tercapai, karena sarana dan prasarana utk gudang farmasi tdk dilaksanakan dikarenakan jangka waktu yg terbatas
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional baru (unit)	1 unit kendaraan roda empat 5 unit kendaraan roda dua	1 unit kendaraan roda empat 5 unit kendaraan roda dua	595.561.000 524.400.000 (88,05%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur baru (Jenis)	16 bh kursi kerja 2 set sofa 20 bh kursi	16 bh kursi kerja 2 set sofa 20 bh kursi	75.586.000 75.130.000 (99,40%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
			putar	putar		
5.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Perlengkapan gedung kantor baru(Jenis)	211 bh/unit/set	155 bh/unit/set	1.409.861.460 826.688.820 (58,64%)	Belum tercapai karena waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa tidak mencukupi
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Aset Dalam Kondisi Baik	100%	100%	3.508.352.140 2.662.218.661 (75,88%)	Tercapai, namun untuk realisasi keuangan diserap sesuai kebutuhan
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	12 bulan tagihan air 12 bulan tagihan listrik 12 bulan tagihan telepon 12 bulan tagihan internet	12 bulan tagihan air 12 bulan tagihan listrik 12 bulan tagihan telepon 12 bulan tagihan internet	526.260.000 405.898.871 (77,13%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang) - jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah) - Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia (orang)	6 orang Cleaning Service 10 buah 262 orang	6 orang Cleaning Service 10 buah 262 orang	2.982.092.140 2.256.319.790 (75,66%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	90%	2.012.839.410 1.226.025.949 (60,87%)	Belum tercapai, karena Rehab Gudang Instalasi Farmasi belum dapat dilaksanakan disebabkan keterbatasan waktu dalam pengerjaannya
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik (Unit) Jumlah kendaraan dinas / operasional rusak menjadi baik (Unit) Jumlah Mobil diproses surat perijinannya	- 13 unit mobil operasional dan SPGDT - 6 unit kendaraan SPGDT - 30 unit kendaraan operasional	- 13 unit mobil operasional dan SPGDT - 6 unit kendaraan SPGDT - 30 unit kendaraan operasional	181.066.700 167.682.799 (92,61%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		(Unit) Jumlah Motor diproses surat perijinannya (unit)				
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik(Unit)	40 Meja kerja dipolitur	40 Meja kerja dipolitur	5.000.000 4.554.000 (91,08%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	- Isi Ulang tabung pemadam kebakaran 6 unit -Pemeliharaan cctv 7 unit -Pemeliharaan AC 25 unit -Pemeliharaan telepon PABX 1 unit -Pemeliharaan Komputer ringan 38 unit -Pemeliharaan Komputer sedang -Pemeliharaan Printer ringan 20 unit	- Isi Ulang tabung pemadam kebakaran 6 unit - Pemeliharaan cctv 7 unit - Pemeliharaan AC 25 unit - Pemeliharaan telepon PABX 1 unit - Pemeliharaan Komputer ringan 38 unit - Pemeliharaan Komputer sedang - Pemeliharaan Printer ringan 2 unit	133.238.000 132.891.150 (99,74%)	Tercapai
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (paket)	6 paket : -Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Ruang Promkesling -Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Ruang Umpeg dan Progkeu -Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Ruang Yankes Primer Rujukan -Pemeliharaan	5 paket - Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Ruang Promkesling - Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Ruang Umpeg dan Progkeu - Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan	1.693.534.710 920.152.000 (54,33%)	Belum tercapai, yaitu pada Rehab Gudang Instalasi Farmasi belum dapat diserap karena keterbatasan waktu untuk pengerjaannya



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
			Taman Dinkes -Pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan kantor - Rehab Gudang Instalasi Farmasi	Ruang Yankes Primer Rujukan - Pemeliharaan Taman Dinkes - Pemeliharaan rutin berkala gedung dan bangunan kantor		

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan menghadapi beberapa masalah di antaranya :

A. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

- 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai permasalahan terkait dengan Pembuatan Buku Saku Tahun 2021 yang tidak terlaksana karena waktu penyusunan yang terbatas dan adanya aturan PPKM pada masa pandemi membuat pertemuan yang melibatkan banyak orang tidak dapat dilaksanakan secara langsung sehingga capaian realisasi keuangan tidak dapat terserap semua. Solusi dengan penyelesaian pembuatan buku saku tahun 2022 harus dibuat di awal tahun, maksimal pada semester I dan mengganti pertemuan atau rapat secara *online*.
- 2.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mempunyai permasalahan target tidak terpenuhi karena waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan barang/jasa tidak mencukupi, penyelesaian dengan mengalokasikan kembali belanja tersebut di tahun anggaran berikutnya
- 3.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mempunyai permasalahan target tidak terpenuhi karena waktu yang dibutuhkan untuk



melaksanakan lelang Rehab Gudang Instalasi Farmasi tidak mencukupi, Solusi mengajukan nota dinas

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada Sub kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditemukan masalah realisasi keuangan dan fisik tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Hal ini terjadi karena:

- Terdapat belanja modal peralatan studio, yang sudah ada dalam pengadaan unit ambulance.
- Terdapat belanja beberapa alat kesehatan umum lainnya, yang sudah ada dalam pengadaan unit ambulance.
- Terdapat belanja modal SAR lainnya, yang sudah ada dalam pengadaan unit ambulance.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya dengan:

- Tidak membelanjakan belanja modal studio berupa microphon TOA dan microphone wirelles.
 - Tidak membelanjakan belanja modal berupa blood pressure monitor, brankart beroda, cukup oksigen, kotak P3K, oxygen regulator, oksigen set, standar infuse beroda, stetoskop ABN, tas PPPK.
 - Tidak membelanjakan belanja modal SAR lainnya berupa basket strecher.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pada :
- a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, memiliki permasalahan antara lain 1) Masih ada ibu hamil yang mempunyai sugesti takut bersalin di faskes di masa pandemi covid-19; 2) Ada sebagian kecil ibu hamil yang bersalin sebelum mencapai tempat fasilitas kesehatan (kebrojolan) 3) Untuk jumlah dukun bayi yg melaksanakan maklumat dukun bayi tidak mencapai target karena terdapat dukun bayi yang meninggal. Solusi : 1) Mengefektifkan peran masyarakat dan nakes untuk konseling pada ibu hamil; 2) Pemantauan ibu hamil lebih ketat dan



sesuai SOP agar tidak terjadi kebrojolan; 3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pendampingan ibu hamil

- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, memiliki permasalahan antara lain karena adanya pandemi menyebabkan kunjungan balita ke posyandu menurun. Kemudian tidak semua kader posyandu mendapat transport sesuai target karena sudah ada kader yang pensiun. Solusi dengan melaksanakan Posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat
- c) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar, memiliki permasalahan antara lain karena pada masa pandemi pertemuan tatap muka di sekolah belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga penjangkaran kesehatan pada usia pendidikan dasar masih terbatas. Solusi dengan janji temu dengan pihak sekolah untuk melaksanakan penjangkaran pada saat terima rapot atau pengambilan hasil belajar.
- d) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan, memiliki permasalahan antara lain dengan adanya pandemi covid-19 menyebabkan pemberangkatan haji di tahun 2021 ditunda sehingga kegiatan pemeriksaan dan pelacakan pasca haji tidak sepenuhnya dilaksanakan. Solusi jika tahun 2022 penyelenggaraan ibadah haji jadi dilaksanakan, maka kegiatan seperti pemeriksaan dan pelacakan haji akan dilaksanakan.
- e) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, memiliki permasalahan :
 - Kondisi Pandemi sehingga kegiatan di Posbindu dihentikan
 - Pembatasan Jam Kunjungan ke Puskesmas yang menyebabkan turunnya angka kunjungan di Puskesmas
 - Dana untuk Kegiatan untuk Posbindu banyak yang difokuskan untuk penanganan Pandemi
 - Di Desa/Kelurahan Belum ada petugas Kesehatan misalnya perawat yang khusus mempunyai tupoksi Program P2PTM
 - Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit (DDFR PTM) Tidak Menular masih rendah, dianggap tidak penting.



- Karena sasaran kegiatan adalah orang sehat/ merasa sehat sehingga kesulitan dalam penggerakan masyarakat untuk datang ke fasilitas keehatan (Puskesmas dan jaringannya) untuk melakukan DDFR PTM.
- Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Posbindu PTM/kelurahan
- Belum semua Desa mempunyai Posbindu Kit
- Keterbatasan logistik untuk pemeriksaan gula darah.
- Belum semua Desa/Kelurahan yang mempunyai Posbindu PTM mempunyai Kader terlatih
- Masih Lemahnya Sistem Pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Puskemas dan jaringannya.
- Kegiatan pengadaan bahan cetak pada pelaksanaan media KIE tidak dapat dilaksanakan karena 1)KAK/spesifikasi yang kurang jelas disebabkan *vested interest*, kompetensi rendah, tidak dilakukan survei pengguna yang berisiko tujuan pengadaan barang dan jasa tidak tercapai, barang/jasa tidak sesuai kebutuhan, terjadinya kemahalan/monopoli dan permasalahan hukum; 2) Jadwal pelaksanaan proses pengadaan kurang selaras dengan kegiatan terkait; 3) Spesifikasi terlalu umum krn kompetensi teknis terbatas, tidak dilengkapi riset pasar yang berisiko multi tafsir, sulit dalam evaluasi, barang jasa tidak sesuai kebutuhan, terjadinya sengketa dan potensi kerugian negara; 4) Sulitnya PPK menentukan HPS dikarenakan survei dan informasi harga terbatas yang berisiko mengurangi peluang belanja, menaikkan jaminan dan gagal tender/seleksi.

Solusi :

- Melaksanakan Koordinasi Lintas sektor terkait (desa/kelurahan) untuk mengadakan Posbindu Kit dan menyediakan bahan habis pakai pemeriksaaan Gula Darah
- Melaksakan KIE kepada masyarakat tentang Pentingnya DDFR PTM
- Melaksanakan Pelatihan kader Posbindu secara bertahap
- Bimbingan Teknis untuk pencatatan dan pelaporan program
- Lebih meningkatkan koordinasi antara tim perencana dan pelaksana program di bagian pencegahan dan pengendalian penyakit



- f) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus, Permasalahan:
- Masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan kegiatan di Puskesmas
 - Pengurangan jam kunjungan di Puskesmas yang menyebabkan angka kunjungan turun
 - Selama masa Pandemi Masyarakat enggan berkunjung ke fasilitas kesehatan
- Solusi :
- Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas
 - Perlu diadakan petugas kesehatan di desa/kelurahan yang khusus penangani Prgram P2PTM
- g) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat , Permasalahan :
- Koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal
 - Stigma masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes
- Solusi :
- KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan advokasi perangkat desa saat kunjungan ke keluarga ODGJ pasung,
 - Sudah terbentuk TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) sehingga wadah koordinasi penanganan ODGJ lebih meningkat
- h) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV, mempunyai permasalahan :
- Pengurangan Jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun
 - Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi
- Solusi :
- BinteK ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen
 - Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas
- i) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, indikator Jumlah FKTP Non Puskesmas yang mendapatkan sosialisasi akreditasi



FKTP belum tercapai, dikarenakan mempunyai permasalahan : 1) Adanya pandemi Covid-19 (status kegawatdarutan Covid-19 belum dicabut); 2) Belum ada petunjuk terbaru tentang Instrumen Standar Akreditasi FKTP Non Puskesmas; dan 3) Belum adanya kesiapan narasumber atau surveyor Akreditasi FKTP Non Puskesmas, dengan penyelesaian Kegiatan Sosialisasi Akreditasi FKTP Non Puskesmas dialihkan untuk kegiatan sosialisasi Akreditasi Puskesmas.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab/Kota pada Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar, capaian realisasi fisik 100% sedangkan capaian realisasi keuangan 98,37% karena pada kegiatan insentif tenaga kesehatan untuk RSUD Bumiayu, tenaga kesehatan yang menangani covid lebih sedikit dibandingkan anggaran yang tersedia dan nilai HPS (nilai kontrak) untuk pembangunan puskesmas lebih rendah daripada pagu anggaran sehingga anggaran tidak dapat terserap semua.

Penghargaan yang Didapat Pada Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional Pada Tahun 2021

- 1) Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada 38 puskesmas se-Kabupaten Brebes sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan alat kesehatan bermerkuri Tahun 2021
- 2) Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes (Puskesmas Bumiayu) dengan Inovasi PeDeKaTe ABK (Peduli Deteksi dan Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus) sebagai TOP 10 (Kategori kabupaten dan Kota) Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021



Tabel III.12
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Labkesda Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
UPTD LABKESDA						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	100%	386.184.000 348.575.447 (90%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	100%	10.000.000 7.599.319 (76%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Laporan Penyerapan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1 Dok.	1 Dok.	10.000.000 7.599.319 (76%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	-	-	Perubahan
2.1	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Tahun	-	-	Perubahan
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	100%	73.625.000 61.175.972 (83%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	2.000.000 1.735.500 (87%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	12.731.700 11.789.872 (93%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	1 Paket	9.709.400 9.493.350 (98%)	Tercapai
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	30.421.000 23.072.750 (76%)	Tercapai
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	14.752.900 11.381.600	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
					(77%)	
3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun	-	-	Perubahan
3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Perjalanan Dinas Luar Daerah)	1 Tahun	1 Tahun	4.010.000 3.702.900 (92%)	Tercapai
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	2.580.000 1.838.000 (71%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 Unit	5 Unit	2.580.000 1.838.000 (71%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	92%	237.405.000 217.866.956 (92%)	Tidak Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	2 Bulan	1 Bulan	12.000.000 1.596.956 (13%)	Belum Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor (Dokter, Tenaga Laboratorium, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan)	13 Orang	13 Orang	225.405.000 216.270.000 (96%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Lingkungan Kantor	100%	100%	62.574.000 60.095.200 (96%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	2 Unit	4.904.000 2.970.200 (61%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (AC, Laptop/Komputer, Printer)	12 Unit	12 Unit	7.500.000 7.425.000 (99%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	50.170.000 49.700.000 (99%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100%	100%	410.706.000 401.546.560 (98%)	Tercapai
7	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100%	100%	329.950.000 327.583.660 (91%)	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	1 Paket	107.450.000 105.120.500 (98%)	Tercapai
7.2	Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Reagen	1 Paket	1 Paket	190.000.000 189.981.960 (100%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Bahan Habis Pakai	Tersedianya Bahan Habis Pakai (BHP)	1 Paket	1 Paket	32.500.000 32.481.200 (100%)	Tercapai
8	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100%	100%	61.000.000 54.602.900 (90%)	Tercapai
8.1	Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Tahun	1 Tahun	46.000.000 46.000.000 (100%)	Tercapai
8.2	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000 8.602.900 (57%)	Tercapai
9	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan	100%	100%	19.756.000 19.360.000 (98%)	Tercapai
9.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Tersedianya Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Unit	3 Unit	19.756.000 19.360.000 (98%)	Tercapai
III	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN, DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang Tersedia	100%	100%	70.000.000 69.887.400 (100%)	Tercapai
10	Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	Persentase Ketersediaan Obat dan Perbelkes di Puskesmas yang	100%	100%	70.000.000 69.887.400 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
	Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tersedia				
10.1	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Laboratorium	1 Tahun	1 Tahun	70.000.000 69.887.400 (100%)	Tercapai
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Tersedia (%)	100%	100%	123.900.000 108.967.100 (88%)	Tercapai
11	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Tersedia (%)	100%	100%	123.900.000 108.967.100 (88%)	Tercapai
11.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Tahun	1 Tahun	123.900.000 108.967.100 (88%)	Tercapai

Permasalahan dan solusi:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes.
Solusi/Penyelesaian : -
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (*Perubahan*)
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes..
Solusi/Penyelesaian : -



- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Permasalahan Tidak terserapnya 100% (seratus persen) anggaran tagihan listrik yang dianggarkan untuk 2 bulan tagihan namun ternyata tagihan terhitung hanya 1 (satu) bulan saja yaitu bulan Desember 2021 untuk gedung baru UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : Penyesuaian dengan anggaran tahun berikutnya.
 - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
 - b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
 - c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman
- a. Kegiatan Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar



realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Brebes. Solusi/Penyelesaian : -

Tabel III. 13
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Klinik Pengobatan Paru dan Kusta Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
UPTD KP2K						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di wilayah kerja UPTD KP2K	100 %	100%	.537.004.950 .476.304.894 (88,70%)	Tercapai
1	Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100%	.60.406.290 .58.435.510 (96,74%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	1 Paket	1 Paket	.2.803.200 .2.539.000 (90,58%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis alat tulis kantor, matrai dan jasa pengiriman	1 Paket	1 Paket	.11.821.090 .10.174.610 (86,07%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan makan minum dan pengisian elpiji	1 Paket	1 Paket	.33.377.000 .33.366.900 (99,97%)	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis fotocopy, jilid dan cetak	1 Dokumen	1 Dokumen	.12.405.000 .12.355.000 (99,60%)	Tercapai
2	Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat penyediaan jasa penunjang di wilayah kerja UPTD KP2K	100%	100 %	.372.070.000 .318.205.935 (85,52%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jenis tagihan yang dibayarkan untuk air listrik dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	.138.930.000 .86.290.935 (62,11%)	Tidak tercapai
2.2	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jenis pembayaran untuk tenaga pelayanan umum kantor	15 Orang	15 Orang	.233.140.000 .231.915.000 (99,47%)	Tercapai
3	Kegiatan : Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemeliharaan barang di wilayah kerja UPTD KP2K	100%	100%	.104.528.660 .99.663.449 (95,35%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dilakukan proses perijinan dan pemeliharaan	2 Unit	2 Unit	.13.850.000 .11.374.901 (82,13%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dilakukan pemeliharaan	25 unit	25 unit	.59.228.060 .58.850.448 (99,36%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 Unit	.31.450.600 .29.438.100 (%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya sumber daya kesehatan	100%	96,83%	.105.971.050 .102.615.900 (96,83%)	Tercapai
1	Kegiatan : Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	Tersedianya bahan habis pakai dan prasarana untuk memberikan pelayanan kesehatan	3 paket	3 Paket	.102.371.050 .99.315.900 (97,02%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan : Pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Tersedianya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan	2 Paket	2 Paket	.20.165.000 .19.913.182 (98,75%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan : Pengadaan bahan habis pakai	Tersedianya barang habis pakai di UPTD KP2K	2 Paket	2 Paket	.82.206.050 .79.402.718 (96,59%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
2	Kegiatan : Penerbitan izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase faskes yang memiliki ijin pelayanan kesehatan	100%	100%	.3.600.000 .3.300.000 (91,67%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan : Peningkatan tata kelola ruah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen izin operasional	1 paket	1 Paket	.3.600.000 .3.300.000 (91,67%)	Tercapai
III	PROGRAM PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	.8.000.000 .7.184.500 (97,68%)	Tercapai
1	Kegiatan : Pelaksanaan sehat dalam rangka promotive/preventif tingkat daerah kabupaten/kota	Jenis media promosi seperti radio spot, baliho, bendera, dll	1 Paket	1 Paket	.8.000.000 .7.814.500 (97,68%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan hidup bersih dan sehat	Jenis media promosi kesehatan	1 Paket	1 Paket	.8.000.000 .7.814.500 (97,68%)	Tercapai

Permasalahan dan solusi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. realisasi keuangan disesuaikan dengan jumlah tagihan. Solusi / Penyelesaian Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Permasalahan Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan karena pembayaran dan pembelian barang disesuaikan dengan kebutuhan dan tagihan dari penyedia jasa. Solusi / Penyelesaian : Meminimalisir anggaran untuk tahun berikutnya dengan pertimbangan jumlah pemakaian dan kemungkinan kenaikan harga dari penyedia jasa.



- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan disesuaikan dengan besar dan frekuensi kerusakan mesin, serta tagihan dari penyedia jasa. Solusi / Penyelesaian : Anggaran disesuaikan dengan tahun sebelumnya.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan tidak 100% dikarenakan adanya efisiensi harga dan disesuaikan dengan kebutuhan. Solusi / Penyelesaian : Adanya penyesuaian dan peninjauan kembali harga pagu.
 - b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan jumlah tagihan penyedia jasa. Solusi / Penyelesaian : Adanya ketelitian dan penyesuaian harga pagu dengan dengan penyedia jasa.
3. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 - a. Kegiatan Pelaksanaan sehat dalam rangka promotive/preventif tingkat daerah kabupaten/kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan efisiensi harga. Solusi / Penyelesaian : Disesuaikan dengan anggaran tahun sebelumnya.

Tabel III. 14
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Puskesmas Tanjung
Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UPTD PUSKESMAS TANJUNG						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	33.544.611.732 28.278.755.287 (84,30%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Penunjang Pelayanan BLUD	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	33.544.611.732 28.278.755.287 (84,30%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayan BLUD	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan perawatan kesehatan (perkesmas)	9 Puskesmas	9 Puskesmas	33.544.611.732 28.278.755.287 (84,30%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	5.706.400.000 4.693.965.320 (82,26%)	-
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.620.800.000 2.033.486.000 (77,59%)	-
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	2.620.800.000 2.033.486.000 (77,59%)	Tercapai
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	3.085.600.000 2.660.479.320 (86,22%)	-
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	3.085.600.000 2.660.479.320 (86,22%)	Tercapai

Permasalahan dan Solusi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Kegiatan Penunjang Pelayanan BLUD mempunyai permasalahan yaitu Penerapan PPK-BLUD Puskesmas di Kabupaten Brebes belum optimal sehingga menghambat proses



pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dengan penyelesaian melaksanakan pendekatan dengan pengambil kebijakan dalam memahami penerapan PPK BLUD di Puskesmas, koordinasi dengan Dinas Kesehatan, BPKAD, dan BPKP dalam menerapkan sistem pada Badan Layanan Umum Daerah.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pelaksanan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota mempunyai permasalahan yang hampir sama yaitu dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Tennis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 sehingga mengakibatkan pergeseran anggaran dan menyebabkan pada beberapa kode rekening yaitu belanja jasa penyelenggaraan acara (transport kegiatan) yang tidak terserap secara maksimal dikarenakan beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana mempertimbangkan adanya pandemi Covid-19, dan pada kode rekening belanja jasa tenaga laboratorium atau insentif tracer dan tenaga yang melaksanakan pemantauan yang tidak dapat terserap maksimal karena adanya penurunan kasus sejak september sampai dengan desember sehingga membuat anggaran tidak dapat diserap, dengan penyelesaian koordinasi kepada pengelola BOK Puskesmas untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sampai dengan tahun anggaran selesai.

Tabel III. 15

**Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Puskesmas Paguyangan
Tahun Anggaran 2021**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UPTD PUSKESMAS PAGUYANGAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	-	-	-	14.210.619.900 12.730.056.443 (89,6%)	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	14.210.619.900 12.730.056.443 (89,6%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Penyelenggaraan perawatan Kesehatan Masyarakat	5 puskesmas	5 puskesmas	14.210.619.900 12.730.056.443 (89,6%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	3.237.800.000 2.865.955.500 (88,52%)	-
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	2.601.800.000 2.283.195.700 (87,8%)	-
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan BOK Puskesmas	100%	100%	2.601.800.000 2.283.195.700 (87,8%)	Tercapai
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	636.000.000 582.759.800 (91,6%)	-
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Pelaksanaan BOK Puskesmas	100%	100%	636.000.000 582.759.800 (91,6%)	Tercapai

Permasalahan dan Solusi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD mempunyai permasalahan dengan menurunnya



pendapatan terutama dari Dana Kapitasi JKN sebagai akibat dari penghapusan kepesertaan JKN KIS di FKTP yang disebabkan oleh adanya data ganda dan penghapusan penerima JKN PBI sehingga Pendapatan tidak mencapai target dengan penyelesaian menentukan kegiatan - kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dan menunda atau meniadakan pelaksanaan kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya tanpa mengganggu Jalannya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran perubahan. Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pendapatan BLUD juga tidak mungkin dihabiskan menjadi 100% karena BLUD harus mempunyai cadangan kas untuk kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya dimana pendapatan BLUD belum masuk terutama untuk Gaji pegawai dan kegiatan yang harus dilaksanakan sebelum masuknya pendapatan di tahun 2022.

2. Program Penunjang Pemeberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Dearah Kabupaten / Kota mempunyai permasalahan tidak bisa memaksimalkan penyerapan anggaran yang berkaitan dengan kasus Covid -19 sebagai dampak dari penurunan jumlah kasus sehingga jumlah sample yang diperiksa juga menurun dan berakibat pada pencairan insentif tracer kurang dari target dengan penyelsaian tetap mengajukan pencairan insentif tracer sesuai dengan fakta dan data yang riil sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun tidak bisa dilaksanakan seluruhnya tetapi penyerapan anggaran sudah lebih dari 87%.
3. Program Penunjang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten / Kota mempunyai permasalahan yang sama berkaitan dengan kasus Covid-19. Penyerapan anggaran terkait insentif tracer covid -19 terkendala dengan menurunnya jumlah kasus yang signifikan sehingga tidak bisa maksimal sedangkan perubahan anggaran sudah tidak bisa dilakukan lagi terkait kebijakan pengelolaan dana DAK Non Fisik BOK degan penyelesaian tetap mengajukan pencairan dana sesuai data yang bisa dipertanggungjawabkan meskipun realisasi keuangan tidak maksimal akan tetapi sudah termasuk tinggi yaitu mencapai 91.6%.



Tabel III. 16
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Puskesmas Banjarharjo
Tahun Anggaran 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UPTD PUSKESMAS BANJARHARJO						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	35.585.569.034 33.033.012.947 (92,83%)	-
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	35.585.569.034 33.033.012.947 (92,83%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Penyelenggaraan perawatan Kesehatan Masyarakat	9 puskesmas	9 puskesmas	35.585.569.034 33.033.012.947 (92,83%)	Tercapai
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	-	-	-	6.088.003.000 5.868.766.560 (96,40%)	-
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	3.299.000.000 3.288.940.910 (99,69%)	-
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	3.299.000.000 3.288.940.910 (99,69%)	Tercapai
2	Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	-	-	-	2.789.003.000 2.579.825.650 (92,50%)	-
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	2.789.003.000 2.579.825.650 (92,50%)	Tercapai

Permasalahan dan solusi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Permasalahan yang ada adalah karena adanya penurunan pendapatan terutama dari Dana Kapitasi JKN sebagai akibat dari penghapusan kepesertaan JKN KIS di FKTP yang disebabkan oleh adanya data ganda dan penghapusan penerima JKN PBI sehingga Pendapatan tidak mencapai target (hanya 96,3%), dengan penyelesaian menentukan kegiatan - kegiatan yang prioritas untuk dilaksanakan dan menunda atau meniadakan pelaksanaan kegiatan yang masih bisa ditunda pelaksanaannya tanpa mengganggu Jalannya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Pendapatan BLUD juga tidak mungkin dihabiskan menjadi 100% karena BLUD harus mempunyai cadangan kas untuk kegiatan di awal tahun anggaran berikutnya. Pada awal tahun belum ada pendapatan BLUD yang masuk, sementara biaya operasional seperti Gaji pegawai kontrak BLUD dan PHL serta biaya operasional seperti listrik, internet, PAM, makan minum pasien harus tetap dibayar.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, peningkatan peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 9 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo. Solusi/Penyelesaian : -
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Permasalahan : Tidak ada permasalahan. Kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 9 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Banjarharjo. Solusi/Penyelesaian : -

Tabel III. 17
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Puskesmas Brebes

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UPTD PUSKESMAS BREBES						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	-	-	24.517.514.000 22.228.579.647 (90,66%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	KABUPATEN/KOTA					
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	24.517.514.000 22.228.579.647 (90,66%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Penyelenggaraan perawatan Kesehatan Masyarakat	9 puskesmas	9 puskesmas	24.517.514.000 22.228.579.647 (90,66%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	5.788.300.000 5.056.780.600 (87,36%)	Tercapai
1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	2.647.500.000 2.327.328.640 (87,90%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	2.647.500.000 2.327.328.640 (87,90%)	Tercapai
2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	3.140.800.000 2.729.451.960 (86,90%)	Tercapai
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	3.140.800.000 2.729.451.960 (86,90%)	Tercapai

Permasalahan dan solusi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan : Tidak ada permasalahan, kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 9 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Brebes. Solusi/Penyelesaian : -
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Permasalahan : Tidak ada permasalahan, kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 9 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Brebes. Solusi/Penyelesaian : -

Tabel III. 18

**Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
UPTD Puskesmas Bumiayu**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UPTD PUSKESMAS BUMIAYU						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	17.110.883.000 14.980.208.447 (87,5%)	-
1.	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Jenis Dokumen Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium	23 jenis	23 jenis	17.110.883.000 14.980.208.447 (87,5%)	Tercapai
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Puskesmas Penyelenggaraan perawatan Kesehatan Masyarakat	6 puskesmas	6 puskesmas	17.110.883.000 14.980.208.447 (87,5%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	-	-	3.838.200.000 3.326.724.510 (86,67%)	-
1.	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.952.100.000 1.686.767.260 (86,4%)	-
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	1.952.100.000 1.686.767.260 (86,4%)	Tercapai
2.	Kegiatan Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	1.886.100.000 1.639.957.250 (86,9%)	-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyelenggaraan BOK Puskesmas	100%	100%	1.886.100.000 1.639.957.250 (86,9%)	Tercapai



Permasalahan dan solusi:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Permasalahan Tidak ada permasalahan, kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 6 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu. Solusi/Penyelesaian : -
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Permasalahan : Tidak ada permasalahan, kegiatan dan besar realisasi keuangan sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan di 9 puskesmas wilayah kerja UPTD Puskesmas Bumiayu. Solusi/Penyelesaian : -

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan

A. Program Kesehatan Masyarakat

Program Kesehatan Masyarakat sudah menunjukkan kesesuaian dengan target kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Untuk indikator kinerja, Program Kesehatan Masyarakat memiliki 45 indikator namun masih terdapat 9 (sembilan) indikator yang capaiannya belum memenuhi target, yaitu :

1. Bayi usia 0-6 bulan dapat Asi Eksklusif 64,98% dari target 84%

Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemberian ASI Eksklusif. Solusi yang dapat diberikan dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya pemberian Asi Eksklusif.

2. Cakupan pelayanan balita (D/S) 73,7% dari target 89%

Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Adanya pandemi Covid-19 kunjungan balita ke posyandu menjadi turun. Solusinya : melaksanakan posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat.

3. Cakupan desa baik garam 73,3% dari target 100%

4. Cakupan RT yang mengkonsumsi garam yodium 95% dari target 100 %

Hal ini antara lain disebabkan karena 1)Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan garam beryodium; 2)Masih terdapat garam di pasar / toko yang menjual garam dengan kandungan yodiumnya rendah 3)Ada beberapa puskesmas yang belum melaksanakan pemantauan garam beryodium karena belum memiliki alat



untuk tes yaitu iodine test. Solusi yang dapat diberikan diantaranya 1) Penertiban penjual; 2) Berfungsinya Perda garam; dan 3) Peningkatan sosialisasi.

5. Prosentase cakupan K4 88,52% dari target 89%

Hal ini disebabkan karena banyak K1 akses (kunjungan bumil pertama kali periksa) sehingga K4 tidak terpenuhi. Solusi dengan 1) Melakukan kunjungan rumah, dan 2) Melalui penyuluhan ke calon pengantin.

6. Prosentase deteksi resiko dan komplikasi oleh masyarakat 44,5% dari target 46%.

Hal ini disebabkan masyarakat langsung kontak kepada tenaga kesehatan dalam mendeteksi risiko dan komplikasi. Solusi dengan meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (penyebarluasan informasi) dalam mendeteksi risiko dan komplikasi di masyarakat

7. Prosentase kunjungan bayi 90,2% dari target 94%.

Hal ini disebabkan 1) Adanya pandemi menyebabkan kunjungan bayi ke posyandu menurun, dan 2) Stok imunisasi dasar lengkap sempat kosong sehingga bayi tidak dapat melaksanakan imunisasi saat posyandu. Solusinya antara lain 1) Posyandu dilaksanakan dengan prokes ketat dan 2) Melengkapi stok imunisasi yg kurang

8. Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar 79,68% dari target 89 %

Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 sehingga kunjungan balita ke posyandu menurun. Solusi yang dapat diberikan dengan 1) Memperbanyak kunjungan rumah termasuk kasus balita resti (resiko tinggi) seperti gizi kurang, gizi buruk, stunting, obesitas; 2) Melaksanakan posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat.

9. Prosentase pelayanan kesehatan usia lanjut 46,22% dari target 55%.

Hal ini disebabkan karena pada masa pandemi Covid 19 lansia yang datang ke posyandu berkurang. Solusi yang dapat diberikan dengan melaksanakan posyandu dengan protokol kesehatan yang ketat.

B. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sudah menunjukkan kesesuaian dengan target kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Untuk indikator kinerja, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki 29 indikator namun masih terdapat 22 indikator yang capaiannya belum memenuhi target, yaitu



1. AFP Rate (> 2 per 100.000 penduduk < 15 tahun) yaitu 2,4 dari target 2,75.
Hal tersebut disebabkan karena seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi sehingga program lain belum dapat berjalan maksimal. Solusi yang dapat dilaksanakan berupa bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen dan bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) serta klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas.
2. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan Jamah haji (%) tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan pemberangkatan haji di tahun 2021 ditunda sehingga kegiatan pemeriksaan dan pelacakan pasca haji tidak sepenuhnya dilaksanakan. Solusinya jika tahun 2022 penyelenggaraan ibadah haji jadi dilaksanakan, maka kegiatan pemeriksaan haji akan dilaksanakan.
3. Prosentase anak sekolah SD/MI dan sederajat yang mendapatkan imunisasi (BIAS) yaitu MR: 71,4 % ; DT : 63,6 % ; Td : 60,6 % dari target 98 %.
Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Adanya pandemi pelayanan imunisasi menjadi terhambat; 2) Beberapa puskesmas belum pelaksanaan BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sekolah); 3) Keterbatasan tenaga pelaksana karena fokus pada pelaksanaan vaksinasi covid19 dalam rangka percepatan vaksinasi. Solusi yang dilakukan 1) Puskesmas melakukan sweeping ke sekolah di hari yang lain (jadwal BIAS Ulang); dan 2) Koordinasi dengan guru untuk menjemput siswa yang tidak hadir pada saat sweeping.
4. Persentase desa / kelurahan yang mencapai 80% Imunisasi dasar lengkap (Desa UCI) 92,9% dari target 100%
5. Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 72,3% dari target 93,5%.
Hal ini disebabkan karena 1) Adanya pandemi pelayanan imunisasi menjadi terhambat, 2) Keterbatasan vaksin dari propinsi dan 3) Keterbatasan tenaga pelaksana karena fokus pada pelaksanaan vaksinasi covid19 dalam rangka percepatan vaksinasi dan pelaksanaan 3T (*Test, Tracing, Treatment*). Solusinya dengan menyampaikan ke propinsi terkait keterbatasan vaksin yang ada di kabupaten
6. Persentase anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi lanjutan (Boster) yaitu DPT/HB Hib : 32,9% dan MR : 34,8% dari target 70%.



Hal ini disebabkan masa pandemi kunjungan sasaran ke posyandu berkurang, banyak orang tua yang takut anaknya diimunisasi. Solusi yang dilakukan puskesmas adalah dengan melakukan sweeping saat posyandu serta mengirim pesan melalui *whats app* grup kader dan masyarakat.

7. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus (% succes rate) 77,7% dari target 85%.

Hal ini disebabkan karena 1) Pasien TB yang sedang pengobatan meninggal dunia; 2) Pasien TB yang sedang pengobatan DO (*Drop Out*) karena ESO (Efek Samping Obat). Solusi yang dapat diberikan : bekerja sama dengan lintas sektor dalam membantu melacak pasien mangkir.

8. Angka keberhasilan pengobatan pasien TB resistan obat (% succes rate) 56% dari target 80%.

Hal ini disebabkan karena 1) Pasien TB yang sedang pengobatan meninggal dunia; 2) Pasien TB yang sedang pengobatan DO karena ESO; 3) Pasien TB MDR (*Multi Drug Resistant*) menolak pengobatan dengan alasan biaya. Solusi yang dapat diberikan : 1) Bekerja sama dengan lintas sektor dalam membantu melacak pasien mangkir; 2) Menyampaikan pada pasien terkait bantuan enabler untuk pasien TB MDR yang pengobatan.

9. Cakupan pengobatan semua kasus TB (% case detection rate /CDR) 48,85% dari target 68%.

Hal ini disebabkan karena kondisi pandemi sehingga mengurangi kunjungan terduga TBC ke fasilitas kesehatan. Solusi yang dapat diberikan diantaranya meningkatkan jejaring lintas sektor terutama pemerintah desa dalam hal penjangkaran dan pendidikan kesehatan.

10. Persentase pasien TB yang mengetahui status HIV 30,3% dari target 70%

Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Belum semua pasien Tb mau dites HIV; 2) Belum semua petugas Tb merujuk pasien nya untuk test HIV; 3) Koordinasi petugas Tb dan petugas HIV di layanan belum maksimal. Solusi yang dapat diberikan diantaranya Meningkatkan jejaring kolaborasi petugas Tb dan HIV; 2)Menekankan kewajiban bahwa semua pasien Tb harus diperiksa HIV; 3) Melengkapi pencatatan dan pelaporan di SITb (Sistem Informasi Tuberculosis).



11. Cakupan penemuan kasus TB resisten obat (absolut) yaitu 71 dari target 75 kasus.
Hal ini disebabkan karena 1) Pengurangan Jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun; 2) Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi. Solusinya berupa 1) Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen dan 2) Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas
12. Persentase angka kasus HIV yang diobati (on ART) (%) 74,35% dari target 80%
Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Kasus HIV yang ditemukan sudah dalam stadium 4 dan akhirnya meninggal dunia; 2) Masih tingginya angka kasus HIV yang Loss to Follow Up (LFU). Solusinya dengan bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) pendamping untuk mengunjungi pasien dan memotivasi untuk kembali ke pengobatan.
13. Cakupan Populasi berisiko yang diperiksa HIV 74,85% dari target 85%
Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Pengurangan jam pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun 2) Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi. Solusinya berupa 1) Bintek ke fasyankes sebagai bentuk refreshing dan meningkatkan komitmen; dan 2) Bekerja sama dengan DPM (Dokter Praktik Mandiri) dan klinik swasta di lingkungan sekitar puskesmas.
14. Angka Penemuan Kusta (per 10.000 penduduk) 0,05 dari target 1/10.000 penduduk
Hal ini disebabkan karena 1) Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga mereka enggan utk datang berobat ke faskes; 2) Masih adanya stigma buruk di masyarakat tentang pasien kusta; 3) Kegiatan penemuan aktif masih jarang dilakukan. Solusinya yaitu 1) Memberikan KIE ke masyarakat tentang penyakit kusta; 2) Meningkatkan kegiatan penemuan secara aktif melalui kegiatan kampanye penemuan pasien kusta .
15. Persentase penemuan Pneumonia Balita 35,65% dari target 60%
Hal ini disebabkan karena 1) Pengurangan jam Pelayanan di Puskesmas karena pandemi sehingga kunjungan ke puskesmas juga menurun; 2) Masyarakat takut untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan apalagi dengan keluhan batuk pilek (takut kalau dicovidkan); 3) Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target



vaksinasi.; 4) Masih lemahnya system pencatatan dan pelaporan Program P2ISPA di Puskesmas; 5) Belum semua kunjungan balita sakit ditangani dengan MTBS (Managemen terpadu Balita Sakit); 6) Belum semua petugas mampu melaksanakan kalsifikasi untuk penemuan kasus. Solusi : 1) Bimbingan Teknis Program tentang pencatatan dan pelaporan Program P2ISPA; 2) On The Job Training (OJT) bagi petugas dalam pemeriksaan untuk menemukan Kasus Pneumonia.

16. Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara 0,029% dari target 80%

Hal ini disebabkan karena 1) Kondisi Pandemi sehingga kegiatan mengumpulkan Masyarakat di hentikan; 2) Pembatasan jam kunjungan ke Puskesmas yang menyebabkan turunnya angka kunjungan ke Puskesmas; 3) Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit (DDFR PTM) Tidak Menular masih rendah, dianggap tidak penting; 6) Karena sasaran kegiatan adalah orang sehat/ merasa sehat sehingga Kesulitan dalam penggerakan masyarakat untuk datang kef askes (Puskesmas dan jaringannya; 7) Belum semua Puskesmas melaksanakan Pemeriksaan IVA. Solusi dengan 1) Melaksanakan Koordinasi Lintas sektor mengerakkan lagi kegiatan Pemeriksaan IVA (ibu PKK, dharma wanita, ibu bhayangkari, ibu Persit,); 2) Melaksanakan KIE kepada masyarakat tentang Pentingnya DDFR PTM; 3) Workshop Peningkatan Keterampilan Pemeriksaan IVA untuk Tenaga Kesehatan terlatih

17. Persentase penduduk usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 33,95% dari target 80%

Hal ini disebabkan karena 1) Kondisi Pandemi sehingga kegiatan di Posbindu dihentikan; 2) Pembatasan Jam Kunjungan ke Puskesmas yang menyebabkan turunnya angka kunjungan di Puskesmas; 3) Dana untuk Kegiatan untuk Posbindu banyak yang direfokusing untuk penanganan Pandemi; 4) Di Desa/Kelurahan Belum ada petugas Kesehatan misalnya perawat yang khusus mempunyai tupoksi Program P2PTM; 5) Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya kegiatan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit (DDFR PTM) Tidak Menular masih rendah, dianggap tidak penting; 6) Karena sasaran kegiatan adalah orang sehat/ merasa sehat sehingga Kesulitan dalam penggerakan masyarakat untuk datang kef askes (Puskesmas dan jaringannya) untuk



melakukan DDFR PTM; 7) Belum semua Desa/Kelurahan mempunyai Posbindu PTM/kelurahan; 8) Belum semua Desa mempunyai Posbindu Kit; 9) Keterbatasan logistik untuk pemeriksaan gula darah; 10) Belum semua Desa/Kelurahan yang mempunyai Posbindu PTM mempunyai Kader terlatih; 11) Masih Lemahnya Sistem Pencatatan dan Pelaporan kegiatan di Puskesmas dan jaringannya. Solusinya antara lain :1) Melaksanakan Koordinasi Lintas sektor terkait (desa/kelurahan) untuk mengadakan Posbindu Kit dan menyediakan bahan habis pakai pemeriksaan Gula Darah; 2) Melaksakan KIE kepada masyarakat tentang Pentingnya DDFR PTM; 3) Melaksanakan Pelatihan kader Posbindu secara bertahap; 4) Bimbingan Teknis untuk pencatatan dan pelaporan program

18. Cakupan minum obat filariasis(POPM/ pemberian obat pencegahan masal) (%) yaitu 97% dari 100%.

Hal ini disebabkan karena 1) Seluruh SDM Puskesmas dikerahkan untuk mencapai target vaksinasi ; 2) Sasaran penduduk minum obat filariasis banyak yg terkonfirmasi positif covid sehingga banyak yg enggan dan menolak minum obat kaki gajah; 3) Banyak yg sudah masuk di sasaran popm namun tidak ke daerah asal dikarenakan pandemi. Solusi dengan memberikan obat filariasis melalui kader pada saat posyandu atau dengan jemput bola yang diberikan langsung ke rumah-rumah

19. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM 83,84 % dari target 100 %

Hal ini disebabkan karena belum semua desa/Kelurahan Mempunyai Posbindu PTM (Penyakit Tidak Menular). Solusi melalui kerjasama dengan lintas sektor terkait (desa/kelurahan) untuk mendirikan Posbindu PTM minimal 1.

20. Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 52,85% dari target 100%

Hal ini disebabkan karena 1) Koordinasi lintas sektor terkait kurang maksimal; 2) Stigma masyarakat terhadap ODGJ membuat masyarakat enggan melaporkan ke faskes. Solusi dengan 1) KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) dengan advokasi perangkat desa saat kunjungan ke keluarga ODGJ pasung; 2) Sudah terbentuk TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) sehingga wadah koordinasi penanganan ODGJ lebih meningkat.



21. Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 70,39% dari target 100%.

Hal ini disebabkan karena 1) Masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan kegiatan di Puskesmas; 2) Pengurangan jam Kunjungan di Puskesmas yang menyebabkan angka kunjungan turun; 3) Selama masa Pandemi Masyarakat takut berkunjung ke fasilitas kesehatan. Solusi dengan 1) Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas; 2) Perlu diadakan petugas kesehatan di desa/kelurahan yang khusus menangani Prgram P2PTM.

22. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 38,60% dari target 100 %.

Hal ini disebabkan karena 1) Masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan kegiatan di Puskesmas; 2) Pengurangan jam Kunjungan di Puskesmas yang menyebabkan angka kunjungan turun; 3) Selama masa Pandemi Masyarakat takut berkunjung ke faskes. Solusi :1) Bimbingan Teknis Program ke Puskesmas; 2) Perlu diadakan petugas kesehatan di desa/kelurahan yang khusus menangani Prgram P2PTM.

C. Program Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan sudah menunjukkan kesesuaian dengan target kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Untuk indikator kinerja, Program Pelayanan Kesehatan memiliki 8 (delapan) indikator namun masih ada 3 (tiga) indikator yang capaiannya belum memenuhi target, yaitu :

1. Cakupan pelayanan gigi pada ibu hamil 95,03% dari target 100%.

Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Kurangnya koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di puskesmas; 2) Kurangnya sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil; 3) Ibu hamil langsung pulang, tidak memeriksakan giginya karena alasan tertentu; dan 4) Masih kurangnya kesadaran pentingnya kesehatan gigi dan mulut yg baik bagi ibu hamil. Solusi yang dapat diberikan diantaranya 1) Koordinasi dan integrasi antar ruang pelayanan di puskesmas; 2) Sosialisasi kepada ibu hamil dan pendamping bumil; 3) Meningkatkan kesadaran ibu hamil akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut yg baik.

2. Persentase industri rumah tangga yang memiliki sertifikat 71,33% dari target 100%.
Permasalahan karena adanya perubahan regulasi terkait penerbitan SPP-IRT (Sertifikat



Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) menyebabkan Dinkes, DPMPTSP dan Industri Rumah Tangga perlu melakukan penyesuaian mekanisme perizinan. Solusinya dengan Mengikuti mekanisme penerbitan SPP-IRT sesuai regulasi yang baru.

3. Cakupan masyarakat miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan 97,9% dari target 100%.

Hal ini antara lain disebabkan karena Adanya penonaktifan PBI JK oleh Kementrian Sosial menyebabkan banyak peserta PBI JK yang menjadi tidak aktif kepesertaan JKN nya. Solusi yang dapat diberikan yaitu Penambahan kuota utk kepesertaan JKN.

D. Program Sumber Daya Kesehatan

Program Sumber Daya Kesehatan sudah menunjukkan kesesuaian dengan target kinerja program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Untuk indikator kinerja, Program Sumber Daya Kesehatan memiliki tiga (3) indikator dimana semua indikator telah mencapai target yang telah ditentukan.





C.3 RSUD Brebes

Pada Tahun anggaran 2021 RSUD Brebes, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Brebes Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 233.663.083.070 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 200.654.810.304 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.19
Anggaran dan Realisasi Belanja
RSUD Brebes T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kesehatan				
	Belanja Operasi	184.391.183.070	170.570.786.586	(13.820.396.484)	92,50
	Belanja Modal	49.271.900.000	30.084.023.718	(19.187.876.282)	61,06
	JUMLAH	233.663.083.070	200.654.810.304	(33.008.272.766)	85,87

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian RSUD Brebes dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.20
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
RSUD Brebes T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	207.743.083.070 177.444.117.118 (85.42 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100 %	100 %	24.541.747.926 24.384.434.307 (99,36 %)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	100 %	100 %	24.541.747.926 24.384.434.307 (99,36 %)	Tercapai
2	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100 %	100 %	183.201.335.144 153.059.682.811 (83,55 %)	Belanja Operasional BLUD
2.1	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100 %	100 %	183.201.335.144 153.059.682.811 (83,55 %)	Belanja Operasional BLUD
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Sarana dan Prasarana RS dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	25.920.000.000 23.210.693.187 (89,55 %)	Tercapai
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Bidang Kesehatan	100 %	100 %	25.920.000.000 23.210.693.187 (89,55 %)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya (DAK)	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	6.000.000.000 4.936.528.387 (82,28 %)	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Bangunan Ruang ICU dan Ruang Operasi
1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Alat	Terpenuhinya Sarana dan	100 %	100 %	18.850.000.000 17.320.992.459	Pelaksanaan Pekerjaan E-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)	Prasarana Rumah Sakit			(90,49 %)	Puchansing Alat Kesehatan Ruang PICU, Ruang ICU, Ruang Bersalin, Ruang Operasi.
1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DBHCHT)	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	100 %	100 %	1.070.000.000 953.172.341 (89,08 %)	Alat Kedokteran Layanan MDR, Penyediaan alat Kedokteran Poliklinik

Sumber data : RSUD Brebes Kabupaten Brebes.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 tidak mempunyai masalah dan kendala yang berarti, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran 2021, Program dan Kegiatan dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal.

Analisis Kesesuaian Capaian

Secara umum, Nilai rata- rata capaian kinerja fisik pada target Program Pembangunan di RSUD Brebes mencapai 100,00 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja keuangan / anggaran pada target Program Pembangunan mencapai 85,87 %. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, kegiatan telah dilaksanakan dengan anggaran yang sesuai kebutuhannya dengan kata lain ada sisa / silpa dari pelaksanaan anggaran TA 2021 sebesar Rp. 33.008.272.766,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai rata-rata capaian kinerja fisik kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja keuangan / anggaran pada kegiatan tersebut mencapai 99,36 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 157.313.619,- atau sebesar 0,64 % ;
2. Nilai rata-rata capaian kinerja fisik kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar 100 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja keuangan / anggaran pada kegiatan tersebut mencapai 83,55 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 30.141.652.333,- atau sebesar 16,45 % ;



3. Nilai rata-rata capaian kinerja fisik kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 %, sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja keuangan / anggaran pada kegiatan tersebut mencapai 89,55 % atau terdapat silpa sebesar Rp. 2.709.306.813,- atau sebesar 10,45 %.



C.4 RSUD Bumiayu

Pada Tahun anggaran 2021 RSUD Bumiayu, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Kesehatan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 50.309.934.050 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 42.572.499.668 atau 84,62% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.21
Anggaran dan Realisasi Belanja
RSUD Bumiayu T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kesehatan				
	Belanja Operasi	38.071.489.371	31.660.148.071	(6.411.341.300)	83,16
	Belanja Modal	12.238.444.679	10.912.351.597	(1.326.093.082)	89,16
	JUMLAH	50.309.934.050	42.572.499.668	(7.737.434.382)	84,62

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian RSUD Bumiayu dan hasil-hasilnya pada urusan Pemerintah Bidang Kesehatan sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.22
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
RSUD Bumiayu T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGE T	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
I	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYRAKAT	Presentase Pemenuhan Upaya kesehatan	100%	100%	39,254,992,913 32,162,909,800 (81,93)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGE T	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100%	100%	9,809,885,799 9,084,564,617 (92,60)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit	Biaya belanja modal bangunan gedung instalasi Rumah Sakit	100%	100%	402,603,649 391,342,640 (97,2)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Biaya pemeliharaan gedung rumah sakit selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	407,933,750 381,251,100 (93,46)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biaya pengadaan ambulance dan SIM RS	100%	100%	3,000,000,000 2,646,850,000 (88,23)	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biaya pengadaan Alat Kedokteran dan kesehatan	100%	100%	5,819,255,000 5,522,607,077 (94,9)	Tercapai
1.5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Biaya pemeliharaan alat kesehatan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	180,093,400 142,513,800 (79,13)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Penyediaan Layanan Kesehatan	100%	100%	29,445,107,114 23,078,345,183 (78,37)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Biaya pelaksanaan promosi kesehatan	100%	100%	447,345,980 411,345,785 (91,95)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Biaya Pelaksanaan BLUD rumah sakit	100%	100%	28,997,761,134 22,666,999,398 (78,17)	Tercapai
II	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN SESUAI STANDAR	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100%	100%	3,384,900,000 3,312,900,000 (97,87)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Wilayah Kabupaten/Kota	Presentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100%	100%	3,384,900,000 3,312,900,000 (97,87)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Biaya honorarium tenaga wiyata bakti (optimalisasi) bulan Januari s.d November 2021	100%	100%	3,384,900,000 3,312,900,000 (97,87)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGE T	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	7,670,041,137 7,110,760,865 (92,70)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	139,550,000 139,350,000 (99,85)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya jumlah dokumen tersaji	100%	100%	75,950,000 75,850,000 (99,87)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rapat-rapat evaluasi kegiatan	100%	100%	63,600,000 63,500,000 (99,84)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	4,245,421,317 4,226,478,509 (99,55)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Biaya honorarium pegawai honorer/ tidak tetap, uang lembur pns, uang lembur non pns, belanja premi asuransi kesehatan	12 bulan	12 bulan	4,245,421,317 4,226,478,509 (99,55)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	841,670,900 709,433,182 (84,28)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biaya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rumah Sakit	12 bulan	12 bulan	97,983,400 54,921,100 (56,05)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Biaya modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga lainnya	100%	100%	178,156,200 114,259,450 (64,13)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biaya makanan dan minuman harian pegawai selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	159,000,000 154,397,500 (97,11)	Tercapai
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	274,797,800 269,124,907 (97,94)	Tercapai
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Biaya surat kabar / majalah selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	30,000,000 22,000,000 (73,33)	Tercapai
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Biaya perjalanan dinas luar dan dalam daerah selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	101,733,500 94,730,225 (93,12)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGE T	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	10 unit	10 unit	472,906,300 418,470,200 (88,48)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Biaya pengadaan mebel rumah sakit, biaya pengadaan mebel kantor	100%	100%	132,580,000 105,182,000 (79,33)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Biaya pengadaan biaya pengadaan computer, biaya pengadaan peralatan personal printer ink, biaya PC, biaya pengadaan alat studio	100%	100%	340,326,300 313,288,200 (92,06)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,330,735,300 1,036,089,255 (77,85)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai 6000: 1.500 lbr, materai 3000: 600 lbr, belanja paket pengiriman: 100 paket	100%	100%	14,137,600 12,158,450 (86)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Biaya telepon, air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	1,041,680,000 811,443,120 (77,9)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biaya penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	103,837,700 87,742,965 (84,5)	Tercapai
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Biaya honorarium tenaga wiyata bakti (K2) bulan Januari s.d November 2021	100%	100%	171,080,000 124,744,720 (72,92)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD kondisi rusak menjadi baik	100%	100%	639,757,320 580,939,719 90,80	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	120,002,720 100,621,719 (83,85)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Biaya pemeliharaan mebel selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	10,700,000 2,965,000 (27,71)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Biaya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	410,000,000 409,140,000 (99,79)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGE T	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	99,054,600 68,213,000 (68,86)	Tercapai

Sumber data : RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan di RSUD Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Capaian realisasi sebesar 84,62% atau sebesar Rp 42.572.499.688 dari pagu anggaran sebesar Rp 50.309.934.050.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 84,65% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan 84,65% menunjukkan bahwa capaian kinerja antar program dan kegiatan sudah sinkron.





C.5 Dinas Pekerjaan Umum

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 308.574.691.723 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 282.282.886.605 atau 91,48% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.23
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pekerjaan Umum T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pekerjaan Umum dan Taru				
	Belanja Operasi	66.236.520.944	62.728.500.339	(3.508.020.605)	94,70
	Belanja Modal	242.338.170.779	219.554.386.266	(22.783.784.513)	90,60
	JUMLAH	308.574.691.723	282.282.886.605	(26.291.805.118)	91,48

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian Dinas Pekerjaan Umum dan hasil-hasilnya pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Tabel III.24
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pekerjaan Umum T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM						
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEM- BANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jaringan transmisi air bersih terbangun	26 lokasi/De sa	26 lokasi/Des a	18.077.715.000 17.729.972.044 (98,08%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah tersambung pipa air bersih	3452 SR/KK	3933 SR/KK	18.077.715.000 17.729.972.044 (98,08%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 dok	5 dok	217.571.000 203.660.500 (93,61%)	Tercapai
1.2	Supervisi Pembangunan/ Peni ngkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningk atan/ Perluasan/ Optimali sasi SPAM	5 dok	5 dok	1.150.144.000 906.618.544 (78,83%)	Tercapai
1.3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	18 liter/det	18 liter/det	300.000.000 244.693.000 (81,56%)	Tercapai
1.4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Tersedianya sarana dan prasarana air bersih di kawasan perdesaan	3052 SR	3002 SR	15.010.000.000 14.975.000.000 (99,77%)	Tercapai
1.5	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM Kawasan Perdesaan	400 SR	400 SR	1.400.000.000 1.400.000.000 (100,00%)	Tercapai
II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase tersumbat tertangani	60%	80%	6.960.902.900 6.775.394.700 (97,33%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kab/ Kota	Panjang saluran drainase kondisi rusak tertangani	50 km	98,35 km	6.960.902.900 6.775.394.700 (97,33%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	5 dok	5 dok	317.340.000 307.606.000 (96,93%)	Tercapai
1.2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	27 dok	27 dok	117.974.000 58.822.500 (49,86%)	Tercapai
1.3	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3 km	3,662 km	1.058.400.000 1.052.788.000 (99,47%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	5 unit	5 unit	403.346.400 369.213.000 (91,54%)	Tercapai
1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	47 km	94,73 km	5.063.842.500 4.986.965.200 (98,48%)	Tercapai
III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	107.801.219.421 88.174.949.851 (81,79%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung memenuhi standar dokumen perencanaan dan pengawasan	100%	100%	107.801.219.421 88.174.949.851 (81,79%)	Tercapai
1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	85 dok	85 dok	294.574.960 243.945.600 (82,81%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	4 dok	107.491.824.460 87.916.896.151 (81,79%)	Tercapai
1.3	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	4 dok	4 dok	14.820.001 14.108.100 (95,20%)	Tercapai
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung terdata	13%	13,79%	417.340.000 398.926.800 (95,59%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terselenggaranya penataan bangunan gedung	100%	100%	417.340.000 398.926.800 (95,59%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	4 dok	4 dok	417.340.000 398.926.800 (95,59%)	Tercapai
V	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	68.460.316.590 64.809.585.014 (94,67%)	Belum Tercapai
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	68.460.316.590 64.809.585.014 (94,67%)	Belum Tercapai
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	20 dok	20 dok	3.495.065.000 3.425.502.300 (98,01%)	Tercapai
1.2	Pembebasan Lahan/ Tanah untuk Penye- lenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	8000 m2	8000 m2	14.820.000 14.818.850 (99,99%)	Tercapai
1.3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	10 dok	10 dok	141.235.880 85.749.341 (60,71%)	Tercapai
1.4	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	15 km	21,554 km	38.450.089.760 37.035.715.138 (96,32%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.5	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	7,5 km	4,864 km	4.293.299.880 4.256.410.500 (99,14%)	Belum Tercapai
1.6	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	7,5 km	1,125 km	455.190.080 433.845.100 (95,31%)	Belum Tercapai
1.7	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	25 unit	9 unit	16.507.180.990 14.641.150.485 (88,70%)	Belum Tercapai
1.8	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	25 unit	25 unit	4.903.466.000 4.850.615.800 (98,92%)	Tercapai
1.9	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	10 km	10 km	199.969.000 65.777.500 (32,89%)	Tercapai
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	14.408.330.571 12.721.863.297 (88,30%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi	100%	100%	1.314.663.600 754.108.648 (57,36%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	349.060.000 220.789.148 (63,25%)	Tercapai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	70.368.000 39.223.400 (55,74%)	Tercapai
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	59.567.000 30.035.900 (50,42%)	Tercapai
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	45.720.000 17.792.200 (38,92%)	Tercapai
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	34.435.000 15.960.800 (46,35%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 lap	2 lap	375.794.000 252.346.400 (67,15%)	Tercapai
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3 lap	379.719.600 177.960.800 (46,87%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	8.590.847.092 8.280.993.450 (96,39%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 orang/bln	95 orang/bln	8.426.668.592 8.196.523.850 (97,27%)	Tercapai
2.2	Tercapai Koordinasi dan Penyusun Tercapai an Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	82.132.000 48.242.600 (58)	Tercapai
2.3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 lap	1 lap	82.046.500 36.227.000 (44,15%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	147.890.000 145.900.000 (98,65%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	200 paket	200 paket	147.890.000 145.900.000 (98,65%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	992.272.100 616.330.425 (62,11%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 paket	6 paket	14.999.900 14.271.000 (95,14%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	50 paket	95.575.000 91.751.000 (96,00%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	30 paket	18 paket	99.765.700 94.095.000 (94,32%)	Tercapai
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	311.460.000 154.000.000 (49,44%)	Tercapai
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	105.850.000 64.174.000 (60,63%)	Tercapai
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 dok	4 dok	30.000.000 27.528.000 (91,76%)	Tercapai
4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	77.780.000 53.650.000 (68,98%)	Tercapai
4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 lap	24 lap	256.841.500 116.861.425 (45,50%)	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	9 unit	9 unit	333.366.500 331.210.000 (99,35%)	Tercapai
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	56 paket	22 paket	79.503.000 79.440.000 (99,92%)	Tercapai
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	26 paket	20 paket	253.863.500 251.770.000 (99,18%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.094.916.935 1.094.916.935 (80,54%)	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	22.500.000 21.280.000 (94,58%)	Tercapai
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	410.920.000 317.359.095 (77,23%)	Tercapai
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 lap	4 lap	195.800.000 102.760.000 (52,48%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 lap	4 lap	730.208.000 653.517.840 (89,50%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD kondisi rusak menjadi baik	100%	100%	1.669.863.279 1.498.403.839 (89,73%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	20 unit	191.516.100 155.298.672 (81,09%)	Tercapai
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	20 unit	202.483.900 158.220.900 (78,14%)	Tercapai
7.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 unit	3 unit	200.000.000 149.707.067 (74,85%)	Tercapai
7.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	178.345.351 144.705.200 (81,14%)	Tercapai
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	897.517.928 890.472.000 (99,21%)	Tercapai
2	UPTD BREBES					
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	197.800.000,00 196.726.000,00 (99,46%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung memenuhi standar dokumen perencanaan dan pengawasan	100%	100%	197.800.000,00 196.726.000,00 (99,46%)	Tercapai
1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan	1 dok	1 dok	197.800.000 196.726.000 (99,46%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
	Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	19.520.280.000 19.394.511.000 (99,36%)	Belum Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	19.520.280.000 19.394.511.000 (99,36%)	Belum Tercapai
1.1	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok	2 dok	49.500.000,00 48.300.000,00 (97,58%)	Tercapai
1.2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	14,4 km	13,021 km	15.542.750.000 15.455.022.000 (99,44%)	Belum Tercapai
1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 km	2,616 km	1.260.000.000,00 1.253.662.000,00 (99,50%)	Belum Tercapai
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,1 km	0,083 km	2.668.030.000,00 2.637.527.000,00 (98,86%)	Belum Tercapai
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	58.529.000 41.040.216 (70,12%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	44.324.000 30.633.800 (69,11%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	2.000.000,00 1.943.950,00 97,20%	Tercapai
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	9.604.000,00 9.577.000,00 (99,72%)	Tercapai
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	5.000.000,00 4.752.400,00 (95,05%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	15.000.000,00 7.536.950,00 (50,25%)	Tercapai
1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	12.720.000,00 6.823.500,00 (53,64%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	14.205.000,00 10.406.416,00 (73,26%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000,00 3.000.000,00 (100,00%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	11.205.000,00 7.406.416,00 (99,46%)	Tercapai
3	UPTD TANJUNG					
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	23.086.130.000 22.921.027.000 (99,28%)	Belum Tercapai
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	23.086.130.000 22.921.027.000 (99,28%)	Belum Tercapai
1.1	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok	2 dok	49.500.000,00 49.500.000,00 (100,00%)	Tercapai
1.2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	45 km	44,348 km	19.123.920.000 18.995.093.000 (99,33%)	Belum Tercapai
1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1,5 km	1,576 km	668.000.000,00 661.805.000,00 (99,07%)	Tercapai
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,1 km	0,090 km	2.492.950.000,00 2.466.903.000,00 (98,96%)	Belum Tercapai
1.5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	94,51 m	94,51 m	751.760.000,00 747.726.000,00 (99,46%)	Tercapai
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	68.163.810 60.005.721 (88,03%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	49.993.810,00 46.901.300,00 (93,81%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6.902.000,00 6.867.600,00 (99,50%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	8.332.000,00 8.138.700,00 (97,68%)	Tercapai
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	5.000.000,00 4.847.400,00 (96,95%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	17.039.810,00 16.726.100,00 (98,16%)	Tercapai
1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	12.720.000,00 10.321.500,00 (81,14%)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	18.170.000,00 13.104.421,00 (72,12%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000 2.857.500,00 (95,25%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	15.170.000,00 10.246.921,00 (30,06%)	Tercapai
4 UPTD BANJARHARJO						
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	198.790.000,00 197.749.000,00 (99,48%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung memenuhi standar dokumen perencanaan dan pengawasan	100%	100%	198.790.000,00 197.749.000,00 (99,48%)	Tercapai
1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	198.790.000,00 197.749.000,00 (99,48%)	Tercapai
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	21.779.140.001 21.584.101.000 (99,10%)	Belum Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	21.779.140.001 21.584.101.000 (99,10%)	Belum Tercapai
1.1	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok	2 dok	49.500.000,00 49.450.000,00 (99,90%)	Tercapai
1.2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	16 km	15,828 km	18.804.080.001 18.638.425.000 (99,12%)	Belum Tercapai
1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 km	2,092 km	850.640.000,00 850.640.000,00 (99,60%)	Tercapai
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,1 km	0,083 km	1.884.920.000,00 1.859.882.000,00 (98,67%)	Belum Tercapai
1.5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	31 m	31 m	190.000.000,00 189.081.000,00 (99,52%)	Tercapai
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	93.861.810 71.328.346 (76,00%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	51.661.810,00 43.322.600,00 (83,86%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6.902.000,00 6.892.000,00 (99,86%)	Tercapai
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	10.000.000,00 9.995.500,00 (99,96%)	Tercapai
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	5.000.000,00 4.996.000,00 (99,92%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	17.039.810,00 11.921.100,00 (69,96%)	Tercapai
1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	12.720.000,00 9.518.000,00 (74,83%)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	42.200.000,00 28.005.746,00 (66,36%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
	Pemerintahan Daerah					
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000,00 2.988.000,00 (99,60%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	39.200.000,00 25.017.746,00 (63,82%)	Tercapai
4	UPTD BUMIAYU					
I	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	269.000.000,00 267.740.000,00 (99,53%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung memenuhi standar dokumen perencanaan dan pengawasan	100%	100%	269.000.000,00 267.740.000,00 (99,53%)	Tercapai
1.1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2 dok	2 dok	269.000.000,00 267.740.000,00 (99,53%)	Tercapai
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	19.872.090.000 19.719.492.000 (99,23%)	Belum Tercapai
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	19.872.090.000 19.719.492.000 (99,23%)	Belum Tercapai
1.1	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok	2 dok	49.500.000,00 48.750.000,00 (98,48%)	Tercapai
1.2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	29 km	22,988 km	16.800.600.000 16.687.681.000 (99,33%)	Belum Tercapai
1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1 km	0,536 km	291.000.000,00 289.700.000,00 (99,55%)	Belum Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,1 km	0,083 km	2.442.990.000,00 2.407.158.000,00 (98,53%)	Belum Tercapai
1.5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	6,7 m	6,7 m	288.000.000,00 286.203.000,00 (99,38%)	Tercapai
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	85.623.810,00 78.711.505,00 (91,93%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	47.824.110,00 47.006.000,00 (98,29%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	5.000.000,00 4.960.000,00 (99,20%)	Tercapai
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	9.604.000,00 8.850.000,00 (92,15%)	Tercapai
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	5.000.000,00 4.977.000,00 (99,54%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	15.500.110,00 15.499.000,00 (99,99%)	Tercapai
1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	12.720.000,00 12.720.000,00 (100,00%)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	37.799.700,00 31.705.505,00 (83,88%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000,00 3.000.000,00 (100,00%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	34.799.700,00 28.705.505,00 (82,49%)	Tercapai
5	UPTD BANTARKAWUNG					
I	PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Persentase panjang jalan Kabupaten sesuai standar jalan kolektor baik	85%	77,71%	7.131.315.000,00 7.075.691.000,00 (99,22%)	Belum Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan Kabupaten rusak tertangani	40%	5%	7.131.315.000,00 7.075.691.000,00 (99,22%)	Belum Tercapai
1.1	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 dok	2 dok	49.500.000,00 49.500.000,00 (100,00%)	Tercapai
1.2	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	7 km	5,355 km	4.033.120.000,00 4.008.043.000,00 (99,38%)	Belum Tercapai
1.3	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	6 km	4,999 km	1.574.545.000,00 1.565.025.000,00 (99,40%)	Belum Tercapai
1.4	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	0,1 km	0,090 km	1.363.150.000,00 1.343.054.000,00 (98,53%)	Belum Tercapai
1.5	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	10 m	10 m	111.000.000 110.069.000 (99,16%)	Tercapai
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran SKPD Dinas Pekerjaan Umum	100%	100%	88.143.810,00 65.861.911,00 (74,72%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	49.997.810,00 49.014.150,00 (98,03%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket	6 paket	6.902.000,00 6.238.000,00 (90,38%)	Tercapai
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 paket	40 paket	10.000.000,00 9.914.500,00 (99,15%)	Tercapai
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	20 paket	4.876.000,00 4.757.500,00 (97,57%)	Tercapai
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 paket	8 paket	15.499.810,00 15.384.150,00 (99,25%)	Tercapai
1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 lap	7 lap	12.720.000,00 12.720.000,00 (100,00%)	Tercapai
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	38.146.000,00 16.847.761,00 (44,17%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISAS I	ANGGARAN REALISASI (%)	KET.
2.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000,00 3.000.000,00 (100,00%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 lap	5 lap	35.146.000,00 13.847.761,00 (39,40%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pekerjaan umum dan Tata Ruang , pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut yaitu Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, mempunyai permasalahan terkait jumlah anggaran yang terbatas, sehingga anggaran yang tersedia tidak bisa menangani kerusakan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Poros yang masih sangat besar (kondisi akhir Tahun 2021 Jalan Kabupaten & Poros tidak mantap sebesar 36,17% atau 488,513 km dari total panjang Jalan 1.350,531 km).

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan :

Berdasarkan TUPOKSI Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah menetapkan Tujuan strategis yaitu : Meningkatkan infrastruktur bidang kebinamargaan dan keciptakarya yang berkualitas. Guna mewujudkan Tujuan tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes menentukan lima Prioritas Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2022 yaitu :

- Meningkatkan kualitas Jalan Kabupaten ;
- Meningkatkan koneksitas antar wilayah ;
- Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan ;
- Meningkatkan Akses Air Bersih Masyarakat ;
- Meningkatkan kualitas Jalan Poros Desa ;



Hasil dari Prioritas Sasaran tersebut dikontrol menjadi capaian tahunan. Adapun Capaian Kinerja di tahun 2021 dibandingkan terhadap Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK) 2021 dan juga terhadap RENSTRA 2017-2022, adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Jalan Kabupaten

Capaian untuk sasaran 1 : Persentase Jalan Kabupaten kondisi mantap tahun 2021 adalah 77,71% dari target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 85% atau 544,622 km dari total panjang 640,732 km, capaian tahun 2021 turun dibandingkan capaian tahun lalu (83,53%), Sedangkan target akhir kondisi mantap Jalan Kabupaten lima tahun ke depan menurut RENSTRA 2017-2022 adalah 73%, jadi terhadap target akhir ini tercapai 106,45%, Ke depannya masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi semua mantap.

Sasaran 2 : Meningkatnya koneksitas antar wilayah

Capaian untuk sasaran 2 : Jumlah lokasi/wilayah terisolir terhubung terealisasi 3 lokasi dari target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 2 lokasi. Total pembangunan jembatan baru yang ditargetkan untuk lima tahun mendatang menurut RENSTRA 2017-2022 adalah 15 jembatan baru, atau 15 wilayah terisolir terhubung. Sampai saat ini sudah tercapai 15 lokasi atau 100%.

Sasaran 3 : Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan

Capaian untuk Sasaran 3 : Persentase kawasan bebas genangan Tahun 2021 adalah 94,29% dari target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 98%, dari total 14 titik rawan banjir di kota Brebes ada 1 titik yang mudah tergenang ketika hujan lebat. Intensitas hujan yang cukup tinggi di tahun 2021 menyebabkan di titik tersebut terjadi genangan disebabkan karena aliran air hujan yang tidak lancar. Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes adalah disamping meningkatkan kondisi saluran drainase juga pemeliharaan saluran drainase yang mengalami kerusakan serta membentuk tim “Dalban” atau Pengendali Banjir yaitu tim yang selalu siap siaga jika hujan deras dan terjadi genangan di kawasan kota Brebes akan segera bertindak untuk menanganinya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Akses Air Bersih Masyarakat



Capaian untuk realisasi capaian Sasaran 4 : Persentase cakupan akses Air Bersih adalah 95,74% angka ini di bawah target tahun 2021 yaitu 97%. Sedangkan target akhir Renstra (lima tahun) adalah 100% atau jumlah penduduk Kab. Brebes yang telah mendapat akses air bersih mencapai 1.737.623 jiwa dari jumlah total penduduk 1.815.000 jiwa.

Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes bersama OPD lain yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) adalah salah satu perangkat daerah yang ikut dalam mewujudkan semua masyarakat untuk mendapat akses air bersih layak khususnya dalam membangun sarana dan prasarana air bersih perpipaan, sedangkan untuk yang non perpipaan diampu oleh OPD lain. Untuk jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas Jalan Poros Desa

Capaian untuk sasaran 5 : Persentase Jalan Poros Desa kondisi mantap tercapai 51,29% dari target yang ditetapkan di tahun 2021 yaitu 80% atau 567,84 km dari total 709,798 km panjang Jalan Poros Desa berdasarkan SK Bupati Brebes no. 600/798 Tahun 2019, angka ini lebih rendah dari capaian tahun lalu yang mencapai 72,95% jalan poros desa kondisi mantap. Sedangkan target akhir kondisi baik Jalan Poros Desa menurut RENSTRA 2017-2022 adalah 78%.

Analisis atas tidak tercapainya target Tahun 2021, adalah karena besarnya anggaran untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan tidak bisa mengcover seluruh jumlah panjang Jalan poros desa yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes.



C.6 Dinas PSDA dan Taru

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas PSDA Taru, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas PSDA dan Taru Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 85.001.597.823 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 82.112.777.111 atau 96,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.25
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas PSDA dan Taru T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pekerjaan Umum dan Taru				
	Belanja Operasi	53.429.481.623	52.186.320.748	(1.243.160.875)	97,67
	Belanja Modal	31.572.116.200	29.926.456.363	(1.645.659.837)	94,79
	JUMLAH	85.001.597.823	82.112.777.111	(2.888.820.712)	96,60

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan capaian Dinas PSDA dan Taru dan hasil-hasilnya pada program Bidang Pekerjaan Umum dan Taru, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Tabel III.26
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas PSDA dan Taru T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal	27,08	27,08	69210050060 67125329531 (96,98%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase jumlah sungai yang berfungsi optimal	27,08	27,08	44008205180 43360844600 (98,52%)	Tercapai
1.1	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul dan Bantaran Sungai Berfungsi Optimal	93,1 Km	93,1 Km	17,668,217,200 17,340,734,900 (98,14%)	Tercapai
1.2	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Panjang Sungai Yang Direhab dan Dinormalisasi	116 Km	116 Km	25,778,234,980 25,471,783,700 (98,81%)	Tercapai
1.3	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air Lainnya 100 orang Jumlah Rehabilitasi Kawasan Kritis Sungai	100 org 3 titik	100 org 3 titik	561,753,000 548,326,000 (97,60%)	Tercapai
2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	267.245 m	267.245 m	25201844880 23764484931 (94,29%)	Tercapai
2.1	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Peningkatan Panjang Saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	267.245 m	267.245 m	12,899,065,620 11,601,406,731 (89,93%)	Tercapai
2.2	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jenis Dokumen Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dokumen) Jenis Peraturan Tentang Pola Tanam (Dokumen) Jumlah mantri Pengairan dan PPA yang mendapatkan Pembinaan (orang)	5 dok 1 dok 65 org 100 kelompok	5 dok 1 dok 65 org 100 kelompok	12,302,779,260 12,163,078,200 (98,86%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Jumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang Terbina (Kelompok) Jumlah Pintu Air yang Terpelihara (buah) Jumlah Ulu- Ulu yang terbina(Orang) Panjang Jaringan Irigasi yang Terpelihara (meter)	450 buah 100 org 4000 meter	450 buah 100 org 4000 meter		
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruandengan dokumen RTRW	20 %	20 %	1397880500 1210903400 (86,62%)	Tercapai
1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruandengan dokumen RTRW	20 %	20 %	931334500 792097500 (85,04%)	Tercapai
1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah RencanaTata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes	150 org	150 org	164.796.500 157.088.000	Tercapai
1.2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersusunnya dokumen penyusunan RDTR	2 dok	2 dok	766.538.000 635.009.500	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruan dengan dokumen RTRW	20 %	20 %	19.080.000 10.750.000 (56,34%)	Tercapai
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Aparatur Pelaksana Bersertifikat Diklatperencanaan tata ruang	2 org	2 org	19.080.000 10.750.000 (56,34%)	Tercapai
3	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruan dengan dokumen RTRW	20 %	20 %	91.680.400 86.876.500 (94,76%)	Tercapai
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen informasi tata ruang (Dokumen)	100 dok	100 dok	91.680.400 86.876.500 (94,76%)	Tercapai
4	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Penyelenggaraan enatan Ruan dengan dokumen RTRW	20 %	20 %	355785600 321179400 (90,27%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Tersusunnya Dokumen monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang Tersusunnya dokumen pengendalian pemanfaatan ruang	2 dok 2 dok	2 dok 2 dok	282.695.600 252.067.400 (89,16%)	Tercapai
4.2	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Aparatur Pelaksana Bersertifikat Diklat pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang (Orang)	2 org	2 org	0 0 (0%)	Tercapai
4.3	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jenis Dokumen sistem informasi penataan ruang (Dokumen)	1 dok	1 dok	73.090.000 69.112.000 (94,55%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	14.393.667.263 13.777.823.380 (95,72%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan Laporan Pelaksanaan tersedia	100%	100%	126.720.000 93.918.404 (74,11%)	Tercapai
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jenis dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	2 dok	2 dok	18.700.000 17.720.000 (94 %)	Tercapai
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis media publikasi dan promosi Jumlah laporan LPPD	4 Lokasi 1 tahun	4 Lokasi 1 tahun	108.020.000 76.198.404 70,54%	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran dilingkungan kantor	100%	100%	11.727.290.043 11.517.698.614 (98,21%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	1 tahun	11.708.590.043 11.500.958.614 (98,22%)	Tercapai
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 dok	2 dok	18.700.000 16.740.000 (89,51%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	10.895.000 10.088.600 (92,59%)	Tercapai
3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	50 org	50 org	10.895.000 10.088.600 (92,59%)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	746.349.980 585.162.469 (78,40%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik /perna	5 jns	5 jns	13.640.100 13.640.100 (100%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan gedung kantor baru Jenis perlengkapan gedung kantor baru Jumlah alat tulis kantor tersedia (jenis)	2 jns 3 jns 42 jns	2 jns 3 jns 42 jns	307.856.400 298.446.682 (96,94%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	29 jns	29 jns	31.236.700 28.002.000 (89,64%)	Tercapai
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jeis bahan makanan dan minuman tersedia	172 org	172 org	140.375.000 127.632.000 (90,92%)	Tercapai
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barangcetakan dan penggandaan tersedia	10 cetakan	10 cetakan	58.211.000 55.356.950 (95,09%)	Tercapai
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bacaan dan perundang-undangan tersedia	2 jns	2 jns	29.400.000 29.400.000 (100%)	Tercapai
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah	1 tahun	1 tahun	165.630.780 32.684.737 (19,73%)	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan adminitrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	66000000 63550000 (96,28%)	Tercapai
5.1	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel kantor baru	2 jns	2 jns	66.000.000 63.550.000 (96,28%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	1048345400 942627177 (89,91%)	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Administrasi pertanggungjawaban Jumlah surat keluar terdistribusi Jumlah surat masuk terdistribusi	500 surat 1200 surat 1700 surat	500 surat 1200 surat 1700 surat	14.000.000 4.001.000 (28,57%)	Tercapai
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	4 jns	4 jns	201.585.000 137.290.257 (68,10%)	Tercapai
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	29 buah 16 buah	29 buah 16 buah	21.000.000 8.030.000 (38,23%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia Jumlah tenaga Kebersihan tersedia Tenaga keamanan	37 org 2 org 8 org	37 org 2 org 8 org	811.760.400 793.305.920 (97,72%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	668066840 564778116 (84,53%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan dinas rusak menjadi baik Jumlah mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	64.322.000 45.734.688 (71,10%)	Tercapai
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional rusak menjadi baik Jumlah Kendaraan jabatan dinas Rusak Menjadi Baik Jumlah mobil diproses surat perizinan Jumlah motor diproses surat perizinan	12 unit 38 buah 8 buah 42 buah	12 unit 38 buah 8 buah 42 buah	214.304.840 131.793.428 (61,49%)	Tercapai
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	rehab sedang/berat gedung kantor terpeliharanya Gedung kantor dan UPTD	2 buah 2 buah	2 buah 2 buah	389.440.000 387.250.000 (99,43%)	Tercapai

Sumber data : Dinas PSDA dan Taru Kabupaten Brebes.

Pada dasarnya pelaksanaan program/kegiatan di lingkup DPSDAPR Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Capaian realisasi Belanja Barang Jasa Anggaran Tahun 2021 sebesar 96,60% atau sebesar Rp.82.112.777.111 dari pagu anggaran sebesar Rp. 85.001.597.823 Dan untuk sub kegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang tidak dianggarkan dikarenakan di masa pandemi tidak ada penawaran diklat jadi anggaran dialihkan ke kegiatan lain.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 95,72% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan 95,72% menunjukkan bahwa capaian kinerja antar program dan kegiatan sudah sinkron.



C.7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, melaksanakan tiga bidang pada urusan pemerintahan yaitu

1. urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang pertanahan

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yaitu pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 38.163.077.532 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp.36.870.675.277 atau 96,61% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.27
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.000.645.000	7.939.733.500	(60.911.500)	99,24
	Belanja Operasi	8.000.645.000	7.939.733.500	(60.911.500)	99,24
2	Perumahan Rakyat	27.310.450.032	26.262.678.237	(1.047.771.795)	96,16
	Belanja Operasi	13.496.356.212	12.968.368.237	(527.987.975)	96,09
	Belanja Modal	13.814.093.820	13.294.310.000	(519.783.820)	96,24
3	Pertanahan	2.851.982.500	2.668.263.540	(183.718.960)	93,56
	Belanja Operasi	2.003.232.500	1.971.136.400	(32.096.100)	98,40
	Belanja Modal	848.750.000	697.127.140	(151.622.860)	82,14
	JUMLAH	38.163.077.532	36.870.675.277	-1.292.402.255	96,61

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).



Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan hasil-hasilnya pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.28
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman T.A 2021

NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	100%	100%	894.035.820 817.508.484 (91,44%)	Tercapai
1	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Basis Data Perumahan, Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan	100%	100%	162.008.300 111.930.104 (69,09%)	Belum Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Basis Data Perumahan	6 Dokumen	1 Dokumen	128.308.300 78.231.054 (60,97%)	Tidak Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan	2 Dokumen	1 Dokumen	33.700.000 33.699.050 (100%)	Tidak Tercapai
2	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Basis Data Perumahan, Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perumahan	100%	100%	451.468.520 450.428.300 (99,77%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Unit Rumah MBR yang terfasilitasi Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas	1500 Unit	341 Unit	451.468.520 450.428.300 (99,77%)	Tercapai
3	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan, Monitoring, Regulasi, Perijinan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%	280.559.000 255.150.080 (90,94%)	Tercapai



NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Hasil Peman-tauan, Monitoring, Regulasi, Perijinan dan Pengemba-ngan Perumahan	30 Dokumen	30 Dokumen	280.559.000 255.150.080 (90,94%)	Tercapai
II	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Unit Kawasan Perumahan Yang Terfasilitasi Utilitas Perumahan Umum	25 Kawasan	25 Kawasan	6.424.541.390 6.134.080.608 (95,48%)	Tercapai
1	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Unit Kawasan Perumahan Yang Terfasilitasi Utilitas Peruma- han Umum	25 Kawasan	25 Kawasan	6.424.541.390 6.134.080.608 (95,48%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Unit Kawasan Peruma-han Yang Terfasilitasi Utilitas Perumahan Umum	25 Kawasan	25 Kawasan	6.424.541.390 6.424.541.390 (95,48%)	Tercapai
III	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh	69,02 Ha	69,02 Ha	15.633.580.660 14.448.544.202 (92,42%)	Tercapai
1	Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Diperbaiki	292 Ha	292 Ha	5.681.721.400 5.603.199.200 (98,62%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Diperbaiki	292 Ha	106,59 Ha	5.681.721.400 5.603.199.200 (98,62%)	Tercapai
2	Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan Kumuh Yang Diperbaiki	292 Ha	292 Ha	4.766.343.300 4.677.207.326 (98,13%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	442.337.800 437.141.900 (98,83%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.2	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Fasilitasi Akses Pelayanan Sanitasi	1500 Rumah Tangga	2055 Rumah Tangga	4.324.005.500 4.240.065.426 (98,06%)	Tercapai
3	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3.176 Unit	3.176 Unit	4.348.660.060 4.168.137.676 (95,85%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Unit Rumah MBR yang terfasilitasi Peningkatan Kualitas	3 Desa	3 Desa	4.348.660.060 4.168.137.676 (95,85%)	Tercapai
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
VI	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase tanah yang bersertifikat	30,00 %	30,00 %	5.681.721.400 5.603.199.200 (98,62%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Daerah Yang Disertifikasi	120 Bidang	120 Bidang	5.681.721.400 5.603.199.200 (98,62%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan, Pemberian Ganti Kerugian dan Proses Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Kasus	1 Kasus	5.681.721.400 5.603.199.200 (98,62%)	Tercapai
V	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah yang bersertifikat	30,00 %	30,00 %	909.099.400 906.309.000 (99,69%)	Tercapai
1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Inventarisasi Rencana Kebutuhan Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen	909.099.400 906.309.000 (99,69%)	Tercapai



NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah bidang tanah masyarakat daerah yang disertifikasi	4000 Bidang	3700 Bidang	909.099.400 906.309.000 (99,69%)	Tercapai
C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Fasilitas Akses Pelayanan Sanitasi	2000 Rumah Tangga	2000 Rumah Tangga	8.000.645.000 7.939.733.500 (99,24%)	Tercapai
1	Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Fasilitas Akses Pelayanan Sanitasi	2000 Rumah Tangga	2000 Rumah Tangga	8.000.645.000 7.939.733.500 (99,24%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapat Fasilitas Akses Pelayanan Sanitasi	2000 Rumah Tangga	1071 Rumah Tangga	8.000.645.000 7.939.733.500 (99,24%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
VII	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Presentase dokumen perencanaan dan lappelaksanaan tersedia	100%	100%	5.195.148.062 4.864.765.888 (93,64%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	99.297.700 97.700.298 (98,39%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jenis Dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi Rkpd).	3 Jenis	3 Jenis	99.297.700 97.700.298 (98,39%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	100%	3.035.049.182 2.944.809.687 (97,03%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	Jumlah PNS Mendapatkan Gaji & Tunjangan	45 Orang	27 Orang	2.991.315.182 2.901.308.687 (96,99%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	14 Buah	9 Buah	21.642.000 21.611.000 (99,86%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.3	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.	Jenis Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	30 Buah	10 Buah	22.092.000 21.890.000 (99,09%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	15.300.000 12.220.000 (79,87%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	46 stel	60 stel	22.092.000 21.890.000 (99,09%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	263.616.900 249.130.520 (94,50%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jenis Komponen Listrik/Penerangan	15 Jenis	15 Jenis	7.595.300 7.595.900 (99,88%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60 Jenis	60 Jenis	46.525.000 44.115.000 (94,82%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.	Jenis Peralatan Rumah Tangga	30 Jenis	30 Jenis	24.058.000 23.945.000 (99,53%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	6 Jenis	6 Jenis	57.900.000 55.806.000 (96,38%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia	10 Jenis	10 Jenis	13.119.000 13.030.000 (96,38%)	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	14 Jenis	14 Jenis	11.400.000 11.400.000 (100%)	Tercapai
4.7	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	4 Jenis	4 Jenis	19.080.000 18.736.000 (98,20%)	Tercapai
4.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	710 Laporan	710 Laporan	83.939.000 74.512.620 (88,77%)	Belum Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	545.599.820 492.445.000 (90,26%)	Tercapai



NO.	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
5.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jenis Mebeuler Baru	9 Jenis	9 Jenis	145.149.000 119.189.000 (82,11%)	Belum Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Baru	10 Jenis	10 Jenis	400.450.820 373.256.000 (93,21%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	606.575.000 512.018.986 (84,41%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Jumlah Surat Masuk/Keluar Terdistribusi	450 Jenis	300 Jenis	4.995.000 4.990.000 (99,90%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan	8 Jenis	4 Jenis	128.600.000 110.049.706 (85,58%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Tenaga Adminstrasi Tersedia	15 Orang	38 Orang	472.980.000 396.979.280 (83,93%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	629.710.160 556.441.397 (88,36%)	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik	30 Unit	16 Unit	161.485.000 102.497.397 (63,47%)	Tercapai
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan Gedung Dalam Kondisi Baik	30 Unit	12 Unit	66.225.160 58.998.000 (89,09%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	402.000.000 394.946.000 (98,25%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Perwaskim pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut adalah Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota mempunyai permasalahan Alokasi anggaran ini terlalu



rendah dengan penyelesaian mengusulkan kepada TAPD untuk memberikan tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target menunjukkan bahwa Dinperwaskim Kab. Brebes sesuai dengan tupoksinya menjalankan visi dan misi Bupati Brebes secara umum ada beberapa sasaran kegiatan yang tidak tercapai. Hal ini dikarenakan minimnya anggaran untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan penanganan RTLH dan Kawasan Kumuh. Pemerintah Kab. Brebes mengalokasikan anggaran RTLH per unit Rp. 10.000.000,- di tahun 2021 Dinperwaskim Kab. Brebes hanya mendapatkan anggaran bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) Sebesar Rp. 2.820.000.000,-.

Sedangkan untuk Kawasan Kumuh, kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinperwaskim Kab. Brebes tidak berada di Lokus Kawasan Kumuh sehingga tidak mengurangi luasan kawasan kumuh.



C.8 Satuan Polisi Pamong Praja

Pada Tahun anggaran 2021 Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.7.782.205.916 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 7.676.563.240 atau 98,64% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.29
Anggaran dan Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Trantibum Linmas				
	Belanja Operasi	7.479.343.316	7.376.538.240	(102.805.076)	98,63
	Belanja Modal	302.862.600	300.025.000	(2.837.600)	99,06
	JUMLAH	7.782.205.916	7.676.563.240	(105.642.676)	98,64

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian satuan polisi pamong praja dan hasil-hasilnya pada program bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan msyarakat sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.30
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
I	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan Pelaksanaan Patroli Trantibum	52,94 %	52,94 %	1,774,381,323 1,773,071,515 (%) 99,93	Tercapai
1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Meningkatnya Trantibum dan Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	1,574,281,323 1,572,971,515 (%) 99,92	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengaman an, dan Pengawasan	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.080 Kegiatan	1.080 Kegiatan	835,231,600 834,208,510 (%) 99,88	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Menurunnya Peredaran Rokok Bercukai Palsu	100 %	100 %	105,000,000 104,986,000 (%) 99,99	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentra- man dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masya- rakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	60 Kegiatan	60 Kegiatan	614,660,500 614,485,005 (%) 99,97	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Masyarakat yang Menjadi Kader KST	50 Orang	50 Orang	19,389,223 19,292,000 (%) 99,50	Tercapai
2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Masyarakat Taat Perda	100 %	100 %	82,500,000 82,500,000 (%) 100	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terselesaikannya Penanganan Atas Pelanggaran Pe- negakkan Perda	60 Kegiatan	60 Kegiatan	82,500,000 82,500,000 (%) 100	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Peningkatan SDM Satpol PP dan Korsik	100 %	100 %	117,600,000 117,600,000 (%) 100	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terciptanya PNS yang Bermutu	30 Orang	30 Orang	117,600,000 117,600,000 (%) 100	Tercapai
II	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	100 %	100 %	693,774,000 692,803,000 (%) 99,86	Tercapai
1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman Kebakaran Cepat Tertangani	100 %	100 %	693,774,000 692,803,000 (%) 99,86	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terselesainya Jumlah Kebakaran di Kabupaten Brebis	50 Kasus	50 Kasus	693,774,000 692,803,000 (%) 99,86	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Tersedia	100 %	100 %	5.314.050.593 5,236,044,725 (%) 98,53	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Tersedia	100 %	100 %	19,000,000 18,884,000 (%) 99,39	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terbentuknya Dokumen Perencanaan	4 Jenis	4 Jenis	19,000,000 18,884,000 (%) 99,39	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Peren- canaan dan Laporan Pelak- sanaan Tersedia	100 %	100 %	4,256,901,693 4,174,181,324 (%) 98,06	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.1	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	45 Orang	45 Orang	4,231,351,693 4,148,825,324 (%) 98,05	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terbentuknya Dokumen Laporan Keuangan	2 Buah	2 Buah	25,550,000 25,356,000 (%) 99,24	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Berkopetensi	100 %	100 %	117,820,000 115,422,858 (%) 97,97	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	130 Stel	130 Stel	17,820,000 17,820,000 (%) 100	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang Rokok Bercukai Palsu/Ilegal	100 %	100 %	100,000,000 97,602,858 (%) 97,60	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100 %	100 %	145,590,100 144,632,350 (%) 99,34	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	8 Jenis	8 Jenis	103,614,100 102,689,600 (%) 99,11	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	80 Kegiatan	80 Kegiatan	41,976,000 41,942,750 (%) 99,92	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Maksimal	100 %	100 %	283,704,200 278,082,582 (%) 98,02	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Teradministrasinya Surat Keluar dan Surat Masuk	2000 Buah	2000 Buah	85,517,200 85,098,600 (%) 99,51	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya Tagihan Listrik, Telepon, Air, Surat Kabar dan Internet	12 Bulan	12 Bulan	73,789,000 69,217,982 (%) 93,81	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Makanan dan Minuman	5 Jenis	5 Jenis	124,398,000 123,766,000 (%) 99,49	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100 %	100 %	491,034,600 479,485,611 (%) 97,65	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas / Operasional	35 Unit	35 Unit	238,218,600 228,810,611 (%) 96,05	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor yang Baik	20 Unit	20 Unit	15,613,000 15,440,000 (%) 98,89	Tercapai

Sumber data : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, tidak ada permasalahan yang dihadapi. Semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil dari target.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99,89 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa semua kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara keseluruhan dengan baik dan lancar tanpa adanya permasalahan. Hal ini juga dapat diartikan bahwa tingkat pelayanan terkait trantibum maupun upaya pemadaman kebakaran telah dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Brebes.





C.9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada Tahun anggaran 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 7.034.583.544 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 6.707.322.417 atau 95,35% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.31
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Trantibum Linmas				
	Belanja Operasi	5.141.421.151	5.032.489.444	(108.931.707)	97,88
	Belanja Modal	1.893.162.393	1.674.832.973	(218.329.420)	88,47
	JUMLAH	7.034.583.544	6.707.322.417	(327.261.127)	95,35

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited)

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.32
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Pengurangan Persentase Korban Terdampak Bencana	10%	10%	1.892.477.538 1.836.185.052 (97,03%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengurangan Persentase korban terdampak bencana	10%	10%	743.471.130 722.720.326 (97,21%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Klpk Relawan Penanggulangan Bencana	1 Klpk	1 klpk	162.029.692 154.966.010 (95,64%)	Tercapai
		Jumlah relawan yang bersertifikat keahlian tanggap bencana	60 Org	60 Org		
1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas Piket Posko Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	30 Org	34 Org	401.640.288 394.467.000 (98,21%)	Tercapai
		Tercukupinya Rambu Jalur Evakuasi	10 Buah	10 Buah		
1.3	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana	1 Desa	1 Desa	49.639.692 46.290.000 (93,25%)	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas penilai kerusakan Pasca Bencana	50 Org	50 Org	130.161.458 126.997.316 (97,57%)	Tercapai
2	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	75%	100%	1.149.006.408 1.113.464.726 (96,91%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jenis bahan tanggap darurat bencana	5 Jenis	5 Jenis	351.564.000 332.542.920 (94,59%)	Tercapai
		Jumlah SK Bupati Mengenai Status Kebencanaan	12 SK	14 SK		
2.2	Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas piket posko siaga darurat bencana	4312 Org/Hari	4399 Org/Hari	532.437.068 526.273.426 (98,84%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis paket logistic saat bencana	6 Jenis	6 Jenis	265.005.340 254.648.380 (96,09%)	Tercapai
		Jenis Peralatan Saat Bencana	3 Jenis	3 Jenis		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	5.142.106.006 4.871.289.417 (94,73%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	100%	35.589.490 35.434.130 (99,56%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Jenis	5 Jenis	16.299.900 16.263.000 (99,77%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Jenis	5 Jenis	10.628.590 10.530.100 (99,07%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Perangkat Daerah/Monitoring	15 Lap	15 Lap	8.661.000 8.641.030 (99,77%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Jenis	1 Jenis	2.540.853.061 2.510.392.754 (98,80%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 12 Bulan	23 Org	23 Org	2.534.701.951 2.504.457.754 (98,81%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Jenis	1 Jenis	6.151.110 5.935.000 (96,49%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	340.691.870 337.879.790 (99,17%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (kabel NYAF	8 Jenis	8 Jenis	5.877.410 4.690.000 (79,80%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		@100 M SPLN 42-3 LMK, U (ex. eterna), lampu jari 18 W, lampu jari 23 W, lampu LED 7 Watt, saklar seri IB, Sekring Otomatis BBC, Stop Kontak Arde outbow putih)				
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	39 Jenis	39 Jenis	34.571.900 34.164.500 (98,82%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga tersedia	9 Jenis	9 Jenis	13.456.200 12.623.000 (93,81%)	Tercapai
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	9 Jenis	9 Jenis	33.591.360 33.344.250 (99,26%)	Tercapai
3.5	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis bahan makan minum tamu tersedia	2 Jenis	2 Jenis	7.950.000 7.938.074 (99,85%)	Tercapai
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	100 Lap 30 Lap	317 Lap 59 Lap	245.245.000 245.119.966 (99,95%)	Tercapai
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi baik	100%	100%	347.295.300 293.200.140 (84,42%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas lapangan roda dua dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	74.393.000 67.820.140 (91,16%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan dan mesin lainnya (Kursi antic, Kursi lipat, Kursi putar, Kursi rapat, Meja rapat, AC Split kapasitas 1.5 PK, UPS 2000 VA, Pesawat radio Rig UHF/FM, Smartphone,	12 Jenis	12 Jenis	272.902.300 225.380.000 (82,59%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Laptop, Laptop Grafis, Printer)				
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	172.347.992 156.825.482 (90,99%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar terdistribusi	3000 Buah	3000 Buah	5.700.000	Tercapai
		Jumlah surat masuk terdistribusi	1500 Buah	1500 Buah	5.700.000 100%	
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	4 Jenis	4 Jenis	107.814.592 94.117.982 (87,30%)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis alat/bahan untuk kegiatan kantor tersedia	22 Jenis	22 Jenis	58.833.400	Tercapai
		Jenis bahan makan minum tersedia	2 Jenis	2 Jenis	57.007.500 (96,90%)	
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	1.705.328.293 1.537.557.121 (90,16%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik	31 Unit	31 Unit	164.761.000 161.912.621 (98,27%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	7 Jenis	7 Jenis	40.685.700 35.574.500 (87,44%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik	2 Unit	2 Unit	1.499.881.593 1.340.070.000 (89,35%)	Tercapai

Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak ada masalah yang signifikan, semua program, kegiatan dan program kegiatan berjalan sesuai target.



Analisis Kesesuaian Capaian

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan tahun 2021 telah tertuang dalam Renstra yang diturunkan dalam Rencana Kerja tahun 2021. Rencana Kerja tahun 2021 menjadi dasar untuk membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran Rencana Kerja dimana di dalam Perjanjian Kinerja memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat mendukung pencapaian target kinerja program OPD.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Brebes sudah sesuai dengan yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
 - 3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
 - 3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 3.5. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
 - 3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.



- 4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Lapangan.
 - 4.2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
 - 5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 6.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
 - 6.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- II. Program Penanggulangan Bencana
- 1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - 1.1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1.2. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
 - 1.3. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
 - 1.4. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - 2.1. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.2. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
 - 2.3. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.





C.10 Dinas Sosial

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Sosial melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu : urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Sosial.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Sosial, yaitu Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Sosial Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 10.467.385.251 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 9.791.383.491 atau 93,54% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.33
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Sosial T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sosial				
	Belanja Operasi	10.234.523.251	9.559.842.491	(674.680.760)	93,41
	Belanja Modal	232.862.000	231.541.000	(1.321.000)	99,43
	JUMLAH	10.467.385.251	9.791.383.491	(676.001.760)	93,54

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas Sosial dan hasil–hasilnya pada program urusan pemerintahan bidang sosial, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Tabel III.34
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Sosial T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	299.823.700 285.540.024 (95,24%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	299.823.700 285.540.024 (95,24%)	Tercapai
1.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Dibina Dapat Aktif Dalam Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial	4 Organisasi	4 Organisasi	94.123.700 93.440.024 (99,27%)	Tercapai
1.2	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga(LK3)	Jumlah Karang Taruna Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Terdaftar Dana Memenuhi Standar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (LKSA/PA) Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Aktif Dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah TKSK Aktif Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	69 Jiwa 18 LKSA/PA 365 Jiwa 17 Jiwa	69 Jiwa 15 LKSA/PA 365 Jiwa 17 Jiwa	205.700.000 192.100.000 (93,39%)	Tercapai Belum Tercapai, dikarenakan - 2 LKSA berganti menjadi Pondok Pesantren, sedangkan Pondok Pesantren bukan termasuk Kategori LKSA/Panti Asuhan - 1 LKSA/PA sudah tidak ada pengurus sehingga tidak beroperasi lagi. Tercapai Tercapai Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		PSM, Karang Taruna, Orsos/LKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas Di Bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	220 PSKS	220 PSKS		Tercapai
		PSM, Karang Taruna, Yang Dibina dan Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS	661 Kelompok	661 Kelompok		
II	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disabilitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya (%)	100%	99%	500.700.000 442.508.468 (88,38%)	Belum Tercapai, dikarenakan ada sub kegiatan yang tidak mencapai target indikator
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Prosentase Anak Terlantar, Anak Dengan Disabilitas, Anak Nakal dan Anak Jalanan, Lanjut Usia Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya dan Dapat Menjalankan fungsi sosialnya (%)	100%	100%	401.005.200 355.920.828 (88,76%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Permakanan	Menurunnya Jumlah Angka Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (Jiwa)	30 Jiwa	30 Jiwa	82.737.720 65.934.680 (79,69%)	Tercapai
1.2	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Eks Penyakit Sosial Yang Mendapa Rehabilitasi Sosial (Orang)	60 Orang	60 Orang	16.321.780 15.785.780 (96,72%)	Tercapai
1.3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut	Lanjut Usia yang mendapatkan asistensi lanjut usia terlantar atau jaminan sosial sejenis lainnya	60 Orang	53 Orang	83.301.880 75.730.278 (90,91%)	Belum Tercapai, dikarenakan 7 Orang Meninggal Dunia
		PMKS Jalanan	30 Orang	30 Orang		Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemisdan Masyarakat	(Gelandangan, Pengemis, Tuna Sosial,Orang Terlantar) Yang Dapat penanganan dan Pemulangan				
1.4	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Dokumen Rekomendasi Penerima Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu Diluar Panti (Dokumen)	5100 Anak	5084 Anak	218.643.820 198.470.090 (90,77%)	Belum Tercapai, dikarenakan pindahalamat keluar Kabupaten Brebes
2	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Presentase Meningkatnya Penyandang Disabilitas, dan PMKS Lainnya yang terpenuhi hak dasar dan dapat menjalankan fungsi sosialnya (%)	100%	82%	99.694.800 86.587.640 (86,85%)	Belum Tercapai, dikarenakan adarealisasi yang tidak mencapai target indikator
2.1	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Menerima Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Dan Berpartisipasi Dalam Peringatan Hari Disabilitas Internasional	200 Orang	163 Orang	99.694.800 86.587.640 (86,85%)	Belum Tercapai, dikarenakan permintaan lebihbanyak dari persediaan dan keterbatasan anggaran
III	PROGRAM PERLINDUNGAN DANJAMINAN SOSIAL	Presentase Meningkatn Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhandasar	100%	100%	273.762.520 230.591.200 (84,23%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Data FakirMiskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Meningkatn Aksesibilitas RTSM (Rumah Tangga Miskin) dan PMKS lainnya dalam pemenuhan kebutuhandasar	100%	100%	273.762.520 230.591.200 (84,23%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Pendataan Fakir MiskinCakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Validasi DataPMKS dan PSKS YangValid	2 Dokumen	2 Dokumen	209.768.720 170.655.400 (81,35%)	Tercapai
1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Validasi DataPMKS dan PSKS YangValid	1 Dokumen	1 Dokumen	63.993.800 59.935.800 (93,66%)	Tercapai
IV	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	268%	415.183.300 413.127.400 (99,50%)	Tercapai
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alamdan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	268%	415.183.300 413.127.400 (99,50%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Makanan	Lokasi Distribusi LogistikBencana Alam yang Mendapatkan Bantuan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tagana yang di Bina dan aktif dalam penanggulangan bencana	17 Kecamatan 30 Orang	7 Kecamatan 26 Orang	8.992.500 8.900.000 (98,97%)	Belum Tercapai, dikarenakan hanyaterjadi di 7 Kecamatan daerahrawan bencana. Belum Tercapai, dikarenakan belumada rekrutmen Tagana.
1.2	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dokumen Validasi PMKS dan PSKS YangAkurat Jumlah Dokumen Verifikasi dan Validasi Penerima Santunan Kematian Jumlah KPM PKH yang telah diberikan Pendamping Keluarga Fakir Miskin yang Mendapat BantuanStimulasi Usaha Ekonomi Produktif	2 Dokumen 5 Jiwa 101.522 Jiwa 270 Jiwa	2 Dokumen 5 Jiwa 116.576 Jiwa 270 Jiwa	406.190.800 404.227.400 (99,52%)	Tercapai Tercapai Tercapai Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penduduk Miskin dan Rentan Yang Mendapatkan Program Rasntra	16.991 Jiwa	202.434 Jiwa		Tercapai
V	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	144.946.500 137.420.000 (94,81%)	Tercapai
1	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase PSKS Yang Aktif Berpartisipasi Dalam Penanganan Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	144.946.500 137.420.000 (94,81%)	Tercapai
1.1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rangkaian Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional yang Dilaksanakan (Renungan Suci, Tabur Bunga, Bhakti Sosial)	3 Tempat	3 Tempat	63.326.500 57.715.000 (91,14%)	Tercapai
		Rangkaian Peringatan Hari Besar Nasional Yang Dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan		Tercapai
		Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	2 TMP	2 TMP		Tercapai
1.2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	2 TMP 2 TMP	2 TMP 2 TMP	55.000.000 54.625.000 (99,32%)	Tercapai Tercapai
		Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola				
1.3	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	2 TMP	2 TMP	26.620.000 25.080.000 (94,21%)	Tercapai

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	1.068.767.320 967.740.095 (90,55%)	Tercapai
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	98%		Belum Tercapai, dikarenakan adarealisasi yang tidak mencapai target indikator
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	83.734.920 79.673.993 (95,15%)	Tercapai
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Lakip, Sakip)	1 Jenis	1 Jenis	14.473.920 11.977.000 (82,75%)	Tercapai
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (evaluasi rkpd)	1 Dokumen	1 Dokumen	69.261.000 67.696.993 (97,74)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	234.761.600 223.101.377 (95,03%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik /Penerangan	6 Jenis	6 Jenis	6.030.200 5.895.000 (97,76%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	66 Jenis	66 Jenis	62.285.300 57.449.700 (92,24%)	Tercapai
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	2 Jenis	2 Jenis	3.348.000 3.348.000 (100,00%)	Tercapai
2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makanan dan minuman tersedia	2 Jenis	2 Jenis	50.200.000 46.900.000 (93,43%)	Tercapai
2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	7 Jenis	7 Jenis	15.246.100 14.124.850 (92,65%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan tersedia (Jenis)	1 Jenis	1 Jenis	18.840.000 17.270.000 (91,67%)	Tercapai
2.7	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan ke luar daerah	120 Laporan	120 Laporan	78.812.000 78.113.827 (99,11%)	Tercapai
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	93%	438.495.800 364.763.681 (83,19%)	Belum Tercapai, dikarenakan adarealisasi yang tidak mencapai target indikator
3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 bulan	5 Jenis	5 Jenis	104.860.000 85.534.681 (81,57%)	Tercapai
3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerjadiperbaiki (Unit)	50 Unit	45 Unit	21.875.800 14.825.000 (67,77%)	Belum Tercapai, dikarenakan 5 Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki.
3.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia (Orang)	20 Orang	20 Orang	311.760.000 264.404.000 (84,81%)	Tercapai
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	311.775.000 300.201.044 (96,29%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik Jumlah Mobil Jabatan dalam kondisi baik	2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	84.870.000 80.897.044 (95,32%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya Jumlah Motor diproses surat perijinannya	6 Unit 20 Unit	6 Unit 20 Unit	17.004.000 10.544.000 (62,01%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Operasional atau Lapangan					
4.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	209.901.000 208.760.000 (99,46%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor mempunyai permasalahan : Tidak Tercapai, dikarenakan 5 Peralatan dan Perlengkapan Kantor dalam kondisi rusak berat sehingga tidak melakukan perbaikan, dengan penyelesaian : tidak melakukan perbaikan karena barang rusak berat tidak dapat diperbaiki.
2. Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial mempunyai permasalahan : pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu tidak tercapai dikarenakan banyaknya permintaan permintaan lebih banyak dari persediaan dan keterbatasan anggaran, dengan penyelesaian : mengadakan anggaran pada sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu di Tahun berikutnya untuk penyediaan alat bantu.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 108% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target program kegiatan dan sub kegiatan mencapai 124%, menunjukkan bahwa kesesuaian program kegiatan dan sub kegiatan telah mencapai target program pembangunan, yaitu : Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, Kesesuaian Target Program Renstra OPD terhadap target program RPJMD dan Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD.





C.11 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas P3KB melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, yaitu Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas P3KB Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 13.429.889.949 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 12.629.044.022 atau 94,04% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.35
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas P3KB T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.968.903.727	5.642.517.265	(326.386.462)	94,53
	Belanja Operasi	5.408.200.470	5.089.028.305	(319.172.165)	94,10
	Belanja Modal	560.703.257	553.488.960	(7.214.297)	98,71
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.460.986.222	6.986.526.757	(474.459.465)	93,64
	Belanja Operasi	6.257.426.222	5.921.258.557	(336.167.665)	94,63
	Belanja Modal	1.203.560.000	1.065.268.200	(138.291.800)	88,51
	JUMLAH	13.429.889.949	12.629.044.022	-800.845.927	94,04

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).



Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas P3KB dan hasil-hasilnya pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.36
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas P3KB T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
I	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase Meningkatnya Implementasi Pangarusutmaan Gender dan Kabupaten Layak Anak (KLA)	16,00	16,00	443.844.100 442.078.730 (99.60%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelembagaan Pangarusutamaan Gender(PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Perempuan	100%	100%	443.844.100 442.078.730 (99.60%)	Tercapai
1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Prosentase OPD yang memiliki Sistem Data Gender dan Anak	70%	70%	143.844.100 143.842.070 (100%)	Tercapai
1.2	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	- Jumlah Perempuan Bersertifikat Kuitas Hidup Perempuan - Prosentase Anggaran Responsif Gender dalam APBD	240 Orang 7%	318 Orang 8%	300.000.000 298.236.660 (99,41%)	Tercapai
II	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak dibanding Kasus Terlapor	100%	100%	33.000.000 33.000.000 (100%)	Tercapai
2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	Perempuan	100%	100%	33.000.000 33.000.000 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.1	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Prosentase Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang Tertangani	100%	100%	33.000.000 33.000.000 (100%)	Tercapai
III	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan Pembentukan Foruma Anak Desa dibanding Jumlah Desa	40,40	40,40	120.975.600 120.884.750 (99,92%)	Tercapai
3	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan DuniaUsaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan Hak Anak	100%	100%	83.357.000 83.266.250 (99,89%)	Tercapai
3.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	• Jumlah Desa Memiliki Forum Anak • Jumlah Petugas yang Bersertifikat KHA	• 65 Desa • 862 Orang	• 150 Desa • 862 Orang	83.357.000 83.266.250 (99,89%)	Tercapai
4	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	100%	100%	37.618.600 37.618.500 (100%)	Tercapai
4.1	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Petugas yang Bersertifikat KHA	50 Orang	50 Orang	37.618.600 37.618.500 (100%)	Tercapai
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Perlindungan Anak Korban	100%	100%	451.830.000 412.860.824 (91,38%)	Tercapai
5	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan	1 Tahun	1 Tahun	52.190.000 52.060.000 (99,75%)	Tercapai
5.1	Koordinasi dan Sinkronasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pencegahan Kekerasan Anak dan Perempuan	1 Tahun	1 Tahun	52.190.000 52.060.000 (99,75%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kab/Kota	Pelayanan Pendampingan Korban	12 Bulan	12 Bulan	399.640.000 360.941.824 (90,32%)	Tercapai
6.1	Koordinasi dan Sinkronasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Pelayanan Pendampingan Korban	12 Bulan	12 Bulan	399.640.000 360.941.824 (90,32%)	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Grand Design KKBPK (dokumen)	1,00	1,00	1.590.279.602 1.589.701.530 (99,96%)	Tercapai
1.1	Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Tersedianya Grand Design KKBPK	100%	100%	51.371.900 49.223.400 (95,81%)	Tercapai
1.2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen Pengendalian Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja)	1 Dok	1 Dok	45.226.900 43.100.000 (95,30%)	Tercapai
1.3	Advokasi, Sosialisasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/Mi dan SLTP/MTs, Jalur Non Formal Dan Informal	Dokumen Pendataan Keluarga (dokumen)	4 Sekolah	-	-	Refocusing anggaran
1.4	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Dokumen Pendataan Keluarga	4 Dok	1 Dok	6.145.000 6.123.400 (99,65%)	Tercapai
2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Profil KKBPK (Buku Profil)	1 Buku Profil	1 Buku Profil	1.538.907.702 1.538.746.130 (99,99%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.1	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jenis Dokumen Pengendalian Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja)	1 Dok	1 Dok	1.431.915.000 1.431.793.000 (99,99%)	Tercapai
2.2	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jenis Dokumen pengendalian Penduduk (Kebijakan Pengendalian Penduduk, Pengelolaan Dalduk dan Mitra Kerja)	1 Dok	-	-	Pergeseran
2.3	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	• Dokumen Pendataan (KKBPK) Kependudukan Keluarga Berencanadan Pembangunan Keluarga • Jenis Media Publikasi KKBPK (Pemutaran Film, Pameran, Leaflet, Kalender, Event, Baliho)	5 Jenis 68 Jenis	3 Jenis 71 Jenis	106.992.702 106.953.130 (99,96%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74,44	69,58	4.622.501.620 4.255.534.727 (92,06%)	-
3	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74,44	69,58	635.305.650 625.242.811 (98,41%)	-
3.1	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Tersedianya Sarana KIE	1 Tahun	1 Tahun	77.901.500 77.413.500 (99,37%)	Tercapai
3.2	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Operasional Balai KKBPK	1 Tahun	1 Tahun	557.404.150 547.829.311 (98,28%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74,44	69,58	76.528.200 70.778.200 (92,49%)	-
4.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penyuluh KB	38 Orang	38 Orang	76.528.200 70.778.200 (92,49%)	Tercapai
5	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74,44	69,58	2.951.935.070 2.628.412.616 (89,04%)	-
5.1	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB	1 Tahun	1 Tahun	103.543.130 103.228.408 (99,70%)	Tercapai
5.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peserta KB Terlayani dengan Baik	100%	100%	1.586.674.940 1.406.670.620 (88,66%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Tahun	1 Tahun	1.261.717.000 1.118.513.588 (88,65%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Peserta KB Aktif (%)	74,44	69,58	958.732.700 931.101.100 (97,11%)	Tercapai
6.1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	• Prosentase Peserta KB Aktif • Prosentase Peserta KB Aktif Pria	• 69% • 1%	• 69,58% • 1%	456.442.500 445.639.800 (97,63%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.2	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Operasional KKBPK di Kampung KB	1 Tahun	1 Tahun	502.290.200 485.461.300 (96,65%)	Tercapai
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	Cakupan Kelompok Bina Keluarga Paripurna (%)	71,05	71,1	1.248.205.000 1.141.290.500 (91,43%)	Tercapai
7	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluargamelalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Paripurna	100%	100%	1.248.205.000 1.141.290.500 (91,43%)	Tercapai
7.1	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Keluarga Paripurna	100%	100%	280.000.000 259.925.000 (92,83%)	Tercapai
7.2	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Kelompok Bina Keluarga Paripurna Baru	7 Klpk	6 Klpk	115.335.000 109.315.000 (94,78%)	Tercapai
7.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Biaya Operasional KKBPK	1 Tahun	1 Tahun	852.870.000 772.050.500 (90,52%)	Tercapai
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Prosentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan tersedia	100%	100%	2.304.734.875 2.095.823.211 (90,93%)	Tercapai
8	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	6 Dok	6 Dok	33.283.120 29.810.000 (89,56%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
8.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jenis Dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi RKPD) - Jenis Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA) dan Monitoring	3 Jenis 3 Jenis	3 Jenis 3 Jenis	16.506.120 16.496.000 (99,94%)	Tercapai
8.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja	12 Dok	12 Dok	16.777.000 13.314.000 (79,36%)	Tercapai
9	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang	20 Orang	2.614.519.252 2.537.869.750 (97,08%)	Belum Tercapai (target sesuai kondisi awal sebelum adanya beberapa PNS yang pensiun)
9.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN	26 Orang	20 Orang	2.614.519.252 2.537.869.750 (97,08%)	Belum Tercapai (target sesuai kondisi awal sebelum adanya beberapa PNS yang pensiun)
10	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kehadiran Pegawai (%)	100%	100%	32.255.000 31.990.000 (99,18%)	Tercapai
10.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur/Pegawai mendapat Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	32.255.000 31.990.000 (99,18%)	Tercapai
11	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepu- asan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	354.819.360 336.691.530 (94,89%)	Tercapai
11.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia	32 Jenis	40 Jenis	20.325.500 20.264.500 (99,70%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
11.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	4 Orang	4 Orang	91.690.640 74.782.710 (81,56%)	Tercapai
11.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	84.607.000 84.490.150 (99,86%)	Tercapai
11.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan penggandaan Tersedia	6 Jenis	8 Jenis	15.693.100 15.572.800 (99,23%)	Tercapai
11.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia	2 Jenis	1 Jenis	3.000.000 2.960.000 (98,67%)	Tercapai
11.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	50 Laporan	50 Laporan	139.503.120 138.621.370 (99,37%)	Tercapai
12	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	189.867.000 184.259.660 (97,63%)	Tercapai
12.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru	4 Jenis	5 Jenis	189.867.000 184.259.660 (97,63%)	Tercapai
13	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	1.694.510.395 1.513.072.021 (89,29%)	Tercapai
13.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Jumlah Surat Keluar Terdistribusi • Jumlah Surat Masuk Terdistribusi	• 600 Buah • 600 Buah	• 1873 Buah • 924 Buah	4.500.000 4.454.000 (98,98%)	Tercapai
13.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan di Bayar dalam 12 Bulan	6 Jenis	6 Jenis	308.274.668 252.793.501 (82%)	Tercapai
13.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Peralatan Kantor	8 Buah	8 Buah	7.057.730 6.890.600 (97,63%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
13.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	13 Orang	13 Orang	823.100.100 719.520.000 (87,42%)	Tercapai
13.5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	21.980.000 21.885.732 (99,57%)	Tercapai
13.6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioanl atau Lapangan	- Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik - Jumlah Mobil Diproses Surat Perijinannya - Jumlah Motor Diproses Surat Perijinannya	9 Unit 9 Unit 100 Unit	105 Unit 11 Unit 94 Unit	125.070.410 104.979.162 (83,94%)	Tercapai Pengadaan baru dari DAK Fisik untuk penyuluh KB
13.7	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	8 Unit	24 Unit	29.020.000 28.789.520 (99,24%)	Tercapai
13.8	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantordan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Rusak menjadi Baik	1 Unit	1 Unit	355.836.257 354.329.300 (99,58%)	Tercapai
13.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau BangunanLainnya	- Jumlah Bangunan Gedung Kantor Baru - Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	19.671.230 19.421.206 (98,73%)	Tercapai

Sumber data : Dinas P3KB Kabupaten Brebes.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan satu dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Brebes yang menangani 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar yakni:

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Terdapat 8 Program dan 19 Kegiatan yang terdiri dari 44 Sub Kegiatan.



Anggaran DP3KB Kabupaten Brebes T.A. 2021

PAGU ANGGARAN : Rp 13.429.889.949

REALISASI : Rp 12.629.044.022 **(94,04%)**

Sisa : Rp 800.845.927

Analisis Kesesuaian Capaian

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 3 Indikator Kinerja dan semuanya telah tercapai.

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 4 Indikator Kinerja dan semuanya telah tercapai.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3KB Kabupaten Brebes T.A. 2021.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 5 Program, yakni:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Program Perlindungan Perempuan;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dari program di atas telah tercapai dan pada beberapa realisasi sub kegiatan telah melebihi dari target (Terlampir).

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdapat 3 Program, yakni:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan dari program di atas telah tercapai kecuali pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKPBBK.



Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi dan tingkat nasional di tahun 2021, sebagai berikut:

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya
2. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama



C.13 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Lingkungan Hidup.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Lingkungan Hidup, yaitu Pemantapan infrastruktur wilayah terutama infrastruktur infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 20.904.162.689 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp.18.666.406.014 atau 89,30% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.37
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Lingkungan Hidup	20.904.162.689	18.666.406.014	(2.237.756.675)	89,30
	Belanja Operasi	19.795.607.689	18.200.572.214	(1.595.035.475)	91,94
	Belanja Modal	1.108.555.000	465.833.800	(642.721.200)	42,02
	JUMLAH	20.904.162.689	18.666.406.014	(2.237.756.675)	89,30

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah dan hasil-hasilnya pada program bidang lingkungan hidup sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.38
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
I	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen lingkungan lainnya (dokumen)	1 tahun	1 tahun	111.593.500 36.550.500 (32,75%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Jenis Dokumen (IKPLHD) dan dokumen lingkungan lainnya (dokumen)	1 tahun	1 tahun	111.593.500 36.550.500 (32,75%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RDTR	2 dok	2 dok	111.593.500 36.550.500 (32,75%)	Tercapai
II	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	75	75	517.219.000 503.271.290 (97,30%)	Tercapai
1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (%)	75	75	517.219.000 503.271.290 (97,30%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,Udara, Dan Laut	Jumlah Sungai Kewenangan Kabupaten yang diuji Kualitas Airnya (Sungai) Jumlah Titik Sampling Kualitas Udara Ambient (Titik Sampling)	7 Sungai 12 titik samping	7 Sungai 12 titik samping	213.095.800 206.105.600 (96,72%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota	Jumlah Parameter Laboratorium Lingkungan Hidup yang Dikuasai	17 parameter	17 parameter	304.123.900 297.165.690 (97,71%)	Tercapai
III	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100	1.594.758.860 1.558.712.234 (97,74%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase aduan masyarakat yang di tindaklanjuti (%)	100	100	1,594,758,860 1,558,712,234 (97,74%)	Tercapai
1.1	Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Yang Terkelola (Lokasi)	35 Lokasi	35 Lokasi	1,594,758,860 1,558,712,234 (97,74%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
IV	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Volume Sampah yang Terangkut, dan terkelola (m3)	238.201,74 Ton	0	1,727,845,456 0 (0 %)	-
1	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (Satu) Daerahkabupaten/ Kota	Jumlah Volume Sampah yang Terangkut, dan terkelola (m3)	238.201,74 Ton	0	1,727,845,456 0 (0 %)	-
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dengan Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dan/Atau Penimbunan	Jumlah Volume Sampah yang Terangkut, dan terkelola (m3)	238.201,74 Ton	0	1,727,845,456 0 (0 %)	-
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase Usaha/Kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (persen)	75	75	978,505,280 933,409,368 95,39%	Tercapai
1	Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Usaha/Kegiatan yang memenuhi peraturan bidang LH (persen)	75	75	978,505,280 933,409,368 95,39%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang Berstatus TAAT dalam penilaian PROPER (Pelaku Usaha) Jumlah Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi (Usaha/Kegiatan)	12 pelaku usaha 58 Usaha Kegiatan	24 pelaku usaha 32 Usaha Kegiatan	978,505,280 933,409,368 95,39%	Tercapai
V	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Luas Tutupan Lahan yang terkonservasi (Ha)	10 Ha	10 Ha	38,868,643 37,251,748 95,84%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang terkonservasi (Ha)	10 Ha	10 Ha	38,868,643 37,251,748 95,84%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Sekolah dengan status Sekolah Berbudaya Lingkungan/Sekolah Adiwiyata (Sekolah)	10 Sekolah	0	38,868,643 37,251,748 95,84%	Tercapai
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	70,128,650 64,745,950 92,32%	Tercapai
1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Aduan Masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	100	100	70,128,650 64,745,950 92,32%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Aduan Masalah Lingkungan Hidup (%)	100	100	70,128,650 64,745,950 92,32%	Tercapai
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	45	45	6,176,733,100 5,913,192,015 95,73%	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah Perdesaan (%)	45	45	6,176,733,100 5,913,192,015 95,73%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang Dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Bank Sampah yang terbentuk (Unit)	280 Unit	125 Unit	56,139,500 55.711950 99,24%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, Dan Pemrosesan Akhir Sampah Di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Volume Sampah yang terkelola (m3)	61.74 m3	60,71 m3	5,768,012,700 5,755,271,965 99,78%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Volume Sampah yang terangkut (m3)	238.140 m3	240,47 m3	352,580,900 288,525,100 81,83%	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	9.688.509.400 8.868.921.282 92,57%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	6.134.400 5.850.800 95,38%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi RKPD) Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval, Jenis)	10 Jenis 5 Jenis	10 Jenis 5 Jenis	6.134.400 5.850.800 95,38%	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	8.544.981.360 7.890.150.749 92,33%	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Terbayarkan Gaji dan Tunjangan (Orang)	117 Orang	117 Orang	8.528.672.640 7.874.610.349 92,33%	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jenis Dokumen Laporan Keuangan (Buah)	1 Buah	1 Buah	16.308.720 15.540.400 95,29%	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100%	100%	124.846.800 123.440.000 98,87%	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari – Hari tertentu Jumlah Pakaian Olah raga	400 Stel 400 Stel	400 Stel 400 Stel	124.846.800 123.440.000 98,87%	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100%	100%	411.357.040 394.364.565 95,87%	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen/Penerangan (Jenis)	20 Jenis	20 Jenis	9.033.600 9.027.500 99,93%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis) Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis) Jumlah Peralatan Kantor (Buah)	100 Jenis 50 Jenis 250 Jenis	100 Jenis 50 Jenis 250 Jenis	215.393.060 200.899.300 93,27%	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	48.535.000 46.521.000 95,84%	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	20 Jenis	20 Jenis	29.403.000 29.380.000 99,92%	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Tersedia (Jenis)	1 Tahun	1 Tahun	5.000.000 5.000.000 100%	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan (Laporan)	1100 Laporan	1100 Laporan	103.992.380 103.536.765 99,56%	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Aset dalam kondisi baik (%)	100	100	20.783.000 20.620.000 99,22%	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur Baru (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	20.783.000 20.620.000 99,22%	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100	100	365.197.800 324.434.292 88,84%	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (Buah) Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (Buah)	1000 Buah 1000 Buah	1000 Buah 1000 Buah	5.550.000 5.547.000 99,95%	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis	169.500.000 137.906.792 81,36%	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Tersedia (Jenis) Jenis Peralatan Kebersihan Kantor Tersedia (Jenis) Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia (Orang)	5 Jenis 40 Jenis 11orang	5 Jenis 40 Jenis 11 orang	190.147.800 180.980.500 95,18%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset Dalam Kondisi Baik (%)	100	100	215.209.000 210.060.876 97,61%	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi Baik (Unit)	7 Unit	7 Unit	170.349.000 165.302.876 97,04%	Tercapai
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dalam Kondisi Baik (Unit)	1 Unit	1 Unit	44.860.000 44.758.000 99,77%	Tercapai

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Tanjung

Permasalahan :

- a. Kegiatan Penyusunan KLHS Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) baru dianggarkan pada APBD Perubahan sehingga baru dapat dimulai pada awal bulan November 2021.
- b. Kegiatan Penyusunan KLHS berkaitan dengan penyusunan dokumen RDTR Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Tanjung, sehingga pelaksanaannya harus disinkronkan dengan penyusunan RDTR yang dilaksanakan oleh Dinas PSDAPR Kab. Brebes.
- c. Konsultasi publik RDTR tahap 2 dilaksanakan oleh Dinas PSDAPR pada tanggal 7 Desember 2021 yang hasilnya ditindaklanjuti dengan penggalan isu



Pembangunan Berkelanjutan pada tanggal 17 desember 2021 oleh tim ahli dan tim teknis penyusunan KLHS RDTR.

- d. Tim ahli penyusunan KLHS RDTR membutuhkan waktu 2 bulan untuk menganalisis penggalian isu Pembangunan Berkelanjutan menjadi Kebijakan Rencana Program (KRP), sehingga sampai dengan T.A. 2021 kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan 40% dan anggaran yang terserap sebesar 32,75%.

Solusi :

Agar penyusunan KLHS RDTR kecamatan bulakamba dan kecamatan tanjung dapat diselesaikan, maka tahapan kegiatan selanjutnya dilaksanakan pada T.A. 2022, untuk itu sisa anggaran diluncurkan kembali pada T.A. 2022

2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) pada Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Tidak Mencapai Target dikarenakan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Keterbatasan Waktu, alokasi waktu yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan ini sangat terbatas dikarenakan kegiatan ini bersumber dari DAK yang baru muncul dalam DPA Perubahan pada Triwulan Terakhir , sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2021 mengingat tahapan pelaksanaan kegiatan ini yang memerlukan waktu yang cukup lama
- b. Lokasi, lokasi yang seyogyanya diproyeksikan sebagai tempat pembangunan Penampungan sementara Limbah B3 Covid-19 ternyata tidak memenuhi Perda Tata Ruang, sehingga rencana pembangunan di lokasi tersebut tidak dapat dilanjutkan.

3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat pada kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan



hidup dengan indikator target 10 sekolah Adiwiyata kenapa tidak tercapai 10 sekolah :

- a. Kegiatan Sekolah Adiwiyata itu harus dilakukan dengan melaksanakan kegiatan bersih2 dan penghijauan dilingkungan sekolah, dan dibuktikan dengan Foto2 kegiatan, sedangkan pada masa 2021 masih kondisi pandemi dan Siswa belajar dengan sistem PJJ / Daring, jadi Kegiatan tidak bisa dilaksanakan karena Siswa Tidak masuk Sekolah
- b. Kegiatan Sekolah Adiwiyata Harus terintegrasi dalam RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) di sekolah dan dilaksanakan kegiatan PBLHS (Peduli Budaya Lingkungan Hidup Sekolah), namun karena Siswa tidak masuk sekolah, jadi tidak bisa dilaksanakan.

Adapun anggaran yang ada telah terpakai untuk :

- Pembelian Rak dan Alat Biopori yang dibagikan ke sekolah – sekolah
- SPPD digunakan untuk pembinaan Adiwiyata & Proklim ke sekolah - sekolah dan kelompok masyarakat

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Capaian kinerja pada Bidang Perencanaan dan Penataan Hukum Lingkungan dengan indikator kinerjanya sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah, Indeks Kualitas Air mencapai target sebesar 105.04 %. Namun ada 2 indikator kinerja yang belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu indeks kualitas udara dengan capaian 96,05% serta Indeks Kualitas Tutupan Lahan hanya mencapai 71.74%.

Indikator Kinerja Indeks kualitas Udara dan Tutupan Lahan belum tercapai dikarenakan :

- a. Meningkatnya sumber emisi udara tidak bergerak yang berasal dari industri;
- b. Meningkatnya sumber emisi bergerak dari asap kendaraan bermotor berbahan bakar fosil;
- c. Untuk IKTL tahun 2021 merupakan hasil pemetaan dari foto satelit dan pemetaan melalui google earth dimana tanaman yang bisa terbaca dalam pemetaan adalah



tanaman dengan ketinggian lebih dari 6m dan berkelompok serta harus mendapat verifikasi dari KLHK.

Pada Bidang Pengembangan Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pengendalian Pencemaran target kinerja belum tercapai dikarenakan :

- a. Terbatasnya armada pengangkut sampah dan tenaga kerja, kondisi Tahun 2021 jumlah Truk 24 unit dan tenaga kerja orang;
- b. Adanya pengurangan anggaran dibidang pengelolaan sampah sehingga mengurangi jadwal pengambilan sampah, yang tadinya 3 shift menjadi 2 shift;
- c. Alat berat yang tersedia berjumlah 2 unit mengalami kerusakan 1 unit, sudah dilakukan servis perbaikan namun belum bisa berfungsi maksimal;
- d. Perbandingan jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu tahun sesuai perhitungan :
 - Timbunan sampah berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2021 sebesar + 950 ton/hari, sedangkan sampah yang dapat terangkut ke TPA baru sebesar + 207.9 Ton/hari dan yang dikelola masyarakat sebesar + 190 ton/hari, berarti masih ada sisa sampah yang belum terangkut + 552.1 ton/hari.
 - Kondisi ideal untuk dapat mengatasi seluruh permasalahan sampah di Kabupaten Brebes diperlukan armada sekitar 150 truk dan 900 orang tenaga pengelola sampah.

Selama tahun anggaran 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Kabupaten Brebes telah mendapatkan beberapa capaian di tingkat nasional, antara lain:

- a. Menjadi Peserta Program Prioritas Nasional Sertifikasi Laboratorium dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan hanya ada 3 Kabupaten yang mendapatkan Program ini, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bantaeng.
- b. Memperoleh Akreditasi Nasional Sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-1559-IDN tertanggal 6 Desember 2021 dan mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Laboratorium Lingkungan Hidup dan sedang dalam proses menunggu surat pengesahan Registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang segera turun di tahun 2022 .



C.13 Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang administrasi kependudukan dan cacatan sipil.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu Peningkatan perlindungan sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil T.A 2021 sebesar Rp. 10.167.759.243 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 9.504.450.287 atau 93,48% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.39
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Adm Kependudukan dan Cacatan Sipil				
	Belanja Operasi	9.467.139.083	8.851.076.487	(616.062.596)	93,49
	Belanja Modal	700.620.160	653.373.800	(47.246.360)	93,26
	JUMLAH	10.167.759.243	9.504.450.287	(663.308.956)	93,48

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Tabel III.40
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN : BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
I	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	-	25.162.000 23.671.070 (94,07%)	-
1	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	-	25.162.000 23.671.070 (94,07%)	-
1.1	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non dokumen Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan penduduk rentan	1	1	25.162.000 23.671.070 (94,07%)	Tercapai
II	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	-	24.102.000 20.014.000 (83,04%)	-
1	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	-	24.102.000 20.014.000 (83,04%)	-
1.1	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah akta perkawinan penduduk non muslim dan penghayat kepercayaan yang diterbitkan dan perubahan status anak dan pewarganegaraan (jumlah)	31	31	6.562.000 5.294.000 (80,68%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah akta kelahiran Yang diterbitkan	50000	57145	17.540.000 14.720.000 (83,92%)	Tercapai
III	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	-	297.020.840 243.679.990 (82,04%)	-
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	297.020.840 243.679.990 (82,04%)	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Sistem data pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil (sistem)	1	1	178.732.200 171.191.700 (95,78%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen analisis pemanfaatan data kuantitatif dan data kualitatif (dokumen)	6	7	10.264.000 5.735.000 (55,87%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Inovasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (inovasi)	1	1	108.024.640 66.753.290 (61,79%)	Tercapai
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	-	45.161.292 40.633.308 (89,97%)	-
1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	-	45.161.292 40.633.308 (89,97%)	-
1.1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya data profil kependudukan	2	2	14.199.292 12.767.808 (89,92%)	Tercapai
1.2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	hasil IKM	2	2	30.962.000 27.865.500 (90,00%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	-	-	-	9.577.741.911 8.982.601.642 (93,79%)	-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	37.217.060 36.844.466 (99,90%)	-
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan (dokumen)	2	2	37.217.060 36.844.466 (99,90%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	3.573.136.451 3.372.038.897 (94,37%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)	12	12	3.496.066.451 3.307.368.897 (94.60%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honor tim pengelola keuangan (bulan)	3	3	77.070.000 64.670.000 (83.91%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	153.790.000 88.358.565 (57.45%)	-
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari hari tertentu (stel)	40	40	35.620.000 29.473.065 (82.74%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Pera- turan Perundang Undangan	Peserta sosialisasi (orang)	500	500	118.170.000 58.885.500 (49.83%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	3.055.828.100 2.891.225.549 (94.6%)	-
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan (jenis)	4	4	2.609.000 2.609.000 (100%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Pera- turan dan Perleng- kapan Kantor	Jenis alat tulis kantor (jenis)	30	30	2.920.243.640 2.763.182.900 (94.62%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga (jenis)	24	24	51.956.460 48.806.800 (93.94%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan minum tersedia (jenis)	2	2	53.395.000 50.027.000 (93.69%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia (jenis)	9	9	30.233.000 29.208.850 (96.61%)	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan luar daerah (laporan)	100	100	195.962.200 195.112.491 (99.57%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	321.670.600 283.279.800 (88%)	-
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	jenis mebel baru (jenis)	1	1	11.625.000 11.600.000 (99,78%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Pera- latan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor (jenis)	14	14	310.045.600 271.679.800 (87,63%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	2.078.873.700 2.000.868.301 (96,25%)	-
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar/masuk terdistribusi (buah)	3000	3000	2.000.000 228.700 (11,44%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan (jenis)	5	5	304.284.000 292.298.235 (96,06%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pelayanan Umum (jenis)	14	14	1.772.589.700 1.708.341.366 (96,38%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Peme- rintahan Daerah	-	-	-	357.226.000 309.986.064 86,78	-
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	23	23	144.618.000 142.602.455 (98,61%)	Tercapai
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perfeng- kapan gedung kantor dalam kondisi baik(jenis)	10	10	108.045.000 67.099.909 (62,10%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	3	3	104.563.000 100.283.700 (95,91%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes.



Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Bidang Administrasi kependudukan dan catatan sipil tidak ada permasalahan yang dihadapi. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.

Analisis Kesesuaian Capaian

Dari 6 indikator program pembangunan, 5 indikator sudah tercapai (83,3%) dan 1 indikator masih belum tercapai (16,6%). Indikator program pembangunan yang sudah tercapai, yaitu pada indikator : Cakupan penduduk yang memiliki KTP, Cakupan Keluarga yang memiliki kartu keluarga, ketersediaan database kependudukan, Rasio penduduk 0-18 tahun yang memiliki akte, dan Ketersediaan database warehouse. Adapun indikator yang belum tercapai yaitu pada indikator perolehan ISO 9001 : 2015. Adapun rincian indikator yang sudah tercapai sebagai berikut :

- Cakupan Penduduk yang memiliki KTP realisasi sebesar 96,53%, atau tercapai 106,4%.
- Cakupan Keluarga yang memiliki kartu keluarga realisasi sebesar 99,48%, atau tercapai 104,7%.
- Ketersediaan database kependudukan, sudah tersedia, atau tercapai 100%.
- Ketersediaan data warehouse pemanfaatan data, sudah tersedia, atau tercapai 100%.
- Rasio penduduk 0-18 tahun yang memiliki akte, tercapai sebesar

Dan rincian indikator yang belum tercapai, sebagai berikut :

- Perolehan ISO 9001 : 2015, belum tercapai

hambatan dalam pencapaian iso adalah, keterbatasan anggaran.

Kegiatan-kegiatan yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil, sebenarnya sudah sesuai dan mendukung tercapainya target-target indikator program tersebut, namun dikarenakan adanya hambatan keterbatasan anggaran, sehingga mengakibatkan tidak adanya dukungan anggaran untuk kegiatan tersebut yang berakibat adanya target program yang tidak tercapai. Perlu diketahui bersama, pada tahun 2021, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes, mendapat kewajiban



refocusing anggaran sebesar Rp.285.474.008,- dan pada tahun 2020 pada APBD sebesar anggaran Rp.1.244.005.000,- dan DAK sebesar Rp270.857.000,-. Dengan begitu besarnya anggaran refocusing pada tahun 2020 dan 2021, sangat berdampak pada sulitnya pemenuhan target kinerja program.





C.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 6.917.680.348 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 6.840.620.620 atau 98,89% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.41
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
	Belanja Operasi	6.868.380.348	6.792.220.620	(76.159.728)	98,89
	Belanja Modal	49.300.000	48.400.000	(900.000)	98,17
	JUMLAH	6.917.680.348	6.840.620.620	(77.059.728)	98,89

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan hasil-hasilnya pada bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.42
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA						
I	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa berkembang menjadi desa cepat berkembang (%)	76,00%	76%	109.821.200 108.930.100 (99,19%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Meningkatnya desa yang memiliki infrastruktur yang menunjang ekonomi masyarakat	292 desa	292 desa	109.821.200 108.930.100 (99,19%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa	Dokumen bidang penataan dan pendayagunaan kawasan Jumlah desa desa penerima bantuan keuangan desa berdikari	1 dokumen 6 desa	1 dokumen 6 desa	14.510.000 13.790.000 95,04%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa	Inventarisasi Permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana Desa dan alternatif Pemecahannya ; Data sebagai bahan pembinaan, fasilitasi, supervisi dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan	292 desa	292 desa	95.311.200 95.140.100 99,82%	Tercapai
II	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%)	51,00	51,00	103.865.800	Tercapai
1	Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa	Persentase Desa yang memiliki BP SPAMS (%)	51,00	51,00	103.865.800	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jenis Dokumen Rencana Kerja Operasional (RKO) Program TMMD Sengkuyung / Reguler Jumlah Desa Penerima Program TMMD Jumlah Kelompok BP-SPAMS	1 dokumen 4 desa 155 kelompok	1 dokumen 4 desa 155 kelompok	103.865.800 103.607.000 99,75%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
III	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Jumlah Desa tertib administrasi	286,00	286,00	947.119.315 . 942.792.050 99,54%	Tercapai
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Jumlah Desa tertib administrasi	286,00	286,00	947.119.315 . 942.792.050 99,54%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jenis Dokumen Laporan Kegiatan Desa (LPPD dan LKPJ) Kepala Desa	2 dokumen	2 dokumen	129.184.280 128.583.500 99,53%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jenis Juknis Pedoman Pelaksanaan Keuangan ; Aset Desa Jumlah Desa yang Menginput Data Inventarisasi Aset Desa Melalui Sim Aset Desa secara akurat (Desa)	2 Juknis 292 desa	2 Juknis 292 desa	179.671.900 179.659.000 99,99%	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Perangkat Desa Bersertifikat Tata Kelola Pemerintahan Desa (Badan Diklat) Jumlah Orang (Kepala Desa, BPD dan Unsur Perangkat Desa) yang mengikuti Sosialisasi Bintek Pengelolaan Keuangan	400 orang 893 orang	400 orang 893 orang	195.881.200 193.542.500 98,76%	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Terbinanya 292 BUMDES	292 BUMDes	292 BUMDes	77.876.240 77.264.050 99,21%	Tercapai
1.5	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya dokumen profil Desa dan Kelurahan	297 dokumen	297 dokumen	35.792.615 35.791.000 100%	Tercapai
1.6	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Terinputnya Data Inventarisasi Aset Desa Kedalam Sistem Informasi ASET DESA	292 desa	292 desa	184.456.000 184.450.500 100%	Tercapai
1.7	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlatihnya Anggota BPD	292 desa	292 desa	87.068.940 86.514.500 99,36%	Tercapai
1.8	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terbentuknya Dokumen pendataan/inventarisasi perkembangan desa dan kelurahan,	297 dokumen . 292 desa 1 kabupaten	297 dokumen 292 desa 1 kabupaten	57.188.140 57.077.000 99,81%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		pendataan profil desa dan profil kelurahan Terbentuknya Jumlah desa berkembang naik status menjadi desa cepat berkembang Terlaksananya Lomba Desa				
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Desa yang memanfaatkan dan mengelola Dana Desa sesuai dengan perencanaan dan aturan (%)	100,00	100,00	832.269.889 827.415.790 99,42%	Tercapai
1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten /kota	292 desa	292 desa	832.269.889 827.415.790 99,42%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Pembinaan Desa Adat	6 desa	6 desa	18.886.400 18.622.500 98,60%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya pembinaan penguatan kelembagaan (LPM, RT/RW, PKK Karang taruna dan kelembagaan masyarakat), Terlaksananya posyandu yang naik ke status madya, Terlaksananya posyandu madya yang naik status ke mandiri, Terlaksananya kader posyandu yang bersertifikat pelatihan	292 desa	292 desa	471.714.700 470.448.860 99,73%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		kader posyandu, Terlaksananya masyarakat desa yang mengikuti bintek penataan dan pendayagunaan kawasan, Terlaksananya masyarakat desa yang naik status menjadi desa swasembada				
1.3	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jenis Dokumen Laporan Aset Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Jumlah BUMdes Baru yang Terbentuk Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan sertifikat pelatihan Usaha Ekonomi Desa	12 dokumen 292 BUMDes 137 kelompok	12 dokumen 292 BUMDes 137 kelompok	84.128.189 83.991.000 99,84%	Tercapai
1.4	Sub Kegiatan Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar Pameran TTG Nasional di Kabupaten Bandung Terbentuknya Posyantekdes Tingkat Kabupaten Brebes	1 kegiatan 30 posyantekdes	1 kegiatan 30 posyantekdes	33.821.400 33.486.400 99,01%	Tercapai
1.5	Sub Kegiatan Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya BBGRM	17 kecamatan	17 kecamatan	28.823.300 28.812.600 99,96%	Tercapai
1.6	Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya fasilitas PKK	292 desa	292 desa	194.895.900 192.054.430 98,54%	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100 %	100 %	65.022.505 64.170.505 (98,69%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dok	3 Dok	65.022.505 64.170.505 (98,69%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dok	1 Dok	1.802.505 1.802.505 100%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen laporan capaian kinerja OPD	1 Dok	1 Dok	63.220.000 62.368.000 98,65%	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Dok	0 Dok	0	Kegiatan Tidak dapat dilaksana kan karena adanya keterbatas an anggaran.
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentasi kehadiran pegawai	1 Tahun	1 Tahun	4.171.098.425 4.129.041.124 (98,99%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan ASN	40 Org	40 Org	4.156.778.425 4.115.291.101 99,9%	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jenis dokumen laporan keuangan	2 buah	2 buah	14.320.000 13.750.023 96,02%	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	50 Stel	50 Stel	20.000.000 19.500.000 (97,50%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	50 Stel	50 Stel	20.000.000 19.500.000 97,50%	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	1 Tahun	1 Tahun	200.005.159 198.898.437 99,80%	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan	9 Jenis	9 Jenis	6.698.700 6.685.000 99,80%	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia Jenis Bahan Kebersihan Kantor	44 Jenis 28 Jenis	44 Jenis 28 Jenis	38.592.900 28.544.300 99,87%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 Jenis	1 Jenis	1.860.000 1.800.000 96,77%	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makanan Minuman Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	31.585.000 31.082.000 98,41%	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	8 Jenis	8 Jenis	10.785.700 10.785.700 100%	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	16.080.000 16.032.000 99,70%	Tercapai
4.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	50 Laporan	50 Laporan	94.402.859 93.969.437 99,54%	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	49.300.000 48.400.000 (98,17%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor baru	7 Jenis	7 Jenis	49.300.000 48.400.000 98,17%	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerin- tahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	272.347.000 253.211.587 (92,97%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk dan Materai	670 Buah	670 Buah	6.510.000 6.510.000 100%	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Dibayar Dalam 12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	62.557.000 56.861.587 90,90%	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	11 Orang	11 Orang	203.280.000 189.840.000 93,39%	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	146.831.055 144.654.027 (98,52%)	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenda- raan Dinas Operasi- onal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Dalam Kondisi Baik	25 Unit	25 Unit	96.639.055 95.188.027 98,50%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebeleur Dalam Kondisi Baik	40 Unit	40 Unit	2.000.000 2.000.000 100%	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Dalam Kondisi Baik	22 Unit	22 Unit	33.700.000 33.285.000 98,77%	Tercapai
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit	14.492.000 14.181.000 97,85%	Tercapai

Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna mempunyai permasalahan tidak terpenuhinya sebagai peserta pada Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional karena tidak ada surat undangan kegiatan dari Provinsi Jawa Tengah.
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai permasalahan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Rakor Dana Desa Tingkat Kabupaten tidak dapat dilaksanakan dengan penyelesaian penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai permasalahan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan



P2MBG Tidak dapat dilaksanakan dengan penyelesaian penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat mempunyai permasalahan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan tidak dapat dilaksanakan dengan penyelesaian penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai permasalahan keterbatasan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan penyelesaian penambahan anggaran untuk tahun berikutnya.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Pada Program Pengembangan Sosial dan Budaya capaian kinerjanya menunjukan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah. Semua indikator pada empat kegiatan di Program Pengembangan Sosial dan Budaya kinerjanya telah mencapai 98,30%.

Capaian kinerja pada Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan indikator kinerjanya sudah menunjukan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah akan tetapi masih ada indikator yang capaiannya tidak memenuhi target yaitu pada kegiatan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tepat Guna target indikator Terealisasi sebagai peserta pada Kegiatan Gelar TTG Tingkat Nasional tidak terealisasi karena kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional ditiadakan akibat pandemi COVID-19.

Pada Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipatif Masyarakat, beberapa kegiatan tidak terealisasi dan tidak memenuhi capaian kinerja dari target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada kegiatan Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif indikator Terlaksananya Bulan Bhakti Gotong



Royong Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Kecamatan tidak tercapai karena adanya surat dari provinsi tentang pembatalan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat akibat adanya pandemi COVID-19, juga pada kegiatan Pelayanan Dasar Masyarakat indikator Terlaksananya pelatihan P2MBG tidak dapat tercapai hal ini dikarenakan adanya Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 sehingga ada kegiatan pelatihan P2MBG tidak dapat dilaksanakan, demikian juga pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada indikator Terlaksananya Rakor Dana Desa tidak tercapai karena Refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19.

Pada Program Pemerintahan Desa kesesuaian antara target kinerja dan realisasi capaian kinerjanya mencapai 99,52%.

Pada bidang kesekretariatan dengan 1 program dan 7 kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun kesesuaian antara target kinerja dan realisasi capaian kinerjanya mencapai 98,18% karena ada satu sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan anggaran yang di dapat.

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi dan tingkat nasional pada Tahun 2021, yaitu Penghargaan atas Upaya Terbaik dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Dana desa Tahun Anggaran 2021 tingkat Provinsi.



C.15 Dinas Perhubungan

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Perhubungan melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Perhubungan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perhubungan diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 18.959.771.985 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 17.238.455.091 atau 90,92 % secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.43
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perhubungan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Perhubungan				
	Belanja Operasi	13.412.502.076	11.876.322.689	(1.536.179.387)	88,55
	Belanja Modal	5.547.269.909	5.362.132.402	(185.137.507)	96,66
	JUMLAH	18.959.771.985	17.238.455.091	(1.721.316.894)	90,92

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited)

Berikut realisasi dari capaian program pembangunan dan capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.44
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	-	-	11.283.325.090 10.583.466.104 93,80	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang (%)	70%	70%	7.079.577.920 6.878.551.354 (97,16%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Paku Jalan, Jumlah PJU Terpasang, Jumlah Rambu Lalu Lintas yang Terpasang, Panjang Marka Jalan, Panjang Pagar Pengaman Jalan yang Terpasang, Peralatan Survey Inspeksi Keselamatan	2300 buah, 2075 unit, 300 unit, 1300 m2, 1000 meter, 1 laporan	PJU yang terpasang 249 Unit, Jumlah Rambu yang terpasang 14 Unit, Panjang Marka Jalan 120 m2, Panjang Pagar Pengaman Jalan yang Terpasang 648 meter.	5.765.896.420 5.617.330.266 (97,42%)	Pemasangan Paku Jalan dan Peralatan Survey Inspeksi Keselamatan Tidak Dilaksanakan karena terkena Refocusing
1.2	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	-Pemeliharaan dan Revitalisasi Traffic Light dan Warning Light serta Peringatan Dini Sebidang/PDPS, -Pemeliharaan Lampu Suar	61 unit, 6 buah	26 Unit, 7 buah	369.400.000 343.819.000 (93,07%)	Belum tercapai (anggaran tidak cukup)
1.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah PJU yang Terpelihara	26450 unit	3042 unit	944.281.500 917.402.088 (97,15%)	Belum tercapai (anggaran tidak cukup)
2	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Kinerja Terminal	84 lap	84 lap	46.520.000 34.380.000 (73,90%)	tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Angkutan Perairan Daratan	12 lap	12 lap	29.600.000 28.205.000 (95,29%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Laporan Kinerja Terminal	84 lap	84 lap	16.920.000 6.175.000 (36,50%)	Tercapai
3	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Kegiatan Ramp Check di Terminal	12 lap	12 lap	731.247.120 607.745.900 (83,11%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Koordinasi	Jumlah Laporan Kegiatan Ramp	12 lap	12 lap	14.390.000 14.020.000	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Check di Terminal			(97,43%)	
3.2	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Rekapitulasi Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kendaraan/Tahun	12 lap	12 lap	716.857.120 644.011.900 (89,83%)	Tercapai
4	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengamanan Hari- hari Tertentu	60 lap	63 lap	933.445.100 846.645.500 (90,70%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Kegiatan Pengamanan Hari- hari Tertentu	1 lap	1 lap	326.156.000 299.490.000 (91,82%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan Pelaksanaan Pengendalian dan Penegakan Disiplin Lalu Lintas	1 dok	1 dok	607.289.100 547.155.500 (90,09%)	Tercapai
5	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	12 lap	12 lap	2.398.919.950 2.157.672.950 (89,94%)	Tercapai, Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pada Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Emplementa si Penanganan Dampak Lalu Lintas di Jalan Kabupaten Sebanyak 5 Laporan, Monitoring Pengelolaan Terminal Sebanyak 7 Laporan.



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
5.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Laporan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas	1 lap	9 lap	78.599.950 64.112.950 (81,56%)	Tercapai Survey Potensi Bahaya (Hazard) Pada Ruas Jalan Lingkar Brebes - Tegal
5.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Inspeksi dan Evaluasi Kinerja Keselamatan LLAJ	1 lap	12 lap	2.320.320.000 2.093.560.000 (90,22%)	Tercapai Potensi PAD pada Wilayah Korsatpel Brebes
6	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan	12 lap	12 lap	93.615.000 58.470.400 (62,46%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Angkutan Jalan	12 lap	12 lap	92.967.000 58.470.400 (62,89%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Pemilihan Abdi Yasa Tingkat Kabupaten	50 orang	-	648.000 0 (0%)	Tidak terlaksana karena Provinsi tidak mengadakan
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	7.676.446.895	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	-	45.096.701 0 (0%)	Tidak dilaksanakan 2 jenis (pameran, karnaval) dikarenakan pandemi Covid-19
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD) Jenis Media Publikasi dan Promosi (Pameran, Karnaval)	10 Jenis , 5 Jenis	10 jenis, 3 jenis	45.096.701 0 (0%)	Tidak dilaksanakan 2 jenis (pameran, karnaval) dikarenakan pandemi Covid-19
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (Laporan Keuangan, LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD, Laporan Akhir Tahun) Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 Jenis, 10 Jenis	10 Jenis 10 Jenis	5.455.806.163 5.109.455.579 (93,65%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan	60 orang	45 orang	5.333.798.063 4.988.951.299 (93,53%)	Pejabat yang diantik masuk mulai Januari Tahun 2022
2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	10 orang	10 orang	118.843.700 119.561.280 (100,60%)	Tercapai, Kelebihi anggaran tapi udah di Contra post/dikemb alikan ke kas Negara
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	5 buah	5 buah	3.164.400 508.000 (16,05%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
2.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jenis Dokumen Laporan Keuangan	5 buah	5 buah	45.096.701 0 (0%)	Tercapai Dikembalik an ke kas Negara/contr a post
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 Jenis	10 Jenis	685.514.516 377.636.073 (54,97%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/Penerangan	20 Jenis	20 Jenis	4.886.000 3.140.000 (64,26%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Alat Kantor Tersedia	50 Jenis	50 Jenis	152.010.000 72.619.000 (47,77%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	17 Jenis	17 Jenis	157.171.850 74.401.000 (47,34%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	20.000.000 16.104.000 (80,52%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	38.900.000 1.417.500 (3,64%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran dan PPKM
3.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jenis Laporan Perjalanan Luar Daerah	100 lap, 100 lap	100 lap 100 lap	180.923.357 116.842.037 (64,58%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 Jenis	10 Jenis	32.400.000 13.527.273 (41,75%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur Baru	5 Jenis	5 Jenis	32.400.000 13.527.273 (41,75%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 Jenis	10 Jenis	778.594.555 602.972.651 (77,44%)	Tercapai Efisiensi penggunaan anggaran
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi Jumlah Surat Masuk Terdistribusi	6000 buah 6000 buah	6000 buah, 6000 buah	46.905.000 42.440.000 (90,48%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jenis Tagihan Dibayar Dalam 12	4 jenis	4 jenis	344.918.400 206.233.151	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan			(59,79%)	
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki	10 unit	10 unit	155.429.055 148.122.000 (95,29%)	Tercapai
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	10 orang	10 orang	231.342.100 206.177.500 (89,12%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Administrasi Umum	10 jenis	10 jenis	677.674.960 504.912.411 (74,51%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Kendaraan Operasional Inspeksi, Monitoring dan Evaluasi	15 unit 1 unit	15 unit 1 unit	434.177.960 264.708.411 (60,96%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 unit	1 unit	243.497.000 240.204.000 (98,64%)	Tecapai

Sumber data : Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan, Dinas Perhubungan menghadapi beberapa masalah, di antaranya

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota mempunyai masalah Jumlah Anggaran yang belum mencukupi target kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan dengan penyelesaian Perencanaan secara bertahap dan simultan setiap tahun untuk memenuhi target kebutuhan.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan mempunyai masalah di monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dampak yang belum di penuhi, seperti fasilitas perlengkapan jalan pada kegiatan pembangunan pabrik / pusat kegiatan. Solusinya adalah penindakan dan sanksi yang tegas oleh tim monitoring dan evaluasi.



Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 90,94% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa jumlah anggaran yang belum mencukupi target.



C.16 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 8.205.312.800 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 8.022.054.777 atau 97,77% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.45
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Komunikasi dan Informatika	8.088.286.320	7.905.482.027	(182.804.293)	97,74
	Belanja Operasi	7.305.364.320	7.125.225.027	(180.139.293)	97,53
	Belanja Modal	782.922.000	780.257.000	(2.665.000)	99,66
2	Statistik	117.026.480	116.572.750	(453.730)	99,61
	Belanja Operasi	84.079.580	83.632.850	(446.730)	99,47
	Belanja Modal	32.946.900	32.939.900	(7.000)	99,98
	JUMLAH	8.205.312.800	8.022.054.777	-183.258.023	97,77

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan hasil-hasilnya pada bidang komunikasi dan informatika dan bidang statistik sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.46
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
----	--	--	--------	-----------	------------------------------	-----



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
I.	PROGRAM INFORMMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan kelompok Informasi masyarakat (KIM)	100%	100%	865.755.880 861.909.708 (99,55%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	100%	100%	865.755.880 861.909.708 (99,55%)	Tercapai
1.1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jenis dokumentasi internal kegiatan pemerintah (foto, video, rekaman suara)	3 Jenis	3 Jenis	118.512.100 118.353.200 (99,87%)	Tercapai (Beberapa target tidak tercapai)
		Jumlah sambutan bupati yang disusun	400 Buah	400 Buah		
1.2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	50 Kegiatan	50 Kegiatan	50 Kegiatan	110.415.900	Tercapai
		Jumlah surat kabar terbaru	2500 Eksemplar	2500 Eksemplar	106.936.364	
		Target pendapatan radio	100.000.000 Rupiah	100.000.000 Rupiah	(96,85%)	
1.3	Pelayanan Informasi Publik	Dokumen laporan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan	1 Dokumen	1 Dokumen	636.827.880 636.620.144 (99,97%)	Tercapai (Beberapa target tidak tercapai)
		Jumlah jenis media publikasi informasi penyelenggaraan pemerintah (Mobil keliling, spanduk, baliho, <i>running text</i> , radio, website).	200 Buah	200 Buah		
		Jumlah kemitraan antara pemerintah kabupaten dengan media massa (MoU)	10 MoU	10 MoU		
		Jumlah permintaan data informasi publik yang diproses	32 Dokumen	12 Dokumen		
		Jumlah petugas admin PPID yang bersertifikat	35 Orang	35 Orang		
		Jumlah petugas KIM yang bersertifikat	30 Orang	30 Orang		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Jumlah petugas PPID Desa/Kelurahan yang bersertifikat	50 Orang	-		
		Jumlah publikasi kegiatan pemerintahan	120 Buah	120 Buah		
		Jumlah publikasi terkait potensi unggulan daerah kabupaten	50 Buah	50 Buah		
II	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tersedianya <i>single data</i> Kabupaten	100%	100%	238.623.020 237.551.614 (99,55%)	Tercapai
2	Kegiatan Pengelolaan <i>e-government</i> dilingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya <i>single data</i> Kabupaten	100%	100%	238.623.020 237.551.614 (99,55%)	Tercapai
2.1	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Data center	1 Kegiatan	1 Kegiatan	79.860.520	Tercapai
		Jumlah kunjungan website	11520 Kegiatan	11520 Kegiatan	79.300.000 (99,30%)	
		Perbup tentang kebijakan TIK	1 Kegiatan	1 Kegiatan		
2.2	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah backbone relay tingkat kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000 99.500.000 (99,50%)	Tercapai
		Jumlah kunjungan website	11520 Kunjungan	11520 Kunjungan		
2.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan daerah	Jumlah kunjungan	11520 Kunjungan	11520 Kunjungan	58.762.500 58.751.614 (99,98%)	Tercapai
		Peningkatan Bandwidth	250 Mbps	250Mbps		
B URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK						
III	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya Buku Brebes dalam Angka	1,00	1,00	117.026.480 116.572.750 (99,61)	Tercapai
3	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi statistik kepada masyarakat	100%	100%	117.026.480 116.572.750 (99,61%)	Tercapai
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisis dan Diseminasi data Statistik	Jenis buku informasi pembangunan daerah (BDD, BS, PP, IHK, Inflasi)	280 Buku	280 Buku	117.026.480 116.572.750 (99,61%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelak- sanaan tersedia	100%	100%	6.983.907.420 6.793.556.305 (97,27%)	Tercapai
4	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelak- sanaan tersedia	100%	100%	11.521.080 11.508.580 (99,89%)	Tercapai
4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen dan monitoring	5 Jenis	5 Jenis	766.2.000.000 2.000.000 (100%)	Tercapai
4.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen (LAKIP, SAKIP, evaluasi RKPD)	2 Jenis	2 Jenis	2.000.000 2.000.000 (100%)	Tercapai
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	3.810.077.918 3.668.464.353 (96,28%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangan	48 Orang	48 Orang	3.803.146.218 3.661.544.953 (96,28%)	Tercapai
5.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jenis dokumen (laporan keuangan)	5 Buah	5 Buah	6.931.700 6.919.400 (99,82%)	Tercapai
6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persentase kehadiran pegawai	100%	100%	850.000.000 841.969.080 (99,05%)	Tercapai
6.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan tembakau	1 Paket	1 Paket	850.000.000 841.969.080 (99,05%)	Tercapai
7	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	388.924.142 388.310.858 (99,84%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	9 Jenis	9 Jenis	10.000.000 10.000.000 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
7.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	28 Jenis	28 Jenis	128.416.822	Tercapai
		Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 Jenis	5 Jenis	128.376.600 (99,97%)	
7.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	6 Jenis	6 Jenis	20.817.920 20.637.400 (99,13%)	Tercapai
7.4	Penyediaan Bahan Logistik	Jenis bahan makanan	4 Jenis	4 Jenis	102.949.600	Tercapai
		Jumlah alat kebersihan tersedia	25 Jenis	25 Jenis	102.709.200 (99,77%)	
7.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jenis barang cetakan dan penggadaan	3 Jenis	3 Jenis	11.913.800 11.913.800 (100%)	Tercapai
7.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia	1 Jenis	1 Jenis	3.960.000 3.960.000 (100%)	Tercapai
7.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dalam daerah	17 Laporan	17 Laporan	110.865.000 110.713.858 (99,86)	Tercapai
8	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	224.028.000 222.928.000 (99,50%)	Tercapai
8.1	Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur baru	1 Jenis	1 Jenis	24.928.000 24.928.000 (100%)	Tercapai
8.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor baru	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	199.100.000 198.000.000 (99,45%)	Tercapai
9	Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	1.119.474.000 1.089.623.486 (97,33%)	Tercapai
9.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar terdistribusi	500 Buah	500 Buah	4.050.000 4.050.000 (100%)	Tercapai
		Jumlah surat masuk terdistribusi	500 Buah	500 Buah		Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
9.2	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	4 Jenis	4 Jenis	472.905.000 472.905.000 (100%)	Tercapai
9.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	26 Orang	26 Orang	472.905.000 472.905.000 (100%)	Tercapai
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase asset dalam kondisi baik	100%	100%	579.882.280 577.671.348 (99,61%)	Tercapai
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah monil diproses surat perijinannya	4 Unit	4 Unit	60.880.000 59.419.348 (97,60)	Tercapai
		Jumlah motor diproses surat perijinannya	6 Unit	6 Unit		Tercapai
10.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	50.511.000 50.426.000 (99,83%)	Tercapai
		Jumlah peralatan kerja diperbaiki	40 Unit	40 Unit		Tercapai
10.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	468.491.280 467.826.000 (99,86%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut adalah pada Program Informasi Dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah, beberapa target pada sub kegiatan belum tercapai Seperti jumlah Sambutan Bupati yang disusun, Jumlah Permintaan Data Informasi Publik yang diproses dan Jumlah Petugas PPID Desa/Kelurahan yang bersertifikat karena keterbatasan anggaran akibat *refocusing* anggaran, maka solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menambah anggaran pada kegiatan yang telah disebutkan agar dapat terlaksana dan mencapai target sesuai dengan yang sudah ditetapkan.



Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 80% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 98,99% menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Informasi dan Komunikasi Publik, dan Program Aplikasi Informatika dan Statistik mempermudah pencapaian target program yaitu ketepatan OPD dalam pelaksanaan pelayanan publik di sektor komunikasi dan informatika.

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi dan tingkat nasional di tahun 2021, adalah

1. Juara Harapan 2 KIM (Pada Tingkat Provinsi)
2. Juara Harapan 3 FK Metra Pada Tingkat Provinsi)





C.17 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan

Pada Tahun anggaran 2021 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- b. Urusan pilihan yaitu Bidang Perdagangan

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Perdagangan, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 18.538.737.740 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 18.130.031.673 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.47
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12.740.687.020	12.421.654.581	(319.032.439)	97,50
	Belanja Operasi	12.699.467.020	12.383.479.581	(315.987.439)	97,51
	Belanja Modal	41.220.000	38.175.000	(3.045.000)	92,61
2	Perdagangan	5.798.050.720	5.708.377.092	(89.673.628)	98,45
	Belanja Operasi	3.482.708.820	3.455.112.692	(27.596.128)	99,21
	Belanja Modal	2.315.341.900	2.253.264.400	(62.077.500)	97,32
	JUMLAH	18.538.737.740	18.130.031.673	-408.706.067	97,80

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan hasil-hasilnya pada bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang perdagangan, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.48
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
I	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	KSP/USP,KSPPS/USPPS berpredikat sehat	23 koperasi	25 koperasi	266.802.000 266.597.976 99,92(%)	Tercapai
1	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	KSP/USP,KSPPS/USPPS berpredikat sehat	23 koperasi	25 koperasi	266.802.000 266.597.976 99,92(%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	29 koperasi	25 koperasi	266.802.000 266.597.976 99,92(%)	-
II	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	143 Koperasi	143 koperasi	219.890.040 218.749.247 99,48(%)	Tercapai
1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perko- perasian bagi Koperasi yang Wil Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi	143 Koperasi	143 koperasi	219.890.040 218.749.247 99,48(%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	12 koperasi	12 koperasi	219.890.040 218.749.247 99,48(%)	Tercapai
III	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	-	-	-	347.195.620 344.964.505 99,36(%)	Tercapai
1	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang memiliki ijin usaha	9%	9%	347.195.620 344.964.505 99,36(%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Memiliki Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	125 Buah	125 Buah	171.528.680 169.498.450 98,82(%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Baru Memiliki Izin Usaha Mikro	7435 Buah	104.602 Buah	175.666.940 175.466.055 99,89(%)	Tercapai
B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
I	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	-	-	-	4.469.605.520 4.388.237.850 98,18(%)	Tercapai
1	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar dalam kondisi baik	19,23 %	19,23 %	4.469.605.520 4.388.237.850 98,18(%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat yang kios / loosnya Cukup baik untuk menampung pedagang	4 Pasar	8 Pasar	4.469.605.520 4.388.237.850 98,18(%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
II	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	-	-	-	1.328.445.200 1.320.139.242 99,37(%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase Alat dagang lolos uji Metrologi	10,80 %	26,80 %	1.328.445.200 1.320.139.242 99,37(%)	Tercapai
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat UTP yang sesuai standar	1200 Alat	3224 Alat	1.328.445.200 1.320.139.242 99,37(%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	1.143.745.240 1.101.163.733 96,28(%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	70.450.520 70.376.055 99,89(%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Kelancaran Administrasi Perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	70.450.520 70.376.055 99,89(%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	505.944.620 502.369.689 99,29(%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/Penerangan	25 Jenis	25 Jenis	4.357.400 4.340.500 99,61(%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor yang tersedia	60 Jenis	60 Jenis	54.208.380 50.811.200 93,73(%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	14 Jenis	14 Jenis	6.208.500 6.173.000 99,43(%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	95.214.000 95.148.500 99,93(%)	Tercapai
2.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	15 Jenis	15 Jenis	192.860.080 192.850.800 99,99(%)	Tercapai
2.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	12.600.000 12.600.000 100(%)	Tercapai
2.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanann Luar Daerah	40 Laporan	40 Laporan	140.496.260 140.445.689 99,96(%)	Tercapai
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	466.684.100 435.526.082 99,53(%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar Terdistribusi	1500 Buah	1554 Buah	6.450.000 6.420.000 99,53(%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan	5 Jenis	5 Jenis	144.857.500 128.047.362 88,40(%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja diperbaiki	12 Unit	12 Unit	4.858.000 4.747.000 97,72(%)	Tercapai
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	14 Orang	14 Orang	310.518.600 296.311.720 95,42(%)	Tercapai
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	100.666.000 92.891.907 92,28(%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Jumlah Mobil dan Motor yang di proses perijinannya	Mobil 5 Unit Motor 70 Unit	Mobil 5 Unit Motor 70 Unit	80.296.000 72.586.407 90,40(%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
4.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	20.370.000 20.305.500 99,68(%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, tidak ditemui masalah yang signifikan. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai target sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target juga tercapai sesuai target telah direncanakan menunjukkan bahwa semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah direncanakan.



C.18 Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan PTSP melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Penanaman Modal.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang penanaman modal, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 6.833.556.122 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 6.278.379.220 atau 91,88% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.49
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Penanaman Modal				
	Belanja Operasi	6.672.243.622	6.121.382.220	(550.861.402)	91,74
	Belanja Modal	161.312.500	156.997.000	(4.315.500)	97,32
	JUMLAH	6.833.556.122	6.278.379.220	(555.176.902)	91,88

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan hasil-hasilnya pada bidang penanaman modal, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.50
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan PTSP T.A 2021

N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersusunnya dok RUPM dan kegiatan business meeting UMKM	100%	100%	84.609.400 84.229.955 (99.55%)	Tercapai
1.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya dok RUPM dan kegiatan business meeting UMKM	100%	100%	84.609.400 84.229.955 (99.55%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dok rencana umum penanaman modal (RUPM)	1 dok	1 dok	64.284.400 63.951.955 (99.48%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Terlaksananya business meeting umkm	1 kegiatan	1 kegiatan	20.325.000 20.278.000 (99.77%)	Tercapai
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jumlah usaha menengah besar yang bermitra dengan usaha menengah kecil	2 dok	2 dok	67.828.500 67.637.105 (99.72%)	Tercapai
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi investasi	2 dok	2 dok	67.828.500 67.637.105 (99.72%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi investasi	2 dok	2 dok	67.828.500 67.637.105 (99.72%)	Tercapai
III	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	100%	100%	319.016.480 315.994.500 (99.05%)	Tercapai
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kepuasan pelayanan permohonan perijinan (%)	100%	100%	319.016.480 315.994.500 (99.05%)	Tercapai



N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan	Berkas/jenis perijinan dan non perijinan yang diinput, diverifikasi, dan di cetak	4700 berkas	1025 berkas	319.016.480 315.994.500 (99.05%)	Belum Tercapai Target bum disesuaikan dengan perubahan anggaran
IV	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tersusunnya dok berita acara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan	50 investor	214 invstor	551.005.700 539.402.473 (97.89%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dok berita acara pemantauan, pembinaan, dan pengawasan	50 investor	214 investor	551.005.700 539.402.473 (97.89%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang dipantau	50 investor	158 investor	122.007.000 119.714.779 (98.12%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pembinaan investor	4 kegiatan	4 kegiatan	265.736.400 258.695.400 (97.35%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah investor yang di awasi	50 investor	156 investor	163.262.300 160.992.294 (98.61%)	Tercapai
V	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tersusunnya dok hasil SKM dan pengembangan aplikasi sistem pengelolaan informasi PTSP	2 dok 1 aplikasi	2 dok 1 aplikasi	826.707.400 826.168.942 (99.93%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Informasi yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dok hasil SKM dan pengembangan aplikasi sistem pengelolaan informasi PTSP	2 dok 1 aplikasi	2 dok 1 aplikasi	826.707.400 826.168.942 (99.93%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Dok hasil SKM (dok) Laporan hasil koordinasi dan konsultasi kebijakan perizinan	2 dok 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 96 laporan 1 aplikasi	2 dok 12 laporan 12 laporan 12 laporan 12 laporan 96 laporan 1 aplikasi	826.707.400 826.168.942 (99.93%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Laporan pemeliharaan perangkat sistem informasi PTSP Laporan pengaduan dan advokasi perijinan Laporan pendataan perijinan PTSP Laporan pengelolaan arsip dok perijinan Laporan penerbitan ijin kepada instansi teknis Pengembangan sistem pengelolaan informasi PTSP (aplikasi)				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	1.623.907.640 1.602.803.869 (98.70%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Tersusunnya Dok Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	7 jenis	7 jenis	65.456.080 65.210.960 (99.63%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dok Perencanaan PD	Tersusunnya dok perencanaan dan monitoring	7 jenis	7 jenis	42.307.500 42.275.480 (99.92%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya dok laporan capaian dan ikhtisar realisasi SKPD	3 jenis	3 jenis	23.148.580 22.935.480 (99.08%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan PD	Tersusunnya dok laporan keuangan PD	100%	90,91%	3.452.999.002 2.934.364.536 (84.98%)	Belum Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya belanja pegawai ASN	33 orang	21 orang	3.360.486.002 2.842.222.376 (84.58%)	Belum Tercapai (PNS hanya 21 dikarenakan



N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
						ada yang pension dan mutasi)
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya dok laporan keuangan akhir tahun	7 buah	7 buah	25.125.000 24.991.200 (99.47%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Tersusunnya dok laporan bulanan, triwulanan, dan semesteran	7 buah	7 buah	36.648.500 36.520.480 (99.65%)	Tercapai
2.4	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Tersusunnya dok prognosis realisasi anggaran	7 buah	7 buah	30.774.500 30.630.480 (99.63)	Tercapai
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dalam melayani masyarakat	100%	100%	17.500.000 17.500.000 (100.00%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atributnya (stel)	50 stel	50 stel	17.500.000 17.500.000 (100.00%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	0	0	0 0 (0%)	Refocusing
4.	Kegiatan Administrasi Umum PD	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	398.333.240 396.065.753 (99.43)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	16 jenis	16 jenis	7.999.900 7.996.300 (99.95%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 jenis	3 jenis	77.757.200 76.285.560 (98.11)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai, makan minum rapat, dan makan minum tamu	3 jenis	3 jenis	52.176.000 51.932.000 (99.53%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

N O	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGA N
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	41.623.640 41.623.640 (99.94%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya kelancaran tugas koordinasi dengan instansi terkait ke dalam dan luar daerah	200 laporan	200 laporan	208.726.000 208.282.943 (99.79%)	Tercapai
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Tersedianya tenaga administrasi untuk membantu tugas – tugas kedinasan	100%	100%	577.028.520 563.428.130 (97.55%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang terdistribusi	Surat masuk : 1200 buah Surat keluar : 1200 buah	Surat masuk : 1402 buah Surat keluar : 1240 buah	21.096.520 20.480.304 (97.08%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	5 jenis	5 jenis	204.042.000 199.037.826 (97.55%)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya tenaga administrasi untuk membantu tugas – tugas kedinasan	21 orang	25 orang	351.890.000 343.910.000 (97.73)	Tercapai
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	Terpeliharanya aset dalam kondisi yang baik	100%	100%	473.071.800 468.456.866 (99.02%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atas Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi yang baik	7 unit	15 unit	138.371.800 137.679.566 (99.50%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin dalam kondisi yang baik	3 jenis	5 jenis	60.000.000 60.000.000 (100%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya bangunan gedung kantor dalam kondisi yang baik	1 unit	1 unit	274.700.000 270.777.300 (98.57%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Brebes.



Dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Penanaman Modal dan PTSP menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

1. Program Penunjang Urusan PD, Kegiatan Administrasi Keuangan PD, Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN indikator realisasi hanya mencapai 21 orang dari target 33 orang, dikarenakan kondisi real pegawai di tahun 2021 pada DPMPTSP Kabupaten Brebes hanya 21 orang saja, karena adanya mutasi pegawai dan purna tugas. Solusi : Mengajukan permintaan pegawai ASN ke BKSDMD untuk mengisi kekosongan ASN di posisi yang dibutuhkan.
2. Tidak tersedianya anggaran pada Program Penunjang Urusan PD, Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD, Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dikarenakan adanya refofusing anggaran pada tahun 2021 untuk penanganan pandemi covid-19. Solusi : Menganggarkan kembali di tahun 2022 untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk pegawai DPMPTSP Kabupaten Brebes yang akan mengikuti pembinaan dan pengembangan aparatur/pegawai di lingkungan dinas.

Analisis Kesesuaian Capaian

Capaian kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes pada tahun 2021 sebagian besar menunjukkan kesesuaian antara target dengan realisasi yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah, meskipun belum mencapai target, karena adanya refofusing anggaran dan adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes menunjukkan kesesuaian target kinerja yang telah ditetapkan yang mencapai 98.94%.





C.19 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Kebudayaan
- b. Urusan Pilihan yaitu Bidang Pariwisata

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Pariwisata, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.8.418.162.553 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 7.920.816.527 atau 94,09% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.51
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kebudayaan	7.563.689.955	7.108.249.127	(455.440.828)	93,98
	Belanja Operasi	6.594.298.255	6.327.143.527	(267.154.728)	95,95
	Belanja Modal	969.391.700	781.105.600	(188.286.100)	80,58
2	Pariwisata	854.472.598	812.567.400	(41.905.198)	95,10
	Belanja Operasi	454.472.598	413.077.400	(41.395.198)	90,89
	Belanja Modal	400.000.000	399.490.000	(510.000)	99,87
	JUMLAH	8.418.162.553	7.920.816.527	-497.346.026	94,09

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.52
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
I	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	-	-	-	316.303.170 309.415.970 97,82%	-
1	Kegiatan Pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	54.042.200 53.392.000 98,80%	Belum tercapai dikarenakan masih pandemi covid 19 sehingga masih banyak group seni yang tutup/belum bisa pentas bahkan ada yang gulung tikar
1.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah grup kesenian terbina	80	72	30.792.200 30.756.600 99,88%	
1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah grup kesenian terbina	80	72	23.250.000 22.635.400 97,36%	
2	Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	205.034.000 199.797.000 97,44%	Belum tercapai dikarenakan masih pandemi covid 19 sehingga masih banyak group seni yang tutup/belum bisa pentas bahkan ada yang gulung tikar
2.1	Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah grup kesenian terbina	80	72	126.650.000 126.499.000 99,88%	
2.2	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional	Jumlah grup kesenian terbina	80	72	78.384.000 73.298.000 93,58%	
3	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	57.226.970 56.226.970 98,25%	Belum tercapai dikarenakan masih pandemi covid 19 sehingga masih banyak group seni yang tutup/belum bisa pentas bahkan ada yang gulung tikar
3.1	Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah grup kesenian terbina	80	72	57.226.970 56.226.970 98,25%	



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	-	-	135.610.500 133.450.500 98,41%	-
1	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/kota	-	-	-	135.610.500 133.450.500 98,41%	Belum tercapai dikarenakan adanya recofusing anggaran sebab pandemi covid 19
1.1	Sub Kegiatan Standarnisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntunan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	4	116.017.500 113.868.500 98,1	
1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	10	4	19.593.000 19.582.000 99,9	
III	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	-	-	-	44.169.960 38.209.960 86,51%	-
1	Kegiatan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	44.169.960 38.209.960 86,51%	Belum tercapai dikarenakan adanya recofusing anggaran sebab pandemi covid 19
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan informasi Sejarah	Peningkatan akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	28,17	29,57	44.169.960 38.209.960 86,51%	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-	-	-	26.400.000 26.400.000 100%	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-	-	26.400.000 26.400.000 100%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Perlindungan Cagar Budaya	Prosentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan (%)	28,17	29,57	26.400.000 26.400.000 100%	Tercapai
V	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSIAMAN KABUPATEN KOTA	-	-	-	1.018.000.000 824.125.600 80,96%	-
1	Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/kota	-	-	-	1.018.000.000 824.125.600 80,96%	-
1.1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Prosentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan (%)	28,17	29,57	18.000.000 18.000.000 100%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Prosentase jumlah cagar budaya yang dilestarikan (%)	28,17	29,57	1.000.000.000 806.125.600 80,61%	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
VI	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	-	-	-	578.006.000 568.210.700 98,31%	
1	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-	--	454.859.000 454.252.000 99,8	
1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi baru	6	6	454.859.000 454.252.000 99,8	Tercapai
2	Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	123.147.000 113.958.700 92,5	
2.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi baru	6	6	123.147.000 113.958.700 92,5	Tercapai
VII	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	-	-	-	166.369.198 138.321.000 83,14%	-
1	Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	166.369.198 138.321.000 83,14%	Belum tercapai dikarenakan masih pandemi covid 19 sehingga masih banyak destinasi yang tutup/belum buka bahkan ada yang gulung tikar
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.000.000	300.775	15.637.198 1.2571.000 80,39	
1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Penyebaran informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1.000.000	300.775	150.732.000 125.750.000 83,42	
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	-	-	-	110.097.400 108.601.700 98,64%	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi kreatif Tingkat Dasar	-	-	-	110.097.400 108.601.700 98,64%	-
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi (orang)	200	120	42.936.700 41.441.000 96,5	Belum tercapai dikarenakan adanya recofusing anggaran sebab pandemi covid 19
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konversasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi (orang)	200	120	53.325.000 53.325.000 100	
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompe- tensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang tersertifikasi (orang)	200	120	13.835.700 13.835.700 100	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IX	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	6.020.040.804 5.772.606.297 95,89%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	Jenis dokumen perencanaan dan monitoring	5 buah	5 buah	102.525.000 102.474.800 99,95%	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan	5 buah	5 buah	29.165.000 29.117.800 99,84%	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya evaluasi kinerja PD	150 lap	150 lap	73.360.000 73.357.000 99,99%	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	4.165.925.184 4.019.818.482 96,49%	-
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	43 org	43 org	4.159.793.121 4.010.471.482 96,41%	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya laporan akhir tahun	1 dok	1 dok	6.128.834 6.120.000 99,8	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Tersedianya laporan semesteran	1 dok	1 dok	3.228,750 3.227.000 99,95%	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	456.817.750 455.791.841 99,78%	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis peralatan listrik	10 jenis	10 jenis	13.647.150 13.647.150 100	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	20 jenis	20 jenis	82.626.700 82.002.580 99,24%	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga (jenis)	15 jenis	15 jenis	55.000.000 55.000.000 100	Tercapai
3.4	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jenis bahan logistik	4 jenis	4 jenis	88.227.000 87.960.849 99,6	Tercapai
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	12 jenis	12 jenis	39.722.300 39.647.350 99,81%	Tercapai
3.6	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Tersedia bahan bacaan/ langganan koran	1 jenis	1 jenis	19.464.000 19.464.000 100%	Tercapai
3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	100 lap	100 lap	158.130.600 158.069.912 99,96%	Tercapai
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	857.505.000 761.719.830 88,83%	-
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar (buah)	500 buah	500 buah	37.670.000 37.060.022 98,38%	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan	5 jenis	5 jenis	233.940.000 195.039.408 83,37%	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kanto	12 buah	12 buah	1.860.000 1 778.000 95,59%	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Junlah THL yang dibayar	30 org	30 org	584.035.000 529.620.400 90,68%	Tercapai
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	437.267.870 432.801.344 98,98%	-
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Junlah kendaraan yang dibiayai	27 unit	27 unit	214.480.000 210.634.844 98,21	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan	Jenis peralatan dan mesin yang	25 buah	25 buah	79.737.870 79.636.500	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	dan Mesin Lainnya	dipelihara			99,87%	
5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	3 gedung	3 gedung	143.050.000 142.530.000 99,64%	Tercapai

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

1. Program pengembangan budaya, kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan berupa kegiatan pelatihan rias penganten adat brebesan dapat terlaksana 100%, adapun sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan berupa kegiatan sosialisasi penghayat juga dapat terlaksana 100% sedangkan untuk kegiatan pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota pada sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya berupa kegiatan indosiana, yaitu program kolaborasi antara kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten berupa pentas kesenian daerah yang bersinergi dengan promosi wisata serta kegiatan pemberian hibah kepada kelompok seni melalui pokir dprd, sedangkan untuk sub kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata tradisional juga dapat dilaksanakan 100% sub kegiatan ini berupa latihan rutin tim karawitan untuk kegiatan pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat dapat dilaksanakan 100% yaitu berupa kegiatan ngasa jalawastu dan gangdoang.
2. Program pengembangan kesenian tradisional, kegiatan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota sub kegiatan standarnisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai dengan kebutuhan



dan tuntunan dapat dilaksanakan 100% sub kegiatan ini berupa kegiatan pentas hari-hari tertentu dan pentas tmii yang biasanya diselenggarakan di jakarta, dikarenakan dengan situasi yang masih di masa pandemi sehingga dilaksanakan secara zoom, sub kegiatan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional berupa kegiatan lomba logo hari jadi yang juga dapat dilaksanakan 100%.

3. Program pembinaan sejarah , kegiatan sejarah lokal dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota , sub kegiatan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah yaitu berupa kegiatan lomba karya tulis ilmiah tentang sejarah maupun cagar budaya dapat dilaksanakan 100%.
4. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, kegiatan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten/kota dan sub kegiatan perlindungan cagar budaya berupa pemeliharaan makam bupati brebes yang ada di desa kertabesuki kecamatan wanasari dapat dilaksanakan 100%.
5. Program pengelolaan permuseuman , kegiatan pengelolaan museum kabupaten/kota , sub kegiatan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman yaitu berupa kegiatan pembelian honor kepada para juru pelihara makam / situs bersejarah yang ada di kabupaten brebes, sub kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum berupa kegiatan pembangunan museum di kecamatan tonjong dapat dilaksanakan 100%.
6. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata , kegiatan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota, sub kegiatan perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota yaitu berupa pembinaan desa wisata, pembangunan foodcourt dan dermaga di dtw parin dapat dilaksanakan 100% sedangkan untuk kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, dengan sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota berupa kegiatan festival desa wisata dapat dilaksanakan 100%.
7. Program pemasaran pariwisata , kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota dengan sub kegiatan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar



negeri pariwisata kabupaten/kota berupa kegiatan sinok sitong dalam arti bukan kegiatan pemilihan sinok sitong dan duta wisata seperti yang biasa dilaksanakan akan tetapi kegiatan yang melibatkan sinok sitong terpilih, seperti untuk dapat hadir pada sidang paripurna dalam rangka hari jadi kabupaten brebes dll, adapun sub kegiatan penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten/kota, baik dalam dan luar negeri yaitu kegiatan pembuatan leaflet/brosur, peta wisata, tis (tourism information system) kalender dll yang anggarannya dibagi 2 yaitu dibiayai oleh APBD dan APBD (melalui dak non fisik layanan kepariwisataan).

8. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar , sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata pembinaan dan pengukuhan kelompok sadar wisata dapat dilaksanakan 100%, sedang untuk sub kegiatan fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konversi ekonomi kreatif yaitu pendataan potensi ekonomi kreatif yang terbagi dalam 17 subsektor, yang data tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk pencapaian program kegiatan dimasa yang akan datang, untuk sub kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif yaitu pembinaan rumah makan/restoran yang semuanya dapat dilaksanakan 100%.
9. Program penunjang urusan pemerintah daerah pada semua kegiatannya secara garis besar tidak mempunyai permasalahan yang berarti, semuanya dapat terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi anggaran yang hampir semuanya adalah 95% dan realisasi fisik 100% begitu juga dengan realisasi capaian kinerjanya semuanya hampir 100% terrealisasi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan untuk urusan kebudayaan mencapai 102% dengan realisasi anggaran yang hanya mencapai 86,67% hal ini dikarenakan adanya penghematan belanja pada pos pembangunan museum yang sedianya di pagu anggaran mencapai 940 juta akan tetapi setelah dilelangkan hanya mencapai 752 juta saja, sedangkan untuk capaian beberapa indikator memang



tidak semua tercapai, hal ini dikarenakan situasi yang masih terdampak oleh pandemi covid 19, yang membuat kegiatan kesenian belum dapat normal kembali.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan untuk urusan pariwisata hanya mencapai 66,8% dengan realisasi anggaran mencapai 95,39% hal ini disebabkan oleh belum berakhirnya pandemi covid 19, dimana sektor pariwisata yang terdampak luar biasa, banyak dtw - dtw yang tidak dapat bertahan sehingga gulung tikar, walaupun ada beberapa dtw yang survive dengan melakukan inovasi.

Penghargaan yang didapat dalam kategori Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2021, antara lain :

1. Juara pada kegiatan Semarang Night Carnival tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Sanggar Seni Elok Elvita Bumiayu pimpinan Elok Ashanti yang menyabet kategori Juara 1 seni defile Mandalika, Juara 2 seni defile Mandalika, Juara 2 seni defile Batak Toba dan Juara 3 seni defile Komodo pada 17 November 2021
2. Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada bulan April 2021 dan Juara 3 Tingkat Nasional yang diselenggarakan FKIP Universitas Sriwijaya Palembang pada bulan Oktober 2021 yang disabet Sanggar Binendrang desa Jipang Kecamatan Bantarkawung.
3. Pencanaan program Desa Berdikari pada Kampung Adat Jalawastu dan Desa Ciseureuh oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI
4. Penetapan Telor Asin sebagai Warisan Budaya Tak Benda usulan tahun 2020 yang ditetapkan 2021 oleh Kemendikbud dan Ristek.
5. Brand promotion tentang budaya Brebes melalui Indonesia Teve One (Upacara Ngasa dan Burok) serta Jejak Petualang Trans7 tahun 2021.
6. Rangkaian kajian dan ekskavasi situs Bumiayu Tonjong bersama Balai Arkeologi DI Yogyakarta dan Sangiran serta pendokumentasian oleh National Geography Channel tahun 2022.
7. Penyelenggaraan platform Indonesiana Tata Kelola Event Seni kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek pada bulan Oktober 2021
8. Pembangunan Museum Purbakala di Galuh Timur senilai Rp 752.405.600.



C.20 Dinas Arsip dan Perpustakaan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Arsip dan Perpustakaan melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 3.950.197.096 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 3.846.442.025 atau 97,37% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.53
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Arsip dan Perpustakaan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Perpustakaan	3.823.738.976	3.721.561.625	(102.177.351)	97,33
	Belanja Operasi	3.288.814.976	3.191.391.725	(97.423.251)	97,04
	Belanja Modal	534.924.000	530.169.900	(4.754.100)	99,11
2	Kearsipan	126.458.120	124.880.400	(1.577.720)	98,75
	Belanja Operasi	126.458.120	124.880.400	(1.577.720)	98,75
	Belanja Modal	0	0	(0)	0
	JUMLAH	3.950.197.096	3.846.442.025	-103.755.071	97,37

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas arsip dan perpustakaan dan hasil-hasilnya pada bidang perpustakaan dan kearsipan, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.54
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Arsip dan Perpustakaan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
I	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan	14500 Orang	4390 orang	424.384.480 403.500.579 95,08%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Pengelolaan Pe ustakaan Tingkat Daerah Kabupat en /Kota	Meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan (Orang)	14500 Orang	4390 orang	370.290.000 351.023.499 94,80%	Tercapai
1.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Pe ustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Buku Pe ustakaan (Buku)	1000 buku	1000 buku	183.600.000 178.304.580 97,12%	Tercapai
1.2	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pe ustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Pe ustakaan Yang Bersertifikat Pengelola Pe ustakaan	40 Orang	40 Orang	31.500.000 30.965.500 98,30%	Tercapai
1.3	Pengembangan Layanan Pe ustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis Layanan Pe ustakaan Baru	1 Jenis	1 Jenis	27.190.000 21.466.300 78,95%	Tercapai
1.4	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah buku rusak yang diperbaiki dan layak baca	100 eksemplar	100 eksemplar	128.000.000 120.287.119 93,97%	Tercapai
2	Kegiatan Pembudayaan Gernar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Menin gkat nya Jumlah Pengunjung Pe ustakaan	14500 Orang	4390 Orang	54.094.480 52.477.080 97,01%	-
2.1	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Anggota pe ustakaan baru (orang)	100 Orang	100 Orang	10.916.900 10.916.400 100%	Tercapai
2.2	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Pengelola Pe ustakaan Yang Bersertifikat Pengelola Pe ustakaan	40 Orang	40 Orang	43.177.580 41.560.680 96,26%	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
II	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Perse ntase Aparatur bersertifikat yang melaksanakan pengelolaan kearsipan	75 Orang	50 orang	126.458.120 124.880.400 98,75%	-
3	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Perse ntase Aparatur bersertifikat yang melaksanakan pengelolaan kearsipan	75 Orang	50 orang	78.775.080 78.748.400 99,97%	-
3.1	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah Aparatur bersertifika Pengelola Kearsipan	75 Orang	50 orang	33.072.280 33.047.000 99,92%	-
3.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	OPD Melaksanakan Pengelolaan Kearsipan	16,15	14.05	45.702.800 45.701.400 100%	-
4	Pen gelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Menin gkatnya Jumlah OPD,SMP dan Desa yang melaksanakan pen	75 Unit Kerja	28 unit kerja	47.683.040 46.132.000 96,75%	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		gelolaan kearsipan Statis secara baku				
4.1	Akuisisi. Pengolahan. Preservasi. dan Akses Arsip Statis	Arsip Statis yang terkelola	100 Berkas	100 Berkas	47.683.040 46.132.000 96,75%	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kegiatan	100%	100%	3.399.354.496 3.318.061.046 97,61%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kegiatan	100%	100%	78.482.040 77.671.876 98,97%	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan dan Monitoring	4 Jenis	4 Jenis	38.328.880 37.740.716 98,47%	Tercapai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jenis Dokumen Perencanaan dan Monitoring	4 Jenis	4 Jenis	13.013.980 12.933.480 99,38%	Tercapai
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (Lakip.Sakip,Evaluasi RKPD)	1 Tahun	1 Tahun	20.571.000 20.429.500 99,31%	Tercapai
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan dan Monitoring	4 Jenis	4 Jenis	6.568.180 6.568.180 100%	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan kegiatan	100%	100%	2.281.881.536 2.219.953.608 97,29%	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	1 Tahun	2.242.847.576 2.181.199.908 97,25%	Tercapai
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Tahun	1 Tahun	22.411.460 22.131.200 98,75%	Tercapai
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jenis Dokumen Laporan Keuangan	1 Tahun	1 Tahun	16.622.500 16.622.500 100%	Tercapai
3	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Berkompetensi	100%	100%	12.250.000 12.250.000 100,00%	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu	1 Tahun	1 Tahun	12.250.000 12.250.000 100%	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	294.722.008 294.554.220 99,94%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/Penerangan	1 Tahun	1 Tahun	32.544.900 32.491.300 99,84%	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	206.957.000 206.858.000 99,95%	Tercapai
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahun	3.122.000 3.107.000 99,52%	Tercapai
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	1 Tahun	1 Tahun	35.118.108 35.117.920 100%	Tercapai
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	1 Tahun	1 Tahun	16.980.000 16.980.000 100%	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	28.037.000 28.037.000 100%	Tercapai
5.1	Pengadaan Mebel	Jenis Meubelair Baru	1 tahun	1 tahun	28.037.000 28.037.000 100%	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan Kantor	100%	100%	509.991.912 494.880.017 97,04%	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk terdistribusi	1 tahun	1 tahun	3.100.000 3.091.000 99,71%	Tercapai
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan Dibayar dalam 12 Bulan	4 Jenis	4 Jenis	86.426.000 80.883.543 93,59%	Tercapai
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia, Jumlah Alat Tulis Kantor Tersedia, Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah, Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia, Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	1 tahun	1 tahun	420.465.912 410.905.474 97,73%	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	100%	100%	193.990.000 190.714.325 98,31%	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional dalam Kondisi baik	1 Tahun	1 Tahun	112.220.000 109.167.325	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan diproses surat perijinanannya			97,28%	
7.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubelair dalam kondisi baik	1Tahun	1Tahun	5.000.000 5.000.000 100,00%	Tercapai
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dalam kondisi baik	1Tahun	1Tahun	15.760.000 15.760.000 100,00%	Tercapai
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain nya	Jumlah Bangunan Gedung rusak menjadi baik	1Tahun	1Tahun	30.940.000 30.940.000 100%	Tercapai
7.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1Tahun	1Tahun	30.070.000 29.847.000 99,26%	Tercapai

Sumber data : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Brebes.

Pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan menghadapi beberapa masalah, antara lain :

1. Program Pengelolaan Arsip

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah aparatur bersertifikat pengelola kearsipan mencapai 50 orang adapun target tahun 2021 berjumlah 75 orang kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan permasalahan adanya refocusing anggaran adapun solusinya agar tahun 2022 adanya penambahan anggaran sehingga realisasi di tahun 2022 bisa terlampaui
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota, Jumlah OPD, SMP dan Desa yang melaksanakan pengelolaan kearsipan dinamis secara baku tercapai 28 OPD dari target tahun 2021 sebanyak 75 OPD ini dikarenakan perlakunya perka anri nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan, bahwa standar baku kearsipan adalah dari hasil pengawasan internal kearsipan OPD.

2. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja meningkatnya Jumlah Pengunjung Perpustakaan tidak terlampaui dari target



14.500 pengunjung hanya terlampaui 4.390 pengunjung dikarenakan adanya pandemi covid 19 sehingga berdampak pada aktifitas layanan perpustakaan di karenakan untuk layanan perpustakaan ditutup selama selama 6 bulan sehingga tidak ada pengunjung perpustakaan adapun setelah dibuka kembali diterapkan pembatasan jumlah pengunjung sesuai prokes

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi atau tingkat nasional di tahun 2021, antara lain :

1. Perpustakaan Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog sebagai Perpustakaan Terbaik Nasional Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021
2. Perpustakaan Desa Buara Kecamatan Ketanggungan sebagai Pemenang Lomba Foto Perpustakaan Nasional Tahun 2021
3. Perpustakaan Desa Pepedan Kecamatan Tonjong Sebagai Pemenang Lomba Cerita Dampak Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional Tahun 2021
4. Perpustakaan Desa Jatibarang Lor Sebagai Juara Harapan 1 Lomba Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021



C.13 Dinas Perikanan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perikanan melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu urusan pilihan pada Bidang Kelautan dan Perikanan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Kelautan dan Perikanan, yaitu Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan digital ekonomi, serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerjatenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 12.240.375.022,00 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 11.083.573.244,00 atau 90,55% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.55
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perikanan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kelautan dan Perikanan	12.240.375.022	11.083.573.244	(1.156.801.778)	90,55
	Belanja Operasi	10.916.874.022	9.976.544.244	(940.329.778)	91,39
	Belanja Modal	1.323.501.000	1.107.029.000	(216.472.000)	83,64
	JUMLAH	12.240.375.022	11.083.573.244	(2.313.603.556)	90,55

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perikanan dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.56
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perikanan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
----	--	--	--------	-----------	------------------------------	-----



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						
I	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap di laut (ton) Produksi perikanan tangkap di waduk (ton)	3.591 135	3.675,47 203,22	1.881.093.000 1.649.258.851 (87,68%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	146.084.000 106.371.380 (72,82%)	-
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	- Database perikanan tangkap - Jumlah benih yang ditebar diwaduk dan embung - Jumlah koordinasi KKMD yang dilakukan	1 dok 230.110 ekor 1 kali	- 230.110 ekor -	146.084.000 106.371.380 (72,82%)	Tercapai, Sebagian indikator tidak dapat dilaksanakan sebab pengembalian refocusing
2	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1.095.488.000 944.804.471 (86,25%)	Tercapai
2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	- Sosialisasi nelayan dan bakul yang dibina - Sosialisasi Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Nelayan - Bantuan keuangan - Bantuan mesin perahu - Bantuan alat penangkapan ikan (DAK) - Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan (DAK)	1 kali 3 kali 3 paket 1 paket 10 paket 1 paket	1 kali 3 kali 3 paket 1 paket 10 paket -	1.010.789.000 890.082.500 (88,06%)	Tercapai, Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan (DAK) tidak dapat dilaksanakan sebab ada kendala dalam identifikasi penerima bantuan



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Sosialisasi kelompok nelayan	3 kali	3 kali	43.977.000 27.019.000 (61,44%)	Tercapai
2.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sosialisasi asuransi nelayan	2 kali	2 kali	40.722.000 27.702.971 (68,03%)	Tercapai
3	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-	-	-	613.399.000 576.206.000 (93,94%)	-
3.1	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah kegiatan Yustisi di TPI	2 kali	2 kali	8.059.000 7.380.000 (91,57%)	Tercapai
3.2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang dikelola Jumlah TPI yang ditata	5 buah 4 buah	5 buah 4 buah	605.340.000 568.826.000 (93,97%)	Tercapai
4	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	26.122.000 21.877.000 (83,75%)	-
4.1	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah kapal yang mendapat pemeriksaan fisik	250 kapal	250 kapal	26.122.000 21.877.000 (83,75%)	Tercapai
II	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya air payau (ton)	71.407	71.747,44	4.964.593.700 4.666.234.133 (93,99%)	Tercapai
1	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	-	-	-	314.882.000 255.806.250 (81,24%)	
1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang dilatih (kelompok)	10 Kelompok	10 Kelompok	57.309.000 55.279.000 (96,46%)	Tercapai
1.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Tambak Dinas/ Tambak Percontohan yang dikelola (unit)	1 Unit	1 Unit	257.573.000 200.527.250 (77,85%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	-	-	-	4.649.711.700 4.410.427.883 (94,85%)	
2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Database Statistik Perikanan Budidaya (laporan)	12 Laporan	12 Laporan	44.832.800 42.696.400 (95,23%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah Hibah Uang yang tersalurkan (paket) - Jumlah Hibah Normalisasi Saluran Tambak yang diperbaiki (paket) - Jumlah Hibah Perbaikan Tanggul tambak yang diperbaiki (paket) - Jumlah Perbaikan Saluran BBI yang diperbaiki (paket) - Jumlah Hibah Budidaya Gurame (paket) - Jumlah Hibah Budidaya Lele (paket) - Jumlah Hibah Budidaya Nila (paket) - Jumlah Hibah Budidaya Udang Tradisional (paket) - Jumlah BBI yang dikelola - Perbaikan tanggul tambak percontohan dinas	3 Paket 31 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Unit 1 Paket	3 Paket 31 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 1 Paket 2 Paket 1 Unit 1 Paket	4.574.207.900 4.338.581.133 (94,85%)	Tercapai
2.3	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (kali)	14 Kali	14 Kali	12.264.000 12.160.000 (99,15%)	Tercapai
2.4	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Koordinasi dan Konsultasi terkait Pengembangan Pembudidayaan ikan	11 Kali	11 Kali	18.407.000 16.990.350 (92,30%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
iii	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi perikanan tangkap di laut (ton) Produksi perikanan tangkap di waduk (ton)	3.591 135	3.675,47 203,22	50.536.000 46.385.893 (91,79%)	Tercapai
1	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	-	-	-	50.536.000 46.385.893 (91,79%)	Tercapai
1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	- Jumlah operasi laut yang dilaksanakan - Monev kegiatan sarpras penangkapan	4 kali 7 kali	4 kali 7 kali	50.536.000 46.385.893 (91,79%)	Tercapai
V	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	-	-	564.673.000 552.701.500 (97,88%)	Tercapai
1	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	166.415.000 162.412.500 (97,59%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Database pelaku usaha perikanan - Jumlah dokumen pasar - Rakol PPL	1 dokumen 1 dokumen 50 orang	1 dokumen 1 dokumen 50 orang	166.415.000 162.412.500 (97,59%)	Tercapai
2	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	-	-	-	96.334.000 91.660.000 (95,15%)	Tercapai
2.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	- Jumlah pelaku usaha yang dibina - Jumlah pengolah/pemasar yang mendapat pelatihan peningkatan mutu hasil perikanan - Lomba kelompok tingkat kabupaten	50 kali 60 orang 1 kali	50 kali 60 orang 1 kali	96.334.000 91.660.000 (95,15%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		- Monev kelembagaan kelompok - Monev mutu hasil produksi hasil perikanan - Peningkatan kelas kelompok (dari madya ke utama) - Peningkatan kelas kelompok (dari pemula ke madya)	12 kali 5 kali 3 kelompok 3 kelompok	12 kali 5 kali 3 kelompok 3 kelompok		
3	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	301.924.000 298.629.000 (98,91%)	Tercapai
3.1	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	- Jumlah anak SD/Balita yang mendapat program PMTAS - Jumlah bantuan sarpras pemasar hasil perikanan - Jumlah bantuan sarpras pengolah hasil perikanan	800 anak 1 paket 1 paket	800 anak 1 paket 1 paket	301.924.000 298.629.000 (98,91%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
iv	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	4.779.479.322 4.169.647.011 (87,24%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	274.761.000 182.880.000 (66,56%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan dan monitoring	2 jenis	2 jenis	168.947.000 87.770.000 (51,95%)	Tercapai, Penyerapan kurang maksimal disebabkan perjalanan ke provinsi dan Jakarta tidak terlaksana akibat PPKM



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Jenis dokumen (evaluasi RKPD/Renja) - Jenis dokumen (Lakip, Sakip) - Jenis media publikasi dan promosi (pameran, karnaval)	1 jenis 2 jenis 1 jenis	1 jenis 2 jenis 1 jenis	105.814.000 95.110.000 (89,88%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	2.478.764.030 2.327.304.506 (93,89%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan	22 orang	22 orang	2.444.015.030 2.293.149.506 (93,83%)	Tercapai
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jenis dokumen laporan akhir tahun	1 buah	1 buah	12.955.000 12.955.000 (100%)	Tercapai
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jenis dokumen laporan keuangan	1 buah	1 buah	16.152.000 15.900.000 (98,44%)	Tercapai
2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jenis laporan prognosis realisasi anggaran	1 buah	1 buah	5.642.000 5.300.000 (93,94%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentasi pegawai berkompetensi	100%	100%	101.466.800 72.312.800 (71,27%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	- Jumlah pakaian olahraga	70 stel	70 stel	23.000.000 23.000.000 (100%)	Tercapai
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur/pegawai mendapat sertifikat pendidikan dan pelatihan	5 orang	5 orang	28.300.000 2.050.000 (7,24%)	Tercapai Pagu kegiatan terlalu tinggi
3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur/pegawai	48 orang	48 orang	50.166.800 47.262.800 (94,21%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	508.856.700 365.753.144 (71,88%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	8 jenis	8 jenis	16.986.500 16.804.100 (98,93%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	38 jenis	38 jenis	50.848.800 50.000.000 (98,33%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Jenis peralatan rumah tangga - Jumlah tenaga kebersihan tersedia	11 jenis 2 orang	11 jenis 2 orang	27.711.400 21.910.000 (79,06%)	Tercapai
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan minum tersedia	3 jenis	3 jenis	132.460.000 116.266.000 (87,77%)	Tercapai
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	18 jenis	18 jenis	53.148.000 42.831.300 (80,59%)	Tercapai
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan luar daerah	70 laporan	70 laporan	227.702.000 117.941.744 (51,80%)	Tercapai, Penyerapan kurang maksimal sebab banyak rapat yang seharusnya dilaksanakan tatap muka tetapi diganti zoom meeting karena PPKM
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	217.309.000 211.740.000 (97,44%)	Tercapai
5.1	Pengadaan Mebel	Jenis mebel baru	4 jenis	4 jenis	50.730.000 50.380.000 (99,31%)	Tercapai
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jenis peralatan gedung kantor baru - Jenis perlengkapan gedung kantor baru	6 jenis 3 jenis	6 jenis 3 jenis	166.579.000 161.360.000 (96,87%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	719.520.000 617.037.761 (85,76%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Jumlah surat keluar terdistribusi - Jumlah surat masuk terdistribusi	2.000 buah 1.000 buah	2.003 buah 1022 buah	9.000.000 6.097.250 (67,75%)	Tercapai Tercapai
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	6 jenis	6 jenis	176.000.000 108.940.511 (61,90%)	Tercapai
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	25 orang	25 orang	534.520.000 502.000.000 (93,92%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%	478.801.792 392.618.800 (82%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik - jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik - jumlah mobil diproses perizinannya - jumlah motor diproses perizinannya	42 unit 7 unit 7 unit 42 unit	42 unit 7 unit 7 unit 42 unit	256.925.792 191.308.800 (74,46%)	Tercapai
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	45 unit	45 unit	32.190.000 12.565.000 (39,03%)	Tercapai, WFH pada tahun anggaran 2021 menyebarkan peralatan dan mesin cukup diservis ringan
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik	1 unit	1 unit	189.686.000 188.745.000 (99,50%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Perikanan Kabupaten Brebes.

Pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Capaian realisasi belanja kegiatan tahun anggaran 2021 sebesar 90,55% atau sebesar Rp 11.083.573.244,00 dari pagu anggaran sebesar Rp 12.240.375.022,00.



Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 149,72% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan mencapai 90,55% menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Brebes sudah mendukung tercapainya target program pembangunan di Kabupaten Brebes.



C.22 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Pangan
- b. Urusan Pilihan yaitu Bidang Pertanian

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pangan dan Pertanian, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diketahui alokasi anggaran belanja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan T.A 2021 sebesar Rp. 25.145.896.014 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 24.327.981.483 atau 96,75% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.57
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pangan	14.592.941.259	14.185.890.718	(407.050.541)	97,21
	Belanja Operasi	13.671.965.913	13.292.199.318	(379.766.595)	97,22
	Belanja Modal	920.975.346	893.691.400	(27.283.946)	97,04
2	Pertanian	10.552.954.755	10.142.090.765	(410.863.990)	96,11
	Belanja Operasi	8.845.637.955	8.635.227.565	(210.410.390)	97,62
	Belanja Modal	1.707.316.800	1.506.863.200	(200.453.600)	88,26
	JUMLAH	25.145.896.014	24.327.981.483	-817.914.531	96,75

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.58
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
I	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) susenas	76%	84,9	500.000.000 487.749.000 (97,55%)	Tercapai.
1	Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan	1 Unit	1Unit	500.000.000 487.749.000 (97,55%)	Tercapai, Karena didukung oleh adanya DAK penugasan bidang pertanian untuk pembangunan Lumbung pangan
1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun	1 Unit	1 Unit	500.000.000 487.749.000 (97,55%)	Tercapai, yaitu dibangunnya 1 unit lumbung pangan(Rice mill,lantai jemur,dan mesin rice mill) di Kecamatan Bulakamba
II	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76	84,9	914.539.850 857.196.728 (93,73%)	Tercapai.
2	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Data ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan	5 Dokumen	1 Dokumen	94.415.000 59.567.000 (63,09%)	Tidak tercapai, hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya kegiatan di provinsi dan pusat terkait lomba cipta menu sehingga anggaran tidak terserap dan target program tidak tercapai
2.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Menu pangan alternatif	1 Jenis	1 Jenis	75.286.000 44.138.500 (58,63%)	Tidak tercapai, hal ini disebabkan karena hanya kegiatan lomba cipta menu tingkat kabupaten saja yang dilaksanakan
2.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan	1 Laporan	1 Laporan	10.704.000 8.966.000 (83,76%)	Tercapai.



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Pokok dan Pangan Lainnya	Pokok dan Pangan Lainnya				
2.3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Data Ketersediaan pangan	1 Jenis	1 Jenis	8.425.000 6.462.500 (76,71%)	Secara anggaran belum maksimal tapi secara realisasi fisik sudah dilaksanakan kegiatannya yaitu kegiatan SERGAB
3	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cadangan pangan pemerintah	100 Ton	100 Ton	297.069.900 275.723.858 (92,81%)	Tercapai.
3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1Laporan	1Laporan	5.225.000 4.312.841 (82,54%)	Tercapai.
3.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota	100 Ton	100 Ton	288.925.000 268.521.117 (92,94%)	Tercapai.
3.3	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara	25 Ton	25 Ton	2.919.900 2.889.900 (98,97%)	Tercapai.
4	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1 Laporan	1 Laporan	523.054.950 521.905.870 (99,78%)	Tercapai, hal ini didukung oleh adanya bantuan dana alokasi khusus non fisik pertanian untuk P2L program penumbuhan melalui kelompok wanita tani
4.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Analisis survey konsumsi pangan masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	12.983.700 12.657.020 (97,48%)	Tercapai.
4.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pekarangan yang ditanami benih	75 rumah	75 rumah	510.071.250 509.248.850 (99,84%)	Tercapai, yaitu DAK non fisik P2L KWT pada Kecamatan Losari, Songgom, Bumiayu dan Ketanggungan (5 KWT)
III	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76	84,9	51.634.600 42.872.397 (83,03%)	Tercapai.
5	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cadangan pangan masyarakat	50 Ton	50 Ton	51.634.600 42.872.397 (83,03%)	Tercapai yaitu kegiatan penyaluran cadangan pangan ke wilayah rawan pangan sesuai pada peta



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						daerah rawan pangan di Kecamatan wilayah utara,tengah dan selatan Kabupaten Brebes
5.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokmen data sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SPKG)	1 Jenis	1 Jenis	51.634.600 42.872.397 (83,03%)	Tercapai.
IV	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	76	84,9	17.503.800 14.644.012 (83,66%)	Tercapai.
6	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	1 Laporan	1 Laporan	17.503.800 14.644.012 (83,66%)	Tercapai.
6.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase makanan aman dikonsumsi di sekolah dan pasar	85%	85%	17.503.800 14.644.012 (83,66%)	Tercapai meskipun belum maksimal karena anggaran untuk pembelian testkit difokuskan namun pengawasan keamanan pangan segar tetap terlaksana dengan mengawasi higienitas dan sanitasi di produsen pangan segar
URUSAN PENYELENGGARAAN BIDANG PERTANIAN						
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman (IP)	181,83	214	1.205.661.840 1.117.125.231 (92,66%)	Tercapai karena dukungan anggaran APBN yang mendorong supaya ada peningkatan produktivitas yaitu melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian
7	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian	1 Dok	1 Dok	523.332.920 485.628.464 (92,80%)	Tercapai.
7.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Dokumen perencanaan alokasi pupuk dan pestisida	1 Dok	1 Dok	303.279.160 287.428.400 (94,77%)	Tercapai.



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					
7.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan alat pasca panen dan pengolahan kopi	2 Kelpk	2 Kelpk	220.053.760	Tercapai.
		Jumlah kelpk tani penerima alsin	8 Kelpk	8 Kelpk	198.200.064 (90,07%)	Tercapai.
		Jumlah produk hasil olahan hortikbun	14 Produk	14 Produk		Tercapai.
		Jumlah produk olahan Tanaman pangan	1 Produk	2 Produk		Tercapai.
		Poktan yang mengikuti pelatihan pascapanen tanaman pangan	1 Kelpk	2 Kelpk		Tercapai.
		Terlatihnya petani akan cara produksi pangan olahan yang baik	34 Org	-		Direfocusing sehingga kegiatan tidak dilaksanakan
		Terlatihnya petani pelaku kopi	3 Org	-		Direfocusing sehingga kegiatan tidak dilaksanakan
8	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Produktivitas padi	56kw/ha	59,25kw/ha	682.328.920 631.496.767 (92,55%)	Tercapai karena banyak dukungan anggran dari APBN untuk mendorong produtivitas tanaman pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian
8.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Desa Mandiri Benih (padi)	4 Desa	-	147.326.400	Tidak tercapai karena anggaran direfocusing
		Jumlah produksi benih bersertifikat	3 Ton/ha	-	132.224.290 (89,75%)	Tidak tercapai karena anggaran direfocusing
		Pengembangan kawasan bawang merah biji (TSS)	3 ha	3 ha		Tercapai.
		Peningkatan produksi bawang merah	5 kw	6,8 kw		Tercapai.
8.2	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Luasan lahan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura	125 ha	100 ha	535.002.520 499.272.477 (93,32%)	Belum tercapai maksimal karena pada luasan lahan kedelai pengadaan untuk benih kedelai direfocusing
ii	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman (IP)	181,83	217	8.609.282.340 8.325.287.977 (96,70%)	Tercapai karena dukungan anggaran APBN yang mendorong supaya ada peningkatan



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						produktivitas yaitu melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian
9	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan pengembangan prasarana pertanian	1 Lap	1 Lap	730.081.500 635.712.637 (87,07%)	Tercapai.
9.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah poktan yang mengakses KUR	10 Kelpk	10 Kelpk	566.112.500 490.585.610 (86,66%)	Tercapai.
		Jumlah pemanfaatan Alsintan	500 Alat	545 Alat		Tercapai.
		Luas lahan pertanian yang memiliki jaminan /asuransi usaha tani	2000 ha	4560 ha		Tercapai Karena keterdukungan APBN dan APBD Provinsi dalam subsidi pembayaran premi asuransi
9.2	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen kondisi jaringan irigasi tingkat usaha tani dan pedesaan	1 Dok	-	23.436.000 5.415.000 (21,11%)	Sosialisasi Perda LP2B belum terlaksana karena Bagian Hukum Setda Brebes Menunda Prolegda Perda LP2B ke tahun 2022
9.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Laporan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	1 Lap	1 Lap	130.000.000 129.206.860 (99,39%)	Tercapai.
9.4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Dokumen masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dok	-	10.533.000 10.505.167 (99,74%)	Dana direfocusing sehingga kegiatan hanya sebatas studi tiru pengembangan kawasan hortikultura (pisang)
10	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Dokumen pembangunan prasarana pertanian	1 Dok	1 Dok	7.879.200.840 7.689.575.340 (97,59%)	
10.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Luasan yang terlayani irigasi secara optimal	1000 ha	1000 ha	1.420.000.000 1.407.623.000 (99,13%)	Tercapai Karena keterdukungan Dana dari anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan Aspirasi
10.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung pertanian	Luasan yang terlayani irigasi secara optimal	50 ha	50 ha	120.000.000 120.000.000 (100%)	Tercapai Karena keterdukungan Dana dari anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						Aspirasi
10.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Panjang jalan usaha tani yang terbangun/terehabilitasi	2 Km	3 Km	4.172.463.840 4.144.328.500 (99,33%)	Tercapai karena keterdukungan Dana dari anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan Aspirasi
10.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Luasan yang terlayani irigasi secara optimal	200 ha	200 ha	840.000.000 839.998.000 (100%)	Tercapai karena keterdukungan Dana dari anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan Aspirasi
10.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung kantor dalm kondisi baik	5 Unit	6 Unit	1.326.737.000 1.177.625.840 (88,76%)	Tercapai karena keterdukungan Dana dari anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan dan Aspirasi
III	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman (IP)	181,83	217	331.231.900 297.799.799 (89,91%)	Tercapai karena dukungan anggaran APBN yang mendorong supaya ada peningkatan produktivitas yaitu melalui dukungan sarana dan prasarana pertanian
11	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang terlindungi dari serangan OPT	17 Kec	17 Kec	331.231.900 297.799.799 (89,91%)	Tercapai.
11.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah poktan penerima bantuan sarana pengendalian hama terpadu komoditas hortikbun	3 Kelpk	3 Kelpk	324.043.900 291.594.299 (89,99%)	Tercapai.
		Sekolah lapang pengendalian hama terpadu tanaman hortikbun	3 Kelpk	3 Kelpk		Tercapai.
11.2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luasan penanganan lahan padi yang terkena puso	15 ha	15 ha	7.188.000 6.205.500 (86,33%)	Tercapai.
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah dokumen perijinan usaha pertanian	1 Dok	1 Dok	331.231.900 297.799.799 (81,91%)	Tercapai.
12	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan	Jumlah produk olahan hasil tanaman pangan	4 Jenis	2 Jenis	331.231.900 297.799.799	Belum tercapai karena penerbitan ijin usaha pertanian yang masuk



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota				(89,91)	hanya untuk ijin produk pangan segar asal tumbuhan dalam hal ini beras kemasan medium dan premium .Untuk jenis pangan lainnya belum
12.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Laporan pembinaan dan pengawasan penerapan ijin usaha pertanian	1 Lap	1 Lap	324.043.900 291.594.299 (89,99%)	Tercapai.
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan pembinaan kelpk tani	83%	85%	402.128.675 398.165.758 (99,01)	Tercapai dari 48 target poktan yang dibina tercapai 51 poktan
13	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Poktan yang berdaya	23%	23%	402.128.675 398.165.758 (99,01%)	Tercapai di 34 poktan
13.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah poktan yang meningkat kelasnya dari pemula ke lanjutan	70 Kelpk	70 Kelpk	51.675.800 50.740.100 (98,19%)	Tercapai.
13.2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelpk tani yang mengembangkan teknologi pertanian	25 Kelpk	25 Kelpk	176.202.875 173.317.098 (98,36%)	Tercapai, salah satu kelpknya adalah kelpk tani millenia
13.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang dimanfaatkan	10 Jenis	11 Jenis	174.250.000 174.108.560 (99,92%)	Tercapai adanya dukungan dari DAK non fisik pertanian penugasan berupa sarana keinformasian ke BPP (13 kecamatan dari 17 kecamatan)
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Persentase kepuasan terhadap pelayanan perkantoran	100%	98%	3.041.375.570 2.963.172.084 (97,43%)	Masih belum tercapai maksimal disebabkan karena adanya refocusing anggaran
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi	100%	100%	270.993.600 261.359.757 (96,44%)	Tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya koordinasi antar SKPD melalui leading sektor masing-masing dan aturan-aturan baru mengenai Dokumen



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi yang wajib dilakukan oleh semua SKPD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen perencanaan	10 Jenis	10 Jenis	106.418.800 104.505.987 (98,20%)	Tercapai. Dokumen tersebut antara lain adalah Renja,SIPD Perencanaan, RKA,DPA ,DPA Refocusing, DPPA, Dokumen Rakor Pertanian, Dokumen Musrenbangtan, Dokumen Musrenbangpem, SIRUP)
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan koordinasi dan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Jenis	7 Jenis	132.346.400 125.979.189 (95,19%)	Tercapai. Laporan tersebut antara lain laporan Statistik pertanian, LKPJ, LPPD, LKJIP,Laporan koordinasi dengan SKPD,Laporan Koordinasi dengan BPP,dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Jenis	10 Jenis	32.228.400 30.874.581 (95,80%)	Tercapai. Laporan tersebut adalah laporan evaluasi Renja pertriwulan,laporan SIPPD per triwulan,Laporan evaluasi statistik pertanian per semester,laporan capaian kinerja BPP ,dan laporan monev SKPD
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	272.490.250 268.256.800 (95,45%)	Tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya koordinasi antar SKPD melalui leading sektor masing-masing dan aturan-aturan baru mengenai Dokumen administrasi keuangan



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						perangkat daerah yang wajib dilakukan oleh semua SKPD
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	195.796.250 191.606.800 (97,86)	Tercapai. Dokumen tersebut adalah dokumen GU dan LS .Meskipun masih ada kendala dalam hal penatausahaan menggunakan SIPD namun selama tahun anggaran 2021 SIPD didampingi dengan SIMDA dalam proses Penatausahaan.
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Lap Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Lap	3 Lap	31.130.200 29.927.000 (96,13%)	Tercapai. Lap tersebut adalah lap realisasi anggaran semester 1, lap prognosis, dan lap keuangan daerah tahun anggaran 2021
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang berkompeten	100%	90%	272.490.250 268.256.800 (98,45%)	Belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran pada bulan Maret 2021 sehingga terjadi pemangkasan anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian PD.
3.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	20 Org	15 Org	20.400.000 19.200.000 (94,12%)	Belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran sehingga tidak semua kegiatan sosialisasi diadakan ,hal yang mungkin perlu dilakukan adalah sosialisasi bisa dilakukan melalui zoom setelah semua sarana prasara zoom memenuhi standar.
3.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Org	15 Org	10.730.200 10.727.000 (99,97%)	Belum Tercapai, karena anggaran yang ada adalah anggaran yang telah direfocusing. Sehingga tidak semua target



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						ASN mendapatkan bintek implementasi peraturan perundang-undangan
4	Kegiatan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	798.698.726 761.878.012 (95,39%)	Tercapai.
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	20 Jenis	20Jenis	9.859.700 9.857.000 (99,97%)	Tercapai.
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor	2 Jenis	2 Jenis	272.259.106 253.855.900 (93,24%)	Tercapai.
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga	20 Jenis	18 Jenis	70.076.400 57.917.500 (82,65%)	Belum tercapai maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal jenis peralatan rumah tangga yang sampai dengan waktu batas akhir pelaksanaan anggaran 2021 barang yang dimaksud belum diperoleh dipasaran
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	12 Jenis	12 Jenis	21.265.760 20.823.750 (97,92%)	Tercapai.
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4 Jenis	4 Jenis	20.000.000 19.561.000 (97,81%)	Tercapai.
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lap fasilitasi kunjungan tamu	10 jenis	10 jenis	121.082.000 120.918.000 (99,86%)	Tercapai.
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	105 lap	105 lap	284.155.760 278.944.862 (98,17%)	Tercapai. Meskipun anggaran difocusing tetapi masih bisa dilaksanakan karena memanfaatkan aplikasi zoom meeting
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Buah	-	-	Refocusing 100 %



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
5.1	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit pengadaan gedung kantor yang terbangun	1 Buah	-	-	Refocusing 100 %
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kepuasan pelayanan dilingkungan perkantoran	100%	100%	734.147.500 714.191.120 (97,28%)	Tercapai, Dampaknya adalah kepuasan pelayanan dan kelancaran kegiatan dilingkungan perkantoran
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jenis surat masuk dan keluar	3 Jenis	3 Jenis	129.156.250 125.912.280 (97,49)	Tercapai.
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Lap penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Jenis	4 Jenis	136.050.000 131.834.340 (96,90%)	Tercapai.
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	95 buah	95 buah	65.190.000 61.699.500 (94,65%)	Tercapai.
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan kantor	101 org	101 org	403.751.250 394.745.000 (97,99%)	Tercapai.
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	90%	933.915.294 927.559.395 (99,32%)	Belum maksimal tercapai,karena direfocusing sebagian kecil anggaran pemeliharaan kendaraan dan gedung.
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dalam keadaan baik dan lap pajak kendaraan	8 Unit	7 Unit	97.257.100 96.749.978 (99,48%)	Belum maksimal tercapai yaitu apada 1 unit kendaraan dinas dobel cabin yang sedianya akan di kembalikan ke bagian umum karena biaya pemeliharaannya besar namun anggaran yang ada masih belum mencukupi
7.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	7 Unit	7 Unit	836.658.194 830.809.417 (99,30%)	Tercapai,yaitu adanya bantuan DAK Penugasan bidang pertanian pada 7 BPP yang direhabilitasi untuk ruang sarana keinformasian

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes.



Permasalahan dan Solusi

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan, terdapat permasalahan yaitu Pembangunan Infrastruktur Lumbung Pangan beserta sarana pendukungnya dari anggaran pemerintah daerah masih belum mampu untuk memenuhi dengan solusi Mengajukan bantuan ke Pusat dan Provinsisupaya mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lumbung pangan dan pendukungnya seperti lantai jemur,bangunan RMU,dan mesin RMU
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat pada :
 - a. kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan sub kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan terdapat permasalahan Kurangnya sinergi dengan Instansi lain yang terkait dengan solusi Supaya stakeholder leading sektor un tuk pemantauan stok,pasokan dan harga berkoordinasi dengan instansi- instansi lain yang terkait.
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota terdapat permasalahan berupa Minimnya anggaran untuk kegiatan pengadaan cadangan pangan (gabah keringgiling) dengan solusi Mengajukan bantuan ke Pusat dan Provinsisupaya mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, terdapat masalah Kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan maksud dan tujuan pemberian bantuan dana untuk kegiatan P2L terutama untuk keberlanjutan kegiatan P2L pasca bantuan tidak diberikan untuk tahun berikutnya, dengan solusi Memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada kelpk penerima bantuan dan monitoring kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan P2L
3. Program pengawasan keamanan pangan, pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota,terdapat masalah Minimnya anggaran sehingga pengadaan kittest untuk alat tes keamanan pangan segar asal



tumbuhan masih belum bisa maksimal diadakan dengan solusi Koordinasi dan sinergi dengan instansi lain yang terkait dalam kegiatan operasi keamanan pangan di sekolah dan pasar

4. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, pada
 - a. kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi terdapat permasalahan Masalah yang berulang sering muncul adalah masalah pupuk dan pestisida antara lain masalah kurangnya subsidi pupuk dari pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk di petani dan masalah distribusi pupuk dengan solusi Masalah keterbatasan pupuk bersubsidi dari pemerintah yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan pupuk di petani pembagian perhitungannya disesuaikan dengan juklak dari pusat salah satunya dengan petani wajib memiliki kartu tan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tupoksinya hanya sebatas membantu petani dalam membuat kartu tani dan menghitung kebutuhan pupuk dan membagi sesuai yang didapat alokasi dari pusat sementara untuk masalah distribusi pupuk menjadi tugas ranah Dinas Perdagangan dan Koperasi Dinas Pertanian
 - b. kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman masalah berupa Secara umum tidak ada masalah yang signifikan hanya ada beberapa komoditas yang masih perlu perhatian khusus yaitu komoditas kedelai hitam di Kecamatan Losari yang hampir tidak ada karena berkurang luasannya sementara di Kecamatan Losari terdapat industri kecap rumah tangga. Kemudian karena refocusing dan minimal anggaran maka target adanya desa mandiri benih dan jumlah produksi benih bersertifikat tidak bisa memenuhi target kinerja dengan solusi Mengajukan bantuan ke Pusat dan provinsi untuk pengadaan kedelai hitam memberikan motivasi kepada petani kedelai hitam dan beras hitam untuk menghidupkan kembali lahan pertaniannya dan sinergi dengan Instansi lain terkait pemasaran produk kedelai hitam dan beras hitam. Sementara untuk desa mandiri benih dan produksi benih bersertifikat seharusnya anggaran tidak direfocusing



Pada sub kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman terdapat masalah Terbatasnya anggaran untuk kegiatan pengadaan alat pasca panen tiap komoditas pertanian supaya nilai tambah produk bisa meningkat. Dan minimnya pengetahuan dan kemauan petani untuk mengolah hasil produksi panennya, solusi Mengajukan bantuan ke Provin dan Pusat untuk alokasi bantuan pasca panen dan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani

5. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, pada
 - a. kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian pada sub kegiatan Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B terdapat masalah Anggaran pembuatan Perda LP2B difokuskan dengan solusi Akan disusun di tahun 2022
 - b. kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, Tidak ada masalah dalam pembangunan karena ketersediaan anggaran dari Pemkab melalui Aspirasi dan bantuan dari pusat melalui Dana Alokasi Khusus Fisik penugasan bidang pertanian bisa diperoleh setiap tahunnya, hanya saja harapan kedepan karena Kabupaten Brebes masuk kedalam daerah miskin ekstrim dan masih banyak memiliki kantong desa miskin maka diharapkan pembangunan berfokus pada daerah-daerah tersebut. Komunikasi dan koordinasi dengan pemberi dana anggaran dan pemilihan calon penerima bantuan melalui verifikasi yang tepat sasaran
6. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Permasalahan dan solusi Masih terbatasnya jumlah penyuluh OPT di lapangan, minimnya anggaran yang dimiliki petani untuk mengatasi OPT, minimnya anggaran untuk membantu petani dalam mengatasi OPT, solusi Mengajukan bantuan ke Provinsi dan pusat untuk memberikan bantuan pengendalian OPT seperti RUBUHA, bantuan pestisida untuk OPT, gerakan pengendalian OPT GERDAL bersama petani dan penyuluh lapangan. Pada sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, terdapat masalah Tidak semua petani mendaftarkan lahannya pada asuransi petani karena kurangnya anggaran dan minimnya kesadaran solusi Memberikan sosialisasi tentang pentingnya ikutserta dalam asuransi petani dan memberikan bantuan untuk premi asuransi bagi petani yang bersedia ikut



serta dalam asuransi petani

7. Program penyuluhan pertanian, pada Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian terdapat sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, permasalahan Masih kurangnya kelembagaan petani di Kecamatan dengan solusi Sosialisasi tentang korporasi petani dan sinergi dengan Instansi terkait tentang pembentukan BUMDes.pada sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Tidak ada karena pada TA.2021 mendapatkan DAK fisik untuk sarana keinformasian pada 13 BPP dan TA.2022 kembali mendapatkan untuk 2 BPP. Solusi Untuk BPP yang belum mendapatkan bantuan akan di usulkan ke pusat supaya alokas anggaran tahun berikutnya diperuntukkan ke BPP yang belum mendapatkan bantuan.

Analisis Kesesuaian Capaian

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan kegiatan : Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Yaitu pada tahun 2021 mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian untuk pembangunan Lumbung Pangan 1 unit berupa Bangunan RMU,Lantai Jemur,dan Mesin RMU.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok Yaitu penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal melalui kegiatan lomba cipta menu yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan pemantauan stock pasokan dan harga pangan
 - b. Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan, Yaitu pengadaan cadangan pangan sebanyak 37.880 ton gabah kering giling
 - c. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi, Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kegiatan Pekaragan Pangan Lestari (P2L) Kelpk wanita Tani /KWT dengan fisik kegiatan berupa pembangunan rumah bibit,Demplot,pengadaan benih dan pasca panen.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan



Penanganan kerawanan pangan pada daerah rawan pangan sesuai pada peta kerawanan pangan meliputi wilayah Kabupaten Brebes Utara,Tengah dan Selatan.

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dengan melakukan kunjungan ke sekolah dan pasar untuk keamanan pangan dengan pengambilan lyi sampel pangan

5. Program Penyediaan dan Pengembangan SaranaPertanian

- a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian pendukung pertanian terkait dengan alat mesin pertanian dan ketersediaan pupuk dan pestisida.
- b. Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian terutama pasca panen yaitu dengan memberikan bantuan berupa sosialisasi penggunaan sarana pasca panen,memfasilitasi brigade alsin dan alat pasca panen,memberikan pelatihan,dan memberikan bantuan hibah alat pasca panen kepada KWT dan Poktan
- c. Pengelolaan sumber daya genetik tumbuhan dan mikroorganisme dengan menambah luasan kawasan tanaman pangan ,sayuran ,buah dan perkebunan

6. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian dengan pengelolaan LP2B yaitu Rencana Penyusunan Perda LP2B
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian dengan membangun jaringan usaha tani,embungjalan usaha tani^DamParit dan pemeliharaan gedung BPP.

7. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- a. Perlindungan tanaman terhadap organisme pengganggu tanaman melalui gerakan pengendalian hama penyakit dan organisme pengganggu tanaman.
- b. Penanganan dampak perubahan iklim yang sebabkan puso pada tanaman pangan dengan mengikuti program asuransi tani

8. Program Perijinan Usaha Pertanian, Penerbitan ijin usaha pertanian yaitu memberikan rekomendasi atas kelayakan usaha pertanian

9. Program Penyuluhan Pertanian

- a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan meningkatkan kapasitas para penyuluh dari kelas pertama ke menengah,menengah ke lanjutan



- b. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dengan membentuk kelompok tani milenial dan Jaringan Petani Nasional
- c. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian dengan memberikan bantuan berupa sarana keinformasian IT kepada BPP

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi atau tingkat nasional di tahun 2021, antara lain :

1. Penghargaan Tingkat Provinsi Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 438/KPTS/KP.590/M/B/2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Berprestasi di Bidang Pertanian tahun 2021
2. Penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas atas sinergi dalam Pengawasan Produk Perlindungan Tanaman Palsu dan Illegal di kabupaten Brebes dari CROPLIFE Indonesia.
3. Penghargaan Tingkat Nasional Sertifikat penghargaan dari Menteri Pertanian kepada Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Brebes yaitu Penghargaan Abdi Bakti Tani kategori Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Peringkat II Tingkat Nasional



C.23 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan satu bidang pada urusan pemerintahan yaitu Urusan Pilihan pada Bidang Pertanian. Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pertanian, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 10.552.954.755 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 10.142.090.765 atau 96,11% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.59
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pertanian				
	Belanja Operasi	8.845.637.955	8.635.227.565	(210.410.390)	97,62
	Belanja Modal	1.707.316.800	1.506.863.200	(200.453.600)	88,26
	JUMLAH	10.552.954.755	10.142.090.765	(410.863.990)	96,11

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.60
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
----	--	--	--------	-----------	------------------------------	-----



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
I	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Sarana Prasarana Pternakan dan Kesehatan Hewan (Unit)	16 Unit	16 Unit	1.202.852.700 1.176.205.500 97,78	Tercapai
1	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewena- ngan Kabupaten/Kota	Jumlah DOD yang dihasilkan	1000 Ekor	1000 Ekor	285.245.900 283.959.300 (99,55%)	Tercapai
1.1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan / Tumbuhan	Jumlah DOD yang dihasilkan	1000 Ekor	1000 Ekor	285.245.900 283.959.300 (99,55%)	Tercapai
2	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah klpk ternak yang menerima bantuan bibit ternak	10 klpk	10 klpk	526.348.000 508.194.700 (96,55%)	Tercapai
		Jumlah Ternak yang lahir melalui IB,	700 ekor	700 ekor		
		peningkatan bibit ternak unggul	138 ekor	138 ekor		
2.1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	jumlah klpk ternak yang menerima bantuan bibit ternak	10 klpk	10 klpk	526.348.000 508.194.700 (96,55%)	Tercapai
		Jumlah Ternak yang lahir melalui IB,	700 ekor	700 ekor		
		peningkatan bibit ternak unggul	138 ekor	138 ekor		
3	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Ternak Yang Mendapat SKLB	100 Ekor	100 Ekor	391.258.800 384.051.500 (98,16%)	Tercapai
3.1	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Ternak Yang Mendapat SKLB	100 Ekor	100 Ekor	79.378.800 77.330.000 (97,42%)	Tercapai
3.2	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Klpk Ternak Yang Mendapat Bibit Rumput Unggul	3 klpk	3 klpk	279.048.600 274.160.000 (98,25%)	Tercapai
		Jumlah Ketersediaan	9 ton	9 ton		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Pakan Ternak dari Hasil Fermentasi Jerami				
		Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak Padang Penggembalaan	726 ton	726 ton		
		Prosentase Ketersediaan Pakan Ternak dari hasil Fermentasi Jerami	9 %	9 %		
3.3	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Klpk Yang Mengaplikasikan Pengawetan Pakan Ternak	14 Klpk	14 Klpk	32.831.400 32.561.500 (99,18%)	Tercapai
II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan Sarana Prasarana Pernakan dan Kesehatan Hewan (Unit	16 Unit	16 Unit	2.449.440.000 2.321.871.191 (94,79%)	Tercapai
1	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Peter-nakan dalam Kondisi Baik	16 Unit	16 Unit	1.367.085.000 1.308.531.800 (95,71%)	Tercapai
1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Peter-nakan dalam Kondisi Baik	3 Unit	3 Unit	1.367.085.000 1.308.531.800 (95,71%)	Tercapai
2	Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Padang Peng-gembalaan dalam Kondisi baik	3 Unit	3 Unit	1.082.355.000 1.013.339.391 (93,62%)	Tercapai
2.1	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Padang Peng-gembalaan dalam Kondisi baik	3 Unit	3 Unit	1.082.355.000 1.013.339.391 (93,62%)	Tercapai
III	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penurunan Kasus penyakit hewan menular (Ekor)	4000	4000	529.032.700 523.214.607 (98,90%)	Tercapai
1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit	Jumlah kandang yang Terdisen-vektan	150 kandang	150 kandang	105.036.500 105.023.500 (99,99%)	Tercapai
		Jumlah peng-obatan ternak	5000 ekor	5000 ekor		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampel ternak yang diperiksa	2600 ekor	2600 ekor		
		Jumlah ternak yang di vaksin	33200 ekor	33200 ekor		
1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah kandang yang Terdisenvektan	150 kandang	150 kandang	105.036.500	Tercapai
		Jumlah Pengobatan ternak	5000 ekor	5000 ekor	105.023.500 (99,99%)	
		Jumlah sampel ternak yang diperiksa	2600 ekor	2600 ekor		
		Jumlah ternak yang di vaksin	33200 ekor	33200 ekor		
2	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota	Jumlah Produk asal Hewan yang bersertifikat aman, sehat, utuh, halal (ASUH)	40 Produsen	40 Produsen	356.650.200	Tercapai
					351.066.679 (96,01%)	
2.1	Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah produk asal hewan yang bersertifikat aman, sehat, utuh halal(ASUH)	40 Produsen	40 Produsen	34.400.000	Tercapai
					34.359.049 (99,88%)	
2.2	Pengawasan atas penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	jns produk asal hewan aman sehat utuh halal (ASUH) yang di awasi jns produk olah pangan asal ternak/hewan	3 jns 9 produk	3 jns 9 produk	303.750.600	Tercapai
					289.233.030 (95,22%)	
2.3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kab/Kota	jumlah poultry shop dan toko obat hewan yang di awasi	10 Lokasi	10 Lokasi	27.499.600	Tercapai
					27.474.600 (99,91%)	
3	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Masyarakat Veteriner yang mendapatkan komunikasi, informasi ,edukasi (KIE) produk ASUH Hewan	480 KIE	480 KIE	37.411.000	Tercapai
					37.254.428 (99,58%)	
3.1	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	jumlah masyarakat veteriner yang mendapatkan komunikasi informasi	480 KIE	480 KIE	37.411.000	Tercapai
					37.254.428 (99,58%)	



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		edukasi(KIE produk ASUH Hewan)				
4	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Ternak besar betina yang mendapatkan surat ketera-ngan status reproduksi (SKSR)	14.000 Ekor	14.000 Ekor	29.935.000 29.870.000 (99,78%)	Tercapai
4.1	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Ternak besar betina yang mendapatkan surat ketera-ngan status reproduksi (SKSR)	14.000 Ekor	14.000 Ekor	29.935.000 29.870.000 (99,78%)	Tercapai
IV	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jns Produk Olahan Asal Ternak (Jns)	6 Jns Produk	6 Jns Produk	53.260.000 52.420.000 (98,42%)	Tercapai
1	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Promosi inovasi teknologi dan hasil peternakan	6 Jns Produk	6 Jns Produk	53.260.000 52.420.000 (98,42%)	Tercapai
1.1	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitasi Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Promosi Inovasi, Teknologi dan Hasil Peternakan	6 Jns Produk	6 Jns Produk	53.260.000 52.420.000 (98,42%)	Tercapai
V	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Ternak Yang Berprestasi	14 Klpk	14 Klpk	1.049.766.500 1.048.605.503 (99 %)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah klpk/pelaku usaha peternakan yang mendapatkan bimbingan usaha peternakan	100 Klpk	100 Klpk	1.049.766.500 1.048.605.503 (99 %)	Tercapai
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Klpk/Pelaku Usaha Peternakan yang Mendapatkan Bimbingan Usaha Peternakan	100 Klpk	100 Klpk	1.049.766.500 1.048.605.503 (99 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi (%)	100	100	1.322.704.939 0 1.225.458.937 92,65%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan lap pelaksanaan tersedia (%)	100	100	171.117.820 161.986.240 (94,66%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5 Dok	5 Dok	96.638.880 94.921.440 (98%)	Tercapai
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	3 Dok	3 Dok	74.478.940 67.064.800 (90,05%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan (%)	100 %	100 %	95.260.000 85.470.000 (89,72%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	1 Dok	95.260.000 85.470.000 (89,72%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	100%	100%	43.135.500 39.670.000 (91,97%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Stel)	70 Stel	70 Stel	26.250.000 26.250.000 (100%)	Tercapai
3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	70 Orang	16.885.500 13.420.000 (79,48%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi (%)	100%	100%	407.611.499 388.550.516 (95,32%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1 Paket	1 Paket	26.152.400 26.109.800	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			(99,84%)	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	42.080.000 31.247.875 (74,26%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	48.197.100 45.695.000 (94,81%)	Tercapai
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	39.291.400 39.010.000 (99,28%)	Tercapai
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	101.250.599 99.816.500 (98,58%)	Tercapai
4.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Lap Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Lap	1 Lap	88.310.000 84.766.000 (95,99%)	Tercapai
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Lap Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	62.330.000 61.905.341 (99,32%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi (Lap)	1 Lap	1 Lap	339.931.500 306.749.159 (90,24%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap	1 Lap	14.400.000 11.500.000 (79,86%)	Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	115.704.600 94.943.659 (82,06%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Lap Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lap	1 Lap	209.826.900 200.305.500 (95,46%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD SKPD dalam	100%	100%	265.648.620	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kondisi baik (%)			243.033.022 (91,49%)	
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	75 Unit	166.123.580 147.333.022 (88,69%)	Tercapai
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan telah dipelihara sesuai kebutuhan	1 Paket	1 Paket	33.005.200 32.715.000 (99,12%)	Tercapai
6.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara	1 Paket	1 Paket	66.519.840 62.985.000 (94,69%)	Tercapai

Sumber data : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes.

Dalampelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Peternakandan Kesehatan hewan tidak terdapat masalah yang signifikan, sehingga realisasi sesuai target yang ditentukan.

Capaian kinerja pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Brebes dengan indicator kinerjanya sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah, yaitu Capaian fisik 99% dan Capaian Keuangan 97,23%

Penghargaan yang didapat pada Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional pada Tahun 2021, antara lain :

1. Juara 1 Lomba Itik Tingkat Propinsi Kelompok Tani Ternak (KTT) Berhias Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
2. Juara 3 Lomba Sistem Informasi Masyarakat Peternakan (SIMASTER)



C.24 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melaksanakan dua bidang pada urusan pemerintahan yaitu :

- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu Bidang Tenaga Kerja
- Urusan Pilihan pada Bidang Perindustrian

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan urusan pemerintahan terutama pada Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian, yaitu Perkuatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan produksi sektor dan komoditas unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur produksi, pengembangan inovasi serta membangun kualitas dan kapasitas tenaga kerja.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 7.208.174.894 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 6.605.685.556 atau 91,68% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.61
Anggaran dan Realisasi Belanja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Tenaga Kerja	6.028.173.434	5.576.683.130	(451.490.304)	92,51
	Belanja Operasi	5.945.612.434	5.499.820.130	(445.792.304)	92,50
	Belanja Modal	82.561.000	76.863.000	(5.698.000)	93,10
2	Perindustrian	1.180.001.460	1.029.002.426	(150.999.034)	87,20
	Belanja Operasi	1.173.001.460	1.022.002.426	(150.999.034)	87,13
	Belanja Modal	7.000.000	7.000.000	0	100,00
	JUMLAH	7.208.174.894	6.605.685.556	(602.489.338)	91,64

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.62
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
I.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase tenaga kerjaterlatih	100%	100%	859.768.250 845.011.005 99 %	Tercapai
1.	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan mendapat Surat Keterangan Pelatihan (orang)	120 org	200 org	838.522.250 824.354.856 99 %	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Pelatihan Kerja dan mendapat Surat Keterangan Pelatihan (orang)	120 org	200 org	838.522.250 824.354.856 99 %	Tercapai
2.	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dokumen Jumlah LPKS, BLKLN, BLK, BKK (dokumen)	100%	100%	21.246.000 20.656.149 98 %	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dokumen Jumlah LPKS, BLKLN, BLK, BKK (dokumen)	3 dok	3 dok	21.246.000 20.656.149 98 %	Tercapai
II.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-	-	132.446.000 115.683.630 88 %	-
1.	Kegiatan pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pencari Kerja (orang) – di GPP Bumiayu	4.800 org	16.548 org	23.490.000 23.451.400 99,9 %	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja (orang) – di GPP Bumiayu	4.800 org	16.548 org	23.490.000 23.451.400 99,9 %	Tercapai
2.	Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Dokumen Jumlah P3MI (dokumen)	1 dok	1 dok	53.234.000 44.046.730 83 %	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Dokumen Jumlah P3MI (dokumen)	1 dok	1 dok	53.234.000 44.046.730 83 %	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3.	Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Penanganan TKI Bermasalah (kasus)	10 org	31 org	55.722.000 48.185.500 87 %	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Peningkatan perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah Penanganan TKI Bermasalah (kasus)	10 org	31 org	55.722.000 48.185.500 87 %	Tercapai
III.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-	-	142.275.000 115.683.630 88 %	-
1.	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	-	-	-	14.967.000 14.740.000 99,9 %	-
1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang tercatat / terbina (perusahaan)	30 perusaha an	30 perusaha an	14.967.000 14.740.000 99 %	Tercapai
2.	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tercatat / terbina (SP/SB)	3 serikat buruh	16 serikat buruh	127.308.000 44.046.730 83 %	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	Jumlah Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tercatat / terbina (SP/SB)	3 serikat buruh	16 serikat buruh	7.952.000 0 0 %	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Perusahaan yang berakibat / berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota					
2.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perusahaan yang tercatat / terbina (perusahaan)	40 perusa haan	40 perusa haan	119.356.000 92.776.310 78 %	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
I.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	-	-	859.768.250 845.011.005 99 %	-
1.	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab / Kota	-	-	-	838.522.250 824.354.856 99 %	-
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen Jumlah IKM Logam yang masih aktif (dokumen)	1 dok	1 dok	20.000.000 17.065.113 99 %	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Prosentase peningkatan jumlah produksi IKM Sandang dan Aneka (%)	2 %	10%	125.000.000 100.498.800 99 %	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen Jumlah IKM Kimia dan Hasil Hutan yang masih aktif dan memenuhi standar (Dokumen) Jumlah IKM Industri Agro yang mengikuti Pembinaan, Pelatihan, Workshop (kelompok) Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi IKM Agro (%)	1 dok 1 kel 2 %	1 dok 1 kel 2 %	975.882.460 824.354.856 99 %	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
II.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Prosentase pertumbuhan industri logam sandang dan aneke (%)	-	-	29.119.000 2.540.000 0 %	-
1.	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen Jumlah IKM Logam yang masih aktif (dokumen)	-	-	29.119.000 2.540.000 0 %	-
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI dalam SIInas yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen Jumlah IKM Logam yang masih aktif (dokumen)	1 dok	1 dok	29.119.000 000 0 %	Tercapai
III.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase pertumbuhan industri logam sandang dan aneke (%)	-	-	30.000.000 19.776.000 66 %	-
1.	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Dokumen jumlah industri logam yang melakukan pengolahan dan analisis data dalam akun SIINAS Kabupaten (%)	100%	100%	30.000.000 19.776.000 66 %	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten / Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Dokumen jumlah industri logam yang melakukan pengolahan dan analisis data dalam akun SIINAS Kabupaten (dokumen)	1 dok	1 dok	30.000.000 19.776.000 66 %	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Presentase dokumen perencanaan dan laporan	100%	100%	4.892.762.484 4.488.465.685 92%	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	DAERAH KABUPATEN / KOTA	pelaksanaan tersedia				
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan	2 dok	2 dok	162.761.000 114.045.480 71 %	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan (Renja, RKA, DPA) (jenis)	2 dok	2 dok	138.739.000 119.375.480 74 %	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen Pelaporan (Lakip, Sakip, Evaluasi) (jenis)	1 dok	1 dok	24.022.000 12.363.000 52 %	Tercapai
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis dokumen pelaporan perangkat daerah	100%	100%	3.474.281.944 3.291.138.494 98 %	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan (bulan)	12 bulan	12 bulan	3.474.281.944 3.291.138.494 98 %	Tercapai
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jenis dok pelaporan perangkat daerah	100%	100%	30.227.000 23.640.000 79 %	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian khusus hari – hari tertentu (stel)	79 stel	79 stel	30.227.000 23.640.000 79 %	Tercapai
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	302.900.800 218.526.510 73 %	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik / Penerangan (Jenis)	9 jenis	9 jenis	7.048.000 4.046.500 66 %	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Kantor (jenis)	50 jenis	50 jenis	90.291.000 57.977.800 66 %	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga (jenis)	33 jenis	33 jenis	51.804.000 25.931.600 51 %	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (jenis)	10 jenis	10 jenis	51.281.800 40.524.500 83 %	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan	Jumlah Bahan Bacaan (jenis)	2 jenis	2 jenis	17.820.000 7.10.000 46 %	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas luar daerah (laporan) Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah (laporan) Jenis Makan Minum (jenis)	90 laporan 25 laporan 4 jenis	90 laporan 25laporan 4 jenis	85.578.000 78.596.110 92 %	Tercapai
5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	78.039.000 73.263.000 94 %	-
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan (jenis)	4 jenis	4 jenis	78.039.000 73.263.000 94 %	Tercapai
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	615.848.000 548.633.482 90 %	-
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk (buah) Jumlah Surat Keluar (buah)	2.600 buah 1.950 buah	2.600 buah	5.000.000 4.400.000 88 %	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis)	7 jenis	7 jenis	191.760.000 147.763.642 78 %	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia (orang)	19 org	19 org	419.088.000 394.793.840 95 %	Tercapai
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	228.704.740 219.218.719 96 %	-
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional dalam kondisi baik (unit) Jumlah mobil diproses surat perijinannya Jumlah motor	20 unit 5 ijin mobil 20 ijin motor	20 unit 5 ijin mobil 20 ijin motor	118.092.500 114.513.219 97 %	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		diproses surat perijinannya				
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi baik (unit)	8 unit	8 unit	23.338.200 18.028.000 78 %	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung dalam kondisi baik (unit)	3 unit	3 unit	87.274.040 86.677.500 99,9 %	Tercapai

Sumber data : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

Program Sekretariat Kegiatan Pemeliharaan Gedung mempunyai permasalahan Kondisi Gedung masih banyak dibutuhkan perbaikan perawatan kondisi gedung yang sudah tua dengan penyelesaian Peningkatan pemeliharaan Gedung kantor.

Program Pelatihan tenaga kerja Kegiatan pelatihan ketrampilan tenaga kerja mempunyai permasalahan Minimnya anggaran pelatihan ketrampilan kerja dengan penyelesaian peningkatan anggaran untuk pelatihan ketrampilan kerja.

Program Industri Agro kimia dan hasil hutan mempunyai permasalahan kurangnya sarana dan prasarana untuk peningkatan Sumber Daya Industri dengan penyelesaian penambahan sarpras dan fasilitas untuk industry.

Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Sudah Ditetapkan

Capaian Kinerja Program Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, namun dari dua indikator kinerja yang ditetapkan masih ada satu indikator kinerja yang tidak sesuai dengan target yaitu indikator kinerja persentase meningkatnya kesejahteraan pekerja dengan target 8% kenaikan UMK dari tahun



sebelumnya. Untuk tahun ini kenaikan UMK hanya tercapai 57.50 % dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada perubahan regulasi.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri Logam, Sandang dan Aneka sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, namun dengan adanya pandemi Covid 19 indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Industri Logam, Sandang dan Aneka hanya dapat tercapai sebesar 0,42 % dari target 0,45% atau capaian tahun 2021 sebesar 140.00 %.

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Teknologi dan Sistem Produksi Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan dapat tercapai sebesar 0,40 % dari target 0,32% atau capaian tahun 2021 sebesar 162.2 %.





C.25 Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 1.421.131.446,00 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 1.345.690.281,00 atau 94,69% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.63
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Tata Pemerintahan)				
	Belanja Operasi	1.421.131.466	1.345.690.281	(75.441.185)	94,69
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	1.421.131.466	1.345.690.281	(75.441.185)	94,69

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.64
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
SEKRETARIAT DAERAH						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	168.854.946 155.407.700 (92,04%)	Peningkatan Kinerja Pemerintah an
1	Kegiatan Penataan Organisasi	Presentase penataan organisasi	100%	100%	168.854.946 155.407.700 (92,04%)	Tercapai
1.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisi Jabatan	Dokumen Penguatan Kelembagaan Kecamatan	1 Dok	1 Dok	5.577.400 4.888.200 (87,64%)	Tercapai
1.2	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Capaian Indikator Pelaksanaan APBD,	2 Dok	2 Dok	163.277.546 150.519.500 (92,19%)	Tercapai
		Capaian indikator standar pelayanan SPM 6 urusan wajib bersifat pelayanan public	1 dok	1 dok		
		Jumlah peserta bintek pemeringkatan provinsi dan nasional capaian indicator kinerja kunci/ IKK	116 Orang	116 Orang		
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Prosentase jumlah kecamatan yang pelaksanaann penyelenggaraan administrasi kecamatan dan PATEN berjalan baik	100	100	833.866.595 816.386.649 (97,90%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Tata pemerintahan	Pengelolaan administrasi bidang pemerintahan yang lebih tertib	17 kec	17 kec	833.866.595 816.386.649 (97,90%)	Tercapai
1.1	Penataan administrasi pemerintahan	Dokumen evaluasi kinerja camat	1 dok	1 dok	254.999.940 251.918.016 (98,79%)	Tercapai
		Dokumen fasilitasi pembentukan pelayanan administrasi kecamatan	1 dok	1 dok		
		Dokumentasi PAW (pergantian antar waktu) anggota DPRD Brebes	1 dok	1 dok		
		Dokumen pembinaan internal berkala administrasi	1 dok	1 dok		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
		perkantoran dan tata pemerintahan				
		Jenis buku (capaian indikator kinerja APBD per SKPD dan urusan wajib / pilihan dilaporkan ke DPRD (LKPJ Bupati Brebes, capaian indikator kinerja kunci / IKK dilaporkan ke Kemendagri melalui Gubernur Jateng (LPPD)	2 dok	2 dok		
1.2	Pengelolaan Administrasi kewilayahan	Dokumen penetapan dan penegasan batas daerah (PPBD)	1 Dok	1 Dok	520.646.875 511.667.333 (98,28%)	Tercapai
		Jumlah dokumen pembukuan nama rupabumi	1 Dok	1 Dok		
		Jumlah peta)Desa/ Kelurahan, kecamatan dan kabupaten Brebes	315 Peta	315 Peta		
1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen Penanganan Permasalahyang menonjol	1 Dok	1 Dok	58.219.780 52.801.300 (90,69%)	Tercapai
		Publikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Publikasi	1 Publikasi		
III	FASILITAS KERJASAMA DAERAH	Peningkatan kerja sama daerah	100%	100%	418.409.925 373.895.932 (86,02%)	Tercapai
	Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	Dokumen Kesepakatan Bersama dan PerjanjianKerja sama anta Pemerintah Daerah, Instansi vertical dan pihak III	1 dok	1dok	418.409.925 373.895.932 (86,02%)	Tercapai

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan) Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintah daerah Bagian Tata Pemerintahan, tidak ada permasalahan yang dihadapi. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.



Analisis Kesesuaian Capaian

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan. Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 100% dan nilai rata-rata capaian kinerja pada target program, kegiatan, sub kegiatan mencapai 100 % dan realisasi anggaran tercapai 94,69%, hal ini menunjukkan bahwa antara kegiatan dengan target kinerja telah sesuai.



C.26 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) T.A 2021 sebesar Rp.787.564.265 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 540.227.800 atau 68,59% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.65
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Perekonomian)				
	Belanja Operasi	787.564.265	540.227.800	(247.336.465)	68,59
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	787.564.265	540.227.800	(247.336.465)	68,59

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.66
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Peningkatan laba BUMD Kab Brebes (Miliar Rupiah)	12	16,295	787.564.265 540.227.800 (68,59%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pelaksanaan kebijakan perekonomian	Peningkatan laba BUMD Kab Brebes dan peningkatan prerkonmian rakyat	6 BUMD	6 BUMD	530.483.015 421.608.700 (79,48%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan BUMD dan BLUD	Peningkatan laba BUMD Kab Brebes dan peningkatan prerkonmian rakyat Tersedianya dokumen pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap BUMD serta lembaga perekonomian lainnya	6 BUMD 3 dok	6 BUMD 3 dok	185.773.015 175.500.000 (94,47%)	Tercapai
1.2	Sub kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian	Jumlah dokumen pemantauan dan pelaporan perkembangan harga sembako pupuk bersubsidi dan penggunaan pestisida Jumlah dokumen pengendalian inflasi daerah Jumlah paket sembako untuk masyarakat kurang mampu	12 dok 1 dok 7.500 pkt	12 dok 1 dok 2.325 pkt	334.710.000 238.290.000 (71,19%)	Pengurangan jumlah paket sembako karena adanya refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 di kabupaten brebes
1.3	Sub kegiatan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Jumlah dokumen mengenai pemantauan produk unggul daerah dan pembinaan terhadap pelaku usaha produk unggulan	5 dok	5 dok	10.000.000 7.818.700 (78,19%)	Tercapai
2	Kegiatan Pemanataan kebijakan sumber daya alam	Penataan Sumber daya alam energy dan air Terkoordinasi dan berjalan optimal	3 SDA	-	257.081.250 118.619.100 (46,14%)	Tercapai
2.1	Sub kegiatan koordinasi sinkronisasi monitoring dan evaluasi kebijakan pertanian kehutanan kelautan, dan perikanan	Dokumen pelaporan Dokuen perencanaan	2 dok 1 dok	2 dok 1 dok	206.581.250 70.491.100 (34,12%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.2	Sub kegiatan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Jenis dokumen pemantauan dan pelaporan ketersediaan SDA, SD Energi dan lainnya	2 dok	2 dok	50.500.000 48.128.000 (95,30%)	Tercapai

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) Kabupaten Brebes.

Pada penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan permasalahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam mempunyai permasalahan antara lain :

- a. BLT dianggarkan untuk 50 orang, namun setelah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai Perbup BLT, hanya didapatkan 5 orang penerima BLT yang memenuhi persyaratan (tidak diperbolehkan adanya duplikasi penerima bantuan).
- b. Pandemi yang masih belum selesai juga mengakibatkan kegiatan banyak dilaksanakan melalui daring sehingga penyerapan rendah

Analisis Kesesuaian Capaian

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 100% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan mencapai 68.59 %, hal ini menunjukkan bahwa antara kegiatan dengan target kinerja telah sesuai.





C.27 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.635.198.600 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 619.761.600 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.67
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Adm Pembangunan)				
	Belanja Operasi	604.198.600	593.828.600	(10.370.000)	98,28
	Belanja Modal	31.000.000	25.933.000	(5.067.000)	83,65
	JUMLAH	635.198.600	619.761.600	(15.437.000)	97,57

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.68
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
I	Program Perekonmian Pembangunan	Presentase ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)	100	100	635.198.600 619.761.600 (97,57%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Pelaksanaan administrasi pembangunan	Presentase ketepatan waktu OPD dalam melaporkan realisasi fisik dan keuangan (%)	100	100	635.198.600 619.761.600 (97,57%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan fasilitasi penyusunan program pembangunan	Jenis dokumen perencanaan setda Jumlah aparatur yang memperoleh sertifikat pelatihan jasa konstruksi Jumlah badan usaha masuk sipjaki (data) Jumlah tukang bidang konstruksi yang bersertifikat ketrampilan kerja	2 dok 50 org 1 badan usaha 120 org	2 dok 50 org 1 badan usaha 124 org	228.920.900 218.718.400 (95,54%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan pengendalian dan evaluasi program kegiatan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembangunan	4 dok	4 dok	178.636.700 176.296.700 (98,69%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil monev pelaksanaan pembangunan dari bantuan gubernur Jumlah Perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan melalui website emonevbang.bre Bes.go.id	12 laporan 73 perangkat daerah	12 laporan 73 perangkat daerah	227.641.000 224.746.500 (98,73%)	Tercapai

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan mempunyai permasalahan kurangnya



- kesadaran tenaga terampil konstruksi untuk memperoleh Sertifikat Keterampilan Kerja dan belum dipahaminya ketentuan UU Jasa Konstruksi secara menyeluruh oleh pelaku jasa konstruksi dengan penyelesaian sosialisasi pentingnya Sertifikat Tenaga Terampil bagi calon peserta Uji Kompetensi dan menghadirkan Narasumber dan mencari materi sosialisasi yang menarik dan dibutuhkan pelaku jasa konstruksi.
2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan mempunyai permasalahan Kurangnya personil di Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Brebes, sehingga masih banyak kegiatan yang tidak termonitor secara langsung dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan monitoring ke semua titik kegiatan, karena banyaknya jumlah paket kegiatan konstruksi di kabupaten Brebes dengan penyelesaian mengusahakan penambahan personil dan mengusahakan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD penanggung jawab kegiatan.
 3. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai permasalahan tidak tertibnya admin untuk melakukan update data pada aplikasi dengan penyelesaian melakukan pembinaan pada admin emonev agar lebih tertib dalam melakukan update data pada aplikasi.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 100 persen sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target tercapai menunjukkan bahwa ada keterkaitan dan kesesuaian antara target kinerja program dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Tercapainya target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdampak pada tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan.





C.28 Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat), diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 25.747.726.580 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 23.347.988.565 atau 90,68% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Kesejahteraan Rakyat)				
	Belanja Operasi	25.587.737.580	23.187.999.565	2.399.738.015	90,62
	Belanja Modal	159.989.000	159.989.000	(0)	100
	JUMLAH	25.747.726.580	23.347.988.565	2.399.738.015	90,68

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH						
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Peningkatan Prestasi bidang keagamaan dalam ajang MTQ Nasional (Peringkat)	10,00	10,00	25.747.726.580 23.347.988.565 90,68	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Evaluasi Pelaaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatkan prestasi bidang keagamaan dalam ajang MTQ Nasional/Provinsi	10 peringkat	10 peringkat	25.747.726.580 23.347.988.565 90,68	Tercapai
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah aparatur, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pegiat keagamaan (Da)	31.500 Orang	22.321 Orang	25.603.415.480 23.210.968.165 (90,66%)	Terjadinya penurunan anggaran karena adanya beberapa kegiatan yang dibatalkan disebabkan pandemi Covid- 19
		Jumlah dokumen hasil evaluasi, verifikasi dan laporan hibah dan bansos keagamaan (dokumen)	17 dokumen	17 dokumen		
1.2	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Organisasi wanita dan perempuan yang mengikuti pembinaan pemberdayaan perempuan dan perlindungann anak (kelompok/Orang)	120 orang	120 orang	73.480.400 70.330.400 (96%)	Tercapai
		Jumlah dokumen mengenai pembinaan, evaluasi dan pemantauan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (dokumen)	17 dokumen	17 dokumen		
1.3	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah tim Pembina UKS yang mengikuti pembinaan tentang usaha- usaha kesehataan sekolah (tim)	18 tim	18 tim	70.830.700 66.690.000 (94%)	Tercapai
		Jumlah dokumen evaluasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan, kebudayaan,	17 dokumen	17 dokumen		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		kepemudaan, keolahragaan dan kesehatan (dokumen)				

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat) Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam pelaksanaan program program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut adalah :

1. Adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan seperti : Penyelenggaraan Ibadah Haji, Penyelenggaraan MTQ, Kegiatan Sunatan Masal, PHBI dan lainnya. Solusinya kedepan agar menerapkan protokol kesehatan dan koordinasi yang intensif dengan instansi lain.
2. Kurangnya komunikasi diantara organisasi perempuan disebabkan karena kesibukan masing-masing pengurusnya. Solusinya diharapkan terjalin komunikasi antar organisasi perempuan dengan cara sering mengadakan komunikasi dan rapat koordinasi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mencapai target yang ditetapkan sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target tercapai menunjukan bahwa ada keterkaitan dan kesesuaian antara target kinerja program dengan kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan. Tercapainya target kinerja kegiatan dan sub kegiatan berdampak pada tercapainya target kinerja program yang telah ditetapkan.





C.29 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.903.391.000 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.443.016.453 atau 84,14% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Hukum)	2.903.391.000	2.443.016.453	460.374.547	84,14

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
I	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	2.903.391.000 2.443.016.453 (84,14%)	-
1	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi hukum	-	-	-	2.903.391.000 2.443.016.453 (84,14%)	-
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan produk hukum daerah	Tercapainya jumlah ASN yang mengikuti bintek Tersedianya produk hukum	250 Org 7 NA	60 Org 4 NA	1.134.179.000 1.065.878.000 (93,97%)	Peningkatan pemahaman ASN terkait hukum



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		(perda,perbup, keputusan bupati, intruksi bupati dn MoU)				
1.2	Sub kegiatan fasilitasi bantuan hukum	Penyuluhan hukum Terlaksananya masyarakat dan perangkat desa yang memperoleh penyuluhan hukum dan HAM Terselesaikannya bantuan hukum kepada ASN dan masyarakat	10 keg 5 legal opinion 10 perkara	10 keg 5 legal opinion 10 perkara	1.086.378.000 1.000.004.004 (92,04%)	Peningkatan wawasan terkait penyuluhan hukum Peningkatan kesejahteraan masyarakat terkait adanya bantuan hukum
1.3	Sub kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Sosialisasi perda (17 kecamatan) Tersosialisasi peraturan hukum dan website	17 keg 4 paket	17 keg 4 paket	682.834.000 577.134.453 (84,52%)	Pentaan dokumentasi produk hukum dan informasi hukum

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Hukum) Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah pada program pemerintah dan kesejahteraan rakyat kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum mempunyai permasalahan yaitu berkurangnya peserta kegiatan karena pemberlakuan PPKM dan untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata – rata capaian kinerja pembangunan pada target Perumusan Peraturan Perundangan, Publikasi Dan Dokumentasi Produk Hukum mencapai rata-rata 100% dan nilai rata-rata capaian kinerja 95% menunjukkan bahwa semua kegiatan dilaksanakan.

Penghargaan yang diraih pada tingkat provinsi ataupun tingkat nasional di tahun 2021, antara lain :

- Peningkatan peringkat untuk penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tingkat nasional
- Peningkatan peringkat tingkat provinsi dalam penilaian jaringan data dan informasi hukum/JDIH



C.30 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada penyelenggaraan pemerintahan yaitu peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi), diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 990.472.000 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 916.829.949 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.73
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Organisasi)				
	Belanja Operasi	982.472.000	908.829.949	73.642.051	92,50
	Belanja Modal	8.000.000	8.000.000	0	100
	JUMLAH	990.472.000	916.829.949	73.642.051	92,56

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.74
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
SEKRETARIAT DAERAH						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU PATEN/KOTA	-	-	-	990.472.000 916.829.949 (92.56%)	-
1	Kegiatan Penataan Organisasi	-	-	-	990.472.000 916.829.949 (92.56%)	Tercapai Terciptanya tertib penataan kelembagaan OPD dan akuratnya informasi jabatan
1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan Analisis Jabatan	▪ Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan ▪ Penyusunan Evaluasi Jabatan ▪ Penyusunan Pedoman Tusi dan Struktur Organisasi Perangkat daerah ▪ Penyusunan Pedoman uraian tugas jabatan structural perangkat daerah ▪ Penyusunan raperda SOTK perangkat daerah ▪ Penyusunan standar kompetensi jabatan strktural perangkat daerah	3 dok 1 dok 1 raperbup 1 raperbup 1 raperda 1 dok	3 dok 1 dok 1 raperbup 1 raperbup 1 raperda 1 dok	321.890.000 302.662.581 (94,02%)	Tercapai Terciptanya tertib penataan analisis jabatan
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan public dan Tata laksana	▪ Fasilitasi inovasi pelayanan public	1 dok 1 dok 1 dok 3 dok	1 dok 1 dok 1 dok 3 dok	363.582.000 335.206.400 (92,20%)	Tercapai Terlaksananya SOP dan pelayanan public



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		- Monitoring dan evaluasi pelayanan public - Penyusunan dokumen SOP, SP dan SPM pelayanan public - Penyusunan ketatalaksanaan pemerintahan daerah	1 dok	1 dok		yang baik serta tercapainya ketatatlaksanaan yang tertib
1.3	Sub Kegiatan Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	- Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi - Fasilitasi peningkatan kinerja aparatur dan udaya kinerja - Fasilitasi penyusunan LKjIP Perangkat Daerah - Penyusunan indikator kinerja utama perjanjian kinerja instansi pemerintah - Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten	1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 1 dok	1 dok 1 dok 1 dok 2 dok 1 dok	305.000.000 278.960.968 (91,46%)	Tercapai Peningkatan tata nilai dan etos kerja ASN serta reformasi birokrasi yang baik

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) Kabupaten Brebes.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penataan Organisasi mempunyai permasalahan terkait kelembagaan dalam hal proses penyusunan Raperbup SOTK hasil dari Penyederhanaan Birokrasi, penyelesaian permasalahan tersebut yaitu telah dilaksanakannya Desk penyusunan Perbup SOTK ke OPD terkait.



Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 100% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan penataan organisasi juga mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa antara kegiatan dengan target kinerja telah sesuai.



C.31 Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 970.483.384 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 933.896.160 atau 96,23% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.75
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)				
	Belanja Operasi	970.483.384	933.896.160	36.587.224	96,23
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	970.483.384	933.896.160	36.587.224	96,23

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum sebagai berikut :

Tabel III.76
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Presentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil (%)	99	100	970.483.384 933.896.160 (96,23%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Layanan Pengadaan	Indikator presesntase proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang berhasil (%)	99	100	970.483.384 933.896.160 (96,23%)	Tercapai
1.1.	Sub Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Tim pelaksanaan kegiatan teknis pengelolaan barang dan jasa	3 keg	3 keg	505.288.504 478.002.924 (94,6%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Pemeliharaan server jaringan registrasi verifikasi pengguna LPSE	1 tahun	1 tahun	297.763.000 283.619.257 (95,25%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan pebinaan advokasi pengadaan barang dan jasa	Pengembangan SDM UKPBJ	1 tahun	1 tahun	167.431.880 165.472.927 (98,83%)	Tercapai

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

1. Program Layanan Pengadaan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai permasalahan yaitu Pengadaan barang/jasa dibawah Rp 50 Juta masih dilakukan dengan manual pada OPD, dengan penyelesaian kegiatan pengadaan barang dan jasa akan didorong dengan pemanfaatan Belanja Langsung Pengadaan (Belapengadaan) melalui marketplace.
2. Program Layanan Pengadaan Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai permasalahan yaitu Pengadaan Langsung barang/jasa (Rp 50 jt s/d Rp 200 Jt) masih dilakukan secara manual dengan penyelesaian didorong migrasi ke pengadaan Langsung secara elektronik (e-PL) dengan dilakukan pengadaan secara terpusat di UKPBJ



3. Program Layanan Pengadaan Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai permasalahan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa yang harus terpenuhi 20 Orang dengan kondisi jumlah yang ada 6 Orang dengan penyelesaian akan dipenuhi melalui CPNS 2021 sejumlah 6 Orang Jabaan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100 % menunjukkan bahwa indikator kinerja pada masing-masing sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, telah mencapai target.

Penghargaan yang didapat pada tingkat nasional atau tingkat provinsi di tahun 2021, yaitu :

1. Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat Provinsi Jawa Tengah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Brebes menempati peringkat 5 (lima) dari 36 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah;
2. Indeks tata kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, peringkat 3 (tiga) di Provinsi Jawa Tengah;
3. Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat Nasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Brebes menempati 35 (tiga puluh lima).





C.32 Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah (Bagian Umum) sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat Daerah (Bagian Umum), diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 22.994.615.520 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 21.959.851.330 atau 95,50% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat Daerah (Bagian Umum) T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat Daerah (Bag. Umum)	22.994.615.520	21.959.851.330	1.034.764.190	95,50

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat Daerah (Bagian Umum) dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum) T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						
SEKRETARIAT DAERAH						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporn pelaksanaan tersedia (%)	100	95	22.994.615.520 21.959.851.330 0 (95.50%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporn pelaksanaan tersedia (%)	100	95	5.002.600 4.761.000 (95.17%)	Belum Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi RKPD)	4 jenis	4 jenis	5.002.600 4.761.000 (95.17%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100	97	12.305.621.836 12.010.018.230 (97.60%)	Belum Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	115 orang	115 orang	12.295.570.13 6 11.999.988.73 0 (97.60%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis dokumen laporan akhir tahun	2 buah	2 buah	5.027.180 5.007.000 (99.60%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jenis dokumen laporan keuangan	2 buah	2 buah	5.024.520 5.022.500 (99.96%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang milik daerah dapat teridentifikasi	100 persen	100 persen	5.002.100 4.706.500 (94.09%)	Tercapai
		Kondisi asset yang tertib penatausahaannya	100 persen	100 persen		
3.1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jenis dokumen laporan aset (buah)	2 buah	2 buah	5.002.100 4.706.500 (94.09%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kehadiran pegawai (%)	100	95	86.281.000 82.250.000 (95.33%)	Belum Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	40 stel	40 stel	86.281.000 82.250.000 (95.33%)	Tercapai
		Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	60 stel	60 stel		
		Jumlah Pakaian korpri	11 stel	11 stel		
		Jumlah pakaian olahraga	8 stel	8 stel		

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100	103	2.263.804.190 2.334.966.877 (103.14%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	45 Jenis	45 Jenis	89.737.900 88.700.000 (98.84%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	40 Jenis	40 Jenis	69.998.600 60.400.120 (86.29%)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	30 jenis	30 Jenis	10.908.000 10.908.000 (100%)	Tercapai
5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	52 Jenis	52 Jenis	69.940.000 69.492.600 (99.36%)	Tercapai
5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia	8 Jenis	8 Jenis	94.698.000 94.697.500 (100%)	Tercapai
5.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis bahan makan minum tersedia	12 Jenis	12 Jenis	883.130.000 883.039.000 (99.99%)	Tercapai
5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis Laporan perjalanan dalam daerah tersedia	530 laporan	530 laporan	1.045.391.690 1.127.729.657 (107.88%)	Tercapai
		Jenis laporan perjalanan luar daerah tersedia	530 laporan	530 laporan		
6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100	96	2.248.198.900 2.171.385.700 (96.58%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional baru	17 unit	17 unit	1.750.000.000 1.711.000.000 (97.77%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis perlengkapan gedung kantor baru	3 Jenis	3 Jenis	498.198.900 460.385.700 (92.41%)	Tercapai
		Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas baru	2 Jenis	2 Jenis		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100	96	2.498.805.744 2.403.304.596 (96.18%)	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar terdistribusi	4250 buah	4250 buah	76.575.744 72.099.100 (94.15%)	Tercapai
		Jumlah surat masuk terdistribusi	4950 buah	4950 buah		
7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	6 Jenis	6 Jenis	973.752.000 923.798.656 (94.87%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2450 buah	2450 buah	113.060.000 113.035.000 (99.98%)	Tercapai
7.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi keuangan tersedia	35 orang	35 orang	1.335.418.000 1.294.371.840 (96.93%)	Tercapai
		Jumlah tenaga kebersihan tersedia	34 orang	34 orang		
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100	67	1.904.877.400 1.278.286.559 (67.11%)	Belum Tercapai
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	140 unit	140 unit	780.770.000 764.758.259 (97.95%)	Tercapai
8.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jenis Aset tetap lainnya terpelihara	4 jenis	4 Jenis	18.008.000 17.965.000 (99.76%)	Tercapai
8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 unit	2 unit	916.747.000 307.328.000 (33.52%)	Tercapai
		Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik	3 unit	3 unit		
8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik	150 unit	150 unit	189.352.400 188.235.300 (99.41%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
	lainnya	Jumlah rumah jabatan dalam kondisi baik	3 unit	3 unit		
9	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan tersedia (%)	100	99	770.813.000 766.494.768 (99.44%)	Tercapai
9.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	2 orang	2 orang	170.813.000 166.494.768 (97.47%)	Tercapai
9.2	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang terbayarkan dana penunjang operasionalnya	2 orang	2 orang	600.000.000 600.000.000 (100%)	Tercapai
10	Kegiatan Fasilitas Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor (%)	100	99	829.999.650 827.497.500 (99.70%)	Tercapai
10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	1 orang	1 orang	465.450.350 464.735.500 (99.85%)	Tercapai
10.2	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah pejabat yang terpenuhi kebutuhannya	1 orang	1 orang	230.665.100 229.815.000 (99.63%)	Tercapai
10.3	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga Sekretariat Daerah	Jumlah pegawai yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	200 orang	200 orang	133.884.200 132.947.000 (99.30%)	Tercapai
11	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan tersedia (%)	100	99	76.209.100 76.179.600 (99.96%)	Tercapai
11.1	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Dokumentasi rencana kegiatan keprotokolan	52 laporan	52 laporan	76.209.100 76.179.600 (99.96%)	Tercapai

Sumber data : Sekretariat Daerah (Bagian Umum) Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 pada Bagian Umum Sekretraiat Daerah mempunyai masalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yaitu Perjalanan



Dinas yang melebihi anggaran dengan penyelesaian kelebihan dana tersebut sudah dikembalikan.

Secara umum tidak terdapat kendala/permasalahan signifikan yang dihadapi bagian umum, hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang dikelola oleh bagian umum merupakan kegiatan yang bersifat rutin dan pelayanan.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target 95.5% menunjukkan bahwa antara kegiatan dengan target kinerja telah sesuai.



C.33 Sekretariat DPRD

Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat DPRD sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.64.818.027.048 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 59.501.187.957 atau 91,80% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.79
Anggaran dan Realisasi Belanja
Sekretariat DPRD T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Sekretariat DPRD				
	Belanja Operasi	64.150.041.048	58.946.328.182	(5.203.712.866)	91,89
	Belanja Modal	667.986.000	554.859.775	(113.126.225)	83,06
	JUMLAH	64.818.027.048	59.501.187.957	(5.316.839.091)	91,80

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini

Tabel III.80
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sekretariat DPRD T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD						
I	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Kinerja Penunjang Fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100%	89.35%	46,712,810,148 44,322,820,408 (94.88%)	-
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sekretariat DPRD	100%	100%	224,468,800 156,441,450 (69.69%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	127,137,400 108,716,170 (85.51%)	Tercapai : Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah - Realisasi Fisik 100%
1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	4 Lap	34,962,400 17,805,000 (50.93%)	Tercapai : Tersusunnya Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Realisasi Fisik 100% - Realisasi keuangan : Penyerapan tidak maksimal disebabkan karena penambahan anggaran di perubahan dengan kondisi waktu yang tidak mencukupi.
1.3	Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Lap	1 Lap	62,369,000 29,920,280 (47.97%)	Tercapai : Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Realisasi Fisik 100% - Realisasi keuangan : Penyerapan tidak maksimal disebabkan karena penambahan anggaran di perubahan dengan kondisi waktu yang tidak mencukupi.
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan PD	100%	98.78%	4,793,916,448 4,633,314,524 (96.65%)	
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	41 Orang	38 Orang	4,368,249,448 4,286,017,094 (98.12%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	200 Dok	285 Dok	210,952,400 181,981,100 (86.27%)	Tercapai : Terdapat 285 dokumen yang telah terverifikasi di Sekretariat DPRD
2.3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9 Dok	9 Dok	76,388,600 69,426,170 (90.89%)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.4	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	97,021,000 61,889,760 (63.79%)	Tercapai : Dokumen yang tersusun yaitu Laporan Keuangan Daerah Sekretariat DPRD - Realisasi Fisik 100% - Realisasi keuangan : Penyerapan tidak maksimal disebabkan karena penambahan anggaran diperubahan dengan kondisi waktu yang tidak mencukupi.
2.5	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Lap	1 Lap	34,795,000 28,750,400 (82.63%)	Tercapai : Dokumen yang dihasilkan yaitu: • Laporan Bulanan • Laporan Semester
2.6	Sub Kegiatan : Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dok	1 Dok	6,510,000 5,250,000 (80.65%)	Tercapai : Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran pada Sekretariat DPRD
3	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	1,310,026,000 1,161,424,840 (88.66%)	-
3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	7 Paket	139,750,000 135,630,000 (97.05%)	Tercapai : - Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya bagi karyawan Sekretariat DPRD - Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran
3.2	Sub Kegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	907,056,000 789,524,560 (87.04%)	Tercapai : Tersedianya data kepegawaian Sekretariat DPRD



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3.3	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	40 Orang	40 Orang	263,220,000 236,269,730 (89.76%)	Tercapai : Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan sesuai kegiatan yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah
4	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	3,421,025,900 3,019,774,207 (88.27%)	
4.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	22,479,200 21,539,400 (95.82%)	Tercapai : Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Sekretariat DPRD
4.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	60 Paket	60 Paket	133,958,100 121,010,650 (90.33%)	Tercapai : Tercapainya fasilitas peralatan dan perlengkapan yang baik untuk menunjang kegiatan kantor Sekretariat DPRD
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	441,697,400 417,296,100 (94.48%)	Tercapai : Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor Sekretariat DPRD
4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	574,694,000 459,119,000 (79.89%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran kurang maksimal karena faktor berkurangnya volume kegiatan rapat DPRD yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	350,133,700 219,542,400 (62.70%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran
4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perun- dang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	2 Dok	180,300,000 165,150,000 (91.60%)	Tercapai : Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
4.7	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	12 Lap	1,717,763,500 1,616,116,657 (94.08%)	Tercapai
5	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Baraang Milik Daerah (BMD) Baru yang Masuk Dalam BMD Sekretariat DPRD	100%	100%	611,116,000 512,034,775 (83.79%)	-
5.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	64,293,000 54,765,000 (85.18%)	Tercapai : - Realisasi fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran
5.2	Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	16 Unit	546,823,000 457,269,775 (83.62%)	Tercapai : - Realisasi fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran
6	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	66.67%	699,859,000 577,504,514 (82.52%)	-
6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap	-	10,731,000 0 (0.00%)	Tidak tercapai : Tidak terserapnya anggaran dikarenakan sarana dan prasarana penyimpanan arsip belum ada/ belum siap.
6.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Lap	5 Lap	490,008,000 394,367,514 (80.48%)	Tercapai : - Tercapainya kelancaran pemakaian telepon, air, listrik, dan langganan internet (hot spot) di lingkungan sekretariat DPRD - Kurangnya penyerapan anggaran



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						dikarenakan besaran tagihan penggunaan kebutuhan yang tidak bisa kita prediksi sebelumnya.
6.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Lap	11 Lap	199,120,000 Rp183,137,000 (91.97%)	Tercapai
7	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase BMD Sekretariat DPRD Kondisi rusak menjadi baik	100%	100%	1,316,053,000 789,922,945 (60.02%)	-
7.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	612,129,000 295,657,065 (48.30%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Kurangnya penyerapan anggaran karena faktor tingkat kerusakan kendaraan yang tidak bisa kita prediksi.
7.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	182,160,000 87,427,000 (47.99%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Kurangnya penyerapan anggaran karena faktor tingkat kerusakan kendaraan yang tidak bisa kita prediksi.
7.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	11,994,000 11,994,000 (100.00%)	Tercapai
7.4	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit	113,548,000 26,927,380 (23.71%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan sebagian peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia tidak terjadi kerusakan sehingga hanya membutuhkan perawatan.
7.5	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	25,000,000 23,700,000 (94.8%)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
7.6	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	371,222,000 344,217,500 (92.73%)	Tercapai : Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi rutin sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Sekretariat DPRD
8	Kegiatan : Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Administrasi Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	88.67%	34,304,145,000 33,471,403,153 (97.57%)	-
8.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	50 Orang	50 Orang	33,396,183,000 32,686,909,423 (97.88%)	Tercapai : Terbayarkan gaji dan tunjangan Anggota DPRD
8.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	350 Paket	350 Paket	841,362,000 741,488,730 (88.13%)	Tercapai : - Realisasi fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal disebabkan karena adanya sisa lelang.
8.3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	50 Orang	33 Orang	66,600,000 43,005,000 (64.57%)	Tercapai : Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan beberapa anggota DPRD tidak mengikuti kegiatan Medical Check Up.
9	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD	Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Administrasi (%)	100%	50%	32,200,000 1,000,000 (3.11%)	Rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan tidak terdapat tagihan dan pada sub kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD untuk pembelian ATK (HVS) sudah tercukupi oleh sub kegiatan lain.
9.1	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	2 Dok	2 Dok	31,000,000 1,000,000 (3.23%)	Tercapai : Dikarenakan tidak ada tagihan terkait iuran ADKASI.
9.2	Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	1 Lap	-	1,200,000 0 (0.00%)	Tidak Tercapai : dikarenakan pembelian ATK (HVS) sudah tercukupi pada Kegiatan Administrasi



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
II	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kepuasan atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Brebes	100%	100%	18,105,216,900 15,178,367,549 (83.83%)	-
1	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	100%	100%	3,902,208,600 3,127,232,325 (80.14%)	-
1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20 Dok	20 Dok	39,784,600 36,705,474 (92.26%)	Tercapai : - Tidak terealisasinya ATK 100% karena adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran
1.2	Sub Kegiatan : Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dok	20 Dok	11,680,000 2,650,000 (22.69%)	Tercapai : - Realisasi fisik 100% - Tidak terealisasinya ATK 100% karena besarnya belanja adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran - Tidak terealisasinya Perjalanan dinas karena kesalahan pembebanan pada kode akun belanja.
1.3	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dok	8 Dok	3,662,270,000 2,993,989,451 (80.11%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga jumlah peserta dibatasi.
1.4	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah	3 Dok	3 Dok	174,624,000 Rp150,000,000 (85.90%)	Tercapai : - Terserapnya pembuatan NA - Perjalanan Dinas untuk NA tidak

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Akademik yang Difasilitasi				dilaksanakan.
1.5	Sub Kegiatan : Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dok	1 Dok	13,850,000 3,887,400 (28.07%)	Tercapai : - Realisasi fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan kegiatan perjalanan dinas tidak dilaksanakan.
2	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran	Dokumen Kebijakan Anggaran	100%	100%	66,966,000 36,389,000 (54.34%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan : Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dok	1 Dok	6,396,000 5,661,000 (88.51%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Tersedianya dokumen KUA dan PPAS - Sedikitnya ruang waktu untuk pembahasan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal
2.2	Sub Kegiatan : Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dok	1 Dok	6,396,000 5,602,000 (87.59%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Tersedianya dokumen perubahan KUA dan PPAS - Sedikitnya ruang waktu untuk pembahasan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal
2.3	Sub Kegiatan : Pembahasan APBD	Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dok	1 Dok	15,396,000 5,794,000 (37.63%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Tersedianya dokumen APBD - Dikarenakan pelaksanaan jadwal pembahasan APBD tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
2.4	Sub Kegiatan : Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dok	1 Dok	15,396,000 6,679,000 (43.38%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Tersedianya dokumen APBD



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
						Perubahan - Dikarenakan pelaksanaan jadwal pembahasan APBD Perubahan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
2.5	Sub Kegiatan : Pembahasan Laporan Semester	Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	2 Dok	2 Dok	7,986,000 7,050,000 (88.29%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Sedikitnya ruang waktu untuk pembahasan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal
2.6	Sub Kegiatan : Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dok	1 Dok	15,396,000 5,602,500 (36.39%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Dikarenakan pelaksanaan jadwal pembahasan Pertanggungjawaban APBD tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.
3	Kegiatan : Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen Rekomendasi Pengawasan Bidang Pemerintahan	100%	100%	146,838,000 30,097,850 (20.50%)	Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.
3.1	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Lap	1 Lap	72,419,000 14,089,450 (19.46%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.
3.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan	1 Lap	1 Laporam	74,419,000 16,008,400 (21.51%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Bidang Infrastruktur				maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.
4	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD	100%	100%	2,941,038,800 2,321,388,857 (78.93%)	
4.1	Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Sertifikat BinteK yang Dimiliki Anggota DPRD (Reguler, Lemhanas, Gender, Fraksi)	50 Orang	50 Orang	1,820,092,800 1,462,957,757 (80.38%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya Refocusing anggaran pada kegiatan Bimbingan Teknis DPRD.
4.2	Sub Kegiatan : Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 Dok	1 Dok	515,000,000 505,400,000 (98.14%)	Tercapai : Realisasi Fisik 100%
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	7 Orang	252,000,000 203,500,000 (80.75%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	339,386,000 136,351,500 (40.18%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Fasilitas kegiatan pengamanan demo skala besar yang tidak bisa di prediksi, adapun situasi di Kabupaten Brebes tahun ini cukup kondusif, sehingga belanja pengamanan demo skala besar tidak dibelanjakan dan penyerapan anggaran kurang maksimal.
4.5	Sub Kegiatan : Penyusunan Program Kerja DPRD	Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dok	1 Dok	14,560,000 13,179,600 (90.52%)	Tercapai
5	Kegiatan : Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Dokumen Informasi Pembangunan Hasil Pokok-Pokok Pikiran	100%	100%	2,047,221,900 1,315,835,652 (64.27%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		DPRD (Analisis Data/ Bahan Dokumen Jaring ASMARA)				
5.1	Sub Kegiatan : Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Dokumen Hasil Kunjungan Kerja dalam Daerah	12 Dok	12 Dok	187,090,500 124,385,000 (66.48%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Terbatasnya alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
5.2	Sub Kegiatan : Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dok	2 Dok	113,504,000 93,478,852 (82.36%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Terbatasnya alokasi waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut
5.3	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Reses	Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dok	3 Dok	1,746,627,400 1,097,971,800 (62.86%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal karena berkurangnya jumlah lokus dan konstituen dari yang direncanakan
6	Kegiatan : Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Dokumen Kode Etik DPRD	100%	100%	33,264,600 19,767,000 (59.42%)	-
6.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	2 Dok	2 Dok	22,818,600 16,878,000 (73.97%)	Tercapai: - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.
6.2	Sub Kegiatan : Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Dok	1 Dok	10,446,000 2,889,000 (27.66%)	Tercapai : - Realisasi Fisik 100% - Penyerapan anggaran tidak maksimal dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi.
7	Kegiatan : Pembahasan Kerja Sama Daerah	Dokumen Kerjasama Antar Daerah	100%	100%	80,503,000 72,994,000 (90.67)	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
7.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dok	1 Dok	80,503,000 72,994,000 (90.67%)	Tercapai
8	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD	Presentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	100%	8,887,176,000 8,254,662,865 (92.88%)	-
8.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dok	12 Dok	8,760,340,000 8,163,035,865 (93.18%)	Tercapai
8.2	Sub Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Lap	1 Lap	123,452.500 88,757,000 (71.90%)	Tercapai : - Penyerapan anggaran kegiatan Lembur dan Makan Minum Lembur tidak dilaksanakan secara maksimal.
8.3	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dok	12 Dok	3,383,500 2,870,000 (84.82%)	Tercapai : - Penyerapan anggaran yang kurang maksimal dikarenakan tidak teralisasinya ATK 100% karena adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran

Sumber data : Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan unsur penunjang Urusan Pemerintahan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tidak tercapai dikarenakan sarana dan prasarana penyimpanan arsip belum ada/ belum siap.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Layanan Administrasi DPRD** dengan sub kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan



DPRD hanya terealisasi sebesar 3,23% dikarenakan tidak terdapat tagihan dari Asosiasi Dewan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

3. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Layanan Administrasi DPRD** dengan sub kegiatan Fasilitas Fraksi DPRD tidak terdapat penyerapan anggaran dikarenakan rincian belanja pada sub kegiatan ini yaitu pembelian ATK (HVS) sudah tercukupi pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
4. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** dengan sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda terdapat permasalahan Tidak terealisasinya Perjalanan dinas karena kesalahan pembebanan pada kode akun belanja.
5. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** dengan sub kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD terdapat permasalahan yaitu kurang maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan tidak dilaksanakannya perjalanan dinas. Tidak teralisasinya ATK 100% karena adanya perbedaan indeks satuan harga yang terlalu jauh dengan harga pasaran.
6. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum pada Tahun Anggaran 2021 serapannya rendah dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi. Permasalahan ini dapat diselesaikan / diatasi jika Wabah Covid 19 dapat teratasi.
7. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan** dan Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur pada Tahun Anggaran 2021 sama halnya dengan kondisi sub bagian tersebut diatas penyerapan hanya mencapai 21,51% hal ini juga oleh karena adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi. Permasalahan ini dapat diselesaikan / diatasi jika Wabah Covid 19 dapat teratasi.
8. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD** dan Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD Tahun Anggaran 2021 Tahun Anggaran 2021 serapannya rendah dikarenakan adanya kebijakan dari Pemkab (PPKM) sehingga kegiatan kunjungan kerja dibatasi. Permasalahan ini dapat diselesaikan / diatasi jika Wabah Covid 19 dapat teratasi.



Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mencapai 94.98% dan realisasi fisik yang rata-rata sudah mencapai 89.35%.

Pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD capaian kinerjanya menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target knierja yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD telah mencapai 84.24% dan reealisasi fisik yang sudah mencapai 100%.





C.34 Kecamatan Brebes

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Brebes dan 5 Kelurahan sebagai unsur kewilayahan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Brebes diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 10.984.620.679 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 10.317.168.019 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.81
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Brebes dan 5 Kelurahan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Brebes dan 5 Kelurahan				
	Belanja Operasi	7.873.614.879	7.370.726.019	(502.888.860)	93,61
	Belanja Modal	3.111.005.800	2.946.442.000	(164.563.800)	94,71
	JUMLAH	10.984.620.679	10.317.168.019	(667.452.660)	93,92

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Brebes dan 5 kelurahan dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.82
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Brebes T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN BREBES DAN 5 KELRAHAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97 %	97 %	39.682.000 24.304.000 (61.24%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang di limpahkan	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan	97%	97%	39.682.000 24,304,000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	kepada camat	pelimpahan - Terpenuhi target pendapatan retribusi daerah	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000	(61.24%)	
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	- Jumlah peizinan, rekomendasi yang di keluarkan (penggunaan ruas jalan, IMB, SKW, surat pindah) - pelayanan rekomendasi (SKTM, skck, santunan kematian, santuna anak yatim dll)	300 buah 100 dok	300 buah 100 dok	6,992,000 5,244,000 (75%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	- Jumlah rekomendasi (SKTM, Proposal bantuan hibah, bansos, dispenisasi surat nikah, surat pengantar SKCK), - laporan data penduduk - Surat Keterangan Kematian - Taret pelunasan PBB	300 dok 100 dok 200 dok 2.700.000.00 0	300 dok 100 dok 200 dok 2.945.359. 742	28,590,000 16,760,000 (58.62%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang di limpahkan	- Data organisasi keagamaan, Kepemudaan, pendidikan formal & non formal - Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) - jumlah bantuan paket sembako - jumlah masyarakat/ lembaga yang layak menerima bantuan social dan keagamaan - laporan kejadian bencana alam - permohonan penyaluran bantuan bencana alam, bencana social	23 dok 3 dok 100 paket 23 dok 10 dok 10 dok	23 dok 3 dok 100 paket 23 dok 10 dok 10 dok	4,100,000 2,300,000 (56.09%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terlaksananya	97%	97%	3.062.146.471 2.879.969.900 (94.05%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan				
1	Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terlaksananya Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97%	97%	21.394.000 9,940,000 (46.46%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan pembangunan di desa	- Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan Desa dan Kecamatan - Terpenuhinya Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan Desa dan Kecamatan	24 dok	24 dok	21,394,000 9,940,000 (46.46%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi kegiatan pemberdayaan Kelurahan	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terlaksananya program peningkatan SDM dan peningkatan masyarakat	97% 5 keg	97% 5 keg	3.040.752.471 2,870,029,900 (94.38%)	Tercapai
2.1	Sub. Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 dok	1 dok	48,295,000 44,350,000 (91.83%)	Tercapai
2.2	Sub. Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	- Pembangunan sarana prasarana kelurahan, jalan desa, jalan khusus, drainase & gedung pertemuan - Terlaksananya Pembangunan sarana prasarana kelurahan, jalan desa, jalan khusus, drainase & gedung pertemuan	8 keg	8 keg	2,483,307,871 2,323,339,000 (93.55%)	Tercapai
2.3	Sub. Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	- Peningkatan SDM dan peningkatan masyarakat - Terlaksananya peningkatan SDM dan peningkatan masy	5 keg	5 keg	509,149,600 502,340,900 (98.66%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terpenuhi anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor	97% 2 orang	97% 2 orang	200.890.000 186.950.000 (93.06%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terpenuhi anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor	97% 2 orang	97% 2 orang	200.890.000 186,950,000 (93.06%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	- Jumlah anggota Linmas yang dibina Pol PP - jumlah anggota Pol PP yang terbina - jumlah Pol PP yang melakukan pengamanan kantor - jumlah bencana yang tertangani - jumlah patroli wilayah yang di laksanakan	100 orang 5 orang 2 orang 5 keg 24 patroli	100 orang 5 orang 2 orang 5 keg 24 patroli	200,890,000 186,950,000 (93.06%)	Tercapai
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	- Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan - Terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97%	97%	28.954.000 25.722.000 (88.83%)	Tercapai
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	- Jenis dokumen administrasi pemerintahan desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades - Tersusunya dokumen administrasi pemerintahan desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades) dengan baik	6 dok	6 dok	28.954.000 25,722,000 (88.83%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi pengelolaan	- Jenis dokumen laporan aset	2 dok	2 dok	6,200,000	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	kelurahan dan desa - jenis dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (ADD, bantuan keuangan, Dana Desa) Terpenuhi Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa, jenis dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (ADD, bantuan keuangan, Dana Desa)	3 dok	3 dok	6,200,000 (100%)	
1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	- Jenis dokumen administrasi pemerintahan desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades) Terpenuhi Jenis dokumen administrasi pemerintahan desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)	6 dok	6 dok	2,700,000 2,700,000 (100%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	- Laporan kegiatan lembaga masyarakat dan PKK - Terpenuhi Laporan kegiatan lembaga masyarakat dan PKK	23 dok	23 dok	20,054,000 16,822,000 (83.88%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	- Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia - Terpenuhi dokumen perencanaan dan monitoring	100%	100%	2.445.300.975 2.201.175.235 (90.01%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	- Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	3 dok	3 dok	32.800.000 24,512,000 (74.73%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Perangkat Daerah	- Terpenuhiya dokumen perencanaan dan monitoring				
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	- Jenis dokumen perencanaan dan monitoring - Tersedianya 3 jenis dokumen dan terlaksananya monitoring	3 dok	3 dok	28.832.000 20,544,000 (71.25%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD	- Jenis dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi RKPD) - Tersedianya 3 jenis dokumen Lakip, Sakip dan Evaluasi RKPD	3 dok sakip, lakip, RKPD	3 dok sakip, lakip, RKPD	3,968,000 3,968,000 (100%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Jenis dokumen laporan akhir tahun - Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun yang tepat waktu	1 dok	1 dok	6.272.000 6,272,000 (100%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun OPD	Jenis dokumen laporan akhir tahun - Tersusunnya dokumen laporan akhir tahun yang tepat waktu	1 dok	1 dok	6,272,000 6,272,000 (100%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	- Persentase kehadiran pegawai - Tercapainya kehadiran pegawai secara maksimal	100%	100%	43.900.000 43,900,000 (100%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	- Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu - Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	44 stel	44 stel	43,900,000 43,900,000 (100%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Jenis media publikasi dan promosi (pameran & karnaval) - Terpenuhiya media publikasi dan promosi (pameran)	0	0	0	-
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor - Terpenuhiya alat tulis kantor dg baik	55 jenis ATK	55 jenis ATK	617.303.046 540,769,786 (87.60%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Jenis komponen listrik/penerangan - Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	22 Jenis	22 Jenis	31,995,500 27,652,600 (86.42%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Jenis alat tulis kantor tersedia - Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	55 jenis ATK 8 jenis	55 jenis ATK 8 jenis	228,232,904 214,331,536 (93.90%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	- Jenis Peralatan rumah tangga - jenis peralatan rumah tangga	22 jenis 5 jenis	22 jenis 5 jenis	66,358,800 60,470,000 (91.12%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor	- Jenis bahan makan, minum tersedia - Tersedianya bahan makan dan minum kantor	3 jenis	3 jenis	65,818,000 60,560,000 (92.01%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan Penggadaan	- Jenis baragn cetakan dan penggandaan - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	3 jenis	3 jenis	68,727,842 55,510,650 (80.76%)	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jenis bahan bacaan dan perundang- undangan - Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	1 jenis	1 jenis	12,720,000 12,470,000 (98.03%)	Tercapai
4.7	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Jenis bahan makan, minum - Jenis cinderamata yang di berikan - Tersedianya bahan makan, minum dan cinderamata	3 jenis 2 jenis	3 jenis 2 jenis	113,331,000 97,615,000 (86.13%)	Tercapai
4.8	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi OPD	- Jumlah laporan perjalanan dalam daerah - Jumlah laporan perjalanan luar daerah - Terpenuhinya laporan perjalanan dalam daerah dan luardaerah	12 laporan 10 laporan	12 laporan 10 laporan	30,119,000 12,160,000 (40.37%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Jumlah tenaga administrasi - Tersedianya tenaga administrasi	8 orang	8 orang	1.067.906.000 942,361,119 (88.24%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah surat keluar terdistribusi - Jumlah surat masuk terdistribusi	300 buah 300 buah	300 buah 300 buah	20,350,000 18,580,000 (91.30%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	- Jenis tagihan di bayar dalam 12 bulan - Terbayarkannya semua tagihan dalam waktu 12 bulan	4 jenis	4 jenis	207,776,000 117,686,119 (56.64%)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah tenaga administrasi tersedia - Jumlah tenaga kebersihan tersedia	8 orang 1 orang	8 orang 1 orang	839,780,000 806,095,000 (95.98%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	- Persentase Aset dalam kondisi baik - Terpeliharanya peralatan kerja	100% 50 unit	100% 50 unit	677.119.929 643,360,330 (95.01%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	- Jumlah kendaraan dinas/operasional mobil jabatan dalam kondisi baik - Jumlah mobil jabatan dalam kondisi baik	8 unit 1 unit	8 unit 1 unit	85,598,000 66,881,330 (78.13%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- Jumlah peralatan kerja diperbaiki - Terlaksananya perbaikan pada peralatan kerja	50 unit	50 unit	48,742,000 37,990,000 (77.94%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya	- Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik - Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik. - Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik - Jumlah rumah dinas rusak menjadi baik	2 unit 2 unit 1 unit 1 unit	2 unit 2 unit 1 unit 1 unit	542,779,929 538,489,000 (99.20%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Brebes yaitu pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa mempunyai permasalahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa kurang antusias dari masyarakat dengan penyelsaian pada setiap musyawarah perencanaan pembangunan di setiap desa selalu melibatkan semua unsur elemen masyarakat sehingga dalam musyawarah tersebut adanya keterwakilan dari masing-masing unsur masyarkat.

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 90 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100 % menunjukan bahwa target program pembangunan dengan target kinerja hampir selaras.



C.35 Kecamatan Jatibarang

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Jatibarang sebagai unsur kewilayahan Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Jatibarang diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.951.268.521 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.876.942.878 atau 97,48% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.83
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Jatibarang T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Jatibarang				
	Belanja Operasi	2.885.640.521	2.812.197.878	(73.442.643)	97,45
	Belanja Modal	65.628.000	64.745.000	(883.000)	98,65
	JUMLAH	2.951.268.521	2.876.942.878	(74.325.643)	97,48

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Jatibarang dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.85
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Jatibarang T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN JATIBARANG						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Peningkatan IKM paten	78%	75,6%	84.900.000	Belum Tercapai
		persentase pelunasan PBB	88%	79,9%	84.600.000 (100%)	Belum Tercapai
		ADD dan bantuan keuangan (%)	100%	100%		Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PKL yang dibangun dan tertibkan serta	250 Orang	0 Orang	84.900.000 84.600.000	Tidak Tercapai karena



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Sesuai Penugasan Kepala Daerah	inventarisasi usaha tidak berizin terpenuhi			(100%)	Pandemic
		Jumlah penanganan covid 19 di wilayah kecamatan	309 Orang/ Kegiatan	309 Orang/ Kegiatan		Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor	6 Orang	6 Orang		Tercapai
1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah anggota linmas yang dibina Satpol PP	0 Orang	0 Orang		Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor	6 Orang	6 Orang		Kegiatan lain tidak tercapai karena refocusing
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina	623 Orang	0 Orang		
		Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan	12 Patroli	0 Orang		
		Jumlah PKL yang dibina dan diterbitkan	250 Orang	0 Orang		
		Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berizin	10 Dokumen	0 Dokumen		
		Jumlah penanganan covid 19 di wilayah kecamatan	309 orang / kegiatan	309 orang / kegiatan	61.800.000 61.800.000 (100%)	Penanganan Covid 19
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melakukan administrasi serta pengelolaan keuangan yang tertib dan baik	100%	100%	24.210.000 22.760.000 (94%)	Tercapai
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian terpenuhi	23 dokumen	23 dokumen	24.210.000 22.760.000 (94%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jenis dokumen administrasi pemerintahan desa (RPJMDes, RKPDDes, RAPBDes, APBDes, LKPDDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)	66 dokumen	66 dokumen	15.880.000 14.480.000 (91%)	Tercapai
1.2	Fasilitasi Penyusunan Program Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan kegiatan lembaga masyarakat dan PKK	23 dokumen	23 dokumen	8.330.000 8.280.000 (99%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	2.842.158.521 2.769.582.878 97%	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring terpenuhi	3 buah	3 buah	4.599.920 4.070.000 (88%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen (lakip, sakis, evaluasi RKPD)	3 jenis	3 jenis	2.630.000 2.630.000 (100%)	Tercapai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan monitoring	3 buah	3 buah	1.969.920 1.440.000 (73 %)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis dokumen laporan keuangan dan gaji terpenuhi	25 orang	22 orang	2.257.247.301 2.214.738.821 (98 %)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji/ gaji terbayarkan	25 orang	22 orang	2.257.247.301 2.214.738.821 (98 %)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya penerangan listrik, pemeliharaan AC, makan minum, cetak dan penggandaan, koran, perjalanan	13 kegiatan	13 kegiatan	220.487.800 210.840.000 (96%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		dinas luar daerah dan dalam daerah terpenuhi				
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	3 jenis	3 jenis	9.774.000 9.720.000 (99 %)	Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	25 unit	25 unit	81.404.000 80.852.000 (99%)	Tercapai
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan minum tersedia	5 jenis	5 jenis	66.830.000 66.495.000 (99%)	Tercapai
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	4 jenis	4 jenis	9.999.800 9.973.000 (99%)	Tercapai
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan perundang- undangan tersedia	1 jenis	1 jenis	3.480.000 3.300.000 (94%)	Tercapai
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan luar daerah	5 laporan	5 laporan	49.000.000 40.500.000 (83%)	Jumlah laporan perjalanan Keluar daerah 0 laporan Jumlah laporan perjalanan Dalam daerah 5 lapoan
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	100%	100%	65.628.000 64.745.000 (99%)	Tercapai
4.1	Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur baru	1 janis	1 jenis	19.845.000 19.845.000 (100%)	Tercapai
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	3 unit	45.783.000 44.900.000 (98%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya belanja materai, tabung gas, kebersihan, pembayaran	13 kegiatan	13 kegiatan	230.945.000 216.092.057 (94%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		listrik, PDAM, internet, tenaga wiyabakti terpenuhi				
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk terdistribusi	480 buah (materai 10.000) 565 buah (materai 3000)	575 buah (materai 10.000) 50 buah (materai 3000)	6.495.000 6.450.000 (99%)	Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	1 tahun	1 tahun	45.060.000 42.678.057 (95%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	10 orang	10 orang	179.390.000 166.964.000 (93%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya belanja pelumas, BBM, pembayaran STNK, pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas terpenuhi	6 kegiatan	6 kegiatan	63.250.500 59.097.000 93%	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil jabatan dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	33.504.000 30.106.000 (89%)	Tercapai
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung knaotr dan Bangunan Lainnya	Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	29.746.500 28.991.000 (97%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Jatibarang pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, hanya beberapa tidak tercapai karena adanya refocusing anggaran. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.

Analisis Kesesuaian Capaian : Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan



mencapai Rp. 2.842.158.521 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 2.769.582.878 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 97 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penyelenggraan Urusan Pemerintahan Umum belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 84.900.000 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 84.600.000 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 100 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 24.210.000 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 22.760.000 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 94 %.



C.36 Kecamatan Wanasari

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Wanasari sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.673.279.987 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.543.132.184 atau 95,13% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.85
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Wanasari T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Wanasari				
	Belanja Operasi	2.359.055.287	2.234.955.184	(124.100.103)	94,74
	Belanja Modal	314.224.700	308.177.000	(6.047.700)	98,08
	JUMLAH	2.673.279.987	2.543.132.184	(130.147.803)	95,13

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Wanasari dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.86
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Wanasari T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN WANASARI						
I	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan administrasi dan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik	100 %	100 %	30.006.520 21,962.100 (73,19 %)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dokumen usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan	100 %	100 %	30.006.520 21,962.100 (73,19 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah program/ usul yang terserap dalam musrenbang Kecamatan	1 dok	1 dok	30.006.520 21.962.100 (73,19 %)	Tercapai
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100 %	100 %	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi penerapan dan penegakan Qanum dan peraturan Kepala Daerah	Jumlah dokumen Koordinasi upaya penegakan Perda dan Perkada	100 %	100 %	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
1.1	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau kepolisian Negara republik Indonesia	Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan	100 %	100 %	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
III.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	100 %	100 %	55.500.000 53.989.460 (97,27 %)	Tercapai
1.	Kegiatan Fasilitasi , rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	100 %	100 %	55.500.000 53.989.460 (97,27 %)	Tercapai
1.1	Fasilitasi pengelola keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah Dokumen rekomendasi pelaksanaan bantuan keuangan desa	20 dok	20 dok	2.700.000 2.580.000 (95,55 %)	Tercapai
1.2	Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah laporan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dan PKK	25 dok	25 dok	52.800.000 51.409.460 (97,36 %)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase kehadiran pegawai	100 %	96,66%	784.872.758 739.276.707 (94,19 %)	Belum Tercapai
1	Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi dan kapasitas ASN	100 %	100 %	6.300.000 6.300.000 (100 %)	Tercapai
1.1	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	Jumlah pakaian olah raga yang dilaksanakan	42 stel	42 stel	6.300.000 6.300.000 (100 %)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
2.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan perkan-toran dengan baik	100 %	99 %	115.569.858 102.574.701 (88,75 %)	Tercapai
2.1	Sub kegiatan Penyediaan komponen instalasimlistrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik	15 jenis	15 jenis	416.000 415.000 (99,75 %)	Tercapai
2.2	Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan perlengkapan kantor	35 jenis ATK	35 jenis ATK	17.087.298 14.658.500 (85,78 %)	Tercapai
2.3	Sub kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga	2 jenis	2 jenis	3.951.000 3.378.000 (85,49%)	Tercapai
2.4	Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis makan minum tersedia	3 jenis	3 jenis	75.020.000 74.908.000 (99,85 %)	Tercapai
2.5	Sub kegiatan Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	2 jenis	6.155.560 5.499.7700 (89,3 %)	Tercapai
2.6	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultase SKPD	2 jenis	1 jenis	12.940.000 3.715.501 (28,71 %)	Tidak tercapai Perjalanan dinas ke luar daerah karena tidak dilaksanakan
3	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase aset dalam keadaan baik	100 %	100 %	14.224.700 12.643.000 (88,88 %)	
3.1	Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	4 jenis	4 jenis	14.224.700 12.643.000 (88,88 %)	Tercapai
4	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100 %	100 %	308.240.000 283.537.762 (91,98 %)	
4.1	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis)	4 jenis tagihan	4 jenis tagihan	47.880.000 35.468.119 (74,07 %)	Tercapai
4.2	Penyediaan jasa penunjang pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga harian lepas SKPD Jumlah iuran jaminan asuransi terbayar	15 orang 2 jenis asuransi	15 orang 2 jenis asuransi	260.360.000 248.069.643 (95,27 %)	Tercapai
5.	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase BMD SKPD dalam keadaan baik	100 %	100 %	340.538.200 334.221.244 (98,14 %)	Tercapai
5.1	Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan oajak	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	11 sepeda motor	11 sepeda motor roda dua	27.920.000 26.478.244 (94,83 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANG AN
	kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah mobil dalam keadaan baik	roda dua 1 unit mobil dinas	1 unit mobil dinas		
5.2	Sub kegiatan Pemeliharaan mebeler	Jumlah mebeler dalam kondisi baik	3 jenis mebeler	3 jenis mebeler	2.331.000 2.285.000 (98,02 %)	Tercapai
5.3	Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	3 jenis	3 jenis	6.500.000 6.300.000 (96,92 %)	Tercapai
5.4	Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung rusak dalam keadaan baik Jumlah gedung kantor yang direhab	1 unit 1 unit	1 unit 1 unit	303.787.200 299.158.000 (98,47 %)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ada 5, 14 sub pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD ke luar daerah tidak tercapai karena ada kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah (Makassar) yang tidak dilaksanakan sehingga anggaran kembali ke kasda sebagai silpa
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan ada 1 dan 2 sub kegiatan tidak ada realisasi atau tercapai karena anggaran difocusing guna kegiatan penanganan covid-19.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan kegiatan ada 1 dan ada 2 sub kegiatan dan pada sub kegiatan peningkatan efektifitas peningkatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan terkena refocusing guna penanganan covid-19

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99,16 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100 % menunjukkan bahwa anggaran untuk Kecamatan Wanasari Tahun 2021 sebesar Rp.895.379.278,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.840.228.267,- dengan persentase 93,84 % dan dilihat dari persentase anggaran yang mencapai 93,84 % untuk tahun anggaran 2021 rata-rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Wanasari.



C.37 Kecamatan Songgom

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Songgom sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Songgom diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.288.834.502 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.175.521.741 atau 95,09 % secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.87
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Songgom T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Songgom				
	Belanja Operasi	2.288.834.502	2.175.521.741	(113.312.761)	95,09
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	2.288.834.502	2.175.521.741	(113.312.761)	95,09

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Songgom dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.88
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Songgom T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SONGGOM						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Presentase Kehadiran Pegawai (%)	100%	95,09%	2.287.834.502 2.175.521.741 (95,09%)	Tercapai
1	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jenis Dok LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD	4 jenis	4 jenis	1.776.171.792 1.692.853.086 (95,31%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1.776.171.792 1.692.853.086 (95,31%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Tambahan Penghasilan Iuran Asuransi Kesehatan Iuran Asuransi Ketenagakerjaan Pembulatan gaji Tunjangan Beras Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Jabatan Tunjangan Keluarga Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun		
2	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan kualitas pelayanan dasar	36 stel	36 stel	10.800.000 10.800.000 (100%)	Tercapai
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari tertentu	36 stel	36 stel	10.800.000 10.800.000 (100%)	Tercapai
3	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	2 keg	2 keg	209.312.710 192.447.000 (91,94%)	Tercapai
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan	700 jenis	700 jenis	5.584.400 5.582.500 (99,97%)	Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat tulis kantor Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki Jumlah alat kebersihan tersedia	50 jenis 1 unit 19 jenis	50 jenis 1 unit 19 jenis	35.857.050 35.814.500 (99,88%)	Tercapai
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan dan minum tersedia	8 jenis	8 jenis	39.250.000 39.250.000 (100%)	Tercapai
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	3000 jenis	3000 jenis	12.729.260 12.720.000 (99,93%)	Tercapai
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	2 jenis	0	1.000.000 0 (0%)	Belum Tercapai belanja langganan koran dikarenakan terjadi defisit anggaran setelah



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
						dilakukan perubahan anggaran dengan penyelesaian dilakukan penambahan anggaran pada tahun anggaran berikutnya
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum tersedia	1 tahun	1 tahun	22.780.000 18.950.000 (83,19%)	Tercapai
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Perjalanan Luas Daerah	5 lap	5 lap	92.112.000 80.130.000 (86,99%)	Tercapai
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis dok LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Operasional	6 dok	6 dok	230.143.000 219.716.412 (95,47%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Keluar Surat Masuk	600 buah 600 buah	600 buah 600 buah	6.000.000 6.000.000 (100%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	5 jenis	5 jenis	42.423.000 38.156.412 (89,94%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Dok Akhir Tahun Jenis Dok LAKIP, SAKIP, Evaluasi RKPD Jumlah Tenaga Administrasi tersedia	4 jenis 4 jenis 11 orang	4 jenis 4 jenis 11 orang	181.720.000 175.560.000 (96,61%)	Tercapai
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan sarana dan prasarana operasional	2 keg	2 keg	62.407.000 59.705.243 (95,67%)	Tercapai
5.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik Jenis mobil diproses surat perijinannya Jumlah motor diproses surat perijinannya	7 unit 1 unit 6 unit	7 unit 1 unit 6 unit	Rp32.501.500 29.965.243 (92,20%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	1 unit	1 unit	9.385.000 9.250.000 (98,56%)	Tercapai
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Peralatan Gedung kantor Baru Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik Jumlah mobil dinas dalam kondisi baik	1 jenis 1 unit 1 unit	1 jenis 1 unit 1 unit	20.520.000 20.490.000 (99,85%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.

Selama pelaksanaan di tahun anggaran 2021 ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut yaitu pada Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan tidak terealisasinya sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yaitu belanja langganan koran dikarenakan terjadi defisit anggaran setelah dilakukan perubahan anggaran dengan penyelesaian dilakukan penambahan anggaran pada tahun anggaran berikutnya.

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp.2.287.834.502,- nilai realisasi belanja mencapai Rp. 2.175.521.741,- sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 95,09 %.



C.38 Kecamatan Bulakamba

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Bulakamba sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Bulakamba diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.784.162.985 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.674.257.367 atau 96,05% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.89
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Bulakamba T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Bulakamba				
	Belanja Operasi	2.395.453.465	2.291.146.777	(104.306.688)	95,65
	Belanja Modal	388.709.520	383.110.590	(5.598.930)	98,56
	JUMLAH	2.784.162.985	2.674.257.367	(109.905.618)	96,05

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bulakamba dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.90
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Bulakamba T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BULAKAMBA						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97	22.792.800 18.630.000 (82%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100	100	22.792.800 18.630.000 (82%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW, surat pindah)	5 Jenis	5 Jenis	180.000 0 (0%)	Tercapai
		Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum	25 Keramaian	19 Keramaian		
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos)	4 Jenis	4 Jenis	18.930.000 16.200.000 (86%)	Tercapai
		Surat keterangan kematian	500 Surat	242 Surat		
		Target pelunasan PBB	Rp. 4,624,386,05 7	Rp. 3,320,604,9 38		
		Target pendapatan retribusi daerah	Rp. 2,500,000	Rp. 2,832,900		
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (19 dokumen)	19 Dok	19 Dok	3.682.800 2.430.000 (66%)	Tercapai
		Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi) (19 Dokumen)	19 Dok	19 Dok		
		Jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (19 Dokumen)	19 Dok	19 Dok		
		Laporan kejadian bencana alam (2 Dokumen)	2 Dok	2 Dok		
		Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (12 Dokumen)	12 Dok	12 Dok		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	-	Refocusing



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-	-	-	Refocusing
2.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	Refocusing
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97	152.100.000 152.100.000 (100%)	Tercapai
3	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	152.100.000 152.100.000 (100%)	Tercapai
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp	0 Orang	0 Orang	150.200.000 150.200.000 (100%)	Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang malakukan pengamanan kantor	8 Orang	8 Orang		
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina	8 Orang	8 Orang		
		Jumlah bencana yang tertangani	2 Kegiatan	2 Kegiatan		
3.2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (%)	100	100	1.900.000 1.900.000 (100%)	Tercapai
3.3	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan	3 Kali	3 Kali	1.900.000	Tercapai
		Jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan	200 Orang	200 Orang	1.900.000 (100%)	Perubahan indikator
		Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin	100 Pengusaha	0 Pengusaha		
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97	26.700.000 26.700.000 (100%)	Tercapai
4	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	26.700.000 26.700.000 (100%)	Tercapai
4.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan	Jenis dokumen laporan aset	19 Dok	19 Dok	20.700.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Pendayagunaan Aset Desa	kelurahan dan desa Jenis dokumen laporan pelaksanaan Kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa)	19 Dok	19 Dok	20.700.000 (100%)	
4.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	-	-	Refocusin g
4.3	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK	4 Dok	4 Dok	6.000.000 6.000.000 (100%)	Tercapai
4.4	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	Refocusin g
V	PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Presentasedokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100	100	2.582.570.185 2.478.416.115 (96%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring	4 Jenis	4 Jenis	1.510.000 1.510.000 (100%)	Tercapai
5.1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (lakip, sakip,evaluasi rkpd)	3 Jenis	3 Jenis	1510000 1510000 (100%)	Tercapai
6	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi keuangan dikelola dengan baik (%)	100	100	1.851.608.385 1.769.708.918 (96%)	Tercapai
6.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai terbayar kan gaji dan tunjangan nya	18 Orang	18 Orang	1.844.378.385 1.762.483.918 (95,56%)	Tercapai
6.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jenis Dokumen Laporan Keuangan	2 Jenis	2 Jenis	2.420.000 2.420.000 (100%)	Tercapai
6.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	2 Jenis	2 Jenis	2.390.000 2.385.000 (99,79%)	Tercapai

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jenis Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	12 Buah	12 Buah	2.420.000 2.420.000 (100%)	Tercapai
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	12.000.000 12.000.000 (100%)	Tercapai
7.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	40 Stel	40 Stel	12.000.000 12.000.000 (100%)	Tercapai
8	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	201.411.580 189.633.290 (94%)	Tercapai
8.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik / Penerangan	9 Jenis	9 Jenis	5.731.900 5.725.300 (99,88%)	Tercapai
8.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Kantor Tersedia	38 Jenis	38 Jenis	164.786.800	Tercapai
		Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	22 Jenis	22 Jenis	162.739.990 (98,76%)	
		Jenis Perlengkapan gedung kantor baru	7 Jenis	7 Jenis		
8.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	9.680.000 9.680.000 (100%)	Tercapai
8.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	3 Jenis	3 Jenis	7.012.880 6.308.000 (89,95%)	Tercapai
8.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan Tersedia	1 Jenis	1 Jenis	3.120.000 2.600.000 (83,33%)	Tercapai
8.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	2 Kegiatan	1 Kegiatan	11.080.000 2.580.000 (23%)	Tercapai
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	128.250.000 127.255.231 (99%)	Tercapai
9.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi	120 Buah	120 Buah	3.000.000	Tercapai
		Jumlah Surat Masuk Terdistribusi	250 Buah	250 Buah	3.000.000 (100%)	
9.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan	2 Tagihan	2 Tagihan	30.400.000 29.405.231	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
					(96,73%)	
9.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	4 Orang	4 Orang	94.850.000	Tercapai
		Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	1 Orang	1 Orang	94.850.000 (100%)	
10	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	386.280.220 376.798.676 (98%)	Tercapai
10.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil diproses surat perijinannya	1 Unit	1 Unit	2.300.000	Tercapai
		Jumlah Motor diproses surat perijinannya	6 Unit	4 Unit	1.498.900 (65,17%)	
10.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	7 Unit	5 Unit	19.879.100 19.670.976 (99%)	Tercapai
10.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki	14 Unit	14 Unit	7.200.000 7.200.000 (100%)	Tercapai
10.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik	1 Unit	1 Unit	356.901.120	Tercapai
		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	348.428.800 (97,63%)	
		Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit		

Sumber data : Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bulakamba antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD mempunyai masalah Tidak Terlaksananya Kegiatan Perjalanan Dinas Ke Makassar Dikarenakan Pandemi Covid-19, Penyelesaian yang dilakukan adalah dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun 2022.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan mempunyai



masalah tidak tercapai Target Pelunasan PBB dikarenakan efek Pandemi Covid-19 sehingga penagihan kurang Optimal, Penyelesaian kordinasi dan sosialisasi dengan Desa untuk pencapaian yang optimal untuk sisa tahun 2021 dan tahun 2022.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum tidak ada masalah, seluruh kegiatan Tercapai.
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa tidak ada masalah, seluruh kegiatan Tercapai

Analisi kesesuaian capaian bahwa nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 97 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 97,19% menunjukan bahwa target capaian kinerja tercapai.





C.39 Kecamatan Tanjung

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Tanjung sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Tanjung diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.769.959.286 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.587.131.906 atau 93,40% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.91
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Tanjung T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Tanjung				
	Belanja Operasi	2.388.564.286	2.209.497.906	(179.066.380)	92,50
	Belanja Modal	381.395.000	377.634.000	(3.761.000)	99,01
	JUMLAH	2.769.959.286	2.587.131.906	(182.827.380)	93,40

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tanjung dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.92
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Tanjung T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN TANJUNG						
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97%	97%	103.473.500 100.533.500 (97,15%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Tata Kelola Penegakan dan Penerapan Perda dan Perkada dengan baik	100%	100%	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring ke dalam daerah	100%	100%	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Tata Kelola Penegakan dan Penerapan Perda dan Perkada dengan baik	3 Orang 840 Orang/Hari 5 Orang	3 Orang 840 Orang/Hari 5 Orang	78.473.500 75.533.500 (96,25%)	Tercapai
2.1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Tenaga Non ASN tersedia Makan minum penjaga malam Transportasi dan Akomodasi	3 Orang 840 Orang/Hari 5 Orang	3 Orang 840 Orang/Hari 5 Orang	78.473.500 75.533.500 (96,25%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	100%	87.729.000 72.133.300 (82,22%)	Tercapai
1.	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tata Kelola Penegakan dan Penerapan Perda dan Perkada dengan baik	100%	100%	87.729.000 72.133.300 (82,22%)	Tercapai
1.1	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jenis dokumen laporan asset kelurahan dan desa Jenis dokumen laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (ADD/ bantuan keuangan/ Dana Desa)	2 Jenis 3 Dokuem	2 Jenis 3 Dokuem	11.253.100 0 (0%)	Tidak Tercapai
1.2	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jenis dokumen administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, LKPDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)	100%	100%	7.200.000 7.200.000 (100,00%)	Tercapai
1.3	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan Kemanan Masyarakat	100%	100%	754.000 754.000 (100,00%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.4	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatkan program dan keahlian masyarakat di desa	100	100	12.117.800 12.117.800 (100,00%)	Tercapai
1.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan Kegiatan lembaga masyarakat dan PKK	23 dok	23 dok	56.404.100 52.061.500 (92,30%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pesentase Kehadiran Pegawai	100 %	93,58	667.778.899 624.947.974 (93,58%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	85,44%	6.870.000 5.870.000 (85,44%)	Tercapai
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercapainya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5 Buah	5 Buah	6.870.000 5.870.000 (85,44%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	107.633.499 95.598.550 (88,82%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan	10 Jenis	10 Jenis	7.233.500 7.232.500 (99,99%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor yang tersedia Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	20 Jenis 10 Jenis	20 Jenis 10 Jenis	45.288.844 43.571.600 (96,21)	Tercapai
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat kebersihan dan pembersih	16 Jenis	16 Jenis	4.969.800 4.967.700 (99,96%)	Tercapai
2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan dan minuman yang tersedia	4 Jenis	4 Jenis	23.344.000 21.732.000 (93,09)	Tercapai
2.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	7.227.355 7.227.250 (100,00%)	Tercapai
2.6	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis bahan makan minum yang tersedia	3 Jenis	3 Jenis	11.070.000 10.867.500 (98,17%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan daerah Jumlah laporan perjalanan luar daerah	12 Lap 10 Lap	12 Lap 10 Lap	8.500.000 0 (0%)	Tidak Tercapai
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	8.637.000 8.637.000 (100.00%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Mebel	Jenis pengadaan meubelair yang tersedia	2 Jenis	2 Jenis	8.637.000 8.637.000 (100.00%)	Tercapai
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	142.750.000 116.978.892 (81,95%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Janis tagihan di bayar 12 bulan	4 Jenis	4 Jenis	53.050.000 33.908.892 (63,92%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN	5 Orang	5 Orang	89.700.000 83.070.000 (92,61%)	Tercapai
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	401.888.400 397.863.532 (99,00%)	Tercapai
5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dalam kondisi baik Jumlah mobil dinas dalam keadaan baik	9 Unit 1 Unit	9 Unit 1 Unit	30.953.400 30.179.532 (97,50%)	Tercapai
5.2	Pemeliharaan Mebel	Jenis pemeliharaan rutin mebel yang tersedia	60 Unit	60 Unit	7.730.000 7.730.000 (100,00%)	Tercapai
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantordalam kondisi baik Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	2 Unit 1 Unit	2 Unit 1 Unit	363.205.000 359.954.000 (99,10)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.



Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Tanjung pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tidak bisa terealisasi karena kgitanya tidak dilaksanakan/ tidak ada dengan penyelsaian anggaran tersebut kembali ke Anggaran Kas Daerah.
2. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitas, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai permasalahan pada sub kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang di dalamnya terdapat kegiatan lomba – lomba Tingkat Kabupaten yang kegiatanya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya Virus Covid 19 sehingga anggaran tersebut tidak dapat terealisasi sehingga penyerapanya menjadi 0% dengan penyelsaian Anggaran tersebut kembali ke Kas Daerah karena sampai akhir anggaran tidak dapat terealisasi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa Anggaran Untuk Kecamatan Tanjung Tahun 2021 sebesar Rp. 858.981.399 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 797.614.724 dengan persentase 92,82% (anggaran selain gaji dan tunjangan PNS), dengan dilihat dari presentase Anggaran yang mencapai 92,82 untuk Tahun Anggaran 2021 rata- rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Tanjung.





C.40 Kecamatan Losari

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Losari sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Losari diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.908.282.392 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.816.105.053 atau 96,83% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.93
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Losari T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Losari				
	Belanja Operasi	2.239.011.262	2.149.290.053	(89.721.209)	95,99
	Belanja Modal	669.271.130	666.815.000	(2.456.130)	99,63
	JUMLAH	2.908.282.392	2.816.105.053	(92.177.339)	96,83

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Losari dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.94
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Losari T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	99,67	18.317.200 18.256.000 (99,67%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97%	99,67%	18.317.200 18.256.000 (99,67%)	Tercapai
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan,	20 buah	20 buah	1.888.100 1.845.500 (97,74%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		IMB, IUMK, SKW, surat pindah)				
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos);	2000 dok	2000 dok	9.116.200	Tercapai
		Surat keterangan kematian;	500 Surat	500 Surat	9.116.000 (100%)	
		Target pelunasan PBB;	1.539.455..977 rupiah	1.539.455.977 rupiah		
		Target pendapatan retribusi daerah;	200.000 rupiah	200.000 rupiah		
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal;	66 dok	66 dok	7.312.900	Tercapai
		Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah datang, monografi);	3 dok	3 dok	7.294.500 (99,75%)	
		Jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan;	6 dok	6 dok		
		Laporan kejadian bencana alam;	1 dok	1 dok		
		Permohonan penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial;	1 dok	1 dok		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	99,42	9.093.000 9.040.000 (99,42%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis program peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di kecamatan brebes (jenis)	1 jenis	1 jenis	9.093.000 9.040.000 (99,42%)	Tercapai
2.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, HUT RI, Hari Jadi,	6 jenis	6 jenis	9.093.000 9.040.000 (99,42%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		evaluasi kecamatan);				
		Jumlah BUMDes yang terbentuk;	8 unit	8 unit		
		Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa	20%	20%		
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	99,95	37.566.200 37.548.000 (99,95%)	Tercapai
3	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis pembinaan dan pengamanan oleh anggota Pol PP dan Linmas	3 jenis	3 jenis	36.800.000 36.784.000 (99,96%)	Tercapai
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota linmas yang dibina satpol pp;	66 orang	66 orang	36.800.000 36.784.000 (99,96%)	Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor;	6 orang	6 orang		
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina	6 orang	6 orang		
4	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Tata Kelola dalam penerapan dan penegakan perda serta perkada	1 tahun	1 tahun	766.200 764.000 (99,71%)	Tercapai
4.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan;	44 patroli	44 patroli	766.200 764.000 (99,71%)	Tercapai
		Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin;	10 pengusaha	10 pengusaha		
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	97,51	56.063.660 54.665.400 (97,51%)	Tercapai
5	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis dokumen hasil fasilitasi pemerintahan desa (jenis)	3 jenis	3 jenis	56.063.660 54.665.400 (97,51%)	Tercapai
5.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jenis dokumen laporan aset kelurahan dan desa;	1 dok	1 dok	29.017.560 27.753.400 (95,64%)	Tercapai
		Jenis dokumen laporan pelaksanaan	66 dok	66 dok		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		kegiatan pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa);				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	97,03%	2.787.242.33 2.704.343.653 (97,03%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring	8 jenis	8 jenis	13.206.200 12.901.200 (97,69%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring	8 jenis	8 jenis	13.206.200 12.901.200 (97,69%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	22 orang	22 orang	1.718.266.744 1.653.817.763 (96,25%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	23 orang	23 orang	1.718.266.744 1.653.817.763 (96,25%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian hari tertentu	33 stel	33 stel	9.152.000 9.152.000 (100%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	30 stel	30 stel	9.152.000 9.152.000 (100%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan administrasi penunjang pelayanan publik	8 jenis	8 jenis	215.537.558 204.408.400 (94,84%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan	12 jenis	12 jenis	12.800.900 12.690.800 (99,14%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru;	6 jenis	6 jenis	144.158.998 143.649.600 (99,65%)	Tercapai
		Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru	0 jenis	0 jenis		
		Jenis Perlengkapan gedung kantor baru	8 jenis	8 jenis		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru	0 jenis	0 jenis		
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Alat Kebersihan dan bahan pembersih;	14 jenis	14 jenis	12.337.000	Tercapai
		Jenis peralatan rumah tangga;	15 jenis	15 jenis	12.312.600 (99,8%)	
		Jenis Peralatan rumah tangga;	12 jenis	12 jenis		
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	60 jenis	60 jenis	13.776.000	Tercapai
					13.296.000 (96,52%)	
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	3 jenis	3 jenis	11.090.660	Tercapai
					11.089.400 (99,99%)	
4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-undangan tersedia	2 jenis	2 jenis	1.560.000	Tercapai
					156.000 (10%)	
4.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	3 jenis	3 jenis	10.024.000	Tercapai
					9.924.000 (99%)	
4.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	20 Laporan	13 laporan	9.790.000	Belum Tercapai karena adanya PPKM, kegiatan dibatalkan
					1.290.000 (13,18%)	
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Aset Tetap Baru	3 jenis	3 jenis	33.258.000	Tercapai
					33.040.000 (99,34%)	
5.1	Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur baru	4 jenis	4 jenis	33.258.000	Tercapai
					33.040.000 (99,34%)	
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang kegiatan pelayanan publik(jenis)	3 jenis	3 jenis	198.170.500	Tercapai
					188.246.990 (94,99%)	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi;Jumlah	1500 buah	1500 buah	7.770.000	Tercapai
		Surat Masuk Terdistribusi;	1000 buah	1000 buah	7.770.000 (100%)	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan di bayar dalam 12 bulan	2 jenis	2 jenis	23.200.500	Tercapai
					22.056.990 (95,07%)	



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	3 orang	3 orang	167.200.000 158.420.000 (94,75%)	Tercapai
		Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	2 orang	2 orang		
		Jumlah Tenaga Ketentraman Tersedia	2 orang	2 orang		
		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Tersedia	2 orang	2 orang		
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah dalam kondisi baik(unit)	33 unit	33 unit	599.651.330 593.625.300 (99%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik;	8 unit	8 unit	35.247.700 32.448.300 (92,06%)	Tercapai
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional rusak dalam kondisi baik;	8 unit	8 unit		
		Jumlah Mobil diproses surat perijinannya;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Mobil jabatan rusak dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Motor di proses surat perijinannya;	8 unit	8 unit		
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik;	4 unit	4 unit	16.029.500 15.919.000 (99,31%)	Tercapai
		Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik;	12 unit	12 unit		
		Jumlah Peralatan kerja diperbaiki;	6 unit	6 unit		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondosi baik;	5 unit	5 unit		
		Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik;	3 unit	3 unit		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik;	1 unit	1 unit	548.374.130 545.258.000 (99,43%)	Tercapai
		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah rumah jabatan rusak menjadi baik;	1 unit	1 unit		

Sumber data : Kecamatan Losari Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Losari pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan permasalahan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tidak bisa terealisasi karena kegitanya tidak dilaksanakan/tidak ada dengan penyelesaian anggaran tersebut kembali ke Anggaran Kas Daerah.

Analisi Keseuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa Anggaran Untuk Kecamatan Losari Tahun 2021 sebesar Rp. 2.908.282.392,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.816.105.053 dengan persentase 96,83%, dengan dilihat dari presentase Realisasi Anggaran yang mencapai 96,83% untuk Tahun Anggaran 2021 rata-rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Losari.





C.41 Kecamatan Kersana

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Kersana sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.510.121.747 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.425.916.469 atau 96,65% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.95
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Kersana T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Kersana				
	Belanja Operasi	2.498.999.747	2.412.669.469	(86.330.278)	86,33
	Belanja Modal	11.122.000	11.122.000	0	100
	JUMLAH	2.510.121.747	2.425.916.469	(84.205.278)	96,65

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Kersana dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.96
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Kersana T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN KERSANA						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN (%)	12 Bulan	12 Bulan	24.479.500 15.630.000 (63.85%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Dok pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	12 Bulan	12 Bulan	24.479.500 15.630.000 (63.85%)	Tercapai
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan	Cakupan penduduk yang memiliki eKTP (%) Cakupan keluarga yang	12 Bulan	12 Bulan	1.049.500 750.000 (71.46%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Perizinan Non Usaha	memiliki Dok Kartu Keluarga (%) Persentase dok NIB yang terbit (%)				
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Cakupan desa yang memenuhi pelunasan PBB (%) Dok monitoring evaluasi pemilihan kepala desa (dok)	1 Buah	1 Buah	8.550.000 4.050.000 (47.37%)	Tercapai
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dok pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Dok	1 Dok	14.880.000 14.880.000 (100%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	13 Desa	13 Desa	24.290.000 19.640.000 (97,04%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Dok usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan (Dok)	13 Desa	13 Desa	24.290.000 19.640.000 (97.04%)	Tercapai
2.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dok Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan (Dok)	13 Desa	13 Desa	20.240.000 16.640.000 (82.21%)	Tercapai
2.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase BUMDes yang terbina (%) Laporan Kegiatan Lembaga Masyarakat Dan PKK (Dok) Peningkatan Omset UP2K di masing-masing Desa (%)	1 Buah	1 Buah	4.050.000 3.000.000 (74.07%)	Tercapai
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perbup Tertangani (%)	12 Bulan	12 Bulan	45.490.000 42.490.000 (93.41 %)	Tercapai
3	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Upaya Penyelenggaraan Kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	12 Bulan	12 Bulan	45.490.000 42.490.000 (93.41 %)	Tercapai
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah patroli keamanan wilayah yang dilaksanakan (Kegiatan) Dokumen Koordinasi penanganan kebencanaan(Dok)	1 Dok	1 Dok	45.490.000 42.490.000 (93.41 %)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	12 Bulan	12 Bulan	25.050.000 23.100.000 (92,22%)	Tercapai
4	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dok pembinaan dan pengawasan desa	12 Bulan	12 Bulan	25.050.000 23.100.000 (92,22%)	Tercapai
4.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan desa yang tertib penatausahaan aset desa (%)	1 Dok	1 Dok	3.000.000 3.000.000 (100%)	Tercapai
4.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dok hasil fasilitasi penyusunan peraturan desa dan kepala desa (dok)	1 Dok	1 Dok	3.000.000 3.000.000 (100%)	Tercapai
4.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dok	1 Dok	1.800.000 1.800.000 (100%)	Tercapai
4.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dok	1 Dok	17.250.000 15.300.000 (88,07%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran Kecamatan Kersana (%)	1 Tahun	1 Tahun	2.390.812.247 2.321.006.469 (97,08%)	Tercapai
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan (jam/hari)	1 Tahun	1 Tahun	1.983.821.747 1.942.319.419 (97.91%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terbayarkan gaji dan tunjangan (orang)	1 Tahun	1 Tahun	1.983.821.747 1.942.319.419 (97.91%)	Tercapai
6	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	40 Stel	40 Stel	16.000.000 16.000.000 (100%)	Tercapai
6.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Stel	40 Stel	16.000.000 16.000.000 (100%)	Tercapai
6.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	12 Bulan	12 Bulan	94.455.720 85.830.000 (90,87)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	6.002.600 6.000.000 (99.96%)	Tercapai
6.4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan kantor (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	12.640.000 12.600.000 (99.68%)	Tercapai
6.5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Logistik Kantor (jenis)	1 Jenis	1 Jenis	57.050.000 57.050.000 (100%)	Tercapai
6.6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan (jenis)	12 Bulan	12 Bulan	10.263.120 10.180.000 (99.19%)	Tercapai
6.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan pelaksanaan rapat (dok)	12 Bulan	12 Bulan	8.500.000 0 (0%)	Tidak
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang terbayarkan (%)	12 Bulan	12 Bulan	234.926.780 216.623.583 (92,21%)	Tercapai
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Surat Masuk (buah) Surat Keluar (buah)	12 Bulan	12 Bulan	3.000.000 3.000.000 (100%)	Tercapai
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik. Air. Telepon. Internet (tagihan)	1 Tahun	1 Tahun	37.863.380 26.888.583 (71.01%)	Tercapai
7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	39.454.200 39.450.000 (99.99%)	Tercapai
7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Tenaga Harian Lepas (THL) SKPD (orang)	12 Orang	12 Orang	154.609.200 147.285.000 (95.26%)	Tercapai
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik (%)	12 Bulan	12 Bulan	61.608.000 60.233.467 (97,77%)	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas Perorangan/jabatan dalam kondisi layak pakai (unit)	1 Unit	1 Unit	29.595.000 29.549.967 (99.85%)	Tercapai
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan dinas operasional/lapangan dalam kondisi layak pakai (unit)	1 Unit	1 Unit	2.500.000 1.211.500 (48.46%)	Tercapai
8.3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler dalam kondisi baik (unit)	1 Unit	1 Unit	6.460.000 6.450.000 (99.85%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
8.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya dalam kondisi baik (unit)	I Jenis	I Jenis	11.122.000 11.122.000 (100%)	Tercapai
8.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor pada tahun rencana (jenis)	1 Unit	1 Unit	11.931.000 11.900.000 (99.74%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Kersana pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tidak bisa terealisasi karena kegiatannya tidak dilaksanakan/ tidak ada dengan penyelesaian anggaran tersebut kembali ke Anggaran Kas Daerah.
2. Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi. rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai permasalahan pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang di dalamnya terdapat kegiatan lomba – lomba Tingkat Kabupaten yang kegiatannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan adanya Virus Covid 19 sehingga anggaran tersebut tidak dapat terealisasi sehingga penyerapannya menjadi 0% dengan penyelesaian Anggaran tersebut kembali ke Kas Daerah karena sampai akhir anggaran tidak dapat terealisasi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa Anggaran Untuk Kecamatan Kersana Tahun 2021 sebesar Rp. 2.510.121.747 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.425.916.469 dengan persentase 96.65%. dengan



dilihat dari presentase Anggaran yang mencapai 96.65% untuk Tahun Anggaran 2021 rata- rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Kersana.



C.42 Kecamatan Ketanggungan

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Ketanggungan sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.734.637.876 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.652.915.428 atau 97,01% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Ketanggungan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Ketanggungan				
	Belanja Operasi	2.517.017.876	2.435.677.428	(81.340.448)	96,77
	Belanja Modal	217.620.000	217.238.000	(382.000)	99,82
	JUMLAH	2.734.637.876	2.652.915.428	(81.722.448)	97,01

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Ketanggungan dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Ketanggungan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN KETANGGUNGAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN (%)	100%	100%	47.026.400 38.998.000 (82,93%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan	100%	100%	47.026.400 38.998.000 (82,93%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		yang dilimpahkan kepada Camat (%)				
1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	1 Tahun	1 Tahun	2.776.400 2.768.000 (99,70%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1 Tahun	1 Tahun	44.250.000 36.230.000 (81,88%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang melaksa- nakan adminis- trasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	100%	100%	29.412.000 28.184.000 (95,82%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Dokumen usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan (Dokumen)	63 dok	63 dok	29.412.000 28.184.000 (95,82%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1 Tahun	1 Tahun	29.412.000 28.184.000 (95,82%)	Tercapai
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perbup Tertangani (%)	100%	100%	130.755.000 124.280.000 (95,05%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyeleng- garaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100%	100%	130.755.000 124.280.000 (95,05%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Lap)	1 Tahun	1 Tahun	130.755.000 124.280.000 (95,05%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Survey Kepuasan terhadap pelayanan perkantoran Kecamatan Ketanggungan (%)	100%	100%	2.527.444.476 2.461.453.428 (97,39%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi (Dokumen)	1 Tahun	1 Tahun	9.008.900 8.696.000 (96,53%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1 Tahun	1 Tahun	9.008.900 8.696.000 (96,53%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rasio implementasi pelaksanaan Administrasi Keuangan (Jam/Hari)	1 Tahun	1 Tahun	2.010.247.434 1.982.558.928 (98,62%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang)	21 Ora ng	21 Ora ng	2.010.247.434 1.982.558.928 (98,62%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN (%)	100%	100%	17.500.000 17.500.000 (100%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1 Paket	1 Paket	17.500.000 17.500.000 (100%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100%	100%	119.934.300 101.206.500 (84,38%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	5.453.800 5.451.000 (99,95%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantoryang Disediakan(Paket)	1 Paket	1 Paket	44.642.200 41.146.000 (92,17%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	46.462.000 42.307.000 (91,06%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	12.334.300 12.302.500 (99,74%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1 Tahun	0 Tahun	11.042.000 0 (0%)	Belum Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Kantor Terbayarkan (%)	100%	100%	100.297.842 89.987.500 (89,72%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SuratMenyurat (Laporan)	565 Buah 250 Buah	565 Buah 250 Buah	3.150.000 3.150.000 (100%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4 Laporan	4 Laporan	43.978.842 38.489.500 (87,52%)	Tercapai
5.3	Sub Kegiatan PenyediaanJasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Tahun	1 Tahun	53.169.000 48.348.000 (90,93%)	Tercapai
6	Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik (%)	100%	100%	270.456.000 261.504.500 (96,69%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara danPerizinannya (Unit)	13 Un it	13 Unit	44.942.000 40.293.500 (89,66%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatandan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan danMesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5 Unit	5 Unit	16.396.000 15.835.000 (96,58%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3 unit	3 Unit	209.118.000 205.376.000 (98,21%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Ketanggungan pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan permasalahan yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang tidak dapat terealisasi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukan bahwa Anggaran untuk Kecamatan Ketanggungan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.734.637.876,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.652.915.428,- dengan presentase 97,01%, dengan dilihat dari presentase anggaran yang mencapai 97,01% untuk Tahun Anggaran 2021 rata-rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Ketanggungan.





C.43 Kecamatan Banjarharjo

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Banjarharjo sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Banjarharjo diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.736.943.899 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.628.267.877 atau 96,03% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.99
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Banjarharjo T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Banjarharjo				
	Belanja Operasi	2.505.016.899	2.397.023.877	(107.993.022)	95,69
	Belanja Modal	231.927.000	231.244.000	(683.000)	99,71
	JUMLAH	2.736.943.899	2.628.267.877	(108.676.022)	96,03

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Banjarharjo dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.100
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Banjarharjo T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN BANJARHARJO						
I	PROGRAM PENEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan (%)	97%	100%	32.830.000 32.830.000 (100%)	Tercapai
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Target yang dikeluarkan, Ijin Penutupan, IUMK, IMB, SKW, SP, PBB, IPM, PKH, BNPT, PMKD, dan Bencana Sosial	100 Dokumen	97 Dokumen	32.830.000 32.830.000 (100%)	Belum Tercapai Adanya pandemic dan aturan PPKM



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Perijinan dan Rekomendasi yang dikeluarkan (Penutupan Jalan, IMB, IUMK, SKW, Surat Pindah (Buah))	100 Buah	97 Dokumen	32.830.000 32.830.000 (100%)	Belum Tercapai Adanya pandemic dan aturan PPKM
II	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan (%)	100%	100%	210.990.000 204.550.000 (97%)	Tercapai
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan Patroli Wilayah Aman di Masyarakat dan Penegakan	12 Bulan	12 Bulan	210.990.000 204.550.000 (97%)	Tercapai
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pol PP yang Terbina (Orang)	10 Orang	10 Orang	210.990.000 204.550.000 (97%)	Tercapai
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan Tugas Umum dan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan (%)	100%	100%	51.886.200 51.886.200 (100%)	Tercapai
1	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Musrembang	25 Dokumen	25 Dokumen	51.886.200 51.886.200 (100%)	Tercapai
1.1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Dokumen Musrembang	25 Dokumen	25 Dokumen	12.100.000 12.100.000 (100%)	Tercapai
1.2	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Data Perbankan, Perkreditan Rakyat, Perkoprasian, Peternakan, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Industri Kecil, Usaha Informal, Kehutanan dan Distribusi hasil produksi (Buah)	25 Dokumen	25 Dokumen	39.786.200 39.786.200 (100%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tersedianya Dana Untuk Pembayaran Gaji ASN Kantor Kecamatan	100%	100%	2.441.237.699 2.339.005.877 (96%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	KABUPATEN/KOTA	Banjarharjo				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dana Untuk Pembayaran Gaji ASN Kantor Kecamatan Banjarharjo	1 Tahun	1 Tahun	2.044.140.279 1.931.776.873 (96%)	Tercapai
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Kecamatan Banjarharjo 19	1 Tahun	1 Tahun	2.044.140.279 1.931.776.873 (96%)	Tercapai
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	30 Stel	30 Stel	10.800.000 10.800.000 (100%)	Tercapai
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 30 Stel	30 Stel	30 Stel	10.800.000 10.800.000 (100%)	Tercapai
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dana Untuk operasional/Kegiatan Rutin Kantor Kec. Banjarharjo	12 Bulan	12 Bulan	100.963.820 92.463.820 (92%)	Tercapai
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Listrik/ Penerangan (Jenis)	6 Jenis	5 Jenis	4.372.900 4.372.900 (100%)	Belum Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jenis)	21 Jenis Dan 5 Unit	18 Jenis dan 5 Unit	42.380.700 42.380.700 (100%)	Belum Tercapai Tercapai
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	2 Jenis	2 Jenis	40.008.000 40.008.000 (100%)	Tercapai
3.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	6 Jenis	5 Jenis	5.702.220 5.702.220 (100%)	Tercapai
3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	2 Laporan	-	8.500.000 0 (0%)	Tidak tercapai (Masa Pandemi Covid 19)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Untuk operasional/Kegiatan Rutin Kantor Kec. Banjarharjo	12 Bulan	12 Bulan	61.827.600 43.372.684 (70%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi	Surat Masuk 250 Surat	Surat Masuk 260 Surat Keluar	1.900.000 1.900.000 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
			Keluar 216	200		
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis Tagihan di Bayar dalam 12 bulan (Jenis)	4 Jenis	3 Jenis	54.102.800 35.647.884 (65%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Kebersihan tersedia	11 Jenis	10 Jenis	5.824.800 5.824.800 (100%)	Tercapai
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Dana untuk Operasional/ Kegiatan Rutin Kantor Kecamatan Banjarharjo	100%	100%	263.506.000 260.592.500 (99%)	Tercapai
51.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dalam Kondisi Baik (Unit)	6 Unit	6 Unit	36.126.000 33.895.500 (94%)	Tercapai
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Dalam Kondisi Baik (unit)	21 unit	20 Unit	13.800.000 13.800.000 (100%)	Tercapai
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Dalam Kondisi baik dan Gedung Baru (Unit)	2 Unit	2 Unit	213.580.000 212.897.000 (100%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah untuk Kecamatan Banjarharjo, permasalahan yaitu adanya refocusing anggaran dan adanya pandemi yang beberapa target belum tercapai.

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target setiap program sudah mencapai target. Terdapat 4 Program yang sudah ditetapkan. Program pertama adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan dengan realisasi sebesar 96,03%. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan sudah berjalan dengan optimal. Program yang kedua adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp 32.830.000, sedangkan untuk realisasi belanja program, kegiatan



dan sub kegiatan sebesar Rp 32.830.000 atau mencapai 100% realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan optimal.

Program ke tiga adalah Program Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp 210.990.000 sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp 204.550.000 atau mencapai 97% realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan optimal. Program yang ke empat adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan sebesar Rp 51.886.200 sedangkan untuk realisasi belanja sebesar Rp 51.886.200 atau mencapai 100% realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan program, kegiatan dan sub kegiatan sudah berjalan optimal.





C.44 Kecamatan Larangan

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Larangan sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Larangan diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 3.024.753.674 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.960.736.061 atau 97,88 % secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.101
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Larangan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Larangan				
	Belanja Operasi	2.513.981.674	2.453.905.061	(60.076.613)	97,61
	Belanja Modal	510.772.000	506.831.000	(3.941.000)	99,23
	JUMLAH	3.024.753.674	2.960.736.061	(64.017.613)	97,88

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Larangan dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.102
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Larangan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN LARANGAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-	-	67.472.400 67.432,800 (99,94%)	-
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.	Target Retribusi Daerah	1 tahun	1 tahun	67.472.400 67.432,800 (99,94%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Jumlah Perizinan dan Rekomendasi yang Dikeluarkan (penutupan, jalan, imb, IUMK, SKW, surat Pindah) (buah)	3825 buah	3825 buah	27.628.800 27.628.800 (100%)	Tercapai
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha.	Jumlah rekomendasi (pendirian, lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal Bantuan hibah dan bansos) (dokumen).	3825 buah	3825 buah	26.343.600 26.304.000 (99,85%)	Tercapai
		Target pelunasan PBB (rupiah)	2.853.615.901	1.565.733.604		Belum Tercapai
		Surat keterangan kematian (Surat)	3825 surat	3825 surat		Tercapai
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang Dilimpahkan.	Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	1000 dokumen	1000 dokumen	13.500.000 13.500.000 (100%)	Tercapai
		Permohonan penyaluran bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	1000 dokumen	1000 dokumen		Tercapai
		Jumlah Masyarakat/ Lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	1000 dokumen	1000 dokumen		Tercapai
		Jumlah bantuan paket sembako (paket)	1000 paket	1000 paket		Tercapai
		Target pendapatan retribusi daerah (rupiah)	5000000 rupiah	5000000 rupiah		Tercapai
		Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa (laporan lahir mati, pindah dating, monografi) (dokumen)	1000 dokumen	1000 dokumen		Tercapai
		Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan nonformal (dok)	1000 dokumen	1000 dokumen		Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	-	27.690.000 27.690.000 (100%)	-
1	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa.	Usulan kegiatan pembangunan desa	11 Desa	11 Desa	27.690.000 27.690.000 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.	Jenis lomba yang dilaksanakan (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok sitong, Perancang busana, Hut-RI, Hari jadi, Evaluasi Kecamatan)	4000 dokumen	4000 dokumen	27.690.000 27.690.000 (100%)	Tercapai Belum Tercapai akibt pandemi
		Jumlah BUMDes yang terbentuk (Unit)	11 Desa	4 Desa		
		Peningkatan omset UPPK dimasing-masing Desa (%)	100%	40%		
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	25.000.000 25.000.000 (100%)	-
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.	Laporan Inventarisasi usaha tidak berizin	40 Pengusaha	40 pengusaha	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
1.1	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	(1). Jumlah bencana yang tertangani (keg)	100 Keg	100 Keg	25.000.000	Tercapai
		(2). Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	8 Orang	8 Orang	25.000.000 (100%)	
		(3). Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	8 Orang	8 Orang		
		(4) Jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	8 Orang	8 Orang		
		(5) Jumlah anggotalinmas yang dibina satpol pp (orang)	700 Orang	700 Orang		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	Prosentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaanterseada (%)	100%	100%	2.904.591.200 2.840.433.261 (97,79%)	Tercapai
1	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen Perencanaan	23 buah	23 buah	762.600 762.600 (100%)	Tercapai
1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jenis Dokumen Perencanaan	23 buah	23 buah	762.600 762.600 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2	Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	1 tahun	1 tahun	2.032.207.374 1.998.049.385 (98,32%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya 23 Orang	1 tahun	1 tahun	2.032.207.374 1.998.049.385 (98,32%)	Tercapai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	45 stel	45 stel	26.400.000 26.400.000 (100%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya(stel)	45 stel	45 stel	26.400.000 26.400.000 (100%)	Tercapai
4	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan Penunjang pelayanan public(jenis)	6 jenis	6 jenis	121.057.400 120.361.100 (99,42%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik/penerangan	13 jenis	13 jenis	9.249.400 9.219.700 (99,68%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tuliskantor tersedia(jenis)	35 jenis	35 jenis	37.937.500 Rp. 37.872.800 (99,83%)	Tercapai
		Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan(jenis)	5 jenis	5 jenis		
		Jumlah suratmasuk Terdistribusi (buah)	2400 jenis	2400 jenis		
		Jumlah tenaga administrasi tersedia(orang)	7 orang	7 orang		
		Jumlah tenaga kebersihan tersedia (orang)	6 orang	6 orang		
		Jumlah surat keluar terdistribusi (buah)	1800 buah	1750 buah		
		Jumlah surat keluar terdistribusi (buah)	1800 buah	1750 buah		
4.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Tenaga kebersihan tersedia(orang)	6 orang	6 orang	8.257.500 8.238.600 (99,77%)	Tercapai
4.4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jenis bahan makan tersedia(jenis)	1261 jenis		37.250.000 36.770.000 (98,71%)	Tercapai
4.5	Penyediaan barang cetakan dan penggadaan	Jenis barang cetakan dan penggadaan tersedia(jenis)	8 Jenis	8 Jenis	15.000.000 14.920.000 (99,47%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan luar daerah(laporan)	1261	1261	13.363.000 13.340.000 (99,83%)	Tercapai
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis aset tetapbaru (jenis)	3 jenis	Jenis	327.772.000 326.333.000 (99,56%)	Tercapai
5.1	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jenis peralatan Gedung kantor baru (jenis)	8 jenis	8 jenis	27.132.000 26.900.000 (99,14%)	Tercapai
5.2	Pengadaan Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan Gedung rusak menjadi baik (jenis)	1 Unit	1 Unit	250.000.000 249.033.000 (99,61%)	Tercapai
5.3	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas baru (jenis)	5 jenis	5 jenis	50.640.000 50.400.000 (99,53%)	Tercapai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis tenaga dan fasilitas penunjang kegiatan kantor (jenis)	3 jenis	3 jenis	188.157.800 167.669.959 (89,11%)	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat Masuk terdistribusi (buah)	2400 buah	2400 buah	9.900.000 9.900.000 (100%)	Tercapai
		Jumlah surat keluar terdistribusi (buah)	1800 buah	1800 buah		Tercapai
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan (jenis)	5 jenis	5 jenis	37.347.800 30.759.959 (82,36%)	Tercapai
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia (orang)	8 orang	8 orang	140.910.000 127.010.000 (90,14%)	Tercapai
7	Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset tetap dalam kondisi baik (Unit)	12 unit	12 unit	208.234.100 200.857.217 (96,45)	Tercapai
7.1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah mobil jabatan dalam Kondisi baik (Unit)	1 unit	1 unit	13.706.100 11.409.217 (83,24%)	Tercapai
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas/	8 unit	8 unit	11.528.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan.	Operasional dalam kondisi baik (Unit)			8.950.000 (77,64%)	
7.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dalam kondisi baik (Unit)	1 unit	1 unit	183.000.000 180.498.000 (98,63%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Larangan, pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemukan masalah yang signifikan, hanya saja beberapa kegiatan tidak tercapai karena pandemi.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 2.904.591.274 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 2.840.433.261 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 97,79 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 67.472.400 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 67.432.800 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 99,94 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 27.690.000 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 27.690.000 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 100 %.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 25.000.000 dan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 25.000.000 sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 100 %.



C.45 Kecamatan Tonjong

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Tonjong sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Tonjong diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.812.430.211 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.732.337.778 atau 97,15% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.103
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Tonjong T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Tonjong				
	Belanja Operasi	2.776.620.211	2.694.027.778	82.592.433	97,03
	Belanja Modal	38.310.000	38.310.000	0	100,00
	JUMLAH	2.812.430.211	2.732.337.778	80.092.433	97,15

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Tonjong dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.104
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Tonjong T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN TONJONG						
I	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan IKM Paten	97% 100%	97% 100%	48.709.600 48.607.000 (99,79%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Jumlah Perijinan dan Rekomendasi Yang Dikeluarkan (Penutupan Jalan, IMB, IUMK, SKW,surat pindah)	25 Buah	25 Buah	11.691.400 11.591.000 (99,14%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					
1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Perijinan dan Rekomendasi Yang Dikeluarkan (Penutupan Jalan, IMB, IUMK, SKW, surat pindah)	25 Buah	25 Buah	11.691.400 11.591.000 (99.14%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Dikelola dan Dipelihara	3 Buah	0 Buah	0 0 (0%)	Tidak Tercapai Dikarenakan Adanya <i>Refocusing</i>
2.1	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Umum yang Dikelola dan Dipelihara	3 Buah	0 Buah	0 0 (0%)	Tidak Tercapai Dikarenakan Adanya <i>Refocusing</i>
3	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	37.018.200 37.016.000 (99,99%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Target Pelunasan PBB Target Pendapatan Retribusi Daerah Jumlah Rekomendasi (Pendirian Lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal Bantuan Hibah dan Bansos) Surat keterangan kematian	160.000.0 00 Rupiah 2.500.000 Rupiah 50 Dokumen 50 Dokumen	160.000.00 0 Rupiah 2.500.000 Rupiah 50 Dokumen 50 Dokumen	26.564.100 26.564.000 (100%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jenis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Desa (Laporan Lahir Mati, Pindah Datang, Monografi) Laporan Kejadian Bencana Alam Permohonan Penyaluran Bantuan Bencana	2 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 15 Dokumen 200 Paket	2 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 15 Dokumen 200 Paket	10.454.100 10.452.000 (99,9%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Alam dan Bencana Sosial Data Organisasi Keagamaan, Kepemudaan, Pendidikan Formal dan Non Formal Jumlah Masyarakat / Lembaga Yang Layak Menerima Bantuan Sosial dan Keagamaan Jumlah Bantuan Paket Sembako				
II	PROGRAM PEMBER DAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	39.000.000 39.000.000 (100%)	Tercapai
4	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	39.000.000 39.000.000 (100%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan Desa dan Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000 13.800.000 (100%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Lomba yang Dilaksanakan (Lomba Desa, MTQ, Dokter Kecil, Sinok Sitong, Rancang Busana, HUT RI, Hari Jadi, Evaluasi Kecamatan) Jumlah BUMDes Yang Terbentuk Peningkatan Omset UPPK dimasing - masing Desa	3 Kegiatan 14 Unit 25%	3 Kegiatan 14 Unit 25%	25.200.000 25.200.000 (100%)	Tercapai
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	40.996.892 40.896.000 (99,75%)	Tercapai
5	Kegiatan Koordinasi Upaya	Pelaksanan Tugas Umum	97%	97%	9.600.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan			9.600.000 (100%)	
5.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Patroli Wilayah Yang Dilaksanakan Jumlah Anggota Pol PP yang terbina Jumlah Anggota Linmas yang dibina Satpol PP Jumlah Anggota Pol PP yang Melakukan Pengamanan Kantor Jumlah Bencana yang Terpantau	24 Patroli 2 Orang 30 Orang 4 Orang 5 Kegiatan	24 Patroli 2 Orang 30 Orang 4 Orang 5 Kegiatan	9.600.000 9.600.000 (100%)	Tercapai
6	Sub Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	31.396.892 31.296.000 (99,68%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan Inventarisasi Kegiatan Usaha Tidak Berijin Jumlah bencana yang tertangan Jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan	2 Pengusaha 5 Kegiatan 30 Orang	2 Pengusaha 5 Kegiatan 30 Orang	31.396.892 31.296.000 (99,68%)	Tercapai
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	39.630.000 39.580.000 (99,87%)	Tercapai
7	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	97%	97%	39.630.000 39.580.000 (99,87%)	Tercapai
7.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDDes, LKPdes, Perdes, PerkadDes,	5 Dokumen	5 Dokumen	4.680.000 4.680.000 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Keputusan Kades)				
7.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Perjalanan Dalam Daerah pada Kegiatan Pemantauan Pelaporan Pajak, Laporan Pelunasan Setoran Raskin	14 Dokumen	14 Dokumen	34.950.000 34.900.000 (99,86%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia Persentase Kehadiran Pegawai Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor Persentase Aset dalam kondisi baik Persentase Kehadiran Pegawai	100% 100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100% 100%	2.646.593.719 2.564.254.778 (96,89%)	Tercapai
8	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	12 Bulan 1 Buah	12 Bulan 1 Buah	2.246.369.119 2.183.130.015 (97.18%)	Tercapai
8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	2.246.369.119 2.182.224.615 (97.14%)	Tercapai
8.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	1 Buah	1 Buah	905.400 905.400 (100%)	Tercapai
9	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	100%	9.000.000 8.945.000 (99,39%)	Tercapai
9.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	100%	9.000.000 8.945.000 (99,39%)	Tercapai
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di	100%	100%	153.836.100 145.322.300 (99,46%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Lingkungan Kantor				
10.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	6 Jenis	6 Jenis	6.390.410 6.372.500 (99,72%)	Tercapai
10.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jenis Perlengkapan Gedung Kantor Baru	16 Unit 5 Unit 6 Unit	16 Unit 5 Unit 6 Unit	63.110.090 63.109.900 (100%)	Tercapai
10.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15 Jenis	15 Jenis	5.713.730 5.690.400 (99,59%)	Tercapai
10.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	2 Jenis	2 Jenis	53.998.000 53.910.000 (99,84%)	Tercapai
10.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	5 Jenis	5 Jenis	4.539.870 4.539.500 (99,99%)	Tercapai
10.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- Undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan	1 Jenis	1 Jenis	3.000.000 3.000.000 (100%)	Tercapai
10.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	5 Laporan	5 Laporan	17.086.000 8.700.000 (50,92%)	Tercapai
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100%	192.939.000 182.484.763 (94,58%)	Tercapai
11.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar Terdistribusi	300 Buah	300 Buah	2.000.000 2.000.000 (100%)	Tercapai
11.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan yang Dibayar Dalam 12 Bulan	3 Jenis	3 Jenis	20.919.000 20.545.483 (98,21%)	Tercapai
11.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	8 Orang 1 Orang	8 Orang 1 Orang	170.020.000 159.939.280 (94,07%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
12	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	44.447.500 44.372.700 (99,83%)	Tercapai
12.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Dalam Kondisi Baik Jumlah Mobil Jabatan Dinas Dalam Kondisi Baik	9 Unit	9 Unit 1 Unit	20.190.900 20.136.700 (99.73%)	Tercapai
12.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja Diperbaiki	5 Unit	5 Unit	4.400.000 4.400.000 (100%)	Tercapai
12.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Rusak Menjadi Baik Jumlah Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik Jumlah Rumah Dinas Rusak Menjadi Baik	1 Unit 1 Unit 1 Unit	1 Unit 1 Unit 1 Unit	19.856.600 19.836.000 (99.90%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada Kecamatan Tonjong tidak ada permasalahan yang dihadapi yang spesifik kecuali adanya Pandemic. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.

Capaian Kinerja pada OPD Kantor Kecamatan Tonjong dengan indikator kinerjanya hampir menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan. Program Pelayanan Umum. Pada program ini ada 4 kegiatan dengan capaian kinerja hampir semua menunjukkan kesesuaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk program dalam sekretariat ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan refocusing penanganan Covid-19. Akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak ada hambatan.





C.45 Kecamatan Bumiayu

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Bumiayu sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Bumiayu, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.913.849.315 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.754.068.921 atau 94,52% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.105
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Bumiayu T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Bumiayu				
	Belanja Operasi	2.766.459.315	2.607.120.921	(159.338.394)	94,24
	Belanja Modal	147.390.000	146.948.000	(442.000)	99,70
	JUMLAH	2.913.849.315	2.754.068.921	(159.780.394)	94,52

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada kecamatan bumiayu dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.106
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Bumiayu T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN						
KECAMATAN BUMIAYU						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	27,900,000	Tercapai
		IKM Paten	100%	85,42%	25,050,000	Belum Tercapai
		Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	100%	82,20%	(89,78%)	Belum Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	27,900,000	Tercapai Belum Tercapai Belum Tercapai
		IKM Paten	100%	85%	25,050,000 (89,78%)	
		Persentase Peningkatan Pelunasan PBB	100%	82%		
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, imb, IUMK, SKW, surat pindah) (buah)	100 Buah	100 Buah	900,000 900,000 (100%)	Tercapai
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Target Pelunasan PBB (%)	100%	82,20	18,000,000	Belum Tercapai Tercapai Tercapai
		Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan, Proposal bantuan hibah dan bansos) (dokumen)	40 Dok	40 Dok	15,300,000 (85,00%)	
		Surat keterangan kematian (surat)	40 Surat	40 Surat		
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan kejadian bencana alam (dokumen)	-	-	9,000,000	Tercapai
		Permohonan penyaluran Bantuan bencana alam dan bencana sosial (dokumen)	50 Dok	50 Dok	8,850,000 (98,33%)	
		Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal (dok)	50 Dok	50 Dok		
		jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan (dok)	50 Dok	50 Dok		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%	48,341,000	Tercapai
		Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	47,166,000 (97,57%)	



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	10 Dok	10 Dok	48,341,000 47,166,000 (97,57%)	Tercapai
		Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	10 Unit	10 Unit		
		Peningkatan Omset UPPK dimasing- masing Desa (%)	-	-		
		laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	5 Dok	5 Dok		
1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dokumen Usulan Kegiatan Pembangunan desa dan Kecamatan (Dokumen)	1 Dok	1 Dok	29,391,000 28,791,000 (97,96%)	Tercapai
		Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPdes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)(dokumen)	5 Dok	5 Dok		
		Jumlah dokumen usulan kegiatan pembangunan desa dan kecamatan (dokumen)	1 Dok	1 Dok		
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, Hut RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan)	2 Keg	2 Keg	18,950,000 18,375,000 (96,97%)	Tercapai Refocusing Refocusing Refocusing
		Jumlah BUMDes yang terbentuk (unit)	-	-		
		Peningkatan Omset UPPK dimasing- masing Desa (%)	-	--		
		Laporan kegiatan Lembaga masyarakat dan PKK (dokumen)	-	-		
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	49,600,000 48,800,000 (98,39)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	10 Pengusaha	6 Pengusaha	49,600,000	Belum Tercapai
		Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	-	-	48,800,000 (98,39)	Tercapai Tercapai Tercapai
		Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	15 Wilayah	15 Wilayah		
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina (orang)	-	-		
		Jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (orang)	30 Org	30 Org		
		Jumlah bencana yang tertangani (keg)	10 Keg	10 Keg		
		Jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (orang)	-	-		
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (orang)	1 Org	1 Org		
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin (pengusaha)	10 Pengusaha	6 Pengusaha	49,600,000	Belum Tercapai
		Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian) (dok)	-	-	48,800,000 (98,39)	Tercapai Tercapai Tercapai
		Jumlah patroli wilayah yang dilaksanakan (x patroli)	15 Wilayah	15 Wilayah		Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina (org)	-	-		
		Jumlah anggota linmas yang dbina satpol pp (org)	30 Org	30 Org		
		Jumlah bencana yang tertangani (keg)	10 Keg	10 Keg		
		Jumlah PKL yang dibina dan ditertibkan (org)	-	-		
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor (org)	1 Org	1 Org		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	27,900,000 22,950,000 (82,26%)	Tercapai
1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jenis Dokumen Keuangan dan Aset Desa	2 Dok	2 Dok	27,900,000 22,950,000 (82,26%)	Tercapai
		Laporan Pelaksanaan Penmberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	3 Dok	3 Dok		
		Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDesm Perdes, Perkades, dll)	7 Dok	7 Dok		
		Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah pada Kegiatan Pendampingan Desa	14 Lap	14 Lap		
1.1	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jenis Dokumen Keuangan dan Aset Desa	5 Dok	5 Dok	4,200,000 3,900,000 (92,86%)	Tercapai
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Laporan Pelaksanaan Penmberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa	3 Dok	3 Dok	4,200,000 3,150,000 (75,00%)	Tercapai
1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jenis Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa (RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDesm Perdes, Perkades, dll)	7 Dok	7 Dok	6,000,000 5,250,000 (87,50%)	Tercapai
1.4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas dalam Daerah pada Kegiatan Pendampingan Desa	14 Lap	14 Lap	13,500,000 10,650,000 (78,89%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
V	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	85,42%	2,760,108,315 2,610,221,153 (94,57%)	Belum Tercapai Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%		
		3. Persentase Kehadiran Pegawai (%)	100%	100%		
		Persentase Pegawai Berkopetensi (%)	100%	100%		
		Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	100%		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen (lakip, sakip, evaluasi rkpd) (jenis)	100%	100%	2,688,000 - (0,00%)	Tercapai Pergeseran anggaran
		jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)				
		Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)				
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	5 Jenis	5 Jenis		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis Dokumen (lakip, sakip, evaluasi rkpd) (jenis)	3 jenis	3 jenis		
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Dokumen perencanaan dan monitoring (Jenis)	1 jenis	1 jenis		
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)	22 Org	22 Org	2,288,500,155 2,177,598,117 (95,15%)	Tercapai
		Jenis Dokumen laporan akhir tahun (buah)	1 Buah	1 Buah		
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Orang)	22 Org	22 Org	2,288,500,155 2,177,598,117 (95,15%)	Tercapai
		Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	22 Org	22 Org		
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen Keuangan Akhir Tahun	1 Buah	-	-	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Kehadiran Pegawai	100%	100%	10,200,000 10,050,000 (98,53%)	Tercapai
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	25 Stel	25 Stel	10,200,000 10,050,000 (98,53%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	30 jenis	30 jenis	188,205,600	Tercapai
		Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	3 jenis	3 jenis	167,381,800 (88,90%)	
		Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10 jenis	10 jenis		
		Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	2 jenis	2 jenis		
		Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	24 jenis	24 jenis		
		Jenis Bahan Logistik (Jenis)	1 Tahun	1 Tahun		
		Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	40 Keg	40 Keg		
		Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah (Laporan)	150 Lap	150 Lap		
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan (Jenis)	10 jenis	10 jenis	4,646,000 4,272,000 (91,95%)	Tercapai
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Alat Tulis Kantor Tersedia (Jenis)	30 jenis	30 jenis	31,951,300	Tercapai
		Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor (jenis)	2 jenis	2 jenis	30,962,000 (96,90%)	
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan Tersedia (Jenis)	24 jenis	24 jenis	11,226,700	Tercapai
		Jenis Peralatan rumah tangga (jenis)	2 jenis	2 jenis	10,766,700 (95,90%)	
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia (Jenis)	1 Tahun	1 Tahun	48,400,000 43,838,000 (90,57%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan Tersedia (Jenis)	3 jenis	3 jenis	8,831,600 8,824,100 (99,92%)	Tercapai
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis Bahan Makan Minum, makanan dan minuman rapat Tersedia (Kegiatan)	40 Keg	40 Keg	8,340,000 8,325,000 (99,82)	Tercapai
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah dan Dalam daerah (Laporan)	150 Lap	150 Lap	74,890,000 60,394,000 (80,64%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	100 Buah	100 Buah	111,518,000 96,934,536 (86,92%)	Tercapai
		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	100 Buah	100 Buah		
		Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	4 Jenis	4 Jenis		
		Jumlah Tenaga jasa Pelayanan Umum Tersedia (orang)	4 Org	4 Org		
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk Terdistribusi (buah)	100 Buah	100 Buah	3,000,000	Tercapai
		Jumlah Surat Keluar Terdistribusi (buah)	100 Buah	100 Buah	3,000,000 (100%)	
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Tagihan dibayar dalam 12 Bulan (Jenis)	4 Jenis	4 Jenis	40,758,000 31,214,536 (76,59%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia (orang)	1 Org	1 Org	67,760,000	Tercapai
		Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia (Orang)	2 Org	2 Org	62,720,000 (99,58)	
		Jumlah Tenaga Penjaga Malam Tersedia (Orang)	1 Org	1 Org		
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Dinas Terbayarkan STNK	13 Unit	13 Unit	158,915,560	Tercapai
		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor dlm Kondisi Baik	10 Unit	10 Unit	158,156,700 (99,58%)	



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	1 Unit	1 Unit		
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas diproses surat perijinannya (Unit)	12 Unit	12 Unit	13,900,060	Tercapai
		Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (Unit)	12 Unit	12 Unit	13,701,200 (98,57%)	
		Jumlah mobil jabatan rusak menjadi baik (Unit)	1 Unit	1 Unit		
6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	1 Unit	1 Unit	137,256,500 136,845,500 (99,70)	Tercapai
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kerja diperbaiki (Unit)	10 Unit	10 Unit	7,760,000	Tercapai
		Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik (Unit)	-	-	7,710,000 (99.36%)	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik (Unit)	-	-		

Sumber data : Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 Kecamatan Bumiayu pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan tidak ditemukan permasalahan yang signifikan, hanya beberapa indikator tidak tercapai dikarenakan pengurangan anggaran (refocusing).

Analisis Kesesuaian Capaian

Capaian Kinerja pada OPD Kantor Kecamatan Bumiayu dengan indikator kinerjanya hampir menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan.

Program Pelayanan Umum. Pada program ini ada 4 kegiatan dengan capaian kinerja hampir semua menunjukkan kesesuaian target kinerja yang ditetapkan. Untuk program dalam sekretariat ada beberapa program dan kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan refocusing penanganan Covid-19. Akan tetapi secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak ada hambatan.





C.13 Kecamatan Paguyangan

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Paguyangan sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.690.720.230 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.586.157.027 atau 96,11% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.107
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Paguyangan T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Paguyangan				
	Belanja Operasi	2.690.720.230	2.586.157.027	(104.563.203)	96,11
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	2.690.720.230	2.586.157.027	(104.563.203)	96,11

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Paguyangan dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.108
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Paguyangan T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN PAGUYANGAN						
I	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	27,900,000 25,050,000 (89,78%)	Tercapai
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	15 Laporan	12 Laporan	108.400.000 65.898.812 (61%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah laporan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	12 Desa	12 Desa	108.400.000 65.898.812 (61%)	Tercapai
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Tersedianya laporan lahir, mati, pindah, datang, monografi	12 Desa	12 Desa	68.580.000 67.980.000 (99%)	Tercapai
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non-usaha	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan (penutupan jalan, IMB, IUMK, SKW, surat pindah)	60 Buah	55 Buah	45.000.000 44.400.000 (99%)	Belum tercapai
		Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian)	0 Dokumen	0 Dokumen		
		Jumlah surat rekomendasi izin bidang ketertiban umum (keramaian)	2 Dokumen	2 Dokumen		
2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	Target pelunasan PBB Target pendapatan retribusi daerah	80%	69,2%	9.180.000 9.180.000 (100%)	Tercapai
2.3	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Data organisasi keagamaan, kepemudaan, pendidikan formal dan non formal Jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil desa(laporan lahir, mati, pindah, datang, monografi) Jumlah bantuan paket Sembako Jumlah masyarakat/lembaga yang layak menerima bantuan sosial dan keagamaan Jumlah rekomendasi(pendirian	23 Dokumen 3 Dokumen 100 Paket 23 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 260 Dokumen	23 Dokumen 3 Dokumen 100 Paket 23 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen 250 Dokumen	14.400.000 14.400.000 (100%)	Tercapa



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		lembaga, SKTM, pernikahan, proposal bantuan hibah dan bansos Laporan kejadian bencana alam Permohonan penyaluran bantuanbencana alam dan bencana sosial Surat keterangan kematian				
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN	-	-	-	14.112.000 14.098.000 (100%)	-
3	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan pemberdayaan desa	12 Laporan	12 Laporan	14.112.000 14.098.000 (100%)	Tercapai
3.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalamforum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarak atan	5 Lembaga Kemasyarak atan	14.112.200 14.098.000 (100%)	Tercapai
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	78.400.000 78.400.000 (100%)	-
4	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 Laporan	7 Laporan	78.400.000 78.400.000 (100%)	Tercapai
4.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian NKRI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Laporan	7 Laporan	78.400.000 78.400.000 (100%)	Tercapai
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase desa yang melakukan	100%	94%	24.768.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	administrasi serta pengelolaan keuangan yang tertib dan baik			23.565.920 (95%)	
5	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah laporan rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 Laporan	6 Laporan	24.768.000 23.565.920 (95%)	Tercapai
5.1	Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa	23 Dokumen	23 Dokumen	24.768.000 23.565.920 (95%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia (%)	100%	99%	2.396.459.430 2.379.321.743	Belum Tercapai
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring	3 Buah	3 Buah	3.456.600 3.450.400 (100%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jenis dokumen (lakip, sakup, evaluasi RKPD)	3 Buah	3 Buah	1.750.200 1.746.600 (100%)	Tercapai
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan monitoring	3 Buah	3 Buah	1.706.400 1.706.400 (100%)	Tercapai
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersediaannya jenis dokumen laporan keuangan	25 Orang	24 Orang	2.257.247.301 2.257.247.301 (98%)	Belum Tercapai
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji/ terbayarkan	25 Orang	24 Orang	2.199.980.210 2.199.980.210 (98%)	Belum Tercapai
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya AC peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	85.667.620 85.667.620 (98%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3.1	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan	3 Jenis	3 Jenis	3.260.100 3.257.000 (100%)	Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	20 Jenis	20 Jenis	24.897.300	Tercapai
		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	25 Unit	25 Unit	24.863.000 (100%)	
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	25 Jenis	25 Jenis	12.334.800 12.125.400 (98%)	Tercapai
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makanan, minuman tersedia	5 Jenis	5 Jenis	37.900.000 37.900.000 (100%)	Tercapai
3.5	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	4 Jenis	4 Jenis	7.275.420 5.763.640 (79%)	Tercapai
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya BMD dalam kondisi baik	5 Jenis	5 Jenis	37.935.000 37.935.000 (84%)	Tercapai
4.1	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional dalam kondisi baik, mobil jabatan dalam kondisi baik	12 Unit	12 Unit	23.675.000 17.881.500 (76%)	Tercapai
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Unit	3 Unit	10.760.000 10.760.000 (99%)	Tercapai
4.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	3 Unit	3 Unit	3.500.000 3.500.000 (100%)	Tercapai
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya AC, peralatan dan perlengkapan kantor	4 Unit	4 Unit	69.420.000 59.980.593 (86%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk Jumlah surat keluar	480 Buah 250 Buah	575 Buah 120 Buah	2.250.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
					2.230.000 (99%)	Belum Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis taihan dibayar dalam 12 bulan	1 Tahun	1 Tahun	34.170.000 25.350.593 (86%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah alat kebersihan tersedia Jumlah tenaga kebersihan (Pramu kantor)	6 Buah 2 Orang	6 Buah 1 Orang	33.000.000 32.400.000 (98%)	Tercapai Belum Tercapai

Sumber data : Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.

Selama tahun anggaran 2021 dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Kecamatan Paguyangan, pada pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan ditemukan beberapa permasalahan, antara lain :

1. Program Penyelenggraan Pemerintah dan Pelayanan publik Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepda Camat ada kendala pada pelunasan PBB untuk mengatasinya dilakukan pembagian jadwal kepada desa untuk pembayaran PBB pada jadwalyang sudah disepakati bersama.
2. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kegiatan koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah berjalan sesuai target kegiatan.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten /Kota belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 2.396.459.430 sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 2.379.321.743 atau mencapai 99 % dari anggaran, hal ini. menunjukkan bahwan program, kegiatan dan subkegiatan sudah berjalan dengan optimal mendekati 100%.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dengan anggaran belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 176.980.000 sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 133.878.812 atau mencapai 76 % dari anggaran, hal ini. menunjukkan bahwan program,



kegiatan dan subkegiatan sudah berjalan baik walaupun belum maksimal hal ini karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa kegiatan ditiadakan.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 14.112.000 sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 14.098.00 atau mencapai 100 % dari anggaran, hal ini. menunjukkan bahwan program, kegiatan dan subkegiatan sudah berjalan dengan optimal

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 78.400.000 sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 78.400.000 atau mencapai 100% dari anggaran, hal ini. menunjukkan bahwan program, kegiatan dan subkegiatan sudah berjalan dengan optimal.

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan anggaran belanja menurut program, kegiatan dan sub kegiatan mencapai Rp. 24.768.800 sedangkan nilai realisasi belanja mencapai Rp. 23.565.920 atau mencapai 95% dari anggaran, hal ini. menunjukkan bahwan program, kegiatan dan subkegiatan sudah berjalan dengan optimal





C.48 Kecamatan Sirampog

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Sirampog sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Sirampog diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 2.065.303.600 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 1.970.241.443 atau 95,40% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.109
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Sirampog T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Sirampog				
	Belanja Operasi	1.993.362.300	1.861.992.117	131.370.183	93,41
	Belanja Modal	71.941.300	70.445.000	(1.496.300)	97,92
	JUMLAH	2.065.303.600	1.932.437.117	132.866.483	93,57

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Sirampog dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.110
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Sirampog T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	-	-	-	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Tata Kelola Penegakan dan Penerapan Perda dan Perkada dengan baik	100%	100%	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring ke dalam daerah	100%	100%	25.000.000 25.000.000 (100%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	100%	100%	4.510.000 4.510.000 (100%)	Tercapai
1.	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tata Kelola Penegakan dan Penerapan Perda dan Perkada dengan baik	100%	100%	4.510.000 4.510.000 (100%)	Tercapai
1.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	100%	100%	4.510.000 4.510.000 (100%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pesentase Kehadiran Pegawai	100 %	93,57	2.065.303.600 1.932.437.117 (93,57%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	100%	93.57%	1.447.081.218 1.353.985.739 (93.57%)	Tercapai
1.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	1.447.081.218 1.353.985.739 (93.57%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	176.277.002 174.725.690 (99,12%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan	15 Jenis	15 Jenis	15.500.000 15.457.070 (99,72%)	Tercapai
2.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis alat kebersihan dan pembersih	16 Jenis	16 Jenis	19,537,902 18,324,820 (93,79%)	Tercapai
2.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan dan minuman yang tersedia	5 Jenis	5 Jenis	61,445,000 61,247,000 (99,68%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	6.420.100 6.419.600 (99,99%)	Tercapai
2.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3 Jenis	3 Jenis	3,360,000 3,360,000 (98,17%)	Tercapai
2.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan daerah	350 Laporan	350 Laporan	70.014.000 69.917.200 (99,86%)	Tercapai
3.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	97,95%	71.941.300 70,445,000 (97,95%)	Tercapai
3.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Jenis	15 Jenis	71.941.300 70,445,000 (97,95%)	Tercapai
4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	301.052.080 273.303.188 (90,78%)	Tercapai
4.1	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar Terdistribusi	2574 buah	2574 buah	39.792.280 39.840.865 (100%)	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Janis tagihan di bayar 12 bulan	3 Jenis	3 Jenis	31,800,800 19,892,323 (62,55%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non ASN	15 Orang	15 Orang	229,460,000 213,570,000 (93,08%)	Tercapai
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pembangunan yang dikelola dengan baik	100%	100%	39.441.000 31.179.500 (99,00%)	Tercapai
5.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua dalam kondisi baik Jumlah mobil dinas dalam keadaan baik	9 Unit 1 Unit	9 Unit 1 Unit	11,559,000 7.226.000 (56,35%)	Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jenis Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10 Unit	10 Unit	3.000.000 1,914,000 (63,8 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
5.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	10,282,000	Tercapai
		Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	10,266,500 (99,95)	
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	1 Unit	14,600,000 11,773,000 (80.64)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk Kecamatan Sirampog tidak ada permasalahan yang dihadapi. Semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana mestinya untuk memperoleh hasil sesuai target.

Analisis Kesesuaian Capaian

Capaian Kinerja pada OPD Kantor Kecamatan Sirampog dengan indikator kinerjanya hampir menunjukkan kesesuaian antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan. Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukkan bahwa Anggaran Untuk Kecamatan Sirampog Tahun 2021 sebesar Rp.2.065.303.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.932.437.117 dengan persentase 93.57%, dengan dilihat dari presentase Anggaran yang mencapai 93.57% untuk Tahun Anggaran 2021 rata-rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua kegiatan yang ada di Kecamatan Sirampog.



C.13 Kecamatan Bantarkawung

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Bantarkawung sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Bantarkawung, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 3.083.289.910 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 2.961.215.394 atau 96,04% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.111
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Bantarkawung T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Bantarkawung				
	Belanja Operasi	2.773.587.910	2.653.624.394	119.963.516	95,67
	Belanja Modal	309.702.000	307.591.000	2.111.000	99,32
	JUMLAH	3.083.289.910	2.961.215.394	122.074.516	96,04

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bantarkawung dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.112
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Bantarkawung T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	9.000.000 9.000.000 (100 %)	Tercapai
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	97%	100 %	9.000.000 9.000.000 (100 %)	Tercapai
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	Jumlah rekomendasi (pendirian lembaga, SKTM, Pernikahan,	5117 dok	5117 dok	9.000.000 9.000.000	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Nonperizinan	Proposal bantuan hibah dan bansos);			(100 %)	
		Surat keterangan kematian;	1200 Surat	1200 Surat		
		Target pelunasan PBB;	1.447.956.393 rupiah	1.447.956.393 rupiah		
		Target pendapatan retribusi daerah;	6000.000 rupiah	6.000.000 rupiah		
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	99	20.036.000 19.817.500 (98,90 %)	Tercapai
2	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Rancangan Pembangunan di Desa	Jumlah dok usulan keg pembangunan Desa dan Kecamatan	20 dok	20 dok	18.686.000 18.467.500 (98,83 %)	Tercapai
2.1	Peningkatan Efektifitas Keg Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis lomba yang dilaksanakan (lomba desa, MTQ, Dokter kecil, Sinok sitong, Rancang busana, HUT RI, Hari Jadi, evaluasi kecamatan);	7 jenis	7 jenis	1.350.000 1.350.000 (100 %)	Tercapai
		Jumlah BUMDes yang terbentuk;	4 unit	4 unit		
		Peningkatan Omset UPPK dimasing-masing Desa	1%	1%		
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	98	182.019.000 165.330.000 (90,83%)	Tercapai
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jenis pembinaan dan pengamanan oleh anggota Pol PP dan Linmas	3 jenis	3 jenis	91.009.500 88.760.000 (97,52 %)	Tercapai
3.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah anggota linmas yang dibina satpol pp;	432 orang	432 orang	91.009.500 88.760.000 (97,52 %)	Tercapai
		Jumlah anggota Pol PP yang melakukan pengamanan kantor	5 orang	5 orang		
		Jumlah anggota Pol PP yang terbina	5 orang	5 orang		
		Belanja Natura dan Pakan Naylor	11 bulan	11 bulan	10.950.000 10.950.000 (100%)	Tercapai
		Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu	12 bulan	12 bulan	14.470.000 2.280.000 (15.76%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	11 bulan 2 orang	11 bulan 2 orang	33.880.000 31.640.000 (93,38 %)	Tercapai
		Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara/Posko Penanggulangan Bencana	30 Hari	30 Hari	11.500.000 11.500.000 (100 %)	Tercapai
		Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	12 bulan	12 bulan	20.209.500 20.200.000 (99.95 %)	Tercapai
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan (%)	97	100	46.800.000 46.800.000 (100 %)	Tercapai
4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jenis dok laporan aset kelurahan dan desa;	1 dok	1 dok	24.300.000	Tercapai
		Jenis dok laporan pelaksanaan keg pembangunan desa (ADD/bantuan keuangan/Dana Desa);	60 dok	60 dok	24.300.000 (100 %)	
4.1	Fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Belanja Perjalanan Dinas	8 dok	8 dok	3.600.000 3.600.000 (100 %)	Tercapai
4.2	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Belanja Makan dan Minum Rapat	3 Keg	3 Keg	2.700.000 2.700.000 (100 %)	Tercapai
4.3	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Laporan Keg Lembaga Masyarakat dan PKK	90 Dok	90 Dok	16.200.000 16.200.000 (100 %)	Tercapai
		Belanja Makan dan Minum Rapat	12 Keg	12 Keg	5.400.000 5.400.000 (100 %)	Tercapai
		Belanja Makan dan Minum Rapat	3 orang	3 orang	10.800.000 10.800.000 (100 %)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase dok perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	96,04 %	3.083.289.910 2.961.215.394 (96,04 %)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	20 orang	20 orang	2.175.784.150 2.084.565.314 (95,81 %)	Tercapai
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	20 orang	20 orang	2.175.784.150 2.084.565.314 (95,81 %)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jenis Keg administrasi penunjang pelayanan public	8 jenis	8 jenis	740.660.260 712.272.580 (96,16 %)	Tercapai
2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Komponen listrik/penerangan	12 jenis	12 jenis	2.249.000 2.238.500 (99,53 %)	Tercapai
2.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan Gedung Kantor Baru; Jenis Peralatan rumah jabatan/dinas baru Jenis Perlengkapan gedung kantor baru Jenis Perlengkapan rumah jabatan/dinas baru	8 jenis 0 jenis 19 jenis 0 jenis	8 jenis 0 jenis 19 jenis 0 jenis	38.572.300 38.188.500 (99 %)	Tercapai
2.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Alat Kebersihan dan bahan pembersih; Jenis peralatan rumah tangga; Tabung Gas Jenis Peralatan rumah tangga;	6 jenis 1 jenis 6 jenis	6 jenis 1 jenis 12 jenis	8.614.500 8.594.500 (99,77 %)	Tercapai
2.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	60 jenis	60 jenis	65.824.000 62.016.000 (94,21 %)	Tercapai
2.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedia	3 jenis	3 jenis	19.016.960 18.656.950 (98,11 %)	Tercapai
2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Perundang- undangan tersedia	2 jenis	2 jenis	3.000.000 3.000.000 (100 %)	Tercapai
2.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis Bahan Makan Minum Tersedia	3 jenis	3 jenis	3.750.000 3.750.000 (100 %)	Tercapai
2.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Luar Daerah	10 Laporan	13 laporan	72.950.000 72.750.000 (99,73 %)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa penunjang keg pelayanan publik(jenis)	6 jenis	6 jenis	168.760.000 151.034.346 (89,49 %)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Terdistribusi;Jumlah	1750 buah	1750 buah	8.040.000	Tercapai
		Surat Masuk Terdistribusi;	1000 buah	1000 buah	8.040.000 (100 %)	
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan di bayar dalam 12 bulan	5 jenis	5 jenis	59.080.000 49.544.346 (83,86 %)	Tercapai
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi Tersedia	2 orang	2 orang	101.640.000 93.450.000 (91,94 %)	Tercapai
		Jumlah Tenaga Kebersihan Tersedia	2 orang	2 orang		
		Jumlah Tenaga Driver/Sopir Tersedia	1 orang	1 orang		
		Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Tersedia	1 orang	1 orang		
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang Milik Daerah dalam kondisi baik(unit)	30 unit	26 unit	360.172.500 354.282.284 (98,36 %)	Tercapai
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik;	12 unit	10 unit	30.621.500 27.062.784 (88,38 %)	Tercapai
		Jumlah Kendaraan dinas/operasional rusak dalam kondisi baik;	4 unit	4 unit		
		Jumlah Mobil diproses surat perijinannya;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Mobil jabatan dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Mobil jabatan rusak dalam kondisi baik;	0 unit	0 unit		
		Jumlah Motor di proses surat perijinannya;	12 unit	10 unit		
5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Mebeleur dalam kondisi baik;	4 unit	4 unit	17.600.000	Tercapai
		Jumlah Peralatan gedung dalam kondisi baik;	11 unit	11 unit	17.390.000 (98,81 %)	
		Jumlah Peralatan kerja diperbaiki;	6 unit	6 unit		
		Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondosi baik;	5 unit	5 unit		
		Jumlah rumah	1 unit	1 unit		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		jabatan/dinas dalam kondisi baik;				
		Jumlah rumah jabatan/dinas dalam kondisi baik;	3 unit	3 unit		
5.3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik;	1 unit	1 unit	309.702.000	Tercapai
		Jumlah gedung kantor dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit	307.591.000 (99,31 %)	
		Jumlah rumah dinas dalam kondisi baik;	1 unit	1 unit		
		Jumlah Bangunan Tempat Parkir rusak menjadi baik;	1 unit	1 unit		

Sumber data : Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bantarkawung yaitu pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Keg Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai permasalahan pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tidak bisa terealisasi karena kegitanya tidak dilaksanakan/tidak ada dengan penyelesaian anggaran tersebut kembali ke Anggaran Kas Daerah.

Analisis Kesesuaian capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 99% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukan bahwa Anggaran Untuk Kecamatan Bantarkawung Tahun 2021 sebesar Rp. 3.083.289.910,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.961.215.394,- dengan persentase 96,04%, dengan dilihat dari presentase Realisasi Anggaran yang mencapai 96,04% untuk Tahun Anggaran 2021 rata-rata telah tercapai dengan baik dilihat dari semua keg yang ada di Kecamatan Bantarkawung.



C.50 Kecamatan Salem

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Salem sebagai unsur kewilayahan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kecamatan Salem diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 3.352.840.634 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 3.273.175.329 atau 97,62 % secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.113
Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Salem T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kecamatan Salem				
	Belanja Operasi	3.111.412.134	3.032.430.329	(78.981.805)	97,46
	Belanja Modal	241.428.500	240.745.000	(683.500)	99,72
	JUMLAH	3.352.840.634	3.273.175.329	(79.665.305)	97,62

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Salem dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.114
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Kecamatan Salem T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SALEM						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	98%	100%	11,100,000 11,100,000 (100%)	Tercapai
1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	98%	100%	11,100,000 11,100,000 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah perijinan dan rekomendasi yang dikeluarkan	2 Jenis	0 Jenis	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
1.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Target pelunasan PBB	1	1	9,000,000 9,000,000 (100%)	Tercapai
1.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Data Organisasi ke agamaan, kepemudaan pendidikan formal dan non formal	1 Dok	1 Dok	2,100,000 2,100,000 (100%)	Tercapai
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0%	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0%	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jenis Lomba yang diikuti di Tk Kab	3 Jenis	0%	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0.98	26,350,000 26,350,000 (100%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0.98	26,350,000 26,350,000 (100%)	Tercapai
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jenis dekumen laporan pelaksanaan keg. pengelolaan aset desa	3 Jenis Keg	3 Jenis Keg	26,350,000 26,350,000 (100%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pelaksanaan tugas umum pemerntahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0%	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan inventarisasi kegiatan usaha tidak berijin	12 Pengusaha	-	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0.98	3,300,000 3,300,000 (100%)	Tercapai
1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan	0.98	0.98	3,300,000 3,300,000 (100%)	Tercapai
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pembinaan dan pengamanan oleh anggota Pol PP dan Linmas, Patroli wilayah Kecamatan dan Pemantauan Bencana	1 Dok	1 Dok	3,300,000 3,300,000 (100%)	Tercapai
1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	laporan monitoring Evaluasi pelaksanaan (pemilihan umum, Pilkada, Pilkades, seleksi perangkat Desa	2 Dok	0%	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig
1.3	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jenis dokumen administrasi pemerintahan Desa (RPJMDes , RKPDes, RAPBDes, APBDes, LKPDDes, Perdes, Perkades, Keputusan Kades)	3 Jenis	3 Jenis	9,750,000 9,600,000 (98%)	Tercapai
1.4	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Laporan kegiatan lembaga masyarakat dan PKK	1 Dok	1 Dok	1,500,000 1,485,500 (99%)	Tercapai
1.5	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah data perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan,	1 Dok	-	-	Tidak tercapai karena adanya refocusig



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		perikanan industri kecil, usaha informal, kehutanan dan distribusi hasil produksi				
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	90%	3,576,124,144 3,221,039,829 (90%)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	90%	2935081000 2,633,584,985 (90%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan Gaji dan Tunjanganya	30 Orang/ Bulan	27 Orang/ Bulan	2,697,617,370 2,633,216,985 (98%)	Belum Tercapai (Beberapa sudah Pensiun sebelum Tahun Anggaran berakhir)
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis Dokumen laporan akhir tahun	1 Lap	1 Lap	380.000 368.000 (97%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kehadiran Pegawai	100%	100%	10.200.000 9,990,000 (98%)	Tercapai
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	50 Stel	35 Stel	10,200,000 9,990,000 (98%)	Belum Tercapai (Pengurangan anggaran dan target tidak berubah)
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	163,029,480 113,676,200 (70%)	Tercapai
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	3 Jenis	3 Jenis	775.900 774.900 (100%)	Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	31 Jenis	31 Jenis	23,898,600 23,598,000 (99%)	Tercapai
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan tersedia	17 Jenis	17 Jenis	5,960,700 5,960,300 (100%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik tersedia	1 Paket/ Tahun	1 Paket/ Tahun	24,376,400 24,369,750 (100%)	Tercapai
3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan tersedia	7 Jenis	7 Jenis	13,498,400 13,347,250 (99%)	Tercapai
3.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jenis makanan dan minuman tersedia	3 Jenis	3 Jenis	13,960,000 13,906,000 (100%)	Tercapai
3.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas	100 Lap	70 Lap	42,360,000 31,720,000 (75%)	Belum Tercapai (PPKM)
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran di lingkungan kantor	1	1	173,101,380 171,702,920 (99%)	Tercapai
4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk terdistribusi	600 Buah	600 Buah	6,000,000 6,000,000 (100%)	Tercapai
		Jumlah surat keluar terdistribusi	700 Buah	700 Buah		
4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan dibayar dalam 12 bulan	3 Jenis	3 Jenis	38,801,100 37,444,360 (97%)	Tercapai
4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	5 Orang	5 Orang	128,300,280 128,258,560 (100%)	Tercapai
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	294,712,284 292,085,724 (99%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas di proses diproses surat perijinannya	10 Unit	10 Unit	3,299,880 3,290,000 (100%)	Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik	11 Unit	11 Unit	28,262,904 26,430,224 (94%)	Tercapai
5.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi/ dinas dalam kondisi baik	10 Unit	10 Unit	64,191,000 63,647,500 (99%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
5.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik	2 Unit	2 Unit	198,958,500 198,718,000 (100%)	Tercapai

Sumber data : Kecamatan Salem Kabupaten Brebes.

Pada dasarnya secara umum pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Salem Tahun Anggaran 2021 tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Capaian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Sebesar 97,62% atau sebesar Rp. 3.273.175.329 dari Pagu Total Anggaran Sebesar Rp 3.352.840.634, pada :

1. Program program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
3. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa karena adanya refocusing anggaran di triwulan pertama. Program kegiatan tersebut di nol kan dan pelaksanaannya di cover dari anggaran yang lain.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata- rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 97% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target kegiatan 97% menunjukkan bahwa capaian kinerja antar program dan kegiatan sudah sinkron.



C.51 Inspektorat

Pada tahun anggaran 2021 Inspektorat Kabupaten Brebes sebagai unsur pengawasan urusan pemerintahan.

Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Inspektorat diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.8.721.994.704 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 8.459.841.643 atau 96,99% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.115
Anggaran dan Realisasi Belanja
Inspektorat T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Pengawasan				
	Belanja Operasi	8.036.434.724	7.786.592.916	(249.841.808)	96,89
	Belanja Modal	685.559.980	673.248.727	(12.311.253)	98,20
	JUMLAH	8.721.994.704	8.459.841.643	(262.153.061)	96,99

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Inspektorat dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.116
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Inspektorat T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Terlaksananya Pengawasan di Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.330.144.500 1.210.224.885 (96,33%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	1.256.284.500 1.140.325.885 (96,44%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pengawasan (Reviu) LKJIP Kab. Brebes	1 Dok	1 Dok	655.200.000 648.547.407 (98,98 %)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Dokumen Pengawasan Laporan Keuangan	1 Dok	1 Dok	68.700.000 61.350.000 (89,30%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut LHP BPK RI dan APIP	1 Tahun	1 Tahun	458.524.500 430.428.479 (93,87%)	Tercapai
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengawasan dan Tindak Lanjut Pengaduan	100 %	100 %	73.860.000 69.899.000 (94,64%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terselesaikanya Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	73.860.000 69.899.000 (94,64%)	Tercapai
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Tersusunnya Peraturan/ Kebijakan tentang Pengawasan dan Pendampingan serta Asistensi	2 Dok	2 Dok	246.760.020 243.980.822 (98,87%)	Tercapai
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Peraturan/ Kebijakan tentang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dok	2 Dok	246.760.020 243.980.822 (98,87%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Peraturan/ Kebijakan tentang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	2 Dok	2 Dok	246.760.020 243.980.822 (98,87%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	-	-	-	7.145.090.184 7.005.635.936 98,05%	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Daerah	Kehadiran Pegawai	60 org	60 org	21.760.020 21.673.700 (99,60%)	Tercapai
1.1	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jenis dokumen laporan akhir tahun	16 Buku	16 Buku	21.760.020 21.673.700 (99,60%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah	-	-	-	161.594.700 160.994.800 (99,63%)	-
2.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	60 Stel	60 Stel	24.000.000 24.000.000 (100%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	Jumlah aparatur/ pengawas	300 Orang	300 Orang	101.934.800 101.639.000 (99,71%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah aparatur/ pengawas	30 Orang	30 Orang	35.659.900 35.355.800 (99,15%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	356.866.420 345.427.905 (96,79%)	-
3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	9 Jenis	9 Jenis	11.704.500 11.704.500 (100%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	12 buah spanduk dan 5 jenis	12 buah spanduk dan 5 jenis	75.224.070 69.675.827 (92,60%)	Tercapai
3.3	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	8 Buah	8 Buah	2.325.000 2.190.000 (94,19%)	Tercapai
3.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	9 Jenis	9 Jenis	26.883.850 26.791.250 (99,66%)	Tercapai
3.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan tersedia	216 buah dan 14 buku	216 buah dan 14 buku	32.072.000 31.960.000 (99,65%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3.6	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jenis bahan makan minum tersedia	12 Bulan	12 Bulan	126.436.000 126.436.000 (99,85%)	Tercapai
3.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jenis penyelenggaraan rapat dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	82.221.000 76.670.328 (93,25%)	Tercapai
3.8	Kegiatan gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-	5.414.377.704 5.349.490.278 (98,80%)	-
4	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahan daerah	-	-	-	579.115.010 553.383.479 (95,56%)	-
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar terdistribusi Jumlah surat masuk terdistribusi	3000 surat, 310 perangko, 538 materai	2935 surat, 501 perangko, 295 materai	18.193.110 16.668.315 (91,62%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	89.545.000 74.307.620 (82,98%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12 Bulan	334.316.900 327.956.544 (98,10%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan tersedia	8 Orang	8 Orang	137.060.000 134.451.000 (98,10%)	Tercapai
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	611.376.330 574.665.774 (94,00%)	-
5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	201.934.000 166.376.674 (82,39%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	20 komputer, 10 mesin tik, 16 printer	20 komputer, 10 mesin tik, 16 printer	50.483.520 50.471.100 (99,98%)	Tercapai
5.3	Sub Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah perlengkapan	12 unit, 1 paket, 1	12 unit, 1 paket, 1	358.958.810	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
	kantor dan Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik	unit	unit	357.818.000 (99,68%)	

Sumber data : Inspektorat Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun anggaran 20221, Inspektorat Kabupaten Brebes menghadapi beberapa masalah di antaranya :

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah mempunyai permasalahan belum optimalnya fungsi pengawasan internal dengan masih banyaknya temuan hasil pengawasan; Penyelesaiannya dengan cara meningkatkan integritas APIP dan komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas kerja.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu mempunyai permasalahan kurangnya data dukung saat aduan disampaikan; Penyelesaiannya yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dan penjelasan pada saat menerima aduan.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 97,60% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target 100% menunjukan bahwa kinerja Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dapat terlaksana dengan baik.





C.52 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Pada tahun anggaran 2021 Baperlitbangda melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada dua bidang yaitu Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Baperlitbangda diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 8.149.833.689 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 7.888.222.296 atau 96,77% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.117
Anggaran dan Realisasi Belanja
Baperlitbangda T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Perencanaan	7.613.085.689	7.357.541.686	(255.544.003)	96,64
	Belanja Operasi	7.254.261.689	7.025.231.686	(229.030.003)	96,84
	Belanja Modal	358.824.000	332.310.000	(26.514.000)	92,61
2	Penelitian dan Pengembangan	536.748.000	530.680.610	(6.067.390)	98,87
	Belanja Operasi	536.748.000	530.680.610	(6.067.390)	98,87
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	8.149.833.689	7.888.222.296	(261.611.393)	96,77

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Baperlitbangda dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



Tabel III.118
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Baperlitbangda T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSURPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
BIDANG PERENCANAAN						
I	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	418.050.000 394.641.020 (94,40%)	Tercapai
1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya dokumne perencanaan Pembangunan Daerah TA 2021 dan Perubahan TA 2020	100%	100%	278.000.000 275.674.570 (99,16%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renstra dengan Renja PD	100%	100%	14.777.000 14.732.900 (99,70%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota	Persentase partisipasi masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan dan usulan yang terakomodir	93%	93%	95.600.000 95.469.500 (99,86%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen RKPD	2 jenis	2 jenis	167.623.000 165.472.170 (98,72%)	Tercapai
2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemda bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dok Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Brebes Th	100%	100%	46.810.000 39.730.150 (84,88%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemda bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Buku Informasi Kegiatan Pembangunan Daerah dan SIPD eDatabase	2 jenis	2 jenis	46.810.000 39.730.150 (84,88%)	Tercapai
3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi dan monitoring Program Kegiatan PD	100%	100%	93.240.000 79.236.300 (84,98%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kab/Kota	Dokumen Evaluasi dan Laoran Evaluasi Program Kegiatan PD	2 dok	2 Dok	41.750.000 34.490.500 (82,61%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan : Monitoring, Evaluasi Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan Monitoring Program dan Kegiatan PD	1 dok	1 dok	51.490.000 44.745.800 (86,90%)	Tercapai
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Keselarasan antar dokumen perencanaan di bidang Pemerintahan, sosbud, Ekonomi dan infrastruktur	100%	100%	1.007.109.000 987.554.220 (98,06%)	Tercapai
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen keselarasan antar dokumen perencanaan PD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10 jenis	10 jenis	456.430.000 444.325.589 (97,35%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen tentang Penanggulangan Kemsikinan Dok kemitraan bidang Pemerintahan dgn Instansi Pem dan Non Pem	4 dok 1 dok	4 dok 1 dok	263.119.000 251.112.615 (95,44%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen kegiatan di bidang Sosisal Budaya	3 dok	3 dok	111.582.000 111.527.900 (99,95%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisai Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen perenanaan, pengendalian dan evaluasi PD bidang social budaya	6 dok	6 dok	81.729.000 81.685.074 (99,95%)	Tercapai
2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Dokumen perencanaan konservasi lahan kritis Masterplan bidang perekonomian	2 dok 5 dok	2 dok 5 dok	386.632.000 381.859.959 (98,77%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJMD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah	5 dok	5 dok	143.477.000 139.965.511 (97,55%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJMD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen lahan kritis Dokumen GNKPA	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	243.155.000 241.894.448 (99,48%)	Tercapai
3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya dokumen kajian pengembangan wilayah	5 dok	5 dok	164.047.000 161.368.672 (98,37%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJMD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen kajian pengembangan wilayah dan pelaksanaan TMMD	4 dok	4 dok	137.547.000 135.165.322 (98,27%)	Tercapai
3.2	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJMD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Kerja Sama Wilayah Perbatasan	1 dok	1 dok	26.500.000 26.203.350 (98,88%)	Tercapai
UNSURPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
I	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	...	100%	100%	536.748.000 528.430.610 (98,45%)	Tercapai
1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Hasil FDA yang direkomen- dasikan	3 rekomen- dasi	3 rekomen- dasi	176.860.000 175.023.500 (99,47%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Hasil FDA yg ditindaklanjuti Jumlah rekomendasi hasil kelitbangan	1 dok 1 rekomen- dasi	1 dok 1 rekomen- dasi	55.300.000 54.735.000 (98,98%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Hasil FDA yg ditindaklanjuti	1 dok	1 dok	120.660.000 120.288.500 (99,69%)	Tercapai
2	Kegiataniatan Pengembangan Inovasi dan teknologi	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan penerapan inovasi	100%	100%	358.368.000 353.407.110 (98,62%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
2.1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Pembuatan aplikasi kelitbangan	1 aplikasi	1 aplikasi	186.956.000 185.589.940 (99,27%)	Tercapai
2.2	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penetapan Teknologi	Jumlah Fasilitas KKN Jml keg pembentukan desa inovasi	10 PT 3 keg	10 PT 3 keg	41.068.000 39.446.900 (96,05%)	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Desiminasi jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan 26.673.000 Pemerintah Daerah yang bersifat inovatif	Jumlah publikasi ilmiah (cetak dan online)	1 volume	1 volume	26.673.000 26.112.500 (97,90%)	Tercapai
2.4	Sub Kegiatan : Sosialisasi dan Desiminasi hasil Kelitbangan	Fasilitas keg KKN	10 PT	10 PT	36.357.000 35.704.000 (98,20%)	Tercapai
2.5	Sub Kegiatan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	Hasil Inovasi masyarakat	2 keg	2 keg	67.314.000 66.553.770 (98,87%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	6.187.926.689 5.929.929.652 (95,83%)	Tercapai
1	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Presentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan keg tersedia	100%	100%	73.424.000 72.739.000 (99,07%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam daerah	36 Lap	36 Lap	73.424.000 72.739.000 (99,07%)	Tercapai
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan PD	Tingkat pelayanan administrasi keuangan	100%	100%	4.192.334.689 4.143.505.434 (98,83%)	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	45 orang	45 orang	4.192.334.689 4.143.505.434 (98,83%)	Tercapai
3	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian PD	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	100%	100%	27.000.000 25.000.000 (92,59%)	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari tertentu (Baju OR)	80 Stel	80 Stel	27.000.000 25.000.000 (92,59%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4	Kegiatan : Administrasi Umum PD	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	748.054.000 716.657.413 (95,80%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan ; Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	10 Jenis	10 Jenis	13.053.000 13.032.000 (99,84%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan ; Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	6 jenis	416.201.000 391.149.600 (93,98%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan : Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	38 jenis	38 jenis	53.948.000 52.781.400 (97,84%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan dan minum	4 jenis	4 jenis	53.240.000 53.420.000 (100%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan	5 jenis	5 jenis	61.868.000 61.862.500 (99,99%)	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jenis bahan bacaan dan perundang undangan	14 jenis	14 jenis	4.200.000 2.850.000 (67,86%)	Tercapai
4.7	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tamu	Jenis bahan makan dan minum	4 jenis	4 jenis	12.243.000 9.205.000 (75,19%)	Tercapai
4.8	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas	100%	100%	133.301.000 132.536.913 (99,43%)	Tercapai
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemda	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	734.158.000 606.801.000 (82,65%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa Komunikasi, Sb Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan terbayar dalam 12 bulan	4 jenis	4 jenis	338.098.000 232.617.182 (68,80%)	Tercapai
5.2	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	21 orang	21 orang	396.060.000 374.183.840 (94,48%)	Tercapai
6	Kegiatan : Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset daerah dalam kondisi baik	100%	100%	367.026.000 365.227.239 (99,51%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas mobil dan sepeda motor dalam kondisi baik	42 unit (7 mobil dan 35 motor)	42 unit (7 mobil dan 35 motor)	197.220.000 195.455.539 (99,11%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
6.2	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	82.538.000 82.531.700 (99,99%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	1 unit	1 unit	87.268.000 87.240.000 (99,97%)	Tercapai

Sumber data : Baperlitbangda Kabupaten Brebes.

Pada dasarnya pelaksanaan program/kegiatan di lingkup Baperlitbangda Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan. Capaian realisasi Belanja Barang Jasa Anggaran Tahun 2021 sebesar 94,61% atau sebesar Rp. 3.722.051.489 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.934.199.000,-.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan mencapai 94,61% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target keg 94,61% menunjukkan bahwa capaian kinerja antar program dan keg sudah sinkron.





C.53 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun anggaran 2021 BPKAD melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan. Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 760.386.460.302 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 747.454.668.421 atau 98,30% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.119
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Keuangan	760.386.460.302	747.454.668.421	(12.931.791.881)	98,30
	Belanja Operasi	54.147.905.948	52.161.215.239	(1.986.690.709)	96,33
	Belanja Modal	688.530.315	649.167.750	(39.362.565)	94,28
	Belanja Tidak Terduga	7.582.672.151	2.735.627.990	(4.847.044.161)	36,08
	Belanja Transfer	697.967.351.888	691.908.657.442	(6.058.694.446)	99,13
	JUMLAH	760.386.460.302	747.454.668.421	(12.931.791.881)	98,30

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BPKAD dan hasil-hasilnya terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.120
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
----	--	--	--------	-----------	------------------------------	-----



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN						
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia	100%	98.00%%	758,525,433,370 745,838,511,069 (97.84%)	-
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan capaian kinerja	100%	70.00%	27.000.000 18.520.000 (68,59%)	-
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen (Lakip, Sakip, Evaluasi RKPD)	6 jenis	6 jenis	27.000.000 18.520.000 (68,59%)	karena pandemic Covid - 19
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terbayarnya semua kewajiban	100%	100%	5.269.768.393 5.055.990.225 (95,94%)	Tercapai
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang terbayarkan Gaji dan Tunjangan	50 orang	43 orang	5.269.768.393 5.055.990.225 (95,94%)	karena mutasi pegawai
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	3.040.000 3.040.000 (100%)	-
3.1	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	5 orang	5 orang	3.040.000 3.040.000 (100%)	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	682.655.989 663.133.193 (97,61%)	-
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik / penerangan	11 jenis	11 jenis	17.928.225 17.928.225 (100%)	-
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	44 jenis	44 jenis	82.428.380 82.241.700 (99.77%)	-
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	6 jenis	6 jenis	157.349.055 155.629.092 (98.91%)	-

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makanan minuman tersedia	6 jenis	6 jenis	114.566.000 106.906.000 (93.31%)	-
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	17 jenis	17 jenis	152.390.329 151.478.000 (99.40%)	-
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas	60 laporan	2.052 laporan	157.994.000 148.950.176 (94.28%)	Banyak SPPD untuk aktivitas vaksinasi dan undangan kegiatan aktivitas koordinasi
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik (%)	100%	95.00%	402.354.315 361.251.750 (89.78%)	-
5.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis peralatan Gedung kantor baru	25 jenis	20 jenis	402.354.315 361.251.750 (89.78%)	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air, listrik, administrasi keuangan	100%	100%	42.084.312.910 40.487.459.160 (96.67%)	-
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar dan masuk terdistribusi	9.550 buah	3.492 buah	8.415.000 8.415.000 (100%)	Aktivitas surat menyurat menurun karena via media online
6.2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 bulan	5 jenis	5 jenis	40.647.822.950 39.133.640.760 (96.27%)	-
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Administrasi tersedia	22 orang	19 orang	1.428.074.960 1.345.403.400 (94.21%)	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Aset dalam kondisi baik	100%	100%	623.532.400 575.299.930 (93.67%)	-
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	72 unit	72 unit	98.465.000 96.244.480 (97.74%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	operasional atau Lapangan					
7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan Gedung dalam kondisi baik	160 unit	145 unit	170.220.500 156.500.450 (91.94%)	-
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan Gedung rusak menjadi baik dan Gedung kantor dalam kondisi keadaan baik	5 unit	5 unit	354.846.900 322.555.000 (91.94%)	-
8	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersusunnya Anggaran Kabupaten Brebes	49 SKPD	49 SKPD	1.960.745.421 1.926.337.613 (98.25%)	-
8.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	49 dokumen	112.710.720 111.559.400 (98.98%)	Karena ada perubahan SOTK
8.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL) (dokumen)	52 dokumen	49 dokumen	102.627.340 100.936.400 (98.35%)	-
8.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA - SKPD	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	49 dokumen	25.892.000 24.974.000 (96.45%)	-
8.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA - SKPD	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	49 dokumen	25.857.000 24.884.000 (96.24%)	-
8.5	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	49 dokumen	857.621.141 837.622.670 (97.67%)	-
8.6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	49 dokumen	634.669.220 625.989.600 (98.63%)	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	tentang Penjabaran Perubahan APBD					
8.7	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah SK atau Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan Jumlah Surat Edaran mengenai Pedoman Penyusunan Penganggaran Daerah yang diterbitkan Perbub ASB dan Kebijakan dan Regulasi Penganggaran untuk Belanja Langsung yang ditetapkan	20 SK/ Perbub 2 dokumen 1 Perbub	7 SK/ Perbub 4 dokumen 1 Perbub	35.944.900 35.727.030 (99.39%)	Aktivitas anggaran terbatas karena kondis pandemic Covid-19
8.8	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jenis dokumen (penganggaran terverifikasi, PPAS dan APBD BL, Penyusunan Anggaran BL)	52 dokumen	52 dokumen	56.932.000 56.922.704 (99.98%)	-
8.9	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah SK atau Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan	1 dokumen	1 dokumen	96.292.000 95.961.809 (99.66%)	-
8.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jenis Dokumen (pencairan BTL dan pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah) Jumlah SK atau Perbub tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan	4 jenis 1 dokumen	4 jenis 1 dokumen	12.199.100 11.760.000 (96.40%)	-
9	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan	Time Rasio Pelayanan Penerbitan Surat	49 SKPD	49 SKPD	839.493.808 832.844.116	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Daerah	Perintah Pencairan Dana (SP2D) (hari)			(99.21%)	
9.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah; Penata-usahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengajuan pencairan dana – dana yg berasal dari pemerintah pusat / provinsi; verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya; BA pemeriksaan kas; hasil analisis anggaran BL,BTL dan pembiayaan PPKD; Penata-usahaan Kas Non Anggaran)	6 jenis	6 jenis	503.026.730 498.868.107 (99.17%)	-
		Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Peneluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah)	2 jenis	2 jenis		Refocusing anggaran
		Jumlah lembar daftar penguji SP2D dan SP2D yang disiapkan	17.000 lembar	12.372 lembar		Refocusing anggaran
		Jumlah Register SP2D dan Penjagaan Realisasi SP2D (lembar)	17.000 lembar	12.372 lembar		Refocusing anggaran
		Jumlah SKPP yang diterbitkan	500 lembar	700 lembar		Banyaknya pensiun yang PNS
		Jumlah Surat Perintah Membayar dan kelengkapannya yang terverifikasi	17.000 lembar	12.372 lembar		Refocusing anggaran

[illegible]



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengajuan pencairan dana – dana yg berasal dari pemerintah pusat / provinsi; verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya; BA pemeriksaan kas; hasil analisis anggaran BL,BTL dan pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non Anggaran) Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Peneluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah	2 jenis	2 jenis	(99.11%)	
9.6	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengajuan pencairan dana – dana yg berasal dari pemerintah pusat / provinsi; verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya; BA pemeriksaan kas; hasil analisis anggaran BL,BTL dan pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non Anggaran)	6 jenis	6 jenis	31.550.600 31.550.000 (100%)	

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
		Jenis Dokumen (Pencairan BTL dan Pengeluaran Pembiayaan PPKD; Laporan Keuangan atas BTL dan Peneluaran Pembiayaan PPKD; pinjaman atas nama pemerintah daerah; utang piutang daerah	2 jenis	2 jenis		
9.7	Rekonsiliasi Data Perimbangan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jenis Dokumen (likuiditas kas daerah; Penatausahaan Deposito dan investasi daerah; rekonsiliasi keuangan daerah; pengajuan pencairan dana – dana yg berasal dari pemerintah pusat / provinsi; verifikasi STS dan bukti penerimaan lainnya; BA pemeriksaan kas; hasil analisis anggaran BL,BTL dan pembiayaan PPKD; Penatausahaan Kas Non Anggaran)	6 jenis	6 jenis	67.056.100 65.785.900 (98.11%)	-
		Jenis laporan (konfirmasi realisasi APBD per triwulan, realisasi gaji PNSD setiap bulan)	12 jenis	12 jenis		
		Jumlah laporan dan setoran PPN, PPh, dan PPN BM yang dibuat	12 lembar	12 lembar		
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Perda)	1 dokumen	1 dokumen	808.506.095 785.613.600 (97.17%)	-
10.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca,	118 jenis	118 jenis	27.563.100 26.432.000 (95.90%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Pengeluaran Kas Daerah	Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD				
10.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan – LO dan Beban	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	118 jenis 117 jenis	118 jenis 117 jenis	32.380.000 28.236.000 (87.20%)	-
10.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	117 jenis	117 jenis	23.575.000 23.473.000 (99.57%)	-
10.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	118 dokumen	118 dokumen	143.811.750 140.240.400 (97.52%)	-
10.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	117 dokumen	117 dokumen	360.528.400 358.756.700 (99.51%)	-



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota					
10.6	Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	118 dokumen	118 dokumen	99.664.000 95.843.750 (96.17%)	-
10.7	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jenis Laporan informasi Keuangan Daerah Jumlah Laporan Keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD yang terpublikasikan	7 jenis 1 laporan	7 jenis 1 laporan	5.850.000 5.256.000 (89.85%)	-
10.8	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 perbub	1 perbub	8.810.000 8.083.750 (91.76%)	-
10.9	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 perbub	1 perbub	31.200.000 28.800.000 (92.31%)	-
10.10	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten / Kota	Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD, Laporan Semester I Pemda, Berita Acara Rekonsiliasi dengan SKPD	117 dokumen	117 dokumen	75.123.845 70.492.000 (93.83%)	-
11	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perda tentang APBD (Perda)	1 Tahun	1 Tahun	705.824.024.039 695.129.021.482 (98.48%)	-
11.1	Analisi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	274.000.000 273.265.200 (99.73%)	-



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KET
	Pinjaman Pemerintah Daerah					
11.2	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Penyaluran Bantuan Keuangan	1 tahun	1 tahun	680.265.716.500 679.666.074.000 (99.91%)	-
11.3	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Belanja Tidak Terduga	1 tahun	1 tahun	7.582.672.151 2.944.738.340 (38.84%)	Tergantung pengajuan permintaan Dana BTT SKPD terkait
11.4	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 tahun	1 tahun	17.701.635.388 12.244.943.942 (69%)	karena pengajuann ya tergantung dari realisasi pajak dan retribusi
II	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Sensus BMD (%)	100%	100%	1.861.026.932 1.836.174.927 (99%)	-
1	Pengeloalaan Barang Milik Daerah	Cakupan Sensus BMD (%)	100%	100%	1.861.026.932 1.836.174.927 (99%)	-
1.1	Penyusunan Standart Harga	Dokumen (SSH; Evaluasi pengelolaan Aset Daerah)	2 dokumen	2 dokumen	86.985.000 86.745.000 (99%)	-
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Dokumen (Aset daerah yang terhapus; barang dan aset daerah yang terinventarisir; daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah; ketentuan skala prioritas penaksiran dan bentuk – bentuk pengamanan barang dan aset daerah	4 dokumen	4 dokumen	1.174.681.000 1.161.132.275 (99%)	-
1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	SK haril sengketa atas barang dan aset daerah yang terselesaikan	49 SKPD	49 SKPD	118.427.000 113.198.000 (96%)	-
1.4	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	SK Penetapan Retribusi kekayaan daerah	Rp. 320.000.00 0	Rp. 320.000.000	480.933.932 475.099.652 (99%)	-

Sumber data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.



Dalam penyelenggaraan pemerintah Bidang Keuangan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai permasalahan kurang maksimalnya kegiatan di perjalanan dinas dalam kota dikarenakan pandemic Covid – 19 dengan ini penyelesaian hanya dapat dilakukan jika pandemic Covid – 19 trendnya menurun;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak mempunyai permasalahan Kebutuhan Belanja Tidak Terduga (BTT) belum maksimal karena tergantung dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) BTT berdasarkan permintaan Dana BTT dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan untuk dapat dimaksimalkan perlu adanya sosialisasi penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang banyak belum diketahui oleh SKPD se- Kabupaten Brebes;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten / Kota belum maksimal karena tergantung dasar pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Belanja Dana Bagi Hasil Kabupaten berdasarkan Rekonsiliasi besaran penerimaan pajak dan retribusi yang diterima Kabupaten Brebes dengan dasar Laporan Lembar Konfirmasi Tranfer untuk menentukan pengajuan pencairan Dana Bagi Hasil Kabupaten dan penyelesaian masalah perlu adanya koordinasi dengan 292 Desa di Kabupaten Brebes untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Brebes.



Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja Program yang sudah ditetapkan

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara keseluruhan 98.33% dari nilai Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 760,386,460,302 (Tujuh ratus enam puluh milyar tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus dua rupiah) terealisasi sebesar Rp. 747,674,685,996 (Tujuh ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu Sembilan ratus Sembilan puluh enam rupiah) sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target mencapai 98 % bahkan ada beberapa kegiatan terserap mencapai 100% hanya di beberapa Sub Kegiatan tertentu menunjukkan ada kegiatan yang kurang maksimal dikarenakan kondisi pandemic covid – 19 dan keterkaitan dengan pengajuan OPD sebagai dasar kelanjutan dari progress pencairan kegiatan yang melekat di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes, tetapi secara menyeluruh kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah sangat maksimal dalam pelayanan public di OPD dan Perangkat Desa se – Kabupaten Brebes dan antara program dan kegiatan serta sub kegiatan sudah sinkrons.

Penghargaan yang didapat pada tingkat provinsi dan tingkat nasional pada Tahun 2021

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes telah mendapatkan penghargaan dari Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah terkait upaya **TERBAIK** dalam peningkatan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 dan ini merupakan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes dalam upaya terus meningkatkan Kinerja kepada pelayanan public untuk semakin lebih baik kerja Cepat, Cerdas dan Akuntabel.



C.53 Badan Pendapatan Daerah

Pada tahun anggaran 2021 Bapenda melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang keuangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 15.362.601.988 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 14.754.430.281 atau 96,04% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.123
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Pendapatan Daerah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Keuangan				
	Belanja Operasi	13.311.322.068	12.822.718.631	(488.603.437)	96,33
	Belanja Modal	2.051.279.920	1.931.711.650	(119.568.270)	94,17
	JUMLAH	15.362.601.988	14.754.430.281	(608.171.707)	96,04

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bapenda dan hasil-hasilnya terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.124
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Pendapatan Daerah T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						
BIDANG KEUANGAN						
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Potensi dan angka ketetapan pajak daerah	107,23 M	124,51 M	3.107.586.400 2.895.470.207 (93,17%)	Tercapai
1.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Potensi dan angka ketetapan pajak daerah	107,23 M	124,51 M	3.107.586.400 2.895.470.207 (93,17%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.1	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen (penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah; penganggaran target pajak daerah); penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk perhitungan bagi hasil pajak dan retribusi ke desa (dokumen) Jenis dokumen (realisasi penerimaan pajak daerah; tunggakan pajak daerah yang terhutang) (dokumen) Jenis (Dokumen pendaftaran pajak daerah yang diajukan objek dan subjek pajak daerah yang terdata; potensi sumber-sumber pendapatan pajak daerah yang teridentifikasi (objek pajak)	4 Dokumen 12 Dokumen 500 Objek Pajak	4 Dokumen 12 Dokumen 500 Objek Pajak	393.469.904 314.895.200 (80,03%)	Tercapai
1.2	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah SK yang diterbitkan mengenai pembinaan di bidang intensifikasi pajak daerah (SK) Jumlah surat tagihan pajak terhutang yang diterbitkan ke wajib pajak (lembar surat)	1 SK 80 Lembar surat	1 SK 80 Lembar surat	134.275.600 127.260.925 (97,78%)	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Perda tentang pendapatan dan retribusi daerah (Perda)	1 Perda	1 Perda	118.166.400 104.708.800 (88,61%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.4	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah surat setoran pajak daerah yang diterbitkan (lembar)	18.000 Lembar	18.000 Lembar	38.222.680 31.959.500 (83,61%)	Tercapai
1.5	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Saerah	Jenis dokumen tembusan daftar himpunan ketetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (buku)	297 Buku	297 Buku	1.967.165.816 1.922.733.682 (83,61%)	Tercapai
		Jenis (laporan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; permohonan pengembalian kelebihan pajak daerah) yang diproses (Laporan)	600 Laporan	600 Laporan		
		Surat pemberitahuan Pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan yang diterbitkan (lembar)	951993 Lembar	951993 Lembar		
		Jumlah data perolehan objek pajak daerah yang diolah (lembar)	923 Lembar	923 Lembar		
		Jumlah nilai jual objek pajak yang dinilai ulang (OP)	48000 OP	48000 OP		
		Jumlah SK tentang kompensasi dan restitusi pajak daerah yang diproses (SK)	4 SK	4 SK		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Jumlah SK tentang penghapusan tunggakan kadaluarsa yang diproses (SK)	150 SK	150 SK		
		Perubahan peta objek pajak (bidang)	51000 bidang	51000 bidang		
1.6	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jenis laporan (berkas pengaduan pajak daerah) surat keberatan dan surat permohonan banding yang tertangani; permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah yang diteliti) (berkas)	240 berkas	240 berkas	270.286.000 220.040.100 (81,41%)	Tercapai
1.7	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pajak yang tertagih dari wajib pajak jatuh tempo	Rp. 120,020 M	Rp. 120,020 M	186.000.000 173.872.000 (93,48%)	Tercapai
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
II	PROGRAM PENUNJANG URUSAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/ KOTA	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	12.255.015.588 11.858.960.074 (96,77%)	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis dokumen (lkjip, lkpj, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja, laporan bulanan)	6 Dokumen	6 Dokumen	6.396.300 5.940.000 (92,87%)	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jenis dokumen (lkjip, lkpj, lppd, laporan keuangan, evaluasi renja, laporan bulanan)	6 Dokumen	6 Dokumen	6.396.300 5.940.000 (92,87%)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	60 Orang	60 Orang	8.599.057.487 8.431.337.934 (98,51%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	60 Orang	60 Orang	8.599.057.487 8.431.337.934 (98,51%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 Stel	50 Stel	21.125.000 21.000.000 (99,41%)	Tercapai
3.1	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 Stel	50 Stel	21.125.000 21.000.000 (99,41%)	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, bahan logistic kantor, barang cetakan dan penggandaan, rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	903.340.601 855.002.980 (94,65%)	Tercapai
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/ penerangan	7 Jenis	7 Jenis	8.599.500 8.516.000 (99,03%)	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis kantor tersedia	16 Jenis	16 Jenis	197.188.901 186.976.900 (94,82%)	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	23 Jenis	23 Jenis	31.774.200 28.354.000 (89,24%)	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan makan minum tersedia	5 Jenis	5 Jenis	114.650.000 108.561.500 (94,69%)	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	13 Jenis	13 Jenis	49.064.000 49.063.150 (100%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan perjalanan dinas	50 Laporan	50 Laporan	502.064.000 473.531.430 (94,32%)	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase asset dalam kondisi baik	100%	100%	896.536.200 796.562.650 (88,85%)	Tercapai
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis peralatan gedung kantor baru	15 Jenis	15 Jenis	896.536.200 796.562.650 (88,85%)	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	12 Bulan	814.080.000 715.012.790 (87,83%)	Tercapai
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar terdistribusi	1000 Buah	1274 Buah	12.420.000 12.380.000 (99,68%)	Tercapai
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan dibayar dalam 12 Bulan	5 Jenis	5 Jenis	147.360.000 110.877.730 (75,24%)	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi tersedia	8 Orang	20 Orang	654.300.000 591.755.060 (90,44%)	Tercapai
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1.054.480.000 1.034.103.720 (98,07%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	20 Unit	37 Unit	142.730.000 130.143.720 (91,18%)	Tercapai
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dalam kondisi baik	1 Unit	1 Unit	876.260.000 873.035.000 (99,63%)	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung dalam kondisi baik	52 Unit	25 Unit	35.490.000 30.925.000 (87,14%)	Tercapai

Sumber data : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pada dasarnya tidak menemukan permasalahan apa pun dalam pencapaian target nya baik secara keuangan maupun fisik.
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai permasalahan sebagai berikut:
 - Banyak potensi objek pajak yang belum teridentifikasi, dengan penyelesaian identifikasi potensi PAD/Pajak Daerah dan Pendataan Potensi



- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB-P2 bisa dikarenakan kondisi ekonomi masyarakat ataupun ketidaktahuan informasi mengenai proses dan tatacara pembayaran PBB-P2, dengan penyelesaian kegiatan sosialisasi melalui media sosial, brosur, baliho, untuk menggugah kesadaran masyarakat.
- Masih banyaknya kesenjangan Nilai Jual Objek Pajak dengan harga tanah terkini, dengan penyelesaian evaluasi dan penyelesaian Nilai Jual Objek Pajak.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target pembangunan mencapai 116,73%, menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah mampu mencapai realisasi melampaui target yang telah ditetapkan. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencapai 96,77% sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada target Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 96,04% menunjukkan bahwa dalam pencapaian targetnya Badan Pendapatan Daerah sudah baik. Meskipun dalam kegiatannya menemukan beberapa masalah, tetapi masih bisa diselesaikan.



C.1 Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pada tahun anggaran 2021 Bapenda melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan. Prioritas pembangunan Kabupaten Brebes pada Tahun 2021 pada unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan yaitu Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, hingga di tingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp. 50.511.363.201 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 49.361.629.429 atau 97,72% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.121
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kepegawian	48.336.550.701	47.255.703.392	(1.080.847.309)	97,76
	Belanja Operasi	46.576.823.241	45.586.226.520	(990.596.721)	97,87
	Belanja Modal	1.759.727.460	1.669.476.872	(90.250.588)	94,87
2	Pendidikan dan Pelatihan	2.174.812.500	2.105.926.037	(68.886.463)	96,83
	Belanja Operasi	2.174.812.500	2.105.926.037	(68.886.463)	96,83
	Belanja Modal	0	0	0	0
	JUMLAH	50.511.363.201	49.361.629.429	(1.149.733.772)	97,72

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited).

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan hasil-hasilnya, sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

Tabel III.122

**Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah T.A 2021**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN						
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai Mendapat Pelayanan Kepegawaian	100%	85.09 (%)	5.054.421.000 4.300.815.998 85.09 (%)	Tercapai
		Persentase Pegawai berkompetensi	100 %	85.09 (%)		
1	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pegawai Mendapat Pelayanan Kepegawaian	100%	93 %	3.336.969.000 2.822.958.905 92,42 (%)	Tercapai
		Tersedianya aplikasi Kepegawaian dan Pelayanan Kepegawaian yang memadai	100%	93 %		
		Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan Kepegawaian	100%	93 %		
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah CPNS yang mendapatkan SK Pengangkatan dan sumpah PNS	96 Orang	96 Orang	2.553.450.000 2.055.424.488 80.50 %	Tercapai
		Jumlah Peserta Seleksi CPNS	20000 Orang	15237 Orang		
		Usulan penyusunan Formasi ASN/CPNS	1500 Orang	906 Orang		
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Buku BUP	80 Orang	80	132.023.000 121.125.013	Tercapai
		Jumlah Pegawai Meninggal yang diproses dokumennya	50 Orang	116	91.75 %	
		Jumlah Pegawai Pensiun yang diproses dokumennya	550 Orang	607		Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Buku Daftar Pejabat struktural	90 Buku	100 buku	575.000.000 571.395.404 99.37 %	Tercapai
		Buku kepegawaian	50 buku	50 buku		
		Jenis Aplikasi Kepegawaian(Simpeg,SAPK,SIMGAJI, Berkala online,E- Kinerja,absensi Online, E-File	1 Paket	1 Paket		
		Jumlah dokumen daftar gaji PNS	14 Kali	14 Kali		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
1.4	Sub Kegiatan Pengelolaan data Kepegawaian	Izin Cuti, Uji Kesehatan	500 dokumen	180 dokumen	76.496.000 75.014.000 98.06 %	Tercapai
		Karis, Karsu, Karpeg	300 dokumen	300 dokumen		
		Taspen, Bapetarum, JKK, JKN	200 dokumen	732 dokumen		
2	Kegiatan Mutasi dan Promosi	Persentase Pegawai Mendapat Pelayanan Kepegawaia	100%	93 %	1.226.591.000 1.021.090.289 92.42 %	Tercapai
		Terlaksananya Talent scouting , seleksi Terbuka JPT , Pengangkatan Jabatan structural / Fungsional , Tersedianya Jumlah PNS sesuai Kebutuhan	100%	93 %		
		Jumlah ASN sesuai Kebutuhan	100%	93 %		
2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Pegawai pindah yang diproses dokumennya	160 orang	242 orang	81.781.000 76.998.354 94.14 %	Tercapai
		Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala	1500 sk	1289 sk		
		Penyelesaian Penataan dan Pemindahan ASN/PNS	130 orang	242 orang		
		SK Mutasi	150 dokumen	242 dokumen		
2.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang mendapatkan kenaikan pangkat	1500 Orang	1461 orang	285.660.000 259.122.600 90.71 %	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	250 orang	5388 PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional tertentu	859.150.000 684.969.335 79.73 %	Tercapai
		Jumlah PNS yang lulus fit and proper test/talent scouting	200 Orang	150 Orang Jumlah PNS yang lulus fit and proper test/talent scouting		
		Jumlah PNS yang mendapat berita acara Pengangkatan sumpah jabatan	400 Orang	80 orang		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
3	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai Berkopetensi	100%	100 %	115.036.000 105.826.623 91.99 %	Tercapai
		Terlaksananya pengiriman Peserta Pelatihan , Peningkatan Kompetensi pegawai	100%	100%		
		Peningkatan Jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan	100%	100%		
3.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang bersertifikat BinteK umum dan teknis	80 orang	149 orang	115.036.000 105.826.623 91.99 %	Tercapai
		Jumlah PNS yang bersertifikat STLUD / STLUPI	150 orang	114 orang		
		SK Bupati Tugas Belajar, Ijin Belajar, Keterangan Belajar dan Penggunaan Gelar	300 orang	230 orang		
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Presentase Kinerja Sasaran Pegawai	100 %	100 %	375.825.000 350.950.181 94.16 %	Tercapai
		Penanganan dan Pembinaan disiplin PNS, Terlaksananya Pengiriman Peserta Pelatihan, Peningkatan Kompetensi ASN	100 %	100 %		
		Peningkatan jumlah ASN yang telah mengikuti pelatihan	100 %	40 %		
4.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen Laporan Monitoring Kinerja ASN Melalui Finger Frint	12 Dokumen	12 Dokumen	125.281.200 124.867.655 99.67 %	Tercapai
		Jumlah Dokumen SKP Esselon II dan III	57 Dokumen	57 Dokumen		
4.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN/PNS Mendapat Penghargaan Satya Lencana	125 Orang	69 orang	80.043.800 75.777.030 94.67 %	Tercapai
		Jumlah PNS yang Mendapatkan bekal ketrampilan menjelang purna tugas	100 Orang	40 orang		
4.3	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Dokumen Ijin Perceraian	35 Dokumen	25 dokumen	170.500.000 150.305.496 88.16 %	Tercapai
		Ijin Perceraian, Penca-lonan Kades, Kepala Daerah Bagi PNS	35 Orang	25 dokumen		



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Jenis SK Pembinaan Kepegawaian, Penjatuhan Disiplin	15 Dokumen	10 dokumen		
		Jumlah ASN/PNS yang mendapat pemahaman tentang peraturan kepegawaian	140 Orang	140 orang		
		Jumlah Dokumen Laporan Pembinaan Kepegawaian Kedisiplinan	20 Dokumen	15 dokumen		
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
I	PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA MANUSIA	Capaian PNS / ASN yang memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis	20 %	23.79 %	2.174.812.500 2.105.926.037 96.83 %	Tercapai
1	Kegiatan Pengembangan kompetensi Teknis	Capaian PNS / ASN yang memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis	20 %	23.79 %	446.032.500 439.406.084 98.51 %	Tercapai
		Pengiriman Peserta Diklat/Kursus/ Pelatihan	80 Orang	149 orang		
		Peningkatan Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis , Pelatihan	1 Tahun	1 Tahun		
1.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkruen, perangkat daerah penunjang dan nurusan pemerintahan umum	Jumlah OPD /SKPD yang Menyusun IPP SKPD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	446.032.500 439.406.084 98.51 %	Tercapai
		Jumlah PNS Bersertifikat Diklat Teknis dan fungsional	80 Orang	149 orang		
2	Sertifikasi, Kelembagaan , Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis	Capaian PNS / ASN yang memiliki Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Teknis	20 %	23.79 %	1.728.780.000 1.666.519.953 96.40 %	Tercapai
		Terlaksananya Diklat Prajabatan , Latsar dan Diklat Kepemimpinan	100 Persen	100 %		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
		Peningkatan Jumlah Pejabat yang mengikuti diklat Struktural , dan tercapainya CPNS yang telah mengikuti Cdiklat Prajabatan di Kabupaten Brebes	1 Tahun	1 tahun		
2.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan daerah , Jabatan Pimpinan Tinggi , Jabatan fungsional , Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah CPNS Mendapat Sertifikat STTPL Latsar	96 Orang	96 orang	1.728.780.000 1.666.519.953 96.40 %	Tercapai
		Jumlah PNS Bersertifikat STTPL Diklat Pim III (PKA)	6 Orang	8 Orang		
		Jumlah PNS Peserta Diklat PIM IV (PKP)	29 Orang	30 Orang		
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Presentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Pelaksanaan Tersedia	100 %	100 %	43.282.129.701 42.960.691.924 99,26 %	Tercapai
1	Kegiatan Perencanaan , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya Publikasi Hasil Kegiatan / Kinerja SKPD, Pelaporan LHKPN	100%	100 %	85.149.000 83.637.000 97.48 %	Tercapai
1.1	Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jenis dokumen Perencanaan dan Monitoring	20 Jenis	20 Jenis	51.214.000 51.207.000	Tercapai
		Monitoring LHKPN ke Dalam daerah Kabupaten Brebes	24 Kegiatan	24 Kegiatan	99,99 %	
1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan penhyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen LAKIP,SAKIP,Evaluasi RKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	13.945.000 13.940.000 99.96 %	Tercapai
1.3	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jenis Media Publikasi dan Promosi	1 Jenis	1 Jenis	19.990.000 18.490.000 92.50 %	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan tersedia Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS, PPPK	100%	100%	39.604.087.391 39.382.330.869 99.44%	Tercapai
2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah CPNS yang terbayarkan gaji dan Tunjangan	96 orang	96 orang	39.403.768.391 39.184.825.369	Tercapai
		Jumlah PNS terbayarkan Gaji dan Tunjangannya	50 orang	50 orang	99.44%	
		Jumlah PPPK terbayarkan gajinya	646 Orang	646 Orang		
2.2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jenis Dokumen Laporan Akhir Tahun	10 Dokumen	10 Dokumen	187.359.000 184.547.500 98.50 %	Tercapai
2.3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Honor Pengelola Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	12.960.000 12.958.000 99.98 %	Tercapai
		Jenis Dokumen Laporan Keuangan	10 Dokumen	10 Dokumen		
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Khusus Hari Tertentu	60 Stel	60 Stel	43.600.000 43.600.000 100 %	Tercapai
3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu	60 Stel	60 Stel	43.600.000 43.600.000 100 %	Tercapai
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran dilingkungan kantor	100%	100%	625.638.960 624.673.913 99.76 %	Tercapai
		Terlaksananya administrasi Umum ,Terpenuhinya Sarpras kerja yang memada, Aset yang terpelihara	100%	100%		
		peningkatan pelayanan publik yang memuaskan	100%	100%		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penyelesaian bangunan kantor	Jenis Komponen Listrik tersedia	40 Jenis	40 Jenis	20.000.000 19.981.000 99.91 %	Tercapai
4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis alat tulis Kantor tersedia	40 Jenis	40 Jenis	208.050.000 207.969.900 99.96 %	Tercapai
4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jenis Peralatan rumah tangga tersedia	21 Jenis	21 Jenis	50.227.000 50.180.200 99.91	Tercapai
4.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis Barang Cetak dan Penggandaan tersedia	50 Jenis	50 Jenis	135.222.960 135.007.600 99.98	Tercapai
4.5	Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan tersedia	3 Jenis	3 Jenis	29.846.000 29.536.400 98.96	Tercapai
4.6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	66 Kegiatan	66 Kegiatan	182.293.000 181.998.813 99.84	Tercapai
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan administrasi Perkantoran dilingkungan Kantor	100%	97 %	1.195.775.460 1.107.586.872 96.25 %	Tercapai
		Terlaksananya Administrasi Umum dan terpenuhinya Sarpras Kerja yang memadai , aset yang terpelihara	100%	97 %		
		Peningkatan sarpras serta peningkatan pelayanan publik yang memuaskan	100%	97 %		
5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jenis Mebeleur Baru	1 Jenis	1 Jenis	13.364.000 13.360.000 99.97 %	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
5.2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan Gedung dan Kantor	1 Jenis	1 Jenis	1.182.411.460 1.094.226.872 92.54 %	Tercapai
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum, Terpenuhinya sarpras yang memadai, Aset yang terpelihara	100%	100 %	791.855.890 787.412.973 99.54 %	Tercapai
		Peningkatan Sarpras serta peningkatan pelayanan publik yang memuaskan	100%	100 %		
6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar terdistribusi	2500 dokumen	1724 dokumen	134.595.890 134.567.500	Tercapai
		Jumlah Surat Masuk terdistribusi	1500 dokumen	4717 dokumen	99.98 %	
6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan telepon, Faximile, Internet, PDAM, dan Listrik dibayar	12 bulan	12 bulan	312.750.000 310.198.473 99.18 %	Tercapai
6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jenis Bahan Makan Minum tersedia	4 Jenis	4 Jenis	344.510.000 342.647.000	Tercapai
		Upah Tenaga Keamanan, Pramur Kantor, dan THL Lainnya	10 Orang	10 Orang	99.46 %	
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pelayanan administrasi Perkantoran di Lingkungan Kantor	100%	100 %	936.023.000 931.450.297 99.38 %	Tercapai
		Terlaksananya administrasi Umum , Terpenuhinya Sarpras kerja yang memadai, Aset yang terpelihara	100%	100%		
		Peningkatan sarpras serta peningkatan pelayanan publik yang memuaskan	100%	100%		
7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Dinas yang diproses surat perijinannya	6 Unit	6 Unit	194.764.000 191.767.497 98.46 %	Tercapai
		Jumlah motor dinas yang diproses surat perijinannya	19 Unit	19 Unit		
		Kendaraan dinas yang terpelihara	25 Unit	25 Unit		



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERANGAN
7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Meubeler dalam kondisi baik	3 Jenis	3 Jenis	15.000.000 14.890.000 99.27 %	Tercapai
7.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Gedung dalam Kondisi baik	1 jenis	1 jenis	245.549.000 245.397.800 99.94 %	Tercapai
		Pemeliharaan alat studio/komunikasi	1 Tahun	1 Tahun		
		Pemeliharaan Genset	1 Tahun	1 Tahun		
		Pemeliharaan Komputer	60 unit	60 unit		
7.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dalam kondisi baik	1 jenis	1 jenis	480.710.000 479.395.000 99.73 %	Tercapai
		Pemeliharaan Taman	1 tahun	1 tahun		

Sumber data : Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan menghadapi beberapa permasalahan, namun demikian tidak semua permasalahan ditemukan solusinya dan masih sebatas identifikasi permasalahan. Permasalahan dan solusi tersebut antara lain :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN :

Pagu Anggaran : 2.553.450.000

Realisasi : 2.055.424.488 (80,50%)

Catatan atas pelaksanaan kegiatan :

- a) Pelaksanaan Seleksi CASN TA 2021 terdiri dari formasi CPNS 397, PPPK Non Guru 45 dan PPPK Guru 4112. BKPSDMD Kab. Brebes telah mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam perjalanan waktu, pelaksanaan seleksi PPPK Guru sepenuhnya difasilitasi oleh Kemendikburistik sehingga anggaran yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.



- b) Terdapat menu pemilihan lokasi ujian bagi peserta seleksi pada portal sscasn.bkn.go.id sehingga alokasi anggaran untuk biaya kontribusi ujian mandiri di UDINUS Semarang tidak dapat terealisasi maksimal.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

Pagu Anggaran : 859.150.000
Realisasi : 684.969.335 (79,73%)

Catatan atas pelaksanaan kegiatan :

- a) Sesuai arahan PPK dan Tim Penilai Kinerja, direncanakan akan dilaksanakan rangkaian kegiatan seleksi mutasi/rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Tahap II sehingga jadwal kegiatan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama Tahun 2021 akan mundur. Hal ini menyebabkan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dapat terealisasi maksimal.
- b) Kegiatan Seleksi Terbuka dalam rangka pengisian JPT Pratama dilaksanakan di Tahun 2022 sehingga anggaran yang dialokasikan di Tahun Anggaran 2021 tidak dapat direalisasikan.

Analisis Kesesuaian Capaian

Nilai rata-rata capaian kinerja pada target program pembangunan di Atas 90 % sedangkan nilai rata-rata capaian kinerja pada kegiatan dan sub kegiatan mencapai > 90 % menunjukkan bahwa Keefektifan kinerja sehingga memenuhi target dan sasaran sebagaimana target dalam renstra 2017 s/d 2022.





C.1 Badan Kesbangpol Daerah

Pada tahun anggaran 2021 Baperlitbangda melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagai pemerintahan umum pada dua bidang kesatuan bangsa dan politik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Brebes, diketahui alokasi anggaran belanja pada T.A 2021 sebesar Rp.11.735.743.556 terealisasi s/d akhir T.A 2021 sebesar Rp. 11.259.925.578 atau 98,60% secara rinci dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel III.125
Anggaran dan Realisasi Belanja
Badan Kesbangpol Daerah T.A 2021

NO	URAIAN	BELANJA		BERTAMBAH (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(RP)	(%)
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	11.735.743.556	11.259.925.578	(475.817.978)	95,95
	Belanja Operasi	11.123.999.556	10.653.845.560	(470.153.996)	95,77
	Belanja Modal	611.744.000	606.080.018	(5.663.982)	99,07
	JUMLAH	11.735.743.556	11.259.925.578	(475.817.978)	95,95

Sumber data : BPKAD Kabupaten Brebes (Un Audited)

Berikut realisasi dari capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan capaian Badan Kesbangpol Daerah dan hasil-hasilnya sebagaimana terangkum pada tabel di bawah ini :

Tabel III.126
Capaian Kinerja Pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Kesbangpol Daerah T.A 2021

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
URUSAN PEMERINTAHAN : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-	-	-	268.394.500 263.622.150 (98.22%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Presentase penanganan kasus paham ideologi dan konflik sosial (%)	100%	100%	268.394.500 263.622.150 (98.22%)	Tercapai
1.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dokumen jumlah elemen masyarakat yang bersertifikasi ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembaruan kebangsaan, bhinneka tunggal ika, dan sejarah kebangsaan (tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, aparatur pemerintah)	12 Dok	12 Dok	260.504.500 255.732.700 (98.17%)	Tercapai
1.2	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	Dokumen laporan koordinasi	12 bulan	12 bulan	7.890.000 7.889.450 (99.99%)	Tercapai
II	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				204.565.001 211.369.861 (103.33%)	Tercapai
2	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Presentase kehadiran masyarakat dalam pemilu (%)	70%	70%	204.565.001 211.369.861 (103.33%)	Tercapai, kelebihan pada realisasi dikembalikan melalui sts ke rekening kas Daerah Kabupaten Brebes



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
2.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen jumlah elemen masyarakat bersertifikasi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi lembaga pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah (toma/toga, pemuda, pelajar)(orang)	150 Org	150 Org	134.429.101 133.686.861 (99.45%)	Tercapai
2.2	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Dokumen laporan koordinasi	12 Dok	12 Dok	61.184.400 66.803.500 (109.18%)	Tercapai, kelebihan pada realisasi dikembalikan melalui sts ke rekening kas Daerah Kabupaten Brebes
2.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Dokumen laporan dana bantuan keuangan parpol dan laporan pemantauan situasi politik	9 Dok	9 Dok	8.951.500 10.879.500 (121.54%)	Tercapai, kelebihan pada realisasi dikembalikan melalui sts ke rekening kas Daerah Kabupaten Brebes
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				328.854.999 327.101.041 (99.47%)	Tercapai
3	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase kehadiran masyarakat dalam pemilu (%)	70%	70%	328.854.999 327.101.041 (99.47%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
3.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah elemen masyarakat bersertifikasi, peningkatan kemampuan, peran dan fungsi dalam demokrasi (ormas, lsm, orang)	360 org	360 org	299.529.999 297.888.041 (99.45%)	Tercapai
3.2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Dokumen laporan dana hibah	210 dok	210 dok	29.325.000 29.213.000 (99.62%)	Tercapai
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				172.023.100 168.465.500 (97.93%)	Tercapai
4	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Presentase penanganan kasus paham ideologi dan konflik sosial (%)	100%	100%	172.023.100 168.465.500 (97.93%)	Tercapai
4.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah elemen masyarakat tersertifikasi ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah (tomas/toga, pemuda pelajar)	480 org	480 org	156.417.100 152.875.500 (97.74%)	Tercapai
4.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalah-gunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen laporan koordinasi	12 dok	12 dok	10.000.500 10.000.000 (99.99%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
4.3	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Dokumen laporan monitoring dan pelaporan	12 Dok	12 dok	5.605.500 5.590.000 (99.72%)	Tercapai
V	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				538.770.060 537.356.560 (96.54%)	Tercapai
5	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Presentase penanganan kasus paham ideologi dan konflik sosial (%)	100%	100%	538.770.060 537.356.560 (96.54%)	Tercapai
5.1	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik daerah	Jumlah elemen masyarakat yang terferifikasi kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing dan lembaga asing, fasilitas kelembagaan, bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah	850 org	850 org	513.144.060 511.820.000 (96.49%)	Tercapai
5.2	Penanganan Konflik di Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 dok	12 dok	25.626.000 25.536.560 (97.58%)	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
	Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah					
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase kehadiran pegawai (%)	100%	100%	1.585.773.600 1.567.746.513 (98,86 %)	Tercapai
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase kehadiran pegawai (%)	100%	100%	61.164.000 60.826.560 (98 %)	Tercapai
1.1	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi tersedia	2 Org	2 Org	61.164.000 60.826.560 (98 %)	Tercapai
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah tenaga berkopetensi	100%	100%	12.580.000 12.580.000 (100%)	Tercapai
2.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	40 stel	40 stel	12.580.000 12.580.000 (100%)	Tercapai
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	226.842.400 224.035.598 (98.76%)	Tercapai
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen listrik/penerangan	11 Jenis	11 Jenis	7.114.000 7.097.500 (99.77%)	Tercapai
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis ATK tersedia	40 Jenis	40 Jenis	25.249.500 25.249.500 (100%)	Tercapai
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis peralatan rumah tangga	21 Jenis	21 Jenis	1.900.000 1.860.000 (97.89%)	Tercapai



NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis makanan dan minuman tersedia / Jenis spanduk dan karangan bunga tersedia	5 Jenis	5 Jenis	73.554.000 72.082.000 (98%)	Tercapai
3.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan tersedia	16 Jenis	16 Jenis	18.227.380 18.214.600 (99.93%)	Tercapai
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan jumlah perjalanan dinas luar daerah	100 buah	100 buah	100.797.520 99.531.998 (98.74%)	Tercapai
4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%	211.744.000 208.306.018 (98.38%)	Tercapai
4.1	Pengadaan Mebel	Jenis mebeleur baru	2 Jenis	2 jenis	22.680.000 22.660.000 (99.91%)	Tercapai
4.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis perlengkapan gedung baru	6 Jenis	6 Jenis	189.064.000 185.646.018 (98.19%)	Tercapai
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kepuasan pelayanan administrasi perkantoran di lingkungan kantor	100%	100%	240.220.300 238.136.700 (99.13%)	Tercapai
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat tertertribusi	875 buah	875 buah	2.498.000 2.490.000 (99.68%)	Tercapai
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis tagihan air, listrik, surat kabar, dibayar 12 bulan	12 Bulan	12 Bulan	52.817.000 51.456.900 (97.42%)	Tercapai
5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan tersedia	12 Org	12 Org	184.905.300 184.189.800 (99.61%)	Tercapai
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase aset dalam kondisi baik (%)	100%	100%	832.318.900 823.861.637 (98.98%)	Tercapai
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik	12 Unit	12 Unit	61.087.000 60.923.893	Tercapai



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN REALISASI (%)	KETERAN GAN
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				(99.73%)	
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah monil dan motor diproses perijinannya	16 unit	16 unit	9.000.000 8.145.724 (90.51%)	Tercapai
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik	17 Unit	17 Unit	43.731.900 43.481.520 (99.43%)	Tercapai
6.4	Pemeliharaan/Rehabilit as Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung rusak menjadi baik	8 Unit	8 Unit	718.500.000 711.310.500 (99%)	Tercapai

Sumber data : Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Brebes.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Brebes sebagian besar sudah menunjukkan kesesuaian antara realisasi dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Daerah meskipun masih ada indikator yang Capaiannya tidak memenuhi Target. Hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 di Kabupaten Brebes pada awal hingga pertengahan tahun 2021 yang membatasi Berkumpulnya masyarakat, karena sebagian besar kegiatan di Kesbangpol Kab.Brebes merupakan Kegiatan Sosialisasi yang Target Indikatornya adalah Masyarakat.

Analisis Kesesuaian Capaian

Kegiatan yang sudah dilaksanakan di Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes merupakan penjabaran dari indikator tujuan dan sasaran Program Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes sehingga apa yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja berupa target kinerja program sudah sesuai dengan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes.



D. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Tabel II.1
Indikator Kinerja Makro

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	CAPAIAN KINERJA TA 2020	CAPAIAN KINERJA TA 2021	PERUBAHAN (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	66,11	66,32	0,318
2	Angka Kemiskinan	17,03	17,43	2,349
3	Angka Pengangguran	9,83	9,78	-0,509
4	Pertumbuhan Ekonomi	-0,47	2,33	595,745
5	Pendapatan Per kapita	23.842.360,81	24.599.193,54	3,174
6	Ketimpangan Pendapatan (Jawa Tengah)			
	a. Perkotaan	0.385	0,398	3,377
	b. Perkotaan dan Perdesaan	0.362	0,372	2,762
	c. Perdesaan	0.319	0,325	1,881

Sumber Data : BPS Kabupaten Brebes

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) dan dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 berturut turut 64,86; 65,68; 66,12; serta mengalami



penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi 66,11. Imbas COVID-19 sangat luas, sehingga berdampak pada penurunan IPM Kabupaten Brebes sebesar 0,01 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 66,11 pada tahun 2020. Di tahun 2021 IPM Kabupaten Brebes mengalami peningkatan 0,21 poin dari 66,11 menjadi 66,32 di tahun 2021.

Gambar II.1
IPM Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021

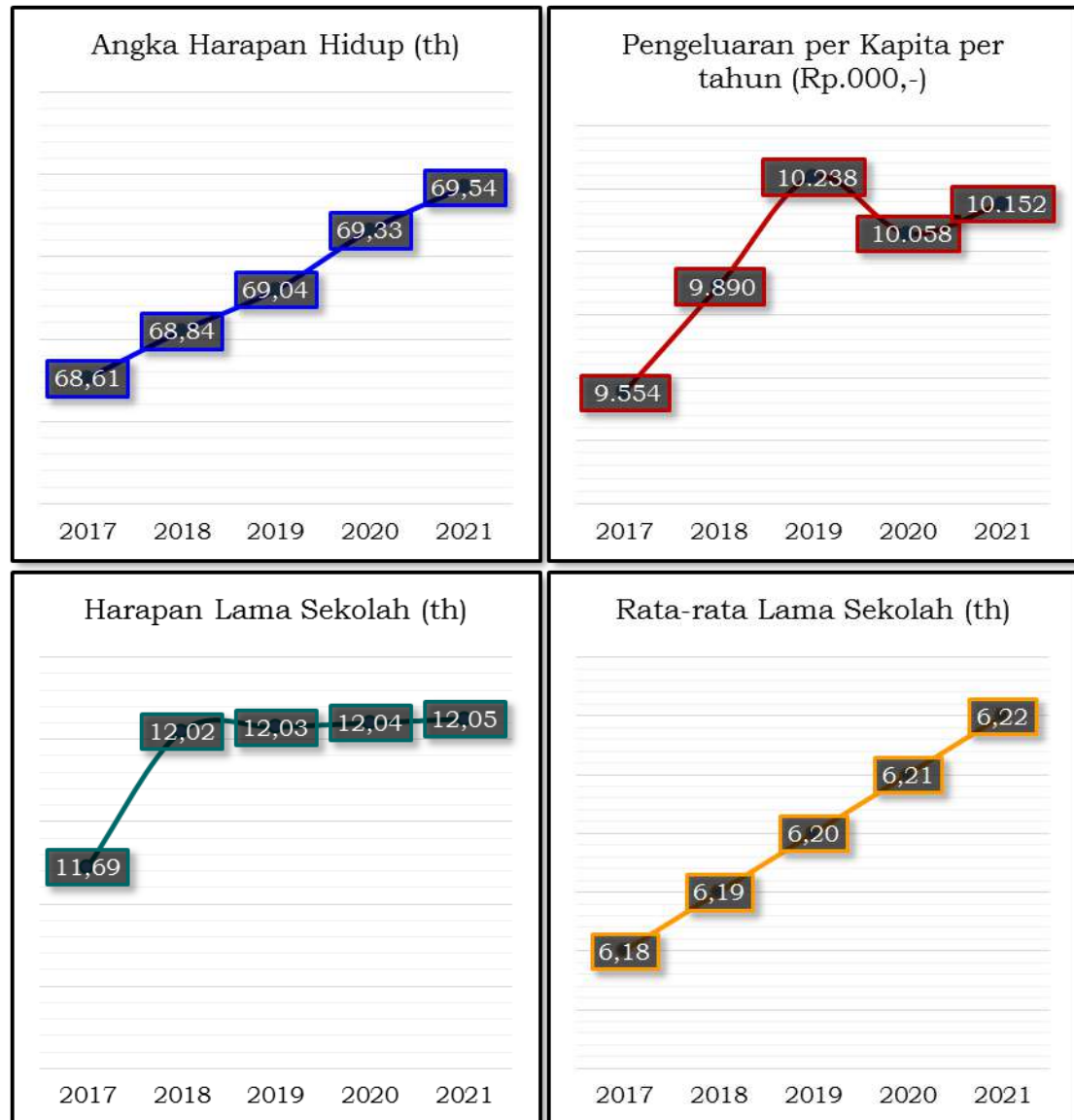


Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

Adapun Komponen-komponen dalam IPM adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Purchasing Power Parity (PPP) atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan.



Gambar
Angka Harapan Hidup (AHH), Pengeluaran per Kapita per Tahun, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Brebes 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

a) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk secara umum khususnya bidang kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat diberikan predikat membaik berdasarkan rata-rata



harapan hidup yang semakin panjang. Dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup, pemerintah dapat mengevaluasi kinerja di bidang kesehatan serta mengukur kualitas/derajat kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program kegiatan di bidang kesehatan tidak dapat berlangsung tunggal, memerlukan dukungan dari berbagai bidang agar terdapat akselerasi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan data BPS, Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2021 semakin meningkat, yaitu sebesar 68,61 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 69,54 tahun pada tahun 2021.

b) Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (tahun) merupakan harapan yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia lebih dari 7 tahun. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan disemua lini yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan data BPS, Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2021 semakin meningkat, yaitu sebesar 11,69 tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 12,05 tahun pada tahun 2021.

c) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 keatas dalam menjalani pendidikan formal. RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Berdasarkan data BPS, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2021 semakin meningkat, yaitu sebesar 6,18 tahun pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,22 tahun pada tahun 2021.



c) Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Purchasing Power Parity (PPP) atau pengeluaran per kapita yang disesuaikan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama satu bulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Indikator ini dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Berdasarkan data BPS, perkembangan pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Brebes pada tahun 2017-2021 mengalami kenaikan, yang berarti ada peningkatan pendapatan masyarakat Kabupaten Brebes, yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.9.554.000,- per orang per tahun menjadi sebesar Rp. 10.152.000,- per orang per tahun pada tahun 2021.

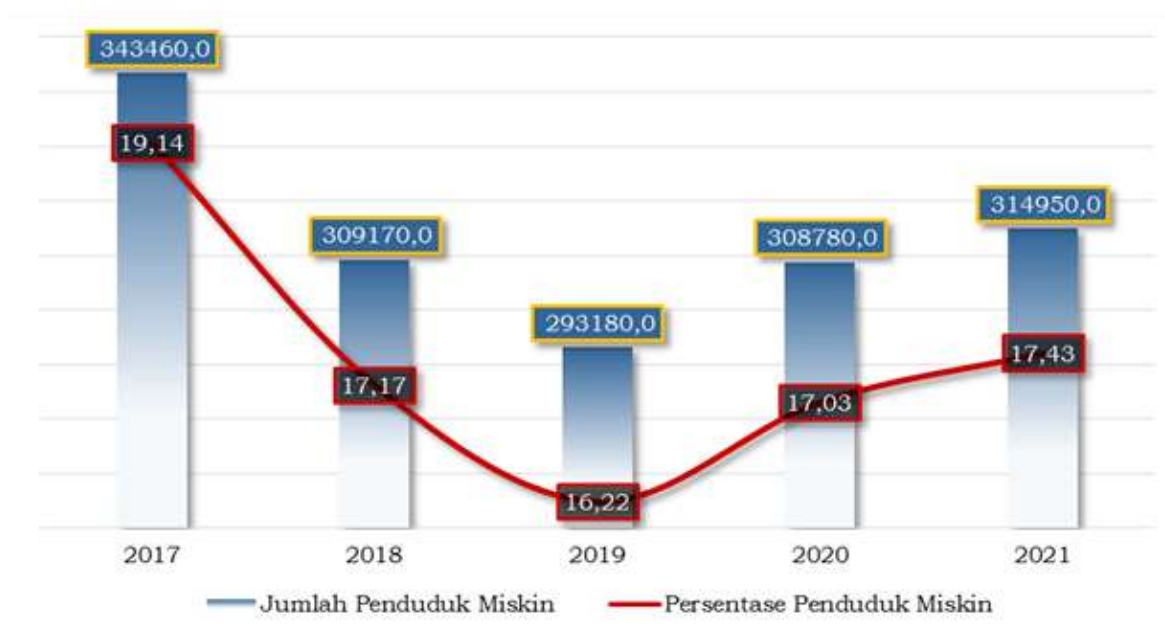
2. Angka Kemiskinan

Gambaran kemiskinan ditunjukkan dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan diukur dari Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan Data Kemiskinan Makro bersumber BPS per bulan Maret 2021, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2021 adalah sebesar 17,43%, mengalami peningkatan/kenaikan sebesar 0,40% dibandingkan tahun sebelumnya

yang sebesar 17,03%, hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Brebes, yang diantaranya menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pemberlakuan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan tujuan untuk meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19 sehingga menyebabkan terhambatnya pergerakan ekonomi masyarakat.

Gambar
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes
Tahun 2017-2021

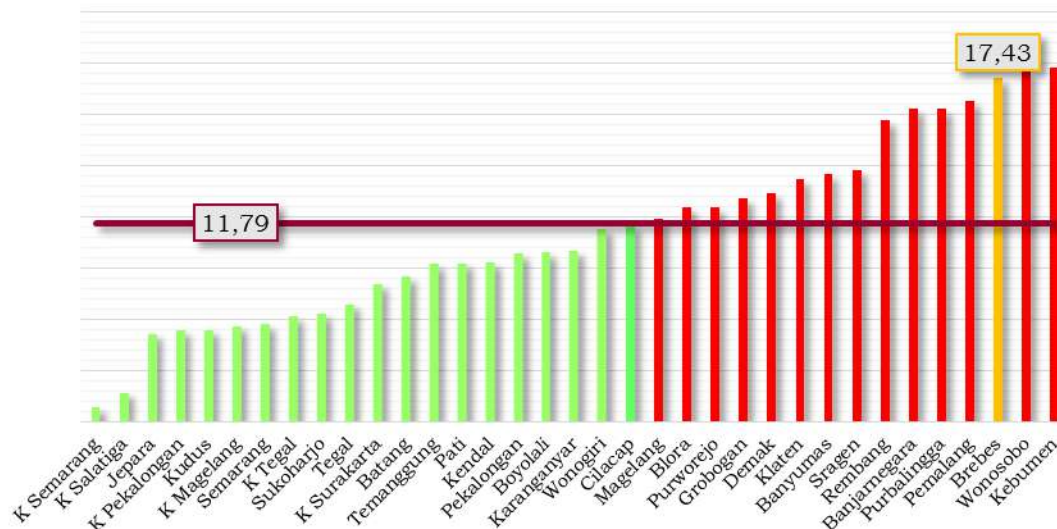


Sumber : BPS Kabupaten Brebes, 2021

Dibandingkan dengan 35 kabupaten/kota se Jawa Tengah, Kabupaten Brebes menempati posisi ke 33, di atas Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen.

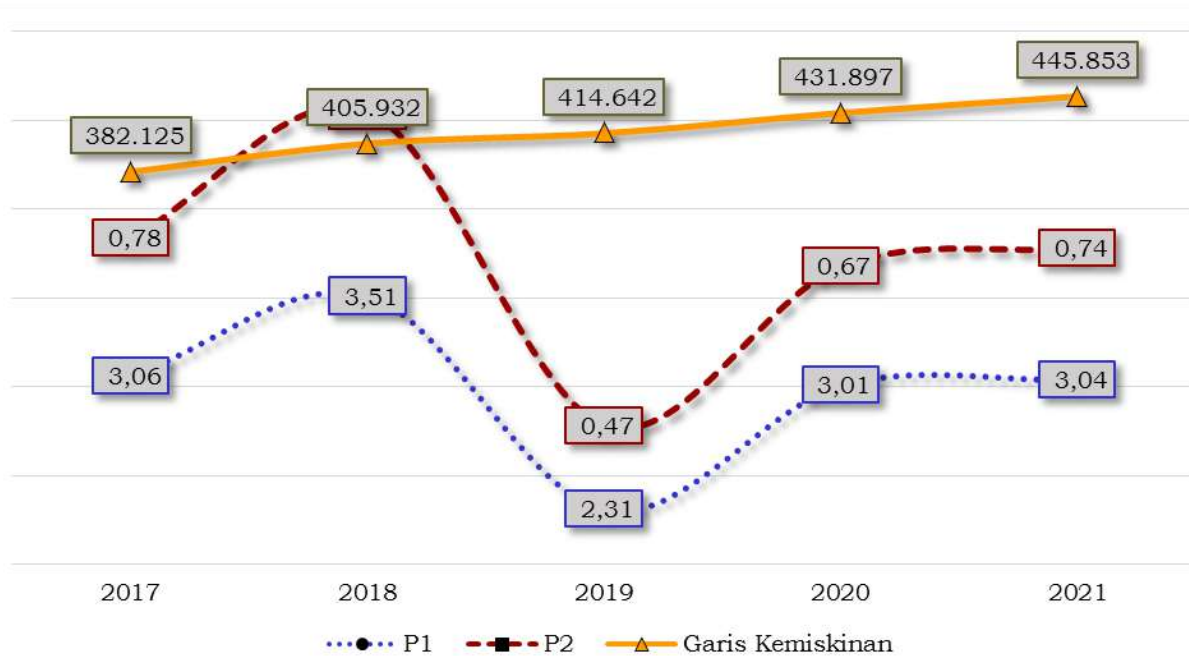


Gambar
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah dan
35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Tahun 2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Indikator kemiskinan makro lainnya, yaitu Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Brebes tahun 2021 sebanyak 308.780 jiwa, atau bertambah sebanyak 6.170 jiwa dari jumlah penduduk miskin tahun 2020 yang sebanyak 308.780 jiwa. Garis Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2021 sebesar Rp. 445.853,- per kapita per bulan, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp. 431.897,- per kapita per bulan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2021 sebesar 3,04 meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,01. Indeks kedalaman kemiskinan ini merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indikator berikutnya adalah Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2021 sebesar 0,74, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,67, menggambarkan bahwa semakin tinggi nilai Indeks Keparahan Kemiskinan, berarti semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1),
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021



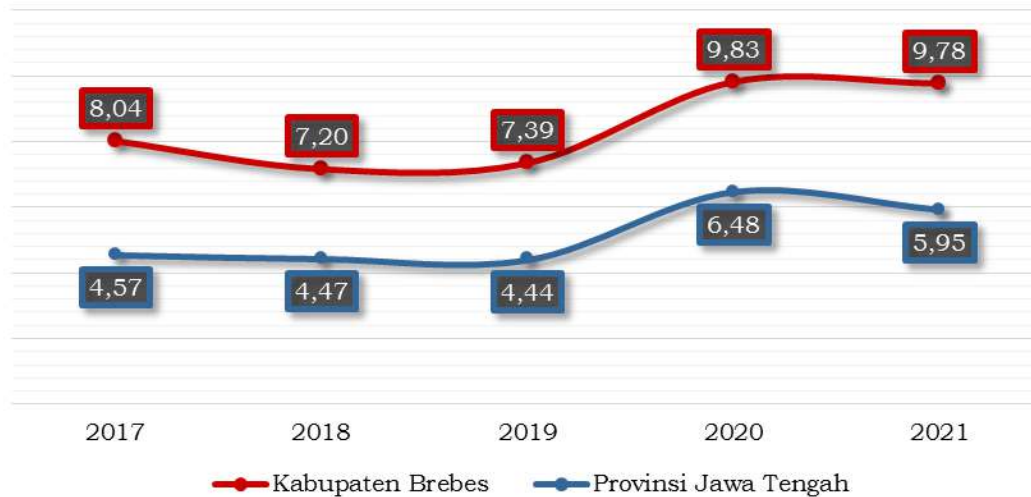
Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

3. Angka Pengangguran (Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT))

Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes Tahun 2017-2021 berfluktuatif, pada tahun 2017 sebesar 8,04%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi 7,20%, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,39%, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 9,83%, dan pada tahun 2021 menurun menjadi sebesar 9,78%. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Brebes sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang antara lain menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena terjadi pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian akibat lesunya kondisi perekonomian nasional dan global.



Gambar
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes (%)
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan kondisi yang positif dan fluktuatif. Pada tahun 2017 sebesar 5,47 persen, kemudian melambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,31 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,86 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi (laju pertumbuhan ekonomi negatif) sebesar 0,59% akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian secara regional, nasional dan global. Namun, jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2020 masih lebih baik, Nasional terkontraksi sebesar 2,07% dan Provinsi Jawa Tengah terkontraksi sebesar 2,65%, hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Brebes yang relatif stabil dalam kondisi pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes meningkat menjadi 2,33%, dan diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Secara lengkap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes

selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagaimana tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes
Tahun 2017-2021



Sumber Data : BPS Kabupaten Brebes, 2021

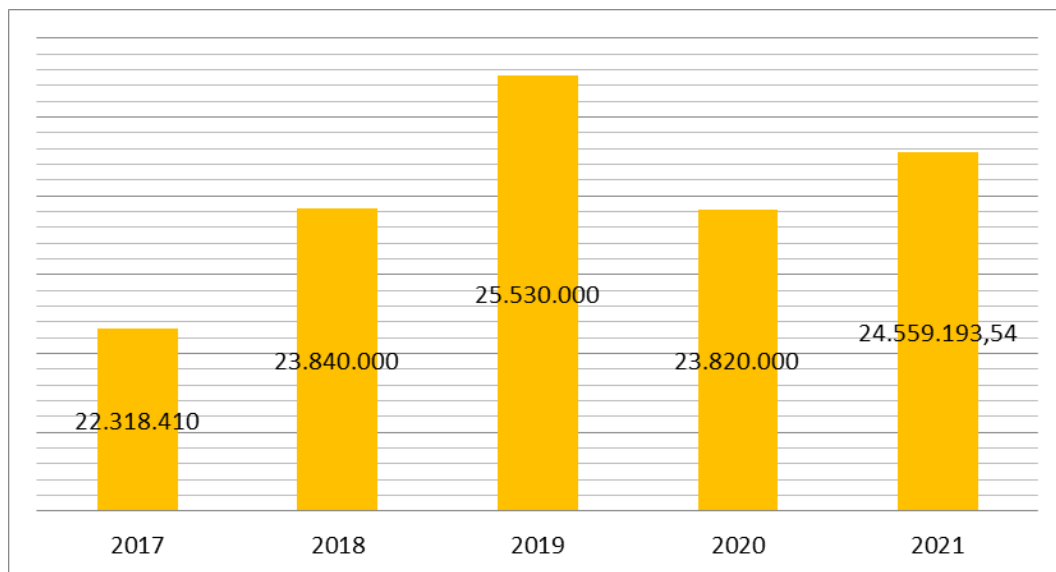
5. Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kabupaten Brebes tahun 2017-2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2017 sebesar Rp.22.318.410,- pada tahun, pada tahun 2018 sebesar Rp.23.840.000,-, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.25.530.000,-, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.23.820.000,- akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian regional, nasional, dan global. Pada Tahun 2021 PDRB Kab Brebes mengalami peningkatan sebesar 3,01% yaitu Rp.24.559.193,54 sebagai bukti pemulihan ekonomi di kabupaten brebes sedang berjalan.

Peningkatan PDRB per kapita menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes semakin meningkat.



Gambar
PDRB per Kapita Kabupaten Brebes (Rupiah)
Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Brebes, 2021

F. Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini)

Mulai tahun 2016 dan seterusnya BPS tidak *membreakdown* indikator tingkat ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) sampai dengan tingkat kabupaten/kota, sehingga data tersebut tidak tersedia. Terakhir tersedia hanya sampai dengan tahun 2015.

Berdasarkan data BPS, Rasio Gini Kabupaten Brebes 2000-2015 berfluktuatif dan cenderung menurun, pada tahun 2011 sebesar 0,33, menurun pada tahun 2015 menjadi sebesar 0,32 pada tahun 2015, hal ini menandakan ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Brebes juga semakin kecil.

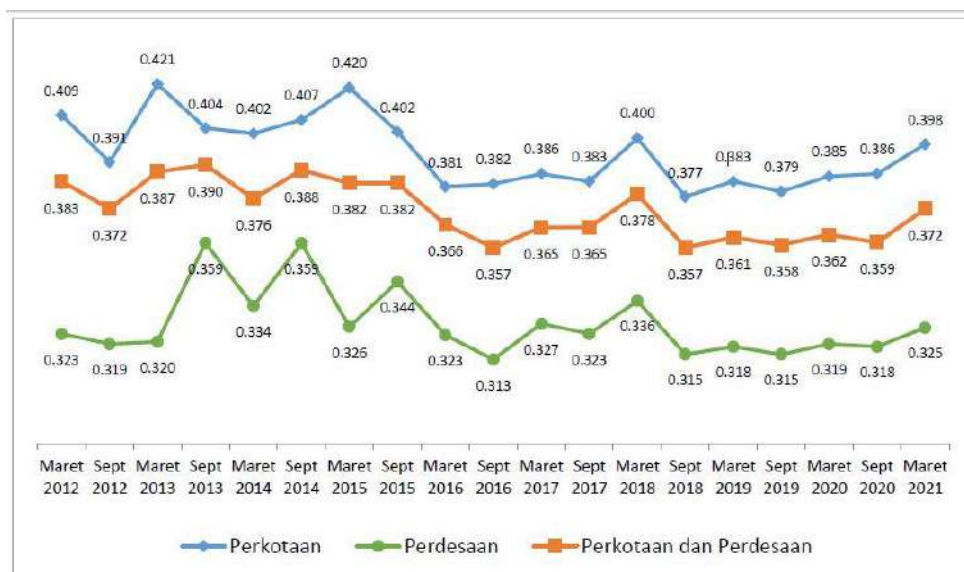
Pada Maret 2021, BPS Jawa Tengah menerbitkan Gini Ratio yang menjelaskan sebagai berikut :

- Pada Maret 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan *Gini Ratio* tercatat sebesar 0,372. Angka ini naik 0,013 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,359,

begitu pula jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,362 juga mengalami kenaikan.

- *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,398 meningkat jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,386 maupun dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,385.
- *Gini Ratio* di daerah perdesaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,325 naik jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,318 maupun dengan *Gini Ratio* Maret 2020 yang sebesar 0,319.
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,34 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,17 persen yang juga tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,19 persen yang berarti juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Gambar I.12
Perkembangan Gini Ratio, Maret 2012-Maret 2021



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)



2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan daerah dan atau kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

Tabel III.170
Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi	Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendanaan Pendidikan Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri Dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Negeri Kabupaten Brebes	▪ Membantu pendanaan penyelenggaraan pendidikan; dan ▪ Mendorong akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan
2.	Peningkatan, pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	▪ dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit yang merupakan salah satu bidang urusan pemerintahan daerah ▪ mencegah dan mengantisipasi penyebaran penyakit; ▪ mengoptimalkan proses penyembuhan; ▪ meminimalisir jumlah penderita; ▪ menekan jumlah kematian; ▪ meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan ▪ melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
3.	Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan <i>digital economy</i> , serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja	Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah	▪ retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; ▪ pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan
		Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Brebes Tahun 2021-2041	▪ mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional di Daerah; ▪ menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah; ▪ mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan; ▪ mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan ▪ meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan
		Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem	▪ untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan, maka diperlukan sistem yang efektif,



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Elektronik Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes	efisien dan akuntabel secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes ▪ Memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik; ▪ Melindungi penanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem; dan ▪ Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara online
		Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Brebes	▪ untuk kelancaran pelaksanaan penagihan dan tertib administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu Pedoman Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Brebes
		Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Pada Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes	▪ untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan publik yang merupakan kebutuhan dan hak masyarakat perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik Pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes
		Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes	▪ untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel diperlukan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ▪ memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang dapat dipertanggungjawabkan ; ▪ melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; ▪ memberikan landasan hukum kepada kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan yang



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			menjadi kewenangannya
4.	Pemantapan Infrastruktur wilayah terutama infrastruktur publik yang tangguh terhadap tekanan dan guncangan bencana dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Kabupaten Brebes	▪ dalam rangka penataan kota, maka rumah susun sederhana sewa menjadi alternatif untuk pemenuhan rumah tinggal yang bermartabat, nyaman, aman, dan sehat bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; ▪ pembangunan rumah susun sederhana sewa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu segera dikelola agar tujuan pembangunan rumah susun sederhana sewa berhasil dan berdaya guna serta mencapai sasaran yang diharapkan
5.	Peningkatan perlindungan Sosial kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak	Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022	▪ untuk mempercepat pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Brebes, perlu Rencana Aksi Daerah Percepatan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Brebes Tahun 2021-2022
6.		Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa	▪ untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa ▪ mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; ▪ mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan ▪ mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.
		Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes	▪ Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa ▪ Mempercepat pembangunan infrastruktur Desa ▪ Meningkatkan kapasitas dan partisipasi lembaga Kemasyarakatan Desa ▪ Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat ▪ Meningkatkan sarana dan prasarana Desa dan ▪ Mencukupi kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa
		Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Alokasi dana Desa	▪ Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman ADD. ▪ Tujuan diberikannya ADD antara lain : ▪ Mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa; ▪ Mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan Desa; ▪ Meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur pemerintahan Desa; ▪ Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; ▪ Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			Desa ▪ dan pemberdayaan masyarakat; ▪ Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; ▪ Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; ▪ Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan ▪ Mendorong upaya penanganan keadaan bencana, darurat dan mendesak ▪ berskala lokal Desa. ▪ Penggunaan ADD berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa
		Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	▪ untuk menjamin keberlangsungan aktivitas operasional dalam rangka meminimalisasi risiko dan menanggulangi gangguan keamanan Pusat Data, serta untuk mewujudkan keseragaman pengembangan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, perlu Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data ▪ Tujuan penyelenggaraan pusat data adalah agar dalam penyelenggaraan Pusat Data dapat berlangsung dengan aman, handal, efektif dan efisien serta memiliki standar untuk keberlangsungan aktivitas operasional guna meminimalisasi risiko serta dapat terhindar dari gangguan operasional.
		Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Statistik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	▪ melaksanakan kegiatan pengelolaan data statistik daerah yang dijadikan pedoman, acuan dan petunjuk teknis seluruh perangkat daerah dan instansi dalam menyusun program kerja, diperlukan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data ▪ menyediakan data statistik Daerah yang lengkap, akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, berkelanjutan dan dapat diakses oleh Pengguna Data; ▪ mencegah adanya duplikasi data; ▪ mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan ▪ menghasilkan informasi pembangunan yang akurat di Daerah.
		Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	▪ untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi, data yang terstruktur, aksesibilitas dan kapasitas, keamanan dan keandalan, penetrasi layanan dan terjangkau, legitimasi dan dukungan teknis agar pelaksanaannya selaras dengan visi pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu adanya pedoman standarisasi pembangunan aplikasi



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			▪ mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan aplikasi menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK; ▪ mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik; ▪ menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan ▪ mewujudkan aplikasi yang memenuhi standar keamanan sistem, metode pengembangan dan kemudahan penggunaan sesuai yang ditentukan oleh Dinas
		Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes	▪ sebagai pedoman dalam pengendalian gratifikasi di Lingkungan Kabupaten Brebes ▪ meningkatkan kepatuhan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terhadap ketentuan Gratifikasi; ▪ menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan melayani; ▪ membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan ▪ meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Pemerintah Daerah
		Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Di Kabupaten Brebes	▪ mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif ▪ mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan; ▪ untuk diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ▪ memiliki sumber data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi; ▪ menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi para pemangku kepentingan; ▪ menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; ▪ mewujudkan pengendalian, monitoring,



NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan ▪ menghasilkan informasi pembangunan di Kabupaten Brebes yang akurat.

Pemerintah Kabupaten Brebes dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan penularan dan penanganan di berbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi di Tahun 2021 (Terlampir).



3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN BREBES ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2020

1. Rekomendasi Pansus XX DPRD Kabupaten Brebes (Urusan Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan) Atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020

Tabel IV.
Rekomendasi Pansus X DPRD Kabupaten Brebes
Atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	URUSAN PENDIDIKAN		
	1) Harus diarahkan kepada peningkatan indikator rata rata lama sekolah dan harapan rata – rata lama sekolah	1. Meningkatkan GKB dengan data DTS dari SIPBM 2. Mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. 3. Melakukan sosialisasi kepada sekolah untuk menyampaikan kepada wali siswa agar putra putri menyelesaikan pendidikan minimal sampai SMA sederajat 4. Mengalokasikan anggaran bagi siswa GKB pendidikan formal SD/SMP/SMA sederajat 5. Sosialisasi kegiatan GBK dan meminta data ke desa dan FMPP	1. Mengembalikan orang dewasa tidak sekolah ke sekolah Non Formal/PKBM 2. Mengusahakan tidak ada peserta didik yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/SMA
2	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	1) Harus ada jaminan bahwa semua penduduk yang lahir di Kabupaten Brebes mempunyai Akte Kelahiran, dan setelah berumur 17 tahun keatas memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Brebes. Hal ini ditujukan agar tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Brebes benar – benar sudah berjalan secara optimal	Menurut undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan dituangkan dalam akte kelahiran. Karena itu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten brebes selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi, kependudukan berkomitmen selalu berusaha memenuhi kebutuhan pelayanan permohonan akte kelahiran dan KTP –el dengan inovasi pelayanan : - Jemput bola ke desa desa - Kerjasama dengan rumah sakit pemerintah desa/ sekolah - Pelayanan online	Dengan selalu aktif secara periodik dindukcapil kabupaten brebes mengajukan permintaan blanko KTP-el ke direktorat DUKCapil Kemendagri atau ke Disperdadesdukcapil provinsi jawa tengah dikandung maksud agar ketersediaan blanko KTP-el di Kabupaten Brebes dapat terjamin. Blanko KTP-el tahun 2021
	2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar selalu memantau ketersediaan Blanko KTP Elektronik dan Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya. Karena yang terjadi selama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merasa sudah memenuhi kebutuhan Blanko tapi fakta dilapangan masih banyak keluhan dari masyarakat tentang kelangkaan	Blanko KTP-el tahun 2021 stok aman. Apabila ada isu bahwa blanko KTP-el habis/kosong itu adalah berita tidak benar. Masyarakat bisa mengecek di blakasuta dindukcapil kabupaten brebes. Untuk blanko dokumen administrasi kependudukan lainnya juga terjamin karena persediaan kertas HVS A4 80 gram sangat mencukupi.	



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Blanko KTP Elektronik.		
3	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	1) Harus ada jaminan adanya program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatanfasilitasi kedesa-desa dalam upaya mencapai peningkatan kinerja desa, baik yang diukur dengan IDM (Indeks Desa Membangun) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) maupun kinerja desa yang diukur dengan IPD (Indeks Pembangunan Desa), yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2) Sampai saat ini kewenangan desa sampai sejauhmana belum jelas dengan aliran dana yang tidak sedikit di Desa oleh karena itu perlu dibuat suatu Peraturan Bupati untuk mengaturnya 3) Perlu peningkatan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna pengawasan terhadap desa bantuan Dana Desa, Bantuan Gubernur dan ADD 4) Pengelolaan Aset Desa supaya berpedoman kepada Peraturan Bupati yang sudah ada, mengingat jumlah Aset Desa dengan telah ditetapkan penghasilan tetap bagi Kades menjadi semakin banyak	- Membuat dan melaksanakan program kegiatan yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan kinerja Desa - Membuat aturan / regulasi yang menjamin adanya program dan kegiatan sebagai acuan dan payung hukum bagi terlaksananya kegiatan tersebut Perlu adanya penambahan Anggaran untuk kegiatan Rp. 5.000.000.000 Sudah ada Peraturan Peraturan Bupati Brebes Nomor 019 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan local berskala desa 1. Rapat koordinasi dengan Camat dan Kasi PMD Kec. Dan Kepala Desa dalam rangka pengawasan terhadap bantuan dana desa 2. Rapat dengan Tenaga Ahli dan Pendamping desa 3. Rapat koordinasi dengan Sekretaris Desa selaku verifikator PKD (Pengelolaan Keuangan Desa) 4. Sosialisasi Regulasi, Monitoring dan Evaluasi, Regulasi, Dana BLT DD 5. Berkaitan minimnya anggaran di Dinpermades maka perlu adanya penambahan Anggaran sebesar Rp. 5.000.000.000 Dengan adanya penambahan anggaran pada no. 3 maka Sosialisasi dan Monev terhadap pelaksanaan Regulasi tersebut bisa dilaksanakan khususnya	- Adanya jaminan program dan kegiatan - Adanya peningkatan kompetensi dan kinerja desa - Adanya Aturan yang jelas - Adanya peningkatan Anggaran Untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pengelolaan, penggunaan dan pengadministrasian dana yang dikelola desa - Efektifitas penyaluran pencairan dan penggunaan Dana Desa - Penyamaan Persepsi tentang penyaluran penggunaan Dana Des - Pengamanan pengelolaan keuangan desa - Peningkatan Anggaran Desa memahami dan taat pada Regulasi Ada
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
	1) Menjadi perhatian kondisi saat ini, potensi bencana sering terjadi, terutama bencana banjir, dan longsor Ketika musim penghujan. DPRD mendorong kepada Pemerintah Daerah kiranya anggaran yang diperuntukan bagi penanganan kebencanaan untuk dialokasikan anggaran yang memadai. Dengan harapan tanggap darurat manakala terjadi kebencanaan dapat diantisipasi sedini mungkin	Sesuai amanat UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana pasal 8 tertulis bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana adalah mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai terdapat 3 tahap penanggulangan bencana, yaitu pra bencana,saat bencana, dan pasca bencana. Menyadari akan pentingnya penanggulanagan bencana, terutama untuk kabupaten brebes yang memiliki resiko tinggi bencana, setiap tahun BPBD selalu mengusulkan anggaran sesuai kebutuhan di dalam penyusunan	1) Belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan penanggunagan bencana di kabupaten brebes. Karenanya, pada tahun 2022,BPBD kabupaten brebes akan mengupayakan tersusunnya peraturan daerah tersebut. Dengan adanya peraturan daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanggulanagan bencana sehingga mampu meminimalisir korban/kerugian yang ditimbulkan akibat



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		rencana kerja dengan mengakomodir ke-3 tahapan penanggulangan bencana. Akan tetapi, anggaran yang ditetapkan untuk BPBD kabupaten brebes belum dapat mencukupi kebutuhan untuk penanggulangan bencana.	bencana. 2) Belum terbentuknya desa tangguh bencana sesuai target yang ditetapkan dikarenakan keterbatasan anggaran. Desatana sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Semakin banyak terbentuk destana, maka dapat menurunkan indes resiko bencana di kabupaten brebes. 3) Masih kurangnya jumlah SDM dan peralatan penanganan bencana yang dimiliki BPBD kabupaten brebes. Hal ini menyebabkan kurangnya maksimalnya peran BPBD kabupaten brebes dalam penanggulangan bencana, baik pada tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana 4) Mengingat urusan bencana masuk dalam pelayanan dasar dan kabupaten brebes memiliki potensi rawan bencana yang tinggi dengan cakupan wilayah yang luas, maka seyogyanya mendapatkan perhatian utama, terutama dalam hal penganggaran. Kenyataannya, alokasi anggaran yang diterima BPBD kabupaten brebes masih minim, sehingga membatasi ruang gerak dalam penanggulangan bencana. Karenanya, diperlukan penambahan anggaran di tahun tahun mendatang agar dapat mengurangi resiko ancaman bencana di kabupaten brebes
URUSAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
	1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang merupakan koordinator dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di tingkat Kabupaten hendaknya mampu mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, dijelaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah berupa dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di bawah koordinasi BAPERLITBANGDA Kabupaten Brebes	Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Renja PD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Renja PD.
BAGIAN HUKUM SETDA			



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1)	Optimalisasi sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Peningkatan kegiatan sosialisasi di tingkat kecamatan dan desa	Seluruh kebijakan produk hukum didapat diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Brebes

Sumber Data : Set. DPRD, Dinas Dukcapil, Dinas Permades, BPBD, Baperlitbangda, Bagian Hukum Setda Kab. Brebes

2. Rekomendasi Pansus XXI DPRD Kabupaten Brebes (Urusan Ekonomi, Keuangan dan Kesehatan) atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020

Tabel IV.215
Rekomendasi Pansus XXI DPRD Kabupaten Brebes
atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
A	RUANG LINGKUP		
	Dalam Pasal 69, ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan: (i) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), (ii) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan (iii) Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ringkasan LPPD)) Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam Pasal 14, ayat (1) juga telah dinyatakan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi: 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan Selanjutnya dalam ayat (2) juga telah dinyatakan bahwa hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi: a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan, b. Kebijakan setrategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya, dan c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat	Ruang lingkup LKPJ meliputi : 1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, terdiri : a. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan yang terbagi menjadi sub bab Capaian indikator kinerja pembangunan dan pelaksanaan program dan kegiatan serta analisis kesesuaian, b. Kebijakan setrategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya terdapat pada bab III. c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun anggaran sebelumnya (APBD Tahun Anggaran 2019) terdapat pada bab III. 2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, terdiri : a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan b. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 hanya 1 (satu) kegiatan yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi Ditjen	Perbaikan ruang lingkup serta sistematika dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2020



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Daerah (DPRD) tahun anggaran sebelumnya (APBD Tahun Anggaran 2019). Di lain pihak, dalam ayat (3), khususnya huruf b, telah dinyatakan bahwa pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas capaian kinerja: 1. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan 2. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah daerah provinsi, yang dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Tengah	Pengelolaan Ruang Laut. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2020 adalah Dinas Perikanan. Memperbaiki format penyusunan capaian kinerja sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes	

Sumber data : DPRD Kab. Brebes

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KELAYAKAN DOKUMEN		
	a) Secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020, seperti dilaporkan beberapa komisi, di dalam penyajian ketiga urusan di atas, terutama dalam penyajian data masih terdapat beberapa kelemahan/kekurangan yang menyebabkan kurang lengkapnya dokumen LKPJ ini untuk mampu menggambarkan keseluruhan laporan pertanggungjawaban kinerja Pemerintahan Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020. Khususnya jika dikaitkan dengan pelaksanaan tahun berkenaan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Karena dokumen RPJMD merupakan pedoman Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Brebes, sehingga ketercapaian pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program-Program Unggulan Idealnya bisa dikaitkan, disertakan dan dinilai tingkat keberhasilannya. b. Laporan LKPJ Kabupaten Brebes, baik di Buku I maupun Buku II belum/ tidak dilampiri dengan adanya pernyataan piagam atau tanda penghargaan yang di dapat selama tahun 2020, sehingga seolah-olah	Penyajian data yang tercantum di dalam LKPJ tidak terlepas dari target yang ditetapkan di dalam RPJMD. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran telah tercantum pada Bab III Sub Bab Capaian Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020, hanya saja target tidak sesuai dengan capaian. Sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes, pada penyusunan dokumen LKPJ selanjutnya, OPD akan diminta untuk menyajikan data sesuai dengan indikator target yang tercantum dalam RPJMD sesuai urusan masing-masing, sehingga akan diketahui keberhasilan kerjanya. Melengkapi dan mencantumkan data perolehan piagam dan tanda penghargaan yang diperoleh pada tahun laporan pada penyusunan LKPJ selanjutnya sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes	Dokumen LKPJ dapat lebih mudah dibaca dengan mempertimbangkan sasaran dan target tahun laporan di dalam RPJMD sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes LKPJ dapat menggambarkan perolehan piagam dan tanda penghargaan sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	belum memperlihatkan prestasi apa yang sudah diperoleh dan dicapai selama tahun 2020. c. DPRD merekomendasikan agar Tabel Capaian, khususnya penjabaran Capaian Kinerja Makro Daerah berdasar turunan Misi ke-1 s/d Misi ke-8 sebaiknya / perlu dilampirkan dari awal masa jabatan (tahun 2017) hingga tahun berkenaan melaksanakan anggaran tahun 2020 (baik dari sisi Rencana dalam dokumen RPJMD maupun Realisasi dalam Pelaksanaan APBD tahun berkenaan). Hal ini dimaksudkan agar tingkat pencapaian / progres keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Brebes oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat dinilai / dievaluasi tingkat keberhasilan / ketercapainnya	Memperbaiki format penyusunan LKPJ dengan penambahan Capaian dari tahun awal jabatan (Tahun 2017), khususnya penjabaran Capaian Kinerja Makro Daerah berdasar turunan Misi ke-1 s/d Misi ke-8 sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes	Dokumen LKPJ menjadi lebih lengkap dengan tambahan data Capaian dari tahun awal jabatan (Tahun 2017), khususnya penjabaran Capaian Kinerja Makro Daerah berdasar turunan Misi ke-1 s/d Misi ke-8 sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes
2	CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH		
	Kinerja Makro Kabupaten Brebes tidak ada/belum ditampilkan dengan baik dalam Buku II. Sesuai dengan Pasal 6, dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pertumbuhan ekonomi, (ii) pendapatan per kapita, (iii) ketimpangan pendapatan, (iv) angka pengangguran, (v) angka kemiskinan, dan (vi) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gambaran capaiannya dan rekomendasinya adalah sebagai berikut. a. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2017 s.d 2020 di Kabupaten Brebes, mengalami kenaikan pada kurun waktu 2017 - 2019, dan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) pada tahun 2020. Pertumbuhan yang negatif pada tahun 2020 dialami oleh banyak daerah, sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19, yang sampai sekarang juga masih belum sepenuhnya teratasi. walaupun ekonomi tumbuh secara negatif, namun masih ada beberapa sektor di Kabupaten Brebes yang masih tumbuh positif. PRO merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes untuk mengambil momentum terbaik terhadap sektor-sektor ekonomi yang masih bertumbuh positif seperti di atas,	Penyajian data capaian makro terdapat pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tetapi sesuai dengan rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes, kami akan menyajikan data capaian makro pada penyusunan LKPJ di tahun berikutnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan kondisi yang positif dan fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 5,11 persen, kemudian meningkat tajam pada tahun 2017 menjadi sebesar 5,65 persen, kemudian melambat pada tahun 2018 menjadi sebesar 5,26 persen, dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 5,72 persen, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi (laju pertumbuhan ekonomi negatif) sebesar 0,59% akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap kondisi perekonomian secara regional, nasional dan global. Namun, jika dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2020 masih lebih baik, Nasional berkontraksi sebesar 2,07% dan Provinsi Jawa Tengah berkontraksi sebesar 2,65%, hal ini disebabkan karena kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Brebes yang relatif	Penyajian data capaian makro pada LKPJ tahun berikutnya sesuai rekomendasi DPRD Kabupaten Brebes.



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	sehingga stabilitas perekonomian masih tetap terjaga dan diharapkan masih mampu menyerap tenaga kerja di Kabupaten Brebes, sekaligus mampu berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes. b. Pendapatan perkapita Pendapatan per kapita, yaitu besarnya PDRB dibagi jumlah penduduk, yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Brebes pada tahun 2017 mengalami peningkatan sampai pada tahun 2019. Namun demikian, pada tahun 2020 sebagai akibat adanya Pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Dengan masih adanya sektor ekonomi yang tumbuh positif DPRD merekomendasikan untuk berusaha semaksimal — mungkin meningkatkan PDRB Perkapita melalui sektor-sektor yang masih tumbuh positif sambil membenahi sektor-sektor yang masih tumbuh negatif, khususnya sektor yang memberikan sumbangan besar ke PDRB. c. Ketimpangan pendapatan Dalam BUKU II belum / tidak temuan adanya paparan yang menunjukkan permasalahan ketimpangan pendapatan, baik ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan yang biasanya diukur dengan Indeks Gini (Gini Ratio) dan ketimpangan antar kecamatan, yang biasanya diukur dengan Indeks Williamson (Wiljamson Index), DPRD merekomendasikan untuk bisa melengkapi kedua besaran Indeks tersebut pada masa-masa mendatang, agar potret ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Brebes dapat diketahui. d. Angka pengangguran Tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes pada tahun 2019 lebih rendah dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Namun demikian, pada tahun 2020 tingkat pengangguran di Kabupaten Brebes meningkat. Artinya, selama setahun dari 2018-2020 terjadi penambahan pengangguran. DPRD merekomendasikan jika ditransformasikan ke jumlah orang, berapa jumlah orang yang menganggur di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 dan dari sektor PDRB apa yang menyebabkan	stabil dalam kondisi pandemi COVID-19. Secara lengkap laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data BPS, PDRB per kapita Kabupaten Brebes tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar Rp.20.930.000,- pada tahun 2017 sebesar Rp.22.250.000,-, pada tahun 2018 sebesar Rp.23.840.000,-, dan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp.25.530.000,-, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.23.820.000,- akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada kondisi perekonomian regional, nasional, dan global. Peningkatan PDRB per kapita menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes semakin meningkat. Pada Maret 2020, BPS Jawa Tengah menerbitkan Gini Ratio yang menjelaskan sebagai berikut : ▪ Pada Maret 2020, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan <i>Gini Ratio</i> tercatat sebesar 0,362. Angka ini naik 0,004 poin jika dibandingkan dengan <i>Gini Ratio</i> September 2019 yang sebesar 0,358, namun naik 0,001 poin jika dibandingkan dengan <i>Gini Ratio</i> Maret 2019 yang sebesar 0,361. ▪ <i>Gini Ratio</i> di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,385 meningkat jika dibandingkan dengan <i>Gini Ratio</i> September 2019 yang sebesar 0,379 maupun dengan <i>Gini Ratio</i> Maret 2019 yang sebesar 0,383. ▪ <i>Gini Ratio</i> di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,319 meningkat jika dibandingkan dengan <i>Gini Ratio</i> September 2019 yang sebesar 0,315 maupun dengan <i>Gini Ratio</i> Maret 2019 yang sebesar 0,318. ▪ Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,53 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2020 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci	



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	banyak terjadi pengurangan tenaga kerja dan yang banyak terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). e. Angka kemiskinan Persentase penduduk miskin di Kabupaten Brebes mengalami tren penurunan setiap tahunnya, sampai pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Walaupun demikian besarnya persentase kemiskinan masih lebih lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan juga Nasional. Kondisi ini patut diapresiasi, dan DPRD merekomendasikan kepala eksekutif untuk terus berusaha semaksimal mungkin mencari faktor penyebab kemiskinan, sekaligus mencari faktor yang mampu meningkatkan pendapatan penduduk di Kabupaten Brebes. f. Indeks pembangunan manusia (IPM) IPM di Kabupaten Brebes pada tahun 2020 masih masuk dalam kategori sedang (range antara 80,00 s/d 69,99). Besaran IPM ini masih di bawah IPM Jawa Tengah yang besarnya 71,87 satuan indeks. Indeks masuk kategori Tinggi / range 70,00 s/d 79,99) seria di bawah Nasional yang besarnya 71,94 satuan indeks. Jika dilihat dari sumber pembentuk IPM yang mengalami penurunan pada tahun 2020 adalah dari unsur Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (dalam satuan ribu rupiah/orang*تان). DPRD merekomendasikan agar Kabupaten Brebes bisa secepatnya masuk ke kategori ber-IPM Tinggi Jantara range 70,00 sid 79,98 satuan indeks) dan terus berusaha meningkatkan anda apeian penduduk melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi dalam PDRB yang mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran sekaligus mampu mengurangi kemiskinan di Kabupaten Brebes	menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,40 persen yang juga tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,33 persen yang berarti juga tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Brebes Tahun 2015-2020 berfluktuatif, pada tahun 2015 sebesar 6,49%, pada tahun 2016 tidak ada data dikarenakan sampel Survei Tenaga Kerja yang dilaksanakan BPS tidak sampai ke tingkat kabupaten/kota, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 8,04%, kemudian menurun pada tahun 2018 menjadi sebesar 7,20%, kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 7,39%, dan pada tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi sebesar 9,83% sebagai akibat dari pandemi COVID-19 yang antara lain menyebabkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran karena terjadi pengurangan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian akibat lesunya kondisi perekonomian nasional dan global. Gambaran kemiskinan ditunjukkan dari kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan diukur dari Tingkat Kemiskinan (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), dan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan Data Kemiskinan Makro bersumber BPS per bulan Maret 2020, Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2020 adalah sebesar 17,03%, mengalami	



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		kenaikan sebesar 0,81% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 16,22%, hal ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian masyarakat Kabupaten Brebes, yang di antaranya menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin akibat pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan untuk meminimalisir penularan dan penyebaran COVID-19 sehingga menyebabkan terhambatnya pergerakan ekonomi masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan formula untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh UNDP (<i>United Nation Development Programme</i>) dan dipublikasikan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan IPM Kabupaten Brebes mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 berturut turut 63,98; 64,86; 65,68; 66,12; serta mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi COVID-19 menjadi 66,11. Imbas COVID-19 sangat luas, terutama pada komponen pengeluaran per kapita yang disesuaikan mengalami penurunan sebesar Rp. 180.000,- sebagai tanda melemahnya kondisi perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan IPM Kabupaten Brebes sebesar 0,01 dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 66,11 pada tahun 2020.	
3	CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH		
	Berdasarkan sajian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Brebes Tahun 2020, capaian kinerja keuangan secara umum ternampai. Namun yang menjadi catatan dan sekaligus beberapa catatan Rekomendasi DPRD adalah sebagai berikut: a. Format penyusunan capaian kinerja, menurut kelaziman adalah realisasi di kurang rencana / target. Untuk kondisi keuangan di Kabupaten Brebes seperti terbalik, sehingga selisih lebih (positip) dan selisih kurang (negatip) menjadi	Memperbaiki format penyusunan capaian kinerja sesuai rekomendasi DPRD Kab. Brebes	Memperbaiki format capaian kinerja



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	terbalik, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. b. Pendapatan Daerah. Dengan realisasi total Pendapatan Daerah Rp.1,73 triliun, yang realisasinya melampaui target hanya Pendaparan Asli Daerah (PAD); sementara Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah belum melampaui target. Dalam kondisi yang demikian DPRD merekomendasikan agar hati-hati dalam merencanakan pos Pendapatan Daerah yang bersumber dari luar Pemerintah Kabupaten Brebes. Perencanaan Pendapatan Daerah yang tidak tepat dapat mempengaruhi ketepatan dalam perencanaan daiam pos Belanja Daerah. c. Belanja Daerah. Dari keseluruhan Belanja Daerah, daya serap yang relatif rendah ada dalam pos Belanja Langsung. Kurang optimalnya dalam penyerapan Belanja Langsung dapat mempengaruhi pencapaian kesejahteraan masyarakat, karena Belanja Langsung perdefinisi / pengertian adalah belanja yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan program kegiatan yang ada kaitannya dengan DPRD merekomendasikan agar pada tahun-tahun masyarakat. mendatang pos Belanja Langsung yang kelak bertransformasi ke pos Belanja Modal yang kemanfaatannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dapat dioptimalkan. Pembiayaan Daerah. d. Pembiayaan Daerah yang direncanakan mengalami defisit; dalam realisasi mengalami surplus. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya program di pos Belanja Daerah banyak yang tidak mencapai target / merekomendasikan agar pada tahun-tahun mendatang pos Belanja tidak direalisasikan. DPRD Langsung / Belanja Modal yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, khususnya yang mampu menyerap tenaga kerja / mengurangi pengangguran serta mampu mengurangi kemiskinan jangan sampai tidak dilaksanakan /	Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Pada TA 2020 terdapat pengurangan Alokasi Dana Perimbangan yang disebabkan oleh Pandemi Corona Virus Desease 2019. Ke depan pada Pos Belanja Langsung akan kami formulasikan untuk alokasi Belanja Modal yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat sehingga diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih optimal. Belanja APBD TA 2020 direncanakan Defisit dikarenakan untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang dianggarkan pada Pos Penerimaan Pembiayaan. Adapun dalam realisasi mengalami surplus, penyebabnya adalah adanya belanja-belanja yang tidak terealisasi secara optimal. Ke depan kami akan lebih cermat dalam proses perencanaan dan penganggaran sehingga penyerapan anggaran dapat lebih optimal.	Alokasi pendapatan dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan daerah yang sah Formulasi belanja modal agar penyerapan lebih optimal Perencanaan pembiayaan daerah

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	gagal dieksekusi.		
4	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN		
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Bersifat Pelayanan Dasar		
	1) Untuk Urusan Kesehatan harus diarahkan kepada peningkatan indikator Usia Harapan Hidup (UHH), dengan terus berupaya meningkatkan asupan gizi anak dan balita serta peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, melalui pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat	1) Meningkatkan cakupan ASI eksklusif, pemberian suplemen makanan (makanan tambahan), peningkatan keluarga sadar gizi dan peningkatan pemanfaatan posyandu 2) Peningkatan sarana dan prasarana PONED (Pelayanan Obstetri Neonatus Esensial Dasar), mengadakan pelatihan dan pembentukan tim PONED, serta peningkatan kemampuan bidan dalam kesiapsiagaan persalinan dan monitoring tumbuh kembang anak guna menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKaBa) 3) Pemasangan media promosi Kesehatan lewat baliho 4) Kampanye promosi Kesehatan dengan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 5) Sosialisasi dan advokasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	1) Meningkatkan penanggulangan masalah gizi pada anak dan balita 2) Peningkatan pelayanan Kesehatan yang merata, terjangkau bermutu dan berkeadilan 3) Adanya perubahan perilaku masyarakat dari perilaku yang tidak sehat berubah ke perilaku yang sehat
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Bersifat Non Pelayanan Dasar		
	1) Untuk Urusan Pangan, harus ada jaminan bahwa ketersediaan dan kecukupan pangan di Kabupaten Brebes semakin hari harus semakin tercukupi dan tidak mengandalkan / menggantungkan pasokan dari luar daerah, khususnya khususnya untuk komoditi yang masuk dalam daftar kebutuhan pokok pangan 2) Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), harus ada program dan kegiatan yang mengarah pada fasilitasi peningkatan status Koperasi dalam kondisi sehat. Sementara untuk UMKM harus ada keterjaminan bahwa hasil produksi UMKM di Kabupaten Brebes dapat dipasarkan dan dapat diserap oleh pasar, sehingga keberlangsungan usaha	- Berdasarkan laporan capaian kinerja skpd komoditas kebutuhan pokok pangan melebihi target untuk padi, kedelai, kacang hijau, kecuali jagung yang tidak memenuhi target. Akan tetapi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya semua komoditas tersebut mengalami kenaikan produksinya. - Tindak lanjut yang akan dilakukan agar semakin tercukupi dalam pasokan komoditi kebutuhan pokok adalah dengan : 1) Pembinaan pengolahan pangan lokal 2) Penyimpanan melalui optimalisasi lumbung pangan (tahun 2020 ada tambahan 2 lumbung pangan dan rumah rice milling dan RMU) 3) Kegiatan Serap Gabah untuk ASN - Sesuai anggaran DPA tahun 2020 Bidang Usaha Mikro dilaksanakan Program Pengembangan Kemitraan dan Promosi Usaha Mikro dalam bentuk kegiatan mengikuti : - Pameran dan Bazar tingkat Nasional di Jakarta - Pameran dan Bazar hari Jadi Brebes - Pameran dan Bazar Hari Kopeerasi	1. Meningkatkan nilai tambah dari hasil komoditas produk tanaman pangan lokal 2. Mencegah terjadinya harga anjlog pada saat panen raya dan kelangkaan kebutuhan pokok pada saat gagal panen atau kemarau dan banjir 3. Mencegah terjadinya pengadaan gabah dari luar - Tujuannya untuk mempromosikan dan memasarkan produk unggulan UMKM dan agar dapat meningkatkan produktivitas /volume usaha serta lebih dikenal produknya di masyarakat luas. - Peningkatan volume pemasaran umkm melalui pemasaran Online - Peningkatan SDM UMKM dalam pengembangan usaha,



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	UMKM tidak mengalami masalah	- Pameran dan Bazar Hari UMKM dan Pameran serta bazar umkm lainnya - Memfasilitasi dan mengadakan Pelatihan bagi UMKM berbasis teknologi Internet (untuk pemasaran online dengan Toko Pedia, Bukalapak, shopee dll) - Memfasilitasi dan mengikuti segala pelatihan utk peningkatan SDM baik dari Kemenkop UKM RI maupun dari Balai Latihan Koperasi dan UKM Prov. Jateng yang terkait dengan pembinaan Pemasaran, Kemasan Produk, Perizinan UMKM, Perisinan PIRT, Perizinan Halal dll - Memfasilitasi kemitraan UMKM dengan Toko Modern atau toko retail	baik melalui pelatihan perencanaan bisnis, Ketrampilan, maupun Pemasaran bagi UMKM Kemasan produk semakin baik dan menarik sertalegalitas usaha atau produknya lebih dipercaya konsumen Terjalin kerjasama kemitraan usaha dengan Toko Modern (Toko Almart Indomart dan PT Bukalapak) - Untuk mengurangi permasalahan yang ada dilakukan dengan pembinaan dan monitoring evaluasi ke umkm setiap kegiatan yang telah dan akan dilakukan.
3)	Untuk Urusan Penanaman Modal , harus ada program dan kegiatan yang mengarah pada usaha peningkatan jumlah perusahaan dan nilai investasi di Kabupaten Brebes, yang menyerai tenaga kerja local. Jika kondisi ini terjadi diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan sekaligus juga dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Brebes	Program perencanaan pengembangan iklim dan promosi penanaman modal melalui kegiatan program perencanaan penanaman modal pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal mempunyai tujuan meningkatkan jumlah investor. Sedangkan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan penanaman modal, pembinaan pelaksanaan modal dan sistem informasi mempunyai tujuan meningkatkan realisasi investasi	Diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan sekaligus juga dapat mengurangi angka kemiskinan di kabupaten brebes
3	Urusan Pilihan		
	1) Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan, OPD terkait dapat mengoptimalkan program dan kegiatannya dalam mengoptimalkan potensi yang dihasilkan dari kelautan dan perikanan darat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat pada khususnya dan daerah sekitarnya jika memungkinkan 2) Untuk Urusan Pertanian, OPD terkait harus mampu memfasilitasi program dan kegiatan yang mampu menjadikan Kabupaten Brebes menjadi Tangguh dalam memproduksi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya produksi padi/beras, dan kebutuhan pokok lainnya	Optimalisasi peningkatan terus dilakukan dengan tetap menjaga kelestariannya. Tidak hanya terbatas di perairan laut, upaya penggalian potensi juga dilakukan di beberapa potensi perairan lainnya seperti waduk, embung, sungai, dan lain-lain Bersama ini kami sampaikan adanya program dan kegiatan yang diharapkan mampu menjadikan Kabupaten Brebes menjadi Tangguh dalam memproduksi tanaman kebutuhan pokok : a. Program IP 400 (padi umur pendek) pada Kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Kersana dan Tonjong dengan luas tanaman 262 Ha. b. Program padi bio fortifikasi /Inparinzinc yang ternyata sangat baik untuk pencegahan stunting c. Program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetic tanaman melalui : - Peningkatan desa mandiri benih	Peningkatan daya dukung stock sumber daya ikan baik di laut maupun perairan lainnya akibat eksploitasi yang tidak ramah lingkungan 1) Agar ketersediaan dan ketercukupan pangan kebutuhan pokok semakin baik 2) Agar luasan pengembangan tanaman pajale dan kacang hijau bertambah dan luas lahan pengembangan Kawasan komoditas buah dan sayur bertambah

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	3) Adanya penggunaan Kartu Tani agar tidak menghambat adanya ketersediaan pupuk. Ditahun 2021 jangan sampai terjadi lagi kelangkaan pupuk seperti yang terjadi di tahun 2020. Ketegasan dari dinas terkait terhadap distribusi pupuk sangat diperlukan sebab masih adanya kelangkaan pupuk padahal masih ada pupuk yang tersimpan di gudang.	- Peningkatan produksi benih bersertifikat - Pengembangan Kawasan komoditas pokok - UPSUS PAJALE yang diperpanjang sampai 2021 Pada bulan Maret 2021 telah dibagikan Kartu Tani sejumlah 35.979 yang merupakan tindak lanjut atas pwndataan tahun 2020, sehingga total Kartan yang telah terbagi kepada petani yaitu 182.549 buah. Kebijakan Program kartu tani pada tahun 2021 juga telah didampingi dengan e-VERVAL .terkait ketersediaan stok dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Prinsip 6 Tepat (Tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat dosis, dan tepat mutu) dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh petani yang berhak secara presisi (by name by addres) yang dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		
	1) Dampak COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja karena kegiatan tidak bisa dilaksanakan untuk memenuhi protocol Kesehatan. Pelatihan-pelatihan dan pameran sangat berpengaruh karena sesuai dengan protocol Kesehatan tidak boleh mengumpulkan orang pada saat tahun 2020. Oleh sebab itu perlu cari alternatif-alternatif kegiatan yang dapat mensiasati hal tersebut sehingga capaian kinerja OPD tersebut dapat terlampaui dengan maksimal meski ada pembatasan terkait protocol Kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. 2) Memastikan terlaksananya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan. 3) Bekerjasama dengan Dinas Perikanan untuk menyelenggarakan Keterampilan, Pengetahuan dan Keahlian bagi ahli tenaga perikanan	Penjadwalan ulang pelatihan pelatihan dan pameran sesuai protokol kesehatan dan menyesuaikan dengan kegiatan di era new normal pelatihan diselenggarakan secara terbatas pesertanya bergantian sesuai jadwal . pergeseran anggaran pelatihan dan pameran yang tidak dapat dilaksanakan pada kegiatan ini. Sosialisasi dan monitoring pencegahan penyebaran covid-19 diperusahaan dan membuat surat edaran nomor 560/440 tanggal 3 juni 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian covid-19 ditempat kerja Mengajukan surat permintaan kerja sama ke Dinas Perikanan dengan tujuan untuk penajagan kerja sama pelatihan ketrampilan tenaga ahli perikanan	Menyelesaikan masalah kinerja yang rendah dengan perubahan/pergeseran anggaran yang tidak bisa dilaksanakan karena covid-19 menjadi kegiatan lain yang bisa dilaksanakan sehingga realisasi penyerapan anggaran dapat maksimal. Menyelesaikan masalah menghindari PHK karena pandemi dengan tetap berproduksinya perusahaan sesuai era new normal Menyelesaikan masalah masih kurangnya kompetensi tenaga kerja sektor perikanan
2	DINAS KESEHATAN, RSUD BREBES DAN RSUD BUMIAYU BESERTA BLUD KESEHATAN		
	1) Adanya INSEND A (Insentif Daerah) yang proporsionalitas bagi dokter spesialis agar mempunyai daya saing dan daya tawar dengan daerah sekitar.	- Telah dianggarkan anggaran insentif tenaga Kesehatan daerah melalui APBD murni dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan pada tahun 2020. APBD murni menganggarkan insentif	- Penghargaan dedikasi nakes dalam memberikan pelayanan Kesehatan Covid-19



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	2) Dalam jangka pendek kekosongan dokter spesialis di RSUD Bumiayu dapat diambil Langkah dengan menyekolahkan dokter umum yang ada di RSUD Bumiayu ke Dokter Spesialis. 3) Perlu dibangunnya Ramp di RSUD Bumiayu / RSUD Brebes dalam waktu secepatnya mengingat fungsi yang sangat vital adanya Ramp tersebut. Anggaran yang dibutuhkan untuk pembuatan Ramp di 5 lantai adalah sebesar Rp. 5 Miliar. 4) Pemenuhan alat Kesehatan yang diperuntukan untuk mendukung kinerja bagi dokter spesialis. Salah satunya adalah untuk Bedah Syaraf	bulan Maret s.d Mei untuk nakes/lainnya yang belum mendapatkan insentif dari BOKT. Adapun BOKT digunakan untuk membayarkan insentif nakes bulan Maret s.d Juni untuk puskesmas dan Maret s.d Juli untuk RSUD - Mohon dianggarkan dari APBD Kabupaten Brebes Tahun 2022 - Mohon dianggarkan dari APBD Kabupaten Brebes 2022	- Ramp merupakan bagian yang tidak kalah penting dalam gedung rumah sakit yang berfungsi menghubungkan ruang-ruang dengan ketinggian elevasi berbeda bagi penyandang disabilitas. Ramp ini yang membedakan antara Gedung rumah sakit dengan Gedung-gedung umum, - Ramp merupakan jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga - Salah satunya untuk jalur evakuasi pasien pengguna bed, kursi roda, dan dikhususkan apabila terjadi bencana - Bagi RSUD Brebes Bedah Syaraf adalah spesialis yang sangat penting disamping RSUD Brebes sesuai tipe B, untuk Bedah Syaraf masih jarang sekali, dan ada Dokter yang bersedia di tempatkan di Brebes
3	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		
	1) Persiapan distribusi pupuk di tahun 2020 masih jauh dari harapan, perlu ada ketegasan manajemen atau dinas dalam memberikan arahan pelaku distribusi pupuk di lini III. Hilangkan tebang pilih dalam memberikan teguran secara kontinyu, pengawasan dalam distribusi ke KPL dan ke petani. 2) Fungsi pengawasan yang sesuai aturan di lini III yang ada di Dinas Perdagangan belum maksimal. Perlu ada top Manajemen (Kepala Dinas) yang mumpuni dan diikuti teamwork yang solid	Dengan dukungan anggaran di tahun 2021, maka Dinas Koperasi UM dan Perdagangan berkomitmen untuk lebih mengawasi kegiatan distribusi pupuk bersubsidi yang Nomor 518/039.A/2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi kepada semua Distributor dan juga menjadwalkan kegiatan monitoring distribusi pupuk bersubsidi secara rutin tiap bulan ke Distributor dan juga KPL. Selain itu, setiap aktivitas yang menyimpang dari ketentuan Perundang-undangan, akan kami tegur secara tertulis, dimana hal ini sudah kami laksanakan di tahun ini untuk distributor serta KPL. diawali dengan distribusi surat Kepala Dinas	Terwujudnya 6 Tepat (Tepat Jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu) dalam distribusi pupuk bersubsidi
4	BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA		
	1) Laba yang begitu kecil dari Perumda Bank Brebes sebesar Rp. 45 Juta, padahal aset yang diperoleh sebesar Rp. 80 Miliar. Mengingat kinerja yang sangat begitu memprihatinkan dimana ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari Top Manajemen Perumda Bank Brebes, maka perlu adanya penyegaran pimpinan Perumda Bank Brebes, dalam hal ini Direktur Utama	a. Bagian Perekonomian melakukan pembinaan dengan melihat laporan keuangan TA. 2020 sebagai tolak ukur kinerja terutama pada Rasio BOPO yang mencapai 107,04% (tidak sehat) dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam operasional lebih besar dan pendapatan yang diterima (Inefisiensi) dan Rasio ROA yang mencapai 0,96% dalam hal ini Direksi belum bisa mengelola asset perusahaan dalam menghasilkan laba dan	Penyebab/masalah kerugian di Tahun 2020 : a. Perekrutan karyawan sebanyak 42 orang untuk memenuhi Keputusan Bupati No.584.2/788 Tahun 2019 tentang penunjukan Perumda BPR Bank Brebes sebagai tempat penyimpanan, penyaluran dan pencairan Dana Desa, DBH Pajak dan Retribusi, ADD dan Bantuan Keuangan kepada Desa pada 10 kecamatan sehingga terjadi kenaikan biaya Tenaga Kerja

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		membina tata Kelola yang baik. b. Adanya komitmen Direksi dalam upaya perbaikan yaitu meningkatkan kinerja operasional, meningkatkan tata Kelola perusahaan yang baik, meningkatkan pendapatan dan efisiensi biaya c. Atas saran Bapak Sekretaris Daerah, untuk memantau perkembangan Kinerja Perumda sampai Triwulan II Tahun 2021	yang begitu signifikan b. Pembayaran uang pesangon dan uang jasa 5 (lima) orang tenaga kerja pensiun yang belum dicadangkan di Tahun sebelumnya c. Pengadaan Sewa Kantor, Sarana dan Prasarana
5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		
	1) Adanya penggunaan Kartu Tani agar tidak menghambat adanya ketersediaan pupuk. Di tahun 2021 jangan sampai terjadi lagi kelangkaan pupuk seperti yang terjadi di tahun 2020. Ketegasan dari dinas terkait terhadap distribusi pupuk sangat diperlukan sebab masih adanya kelangkaan pupuk padahal masih ada pupuk yang tersimpan di Gudang	Pada bulan Maret 2021 telah dibagikan Kartu Tani sejumlah 35.979 yang merupakan tindak lanjut atas pendataan tahun 2020, sehingga total Kartan yang telah terbagi kepada petani yaitu 182,549 buah. Kebijakan Program Kartu Tani pada tahun 2021 juga telah didampingi dengan e-VERVAL. Terkait ketersediaan stok dan distribusi pupuk bersubsidi merupakan kewenangan dan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Prinsip 6 tempat (Tepat jenis, tepat jumlah, tepat tempat, tepat dosis, and tepat mutu) dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilaksanakan secara optimal sehingga subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh petani yang berhak secara presisi (by name by address yang dapat mendukung peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian
6	DINAS PERIKANAN		
	1) Perlu ada upaya-upaya yang dilakukan dinas terkait sangat merosotnya harga garam. 2) Mendata Pemilik-Pemilik Kapal ikan di Kabupten Brebes untuk sosialisasi tentang pentingnya Asuransi ABK (Anak Buah Kapal)	a. Penyerapan garam rakyat melalui Washing Plant dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran b. Pembangunan Gudang Garam Rakyat dengan tujuan menyimpan garam Ketika harga rendah dan menjual Ketika harga tinggi c. Rencana penyerapan garam oleh ASN dengan dasar surat edaran dari Bupati 1) Program Asuransi Nelayan terus disosialisasikan pada tahun 2021 melalui APBD Prov. Jateng, Kab. Brebes mendapat alokasi 5.029 nelayan kecil dan ABK perahu kecil yang diikuti dalam program tersebut 2) Surat Himbauan dari Dinas Perikanan kepada KUD Mina Saya Sari untuk meningkatkan jaminan Kesehatan dan asuransi jiwa bagi nelayan anggota koperasi	Untuk menjaga harga garam agar tidak jatuh (Stabil) Meningkatkan kesadaran nelayan untuk melindungi diri secara mandiri
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
	1) Terkait penataan Kawasan ternak sapi di Maribaya perlu dilakukan upaya-upaya pemenuhan infrastruktur maupun sarana dan prasarannya sehingga pada waktunya Kawasan ternak sapi di Maribaya tersebut dapat lebih siap segalanya sejak dini 2) Terkait sapi Jabres yang dijadikan ikon ternak sapi di Kabupaten Brebes, perlu dipikirkan agar sapi Jabres tersebut juga lebih bisa	Sudah diusulkan anggaran kegiatan penataan kawasan padang penggembalaan maribaya melalui sumber dana APBD kabupaten, APBD prov dan APBN Upaya yang telah dilakukan dalam pengembangan sapi jabres yaitu dibuat pagar penyekat pada lahan padang penggembalaan ternak	Anggaran pembuatan masterplan padang penggembalaan maribaya serta untuk penyelesaian pembangunan pagar keling, penyediaan sumber daya air, pengolahan limbah (Bioreaktor kapal selam) dan pembangunan jalan inspeksi di kawasan padang penggembalaan maribaya Disediakan tempat untuk sapi khususnya sapi jantan atau sapi afkir yang akan digemakan serta tambahan pakan konsentrat untuk



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	dimaksimalkan pada penggemukannya, jangan hanya untuk perkebang biakannya saja	,penyeleksian ternak penggembukan serta penambahan pakan konsentrat Pengobatan obat cacin untuk ternak masyarakat sekitar	meningkatkan bobot sapi Upaya untuk meningkatkan kesehatan ternak milik masyarakat

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	Rekomendasi Khusus		
	Dilakukannya perubahan RPJMD kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 70 Tahun 2019 mengharuskan revisi RPJMD dengan satu tujuan pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat mengingat ada kondisi khusus yang terjadi pada tahun 2020 yaitu adanya pandemic Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap capaian realisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh semua OPD sebagai penterjemah pelaksana visimisi Kepala Daerah, sehingga perlu adanya perubahan RPJMD yang disesuaikan dengan kondisi terkini menyikapi efek dari pandemic Covid-19 tersebut.	Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, pada Pasal 342 ayat (2) yang berbunyi : Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila : a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun	Berdasarkan peraturan tersebut, maka rekomendasi khusus Pansus 21 DPRD Kabupaten Brebes untuk dilakukannya perubahan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 untuk saat ini tidak dapat dilaksanakan. Di samping itu, tahun 2021 ini BAPERLITBANGDA sedang dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2022 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan kelima atau merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022. Sedangkan terkait dengan dampak Pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap realisasi capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, nantinya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyusunan RPJMD periode berikutnya

Sumber Data : Kab. Brebes.

3. Rekomendasi Pansus XXII DPRD Kabupaten Brebes (Urusan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat) Atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020

**Tabel IV.
Rekomendasi Pansus XXII DPRD Kabupaten Brebes
Atas LKPJ Bupati Brebes TA 2020**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
----	--------------------	--------------------------	------------------------------------

**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1) Memaksimalkan bahu jalan untuk dibangun agar tidak digunakan untuk bangunan liar 2) Pemeliharaan jalan supaya dimaksimalkan	- Akan melakukan program penataan bahu jalan - Sosialisasi ke warga setempat - Memperbaiki sistem pemeliharaan jalan yang lebih tepat sasaran dan mutu yang lebih baik - Menambah anggaran pemeliharaan jalan	- Memperbaiki dan membersihkan bahu jalan yang masuk dalam rumija(Ruang Milik Jalan) agar bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan jalan dan memaksimalkan fungsinya - Kondisi jalan wilayah di brebes bisa ditingkatkan - Perekonomian dan kegiatan masyarakat bisa meningkat seiring kondisi jalan yang semakin membaik
2	DINAS PENGOLAHAN SIMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG		
	1) Bangunan liar dan yang berdiri diatas aliran sungai supaya di terbitkan agar tidak mengganggu aliran sungai	Akan kami koordinasikan dengan pengampu kewenangan pemerintah provinsi jawa tengah yaitu melalui dinas pekerjaan umum sumber daya air dan penataan ruang provinsi jawa tengah dan pemerintahan pusat yaitu melalui balai besar wilayah sungai(BBWS) pemali juana dan balai besar wilayah sungai (BBWS)cimanuk cisanggarung.	- Akan kami lakukan inventaris bangunan liar dan jembatan yang berdiri diatas aliran sungai. - Kami akan melakukan sosialisasi terhadap pemilik bangunan liar tersebut agar menaati peraturan pendirian bangunan sepanjang garis sepadan sungai
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		
	1) Bupati untuk tidak menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten apalagi cenderung dinas pariwisata sekarang ini banyak kurang tanggap disistem dan pengelolaannya karena bidang pariwisata memiliki potensi yang bagus untuk menambah PAD Kabupaten Brebes	Kurang tanggapan dimaksud DPRD disebabkan pimpinan terdahulu menjelang pensiun	Untuk diadakan pimpinan baru yang lebih kompeten
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN		
	1) Perlunya data yang valid tentang data RTLH di kabupaten Brebes	Data RTLH di Kabupaten Brebes berdasarkan pada data PBDT (Pemutahiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 jumlah 63.471, sedangkan berdasarkan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tahun 2019 berjumlah 22.939, namun untuk pengambilan kebijakan pemerintah bersumber basis data DTKS seiring dengan penanganan penurunan angka kemiskinan, dari masing – masing sumber data pemerintah desa (pmdes) sudah bisa mengakses data RTLH lewat SIMPERUM (Sistem Informasi Perumahan) dan mevalidasi data RTLH tersebut	Sumber data RTLH yang berasal dari PBDT dan DTKS semuanya diakui oleh pemerintah, akan tetapi pemerintah kabupaten Brebes belum memiliki Singel Data RTLH, langka yang perlu diselesaikan dalam rangka pemutahiran data RTLH Gerakan dari pemdes lewat RT / RW untuk melakukan pendataan basis datanya dari Simperum dan divalidasi oleh pemdes lewat operator Simperum Desa. Dalam pembuatan singel data RTLH perlu koordinasi sinergitas antara data RTLH PBDT dan DTKS serta hasil verifikasi di lapangan lewat RT / RW. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2018, 2019 dan 2021 sudah melakukan validasi, verifikasi dan up date data RTLH di beberapa kecamatan. Sinergitas dan terintegrasinya data Simperum dan e RTLH data singel data RTLH Kabupaten Brebes perlu dibangun dalam



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
			rangka memudahkan dalam kinerja capaian Garapan RTLH.
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH		
	1) Perlu nja tambahan kendaraan untuk pengangkut sampah agar masalah sampah bisa teratasi	- Mengusulkan Kebutuhan armada pengangkut sampah 198 unit truk @ Rp. 400 juta = Rp. 79.200.000.000. - Mengusulkan tenaga kerja yang dibutuhkan 990 orang dengan rincian untuk honor @365 hari x 65.000 x 990 orang = 23.487.750.000. - Mengusulkan kebutuhan BBM 198 unit x 17 liter x 365 hari x Rp 5.150 = Rp. 6.327.238.500/tahun. - Anggaran pemeliharaan Sarpras Sampah 198 unit x 12 bulan x Rp.1000.000 = 2.376.000.000/tahun	- Sampah dapat diangkut secara optimal ke TPA
6	DINAS PERHUBUNGAN		
	1) Dinas Perhubungan untuk segera Koordinasi dengan PLN untuk mencari solusi berkaitan dengan pembayaran pajak penerangan jalan umum	Saat ini tengah disusun kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten brebes dan pln tentang pemungutan, penyeteroran paja penerangan jalan, pembayaran rekening listrik dan pengelolaan. Penerangan jalan umum pemerintah kabupaten brebes. Kesepakatan bersama ini melibatkan unsur opd yang terkait yaitu Bapenda, Bpkad dan dinas perhubungan dimana leading kesepakatan Bersama ini ada di bapenda karena terkait dengan pajak penerangan Jalan.	Tujuan disusunnya kesepakatan bersama adalah: a. Menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli Daerah kabupaten brebes yang berasal dari pajak Penerangan jalan. b. Menjamin kelancaran pelunasan rekening listrik Pemerintah daerah. c. Melakukan pengawasan dan penertiban lampu PJU Tidak resmi. d. Meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik. e. Mencapai kesepakatan dan kesepakatan validasi dataLampu PJU f. Menjamin kelancaran pendataan lampu PJU.
	2) Penambahan rambu rambu jalan di kabupaten brebes	Secara berkala perencanaan penganggaran rambu-rambu jalan dan Alat perlengkapan jalan lainnya terus dilaksanakan dalam dokumen Perencanaan anggaran dinas perhubungan kabupaten brebes dengan Menyuaikan analisa kebutuhan juga usulan masyarakat	Ketersediaan rambu jalan dan alat perlengkapan jala Lainnya untuk keselamatan, kenyamanan dan ketertiban Masyarakat.
7	DINAS SOSIAL		
	1) Pemerintah daerah diharapkan melakukan kegiatan pendataan PMKS dengan melibatkan pihak kecamatan, desa dan lembaga terkait yang valid serta menambah dana dalam penganggulangan kemiskinan	1) Sejak Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2021 Dinas Sosial Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran PMKS. Kegiatan telah dilaksanakan melibatkan stakeholder terkait meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pihak kecamatan dan desa, serta Pendamping PKH dan TKSK. 2) Kegiatan penanganan dan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui Bidang Penanggulangan Kemiskinan,	Kualitas pemutakhiran data PMKS yang valid dan program penanganan/penanggulangan kemiskinan yang berkualitas dan tepat sasaran.



NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		meliputi : - Membuat Juknis Verifikasi dan Validasi Data Penanggulangan Kemiskinan. - Membuat Profil Kemiskinan Daerah - Menyusun Grand Design Penanggulangan Kemiskinan - Pembuatan Dokumen Hasil Verifikasi dan Validasi dan Sinkronisasi Data Penanggulangan Kemiskinan Beberapa kegiatan sudah direncanakan dan diusulkan anggarannya tetapi belum memperoleh alokasi anggaran, meliputi : a. Pelatihan Keterampilan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sebesar Rp. 750.000.000,- b. Verifikasi dan Validasi DTKS dan Pendataan PMKS sebesar Rp. 500.000.000,- 3) Agar program penanganan/penanggulangan kemiskinan makin berkualitas dan tepat sasaran, masih diperlukan penambahan anggaran, sehingga diharapkan dapat tercapai Peningkatan Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penurunan Angka Kemiskinan dan Kabupaten Brebes	
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	1) Diperlukan regulasi sebagai pelaksanaan kabupaten ramah anak yang dapat digunakan untuk pencegahan perkawinan dini dan perlindungan anak secara komprehensif	- Sosialisasi Perda Kab. Brebes No.004 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak - Memberikan Sosialisasi dan KIE mengenai Kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan - Rencana Pembuatan Perda tentang Kabupaten Layak Anak	- Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan, Penanganan Korban dan Pengembangan system data dan informasi anak - Pencegahan Pernikahan Dini dan Remaja terhindar dari Triad KRR
9	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN		
	1) Perlu pembangunan kearsipan yang berbasis digital dan pembangunan perpustakaan digital, sehingga kita bisa menghemat tempat dan efektifitas waktu dan biaya	1. Untuk tahun 2020 belum ada anggaran untuk pembangunan kearsipan berbasis digital. 2. Untuk pengelolaan arsip dinamis dan statis yang terintegrasi berbasis digital tahun 2019 kita upayakan bantuan aplikasi SIKD dan SIKS ke ANRI tetapi sampai sekarang belum terealisasi 3. Syarat untuk pengelolaan kearsipan berbasis IT di perlukan 4 instrumen : a. Pedoman Tata Naskah Dinas b. Pedoman Klasifikasi Arsip c. Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis d. Jadwal Retensi Arsip	- Penghematan tempat, waktu dan sumber daya manusia - Untuk tahun 2022 mohon di upayakan anggaran untuk pembangunan kearsipan berbasis digital - Di bidang kearsipan mohon di upayakan adanya sumber daya manusia berbasis TIK/ sarjana TIK - Adanya fasilitas perpustakaan digital di Kab. Brebes sehingga dapat di akses oleh seluruh masyarakat



**BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH**

NO	DAFTAR REKOMENDASI	TINDAK LANJUT TAHUN 2020	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Keempat instrumen tersebut sudah kami upayakan pembentukannya berupa Peraturan Bupati. Khusus untuk Jadwal Retensi Arsip sudah terbentuk 30 Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah namun kurang 3 urusan 4. Mengusulkan penambahan anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan digital senilai Rp. 250.000.000,	
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		
	1) Belum semua guru ngaji, imam masjid dan mushola dilakukan pembinaan perlu kiranya untuk dilakukan pendataan setiap tahun agar tidak menimbulkan kecemburuan diantara mereka 2) Keterlambatan pelaksanaan pembinaan guru ngaji, imam masjid dan mushola dikarenakan adanya covid-19 supaya tidak terulang kembali	Terkait masalah pendataan setiap tahun sebelum dilaksanakannya pembinaan Bagian Kesra Setda selalu melaksanakan verifikasi data, yang melibatkankasi Kesos Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah, Kasi pelayanan (Lebe). Namun karena terbatasnya anggaran yang ada maka usulan desa tidak dapat terakomodir seluruhnya Sedangkan atasketerlambatan pelaksanaan pembinaan guru ngaji dll disebabkan karena adanya aturan yang melarang terjadinya kerumunan massa yang dikhawatirkan akan timbul penyebaran Covid-19, di samping itu ada juga kebijakan refocusing pada tahun anggaran 2020 walaupun ketika adaperubahan APBD 2020 anggaran gurungajidll dikembalikan lagi sehingga pelaksanaan guru ngaji dll setelah ditetapkannya APBD perubahan 2020	Pendataan guru ngaji, imam masjid dan mushola pelaksanaan pembinaan guru ngaji dll
11	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	Pengadaan lelang agar lebih cepat supaya kegiatan bisa berjalan tepat waktu	1. Peningkatan Kapasitas server LPSE 2. Jika implemetasi seluruh pengadaan langsung dilakukan secara eletronik diharapkan adanya pelatihan dn bimbingan teknis bagi penyedia jasa 3. Unit Kinerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ) dapat menyajikan dan melaksanakan anggaran penghematan dari seluruh proses pemilihan, tendr da pengadaan langsgng elektroik (e-PL)	Peningkatan percepatan kegiatan pelelangan.

Sumber Data : Kabupaten Brebes.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Brebes mendapatkan Tugas Pembantuan yang merupakan Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) atas beban APBN dan dipergunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik.

Tujuan Tugas Pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang didanai dari APBN dan program dan kegiatan yang didanai dari APBD dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintah daerah di dalam mencapai visi misinya.

Dasar Hukum yang melandasi pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan, sebagai berikut :

- a. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom.
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- g. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

A. Identitas Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diterima Dari Pemerintah Tingkat Di Atasnya

Pada tahun 2021 Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Brebes pada hanya 1 (satu) kegiatan yaitu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan tahun 2021 adalah Dinas Perikanan.

Program Pengelolaan Ruang Laut dengan kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan. Hasil atau keluaran dari kegiatan tersebut yaitu luas lahan garam yang difasilitasi seluas 30 hektar. Kegiatan berupa pemberian bantuan sarana prasaran usaha garam rakyat, antara lain integrasi lahan tambak garam seluas 15 hektar di Desa Karangdempel Kecamatan Losari, dan 15 hektar di Desa Krakahan Kecamatan Tanjung, serta pembangunan jalan produksi, pengadaan geomembran, pengadaan mesin pompa, dan paralon. Bantuan sarana dan prasarana PUGAR tersebut disampaikan melalui Koperasi PUGAR Sinar Mulia Desa Karangdempel Kecamatan Losari dan Koperasi PUGAR Mutiara Fajar Harapan Desa Krakahan Kecamatan Tanjung. Diharapkan dengan adanya integrasi lahan dan bantuan sarana prasarana dapat lebih meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat. Selain itu juga terdapat kegiatan pembangunan Gudang Garam Rakyat di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes.

Kinerja yang diharapkan dari kegiatan ini diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petambak garam, meningkatkan produksi dan usaha garam rakyat, meningkatkan kualitas garam rakyat, serta meningkatkan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi

Kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2021 bersumber APBN dengan total anggaran sebesar Rp. 2.208.368.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.151.109.857,- atau sebesar 97,41% dan realisasi fisik 100%.



- B. Identitas Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan dari Pemerintah Tingkat di bawahnya.

Tidak ada pelaksanaan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diberikan kepada Kecamatan, Kelurahan maupun Desa pada Tahun Anggaran 2021.

4.2 Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Bahwa dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut, tidak terdapat permasalahan yang signifikan. Kegiatan dari tugas pembantuan berjalan dengan baik.



BAB V

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kami telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Brebes yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Keluaran (*output*) dari penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2021 berupa hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta pelayanan umum dalam arti luas, menjadi wujud pelaksanaan tugas dari segenap aparatur Pemerintah Daerah.

Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 tersebut patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat melalui pendayagunaan sumber daya yang relatif terbatas.

Keberhasilan yang dicapai Kabupaten Brebes dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan merupakan hasil kerja sama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah), Legislatif (DPRD), dan dukungan masyarakat Brebes. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan hasil upaya optimal yang mampu diekspresikan oleh seluruh jajaran eksekutif selaku penyelenggara pemerintahan, sehingga semua itu sekaligus dapat mencerminkan tingkat kinerja yang diharapkan.



Sebagai bagian akhir penyampaian laporan ini, perkenankan Kami menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua *stakeholder* , khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Brebes yang selama ini telah menjalin hubungan yang harmonis dan memberikan dorongan dan juga kritik yang konstruktif kepada eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, dan juga kepada semua komponen masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas partisipasi, inovasi, dukungan, masukan dan saran yang telah diberikan dalam turut serta membangun dan mewujudkan menuju Kabupaten Brebes yang unggul, sejahtera dan berkeadilan.

Akhirnya saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Brebes yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan lindungan-Nya kepada kita semua. Aamin.

LAMPIRAN I : PENGHARAGAAN YANG DIRAIH DI TAHUN 2021

Penghargaan yang diraih pada tingkat provinsi ataupun tingkat nasional di tahun 2021, antara lain :

1. BIDANG PENDIDIKAN

A. Bidang PNFI :

1. Program Dewasa Tidak Sekolah (DTS) dengan sasaran usia 21 keatas, dengan tujuan penuntasan buta aksara dan peningkatan IPM.
2. DTS Inklusi dengan sasaran warga belajar yang berkebutuhan khusus agar mereka tetap mendapatkan pendidikan tanpa perbedaan, sebagai pilot project desa Cenang, kecamatan Songgom.
3. Menjadikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri sebagai rujukan pendidikan nonformal di Kabupaten Brebes, dengan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pendidikan kesetaraan dan life skill.

B. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar :

1. Aufa Farhani Kusdiana Putri kelas 9 SMP Albahri School Bantarkawung, Juara Tartil Putri Lomba Mata Pelajaran dan Seni Islami (Maps) SMP Tingkat Propinsi Jateng Tahun 2021.
2. Juara 3 KSN IPA Tahap 2 Tingkat Propinsi Jawa Tengah atas nama Iffatul Inayah dari SMP Taalamul Huda Bumiayu.
3. Aliuuh Ar Rahmah memperoleh medali perunggu dalam Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (KOPSI) tingkat Nasional, mewakili Kab. Brebes dan Jawa Tengah.
4. Pada Tahun 2021 Program Gerakan Kembali Bersekolah (GKB) jalur formal, telah mengembalikan Anak Putus Sekolah sejumlah :
 - SD/MI : 233 siswa/siswi
 - SMP/MTs : 458 siswa/siswi
 - SMK/SMK/MA : 376 siswa/siswi
 - Total : 1.057 siswa/siswi
5. Program GKB diupayakan dapat mendorong peningkatan IPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Brebes melalui angka rata-rata lama sekolah.

C. Bidang PTK :

1. Finalis Apresiasi Kategori Guru SD Inspiratif tingkat Nasional : Nurohim, S,Pd (SDN Kaliwlingi 02).
2. Finalis Apresiasi KAtegori Pengawas Inspiratif tingkat Nasional : Dr. Salimudin, M.Pd

2. BIDANG KESEHATAN

- a. Penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada 38 puskesmas se-Kabupaten Brebes sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak menggunakan alat kesehatan bermerkuri Tahun 2021
- b. Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes (Puskesmas Bumiayu) dengan Inovasi PeDekaTe ABK (Peduli Deteksi dan Intervensi Dini Anak Berkebutuhan Khusus) sebagai TOP 10 (Kategori kabupaten dan Kota) Inovasi Pelayanan Publik Propinsi Jawa Tengah Tahun 2021

3. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

- a. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori Nindya
- b. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Utama

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DAN DESA

Penghargaan atas Upaya Terbaik dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Dana desa Tahun Anggaran 2021 tingkat Provinsi.

5. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Menjadi Peserta Program Prioritas Nasional Sertifikasi Laboratorium dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan hanya ada 3 Kabupaten yang mendapatkan Program ini, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bantaeng
- b. Memperoleh Akreditasi Nasional Sebagai Laboratorium Penguji dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor LP-1559-IDN tertanggal 6 Desember 2021 dan mendapatkan rekomendasi untuk menjadi Laboratorium Lingkungan Hidup dan sedang dalam proses menunggu surat pengesahan Registrasi dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia yang segera turun di tahun 2022

6. BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA

- a. Inovasi Kelas Keberbakatan/Khusus Olahraga disatukan pendidikan SMP sebagai tindak lanjut grand design olahraga nasional.
- b. Meningkatkan Prestasi Olahraga Pelajar melalui even Popda Propinsi.
- c. Terwujudnya Perda Pembangunan Kepemudaan sebagai langkah awal mewujudkan Brebes Kabupaten Layak Pemuda.
- d. Terbentuknya induk Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) yang mewadahi Olahraga Tradisional, Petualangan, Kebugaran Masyarakat, agar terwujud masyarakat Brebes Sehat Bugar dan tetap melestarikan budaya Keolahragaan Tradisional.
- e. Seleksi Pemuda Pelopor dan Organisasi Kepemudaan Berprestasi agar membangkitkan semangat pemuda menjadi kepeloporan di semua sector agar bias membantu pembangunan di Brebes.
- f. Terjalinnya stakeholder kepemudaan yang saling support untuk meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan, seperti DPD KNPI Kab. Brebes, Program Pengembangan Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PPKP) Pemuda Pelopor.
- g. Jejaring Kepemudaan tersebut akan menciptakan kegiatan dan program kepemudaan yang lebih tepat sasaran, adaptif dan sustainable.

7. BIDANG KEBUDAYAAN DAN BIDANG PARIWISATA

- a. Juara pada kegiatan Semarang Night Carnival tingkat Provinsi Jawa Tengah oleh Sanggar Seni Elok Elvita Bumiayu pimpinan Elok Ashanti yang menyabet kategori Juara 1 seni defile Mandalika, Juara 2 seni defile Mandalika, Juara 2 seni defile Batak Toba dan Juara 3 seni defile Komodo pada 17 November 2021
- b. Juara 2 Tingkat Nasional Lomba Tari Kreasi Nusantara yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada bulan April 2021 dan Juara 3 Tingkat Nasional yang diselenggarakan FKIP Universitas Sriwijaya Palembang pada bulan Oktober 2021 yang disabet Sanggar Binendrang desa Jipang Kecamatan Bantarkawung.

- c. penancangan program Desa Berdikari pada Kampung Adat Jalawastu dan Desa Ciseureuh oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI
- d. Penetapan Telor Asin sebagai Warisan Budaya Tak Benda usulan tahun 2020 yang ditetapkan 2021 oleh Kemendikbud dan Ristek.
- e. Brand promotion tentang budaya Brebes melalui Indonesia Teve One (Upacara Ngasa dan Burok) serta Jejak Petualang Trans7 tahun 2021.
- f. Rangkaian kajian dan ekskavasi situs Bumiayu Tonjong bersama Balai Arkeologi DI Yogyakarta dan Sangiran serta pendokumentasian oleh National Geography Channel tahun 2022.
- g. Pembangunan Museum Purbakala di Galuh Timur senilai Rp 752.405.600, -
- h. Penyelenggaraan platform Indonesiana Tata Kelola Event Seni kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek pada bulan Oktober 2021.

8. BIDANG PERPUSTAKAAN

- a. Perpustakaan Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog sebagai Perpustakaan Terbaik Nasional Implementasi Program Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021
- b. Perpustakaan Desa Buara Kecamatan Ketanggungan sebagai Pemenang Lomba Foto Perpustakaan Nasional Tahun 2021
- c. Perpustakaan Desa Pepedan Kecamatan Tonjong Sebagai Pemenang Lomba Cerita Dampak Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Perpustakaan Nasional Tahun 2021
- d. Perpustakaan Desa Jatibarang Lor Sebagai Juara Harapan 1 Lomba Perpustakaan Desa Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

9. BIDANG PERTANIAN

- a. Penghargaan Tingkat Provinsi Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor 438/KPTS/KP.590/M/B/2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP)Berprestasi di Bidang Pertanian tahun 2021

- b. Penghargaan dan apresiasi kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas atas sinergi dalam Pengawasan Produk Perlindungan Tanaman Palsu dan Illegal di kabupaten Brebes dari CROPLIFE Indonesia.
- c. Penghargaan Tingkat Nasional Sertifikat penghargaan dari Menteri Pertanian kepada Kabupaten Brebes melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Brebes yaitu Penghargaan Abdi Bakti Tani kategori Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Peringkat II Tingkat Nasional.
- d. Juara 1 Lomba Itik Tingkat Propinsi Kelompok Tani Ternak (KTT) Berhias Keluarahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
- e. Juara 3 Lomba Sistem Informasi Masyarakat Peternakan (SIMASTER)

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN (ADMINISTRASI PEMERINTAHAN)

- a. Peningkatan peringkat untuk penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM tingkat nasional
- b. Peningkatan peringkat tingkat provinsi dalam penilaian jaringan data dan informasi hukum/JDIH
- c. Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat Provinsi Jawa Tengah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab.Brebes menempati peringkat 5 (lima) dari 36 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah
- d. Indek tata kelola Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, peringkat 3 (tiga) di Provinsi Jawa Tengah
- e. Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingkat Nasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Brebes menempati 35 (tiga puluh lima)

FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (BIDANG KEUANGAN)

- a. Kanwil Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah terkait upaya **TERBAIK** dalam peningkatan pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021
- b. Penghargaan dari Bank Indonesia perwakilan propinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Brebes sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi ETP Terbaik

**LAPORAN PENANGANAN COVID-19 DI TAHUN 2021 DI WILAYAH
KABUPATEN BREBES**

A. DINAS KESEHATAN**1. Anggaran terkait Penanganan Covid 19**

No	Uraian	Anggaran			Realisasi			(%)
		Sumber Pendanaan			Sumber Pendanaan			
		DAU	DBH	PU APBD	DAU	DBH	PU APBD	
1	Dukungan pendanaan belanja kesehatan dan belanja prioritas lainnya	-	-	57.886.938.316	-	-	57.177.590.392	98,77%
TOTAL		-	-	57.886.938.316	-	-	57.177.590.392	98,77%

2. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan

Pelaksanaan 3T yaitu Testing, tracking dan Treatment di kabupaten Brebes

- a) Testing dalam penanganan covid 19 untuk warga melalui testing baik melalui rapid test swabb ataupun melalui swabb RT-PCR dengan sasaran suspek dan kontak erat dilaksanakan oleh puskesmas, Klinik, RS pemerintah dan RS Swasta
- b) Tracking Pelacakan kontak erat dan kontak dekat pasien RS /warga terkonfirmasi positif. Bagi warga yang terkonfirmasi positif dan tidak bergejala dilakukan isolasi mandiri dengan ketat dengan pemantauan oleh tenaga kesehatan
- c) Treatemnt: Pemantauan selama 14 hari terhadap pasien/warga terkonfirmasi positif, serta pemantauan terhadap kontak erat dan kontak dekat. Pemantauan dan pemeriksaan kesehatan bagi warga yang isolasi mandiri serta pemberian vitamin secukupnya Melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat umum maupun di lingkungan pendidikan Malaksanakan vaksinasi covid 19 kepada masyarakat di Kabupaten Brebes secara bertahap sesuai prioritas. Untuk mendapatkan kekebalan individu dan kelompok.

3. Koordinasi antar instansi

Koordinasi melalui program joko tonggo dan microzonasi Penerapan PPKM Pelaksanaan vaksinasi covid 19 sinergi dengan lintas sektor, POLRI, TNI, Pemerintah Daerah Kecamatan, Pemerintah Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), organisasi masyarakat serta kader kesehatan dan lainnya

4. Data bantuan sosial dari berbagai sumber

Tidak ada bantuan sosial di Dinas Kesehatan

No	Uraian		Jenis Akun	Anggaran			Realisasi					Realisasi Output		
				Sumber Pendanaan			Jumlah	Sumber Pendanaan			Jumlah	%	Volum	Satuan
				DAU	DBH	PU APBD		DAU	DBH	PU APBD				
1	Penanganan Covid-19		Belanja Barang dan Jasa (5.1.02) dan Belanja Modal (5.2.3)		--	21.104.724.841	21.104.724.841	-	-	20.882.439.995	20.882.439.995	8,95%	100	%
2	Dukungan vaksinasi:													
	a	Dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	347.635.825	347.635.825	-	-	347.635.775	347.635.775	99,99%	100	%
	b	pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	336.163.826	336.163.826	-	-	336.163.776	336.163.776	99,99%	100	%
	c	distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	336.163.824	336.163.824	-	-	336.163.774	336.163.774	99,99%	100	%
	d	insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
	e	insentif vaksinator untuk petugas puskesmas	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	2.736.000.000	2.736.000.000	-	-	2.736.000.000	2.736.000.000	100%	100	%
	f	monitoring SDM yang melaksanakan vaksinasi	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	26.250.000	26.250.000	-	-	26.250.000	26.250.000	100%	100	%
3	Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
4	Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19													
	a	dokter spesialis	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	1.530.000.000	1.530.000.000	-	-	1.530.000.000	1.530.000.000	100%	100	%

No	Uraian		Jenis Akun	Anggaran				Realisasi					Realisasi Output	
				Sumber Pendanaan			Jumlah	Sumber Pendanaan			Jumlah	%	Volum e	Sa tu an
				DAU	DBH	PU APBD		DAU	DBH	PU APBD				
	b	dokter umum & dokter gigi	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	1.760.000.000	1.760.000.000	-	-	1.760.000.000	1.760.000.000	100%	100	%
	c	bidan & perawat	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)	-	-	10.800.000.000	10.800.000.000	-	-	10.800.000.000	10.800.000.000	100%	100	%
	d	tenaga kesehatan lainnya	Belanja Barang dan Jasa (5.1.02)		-	18.910.000.000	18.910.000.000	-	-	18.422.937.072	18.422.937.072	97,42%	100	%
5	Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat			-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%		
JUMLAH DUKUNGAN PENDANAAN BELANJA KESEHATAN DAN BELANJA PRIORITAS LAINNYA				-	-	57.886.938.316	57.886.938.316	-	-	57.177.590.392	57.177.590.392	98,77%	100	%

B. RSUD BREBES TAHUN 2021.

1. ANGGARAN PENANGANAN COVID-19

a. Bidang medis

Biaya Pengadaan terapi Plasma convalesen Anggaran : Rp. 70.000.000,
Pemakaian untuk 8 orang terkonfirmasi sebanyak 16 kolf Sumber Anggaran :
BLUD RSUD Brebes

b. Bidang Penunjang

Penunjang Medis

No	Kegiatan/barang	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1.	Pengadaan Alat Kedokteran	BLUD	1.584.612.312
2	Pengadaan BPH	BLUD	6.803.730.740
3	Pengadaan Obat	BLUD	1.905.768.078
4	Hibah Dinas	BLUD	827.169.370
5	Pemeliharaan dan Sparepart	BLUD	1.940.056.752
	Total	BLUD	13.061.337.252

Penunjang non medis

No	Kegiatan/Barang	Sumber Anggaran	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Instalasi Kamar Jenazah	BLUD	
	Belanja Barang Pakai Habis Kamar Jenazah	BLUD	399.419.400
	Belanja Jasa Penguburan Mayat dikenal dan tak dikenal	BLUD	202.800.000
	Belanja Jasa Pemulasaraan dan Perawatan Jenazah	BLUD	202.800.000
2.	Anggaran penggunaan mobil Ambulance untuk penguburan Jenazah covid-19	BLUD	138.435.850
3.	Anggaran Instalasi Gizi		
	Belanja penambah daya tahan tubuh (Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Gizi)	BLUD	414.171.600
	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (Belanja Makan Minum Pasien)	BLUD	714.333.100
	Total		2.071.959.950,00

c. Bagian Umum

NO	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN	NILAI (RP)
1.	Belanja Modal Alat Pendingin - Belanja Pekerjaan Tata Udara Ruang Negatif	BLUD	263.200.000
2.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - Pemeliharaan Gedung Rawat Inap (Anteroom Ruang Flamboyan)	BLUD	29.850.000
3.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja — Bangunan Kesehatan - Pemeliharaan Gedung Rawat Inap (Anteroom Ruang Sakura)	BLUD	32.560.000

NO	PEKERJAAN	SUMBER ANGGARAN	NILAI (RP)
4.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan - Pemeliharaan Gedung Penunjang (Nurse Station Picu)	BLUD	59.268.000
5.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Instalasi - Pemeliharaan Gedung Instalasi Gawat Darurat	BLUD	146.448.000
6.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Kesehatan (Anteroom R. Melati & R. Teratai)	BLUD	57.410.000
7.	Belanja Modal Alat Pendingin - Pekerjaan Tata Udara Ruang Negatif (Ruang Dahlia)	BLUD	499.950.000
	Total		1.088.686.000

d. Bagian Keuangan :

Total Honorarium Tenaga Sukarelawan Covid-19 : Rp. 193.500.000

Sumber Anggaran : BLUD

2. UPAYA-UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN

a. Rekrutmen Tenaga relawan covid-19, terdiri dari :

- Perawat : 6 Orang
- Bidan : 2 Orang
- Penata Radiologi : 1 Orang
- Tenaga administrasi : 5 Orang
- Tenaga Pemulasaran Jenazah : 3 Orang
- Pramusaji : 2 Orang
- Tenaga POS : 2 Orang

Total : 21 Orang

b. Penambahan Ruang Isolasi covid-19

- Penambahan kapasitas Ruang Observasi Covid di IGD

- Penambahan Kapasitas Ruang ICU covid-19
 - Penambahan kapasitas Ruang rawat inap Covid-19
 - Pembuatan Ruang anteroom di setiap ruang perawatan Covid-19
 - Menjadikan beberapa ruang Isolasi covid-19 menjadi ruangan bertekanan Negatif.
- a. Meningkatkan Derajat Kesehatan dan Imunitas Tenaga kesehatan di Area RSUD Brebes
- Pemeriksaan Swab berkala Karyawan karyawan
 - Vaksinasi menyeluruh terhadap Nakes RSUD Brebes
 - Pemberian Multivitamin Dosis tinggi terhadap Nakes
 - Melakukan Perawatan terhadap Nakes yang Terkonfirmasi Covid-19

3. KOORDINASI ANTAR INSTANSI

- Setiap kasus Terkonfirmasi dilaporkan Dinas Kesehatan kab. Brebes.
- Dalam situasi tertentu RSUD Brebes juga berkoordinasi dengan POLRES Brebes
- Laporan online pasien Covid melalui SIRS Online dan Corona Jateng dilakukan secara Realtime.

4. DATA BANTUAN SOSIAL DARI BERBAGAI SUMBER

a. Alat Kesehatan.

Tgl	No	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Jumlah
31/03/21	1	BNPB Pusat	Mesin HFNC BMC H - 08 A	2 unit
			Ventilator	3 unit
			Pulse Oxymeter	29 buah
26/10/2021	2	KEMENKES. RI	OXYGEN CONCENTRATOR DO2-5AH-OC-5LPM	19 unit
			OXYGEN CONCENTRATOR CANTA -OC-V5-WN-NS- 10LPM	10 unit

Tgl	No	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Jumlah
12/08/2021	3	PBNU KAB.BREBES	OXYGEN CONCENTRATOR LONGFIAN /JAY-10	1 unit
			ICROMA II Boditech	1 unit
08/09/2021	4	YAYASAN BENIH BAIK	Tabung Oksigen	7 buah
27/10/2021	5	DINKES PROV.JATENG	Mesin HFNC	2 unit
			Ventilator Philips Respionic (Trilogi Evo 300)	2 unit

b. BPH (Bahan Pakai Habis)

Tgl	No	Pemberi	Jenis Hibah	Jumlah
27/01/2021	1	BISNET	Respirator Mask N.95 Ear loop (5Play)	2 dus
			Surgical Mask ear loop 3 play	2 dus
10/02/2021	2	Brebes Merangi Corona	Masker Medis	4 box
			Sarung Tangan Medis	1 box
20/05/2021	3	WECare.id+C O HOPE	Masker Surgical	40 box
			Coverall	50 pcs
			Masker N.95	14 box
			Face Shiled	55 pcs
28/06/2021	4	BISNET	Masker N95	40 box
			Masker Bedah	50 box

Tgl	No	Pemberi	Jenis Hibah	Jumlah
30/06/2021	5	Sekda Daerah Kab.Brebes Ketua Forum CSR Kab.Brebes	Masker Bedah	1 dus
19/07/2021	6	PT PLN (persero) UP3 Tegal	Oxygen Cair	2 ton
25/06/2022	7	Dinas Kesehatan Kab. Brebes	Peti Jenazah	12 peti

c. Makanan dan suplemen

Tgl	No	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Jumlah
10/02/2021	1	Brebes Merangi Corona	Vitamin	2 Kotak
			Susu kotak	3 dus
22/02/2021	2	PT. Novell Pharm. Labs.	Suplemen Makanan C2 Fit	5 streep
03/03/2021	3	PT. Amugrah Argon Medica	Jubi-R (jubi001)	20 box
14/04/2021	4	Kimia Farma	Enkasari Mothwash	20 botol
14/04/2021	5	Kimia Farma	Seplemen makanan/ Food	240 box
07/07/2021	6	PPNI DPW Prov.Jateng	Susu Mil Cimory	3 dus
			Suplemen Makanan	10 box
21/09/2021	7	PT Charoen	PT Charoen Pokphand	189 pcs
23/09/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs
30/09/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs
07/10/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs
14/10/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs
21/10/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs

Tgl	No	Pemberi Hibah	Jenis Hibah	Jumlah
28/10/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs
04/11/2021		PT Charoen	PT Charoen Pokphand	192 pcs

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU

REKAPITULASI PASIEN PDP, COVID RSUD BUMIAYU
TAHUN 2021

NO	BULAN				KETERANGAN					JML PSN
		COVID			SEMBUH	ISOLASI MANDIRI	MENINGGAL COVID	MENINGGAL PROBABLE	RUJUK	
		L	P	JML						
1	JANUARI	20	19	39	6	25	4	1	3	39
2	FEBRUARI	10	22	32	1	25	6	0	0	32
3	MARET	7	9	16	1	14	0	1	0	16
4	APRIL	14	10	24	1	18	3	1	1	24
5	MEI	7	11	18	1	16	1	0	0	18
6	JUNI	22	29	51	0	46	4	0	1	51
7	JULI	22	30	52	3	36	12	0	1	52
8	AGUSTUS	11	6	17	10	4	2	1	0	17
9	SEPTEMBER	1	1	2	1	0	1	0	0	2
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		114	137	251	24	184	33	4	6	251
					251					

Daftar Barang Milik Daerah/ Aset Tetap Penunjang Penanganan Covid-19 RSUD Bumiayu

No	Nama & Spesifikasi Barang	Merk	Satuan	Jumlah Barang	Harga Satuan(Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
1	Pasien Monitor	Nihon Kohden	Unit	6	Rp 108,000,000	Rp 648,000,000	DAK
2	Ventilator	Nihon Kohden	Unit	1	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	DBHCT
3	Nasal Canula	Poli Medical	Unit	2	Rp 54,049,000	Rp 108,098,000	DBHCT
4	Nasal Canula	Poli Medical	Unit	1	Rp 54,049,699	Rp 54,049,699	DBHCT
5	Hepa Filter	Invinite	Unit	10	Rp 75,586,100	Rp 755,861,000	DBHCT
6	Syring Pump	Mindray	Unit	9	Rp 17,000,000	Rp 153,000,000	DAK
7	Infus Pump	Mindray	Unit	6	Rp 17,643,000	Rp 105,858,000	DAK
8	Infus Pump	Mindray	Unit	1	Rp 17,642,000	Rp 17,642,000	DAK
9	Mobil Ambulance	HIS	Unit	1	Rp 922,900,000	Rp 922,900,000	DAK
10	Mobil Ambulance	HIS	Unit	1	Rp 1,477,300,000	Rp 1,477,300,000	DAK
11	Oxygen Concentrator	Blue Care	Unit	2	Rp 26,667,000	Rp 53,334,000	DBHCT
12	Oxygen Concentrator	Blue Care	Unit	1	Rp 26,666,000	Rp 26,666,000	DBHCT
13	Oxygen Concentrator	DevilBiss	Unit	5	Rp 16,433,822	Rp 82,169,110	Hibah KEMENKES
TOTAL						Rp 5,404,877,809	

LAPORAN PERSEDIAAN PERBEKES DINKES & PENGADAAN MANDIRI UNTUK SUSPECT COVID19 TAHUN 2021

NO	TANGGAL	NAMA PERSEDIAAN BHP/REAGENT	NO BATCH	SATUAN	HARGA	JUMLAH DITERIMA	JUMLAH NOMINAL	SUMBER DANA
1	22-03-2021	VTM (Virus Transport Media)	92085	Pcs	Rp 53,000	200	Rp 10,600,000	APBD I / APBD PROVINSI
		RDT Covid	6120014	Test	Rp 108,300	100	Rp 10,830,000	APBD I / APBD PROVINSI
		RDT Covid	2010265	Test	Rp 85,000	200	Rp 17,000,000	BTT / APBD II
2	27-03-2021	VTM (Virus Transport Media)	92085	Pcs	Rp 53,000	200	Rp 10,600,000	APBD I / APBD PROVINSI
		RDT Covid	INDECSWAB	Test	Rp 107,800	200	Rp 21,560,000	APBD I / APBD PROVINSI
3	23-04-2021	YHLO Gline-2019-nCov IgG/IgM	20201 103	Box @ 25 Test	Rp 1,320,000	15	Rp 19,800,000	BLUD RSUD Bumiayu
4	23-06-2021	RDT Covid	M20007/08 INDEC	Test	Rp 107,800	100	Rp 10,780,000	APBD I / APBD PROVINSI
		VTM (Virus Transport Media)	CITOSWABIAN	Pcs	Rp 53,000	200	Rp 10,600,000	APBD I / APBD PROVINSI
5	9/9/2021	RDT Covid	2107037	Test	Rp 97,450	200	Rp 19,490,000	APBD I / APBD PROVINSI
6	27-09-2021	YHLO Gline-2019-nCov IgG/IgM	20210303	Box @ 25 Test	Rp 875,000	12	Rp 10,500,000	BLUD RSUD Bumiayu
7	26-10-2021	YHLO Gline-2019-nCov IgG/IgM	20210401	Box @ 25 Test	Rp 1,022,727	11	Rp 11,249,997	BLUD RSUD Bumiayu
		YHLO Gline-2019-nCov IgG/IgM	20210401	Box @ 25 Test	Rp 1,022,730	1	Rp 1,022,730	BLUD RSUD Bumiayu
8	2/11/2021	VTM (Virus Transport Media)	R1201122	Pcs	Rp 35,000	400	Rp 14,000,000	APBD I / APBD PROVINSI
		VTM (Virus Transport Media)	VTM100	Pcs	Rp	100	Rp	APBD I / APBD

Gamaraas	30	Rp	3,380,000	0	Rp	101,400,000	Rp	101,400,000
Intake Nursing Cap	10	Rp	50,000	0	Rp	500,000	Rp	550,000
Intake Disposable Shoes Cover	10	Rp	90,000	0	Rp	900,000	Rp	990,000
Masker N95 Onemed	100	Rp	16,000	0	Rp	1,600,000	Rp	1,760,000
Masker N95 1860 3M	100	Rp	18,000	0	Rp	1,800,000	Rp	1,980,000
Glove Supreme M free powder shamrock	100	Rp	155,000	0	Rp	15,500,000	Rp	17,050,000
Covifor 100mg	50	Rp	425,000	0	Rp	21,250,000	Rp	23,375,000
Desrem serbuk injeksi 100mg	10	Rp	400,000	0	Rp	4,000,000	Rp	4,400,000
Nurse cap safelock	10	Rp	40,000	0	Rp	400,000	Rp	440,000
Shoe cover ecogreen	10	Rp	60,000	0	Rp	600,000	Rp	660,000
Tro-senosurge sterile glove 7.0	300	Rp	11,990	Ada	Rp	3,597,000	Rp	1,978,500
Favipiravir 200 mg	5	Rp	1,500,000	0	Rp	7,500,000	Rp	8,250,000
Spmed Apron Plastic	5	Rp	250,000	0	Rp	1,250,000	Rp	1,375,000
Pumamed Apron 3D micron	400	Rp	3,000	0	Rp	1,200,000	Rp	1,320,000
Oseltamivir Phos kaps 75 mg	10	Rp	1,300,000	0	Rp	13,000,000	Rp	14,300,000
Favipiravir 200 mg	20	Rp	1,500,000	0	Rp	30,000,000	Rp	33,000,000
Covifor 100mg	12	Rp	1,000,000	0	Rp	12,000,000	Rp	13,200,000
Sarung Tangan NS L dan M Remedi	110	Rp	125,000	0	Rp	13,750,000	Rp	15,125,000
Eco green nursing cup	10	Rp	65,000	0	Rp	650,000	Rp	715,000
Eco green disposable shoes cover	10	Rp	55,000	0	Rp	550,000	Rp	605,000
Spmed Apron Plastic Long slave	5	Rp	140,000	0	Rp	700,000	Rp	770,000
Covifor 100mg	12	Rp	1,000,000	0	Rp	12,000,000	Rp	13,200,000
Oseltamivir Phos kaps 75 mg	10	Rp	1,300,000	0	Rp	13,000,000	Rp	14,300,000
Tro-senosurge sterile glove 7.0 dan 7.5	1500	Rp	11,990	Ada	Rp	17,985,000	Rp	9,892,500
Favipiravir 200 mg	2	Rp	1,800,000	0	Rp	3,600,000	Rp	3,960,000
Favipiravir 200 mg	1	Rp	1,800,000	0	Rp	1,800,000	Rp	1,980,000
Covifor 100mg	30	Rp	750,000	0	Rp	22,500,000	Rp	24,750,000
Covifor 100mg	30	Rp	750,000	0	Rp	22,500,000	Rp	24,750,000
Covifor 100mg	30	Rp	750,000	0	Rp	22,500,000	Rp	24,750,000
Oseltamivir Phos kaps 75 mg	2	Rp	1,300,000	0	Rp	2,600,000	Rp	2,860,000
Covifor 100mg	30	Rp	750,000	0	Rp	22,500,000	Rp	24,750,000

VAKSIN DAN BHP KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 RSUD BUMILAYU TAHUN 2021

ALAT DAN BHP	JUMLAH	HARGA	TOTAL
Alkohol swab	780	Rp 88	Rp 68,640
Safety box	3	Rp 13,600	Rp 40,800
Vaksin covid 19 Moderna	45	Rp 1,339,441	Rp 60,274,845
ADS 0,5 ml	780	Rp 1,190	Rp 928,200
Vaksin covid 19	50	Rp 1,339,440	Rp 66,972,000
Safety box 5LT	5	Rp 5,599	Rp 27,995
ADS 0,5 ml	350	Rp 1,185	Rp 414,750
Alkohol Swab	350	Rp 79	Rp 27,650
Safety box 5 LT	13	Rp 14,000	Rp 182,000
ADS 0,5 ml	1164	Rp 1,050	Rp 1,222,200
Alkohol swab	400	Rp 97	Rp 38,800
Vaksin covid 19 sinovac (2 dosis)	200	Rp 1,339,441	Rp 267,888,200
Alkohol swab	310	Rp 95	Rp 29,450
vaksin covid 19 vial	70	Rp 1,473,384	Rp 103,136,880
Alkohol swab	384	Rp 127	Rp 48,768
Total			Rp 501,301,178

D. BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

Upaya yang dilaksanakan oleh BPBD dalam penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021, antara lain :

1. Penyemprotan Desinfektan
 - a. Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 s/d Juli 2021
 - b. Lokasi penyemprotan 17 Kec. Di Kab. Brebes Meliputi :
 - OPD/Kantor Kecamatan/Kantor Kelurahan dan Desa
 - Sekolah/Madrasah
 - Pemukiman Warga Terkonfirmasi Covid-19
 - Fasilitas Umum (Pasar-pasar, Masjid/Mushola)
 - c. Tujuan Kegiatan :
 - Memutus Rantai Penyebaran Covid-19
2. Pemakaman Jenazah Covid – 19
 - a. Waktu Pelaksanaan : Januari 2021 s/d Oktober 2021
 - b. Lokasi Pemakaman : Wilayah Kab. Brebes Bagian Selatan (Bumiayu, Tonjong, Salem, Sirampog, Paguyangan, Bantarkawung)
 - c. Personil : BPBD Brebes dan Relawan
3. Pembagian Masker

Kegiatan tersebut dilaksanakan di area pasar dan fasilitas umum
4. PELATIHAN PEMULASARAN JENAZAH BAGI RELAWAN
 - a. Waktu Pelaksanaan : 7 juli 2021
 - b. Tempat : Kecamatan Bumiayu
 - c. Jumlah Peserta : 30 Orang
5. Sosialisasi dan monitoring PPKM di Wilayah Kabupaten Brebes

Realisasi Dan Pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021
OPD : BPBD Kabupaten Brebes

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	NOMOR/ TGL SP2D
----	--------	------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------

NO	LOKASI	PERUNTUKAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	NOMOR/ TGL SP2D
1	Kabupaten Brebes	Penyemprotan Desinfektan dan Pemakaman Jenazah Covid-19 serta Pembelian APD Covid-19	116.875.000	66.625.000	50.250.000	03.06/04.0/0000 12/LS/5.02.0.00. 0.00.2..0000/M/2 /2021 tanggal 15 Februari 2021
2	Kabupaten Brebes	Pengadaan beras bagi warga terdampak PPKM Darurat	200.000.000	170.000.000	30.000.000	03822/BTT/4.04. 02.00/2021 tanggal 30 Juli 2021
3	Kabupaten Brebes	Pengadaan Logistik Untuk Percepatan Vaksinasi Lansia Kabupaten Brebes	227.475.000	223.740.000	3.735.000	05964/BTT/4.04. 02.00/2021 tanggal 1 Oktober 2021
4	Kabupaten Brebes	Penanganan Percepatan Vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat di Kabupaten Brebes	200.000.000	193.534.000	6.466.000	10368/BTT/4.04. 02.00/2021 Tanggal 23 Desember 2021
JUMLAH			744.350.000	653.899.000	90.451.000	-

E. DINAS SOSIAL

Kegiatan perlindungan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam rangka untuk penanganan covid-19 di wilayah Kabupaten Brebes dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran		Realisasi		(%)
		Sumber Pendanaan		Sumber Pendanaan		
		DAU	DBH	DAU	DBH	
1	Perlindungan Sosial					
	Bantuan Sosial	4.408.301.500	-	4.055.301.000	-	91,99%
2	Dukungan Ekonomi	-	-	-	-	
TOTAL		4.408.301.500	-	4.055.301.000	-	91,99%

Kegiatan perlindungan sosial berupa pemberian bantuan sosial berupa :

1. Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat
2. Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah
3. Bantuan Sosial Untuk Eks Penyandang Penyakit Sosial terdapat permasalahan yaitu penerima manfaat meninggal dunia

4. Bantuan Sosial Untuk Lansia Terlantar terdapat permasalahan yaitu Penerima Manfaat Meninggal Dunia dan Pindah Tempat Tinggal
5. Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas, terdapat permasalahan yaitu beberapa tidak sesuai sasaran sebagai upaya pemecahan masalah yaitu dengan pendataan harus di assesmen ulang
6. Bantuan Sosial Untuk Orang Terlantar
7. Bantuan Sosial Santunan Anak Yatim Piatu diluar Panti
8. Bantuan Sosial Korban Bencana dan Penyerahan Relawan
9. Bantuan Sosial untuk eks Balai Besar Rehabilitasi Sosial "Wira Adhi Karya" Ungaran terdapat permasalahan yaitu kurangnya peminat sebagai solusi yaitu Melakukan Sosialisasi Ke 17 Kecamatan yang ada pada wilayah Kabupaten Brebes
10. Bantuan Sosial untuk Bantuan Transport Kelayan Keluar Daerah terdapat permasalahan yaitu administrasi kurang lengkap
11. Bantuan Sosial untuk Orang Tidak Mampu
12. Bantuan Sosial Santunan Kematian

Laporan Realisasi Dukungan Program Pemulihan Ekonomi Daerah

Dinas Sosial Kabupaten Brebes

Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
		Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Satuan
		DAU	DBH			DAU	DBH				
I	PERLINDUNGAN SOSIAL										
1	Bantuan sosial										
a	Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	145,000,000	0	145,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000	145,000,000	7	lembaga
b	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah	230,000,000	0	230,000,000	0	205,000,000	0	205,000,000	230,000,000	8	lembaga
c	Bantuan Sosial Untuk Eks Penyandang Penyakit Sosial	60,000,000	0	60,000,000	0	59,000,000	0	59,000,000	60,000,000	59	Orang

No.	Uraian	Anggaran				Realisasi				Realisasi Output	
		Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Sumber Pendanaan		Jumlah	%	Volume	Satuan
		DAU	DBH			DAU	DBH				
d	Bantuan Sosial Untuk Lansia Terlantar	60,000,000	0	60,000,000	0	53,000,000	0	53,000,000	60,000,000	53	Orang
e	Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas	150,000,000	0	150,000,000	0	128,000,000	0	128,000,000	150,000,000	128	Orang
f	Bantuan Sosial Untuk Orang Terlantar	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	0	10,100,000	10,100,000	38	Orang
g	Bantuan Sosial Santunan Anak Yatim Piatu diluar Panti	1,275,000,000	0	1,275,000,000	0	1,271,000,000	0	1,271,000,000	1,275,000,000	5,084	Anak
h	Bantuan Sosial Korban Bencana dan Penyerahan Relawan	38,201,500	0	38,201,500	0	38,201,000	0	38,201,000	38,201,500	2	organisasi
i	Bantuan Sosial untuk eks Balai Besar Rehabilitasi Sosial "Wira Adhi Karya" Ungaran	30,000,000	0	30,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	30,000,000	14	Anak
j	Bantuan Sosial untuk Bantuan Transport Kelayan Keluar Daerah	45,000,000	0	45,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	45,000,000	42	Orang
k	Bantuan Sosial untuk Orang Tidak Mampu	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000	17,000,000	17	orang
l	Bantuan Sosial Santunan Kematian	2,348,000,000	0	2,348,000,000	0	2,083,000,000	0	2,083,000,000	2,348,000,000	2083	Orang
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL	4,408,301,500	0	4,408,301,500	0	4,055,301,000	0	4,055,301,000	4,408,301,500		
			-								
II	DUKUNGAN EKONOMI			-							
	Pemberdayaan UMKM	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
	Subsidi pertanian	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
	Dst...	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
	Subtotal DUKUNGAN EKONOMI	-	-	-	-	-	-	-	0.00%		
			-								

F. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021, antara lain :

1. Pemberlakuan PPKM dan Pelaksanaan posko penanganan virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat desa
2. Penguatan Satgas Jogo Tonggo dan mengantisipasi meningkatnya jumlah zonasi RT merah dan RT orange pasca peringatan Hari Raya
3. Antisipast Lonjakan Kasus Covid-19 Paska Lebaran/Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 dan sesuai dengan hasil evaluasi penanganan Covid-19 Minggu ke-19 serta kebijakan pelaksanaan penladsan mudik Lebaran/Idul Fitri 1442 H/2021 di Jawa Tengah, bersama ini diminta perhatiannya untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 baska Ilburan Lebaran/Idul Fitri 1442 H/2021 sesuai dengan tugas dan fungsi serta wilayah masing-masing
4. ,Melakukan pelaporan Pelaksanaan Pembatasan Total (Lockdown) tingkat RT se Kabupaten Brebes
5. Percepatan pelaksanaan vaksin kepada warga masyarakat untuk capaian 50 % di Wilayah Brebes
6. Mengaktifkan optimalisasi fungsi Satgas Penanganan Covid-19 di Desa/Kelurahan
7. Memfasilitasi pelaksanaan pendataan jumlah pendatang/pemudik yang keluar masuk di Desa oleh satgas Jogo Tonggo di tingkat RW pada aplikasi Jogo Tonggo

No.	DESA	BLT (KPM)
1	ADISANA - 3329032001 KEC. BUMIAYU	225
2	BABAKAN - 3329122001 KEC. LOSARI	186
3	BANDUNGSARI - 3329172001 KEC. BANJARHARJO	160
4	BANGBAYANG - 3329022001 KEC. BANTARKAWUNG	150
5	BANGSRI - 3329142001 KEC. BULAKAMBA	385
6	BANJARAN - 3329012001 KEC. SALEM	90
7	BANJARANYAR - 3329092001 KEC. BREBES	180
8	BANJARATMA - 3329142002 KEC. BULAKAMBA	286
9	BANJARHARJO - 3329172003 KEC. BANJARHARJO	375
10	BANJARLOR - 3329172002 KEC. BANJARHARJO	163

No.	DESA	BLT (KPM)
11	BANJARSARI - 3329022002 KEC. BANTARKAWUNG	200
12	BANTARKAWUNG - 3329022003 KEC. BANTARKAWUNG	52
13	BANTARWARU - 3329022004 KEC. BANTARKAWUNG	110
14	BAROS - 3329162001 KEC. KETANGGUNGAN	477
15	BATURSARI - 3329052001 KEC. SIRAMPOG	166
16	BENDA - 3329052002 KEC. SIRAMPOG	155
17	BENTAR - 3329012002 KEC. SALEM	60
18	BENTARSARI - 3329012003 KEC. SALEM	69
19	BLANDONGAN - 3329172004 KEC. BANJARHARJO	111
20	BLUBUK - 3329122002 KEC. LOSARI	266
21	BOJONG - 3329072001 KEC. JATIBARANG	150
22	BOJONGSARI - 3329122003 KEC. LOSARI	300
23	BUARA - 3329162002 KEC. KETANGGUNGAN	588
24	BUARAN - 3329072002 KEC. JATIBARANG	198
25	BULAKAMBA - 3329142003 KEC. BULAKAMBA	295
26	BULAKELOR - 3329162003 KEC. KETANGGUNGAN	395
27	BULAKPAREN - 3329142004 KEC. BULAKAMBA	200
28	BULUSARI - 3329142005 KEC. BULAKAMBA	296
29	BUMIAYU - 3329032002 KEC. BUMIAYU	234
30	BUNIWAH - 3329052003 KEC. SIRAMPOG	200
31	CAPAR - 3329012004 KEC. SALEM	93
32	CENANG - 3329102001 KEC. SONGGOM	259
33	CIAMPEL - 3329112001 KEC. KERSANA	100
34	CIAWI - 3329172005 KEC. BANJARHARJO	200
35	CIBENDUNG - 3329172006 KEC. BANJARHARJO	150
36	CIBENTANG - 3329022005 KEC. BANTARKAWUNG	233
37	CIBUNIWANGI - 3329172007 KEC. BANJARHARJO	150
38	CIDUWET - 3329162004 KEC. KETANGGUNGAN	300
39	CIGADUNG - 3329172008 KEC. BANJARHARJO	250
40	CIGEDOG - 3329112002 KEC. KERSANA	210
41	CIHAUR - 3329172009 KEC. BANJARHARJO	200
42	CIKAKAK - 3329172010 KEC. BANJARHARJO	247
43	CIKANDANG - 3329112003 KEC. KERSANA	120
44	CIKEUSAL KIDUL - 3329162005 KEC. KETANGGUNGAN	327
45	CIKEUSAL LOR - 3329162006 KEC. KETANGGUNGAN	365
46	CIKUYA - 3329172011 KEC. BANJARHARJO	175
47	CILIBUR - 3329042001 KEC. PAGUYANGAN	174
48	CIMOHONG - 3329142006 KEC. BULAKAMBA	329
49	CIMUNDING - 3329172012 KEC. BANJARHARJO	175
50	CINANAS - 3329022006 KEC. BANTARKAWUNG	200
51	CIOMAS - 3329022007 KEC. BANTARKAWUNG	80
52	CIPAJANG - 3329172013 KEC. BANJARHARJO	150
53	CIPELEM - 3329142007 KEC. BULAKAMBA	410
54	CIPETUNG - 3329042002 KEC. PAGUYANGAN	62

No.	DESA	BLT (KPM)
55	CIPUTIH - 3329012005 KEC. SALEM	31
56	CISEUREUH - 3329162007 KEC. KETANGGUNGAN	385
57	CITIMBANG - 3329012006 KEC. SALEM	50
58	DAWUHAN - 3329052004 KEC. SIRAMPOG	170
59	DUKUHBADAG - 3329162008 KEC. KETANGGUNGAN	185
60	DUKUJERUK - 3329172014 KEC. BANJARHARJO	251
61	DUKUHLA - 3329142008 KEC. BULAKAMBA	390
62	DUKUHMAYA - 3329102002 KEC. SONGGOM	302
63	DUKUSALAM - 3329122004 KEC. LOSARI	291
64	DUKUHTENGAH - 3329162009 KEC. KETANGGUNGAN	361
65	DUKUHTURI - 3329032003 KEC. BUMIAYU	210
66	DUKUHTURI - 3329162020 KEC. KETANGGUNGAN	301
67	DUKUHWIRINGIN - 3329082002 KEC. WANASARI	180
68	DUMELING - 3329082003 KEC. WANASARI	300
69	GALUHTIMUR - 3329062001 KEC. TONJONG	300
70	GANDOANG - 3329012008 KEC. SALEM	30
71	GANGGAWANG - 3329012007 KEC. SALEM	117
72	GEGERKUNCI - 3329102008 KEC. SONGGOM	127
73	GLONGGONG - 3329082001 KEC. WANASARI	145
74	GRINTING - 3329142009 KEC. BULAKAMBA	383
75	GUNUNGGUNDA - 3329012009 KEC. SALEM	24
76	GUNUNGLARANG - 3329012010 KEC. SALEM	41
77	GUNUNGSUGIH - 3329012011 KEC. SALEM	27
78	GUNUNGTAJEM - 3329012012 KEC. SALEM	19
79	IGIRKLANCENG - 3329052005 KEC. SIRAMPOG	260
80	INDRAJAYA - 3329012013 KEC. SALEM	60
81	JAGALEMPENI - 3329082004 KEC. WANASARI	260
82	JAGAPURA - 3329112004 KEC. KERSANA	150
83	JANEGARA - 3329072003 KEC. JATIBARANG	185
84	JATIBARANG KIDUL - 3329072004 KEC. JATIBARANG	250
85	JATIBARANG LOR - 3329072005 KEC. JATIBARANG	120
86	JATIMAKMUR - 3329102009 KEC. SONGGOM	222
87	JATIROKEH - 3329102003 KEC. SONGGOM	265
88	JATISAWIT - 3329032004 KEC. BUMIAYU	80
89	JATISAWIT - 3329122005 KEC. LOSARI	315
90	JEMASIH - 3329162010 KEC. KETANGGUNGAN	349
91	JIPANG - 3329022008 KEC. BANTARKAWUNG	350
92	JUBANG - 3329142010 KEC. BULAKAMBA	135
93	KADUMANIS - 3329012014 KEC. SALEM	8
94	KALIALANG - 3329072006 KEC. JATIBARANG	173
95	KALIBUNTU - 3329122006 KEC. LOSARI	200
96	KALIERANG - 3329032005 KEC. BUMIAYU	138
97	KALIGANGSA KULON - 3329092004 KEC. BREBES	230
98	KALIGANGSA WETAN - 3329092005 KEC. BREBES	150

No.	DESA	BLT (KPM)
99	KALIGIRI - 3329052006 KEC. SIRAMPOG	154
100	KALIJURANG - 3329062002 KEC. TONJONG	306
101	KALILANGKAP - 3329032006 KEC. BUMIAYU	200
102	KALILOKA - 3329052007 KEC. SIRAMPOG	170
103	KALIMATI - 3329092006 KEC. BREBES	259
104	KALINUSU - 3329032007 KEC. BUMIAYU	315
105	KALIPUCANG - 3329072007 KEC. JATIBARANG	183
106	KALISUMUR - 3329032008 KEC. BUMIAYU	150
107	KALIWADAS - 3329032009 KEC. BUMIAYU	120
108	KALIWLINGI - 3329092007 KEC. BREBES	250
109	KAMAL - 3329152001 KEC. LARANGAN	131
110	KARANGBALE - 3329152002 KEC. LARANGAN	80
111	KARANGBANDUNG - 3329162011 KEC. KETANGGUNGAN	253
112	KARANGDEMPER - 3329122007 KEC. LOSARI	346
113	KARANGJONGKENG - 3329062003 KEC. TONJONG	120
114	KARANGJUNTI - 3329122008 KEC. LOSARI	349
115	KARANGLO - 3329072008 KEC. JATIBARANG	193
116	KARANGMAJA - 3329172015 KEC. BANJARHARJO	180
117	KARANGMALANG - 3329162019 KEC. KETANGGUNGAN	273
118	KARANGPARI - 3329022009 KEC. BANTARKAWUNG	100
119	KARANGREJA - 3329132001 KEC. TANJUNG	145
120	KARANGSAMBUNG - 3329122009 KEC. LOSARI	315
121	KARANGSARI - 3329142011 KEC. BULAKAMBA	100
122	KARANGSEMBUNG - 3329102004 KEC. SONGGOM	234
123	KEBANDUNGAN - 3329022010 KEC. BANTARKAWUNG	160
124	KEBOGADUNG - 3329072009 KEC. JATIBARANG	200
125	KEBOLEDAN - 3329082005 KEC. WANASARI	126
126	KEBONAGUNG - 3329072010 KEC. JATIBARANG	135
127	KECIPIR - 3329122010 KEC. LOSARI	359
128	KEDAWUNG - 3329132002 KEC. TANJUNG	151
129	KEDUNGBOKOR - 3329152003 KEC. LARANGAN	228
130	KEDUNGNENG - 3329122011 KEC. LOSARI	277
131	KEDUNGOLENG - 3329042003 KEC. PAGUYANGAN	210
132	KEDUNGTUKANG - 3329072011 KEC. JATIBARANG	194
133	KEDUNGUTER - 3329092008 KEC. BREBES	200
134	KEMIRIAMBA - 3329072012 KEC. JATIBARANG	131
135	KEMUKTEN - 3329112005 KEC. KERSANA	179
136	KEMURANG KULON - 3329132003 KEC. TANJUNG	366
137	KEMURANG WETAN - 3329132004 KEC. TANJUNG	300
138	KENDAWA - 3329072013 KEC. JATIBARANG	180
139	KERSANA - 3329112007 KEC. KERSANA	103
140	KERTABESUKI - 3329082006 KEC. WANASARI	340
141	KERTASARI - 3329172016 KEC. BANJARHARJO	194
142	KERTASINDUYASA - 3329072014 KEC. JATIBARANG	150

No.	DESA	BLT (KPM)
143	KETANGGUNGAN - 3329162012 KEC. KETANGGUNGAN	313
144	KLAMPIS - 3329072015 KEC. JATIBARANG	110
145	KLAMPOK - 3329082007 KEC. WANASARI	247
146	KLIKIRAN - 3329072016 KEC. JATIBARANG	200
147	KLUWUT - 3329142012 KEC. BULAKAMBA	350
148	KRADENAN - 3329112006 KEC. KERSANA	97
149	KRAKAHAN - 3329132005 KEC. TANJUNG	280
150	KRAMAT - 3329072017 KEC. JATIBARANG	199
151	KRAMATSAMPANG - 3329112008 KEC. KERSANA	155
152	KRASAK - 3329092009 KEC. BREBES	150
153	KRETEK - 3329042004 KEC. PAGUYANGAN	200
154	KUBANGJATI - 3329162013 KEC. KETANGGUNGAN	321
155	KUBANGJERO - 3329172017 KEC. BANJARHARJO	180
156	KUBANGPARI - 3329112009 KEC. KERSANA	100
157	KUBANGSARI - 3329162015 KEC. KETANGGUNGAN	425
158	KUBANGWUNGU - 3329162014 KEC. KETANGGUNGAN	408
159	KUPANGPUTAT - 3329132006 KEC. TANJUNG	100
160	KUPU - 3329082008 KEC. WANASARI	350
161	KUTAMENDALA - 3329062004 KEC. TONJONG	519
162	KUTAYU - 3329062005 KEC. TONJONG	181
163	LANGKAP - 3329032010 KEC. BUMIAYU	60
164	LARANGAN - 3329152004 KEC. LARANGAN	93
165	LAREN - 3329032011 KEC. BUMIAYU	132
166	LEGOK - 3329022011 KEC. BANTARKAWUNG	100
167	LEMAHABANG - 3329132008 KEC. TANJUNG	263
168	LEMBARAWA - 3329092010 KEC. BREBES	230
169	LENGKONG - 3329082009 KEC. WANASARI	115
170	LIMBANGAN - 3329112010 KEC. KERSANA	266
171	LIMBANGAN - 3329122012 KEC. LOSARI	341
172	LINGGAPURA - 3329062006 KEC. TONJONG	380
173	LOSARI KIDUL - 3329122013 KEC. LOSARI	200
174	LOSARI LOR - 3329122014 KEC. LOSARI	225
175	LUWUNGBATA - 3329132009 KEC. TANJUNG	345
176	LUWUNGGEDE - 3329132007 KEC. TANJUNG	313
177	LUWUNGGEDE - 3329152005 KEC. LARANGAN	147
178	LUWUNGRAGI - 3329142013 KEC. BULAKAMBA	399
179	MALAHAYU - 3329172018 KEC. BANJARHARJO	233
180	MANGGIS - 3329052008 KEC. SIRAMPOG	200
181	MENDALA - 3329052009 KEC. SIRAMPOG	219
182	MLAYANG - 3329052010 KEC. SIRAMPOG	200
183	MUNDU - 3329132010 KEC. TANJUNG	185
184	NEGARADAHA - 3329032012 KEC. BUMIAYU	98
185	NEGARAYU - 3329062007 KEC. TONJONG	120
186	NEGLA - 3329122015 KEC. LOSARI	448

No.	DESA	BLT (KPM)
187	PABUARAN - 3329012015 KEC. SALEM	100
188	PADAKATON - 3329162021 KEC. KETANGGUNGAN	333
189	PADASUGIH - 3329092013 KEC. BREBES	195
190	PAGEJUGAN - 3329092014 KEC. BREBES	406
191	PAGOJENGAN - 3329042005 KEC. PAGUYANGAN	125
192	PAGUYANGAN - 3329042006 KEC. PAGUYANGAN	143
193	PAKIJANGAN - 3329142014 KEC. BULAKAMBA	403
194	PAKUJATI - 3329042007 KEC. PAGUYANGAN	75
195	PAMEDARAN - 3329162016 KEC. KETANGGUNGAN	515
196	PAMENGGER - 3329072018 KEC. JATIBARANG	151
197	PAMIJEN - 3329032013 KEC. BUMIAYU	132
198	PAMULIHAN - 3329152006 KEC. LARANGAN	545
199	PANDANSARI - 3329042008 KEC. PAGUYANGAN	121
200	PANGEBATAN - 3329022012 KEC. BANTARKAWUNG	200
201	PAREREJA - 3329172019 KEC. BANJARHARJO	205
202	PASIRPANJANG - 3329012016 KEC. SALEM	50
203	PEBATAN - 3329082010 KEC. WANASARI	150
204	PEDESLOHOR - 3329072019 KEC. JATIBARANG	166
205	PEJAGAN - 3329132011 KEC. TANJUNG	250
206	PEKAUMAN - 3329122016 KEC. LOSARI	253
207	PEMARON - 3329092016 KEC. BREBES	198
208	PENANGGAPAN - 3329172020 KEC. BANJARHARJO	238
209	PENDE - 3329112011 KEC. KERSANA	150
210	PENDE - 3329172021 KEC. BANJARHARJO	190
211	PENGABEAN - 3329122017 KEC. LOSARI	405
212	PENGARADAN - 3329132012 KEC. TANJUNG	437
213	PENGARASAN - 3329022013 KEC. BANTARKAWUNG	350
214	PENGGARUTAN - 3329032014 KEC. BUMIAYU	196
215	PEPEDAN - 3329062008 KEC. TONJONG	130
216	PESANTUNAN - 3329082011 KEC. WANASARI	400
217	PETUNJUNGAN - 3329142015 KEC. BULAKAMBA	225
218	PLOMPONG - 3329052012 KEC. SIRAMPOG	258
219	PRAPAG KIDUL - 3329122018 KEC. LOSARI	531
220	PRAPAG LOR - 3329122019 KEC. LOSARI	353
221	PRUWATAN - 3329032015 KEC. BUMIAYU	100
222	PULOGADING - 3329142016 KEC. BULAKAMBA	275
223	PULOSARI - 3329092017 KEC. BREBES	250
224	PURBAYASA - 3329062009 KEC. TONJONG	120
225	PURWODADI - 3329062011 KEC. TONJONG	188
226	RAGATUNJUNG - 3329042009 KEC. PAGUYANGAN	139
227	RAJAWETAN - 3329062010 KEC. TONJONG	175
228	RANCAWULUH - 3329142017 KEC. BULAKAMBA	435
229	RANDEGAN - 3329122020 KEC. LOSARI	100
230	RANDUSANGA KULON - 3329092018 KEC. BREBES	293

No.	DESA	BLT (KPM)
231	RANDUSANGA WETAN - 3329092019 KEC. BREBES	115
232	RANDUSARI - 3329122021 KEC. LOSARI	203
233	RENGASBANDUNG - 3329072020 KEC. JATIBARANG	218
234	RENGASPENDAWA - 3329152007 KEC. LARANGAN	151
235	RUNGKANG - 3329122022 KEC. LOSARI	271
236	SALEM - 3329012017 KEC. SALEM	104
237	SARIREJA - 3329132013 KEC. TANJUNG	150
238	SAWOJAJAR - 3329082012 KEC. WANASARI	225
239	SENGON - 3329132014 KEC. TANJUNG	496
240	SIANDONG - 3329152011 KEC. LARANGAN	114
241	SIASEM - 3329082013 KEC. WANASARI	300
242	SIDAKATON - 3329132015 KEC. TANJUNG	192
243	SIDAMULYA - 3329082014 KEC. WANASARI	166
244	SIGAMBIR - 3329092020 KEC. BREBES	196
245	SIGENTONG - 3329082015 KEC. WANASARI	197
246	SINDANGHEULA - 3329172022 KEC. BANJARHARJO	190
247	SINDANGJAYA - 3329112012 KEC. KERSANA	100
248	SINDANGJAYA - 3329162017 KEC. KETANGGUNGAN	315
249	SINDANGWANGI - 3329022014 KEC. BANTARKAWUNG	185
250	SISALAM - 3329082016 KEC. WANASARI	97
251	SITANGGAL - 3329152008 KEC. LARANGAN	250
252	SIWULUH - 3329142018 KEC. BULAKAMBA	220
253	SIWUNGKUK - 3329082017 KEC. WANASARI	100
254	SLATRI - 3329152009 KEC. LARANGAN	415
255	SONGGOM - 3329102005 KEC. SONGGOM	224
256	SONGGOM LOR - 3329102010 KEC. SONGGOM	222
257	SRIDADI - 3329052011 KEC. SIRAMPOG	216
258	SUKAREJA - 3329172023 KEC. BANJARHARJO	155
259	SUTAMAJA - 3329112013 KEC. KERSANA	100
260	TAMBAKSERANG - 3329022015 KEC. BANTARKAWUNG	150
261	TANGGERAN - 3329062012 KEC. TONJONG	191
262	TANGGUNGSAI - 3329162018 KEC. KETANGGUNGAN	435
263	TANJUNG - 3329132016 KEC. TANJUNG	200
264	TANJUNGSARI - 3329082018 KEC. WANASARI	168
265	TARABAN - 3329042010 KEC. PAGUYANGAN	228
266	TEGALGANDU - 3329082019 KEC. WANASARI	200
267	TEGALGLAGAH - 3329142019 KEC. BULAKAMBA	230
268	TEGALREJA - 3329172024 KEC. BANJARHARJO	250
269	TEGALWULUNG - 3329072021 KEC. JATIBARANG	220
270	TEGONGAN - 3329132017 KEC. TANJUNG	295
271	TELAGA - 3329022017 KEC. BANTARKAWUNG	112
272	TEMBELANG - 3329072022 KEC. JATIBARANG	233
273	TEMBONGRAJA - 3329012018 KEC. SALEM	80
274	TENGGULI - 3329132018 KEC. TANJUNG	313

No.	DESA	BLT (KPM)
275	TENGKI - 3329092021 KEC. BREBES	225
276	TERLANGU - 3329092022 KEC. BREBES	202
277	TERLAYA - 3329022016 KEC. BANTARKAWUNG	250
278	TIWULANDU - 3329172025 KEC. BANJARHARJO	201
279	TONJONG - 3329062013 KEC. TONJONG	182
280	WANACALA - 3329102006 KEC. SONGGOM	203
281	WANAREJA - 3329052013 KEC. SIRAMPOG	300
282	WANASARI - 3329082020 KEC. WANASARI	232
283	WANATAWANG - 3329102007 KEC. SONGGOM	334
284	WANATIRTA - 3329042011 KEC. PAGUYANGAN	200
285	WANGANDALEM - 3329092023 KEC. BREBES	200
286	WANOJA - 3329012019 KEC. SALEM	98
287	WARU - 3329022018 KEC. BANTARKAWUNG	185
288	WATUJAYA - 3329062014 KEC. TONJONG	150
289	WINDUAJI - 3329042012 KEC. PAGUYANGAN	365
290	WINDUASRI - 3329012020 KEC. SALEM	58
291	WINDUSAKTI - 3329012021 KEC. SALEM	45
292	WLAHAR - 3329152010 KEC. LARANGAN	250
		63033

G. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021 yaitu dengan melaksanakan operasi penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 di tempat-tempat umum seperti Pasar, Pusat Pembelanjaan dan pelayanan di perkantoran (Pembuatan KTP, KK, BPJS, Kartu Pencari Kerja DLL). Upaya tersebut dilaksanakan berkoordinasi dengan TNI dan Polri.

NO	NAMA KEGIATAN	NOMINAL	SUDAH SPJ	KETERANGAN
1	Ppkm Covid-19	199.600.000	199.600.000	Operasi Gabungan Pol PP, TNI dan Polri
2	PPKM Covid-19 Lv.2 PAM Natura 2021	122.500.000	122.500.000	Polri (Des 2021)
TOTAL		322.100.000	322.100.000	-

H. DINAS KOPERASI UM DAN PERDAGANGAN

Anggaran khusus dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021 tidak ada, Namun ada anggaean paa kegiatan kinerja tahunan sebesarRp. 332.995.620 di antaranya untuk pemebrdayaan UMKM dalam pemulihan alam pemulihan ekonomi nasional

Upaya yang telah dilaksanakan untuk penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021 antara lain :

1. Memberikan Solusi dan Edukasi atas kebijakan PPKM kepada pedagang pasar dan pelaku UMKM pada umumnya.
2. Melakukan kegiatan untuk mendukung kebijakan PPKM (penyemprotan diinfektan dilingkungan pasar, vaksinasi terhadap pedagan pasar)
3. Memfasiitasi kerjasama dengan Toko Retail modern (Indomaret, Alfamart, dll) terkait pemasaran produk UMKM
4. Memfasilitasi tempat pemasaran Sentral Produk UMKM "Lapakemane"
5. Memfasilitasi kerjasama Pemasaran secara Online dengan PT. Bukalapak, melalui Platform Bukalapak dan Buka Pengadaan
6. Pelatihan Pemasaran Online dengan Marketplace antara lain Tokopedia, PT. Emporia Digital (Klaster UMKM), dll

Dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021 Dinas Koperasi UM dan Perdagangan telah berkoordinasi antar instansi pada kegiatan, antara lain :

1. Mengadakan vaksinasi terhadap para pedagang pasar yang ada di Kab. Brebes
2. Mengadakan vaksinasi kepada anggota/masyarakat koperasi bekerja dengan Kospin Jasa
3. Mengadakan vaksinasi kepada pelaku umkm bekerjasama dengan bank Jateng
4. Mengadakan vaksinasi kepada masyarakat bekerjasama dengan OJK Tegal dalam rangka percepatan pencapaian vaksinasi
5. Mengadakan vaksinasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PT PLN Unit Brebes dalam rang percepatan pencapaian vaksinasi
6. Mengadakan vaksinasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PT. BPR BKK Banjarharjo dalam rang percepatan pencapaian vaksinasi

7. Monitoring percepatan vaksinasi di wilayah kerja Puskesmas Bandungsari dan Bantarkawung

Data bantuan social yang telah diberikan pada masyarakat sebagai upaya untuk penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Brebes di Tahun 2021, antara lain :

- a. Bantuan Subsidi modal bagi PKL Alun alun Brebes Sebanyak 108 @ Rp. 350.000 Total Rp. 37.800.000 (Sumber dana dari Baznas Brebes)
- b. Bantuan Sosial Keuangan bagi UMKM terdampak PPKM (Lokasi Wisata, Pasar dan Fasilitas Sebanyak 2055 umkm @ Rp.400.000 Umum) Total Rp. 822.000.000 (Sumber dana Pemprov Jateng)
- c. Bantuan sosial BPUM bagi Usaha Mikro di Kabupaten Brebes Sebanyak 58.809 Usaha Mikro @Rp. 1.200.000 Total Rp. 70.570.800.000 (Sumber dana Kemenkop RI)
- d. Batuan sosial bagi kelompok umkm untuk 4 kelompok Total anggaran Rp.80.000.000 (Sumber APBD 2/ Pokir)

